

Laporan Tahunan 2010

indosat

DISCLAIMER

Laporan Tahunan ini adalah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 dan X.K.7. Bab 20-F dalam Laporan Tahunan ini diambil dari Laporan Tahunan dalam Format 20-F yang telah kami sampaikan kepada US-SEC.

Dalam Laporan Tahunan ini, kata "Indosat", "Perusahaan", "Perseroan" dan "kami" merujuk kepada PT Indosat Tbk dan anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Sedangkan kata "Indonesia" merujuk kepada Republik Indonesia. "Pemerintah" adalah Pemerintah Indonesia. "Amerika Serikat" atau "AS" adalah Amerika Serikat. "Rupiah" atau "Rp" adalah mata uang resmi Indonesia dan "Dolar AS" atau "US$" adalah mata uang resmi Amerika Serikat. Beberapa angka tertentu (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk mempermudah, sehingga angka, perhitungan, persentase dan rasio yang diberikan dengan yang sesungguhnya dapat berbeda. Kecuali jika disebutkan, semua informasi keuangan yang berhubungan dengan kami, disajikan dalam Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan ini mencantumkan beberapa informasi keuangan dan hasil-hasil usaha tertentu, serta mungkin juga mencantumkan beberapa proyeksi, rencana, strategi dan tujuan tertentu dari Indosat, yang bukan merupakan pernyataan fakta historis, yang akan dianggap sebagai pernyataan pandangan ke depan (*forward-looking statement*) dalam batasan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan-pernyataan yang bersifat pandangan ke depan bergantung kepada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan kejadian-kejadian nyata dan hasil-hasil masa depan Indosat yang secara material berbeda dengan yang diharapkan atau ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan yang demikian. Tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil yang diantisipasi, atau ditunjukkan oleh setiap pernyataan yang bersifat pandangan ke depan, akan dicapai.

Tidak ada informasi apapun yang terdapat di dalamnya yang boleh direproduksi tanpa izin tertulis dari Perusahaan. Untuk informasi termutakhir, silakan menghubungi Group Investor Relations, Jl. Medan Merdeka Barat No.21, Jakarta 10110, Indonesia. Tel. (62-21) 3000 3001, 3869 615, Fax. (62-21) 3000 3757 atau E-mail: investor@indosat.com.

Kami berkomitmen untuk berkomunikasi secara terbuka dengan setiap Stakeholder. Stakeholder kami dapat melihat situs kami di www.indosat.com untuk informasi lebih lanjut mengenai Indosat. Versi online dari dokumen ini juga tersedia di www.indosat.com.



Transformasi Indosat terus berlanjut di tahun 2010, dimana kami menyusun fondasi pijakan untuk mengembangkan seluruh potensi kami. Melalui fokus pada PELANGGAN, memasuki segmen PASAR PERTUMBUHAN baru, menanamkan pemahaman terhadap arah dan tujuan baru pada KARYAWAN KAMI, meningkatkan pengembalian ASET-ASET KAMI, serta melalui penguasaan kemajuan TEKNOLOGI mutakhir, Indosat telah tumbuh semakin kokoh sebagai operator kedua terbesar di pasar seluler Indonesia, dalam langkah awal perjalanan Transformasi Indosat untuk senantiasa mencapai yang lebih baik.

DAFTAR ISI



PENGANTAR

01

16 Sekilas Indosat
17 Visi, Misi, dan Nilai
18 Ikhtisar Keuangan
20 Ikhtisar Operasional
22 Ikhtisar Saham dan Obligasi
24 Penghargaan dan Prestasi 2010
26 Peristiwa Penting 2010
28 Produk dan Merek Kami
30 Laporan Dewan Komisaris
34 Profil Dewan Komisaris
38 Laporan Direksi
42 Profil Direksi



TINJAUAN BISNIS & JASA

44

46 Jasa Seluler
50 Jasa Multimedia, Komunikasi Data & Internet (MIDI)
54 Jasa Telekomunikasi Tetap



TINJAUAN OPERASIONAL

56

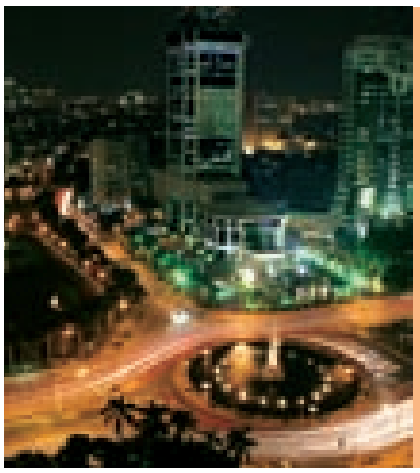
58 Sumber Daya Manusia
62 Jaringan dan Teknologi Informasi



TATA KELOLA PERUSAHAAN

66

68 Tata Kelola Perusahaan
89 Laporan Komite Audit
91 Laporan Komite Anggaran
92 Laporan Komite Manajemen Risiko
93 Laporan Komite Remunerasi



FAKTOR-FAKTOR RISIKO

94

96 Risiko-Risiko yang Berkaitan dengan Indonesia

101 Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis Perusahaan

107 Risiko yang Terkait dengan Bisnis Jasa Seluler

110 Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis Jasa Data Tetap ("MIDI")

111 Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis Jasa Telekomunikasi Tetap



ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

112

114 Analisa & Pembahasan Manajemen

LAPORAN KEUANGAN

153

155 Laporan Keuangan

297 Laporan Tahunan dalam Format 20-F

449 International Financial Reporting Standard (IFRS)

DATA PERUSAHAAN

575

576 Informasi Bagi Pemegang Saham

578 Struktur Organisasi

580 Profil Anggota Komite Audit

581 Anak Perusahaan

REFERENSI PERATURAN BAPEPAM-LK NO. X.K.6

582

senyum indosat

Di tahun 2010 Indosat memperkenalkan program retensi bagi pelanggan seluler yang dikenal dengan program "Senyum Setia Indosat".

FOKUS PADA PELANGGAN

Fokus pada kebutuhan pelanggan adalah kunci dari strategi pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang Indosat. Dalam transformasi menjadi organisasi yang fokus pada pelanggan, Indosat di tahun 2010 telah menuntaskan tahap akhir pengembangan model bisnis baru menjadi empat *Strategic Business Unit (SBU)*, yang masing-masing berkonsentrasi memenuhi kebutuhan segmen pasar yang berbeda.

SBU Consumer Wireless
Melayani segmen ritel yang membutuhkan layanan seluler melalui produk prabayar maupun pasca bayar.

SBU Consumer Broadband
Melayani segmen pasar ritel yang membutuhkan layanan seluler data pita lebar (*broadband*) mutakhir.

SBU Corporate Solutions
Melayani segmen pasar korporat yang membutuhkan layanan solusi terpadu kebutuhan informasi dan komunikasi seperti sirkit sewa internasional kecepatan tinggi, sirkit sewa domestik kecepatan tinggi, IP-VPN, Frame Relay dan Internet.

SBU Wholesale & Infrastructure
Melayani segmen pasar *wholesale* yang membutuhkan layanan sambungan langsung internasional (SLI), *roaming*, *hubbing*, sewa transponder satelit, sewa menara, dan sewa kapasitas kabel laut.


+6.1%
Pertumbuhan Total Trafik SLI
+20.3%
Pertumbuhan Jumlah Transponder Satelit
+172,5%
Pertumbuhan jumlah (bandwidth) Sirkit Sewa Internasional Kecepatan Tinggi
+34,3%
Pertumbuhan Pelanggan Seluler
android

IDENTIFIKASI PELUANG DI PASAR PERTUMBUHAN BARU

Peluncuran strategi nilai-berimbang dan fokus pada pelanggan melalui inovasi layanan, telah membuat kami berhasil mempertahankan pangsa pasar layanan seluler dan meningkatkan pendapatan konsolidasi. Ke depan, kami terus berupaya memahami kebutuhan pelanggan dan mengenali segmen pasar dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, melalui penyediaan berbagai solusi komunikasi dan informasi saat ini dan masa depan.

Inovasi *Consumer Wireless*

- Operator seluler pertama di Indonesia yang menawarkan layanan berbasis Android bekerja sama dengan beberapa distributor *handset* Android terkemuka di Indonesia.
- Memperluas layanan BlackBerry melalui peningkatan kapasitas koneksi ke server Research in Motion menjadi 100 Mbps *dual-link*, yang terbesar di Indonesia saat ini.
- Menyediakan i-klan sebagai layanan *Self Service Mobile Advertising Portal* terpadu untuk kebutuhan perusahaan periklanan, pemasang iklan, dan pelanggan.
- Mendirikan Indosat Innovation Lab di Gedung Indosat di Jakarta, sebagai wadah pengembang aplikasi lokal, terutama inovator muda, untuk mengembangkan aplikasi sistem seluler yang ada di pasar, dengan peluang penggunaan komersial oleh Indosat.

Inovasi *Consumer Broadband*

- Broadband-on-Request, menyediakan pilihan paket kuota harian, mingguan dan bulanan maupun paket *unlimited* bagi pelanggan pasca bayar Matrix.

Inovasi *Corporate Solutions*

- *Data Center/Disaster Recovery Center* dan solusi *managed services*.
- BlackBerry Enterprise Solution (BES) On Demand Hosted yang dapat diakses langsung melalui SMS dari kartu Matrix, Mentari, IM3 atau StarOne pelanggan tanpa memerlukan server atau perangkat lunak khusus.


+12,1%
Pendapatan Seluler
+5,2%
Total Pendapatan Konsolidasi
+2,0%
Marjin EBITDA

MENGGALANG POTENSI TERBAIK KARYAWAN

Seluruh karyawan Indosat tengah bertransformasi menjadi insan profesional berkualitas tinggi dan berintegritas tinggi yang mampu mengelola perubahan demi mencapai keberhasilan dalam bisnis. Insan Indosat kini memiliki pemahaman baru tentang arah dan tujuan Perusahaan melalui visi baru Perusahaan. Bahu membahu, mereka tahu arah yang ingin dituju dan upaya mewujudkannya.

Indosat *Transformation Awareness*

Merupakan program internal yang dirancang untuk memperkuat motivasi dan kesiapan karyawan menghadapi berbagai aspek transformasi perusahaan yang tengah berlangsung. Kami mengadakan rangkaian workshop Indosat Change Leader untuk membekali manajemen senior dan staf tingkat manajerial agar mampu menjalankan kepemimpinan yang efektif dan mendorong proses transformasi di unit kerja masing-masing.

Budaya *Operational Excellence*

Program Management Office (PMO) disiapkan sebagai landasan untuk memacu inisiatif Operational Excellence yang berkelanjutan guna terbentuknya budaya kinerja tinggi dan sadar biaya. Program Operational Excellence Award dicetuskan tahun 2010 guna memacu karyawan menyumbangkan ide-ide perbaikan proses dan prosedur operasional.

Indosat *Financial Awareness*

Program Indosat Financial Awarness (IFA) dilaksanakan untuk membangun budaya berbasis kinerja sehingga karyawan lebih memahami kinerja keuangan perusahaan, serta merasakan keterkaitan langsung antara tugas mereka sehari-hari dengan seluruh kinerja perusahaan.

Produktivitas Karyawan

Program Transformasi Indosat telah mulai memperlihatkan hasil, antara lain peningkatan nyata produktivitas karyawan tahun 2010 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang diukur dari total pendapatan per jumlah karyawan.

Kode Etik

Buku Panduan Kode Etik telah diterbitkan, dan setiap karyawan termasuk Direksi telah menandatangani buku miliknya sebagai janji untuk mematuhi Kode Etik Indosat.



+9,7%
Pertumbuhan EBITDA didukung Budaya *Operational Excellence*

+11,96%
Peningkatan Produktivitas Karyawan

1 Hari
Pelatihan Indosat Financial Awareness bagi Seluruh Karyawan



MENGOPTIMALKAN HASIL DARI ASET-ASET KAMI

Sebagai penyedia jaringan dan layanan telekomunikasi terpadu di Indonesia, Indosat memiliki sejumlah besar aset menara telekomunikasi, jaringan *backbone* serat optik serta sistem satelit. Optimalisasi pengembalian atas semua aset tersebut adalah strategi yang tepat untuk meningkatkan profitabilitas.

Pendapatan Menara Bersama Rp 252 miliar

Indosat pada tahun 2010 telah membentuk unit khusus untuk menjalankan bisnis menara telekomunikasi, yang pada akhir tahun 2010 telah membukukan kontrak *tower sharing* dengan operator pihak ketiga serta anak perusahaan, mencakup 3.019 menara dan menghasilkan pendapatan sebesar Rp252 miliar.

Inisiatif ini dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru Pemerintah terkait pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama oleh penyedia layanan telekomunikasi. Indosat saat ini terus menyusun kebijakan dalam perluasan jaringan menara telekomunikasi.


Rp 252
Miliar
Pendapatan
Menara Bersama
3.019
Jumlah Menara
Bersama

PELOPOR PENERAPAN TEKNOLOGI PALING MUTAKHIR

Sejak pertengahan tahun 1970-an, Indosat mengoperasikan pertama kali sistem komunikasi satelit internasional, sehingga teknologi muktahir telah menjadi bagian dari keberadaan Indosat. Dengan senantiasa menguasai kemajuan pesat teknologi, Indosat bertekad memastikan keunggulan dalam persaingan di masa mendatang.

42 Mbps Downlink
5,8 Mbps Uplink

Pada tahun 2010, Indosat menjadi operator pertama di Asia, dan kedua di dunia, yang meluncurkan layanan akses komersial *mobile broadband* dengan menggunakan teknologi *Dual-Carrier High Speed Packet Access* (HSPA)+.

Baterai Zinc-Air

Indosat telah menyelesaikan persiapan akhir untuk penggunaan baterai *air-breathing zinc* isi ulang berkapasitas tinggi di sejumlah Base Transceiver Station (BTS)-nya, yang memiliki keunggulan-keunggulan lebih hemat energi dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan baterai *lead-acid* konvensional.

Modernisasi Jaringan

Indosat secara bertahap mulai mengganti jaringan perangkat lama radio telekomunikasi dengan perangkat mutakhir Software Defined Radio (SDR)/Single RAN (Radio Access Network) yang lebih hemat daya listrik, biaya transmisi dan biaya pemeliharaan dibanding dengan solusi BTS konvensional.

Indosat Innovation Lab

Indosat Innovation Lab bertujuan mendorong kreativitas dan inovasi teknologi nirkabel di kalangan pengembang aplikasi muda. Menjadi wadah eksperimen dan diskusi serta mengembangkan aplikasi sistem operasi nirkabel yang ada di pasar saat ini, Indosat Innovation Lab terletak di Kantor Pusat Indosat di Jakarta, dan fasilitas serupa akan dibangun di Bandung dan Yogyakarta.


42 Mbps
DC HSPA+
Modernisasi Jaringan di Jabodetabek, Sumatera dan Kalimantan
Peresmian Indosat Innovation Lab
Pelopor Penggunaan Baterai *Zinc-Air*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



Mewujudkan Komitmen Kami

Indosat bersungguh-sungguh memegang komitmennya dalam menjaga keberlangsungan bisnis secara bertanggung jawab. Kami berkomitmen memegang teguh standar tertinggi dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjunjung 10 Prinsip UN Global Compact. Dan kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Indosat terus aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di Indonesia. Di bawah payung program 'Satukan Cinta Negeri', Indosat melakukan beragam inisiatif di bidang pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan dan kepedulian sosial. Berbagai inisiatif saat ini seperti Mobil Klinik Sehat Keliling, Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC) atau Proyek Bio-Fuel BTS, seluruhnya Diinteregasikan ke dalam bisnis dan aktivitas operasional kami dan dirancang untuk memberikan



manfaat terukur dan nilai tambah jangka panjang di bidang yang bersangkutan. Pada tahun 2010, Indosat mengeluarkan biaya sebesar Rp13 miliar untuk program-program CSR tersebut.

Program-program yang melibatkan masyarakat dan lingkungan hidup ini, hanya merupakan sebagian dari pendekatan tanggung jawab sosial Indosat dalam rangka menjaga keberlanjutan. Sejalan dengan tujuan CSR "untuk tumbuh dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dan untuk mengayomi masyarakat", Indosat berencana untuk memastikan setiap aktivitas perusahaan dapat memberikan pengaruh positif kepada seluruh *shareholders*, termasuk para pemegang saham, pelanggan, karyawan, mitra usaha, masyarakat dan lingkungan. Kegiatan kami yang lebih terperinci akan disajikan secara terpisah di dalam buku Laporan Keberlanjutan 2010 kami, 'Mewujudkan Komitmen Kami'.

SEKILAS INDOSAT

1967 Indosat didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing di Indonesia yang pertama kali menyediakan layanan telekomunikasi internasional melalui satelit internasional.

1980 Berkembang menjadi perusahaan telekomunikasi internasional pertama yang dibeli dan dimiliki 100% oleh pemerintah Indonesia.

1994 Menjadi perusahaan publik, terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek New York. Pemerintah RI memiliki 65% dan publik 35%.

2001 Mengambil alih saham mayoritas di Satelindo, operator seluler & IDD di Indonesia. Mendirikan PT Indosat MultiMedia Mobile (IM3), sebagai operator seluler pelopor jaringan GPRS dan Layanan multimedia di Indonesia.

2002 Pemerintah RI menjual 8,10% sahamnya kepada publik dan selanjutnya menjual 41,94% kepada Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd (STT). Pemerintah memiliki 15,00%, STT memiliki 41,94% dan publik memiliki 43,06%.

2003 Bergabung dengan ketiga anak perusahaan Satelindo dan IM3, serta Bimagraha untuk menjadi operator seluler terkemuka di Indonesia.

2006 Memperoleh lisensi jaringan 3G dan memperkenalkan layanan 3.5G di Jakarta dan Surabaya.

2008 Saham Indosat secara tidak langsung dimiliki oleh Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C. (Qtel) sebanyak 40,81% melalui Indonesia Communications Limited (ICLM) dan Indonesia Communication Pte. Ltd (ICLS). Pemerintah Indonesia dan publik menguasai sisa saham sebesar masing-masing 14,29% dan 44,90%.

2009 Qtel kemudian membeli saham seri B sebanyak 24,19% dari publik, sehingga menjadi pemegang saham mayoritas Indosat dengan kepemilikan sebesar 65%. Dengan begitu, Indosat dimiliki oleh Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C. (Qtel) atas nama Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd (65%), Pemerintah Indonesia (14.29%) dan publik (20.71%).

Indosat memperoleh lisensi tambahan frekuensi 3G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sementara anak perusahaan IM2, memenangkan tender untuk lisensi WiMAX yang diadakan pemerintah.



2010

Pada tahun 2010, Indosat telah menyelesaikan persiapan dari proses transformasi mendasar menjadi perusahaan berkinerja tinggi yang berfokus pada pelanggan, melalui restrukturisasi organisasi, modernisasi dan pengembangan jaringan seluler, serta, upaya peningkatan keunggulan operasional.

Visi

Menjadi pilihan utama pelanggan untuk seluruh kebutuhan informasi dan komunikasi

Misi

- Menyediakan dan mengembangkan produk, layanan dan solusi inovatif yang berkualitas untuk memberikan nilai lebih bagi para pelanggan.
- Meningkatkan *shareholders value* secara terus menerus.
- Mewujudkan kualitas kehidupan yang *lebih baik bagi stakeholder*.

Nilai

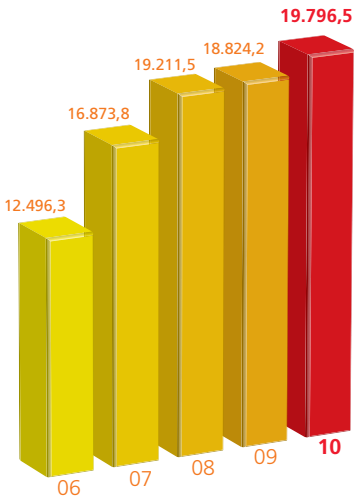
- INTEGRITAS
- KERJA SAMA
- KEUNGGULAN
- KEMITRAAN
- FOKUS PADA PELANGGAN

IKHTISAR KEUANGAN

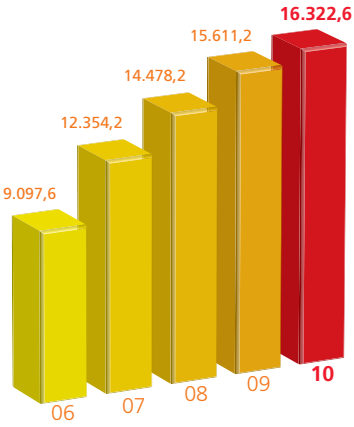
(dalam miliar Rupiah)

	2010	2009	2008	2007	2006
LAPORAN LABA RUGI					
Pendapatan Usaha	**19.796,5**	18.824,2	19.211,5	16.873,8	12.496,3
Beban Usaha	**16.322,6**	15.611,2	14.478,2	12.354,2	9.097,6
Laba Usaha	**3.473,9**	3.213,0	4.733,3	4.519,6	3.398,7
Penghasilan (Beban) Lain - Bersih	**(2.392,1)**	(981,0)	(2.408,2)	(1.590,0)	(1.375,8)
Bagian Laba (Rugi) Bersih Perusahaan Asosiasi	**0,0**	0,0	0,0	0,0	(0,2)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	**1.081,8**	2.232,0	2.325,1	2.929,6	2.022,7
Beban Pajak Penghasilan Bersih	**(357,8)**	(677,3)	(419,8)	(859,5)	(576,1)
Laba Sebelum Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan	**724,0**	1.554,7	1.905,3	2.070,1	1.446,6
Hak Minoritas atas Laba Bersih Anak Perusahaan	**(76,8)**	(56,5)	(26,8)	(28,1)	(36,5)
Laba Bersih	**647,2**	1.498,2	1.878,5	2.042,0	1.410,1
Jumlah Saham Beredar (dalam jutaan lembar saham)	**5.433,9**	5.433,9	5.433,9	5.433,9	5.404,7
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah jumlah penuh)	**119,1**	275,7	345,7	375,8	260,9
EBITDA	**9.625,9**	8.774,4	9.289,2	8.682,8	7.027,2
NERACA					
Jumlah Aset	**52.818,2**	55.041,5	51.693,3	45.305,1	34.228,7
Aset Tetap - Bersih	**43.571,0**	44.428,8	38.394,1	30.572,8	24.918,6
Modal Kerja	**(5.788,0)**	(5.931,6)	(983,5)	(832,5)	(1.137,8)
Jumlah Kewajiban	**34.581,7**	36.753,2	33.994,8	28.463,0	18.826,3
Hak Minoritas	**385,8**	330,6	288,9	297,4	200,6
Jumlah Ekuitas	**17.850,7**	17.957,7	17.409,6	16.544,7	15.201,8
RASIO USAHA (%)					
Laba Usaha terhadap Pendapatan Usaha	**17,55**	17,07	24,64	26,78	27,20
Laba Usaha terhadap Ekuitas	**19,46**	17,89	27,19	27,32	22,36
Laba Usaha terhadap Jumlah Aset	**6,58**	5,84	9,16	9,98	9,93
Marjin EBITDA	**48,62**	46,61	48,35	51,46	56,43
Marjin Laba bersih	**3,27**	7,96	9,78	12,10	11,28
Pengembalian Modal	**3,63**	8,34	10,79	12,34	9,28
Pengembalian Aset	**1,23**	2,72	3,63	4,51	4,12
RASIO KEUANGAN (%)					
Rasio Lancar	**51,55**	54,62	90,79	92,86	83,28
Rasio Hutang terhadap Ekuitas	**133,79**	141,14	124,69	99,84	74,74
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aset	**65,47**	66,77	65,76	62,83	55,00
DIVIDEN PER SAHAM (Rp)					
Final	**137,86**	172,85	187,90	129,75	149,32
Tanggal Pembayaran	**02/08/2010**	22/7/2009	15/7/2008	13/7/2007	8/8/2006

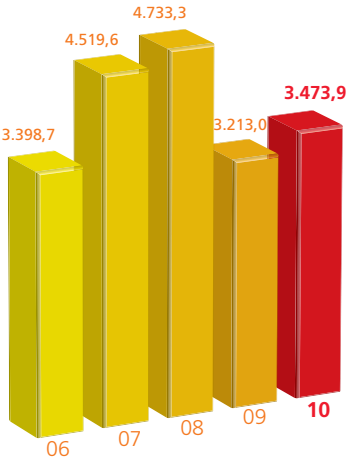
Pendapatan Usaha
(Rp miliar)



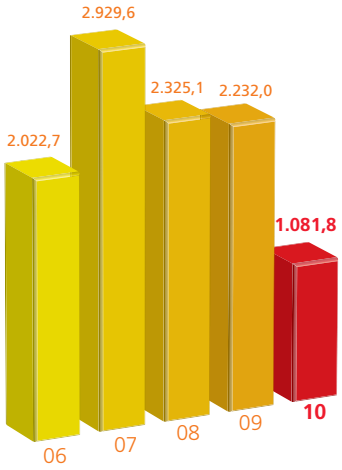
Beban Usaha
(Rp miliar)



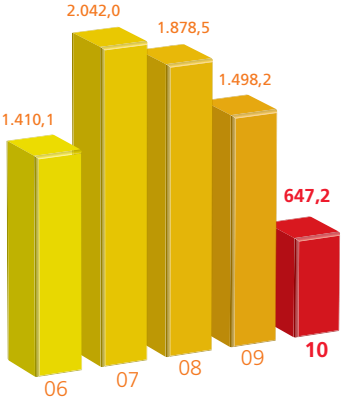
Laba Usaha
(Rp miliar)



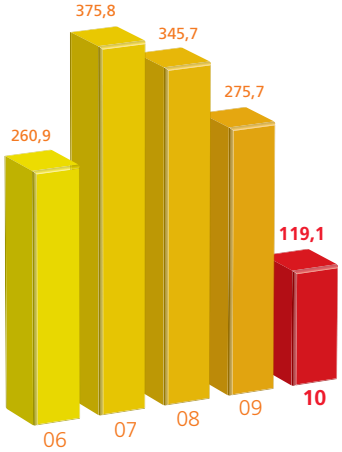
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
(Rp miliar)



Laba Bersih
(Rp miliar)



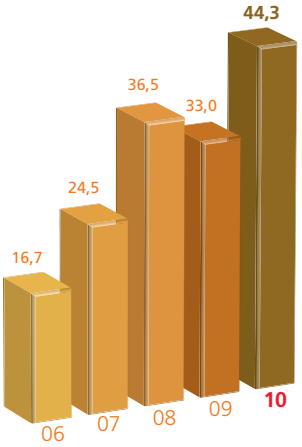
Laba per Saham Dasar
(Rp)



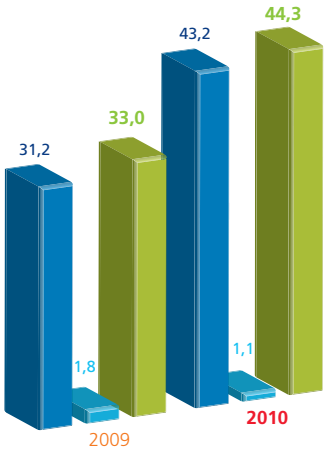
IKHTISAR OPERASIONAL

	Satuan	2010	2009	% Perubahan
SELULER				
Pelanggan Prabayar	pelanggan	43.170.139	31.163.859	38,5%
Pelanggan Pasca bayar	pelanggan	1.102.178	1.803.342	-38,9%
Total Pelanggan	pelanggan	44.272.317	32.967.201	34,3%
ARPU Prabayar	Rp	31.493	33.448	-5,8%
ARPU Pasca bayar	Rp	234.037	175.327	33,5%
ARPU Gabungan	Rp	34.712	37.664	-7,8%
Telepon Tetap Nirkabel				
Pelanggan Prabayar	pelanggan	489.007	525.391	-6,9%
Pelanggan Pasca bayar	pelanggan	61.123	68.742	-11,1%
Total Pelanggan	pelanggan	550.130	594.133	-7,4%
ARPU Prabayar	Rp	14.719	23.207	-36,6%
ARPU Pasca bayar	Rp	45.613	69.160	-34,0%
ARPU Gabungan	Rp	17.730	28.402	-37,6%
SLI				
Trafik Outgoing	menit	463.037.201	502.031.713	-7,8%
Trafik Incoming	menit	1.723.855.406	1.558.463.354	10,6%
Total Trafik	menit	2.186.892.608	2.060.495.067	6,1%
Rasio Incoming/Outgoing	–	3,7	3,0	24,1%
MIDI				
Wholesale				
Sirkit Sewa Internasional Kecepatan Tinggi	Mbps	13.614	5.054	169,4%
Sirkit Sewa Domestik Kecepatan Tinggi	Mbps	15.678	11.712	33,9%
Transponder	Mhz	707	738	-4,2%
Frame Relay	Mbps	10	22	-54,5%
Internet	Mbps	3.383	5.754	-41,2%
IPVPN	Mbps	1.396	1.030	35,5%
Lintasarta				
Sirkit Sewa Kecepatan Tinggi	64Kbps	60.517	64.087	-5,6%
Frame Relay	64Kbps	18.012	25.173	-28,4%
VSAT	64Kbps	15.634	6.602	136,8%
IPVPN	64Kbps	47.523	31.558	50,6%
IM2				
Internet Dial Up	pelanggan	8.068	9.291	-13,2%
Internet Dedicated	sambungan	758	884	-14,3%
IPVPN	sambungan	396	447	-11,4%
Karyawan (Tetap dan Tidak tetap termasuk karyawan anak perusahaan)	orang	6.694	7.126	-6,1%
Galeri Indosat	service centre	169	171	-1,2%
Griya Indosat	service centre	60	61	-1,6%
Kios Layanan & Penjualan Indosat (KILAT)	service centre	13	–	N/A
e-Galeri	service centre	3	–	N/A

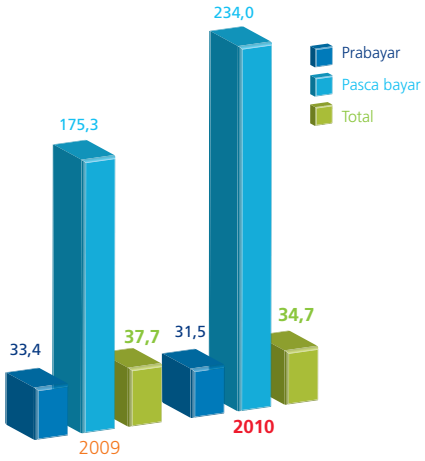
Total Pelanggan Seluler
(juta)



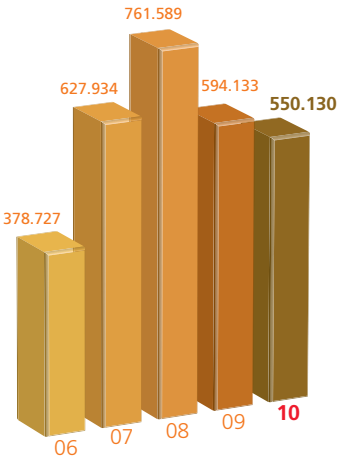
Komposisi Pelanggan Seluler
(juta)



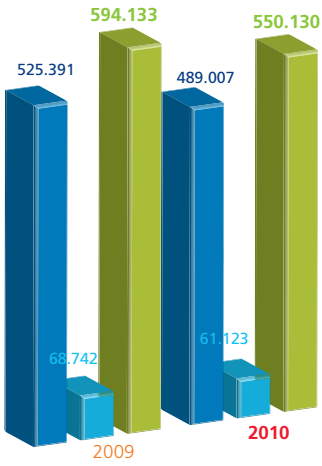
ARPU-Gabungan Seluler
(Rp ribu)



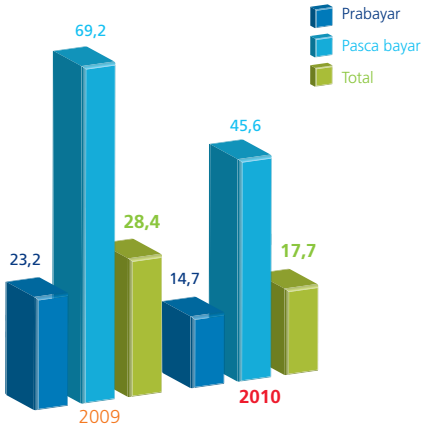
Total Pelanggan Telepon Tetap Nirkabel



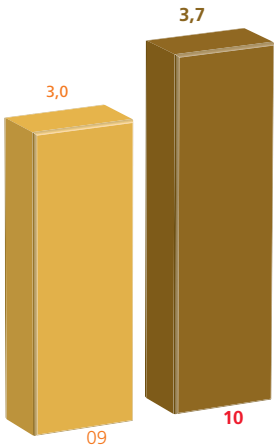
Komposisi Telepon Tetap Nirkabel



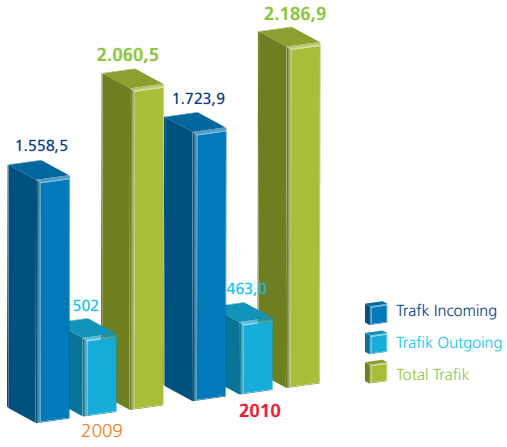
ARPU-Gabungan Telepon Tetap Nirkabel
(Rp ribu)



Rasio SLI Incoming/Outgoing
(juta)



Trafik SLI
(juta Menit)



IKHTISAR SAHAM DAN OBLIGASI

IKHTISAR SAHAM

Kinerja Saham

	New York Stock Exchange (US$/ADR)		Bursa Efek Indonesia (Rp/Saham)	
	2010	2009	2010	2009
Tertinggi	35,58	30,37	6.300	5.950
Terendah	24,22	16,74	4.400	4.200
Di Akhir Tahun	29,12	25,11	5.400	4.725
Laba Bersih per ADR/Saham	0,66	1,47	119,10	275,72
Dividen per Saham	–	0,73	–	137,86
Rasio Dividen yang Dibayarkan (%)	–	50	–	50
(%) *Dividend Yield*				
Dividen per ADR/Saham / Harga ADR/Saham di Akhir Tahun	–	1,51	–	2,92
Ratio P/E				
Harga ADR/Saham Akhir Tahun / Laba Bersih per ADR/Saham	44,12x	17,08x	45,34x	17,13x

Harga Saham per Triwulan di NYSE (US$/ADR)

Periode	2010		2009		Volume 2010 (ADS)	
	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
Triwulan Pertama	33,96	25,38	26,25	16,74	95.984	1.200
Triwulan Kedua	34,19	25,97	26,65	20,99	117.276	400
Triwulan Ketiga	30,46	24,22	28,35	24,29	214.629	400
Triwulan Keempat	35,58	28,01	30,37	24,28	80.200	407

Harga Saham per Triwulan di IDX (Rp/ADR)

Period	2010		2009		Volume 2010 (LOT)	
	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
Triwulan Pertama	6.200	4.700	5.900	4.200	52.529	283
Triwulan Kedua	6.150	4.775	5.950	4.850	13.851	598
Triwulan Ketiga	5.500	4.400	5.700	5.050	44.367	643
Triwulan Keempat	6.300	5.100	5.700	4.600	19.341	886

Profil Obligasi

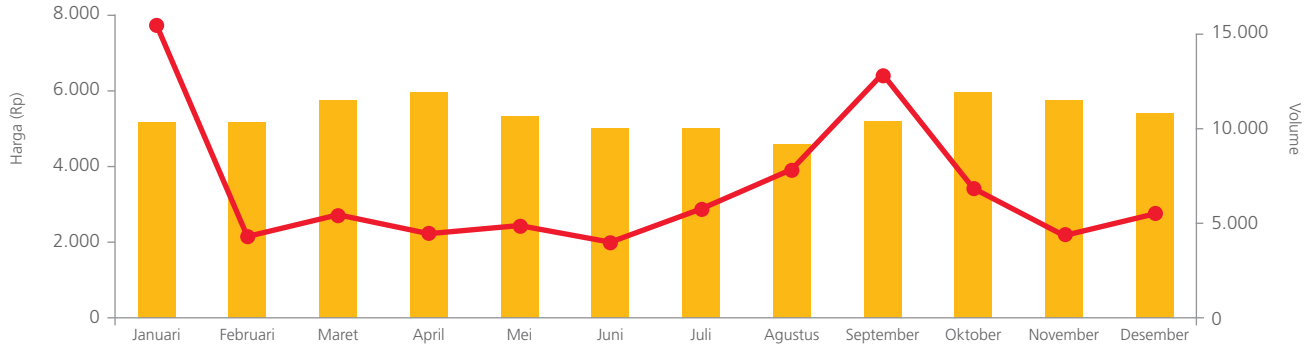
Keterangan	Tanggal	Bursa Efek	Nilai	Suku Bunga	Jatuh Tempo
Obligasi Indosat II	06-Nov-02	Bursa Efek Surabaya*	Seri B : Rp200,0 miliar	16,00% per tahun	06-Nov-32
Obligasi Indosat III	22-Okt-03	Bursa Efek Surabaya*	Seri B : Rp640,0 miliar	12,88% per tahun	Dilunasi 22-Okt-10
Obligasi Indosat IV	21-Jun-05	Bursa Efek Surabaya*	Rp815,0 miliar	12,00% per tahun	21-Jun-11
Obligasi Indosat V	29-Mei-07	Bursa Efek Surabaya*	Seri A : Rp1.230,0 miliar	10,20% per tahun	29-Mei-14
			Seri B : Rp1.370,0 miliar	10,65% per tahun	29-Mei-17
Obligasi Indosat VI	09-Apr-08	Bursa Efek Indonesia	Seri A : Rp760,0 miliar	10,25% per tahun	09-Apr-13
			Seri B : Rp320,0 miliar	10,80% per tahun	09-Apr-15
Obligasi Indosat VII	08-Des-09	Bursa Efek Indonesia	Seri A : Rp700,0 miliar	11,25% per tahun	08-Des-14
			Seri B : Rp600,0 miliar	11,75% per tahun	08-Des-16
Obligasi Indosat Syariah Ijarah	21-Jun-05	Bursa Efek Surabaya*	Rp285,0 miliar	Rp34,2 miliar per tahun	21-Jun-11
Sukuk Ijarah Indosat II	29-Mei-07	Bursa Efek Surabaya*	Rp400,0 miliar	Rp40,8 miliar per tahun	29-Mei-14
Sukuk Ijarah Indosat III	09-Apr-08	Bursa Efek Indonesia	Rp570,0 miliar	Rp58,4 miliar per tahun	09-Apr-13
Sukuk Ijarah Indosat IV	08-Des-09	Bursa Efek Indonesia	Seri A : Rp28,0 miliar	Imbalan Ijarah Rp3,2 miliar per tahun	08-Des-14
			Seri B : Rp172,0 miliar	Imbalan Ijarah Rp20,2 miliar per tahun	08-Des-16
Guaranteed Notes jatuh tempo 2010	05-Nov-03	Luxembourg Stock Exchange and Singapore Exchange Securities Trading Limited	US$234,7 juta	7,75% per tahun	Dilunasi 10-Agt-10
Guaranteed Notes jatuh tempo 2012	22-Jun-05	Singapore Exchange Securities Trading Limited	US$109,4 juta	7,13% per tahun	Dilunasi 2-Sep-10
Guaranteed Notes jatuh tempo 2020	29-Jul-10	Singapore Exchange Securities Trading Limited	US$650,0 juta	7,38% per tahun	29-Jul-20

**pada 30 November 2007 Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia.*

KINERJA SAHAM

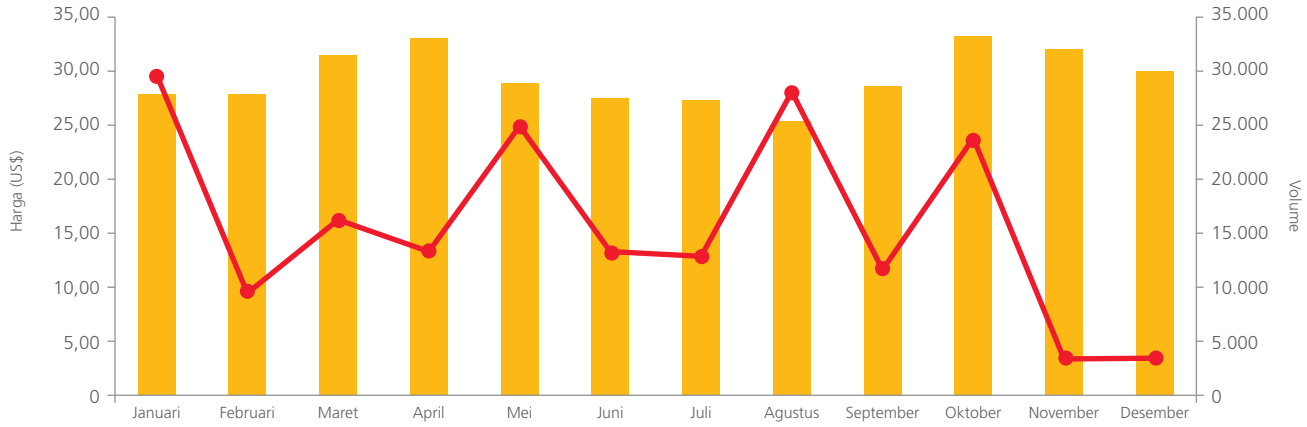
BURSA EFEK INDONESIA (ISAT)

Periode: 1 Januari – 31 Desember 2010



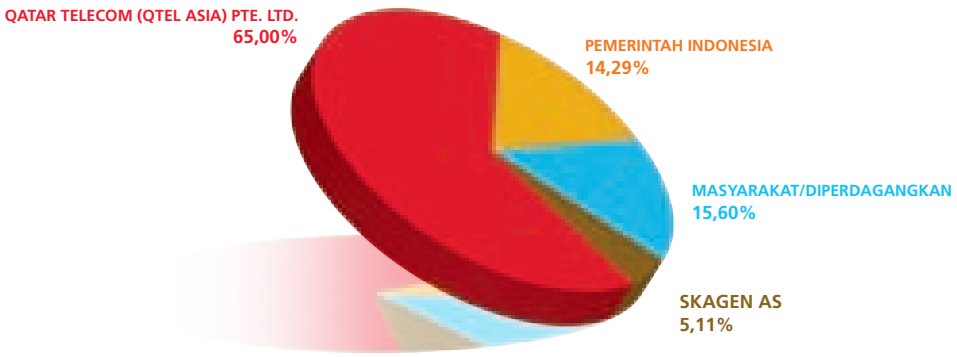
NEW YORK STOCK EXCHANGE (IIT)

Periode: 1 Januari – 31 Desember 2010



Komposisi Pemegang Saham

(per 31 Desember 2010)



PENGHARGAAN DAN PRESTASI 2010

Sejumlah penghargaan yang kami terima di tahun 2010 menjadi bukti keunggulan Indosat dalam kualitas layanan, organisasi, dan praktik-praktik bisnis terbaik.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Indonesian Marketing Dream Team Champion
- Recognition of Championship in Marketing Strategy for IM3 Marketing Team

Indonesia Most Recommended Consumer Community 2010
- i-Cyclist (Indosat Cyclist)

LAYANAN PELANGGAN

Call Center Award for Service Excellence for Telecommunication Industry
- Excellence

The Best Contact Center Indonesia 2010
- Excellence Achievement
- The Best Team Work Contact Center
- The Best HR Retention Above 100 Seat
- The Best Video Contact Center
- The Best Technology Innovation
- The Best Business Contribution
- The Best Back Office Operation
- The Best Agent Inbound
- The Best Supervisor Above 100 seat
- The Best Agent Outbound
- The Best Agent Quality Assurance
- The Best Team Leader
- The Best Back Office Support



Indosat Wireless Innovation Contest
Best CSR Program Operator of The Year : IWIC



ICCA
The Best Team Work Contact Center

KINERJA PERUSAHAAN

The Asia's 200 Most Admired Companies
- Indonesia's Top 10 Most Admired Companies

Pefindo Award
- Silver Award – Best Bond Type Issuer – Syariah Bonds

IICD GCG Award 2009
- Best Non-Financial Publicly-Listed Company

Finance Asia Award
- Best High Yield Bond 2010 Award

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Indonesia Cellular Award 2010
- Corporate Social Responsibilities (CSR)

MetroTV MDGs Award 2010
- Goal 5: Improving Maternal Health

KEUNGGULAN PRODUK

TOP Brand Award 2010
- SimCard GSM Postpaid (Matrix)
- SimCard GSM Prepaid (IM3)
- Internet Service Provider (mobile)

The Net Promoter Customer Loyalty Award 2010
- The Net Promoter Leader 2010 in GSM for IM3

2nd Indonesia Word of Mouth Marketing Award 2010
- The Most Recommended BlackBerry Internet Service

Digital Marketing Awards
- The Best Digital Product – kategori Simcard (IM3)
- The Best Website – kategori Telekomunikasi

Indonesia Most Popular Brand in Social Media 2010
- Simcard GSM: IM3

Indonesia Cellular Award 2010
- Best Bundling Phone with Sony XPeria X10



Cellular Award 2010
Best Customer Care
Indosat



Indonesia Cellular Award 2010
The Best Bundling Phone



Metro TV MDGs Award 2010

PERISTIWA PENTING 2010

Januari

"Meraih Mimpi Bersama IM3"

Jakarta, 18 Januari 2010 – Sambut awal tahun dengan semangat dan inovasi baru, Indosat meluncurkan program "Meraih Mimpi Bersama IM3" bagi pelanggan IM3 dan Mentari untuk menikmati akses *broadband* cepat dan murah dengan tarif hanya Rp0,3 per kilobyte. Hal yang sama juga dapat dinikmati oleh pelanggan Mentari. Layanan ini juga dapat dinikmati pelanggan eksisting IM3 dan Mentari dengan kecepatan akses data hingga 2 Mbps melalui *handset* pelanggan secara praktis tanpa mengganti kartu dengan harga yang terjangkau. Selain itu pelanggan baru akan menikmati bonus tambahan 100 SMS gratis setiap hari ke semua operator, dengan persyaratan tertentu.

Februari

Indosat Hadir dengan BlackBerry StarOne

Jakarta, 20 Februari 2010 – Indosat menghadirkan layanan StarOne BlackBerry, yang memungkinkan pelanggan StarOne menikmati beragam layanan BlackBerry.

Indosat Luncurkan Layanan Berbasis Android Pertama di Indonesia

Jakarta, 22 Februari 2010 - Indosat meluncurkan layanan berbasis Android bekerja sama dengan 6 distributor perangkat Android terkemuka, dilengkapi dengan Android Application Store dimana pelanggan bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi berbasis Android.

Maret

Mentari Dekatkan Kehangatan dan Kebersamaan Keluarga

Jakarta, 11 Maret 2010 - Indosat meluncurkan paket 'Mentari 50' yang memberi beragam kemudahan untuk seluruh anggota keluarga pelanggan Mentari di seluruh Indonesia.

Indosat Hadirkan Layanan Mentari - Taiwan

Jakarta, 22 Maret 2010, Indosat bekerja sama dengan Far EasTone Telecommunication (FET) meluncurkan Kartu Pra Bayar Mentari Taiwan.

April

Indosat Hadirkan Layanan BlackBerry On Demand (Enterprise) Hosted

Jakarta, 1 April 2010, - Indosat kembali menghadirkan inovasi layanan dengan meluncurkan BlackBerry On Demand (Enterprise) Hosted, yang memungkinkan pelanggan korporasi mengaktifkan dan mengakses BlackBerry On Demand (Enterprise) Hosted secara langsung melalui SMS.



Kartu Indosat, Satu Kartu dengan Berbagai Kemudahan - Indosat meluncurkan Kartu Indosat dengan tema "Semuanya Bisa Semaunya", merupakan layanan pertama di Indonesia yang memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk memilih nomor dan paket yang diinginkan hanya dalam satu kartu.



Apresiasi untuk Negeri di 43 Tahun, Indosat Hadirkan Innovation Lab - Indosat Innovation Lab merupakan wadah dan pusat pertemuan para pengembang aplikasi dan inovator muda untuk bereksperimen dan berdiskusi secara intensif dalam mengembangkan aplikasi berbasiskan sistem *handset* yang ada di pasar. Indosat Innovation Lab pertama hadir di Kantor Pusat Indosat Jakarta dan direncanakan akan dibangun pula di 2 kota lainnya yaitu Bandung dan Yogyakarta.

Mei

Indosat Luncurkan e-Galeri

Jakarta, 5 Mei 2010 – Indosat untuk pertama kalinya meluncurkan e-Galeri yang merupakan salah satu inovasi untuk memberikan layanan cepat berupa *vending machine & billing payment* yang ditempatkan di lokasi strategis guna memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian voucher isi ulang, kartu perdana, pembayaran tagihan pasca bayar, serta informasi marketing terkini dan info lokasi Galeri Indosat atau Griya Indosat, tanpa perlu datang ke Galeri atau menghubungi Contact Center.

Juli

Indosat Luncurkan i-klan Store, Fitur Portal Mobile Advertising Swalayan Pertama di Dunia

Jakarta, 14 Juli 2010 – Indosat bekerja sama dengan anak perusahaannya IM2, meluncurkan i-klan Store, yaitu portal *mobile & internet advertising* swalayan (*self service*) pertama di dunia yang dapat digunakan oleh siapapun, baik *agency*, pemasang iklan maupun pelanggan untuk melakukan segala transaksi beriklan secara online melalui akses via ponsel ke www.indosat.com/i-klan atau http://www.iklanstore.net.

Oktober

Indosat Peduli Korban Merapi

Yogyakarta, 28 Oktober 2010 – Melalui Program Indosat Peduli, Indosat membantu masyarakat korban letusan gunung Merapi dengan menurunkan bantuan kesehatan melalui Mobil Klinik Sehat Keliling, bantuan sosial serta layanan telekomunikasi berupa telepon gratis bagi para korban, yang juga bisa dimanfaatkan para relawan berkomunikasi dalam upaya membantu proses evakuasi.

November

Indosat Sukses Dukung Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi pada Kunjungan Kenegaraan Presiden Barack Obama

Jakarta, 11 November 2010 – Berakhirnya kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang berlangsung dengan sukses, menjadi kesuksesan pula bagi Indosat yang dipercaya oleh Kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia, guna menyediakan fasilitas telekomunikasi selama kunjungan Presiden Barack Obama di Indonesia yang berlangsung dari tanggal 9-10 November 2010.



INDOSAT AWARDS Untuk Insan Musik Indonesia - Indosat mempersembahkan program INDOSAT AWARD, sebuah penghargaan sebagai wujud kepedulian Indosat untuk menghargai sekaligus mempromosikan kekayaan budaya seni musik Indonesia serta mendukung perkembangan industri musik anak negeri sehingga dapat menjadi aset bangsa yang dibanggakan.



Apresiasi untuk Negeri di 43 Tahun, Indosat Hadirkan Grand Final IWIC ke-5 – Indosat menyelenggarakan *grand final* Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC) ke-5. IWIC bertujuan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi dalam bidang teknologi nirkabel *(wireless)*.

PRODUK DAN MEREK KAMI

JASA SELULER

	Keterangan	Manfaat bagi Pelanggan
IM3	Layanan seluler prabayar yang terjangkau ditujukan bagi segmen kaum muda.	Waktu bicara lebih lama dan jumlah SMS yang lebih banyak.
mentari	Layanan seluler prabayar untuk pengguna regular.	Perhitungan tarif yang sederhana dan hemat.
Matrix	Layanan seluler premium GSM pasca bayar.	Layanan premium untuk mobilitas dan kualitas yang tinggi, dengan jangkauan internasional paling luas.
Matrix auto	Varian produk Matrix yang menawarkan layanan seluler pasca bayar yang dapat diisi ulang.	Fleksibilitas mengontrol pemakaian. Menggabungkan manfaat dari layanan pasca bayar dan prabayar.
BlackBerry	Layanan seluler pasca bayar/prabayar dan *push-mail* global.	Paket *bundling* yang menarik untuk layanan e-mail dan telepon bergerak.
indosat broadband 3.5G	Akses *internet mobile*/layanan data dengan teknologi 3,5G broadband berkecepatan tinggi (GPRS/EDGE/ UMTS/HSDPA/HSPA+).	Kecepatan akses yang tinggi hingga 42 Mbps.
imenu #123# · i-Guard ·	Layanan nilai tambah untuk pengguna layanan seluler.	Memberikan pilihan fitur, konten dan *game* untuk hiburan.

JASA TELEKOMUNIKASI TETAP

	Keterangan	Manfaat bagi Pelanggan
	Layanan Voice Over Internet Protocol (VoIP) domestik dan internasional.	Tarif internasional yang terjangkau, kartu telepon VoIP untuk jarak jauh, biaya telepon yang terkontrol.
 	Sambungan Langsung Internasional.	Telepon SLI yang jernih dan berkualitas, menjangkau mitra bicara di seluruh dunia.
	Fixed Wireless Access (FWA) dengan mobilitas terbatas di wilayah/kode area tertentu.	Layanan komunikasi suara, SMS dan akses internet yang hemat.

JASA MIDI (MULTIMEDIA, KOMUNIKASI DATA DAN INTERNET)

	Keterangan	Manfaat bagi Pelanggan
IPLC (International Private Leased Circuit) **DPLC** (Domestic Private Leased Circuit)	**Layanan Komunikasi Data:** Produk dan layanan yang kami tawarkan dalam segmen bisnis ini meliputi layanan *digital leased line broadband and narrowband* berbasis *point-to-point* domestik dan internasional yang berkecepatan tinggi, layanan *packet-switching* berkinerja tinggi dan penyewaan transponder satelit dan layanan penyiaran.	Koneksi sirkit *private point-to-point*.
Frame Relay & ATM (Asynchronous Transfer Mode)		Fleksibilitas untuk trafik yang beragam.
INP (Internet Network Provider)		Akses internet global.
IDIA (Indosat Dedicated Internet Access) **INIX** (Indosat National Internet Exchange)		Mampu membuat jaringan pribadi melalui paket data nasional.
MPLS (Multi-Protocol Label Switching) **Satellite Services**		Solusi layanan *broadcast* untuk nasional dan internasional.
DRC (Disaster Recovery Center)		Layanan keamanan data.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Strategi nilai-berimbang kami yang berfokus pada pelanggan melalui inovasi teknologi dan produk akan menjadikan Indosat penyedia utama layanan telekomunikasi terlengkap di Indonesia dalam jangka panjang.



Pertumbuhan, Inovasi dan Daya Tahan

Merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi saya untuk memberi tinjauan atas kinerja Indosat. Selama tahun 2010, Indosat telah menunjukkan potensi sangat besar yang mampu diraihnya, melalui penerapan strategi yang mengombinasikan fokus pada nilai lebih bagi pelanggan serta inovasi teknologi.

Program transformasi Indosat kami mulai di tahun 2009 melalui fokus pada penciptaan nilai lebih. Kami telah mencapai kemajuan nyata dan meyakinkan dalam penerapan strategi ini. Pangsa pasar dan pendapatan bisnis seluler kami telah bertumbuh pesat, dan kami telah meletakkan fondasi teknologi sebagai pijakan pengembangan dan pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Semua ini tercapai di tengah kondisi pasar yang melemah dan kompetisi yang semakin ketat memperebutkan pangsa pasar, sehingga kami merasa sangat bangga atas kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai.

Selama tahun 2010, penghapusan pelanggan non-aktif dari sistem, serta fokus kami dalam mengembangkan kualitas layanan untuk pelanggan potensial, telah berhasil meningkatkan pangsa pasar layanan seluler 4 triwulan berturut-turut. Ini adalah prestasi yang mengesankan mengingat terjadi persaingan tarif yang ketat menjelang akhir tahun 2010.

Titik balik ini tidak hanya termanifestasi dalam pergeseran dan pertumbuhan basis pelanggan kami. Berbagi pengetahuan, keahlian dan sumber daya di lingkup Qtel Group, kami juga berfokus dalam penyediaan pilihan produk dan layanan yang beragam untuk pelanggan. Fokus pengembangan kami adalah solusi *enterprise* untuk layanan *platform* Android, Blackberry dan Apple, beberapa di antara layanan teknologi inovatif ini adalah yang pertama di dunia, yang menggarisbawahi posisi kepemimpinan produk dan layanan Indosat di Indonesia.

Guna memenuhi kebutuhan pelanggan kami yang bernilai tinggi, serta menjamin bahwa pelanggan dan calon pelanggan senantiasa memperoleh layanan terbaik, kami juga memprioritaskan keandalan kualitas jaringan. Jaringan DC HSPA+ kami kini mampu memberikan kecepatan hingga 42 Mbps, keunggulan yang menjadi pembeda utama di pasar, serta kami banggakan karena merupakan jaringan pertama di Asia dengan kecepatan tersebut.

Mewujudkan Nilai Lebih menjadi Kinerja

Strategi nilai lebih dalam pengembangan pangsa pasar dan kepuasan pelanggan telah terwujud dalam pencapaian keuangan yang kuat; walaupun terus menjalankan program investasi modal guna pengembangan bisnis, kami mencatat pertumbuhan kuat EBITDA sebesar 9,7% menjadi Rp9.626 miliar di tahun 2010. Kenaikan ini bukan karena penurunan marjin EBITDA, yang berhasil ditingkatkan menjadi 48,6%, namun karena didukung program penghematan biaya yang berjalan paralel dengan penataan strategis bisnis kami.

Pendapatan perusahaan juga meningkat cukup besar dengan pertumbuhan 5,2% menjadi Rp19.795 miliar di tahun 2010. Kenaikan ini terutama adalah hasil dari pertumbuhan bisnis seluler dan strategi nilai-berimbang sehingga pendapatan seluler tumbuh 12,1% menjadi Rp16.027 miliar.

Titik balik bisnis kami diakui oleh pasar modal internasional yang menyerap penerbitan obligasi baru kami US$ 650 juta dengan bunga 7,375% pada bulan Juli 2010. Keberhasilan ini memungkinkan kami melunasi beberapa fasilitas pinjaman sehingga mengurangi 5,5% total pinjaman Indosat di akhir tahun; kami akan terus berupaya menurunkan biaya keuangan ini di tahun 2011.

Kinerja keuangan kami ini mencerminkan kekuatan dan pengalaman tim manajemen senior kami yang dalam waktu relatif singkat, mampu menerapkan strategi mengembangkan potensi dan merebut posisi kepemimpinan di pasar, serta secara bersamaan terus memberi nilai kepada pemegang saham. Manajemen terbukti menunjukkan kemampuan menetapkan fokus dan mengarahkan kegiatan Perusahaan, sehingga kami menaruh kepercayaan penuh pada rencana pertumbuhan lima tahun yang telah disusun guna mentransformasi bisnis Indosat lebih lanjut.

Tahun lalu, kami mengumumkan rencana penataan strategis untuk memfokuskan bisnis kami ke empat lini bisnis. Dengan gembira, saya melaporkan bahwa penerapan rencana tersebut kini telah memasuki tahap akhir. Hal ini akan merampingkan fokus kegiatan dan menjamin optimalisasi hasil dan kinerja bisnis kami. Hal ini didukung upaya kami mengembangkan dan memotivasi karyawan. Kami sepenuhnya mengakui nilai integral karyawan, dan telah merancang serangkaian program pengembangan keterampilan serta pemberdayaan potensi untuk mendukung kemajuan bisnis Indosat.

Komitmen pada Tanggung Jawab Kami

Selain komitmen pada karyawan, kami memiliki fokus mendalam dan terus menerus terhadap tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian mendasar dari tujuan strategis keberlanjutan.

Pada tahun 2010, kami terus melanjutkan pengembangan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan di seluruh organisasi. Kode Etik kami disusun selaras dengan praktik terbaik GCG di Indonesia dan kami juga telah memiliki perjanjian kerja bersama yang baru antara serikat karyawan Indosat dan manajemen.

Kami juga senantiasa menyadari peran Indosat di masyarakat. Masyarakat Indonesia tertimpa musibah bencana alam di tahun 2010 sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Indosat berupaya keras membantu mereka yang tertimpa musibah melalui bantuan bencana di lokasi letusan gunung Merapi, serta melalui program Mobil Klinik Sehat Keliling. Pada tahun 2011, kami akan terus berkomitmen untuk mengembangkan program-program peningkatan standar kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dukungan Tanpa Henti adalah Kunci Keberhasilan

Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Anda semua, pemegang saham Indosat, atas dukungan kuat Anda terhadap agenda transformasi kami di tahun-tahun sebelumnya. Dukungan ini telah memperkuat upaya kami dan mempercepat perubahan yang telah kami capai.

Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada segenap karyawan Indosat, yang semangat, dedikasi dan keahliannya merupakan unsur penting tercapainya strategi titik balik pertumbuhan kami. Saya dan seluruh kolega juga berterima kasih terhadap para mitra, pemangku kepentingan dan organisasi-organisasi yang telah bekerja sama erat selama tahun 2010 dalam mendukung penerapan program perubahan kami.

Melangkah Ke Depan

Seluruh kolega manajemen dan saya merasa sangat bangga atas keberhasilan nyata yang dicapai Indosat di tahun yang lalu. Indosat akan tetap menjadi Perusahaan dengan potensi luar biasa untuk berkembang di pasar yang juga tumbuh pesat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Melalui dukungan tanpa henti dari Anda, saya yakin bahwa strategi nilai berimbang kami yang berfokus pada pelanggan melalui inovasi teknologi dan produk akan menjadikan Indosat menjadi penyedia utama layanan telekomunikasi terlengkap di Indonesia dalam jangka panjang.



Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani
Komisaris Utama

PROFIL DEWAN KOMISARIS

1. **Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani** telah menjabat sebagai Komisaris Utama sejak bulan Agustus 2008. Saat ini, Sheikh Abdulla adalah Chairman of the Board of Directors Qtel. Dalam kapasitasnya sebagai Chairman, beliau telah mengembangkan sistem *corporate governance* Qtel untuk menjamin Qtel dikelola sesuai dengan praktik yang berlaku secara internasional, dengan demikian memperkuat baik akuntabilitas korporasi dan juga terciptanya kesejahteraan pemegang saham secara berkelanjutan. Sheikh Abdulla telah juga melakukan restrukturisasi dan pengembangan usaha Qtel di regional. Setelah akuisisi Qtel atas Wataniya, sebagai perusahaan yang berbasis di Kuwait, yang saat itu dianggap merupakan transaksi telekomunikasi terbesar di wilayah Arab, Sheikh Abdulla ditunjuk sebagai Chairman Wataniya. Sheikh Abdulla dahulu memegang beberapa posisi terkemuka di Qatar termasuk Chief dari Royal Court (Amiri Diwan) sejak tahun 2002 hingga 2005. Beliau juga merupakan anggota dari Qatari Planning Council sejak tahun 2001 hingga 2004. Sebagai seorang instruktur pilot bersertifikasi dari British Royal Air Force, Sheikh Abdulla memiliki latar belakang yang beragam baik dalam bidang militer maupun penerbangan. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Senior Army War College, Carlisle Barracks di Amerika Serikat.



1. **Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani**
   Komisaris Utama
2. **George Thia Peng Heok**
   Komisaris Independen
3. **Alexander Rusli**
   Komisaris Independen
4. **Parikesit Suprapto**
   Komisaris
5. **Soeprapto S.I.P**
   Komisaris Independen

2. George Thia Peng Heok

menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perusahaan sejak bulan Juni 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur/Konsultan di Asiainc Private Limited. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi, termasuk sebagai Konsultan/Direktur Strategic Advisor Private Limited sejak tahun 2003 hingga tahun 2006, Ketua Eksekutif MediaStream Limited sejak tahun 1999 hingga tahun 2003, Direktur/Konsultan Phoenix Capital Private Limited sejak tahun 1995 hingga tahun 1998, Ketua Eksekutif Asia Matrix Limited sejak tahun 1993 hingga tahun 1995, Managing Director Lum Chang Securities Private Limited sejak tahun 1991 hingga tahun 1993, Managing Director Sun Hung Kai Securities Private Limited sejak tahun 1989 hingga tahun 1991, Managing Director Merrill Lynch International Bank Limited sejak tahun 1987 hingga tahun 1989, Direktur Eksekutif/Partner Kay Hian Private Limited sejak tahun 1985 hingga tahun 1987 dan Managing Director Morgan Grenfell (Asia) limited sejak tahun 1975 hingga tahun 1985. Beliau adalah seorang akuntan publik bersertifikat dan anggota dari Chartered Association of Certified Accountants (Inggris) dan Singapore Institute of Directors.



6. **Chris Kanter**
   Komisaris Independen

7. **Rionald Silaban**
   Komisaris

8. **Rachmat Gobel**
   Komisaris

9. **Dr. Nasser Mohammed Marafih**
   Komisaris

10. **Richard Farnsworth Seney**
    Komisaris

3. Alexander Rusli

telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2010 dan saat ini menjabat sebagai anggota dari Komite Remunerasi Perusahaan. Saat ini Beliau menjabat sebagai komisaris dari PT Krakatau Steel (Persero), badan usaha yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara yang memproduksi produk baja-karbon. Beliau pernah menjabat sebagai Konsultan Ahli untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara, dengan pengawasan kepada 140 Badan Usaha Milik Negara dan lebih dari 500 anak perusahaan. Sebelumnya, beliau menjabat pula sebagai Konsultan Ahli untuk Menteri Komunikasi dan Informatika, dimana beliau terlibat dalam perumusan kebijakan dan peraturan dan dalam mengawasi proyek-proyek nasional infrastruktur ICT negara. Posisi ini beliau duduki selama dua masa kabinet kementerian. Beliau juga bertindak sebagai Konsultan bagi Pricewaterhouse Coopers. Beliau meraih gelar Doctor of Philosophy, Sistem Informasi, Curtin University of Technology, Australia.

4. Parikesit Suprapto

menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Februari 2011. Saat ini beliau merupakan Deputi Kementrian BUMN Bidang Usaha Jasa namun sebelumnya memegang beberapa jabatan yaitu Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Industri Perbankan dan Pembiayaan dari tahun 2008 hingga tahun 2010, Penasehat Ahli bidang Usaha Kecil untuk Mentri BUMN dari tahun 2006 hingga tahun 2008, Asisten Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Industri Pembiayaan dan Konstruksi dari tahun 2002 hingga tahun 2005 dan Direktur Restrukturisasi dan Privatisasi Dirjen BUMN Kementrian Keuangan sejak tahun 2001 hingga tahun 2002. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri di Jakarta pada tahun 1980, gelar Master in Economic Development dari Indiana University di Amerika Serikat pada tahun 1990 dan Doctoral Degree in Economic Development dari University of Notre Dame di Amerika Serikat pada tahun 1995.

5. Soeprapto S.I.P

telah menjabat sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Audit sejak bulan Juni 2005. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan, seperti Asisten Pribadi dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan 2001 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Sawit Kaltim Lestari sejak 2010. Beliau memperoleh gelar sarjana ilmu politik dari Universitas Terbuka, Jakarta dan merupakan peserta Kelas Biasa (KRA 29) pada tahun 1996 di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

6. Chris Kanter

telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua dan Pendiri dari Sigma Sembada Group, sebuah kontraktor alat berat untuk perangkat transportasi dan logistik. Beliau telah menjabat sebagai Wakil Presiden untuk Investasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi, Transportasi dan Kepariwisataan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) sejak tahun 1994 sampai tahun 2010. Baru-baru ini beliau ditunjuk kembali untuk jangka waktu lima tahun berikutnya sampai dengan tahun 2015 sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas. Beliau juga baru-baru ini ditunjuk sebagai Wakil Ketua dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Ketua dari Dewan Pendiri Swiss German University. Beliau juga menjabat beberapa peran di pemerintahan Indonesia dan telah terlibat langsung dalam Paket Kebijakan untuk Mengembangkan Iklim Investasi di Indonesia dan juga bertindak sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan 2002 dan baru-baru ini ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia sebagai anggota dari Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang memberikan laporan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Teknik, Universitas Trisakti, Indonesia.

7. Rionald Silaban

menjabat sebagai Komisaris sejak Juni 2008 dan ditunjuk sebagai anggota dari Komite Manajemen Risiko pada tahun yang sama. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Departemen Keuangan. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi termasuk sebagai Direktur Manajemen Risiko Fiskal Departemen Keuangan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008, Penasehat Senior di World Bank di Washington D.C., Amerika Serikat sejak tahun 2004 hingga tahun 2006, Kepala Divisi Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan sejak tahun

2002 hingga tahun 2004, Kepala Divisi Pengawasan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional sejak tahun 2000 hingga tahun 2002, Kepala Divisi Jasa Keuangan di Biro Hukum Departemen Keuangan sejak tahun 1998 hingga tahun 2000, Wakil Direktur untuk Direktorat Privatisasi untuk Direktorat Umum Badan Usaha Milik Negara Departemen Keuangan sejak tahun 1997 hingga tahun 1998, Kepala Seksi Biro Hukum Departemen Keuangan sejak tahun 1994 hingga tahun 1997 dan Kepala Sekretariat Komite Privatisasi Departemen Keuangan sejak tahun 1994 hingga tahun 1997. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar LL.M. dari Georgetown University Law Center, Washington D.C., Amerika Serikat pada tahun 1993.

8. Rachmat Gobel

telah menjadi Komisaris sejak bulan Agustus 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai Pimpinan dari Grup Gobel yang bergerak di bidang pengolahan, perdagangan, layanan, manajemen logistik terintegrasi seperti makanan dan obat-obatan, termasuk industri katering. Grup Gobel adalah *partner joint venture* dari Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., suatu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang elektronik dan barang-barang elektronik yang dipasarkan dengan merek Panasonic. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua dari Dewan Pengawas dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Wakil Ketua dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ketua dari Federasi Gabungan Elektronik dan Telematika (F.GABEL) dan ditunjuk sebagai anggota dari Komite Inovasi Nasional oleh Presiden Indonesia. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Perdagangan Internasional dari Universitas Chuo, Tokyo, pada tahun 1987,dan dianugerahi gelar Honorary Doctorate dari Universitas Takushoku, Tokyo, Jepang, pada tahun 2002. Pada tahun 2009, Beliau telah menerima "Distinguished Engineering Award in Manufacturing Technology" gelar yang bergengsi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beliau juga aktif terlibat dalam beberapa kegiatan sosial, termasuk Komite Olimpiade Indonesia dan Palang Merah Indonesia.

9. Dr. Nasser Mohammed Marafih

telah menjabat sebagai Komisaris Indosat sejak bulan Agustus 2008 dan juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Anggaran. Beliau memulai karirnya di Qatar Telecom (Qtel) pada tahun 1992 sebagai penasihat ahli dari Universitas Qatar dan selanjutnya pada tahun 1994 ditunjuk sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan (Director of Strategic Planning and Development) dan akhirnya ditunjuk untuk posisinya yang sekarang sebagai Chief Executive Officer (CEO) pada tahun 2002. Dalam kapasitasnya ini, Dr. Marafih telah berpartisipasi dalam sejumlah komite pemerintah tingkat tinggi dan merupakan anggota Direksi dari sejumlah anak perusahaan Qtel. Beliau juga menduduki jabatan sebagai Direksi dari GSM Association. Dr Marafih sukses membawa Qtel melewati transformasi menjadi perusahaan global dan beliau memainkan peran penting dalam akuisisi besar oleh Qtel. Dr. Marafih merupakan seorang dosen dan asisten profesor di Electrical Engineering Department dari Universitas Qatar. Dr Marafih memiliki gelar Bachelor of Science di bidang teknik Elektro, Master of Science dan Ph.D. dalam bidang Communication Engineering, semuanya dari George Washington University, di Amerika Serikat. Beliau adalah anggota dari the Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. selama lebih dari sepuluh tahun.

10. Richard Farnsworth Seney

telah menjabat menjadi Komisaris sejak bulan Juni 2009. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional di Qtel International (QI) sejak tahun 2007 sampai masa pensiun beliau di bulan Maret 2011, Presiden dan Kepala Bagian Eksekutif di MCT Corp (termasuk para pendahulunya) dari tahun 1992 hingga tahun 2007, Wakil Presiden Deputi Eksekutif dan General Manager dari MCT Investors, L.P sejak tahun 1987 hingga tahun 2002, dan Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Bagian Keuangan dari Charisma Communications Corporation, Perusahaan yang bergerak di bidang Komunikasi sejak tahun 1985 hingga tahun 1992. Beliau memperoleh gelar Bachelor di bidang Commerce dari University of Virgina McIntire School of Commerce.

LAPORAN DIREKSI



Tahun 2010 adalah tahun titik balik bagi Indosat, tahun dimana kami menciptakan momentum mengembangkan pangsa pasar dan pendapatan dari bisnis seluler kami, melakukan modernisasi jaringan telekomunikasi, serta menyelesaikan kerangka dasar transformasi berkelanjutan di dalam bisnis, organisasi dan sumber daya manusia kami.

Memperkuat Keunggulan Kami

Memasuki tahun 2010, lanskap dan pasar telekomunikasi Indonesia tidak mengalami banyak perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang ditandai tingkat pertumbuhan rendah serta persaingan tajam, terutama di antara para pelaku utama industri, dalam mempertahankan dan memperluas pangsa pasar dan pendapatan melalui strategi tarif yang agresif. Di dalam situasi dan kondisi pasar seperti di atas, kami percaya Indosat telah mampu memperkuat posisi kedua terbesar di pasar seluler, yang merupakan lini bisnis utama kami serta memberi kontribusi sekitar 81% pendapatan kami tahun 2010. Seiring penerapan strategi nilai-berimbang yang dijalankan, kami memfokuskan lebih banyak sumber daya dalam membidik segmen pasar dan layanan yang berpotensi tinggi, serta mampu memperluas basis pelanggan seluler kami secara signifikan. Pada 31 Desember 2010, Indosat memiliki 44,3 juta pelanggan seluler, meningkat 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Kami percaya pelanggan memilih Indosat karena kualitas dan inovasi produknya, serta kehandalan jaringan dan keunggulan layanannya.

Keunggulan kami dalam produk dan layanan terbukti nyata di tahun 2010. Pada bulan Maret 2010, Indosat adalah perusahaan seluler pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan seluler Android bekerja sama dengan distributor perangkat telepon Android terkemuka, dan meluncurkan i-Store atau "toko virtual" penyedia ribuan aplikasi Android serta Wiigo atau layanan Android-on-Demand pertama di Indonesia. Selanjutnya, pada bulan April 2010 Indosat meluncurkan secara komersial akses internet tercepat Dual Carrier (DC) HSPA+ dengan kecepatan *downlink* hingga 42 Mbps dan *uplink* hingga 5,8 Mbps, memanfaatkan tambahan frekuensi 3G (*second carrier*) yang baru diperoleh Indosat pada tahun 2009. Pada akhir tahun 2010, layanan akses internet tercepat DC HSPA+ telah tersedia di kota Jakarta, Surabaya dan Medan.

Layanan inovatif lain adalah i-klan Store, layanan *self-service* pertama di dunia, portal layanan iklan melalui internet. Diluncurkan pada Juli 2010, melalui i-klan Store pemasang iklan dapat mengarahkan pesan iklan secara tepat ke perangkat seluler pelanggan. Indosat juga memperkuat keunggulan layanan BlackBerry melalui peluncuran Blackberry StarOne di CDMA 2000-1x platform, serta juga inovasi lain seperti layanan BlackBerry on Demand (Enterprise) atau BES yang memungkinkan klien perusahaan menikmati seluruh solusi BlackBerry Enterprise seperti Mobile Data Service, menggunakan kartu Matrix, Mentari, IM3 dan StarOne tanpa harus memiliki server atau perangkat lunak khusus.

Kami mencurahkan sejumlah besar sumber daya untuk modernisasi dan perluasan jaringan seluler di tahun 2010. Kami memulai dengan penerapan teknologi Single RAN SDR (Software Define Radio) di jaringan pemancar BTS kami, serta menyiapkan migrasi ke jaringan digital *Internet Protocol*. Seluruh investasi ini memungkinkan Indosat meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan, serta berdampak pada biaya operasi yang lebih efisien dalam jangka pendek dan menengah ke depan.

Hasil dan Kinerja Tahun 2010

Indosat meraih pendapatan operasi terkonsolidasi Rp19.796 miliar di tahun 2010, yang merupakan titik balik petumbuhan 5,2% dibandingkan tahun 2009. Walau pendapatan non-seluler kami tidak mencapai target, namun hal ini diimbangi oleh kinerja yang mantap dari bisnis seluler kami yang mencatat pertumbuhan pendapatan 12,1% dibanding tahun lalu menjadi Rp16.027 miliar pada tahun 2010, di tengah-tengah tekanan persaingan yang semakin ketat terutama di kuartal keempat tahun 2010.

EBITDA kami tumbuh pesat 9,7% menjadi Rp9.626 miliar pada tahun 2010, sementara marjin EBITDA meningkat 2 poin persen dibanding tahun 2009 menjadi 48,6%. Peningkatkan marjin EBITDA ini menunjukkan kemajuan dalam program efisiensi biaya, yang di tahun 2010 mencakup penyesuaian struktur insentif penjualan pulsa isi ulang untuk distributor dan pengecer, sehingga biaya pemasaran dan penjualan kami lebih efisien.

Di bidang Procurement, kami menerapkan strategi baru dengan pemasok sehingga memperoleh harga pembelian peralatan yang lebih kompetitif. Kami juga menetapkan prioritas lebih ketat untuk pembelanjaan modal (CAPEX), melalui pengkajian apakah proposal investasi yang diajukan akan menguntungkan secara komersial. Tanpa mengorbankan kualitas jaringan dan program pengembangan, kami mampu mengurangi secara signifikan rasio *CAPEX-to-sales* sehingga jumlah pembelanjaan di tahun 2010 berjumlah Rp5.515 miliar menurun dari Rp11.584 miliar pada tahun 2009. Walaupun sebagian besar penghematan ini baru akan terealisasi pada tahun 2011 ke depan, pada tahun 2010 arus kas dari hasil operasi Indosat telah berada dalam posisi positif, berbeda dengan posisi kami beberapa tahun terakhir.

Pada Juli 2010 Indosat sukses menggalang pendanaan di pasar internasional melalui penerbitan Obligasi US$650 juta dengan kupon 7,375% berjangka 10 tahun. Kami menggunakan dana ini untuk melunasi Obligasi USD yang jatuh tempo pada 2012, serta pelunasan awal dari 4 fasilitas pinjaman IDR yang jatuh tempo pada 2012, 2013 dan 2014. Dengan total pinjaman berkurang 5,5% pada akhir tahun 2010, kami berharap mampu mengurangi biaya pendanaan, sehingga neraca kami akan menjadi semakin baik.

Kami sungguh berbesar hati atas kemampuan mencapai hasil-hasil ini, seiring dengan langkah-langkah transformasi berdimensi luas yang tengah kami jalankan guna membangun organisasi bisnis yang semakin fokus kepada pelanggan.

Transformasi untuk Mengembangkan Potensi

Indosat melakukan transformasi berkelanjutan demi mewujudkan visi menjadi pilihan utama pelanggan untuk solusi informasi dan komunikasi. Kami menyusun Indosat

Transformation Roadmap 2010-2015 sebagai panduan strategi lima tahun ke depan untuk memenangkan persaingan. Kami berupaya lebih fokus kepada pelanggan, melakukan ekspansi ke pasar berpotensi pertumbuhan tinggi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mengoptimalkan pendapatan dari aset, serta menguasai teknologi mutakhir agar selalu berada di depan. Program-program strategis tersebut akan diwujudkan melalui Operational Excellence dengan penekanan pada efisiensi biaya dan efektivitas hasil serta kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan.

Pada akhir tahun 2010, struktur organisasi Indosat yang baru, yang merupakan unsur penting dari transformasi bisnis kami, mendekati tahap akhir dengan fungsi-fungsi terpentingnya. Implementasi model bisnis baru melalui pembentukan 4 Strategic Business Unit (SBU) yang masing-masing terfokus ke segmen pasar tertentu, telah memasuki tahap akhir. Kami juga melakukan reorganisasi sejumlah fungsi pendukung yang kini ditempatkan di bawah kendali Kantor Pusat, bukan berada di bawah kendali Kantor Regional seperti yang sebelumnya berjalan.

Kami meluncurkan program Operational Excellence Award guna memacu para karyawan menyumbangkan ide-ide perbaikan dalam proses dan prosedur operasional. Kami melaksanakan program Indosat Financial Awareness (IFA) yang khusus dirancang untuk membangun keterampilan dan kesadaran finansial yang memadai bagi karyawan di seluruh jenjang dan fungsi organisasi. Program sejenis yang kami jalankan adalah Indosat Transformation Awareness (ITA) yang bertujuan membangkitkan motivasi dan kesiapan karyawan dalam mengelola beragam aspek transformasi berkelanjutan. Indosat juga mengadakan berbagai workshop Indosat Change Leader untuk membekali manajemen senior dan staf di tingkat menengah perusahaan agar mampu menjalankan kepemimpinan yang efektif dan mendorong proses transformasi di unit kerja masing-masing.

Perusahaan yang Bertanggungjawab

Indosat senantiasa menjunjung komitmen untuk melayani masyarakat dan bertanggung jawab untuk menjalankan roda bisnis secara berkelanjutan. Kami telah menetapkan lima bidang dimana kami bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab, yaitu penata-kelolaan organisasi, hubungan kerja dengan karyawan, perlindungan konsumen, pelestarian lingkungan, dan kontribusi terhadap masyarakat.

Pada tahun 2010 perusahaan kami menunjukkan kemajuan dan perkembangan penting dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Kami membentuk sejumlah komite eksekutif untuk memperkuat kerangka menyeluruh tata kelola yang baik, mengubah anggaran dasar perusahaan sesuai ketentuan perundangan yang baru dan perubahan-perubahan di struktur organisasi kami, serta menyusun ulang panduan pelaksanaan Kode Etik yang berlaku untuk semua karyawan termasuk Direksi. Kami telah memperbarui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh manajemen bersama serikat karyawan Indosat pada 31 Desember 2010, serta meningkatkan kualitas layanan pelanggan, khususnya dalam penyelesaian keluhan pelanggan.

Sementara itu, dalam aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kami mencatat sejumlah kemajuan penting di tahun 2010. Di antaranya adalah program Mobil Klinik Sehat Keliling, program bantuan tanggap bencana banjir Karawang, banjir lumpur Wasior, tsunami Mentawai dan letusan Gunung Merapi. Kompetisi Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC) yang diadakan untuk kelima kalinya mampu membangkitkan inovasi dan kreativitas masyarakat khususnya generasi muda dalam teknologi wireless. Kami juga sukses merintis upaya-upaya mengurangi emisi karbon dari operasional menara BTS kami. Seluruh aktivitas ini, serta berbagai kegiatan lainnya, akan dijabarkan lebih rinci dalam laporan terpisah Indosat Sustainability Report 2010, yang telah diterbitkan untuk ketiga kalinya, mengikuti praktik terbaik CSR tingkat global.

Penghargaan untuk Kesempurnaan

Upaya keras kami dalam Operational Excellence telah memperoleh banyak pengakuan dan penghargaan untuk prestasi dan pencapaian yang diraih. Keunggulan Call Center dan Customer Service Indosat mendapat penghargaan di ajang 'Call Center Award for Service Excellence 2010' yang diadakan Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre-CCSL) dan majalah Marketing, kami memperoleh 'Award in Best Contact Center Indonesia 2010' dari Indonesia Contact Center Association (ICCA), serta penghargaan sebagai 'Best Customer Care Operator' di Selular Award 2010 yang diadakan majalah Selular. Indosat juga menempati posisi keenam sebagai 'Most Admired Companies in Indonesia 2010' menurut survei dari harian Asian Wall Street Journal. Selain itu, kami juga menerima banyak penghargaan atas kualitas dan inovasi produk serta layanan kami.

Tanpa mengurangi bobot penghargaan yang diterima, kami menyadari bahwa masih banyak yang harus kami perbaiki di berbagai aspek bisnis dan operasi kami. Mengingat bahwa kini Indosat tidak hanya berkompetisi dengan para pesaing di industri telekomunikasi, namun juga perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional terkemuka, kami berupaya menanamkan kesadaran untuk melakukan penyempurnaan organisasi secara terus menerus. Kesadaran inilah, dalam hemat kami, merupakan aspek terpenting bagi Indosat untuk merebut dan mempertahankan posisi sebagai penyedia utama layanan telekomunikasi terlengkap dan terintegrasi serta menjadi perusahaan yang bertanggung jawab di Indonesia.

Perubahan Komposisi Direksi

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 8 Februari 2011, Hans C. Moritz menggantikan Stephen Edward Hobbs sebagai direktur, efektif sejak 1 Mei 2011.

Prospek dan Strategi Bisnis 2011

Bagi Indosat, 2011 adalah tahun penuh harapan dan tantangan. Kami menyadari banyaknya tantangan yang menghadang di depan, namun kami berharap mulai memetik hasil-hasil nyata dari berbagai prakarsa kami di tahun 2010 dalam membangun landasan kokoh untuk transformasi berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, kami telah menerapkan berbagai prioritas dan program untuk tahun 2011.

Prioritas utama kami adalah mempertahankan dan memperkuat posisi kami dalam pengembangan pangsa pasar dan pendapatan. Kami berupaya mencapainya, antara lain memperkuat posisi di layanan *broadband* dan BlackBerry termasuk di segmen pasar korporasi dan UKM, mengembangkan layanan *mobile-commerce* serta bisnis penyewaan menara, serta penerapan strategi kluster-jaringan di wilayah-wilayah potensial. Indosat juga akan memfokuskan pembangunan dan perbaikan kapasitas dan kualitas layanan melalui penerapan jaringan HSPA+, efisiensi biaya operasi BTS, penambahan kapasitas transmisi jaringan, dan melanjutkan program modernisasi jaringan serta rencana peluncuran Satelit Palapa-E.

Di samping itu, Indosat terus melanjutkan langkah-langkah untuk memperbaiki efektivitas kerja dan mencapai keunggulan operasional sesuai kerangka transformasi berkelanjutan bidang organisasi dan sumber daya manusia kami. Langkah-langkah ini, yang didukung strategi bisnis baru kami, tidak hanya akan memperkuat posisi Indosat di pasar, namun juga menciptakan nilai tambah, baik untuk pelanggan dan pemegang saham, sebagai satu-satunya operator telekomunikasi paling lengkap dan terintegrasi di Indonesia.

Ungkapan Terima Kasih

Sungguh merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan bagi Indosat, seiring tuntasnya tahap pertama pertumbuhan transformatif kami dalam mengembangkan potensi dan melampaui apa yang telah kami capai sebelumnya. Atas nama Direksi, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada manajemen dan seluruh karyawan Indosat atas dedikasinya mencapai hasil-hasil mengesankan tahun 2010. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemegang saham atas arahan dan kepercayaan terus menerus kepada kami. Yang turut berperan besar dalam keberhasilan tahun 2010 adalah dukungan dari mitra-mitra strategis, dan terutama juga dari para pelanggan setia. Terima kasih setulusnya kami sampaikan.

Besar harapan kami untuk terus mendapatkan dukungan dari segenap pemangku kepentingan. Dipacu oleh hasil-hasil dan kemajuan pesat di tahun 2010, kami sangat bersemangat dalam mengembangkan potensi terbaik guna mencapai keberhasilan lebih besar di tahun 2011 dan tahun-tahun seterusnya.



Harry Sasongko Tirtotjondro
President Director & CEO

PROFIL DIREKSI



1. **Harry Sasongko Tirtotjondro**
   President Director & Chief Executive Officer
2. **Hans Christiaan Moritz***
   Director & Chief Technology Officer
3. **Fadzri Sentosa**
   Director & Chief Wholesale and Infrastructure Officer
4. **Laszlo Imre Barta**
   Director & Chief Commercial Officer
5. **Peter Wladyslaw Kuncewicz**
   Director & Chief Financial Officer



***Stephen Edward Hobbs**
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada 8 Februari 2011, Pemegang Saham telah memberhentikan dengan hormat Stephen Edward Hobbs sebagai anggota Direksi terhitung sejak tanggal 30 April 2011 dan mengangkat Hans Christiaan Moritz sebagai penggantinya terhitung sejak tanggal 1 Mei 2011.

1. Harry Sasongko Tirtotjondro

telah menjabat sebagai President Director and Chief Executive Officer sejak bulan Agustus 2009. Sebelumnya beliau telah memegang beberapa jabatan sebagai Presiden Direktur dan CEO dari GE Consumer Finance sejak tahun 2005 sampai 2009, dimana beliau diakui sebagai salah satu dari 10 CEO terbaik di Indonesia pada tahun 2008 oleh the SWA Magazine & Synovate awards. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2005, beliau merupakan anggota Lippo Group dimana Beliau sempat menjabat sebagai Managing Director dari Matahari Retail & Lippo Bank. Beliau pernah menjabat sebagai Managing Director of Consumer Banking di PT Bank Tiara Asia pada tahun 1995 sampai dengan 1998, dan sebelumnya sebagai Direktur di PT Citicorp Finance dan Citibank, N.A. pada tahun 1998. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung Indonesia, gelar Master of Science di bidang Pendidikan dari the Ohio State University, Amerika Serikat, dan merupakan Chartered Financial Consultant (ChFC), gelar yang diperoleh dari Singapore College of Insurance/ American College di Amerika Serikat.

2. Hans Christiaan Moritz

diangkat sebagai Director and Chief Technology Officer pada bulan Februari 2011 dan mengambil alih seluruh tugasnya sejak 1 Mei 2011. Beliau memiliki pengalaman selama 22 tahun di industri telekomunikasi seluler dan pernah menjabat berbagai posisi sebelumnya, termasuk Head Corporate Project Officer di Vodafone India sejak tahun 2009 sampai dengan 2011, Group Operations Director Africa/Chief Technology Officer di Zain sejak tahun 2006 sampai dengan 2009, Chief Technology Officer di Zain Uganda sejak tahun 2004 sampai dengan 2006, Chief Operating Officer di KPN Internet sejak tahun 2003 sampai dengan 2004, General Manager of the Business Unit Broadband Network di KPN Telecom sejak tahun 2001 sampai dengan 2003, Chief Operating Officer di BASE dan sejak tahun 1998 sampai dengan 2000, Operations Director Asia (berdomisili di Indonesia) di KPN Asia sejak tahun 1994 sampai dengan 1997. Beliau memperoleh gelar Master di bidang Matematika pada tahun 1986 dan beberapa gelar Sarjana, seperti di bidang Elektronika pada tahun 1978, Feedback dan Sistem Pengendalian pada tahun 1984 dan Manajemen Perairan pada tahun 1984.

3. Fadzri Sentosa

telah menjabat sebagai Direktur sejak bulan Juni 2007 dan sebagai Director and Chief Wholesale and Infrastructure Officer sejak bulan Juni 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Aplikanusa Lintasarta. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan di Perusahaan, termasuk sebagai anggota dari Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, Group Head National Card dan Channel Management sejak tahun 2006 sampai dengan 2007, Senior Vice President bidang Commerce, daerah Jabotabek sejak tahun 2005 sampai dengan 2006 dan Senior Vice President bidang Penjualan Seluler sejak tahun 2003 sampai dengan 2004, anggota dari Direksi Satelindo pada tahun 2003 dan anggota dari Direksi dari IM3 dari tahun 2002 sampai 2003. Beliau memperoleh gelar Master di bidang Regional Business Management dari University of Technology, Sydney pada tahun 2001 dan gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986.

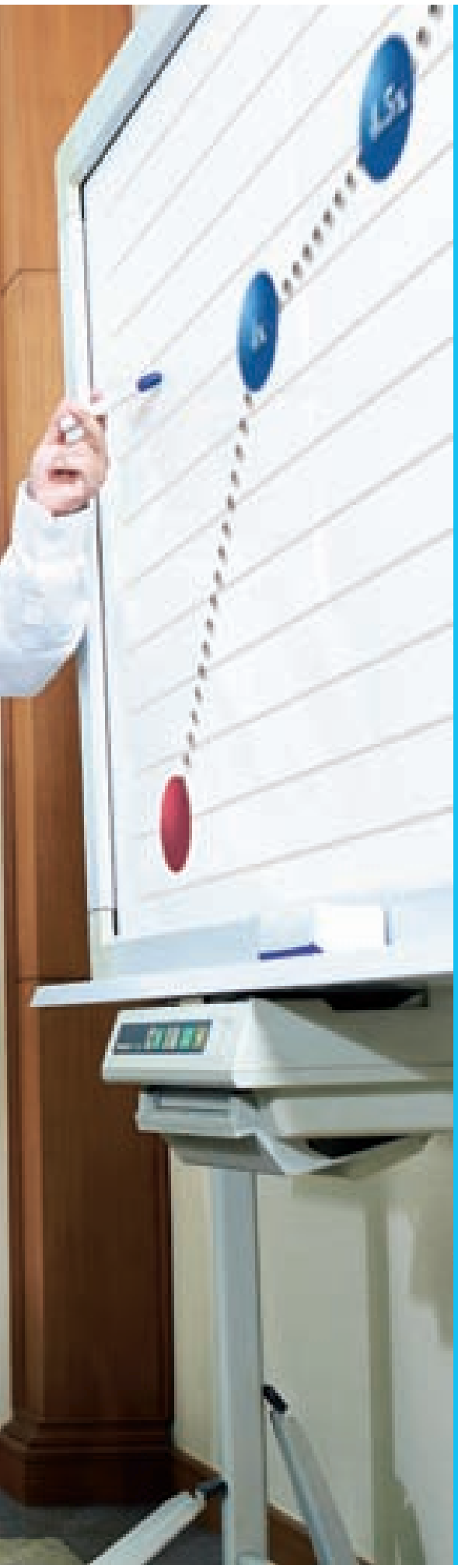
4. Laszlo Imre Barta

telah menjabat sebagai Director and Chief Commercial Officer sejak tanggal 1 Mei 2010. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Deputy Chief Marketing Officer di Grameenphone di Bangladesh. Beliau menghabiskan lebih dari empat tahun di Grameenphone di Bangladesh, dimana beliau mengembangkan diri dan memimpin peluncuran strategi bisnis pasar, mendirikan dan memimpin departemen UKM, dan menjabat sebagai Direktur Penjualan. Sebelum diperbantukan untuk Grameenphone oleh Grup Telenor, beliau bekerja untuk Pannon GSM di Hungaria, dimana beliau mengepalai departemen Corporate Client. Sebelum Pannon, beliau bekerja untuk Ericsson Hungary dimana beliau memimpin penjualan handset dan aksesori untuk operator seluler lokal Hungaria. Beliau bergabung dengan Ericsson dari Phillip Morris, dimana beliau memulai karirnya dalam bidang Penjualan. Beliau menerima Postgraduate Award dalam Studi Manajemen dari Szamalk Open Business School, Budapest pada tahun 2004 dan memiliki gelar di bidang Akuntansi dan Landscape Architecture & Engineering dari universitas-universitas di Hungaria.

5. Peter Wladyslaw Kuncewicz

telah menjabat sebagai Director & Chief Financial Officer sejak bulan September 2009. Beliau memiliki pengalaman selama 30 tahun di bidang keuangan di berbagai pasar keuangan internasional, 10 di antaranya bergerak di bidang telekomunikasi. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2009, Beliau memegang jabatan sebagai Director & Chief Financial Officer di Telenor Pakistan, memegang urutan ke-2 terbaik dalam urutan 5 pasar keuangan teraktif. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2006, beliau menjabat sebagai Director & Chief Financial Officer di Star Foods SA, sebuah perusahaan FMCG, dan sejak tahun 1996 sampai dengan 1997 beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di United Biscuits Poland. Beliau juga bekerja di bidang pengadaan keuangan dan IT roles di Batelco, Bahrain sejak tahun 1996 sampai dengan 1998. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Biologi dari University of Sussex, England, dan Master of Science di bidang di bidang Business Planning dan Finance dari University of Salford, England. Beliau juga merupakan anggota dari Chartered Institute of Management Accountants di Inggris.





TINJAUAN BISNIS & JASA

JASA SELULER

Mentari dan IM3 memperoleh penghargaan 'Top Brand Award' untuk tiga tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009 dan 2010, sementara Matrix memperoleh penghargaan 'Top Brand Award' untuk tahun 2010.

Jasa Seluler

Pasar jasa telekomunikasi seluler di Indonesia memperlihatkan pertumbuhan signifikan dalam dasawarsa yang baru lalu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan tarif cenderung menurun seiring pasar yang mulai jenuh, namun demikian potensi pasar secara keseluruhan masih prospektif. Pasar masih berpotensi untuk tumbuh karena penetrasi seluler domestik masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini, serta seiring dengan berlanjutnya modernisasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di dalam pasar ini, Indosat semakin memperkokoh posisinya sebagai penyedia layanan telekomunikasi seluler terbesar kedua diukur dari jumlah pelanggan, yang tercatat mencapai 44,3 juta pelanggan (termasuk pelanggan *wireless broadband*) per tanggal 31 Desember 2010. Pendapatan jasa seluler mengkontribusikan 81,0% dari total pendapatan usaha konsolidasi Indosat pada tahun 2010.

Jasa-Jasa

Indosat menyediakan rangkaian lengkap layanan seluler untuk suara dan data termasuk layanan *wireless broadband*. Layanan-layanan tersebut tersedia melalui produk-produk seluler Indosat baik produk prabayar Mentari dan IM3 maupun produk pascabayar Matrix, yang telah sangat populer di masing-masing segmen pasarnya yang berbeda. Produk Mentari, misalnya, ditujukan untuk pasar konsumen dewasa dengan menawarkan layanan jasa suara dengan tarif bersaing, sedangkan produk IM3 lebih ditujukan untuk pelanggan usia muda yang membutuhkan layanan suara, SMS dan data yang dipadukan secara atraktif. Sementara itu, produk Matrix diperuntukkan bagi pengguna jasa di lingkungan korporat maupun pelanggan konsumen individu kelas atas atau premium.

Pelanggan layanan seluler Indosat memperoleh akses pada rangkaian lengkap fitur dan layanan nilai tambah seperti SMS, MMS dan Voice, koneksi GPRS untuk *mobile Internet*, transfer data dan *push e-mail* (layanan BlackBerry), maupun fungsi-fungsi yang tersedia tanpa biaya tambahan seperti *caller ID*, *call waiting* dan *call forwarding*.

Pelanggan seluler Indosat juga dapat melakukan dan menerima panggilan telepon, SMS maupun koneksi data (GPRS/3G) ketika berada di luar negeri. Per 31 Desember 2010, pelanggan pasca bayar Indosat dapat menikmati fasilitas *roaming* internasional di 468 jaringan milik 336 mitra operator di 153 negara, sedangkan bagi pelanggan prabayar, fasilitas *roaming* internasional tersedia melalui 21 jaringan yang dioperasikan oleh 21 mitra operator di 17 negara.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, pendapatan dari layanan SMS telah memberikan porsi signifikan terhadap

pendapatan operasional dari layanan nilai tambah seluler dan fitur. Pada bulan Desember 2010, misalnya, Indosat mencatat rata-rata trafik SMS harian sekitar 516,0 juta SMS (belum termasuk layanan SMS nilai tambah yang umumnya terkait dengan program-program promosi oleh pemasang iklan maupun penyedia konten).

Tarif

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan rumusan tarif bagi layanan seluler prabayar dan pasca bayar yang berlaku untuk semua operator, sekalipun masing-masing operator dapat menawarkan program promosi dengan tarif yang lebih rendah dari tarif maksimum yang ditetapkan. Saat ini, Indosat menawarkan berbagai program promosi yang memberikan berbagai macam insentif untuk menarik pelanggan baru, mendorong volume penggunaan layanan serta meningkatkan daya saing produk Indosat di pasarnya.

Memimpin di Pasar

Kepemimpinan Indosat di pasar produk dan jasa seluler nampak jelas di tahun 2010. Pada bulan Maret 2010, Indosat menjadi penyedia layanan seluler pertama di Indonesia yang menghadirkan layanan berbasis Android bekerja sama dengan beberapa distributor telepon genggam Android terkemuka, termasuk memperkenalkan layanan i-Store, fasilitas Android Application Store virtual, dan Indosat Wiigo, solusi layanan Android-on-Demand yang pertama di Indonesia, Indosat juga meluncurkan Mentari Taiwan, produk *co-branding* inovatif dengan operator telekomunikasi Taiwan, Far EasTone Telecommunication. Mentari Taiwan menawarkan tarif sambungan langsung internasional yang lebih terjangkau bagi pengguna di Taiwan, termasuk tentunya sejumlah besar tenaga kerja Indonesia yang berada di negara tersebut, untuk melakukan panggilan ke nomor Mentari, IM3, Matrix dan StarOne Indosat di Indonesia. Sebuah layanan terobosan lainnya adalah i-klan Store, layanan portal iklan swalayan Internet pertama di dunia yang diluncurkan pada bulan Juli 2010. Layanan i-klan Store memungkinkan pemasang iklan memasarkan produk dan jasanya langsung ke perangkat genggam milik pelanggan, dan dilengkapi dengan fitur-fitur layanan seperti pilihan jalur pengiklanan maupun target pasar yang dituju,



"MU24H itu IM3", salah satu program yang memberikan banyak manfaat bagi pelanggan IM3.

serta fasilitas transaksi melalui kartu kredit, PayPal, debit rekening, atau layanan iPay dan Dompetku dari Indosat.

Dengan lebih dari 500.000 pelanggan di akhir tahun 2010, Indosat memiliki posisi yang kokoh di pasar layanan BlackBerry di Indonesia, yang merupakan pasar layanan BlackBerry kedua terbesar di dunia. Pada tahun 2004, Indosat menjadi operator telekomunikasi pertama yang menawarkan layanan BlackBerry Enterprise Solution (BES) di Indonesia bagi para pelanggan Matrix. Di tahun 2009, Indosat juga menjadi operator pertama yang menyediakan layanan tersebut bagi pelanggan prabayar, yaitu Mentari dan IM3. Untuk memperkuat posisinya di segmen layanan BlackBerry, Indosat pada bulan Oktober 2010 telah meningkatkan kapasitas koneksi ke server Research in Motion menjadi 100 Mbps *dual link*. Ini merupakan kapasitas terbesar di Indonesia saat ini, sehingga memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi bagi kenyamanan para pengguna layanan Indosat BlackBerry.

Pada tahun 2010, Indosat meluncurkan layanan BES on Demand (Enterprise) Hosted yang pertama di Indonesia. Berbeda dengan layanan BES on Demand terdahulu yang memerlukan server dan perangkat lunak khusus di tempat pelanggan korporat, layanan BES on Demand (Enterprise) Hosted dikembangkan khusus untuk pelanggan segmen usaha kecil dan menengah (UKM) dan dapat diakses langsung dengan mengirim SMS dari kartu Matrix, Mentari ataupun IM3 pelanggan. Melihat pada potensi yang ada di segmen UKM, layanan BES on Demand (Enterprise) Hosted diperkirakan akan semakin memperkokoh posisi Indosat di pasar layanan BlackBerry di Indonesia.

Layanan Broadband Nirkabel

Seiring makin populernya layanan *broadband* nirkabel di Indonesia, Indosat menyediakan akses *broadband* nirkabel untuk perangkat kecil (*Handheld Devices*) melalui kartu Matrix, Mentari dan IM3. Sejak tahun 2009, pelanggan Mentari dan IM3 dapat menikmati layanan Broadband-on-Request yang kemudian mulai tahun 2010 juga tersedia bagi pelanggan Matrix, dengan pilihan paket harian, mingguan dan bulanan maupun paket *unlimited*. Kemudian, pada bulan April 2010, Indosat menjadi operator telekomunikasi pertama di Asia dan kedua di dunia yang meluncurkan layanan komersial akes *Internet broadband* dengan teknologi Dual Carrier (DC) HSPA+ yang menawarkan kecepatan *downlink* sampai dengan 42 Mbps dan *uplink* sampai dengan 5,8 Mbps. Layanan ini memanfaatkan lisensi *carrier* kedua (*second carrier*) yang diperoleh Indosat pada tahun 2009. Sampai dengan akhir tahun 2010, akses DC HSPA+ telah dapat dinikmati oleh pelanggan Indosat di Jakarta, Surabaya dan Medan.

Aktivitas Pemasaran

Indosat memasarkan produk dan layanan selulernya melalui pusat-pusat layanan terpadu dan layanan konsumen walk-in centers, baik yang dioperasikan oleh Indosat yaitu Galeri Indosat maupun yang dioperasikan oleh mitra distributor yaitu Griya Indosat. Pada akhir tahun 2010, tercatat beroperasi sebanyak 169 Galeri Indosat dan 60 Griya Indosat untuk melayani pelanggan di berbagai kota besar Indonesia di seluruh propinsi mulai dari Sumatra Utara sampai Papua. Selain itu, akses pada produk dan layanan Indosat juga dapat diperoleh melalui outlet KILAT (Kios Layanan dan Penjualan Indosat) yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra perorangan, dengan total 13 outlet di tahun 2010.

Pada tahun 2010, Indosat memperkenalkan e-Galeri, fasilitas mesin swalayan di lokasi-lokasi publik dimana pelanggan dapat melakukan isi ulang kartu, membeli kartu perdana, membayar tagihan pasca bayar, serta memperoleh informasi mengenai produk dan program promosi Indosat terkini. Konsep e-Galeri merupakan yang pertama di Indonesia dan ditujukan untuk memberikan lebih banyak kemudahan bagi pelanggan Indosat tanpa harus datang dan antri di Galeri Indosat atau Griya Indosat.

Meskipun jalur pemasaran langsung sangat berperan dalam mempromosikan citra produk Indosat di pasarnya, bagian terbesar dari pendapatan penjualan layanan seluler Indosat merupakan kontribusi dari jaringan dealer independen Indosat. Saat ini, Indosat bekerja sama dengan sekitar 52 dealer independen yang mengoperasikan jaringan distribusi mereka masing-masing di berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan melayani penjualan produk, pelayanan pelanggan, pembayaran tagihan maupun informasi akan produk dan layanan Indosat, kepada konsumen individu. Pada tahun 2010, Indosat memperbarui strategi pengelolaan jaringan dealer melalui penyelarasan struktur komisi dealer. Pada sistem yang baru, persentase komisi untuk distributor dan pengecer ditentukan berdasarkan skala lamanya pelanggan aktif dalam jaringan Indosat, selain berdasarkan volume pemakaian. Sistem komisi

yang baru tersebut telah terbukti efektif dalam menarik pelanggan yang lebih berkualitas, dan sekaligus mengoptimalkan biaya penjualan dan pemasaran.

Pada akhir tahun 2010, jumlah pelanggan layanan seluler Indosat (termasuk layanan *broadband* nirkabel) telah mencapai sekitar 44,3 juta pelanggan, dibandingkan posisi setahun sebelumnya dengan sekitar 33,0 juta pelanggan. Seiring keberhasilan Indosat dalam mengurangi jumlah pelanggan prabayar dari kategori perilaku '*calling card*' di tahun 2009, penerapan strategi nilai-berimbang yang menawarkan nilai lebih tinggi dengan harga yang sepadan kepada pelanggan telah berhasil menarik sejumlah besar pelanggan baru di tahun 2010, diantaranya melalui program-program seperti 'Meraih Mimpi Bersama IM3', 'MU24H itu IM3' dan 'Mentari 50'.

Dengan strategi harga yang tepat, Indosat berhasil meningkatkan jumlah pelanggan seluler di tahun 2010. Pada saat yang sama, Indosat menyadari bahwa mempertahankan pelanggan yang telah ada sama pentingnya dengan memperoleh pelanggan baru. Untuk itu, pada tahun 2010 Indosat meluncurkan program loyalitas pelanggan 'Senyum Setia Indosat', yang menawarkan bonus SMS dan bicara gratis kepada pelanggan setia Mentari, IM3, Matrix dan StarOne Indosat berdasarkan lama berlangganan maupun volume penggunaan. Program Senyum Setia Indosat melengkapi berbagai inisiatif Indosat lainnya dalam rangka mempertahankan layanan yang berkualitas tinggi serta inovasi fitur produk dan layanan yang berkelanjutan, sehingga pelanggan yang puas akan tergerak untuk terus setia menggunakan produk dan jasa Indosat.



Galeri Indosat di kantor pusat, salah satu dari 169 galeri sebagai pusat layanan bagi pelanggan.

JASA MULTIMEDIA, KOMUNIKASI DATA, & INTERNET (MIDI)

Kebutuhan yang semakin meningkat dari perusahaan dan kalangan dunia usaha akan layanan komunikasi dan jaringan data yang handal telah memberikan peluang pertumbuhan jasa MIDI, yang pada tahun 2010 mengkontribusikan 12% dari total pendapatan usaha konsolidasi Indosat.

Jasa-Jasa
Indosat saat ini menawarkan beragam layanan MIDI (Multimedia, Komunikasi Data dan Internet), mulai dari solusi konektivitas *packet-switched* Asynchronous Transfer Mode (ATM) dan *frame relay* sampai jaringan modern berbasis layanan IP-VPN (Internet Protocol-Virtual Private Network) dan MPLS (Multi Protocol Label Switching), layanan Internet, sewa transponder satelit untuk perusahaan telekomunikasi dan penyiaran, dan jasa nilai tambah seperti Disaster Recovery Center dan Data Services.

Solusi Konektivitas. Indosat melayani kebutuhan pelanggan perusahaan melalui berbagai layanan komunikasi data yang dikemas sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan terkait aspek jenis komunikasi data, harga, kecepatan dan keamanan jaringan komunikasi. Ini mencakup antara lain layanan transmisi data kecepatan tinggi seperti Indosat World Link, layanan *international leased line point-to-point* melalui jaringan kabel laut dan kabel darat; Indosat National Link, layanan *domestic private leased line point-to-point*; dan Direct Link, layanan *leased line* melalui satelit/VSAT yang memungkinkan komunikasi data *point-to-multipoint*.

Indosat juga menyediakan layanan komunikasi data *multipoint* internasional maupun domestik melalui jaringan Internet Protocol (IP) Network Cloud, yaitu layanan berbasis IP-VPN maupun MPLS. Layanan IP-VPN domestik saat ini tersedia di 74 kota di Indonesia, sementara layanan IP-VPN internasional tersedia untuk area layanan di kawasan Asia Tenggara serta juga untuk tujuan-tujuan di Asia Utara, Jepang, Eropa dan Amerika Serikat melalui kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi global. Sementara itu, layanan berbasis MPLS seperti Indosat Premium Ethernet dan Metro Ethernet tersedia untuk jaringan komunikasi suara, data, video dan aplikasi Internet dengan cakupan domestik maupun internasional. Indosat juga memiliki layanan *packet-switched* Asynchronous Transfer Mode (ATM) dan *frame relay*, yang memberikan pelanggan konektivitas multilateral, interkoneksi LAN yang handal, dan kemampuan untuk mendukung aplikasi-aplikasi *distributed computing* yang kompleks.

Layanan Internet. Indosat menyediakan layanan Internet Network Provider untuk pelanggan perusahaan penyedia layanan Internet (ISP), serta akses Internet dedicated untuk pelanggan konsumen (*end users*). Dalam tahun yang berakhir 31 Desember 2010, Indosat mengoperasikan tiga perusahaan ISP yang memberikan pendapatan sebesar Rp519,6 miliar (US$57,8 juta). Melalui anak perusahaan IM2, Indosat juga menyediakan akses *Internet dedicated* maupun *dial-up*, baik bagi pelanggan korporat dan komersial [perusahaan berskala menengah ke bawah (UKM)] maupun bagi pelanggan individu. Pada tahun 2010, layanan Internet mengkontribusikan 21,0% dari total pendapatan operasional layanan MIDI.

Sewa Transponder Satelit. Indosat mengoperasikan satelit komunikasi Palapa-D yang diluncurkan pada bulan Agustus 2009 untuk menggantikan satelit Palapa-C2 yang beroperasi sejak 1996. Pada tahun 2010, satelit Palapa-D telah beroperasi penuh, sementara satelit Palapa-C2 yang telah dipindahkan ke orbit *inclined* 150.5E akan terus beroperasi sampai tahun 2014 terutama untuk kebutuhan *backhaul* trafik seluler Indosat. Satelit Palapa-D membawa 11 transponder Extended C-Band, 24 transponder Standard C-Band serta 5 transponder Ku-Band, seluruhnya dimiliki oleh Indosat, yang menyewakan kapasitas transponder tersebut kepada perusahaan penyiaran dan operator telekomunikasi lain. Jasa-jasa satelit lainnya yang disediakan oleh Indosat antara lain adalah layanan TV, Indosat TV Link, layanan jaringan privat, akses Internet, dan layanan multimedia dan konferensi video.

VSAT Net/IP dan VSAT Link. Melalui anak perusahaan, Lintasarta, Indosat menyediakan layanan jaringan komunikasi data berbasis Satelit VSAT Net/IP dan VSAT Link. Layanan VSAT Net/IP menyediakan koneksi dan pengendalian atas trafik data antara lokasi-lokasi terpencil, sesuai untuk kebutuhan jaringan komunikasi data pelanggan dengan volume trafik rendah sampai menengah seperti perusahaan di sektor keuangan, transportasi, perdagangan dan distribusi. Layanan VSAT Link menyediakan transmisi data digital *point-to-point* ke lokasi terpencil untuk melayani volume trafik data menengah sampai tinggi bagi perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur, pertambangan dan jasa keuangan.

Disaster Recovery Center (DRC) dan Data Center. Indosat menyediakan jasa DRC dan Data Center berupa layanan *server co-location, rack, cage, power* dan fasilitas pendukungnya sebagai jasa nilai tambah bagi pelanggan korporat. Sebagai bagian dari solusi total telekomunikasi bagi pelanggan, Indosat juga menyediakan layanan *leased line* domestik atau jaringan *backbone* dari fasilitas DRC atau Data Center Indosat ke lokasi pelanggan.

Produk dan Fitur Layanan Baru

Indosat terus mempelopori pengembangan apa yang disebut Solusi Konvergensi, yang menggabungkan kapabilitas dan fitur dari berbagai produk teknologi informasi dan komunikasi menjadi solusi layanan nilai tambah yang dapat membantu pelanggan melalui penyediaan komunikasi data, suara dan video yang efisien dari segi biaya.



Ruang Pengendali Satelit Palapa-D di Jatiluhur, Jawa Barat.

Pada tahun 2010, Indosat meluncurkan beberapa produk baru bagi pelanggan korporat, di antaranya adalah layanan Indosat Enterprise Resource Planning (I-ERP). Layanan I-ERP memungkinkan pengelolaan komunikasi data secara *real time* menggunakan perangkat komunikasi bergerak nirkabel yang dapat diakses melalui jaringan GPRS atau HSDPA. Layanan ini dikembangkan untuk memfasilitasi proses-proses bisnis di perusahaan-perusahaan sektor manufaktur dan F&B (*Food & Beverage*) maupun perusahaan distributor yang memiliki proses-proses

terintegrasi seperti fungsi *sales canvassing, sales order*, manajemen gudang dan logistik, dan lain-lain.

Layanan I-ERP merupakan salah satu layanan terbaru di kategori layanan Solusi Konvergensi yang semakin diminati oleh pelanggan korporat. Layanan Solusi Konvergensi lainnya diantaranya adalah layanan Corporate VPN, Wireless EDC dan Wireless ATM, serta SME Solution.

Layanan SME Solution merupakan paket layanan komunikasi bergerak dan komunikasi tetap bagi perusahaan skala kecil dan menengah (UKM). Paket layanan tersebut mencakup akses *Internet broadband*, fasilitas komunikasi suara dan SMS, fasilitas Toko On Line yang menyediakan fitur-fitur web hosting termasuk layanan pembayaran online (i-payment), serta berbagai opsi layanan dan fungsi lain sesuai kebutuhan yang berbeda-beda di perusahaan-perusahaan sektor UKM. Indosat mulai mempromosikan layanan SME Solution melalui iklan di media cetak nasional dan lokal di triwulan ketiga tahun 2010.

Upaya inovasi produk lainnya adalah pengembangan paket aplikasi kesehatan jarak-jauh untuk rumah sakit menggunakan solusi Wireless EDC dari Indosat, serta layanan Restoration Service untuk pelanggan korporat yang memakai sistem jaringan kabel laut Indosat untuk kebutuhan komunikasi data internasionalnya.

Aktivitas Pemasaran

Pelanggan pengguna jasa MIDI kebanyakan adalah perusahaan besar maupun perusahaan di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun Indosat juga melayani pelanggan *wholesale* maupun ritel untuk jasa-jasa seperti layanan Internet. Pada bulan Juni 2010, Indosat meluncurkan situs web Indosat Corporate Solution (ICS) yang dapat diakses dari portal Indosat di www.indosat.com. Situs ICS dirancang untuk mempermudah akses informasi terhadap rangkaian produk dan jasa Indosat yang tersedia bagi pelanggan korporat dan sekaligus meningkatkan citra merek Indosat di mata pelanggan. Sebuah survei kemudian diadakan melalui situs ICS pada bulan Oktober dan November 2010 untuk menilai kepuasan pengguna jasa ICS dan meminta masukan bagi perbaikan yang dirasa perlu.

Aktivitas penjualan dan pemasaran untuk produk dan layanan Indosat Corporate Solution antara lain mencakup kegiatan presentasi kelompok, *direct mail*, promosi melalui mitra, program retensi pelanggan, iklan di media massa, dan program-program promosi penjualan. Di antara program-program promosi yang diadakan di tahun 2010 adalah program insentif progresif untuk pelanggan premium layanan Indosat Phone di wilayah Jabodetabek, program diskon khusus bagi perusahaan ISP pelanggan layanan Indosat Internet Network Provider yang menyewa kapasitas *backbone* tambahan, dan program promosi khusus bagi pelanggan layanan Ethernet LAN ACASIA. Bekerja sama dengan Cisco dan Asosiasi Perusahaan Pertambangan Indonesia, Indosat menggelar acara *Focus Group Discussion* (FGD) pada bulan Juni 2010 dengan tema 'Idea Sharing on Data Center, Disaster Recovery Center Outsourcing, and Virtualization Technology'. Forum yang dihadiri oleh karyawan TI dan tehnik dari perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut bertujuan untuk mempromosikan produk dan layanan Indosat Corporate Solution.

Sebagai bagian dari rangkaian aktivitas memperingati bulan suci Ramadhan, Indosat juga menyelenggarakan acara 'Ramadhan Package on Appreciation Program' pada bulan Agustus - September 2010. Acara yang merupakan apresiasi untuk pelanggan setia Indosat ini berupa sesi

pelatihan 3 minggu bagi wakil-wakil undangan dari para pelanggan tersebut yang membahas berbagai topik mulai dari kompetensi manajerial, keuangan dan TI sampai pada keterampilan bernegosiasi dan pengembangan pribadi.

Pada bulan Juli 2010, Indosat menjadi tuan rumah acara Global Partnership Gathering bagi para mitra telekomunikasi global dengan tema 'Indosat Group: Synergy for Information, Services & Support'. Acara tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membina hubungan baik dengan mitra telekomunikasi internasional yang merupakan elemen penting dalam penyediaan jasa-jasa telekomunikasi internasional Indosat. Sebelumnya, pada bulan Juni 2010, Indosat memperoleh penghargaan sebagai 'Best Partner' dalam kategori 'Maintain and Achieve Operational Excellence' dalam acara Global Partner Gathering yang diadakan di Singapura oleh Cable & Wireless, perusahaan telekomunikasi global yang berkantor pusat di Inggris dan salah satu dari mitra global Indosat.



Global Partner Gathering bersama mitra telekomunikasi global.

JASA TELEKOMUNIKASI TETAP

Pendapatan dari jasa telekomunikasi tetap, terutama dari layanan Sambungan Langsung Internasional (SLI) dan layanan telepon tetap nirkabel, mengkontribusikan 7% terhadap total pendapatan usaha konsolidasi Indosat di tahun 2010.

Jasa-Jasa

Sambungan Langsung Internasional (SLI). Indosat merupakan salah satu penyedia utama layanan sambungan langsung jarak jauh internasional di Indonesia, melalui produk Indosat 001 dan Indosat 008 maupun produk Indosat FlatCall 01016. Indosat 001 dan Indosat 008 adalah layanan sambungan langsung jarak jauh internasional, dengan produk '001' merupakan layanan premium sementara '008' dipasarkan sebagai layanan ekonomis dengan tarif lebih terjangkau. Produk 'FlatCall 01016' diperkenalkan pada tahun 2005, awalnya menggunakan kode akses '016'. Layanan ini mengakomodasi kebutuhan segmen pasar yang sensitif terhadap harga dengan menawarkan tarif yang sangat terjangkau untuk beberapa negara tujuan panggilan tertentu, dan menggunakan tarif reguler layanan VoIP (Voice over Internet Protocol) untuk negara-negara tujuan lainnya.

Layanan Telepon Tetap. Indosat menyediakan layanan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik melalui produk 'Indosat Phone'. Saat ini, layanan Indosat Phone tersedia di 82 kota besar di seluruh Indonesia.

Layanan Telepon Tetap Nirkabel. Indosat menghadirkan layanan telepon tetap nirkabel StarOne untuk melengkapi layanan selulernya dan menyediakan solusi hemat biaya bagi pelanggan yang hanya memerlukan mobilitas terbatas. Dengan teknologi CDMA 2000 x1 dan lisensi nasional telepon tetap nirkabel di frekuensi 800 MHz, sampai dengan Desember 2010 layanan StarOne tersedia di 82 kota di Indonesia, dan terutama di pulau Jawa. Pada tahun 2010, Indosat meluncurkan layanan StarOne CDMA BlackBerry bagi pelanggan StarOne prabayar dan pasca bayar, dan menjadi operator telepon tetap nirkabel pertama di Indonesia yang menghadirkan layanan BlackBerry untuk suara, SMS, Internet nirkabel, e-mail dan *instant messaging*. Di akhir Desember 2010, tercatat terdapat 61.123 pelanggan StarOne pasca bayar dan 489.007 pelanggan prabayar.

Pemasaran

Indosat memiliki tim pemasaran khusus untuk layanan SLI, terutama bagi kelompok 500 pelanggan terbesar yaitu hotel, perusahaan besar, kantor-kantor pemerintah dan kedutaan besar negara asing. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan volume penggunaan SLI di tahun 2010, termasuk melalui iklan di media massa,

perjanjian komitmen volume trafik dengan mitra operator telekomunikasi luar negeri untuk menyalurkan panggilan *incoming* internasional melalui Indosat, dan kerja sama dengan mitra untuk memasarkan layanan SLI Indosat kepada pelanggan perusahaan yang potensial. Indosat juga memiliki program apresiasi pelanggan yang memberikan insentif khusus bagi pelanggan aktif.

Indosat terus mempromosikan layanan FlatCall 01016 di tengah makin populernya penggunaan akses telekomunikasi VoIP di kalangan konsumen serta persaingan yang semakin ketat dari penyedia layanan VoIP. Pada tahun 2010, Indosat menyelenggarakan program promosi khusus untuk FlatCall 01016 yang berlaku secara nasional dengan menawarkan tarif khusus maupun bonus menit percakapan untuk panggilan ke 21 negara tujuan utama. Selain program berskala nasional ini, Indosat juga merancang program-program promosi Flatcall 01016 di lingkup lokal yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna layanan di masing-masing tempat atau wilayah.

Di tahun 2010, Indosat mencatat peningkatan layanan SLI sebesar 10,6% pada panggilan telepon masuk menjadi 1.723,9 juta menit berbayar, sementara panggilan telepon keluar tercatat turun sebesar 7,8% menjadi 463,0 juta menit berbayar. Sementara itu, total pendapatan dari layanan telepon tetap nirkabel mencapai Rp174,2 miliar pada tahun 2010.







TINJAUAN OPERASIONAL

SUMBER DAYA MANUSIA

Pada akhir tahun 2010, Indosat mempekerjakan sekitar 6.700 karyawan yang merupakan inti dari proses transformasi yang sedang berlangsung di sepanjang tahun.

Mengerahkan seluruh potensi sumber daya manusia adalah bagian dari strategi pertumbuhan dan transformasi Indosat yang sedang berlangsung. Proses transformasi ini melibatkan perubahan yang luas dalam strategi bisnis, struktur organisasi, berikut segenap insan Indosat. Dengan perubahan strategi untuk lebih fokus pada segmen pasar yang dilayani daripada produk-produk yang ditawarkan, Indosat melakukan perombakan struktur organisasi sehingga menjadi lebih ramping, lebih berfokus ke pelanggan dan lebih mampu menghadapi dinamika dan persaingan pasar. Pada akhir tahun 2010, strategi bisnis baru ini telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan struktur organisasi baru yang telah tertata. Di samping itu, Indosat juga mengalokasikan sumber daya yang cukup besar dalam hal waktu, upaya dan uang untuk menyiapkan landasan kerja yang kokoh dalam proses transformasi segenap insan Indosat.

Perusahaan Pilihan

Indosat selalu berusaha menjadi tempat kerja terbaik bagi karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang kondusif di samping memastikan kesejahteraan karyawan dan anggota keluarga mereka. Selain dari gaji bulanan, karyawan juga menerima berbagai manfaat lain seperti manfaat telepon, manfaat kesehatan, bonus tahunan yang berupa insentif, serta berbagai berbagai fasilitas dan penghargaan lain. Selama memungkinkan, kondisi kerja dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan bekerja kepada karyawan. Sebagai contoh adalah struktur waktu kerja yang memungkinkan karyawan untuk mengatur sendiri jadwal masuk dan pulang kerja berdasarkan beban kerja mereka sehari-hari, sementara aturan yang fleksibel tentang cara berpakaian memungkinkan mereka untuk mengenakan pakaian formal atau kasual, sesuai dengan peran, fungsi dan tugas masing-masing. Untuk kepentingan karyawan, Indosat menyediakan perpustakaan, klinik kesehatan, kantin, dan ruang perawatan di beberapa lokasi kerja. Indosat juga menyediakan fasilitas penyaluran hobi atau bakat dalam olahraga dan seni untuk menyeimbangkan kerja dengan kegiatan sosial.

Implementasi Operational Excellence

Karyawan terus dimotivasi untuk lebih kreatif dalam menghasilkan ide-ide praktis yang dapat diterapkan dalam pencapaian proses kerja yang lebih baik, lebih cepat atau lebih hemat biaya. Pada tahun 2010, dalam rangka mencapai keunggulan operasional, Indosat menyelenggarakan Operational Excellence Award. Acara ini menarik respon yang antusias dari karyawan dengan diusulkannya sekitar 130 ide dan inisiatif yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai aspek operasional dan proses kerja Indosat. Beberapa dari inisiatif ini langsung dilaksanakan dan kini telah menghasilkan penghematan biaya yang cukup signifikan.

Budaya Kerja Berbasis Kinerja

Salah satu aspek penting dari transformasi di Indosat adalah penyempurnaan sistem Manajemen Kinerja Karyawan yang dikembangkan dari metodologi *balanced scorecard*. Metrik *scorecard* dirumuskan menjadi Key Performance Indicators (KPI) utama di tingkat perusahaan, dan kemudian diterapkan di tingkat grup, divisi dan terus ke bawah pada tiap-tiap karyawan. Hal ini memastikan efektivitas pelaksanaan strategi perusahaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, di samping memfasilitasi penyelarasan antara strategi korporat Indosat dengan tujuan keseluruhan dari Grup Qtel.

Sistem Manajemen Kinerja Karyawan ini diharapkan dapat mengarah pada terciptanya budaya berbasis kinerja di antara karyawan Indosat, karena lebih menekankan pada tingkat kinerja individu tertentu dan bukan pada prestasi kelompok. Target KPI dari tiap-tiap karyawan ditetapkan di awal tahun, kemudian ditinjau kembali dan direvisi sesuai kebutuhan di pertengahan tahun, sedangkan prestasi karyawan dinilai di awal tahun berikutnya dengan skala 1 sampai 5. Pemeringkatan kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan penghargaan bagi tiap-tiap karyawan, yang kemudian diberikan dalam bentuk bonus tahunan, penyesuaian skala gaji, dan insentif khusus.

Sebagai bagian dari upaya membangun budaya berbasis kinerja di antara karyawan, Indosat memperkenalkan inisiatif Indosat Financial Awareness (IFA) pada tahun 2010 yang diikuti oleh seluruh karyawan. IFA merupakan serangkaian bahan studi mengenai berbagai informasi keuangan seperti informasi mengenai sumber penghasilan dan jumlahnya masing-masing, berikut jenis dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut, serta berbagai informasi keuangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Indosat. Materi ini disusun dan disajikan secara berbeda untuk karyawan pada tingkat yang berbeda. Melalui IFA, karyawan diharapkan untuk lebih memahami kinerja keuangan perusahaan, serta merasakan keterkaitan langsung antara tugas mereka



Indosat memperkenalkan inisiatif Indosat Financial Awareness (IFA) pada tahun 2010.

sehari-hari dengan seluruh kinerja perusahaan. Pada akhirnya, hal ini akan mengarah pada motivasi kerja yang lebih tinggi sejalan dengan harapan karyawan terhadap perusahaan.

Peluncuran Buku Kode Etik

Dalam perkembangan selanjutnya, Kode Etik kami telah diformalisasi dengan dikeluarkannya dokumen panduan Kode Etik Perusahaan. Setiap karyawan Indosat menandatangani salinan Kode Etiknya masing-masing dalam serangkaian sesi sosialisasi ke bawah pada setiap tingkat organisasi.

Sistem Informasi SDM

Indosat mengembangkan Sistem Informasi SDM berbasis ESS (*Employee Self Service*) dengan proses elektronik otomatis, sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya dan kesalahan. Setiap karyawan dapat menggunakan aplikasi intranet 'Myinfo' untuk mengakses dan memperbarui informasi yang relevan dan data pribadinya masing-masing. Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh karyawan untuk memulai proses rutin tertentu secara langsung, termasuk penilaian kinerja, penggantian biaya medis atau perjalanan bisnis, pengambilan waktu cuti, serta untuk mendaftarkan diri untuk suatu pelatihan khusus atau penghargaan karyawan seperti beasiswa dan tunjangan lainnya.

Komunikasi Manajemen dengan Karyawan

Indosat berusaha untuk mempertahankan komunikasi yang efektif dengan seluruh karyawan, mengenai sasaran perusahaan di masa mendatang, kemajuan yang telah dibuat, dan terutama mengenai peraturan dan kebijakan perusahaan yang secara langsung mempengaruhi karyawan. Komunikasi yang efektif dengan karyawan menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan proses transformasi yang sedang berlangsung di Indosat. Dalam hal ini, Indosat melakukan berbagai inisiatif yang dirancang untuk menyebarkan informasi, membangun kesadaran dan membangun dukungan karyawan terhadap transformasi.



Komunikasi dua arah antara manajemen puncak dan karyawan dilakukan melalui pertemuan rutin.

Komunikasi dua arah langsung antara manajemen puncak dan karyawan dilakukan melalui pertemuan informal rutin, kunjungan Direksi ke cabang dan lokasi kerja, pertemuan sosial dengan Presiden Direktur, dan komunikasi rutin dengan perwakilan dari Serikat Pekerja Indosat (SPI). Selain itu, Indosat juga memanfaatkan saluran komunikasi tidak langsung seperti intranet perusahaan dan kelompok e-mail serta poster dan sarana komunikasi visual lainnya yang ditempatkan di lokasi kerja. Dengan memelihara komunikasi dua arah yang efektif, Indosat berusaha memastikan dukungan penuh dari seluruh karyawan terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

Pelatihan & Pengembangan Karyawan

Di luar kegiatan khusus yang berkaitan dengan proses transformasi Indosat, pelaksanaan berbagai program pelatihan dan pengembangan karyawan di tahun 2010 tetap merupakan agenda kerja Divisi SDM. Secara keseluruhan, Indosat mengadakan 592 program pelatihan di tahun 2010 yang diikuti oleh 9.645 karyawan. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam pengembangan kompetensi karyawan dan untuk lebih fokus pada kualitas layanan yang diberikan, program pelatihan tahun 2010 mencakup lebih banyak modul pelatihan yang mendalam untuk kompetensi yang lebih khusus. Total biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan karyawan pada tahun 2010 mencapai Rp12,5 miliar (tidak termasuk biaya yang dikeluarkan oleh anak perusahaan).

Indosat memiliki fasilitas pusat pelatihan khusus di Jatiluhur, yang dilengkapi dengan ruang belajar, ruang komputer, dan perpustakaan. Fasilitas ini dapat menangani 16 kelas secara bersamaan untuk 200 peserta, dan dilengkapi dengan asrama dan fasilitas kebugaran termasuk area pelatihan *outbound*. Di samping itu, kami juga memiliki sejumlah ruang pelatihan berfasilitas lengkap dengan kapasitas maksimal 80 orang, serta ruang komputer berkapasitas 25 orang, yang berlokasi di gedung kantor pusat kami di Jakarta.

Hubungan Industrial

Pada 31 Desember 2010 kami menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2011-2012 yang kemudian diperbaharui dan dinegosiasikan ulang setiap dua tahun antara Manajemen dan Serikat Pekerja Indosat (SPI). Fungsi PKB di Indosat bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang dapat mendukung keberhasilan bisnis perusahaan tanpa mengesampingkan hak-hak karyawan. Dengan demikian, PKB mencakup berbagai ketentuan umum kepegawaian, termasuk jam kerja, penggajian, pengembangan dan kompetensi karyawan, keselamatan kerja dan kesehatan, kesejahteraan karyawan, tunjangan sosial, kode etik karyawan, dan mekanisme dalam menangani perselisihan kepegawaian. Sementara itu, pertemuan rutin antara manajemen dan perwakilan SPI berfungsi sebagai sarana untuk memelihara hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja Indosat.

Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2010	2009
S2 dan S3	327	339
S1	2.165	2.149
D3	665	708
Hingga SLTA	523	532
SMK	163	160
Total	**3.843**	**3.888**

JARINGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Indosat memahami bahwa ekspansi dan modernisasi jaringan yang berkelanjutan adalah kunci untuk melanjutkan pertumbuhan di masa-masa mendatang.

Indosat mempertahankan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang luas yang terdiri dari jaringan seluler dan jaringan telekomunikasi tetap yang mencakup gerbang telekomunikasi internasional, sistem kabel bawah laut, sirkuit satelit dan stasiun transmisi *microwave*. Sebagai bagian dari strategi pertumbuhannya, Indosat secara agresif mendorong ekspansi dan modernisasi jaringan di tahun 2010, terutama pada jaringan selulernya. Selama tahun ini, Indosat meluncurkan sekitar 1.755 BTS (*Base Transceiver Station*) baru, termasuk 924 Stasiun Node-B atau BTS 3G. Penggunaan lahan untuk fasilitas seluler Indosat juga ikut tumbuh dan mencakup lebih banyak wilayah terpencil di luar Jawa, khususnya di Kalimantan dan Papua.

Pemanfaatan Teknologi

Modernisasi dan ekspansi jaringan berjalan paralel, dimana Indosat memilih strategi untuk mengganti peralatan yang sudah lama dengan peralatan baru. Strategi ini mensyaratkan instalasi peralatan baru untuk mengganti peralatan yang lama di daerah-daerah dengan lalu lintas komunikasi yang padat, sementara peralatan lama kemudian dimanfaatkan untuk melayani daerah-daerah terpencil di sekitar jaringan yang ada.

Program modernisasi jaringan Indosat ini diperkirakan akan berlangsung selama tiga tahun, mulai dari tahun 2010 hingga selesai. Salah satu pengembangan yang terkait dalam program ini adalah pemilihan pemasok, melalui keputusan untuk mengurangi jumlah pemasok peralatan radio dalam rangka meningkatkan daya beli. Pada pertengahan tahun 2010, Indosat mengurangi jumlah pemasok menjadi 4 dan proses modernisasi jaringan yang sebenarnya pun dapat dimulai.

Kalimantan menjadi target utama modernisasi jaringan, yang meskipun merupakan wilayah di mana Indosat memiliki eksistensi yang kuat dalam hal BTS, namun secara bersamaan BTS-BTS tersebut juga merupakan salah satu inventori tertua yang sudah tidak mungkin untuk di-*upgrade*. Dengan demikian, wilayah Kalimantan saat ini memiliki beberapa peralatan radio BTS yang paling modern di negeri ini. Di samping itu, wilayah Jabodetabek yang di lingkungan Indosat dikenal sebagai daerah 'Segitiga Emas' juga menjadi target modernisasi.

Semua peralatan baru ini menggunakan teknologi Single RAN (*Radio Access Network*) dengan sistem SDR (*Software Defined Radio*), yang terbukti fleksibel dalam menangani standar radio seluler yang berbeda mulai dari 2G sampai 3G, Wimax dan sampai ke teknologi LTE (*Long-Term Evolution*) terbaru.

Teknologi Ramah Lingkungan

Di samping kemampuan operasional, keunggulan utama dari peralatan radio baru ini adalah kemampuannya untuk menekan penggunaan daya hingga 50%, terutama karena

panas yang dihasilkan jauh lebih rendah sehingga tidak memerlukan pendingin udara. Dengan peralatan baru yang sudah dengan sendirinya menghasilkan penghematan biaya operasional, Indosat memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Jaringan listrik PLN adalah sumber energi yang paling ekonomis untuk menara BTS seluler dan semua instalasi terkait lainnya, namun pemadaman listrik sangat sering terjadi, terutama di beberapa daerah tertentu di Indonesia. Bahkan, pemadaman listrik PLN merupakan satu-satunya penyebab dominan dari gangguan layanan BTS. Untuk itu, sebagian besar instalasi BTS dilengkapi dengan dua set diesel pembangkit listrik sebagai cadangan.

Pada tahun 2010, Indosat bereksperimen dengan mengganti salah satu set generator diesel dengan instalasi baterai, di mana pengaturan pengoperasian kombinasi antara generator set dengan baterai dilakukan dengan menggunakan *switch* CDC (*Charge-Discharge Controller*). Hal ini mengoptimalkan penggunaan baterai sebagai sumber daya alternatif dalam kondisi pemadaman PLN, sehingga sangat mengurangi kebutuhan akan penggunaan generator diesel. Hasilnya adalah penghematan bahan bakar diesel serta pengurangan karbon, sehingga lebih ramah lingkungan. Hingga kini, pengoperasian sekitar 110 menara BTS dengan solusi CDC di Medan dan Sumatera Utara telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan.

Pengembangan lain yang menarik dalam arah ini pada tahun 2010 adalah penggunaan baterai *zinc-air* untuk mengganti baterai *lead-acid* konvensional. Ini merupakan penggunaan komersial baterai *zinc-air* pertama oleh operator telekomunikasi. Indosat juga merasa bangga bahwa sebagian besar komponen dari baterai ini diproduksi di Indonesia. Penggunaan baterai *zinc-air* sangat mengurangi bahaya keracunan timah pada lingkungan karena praktik pembuangan limbah baterai *lead-acid* yang dilakukan tidak pada tempatnya.

Efisiensi Pemeliharaan dan Operasional

Karena jaringan seluler yang ada sekarang telah menjadi semakin mahal untuk dipelihara dan untuk dioperasikan, keputusan strategis untuk mengganti seluruh jaringan ini



dengan peralatan baru, termasuk yang dilengkapi dengan solusi CDC dan baterai *zinc-air*, diyakini akan menghasilkan penghematan biaya operasional yang signifikan untuk Indosat di tahun-tahun mendatang. Indosat juga mengupayakan efisiensi biaya melalui berbagai inisiatif lain pada tahun 2010. Kontrak yang ada dengan pemasok atau operator telekomunikasi lain yang terkait dengan pemeliharaan dan pengoperasion jaringan seluler ditelaah untuk melihat ruang untuk efisiensi melalui negosiasi ulang masa kerja. Kabel *copper grounding* yang digunakan pada instalasi menara diganti dengan kabel aluminium yang lebih murah. Persyaratan energi menara BTS yang diturunkan memungkinkan evaluasi ulang kapasitas set generator diesel. Secara keseluruhan, pengelompokan kembali perencanaan jaringan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan, serta fungsi kualitas jaringan dalam satu manajemen telah menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan lebih efisien.

Sistem Kabel Laut

Tahun 2010 juga menyaksikan pengembangan jaringan kabel bawah laut domestik Indosat. Pada bulan Desember 2010, Indosat telah membuat *purchase order* untuk peningkatan kapasitas sistem kabel bawah laut Jawa-Kalimantan-Sulawesi (JAKASUSI) dan untuk konstruksi sistem kabel bawah laut Jawa-Bali (JAVALI). Kapasitas dari sistem JAKASUSI akan ditingkatkan menjadi 90 Gbps sedangkan untuk link Jawa-Kalimantan dan Kalimantan-Sulawesi menjadi 60 Gbps. Sementara itu, sistem baru JAVALI yang menghubungkan Jawa Timur dan pulau Bali akan memiliki kapasitas awal 50 Gbps yang dapat ditingkatkan hingga 160 Gbps. Kedua sistem ini diharapkan untuk dapat dioperasikan pada pertengahan tahun 2011.



IP/MPLS Backbone dan Metro Ethernet Network.

Kami telah menyelesaikan proyek pemasangan jaringan Metro Ethernet di lebih dari 299 *point of presence* di Indonesia dengan konektivitas serat optik. Melalui jaringan ini, kami menyediakan *leased line virtual* yang menawarkan akses *point-to-point* Ethernet, jasa virtual private LAN yang menawarkan akses *multipoint-to-multipoint* Ethernet dan jaringan *virtual private routed* yang menawarkan IP VPN dan Internet yang terhubung secara lokal. Kami juga memakai Jaringan Metro Ethernet kami untuk melakukan *backhauling* terhadap trafik selular 2G dan 3G kami. *Dual redundant routers* untuk IP-MPLS *backbone* di 24 kota telah ditempatkan dan dihubungkan melalui *backbone* serat optik. Jaringan Metro Ethernet juga telah ditempatkan di sembilan kota besar untuk memberikan akses broadband bagi pasar korporasi di gedung-gedung pencakar langit dan *backhaul* selular untuk layanan 3.5 HSDPA. Layanan yang digunakan oleh para pelanggan kami, di antaranya adalah akses Internet, jasa penyiaran dan sambungan pusat data.

Memberikan Kualitas Layanan

Dalam hal kualitas jaringan, pada tahun 2010 Indosat berupaya untuk memastikan ketersediaan dan kinerja jaringan yang lebih baik melalui pembangunan Single Network Operation Center (SNOC). Fasilitas SNOC baru di Serpong, Banten, dibangun untuk menggantikan fasilitas lama yang terletak di Gedung Indosat di Jakarta, dan merupakan suatu peningkatan yang signifikan yang pada gilirannya akan mengintegrasikan semua fungsi kontrol pengatur transmisi dan jaringan seluler Indosat, termasuk satelit dan sistem kabel laut.

Sepanjang tahun 2010, Indosat mampu mempertahankan tingkat ketersediaan jaringan yang memuaskan, dengan penurunan yang signifikan dalam rata-rata pemadaman jaringan per bulan jika dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini terbukti, antara lain, dengan kinerja jaringan Indosat yang memuaskan selama musim Lebaran dan Natal dan Tahun Baru, yang secara umum merupakan uji coba yang sebenarnya bagi operator telekomunikasi dalam menangani permintaan layanan dan beban yang sangat meningkat di tiap-tiap musim tersebut setiap tahunnya.

Untuk mengantisipasi meningkatnya lalu lintas telekomunikasi selama musim puncak Lebaran pada tahun 2010, Indosat meningkatkan kapasitas jaringan sebesar 200% untuk SMS (*Short Message Service*) dan 120% untuk kapasitas suara. Hal ini berarti kemampuan penanganan lalu lintas SMS dan suara sebesar masing-masing 900 juta SMS dan 700 juta menit per hari. Untuk lalu lintas data, kapasitas ditingkatkan menjadi 250% atau setara dengan 100 Terabyte/hari. Selain itu, selama bulan Ramadhan tahun 2010, Indosat juga meningkatkan kapasitas hubungan dengan server RIM menjadi 1 Gbps dalam rangka menjaga kualitas layanan BlackBerry Indosat.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Indosat meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan serta menjamin keberlanjutan usaha.

Tata kelola perusahaan adalah kunci untuk menjamin keberkelanjutan bisnis. Perusahaan juga berupaya untuk senantiasa mengembangkan penerapan praktik-praktik terbaik sebagaimana yang dikembangkan oleh perusahaan dunia lainnya. Selain itu, sebagai perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya secara *dual listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan New York Stock Exchange (NYSE), Perseroan juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan pasar modal, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, termasuk Pasal 404 dari US Sarbanes-Oxley Act mengenai pengendalian internal dalam pelaporan keuangan.

Kerangka Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan yang diterapkan Indosat bertumpu pada lima pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

- **Transparansi**
  Sebagai bagian dari upaya mematuhi prinsip transparansi dan menjaga obyektivitas dalam operasi bisnis, Perusahaan berupaya untuk menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan dapat diakses oleh semua *stakeholder*.

- **Akuntabilitas**
  Perusahaan telah menetapkan kerangka kerja akuntabilitas, dimana peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan komite lainnya telah diungkapkan dengan jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi perusahaan.

- **Tanggung Jawab**
  Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam hal tanggung jawab perusahaan, Perusahaan melakukan segala hal yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

- **Independensi**
  Sejalan dengan semangat independensi, Perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong independensi setiap unit kerja, sehingga unit-unit tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu. Salah satu upaya tersebut adalah meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dalam kegiatan manajemen dan operasional, dengan memastikan bahwa berbagai pengangkatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka di dalam perusahaan.

- **Keadilan**
  Sesuai dengan prinsip keadilan, Perusahaan berupaya untuk memperlakukan semua *shareholder* secara adil. Perusahaan memastikan bahwa seluruh pemegang saham memiliki akses yang sama terhadap informasi perusahaan. Untuk menghindari terjadinya pembedaan pengungkapan informasi, maka setiap informasi yang telah diungkapkan kepada publik diunggah (*upload*) ke website Perusahaan, yakni http://www.indosat.com.

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) adalah organ Perusahaan yang memegang semua otoritas yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi sejauh yang diijinkan oleh hukum dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Forum RUPS terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pada tahun 2010, Perusahaan mengadakan RUPSLB pada 28 Januari 2010 dan RUPST pada tanggal 22 Juni 2010.

1.1. RUPSLB

RUPSLB Perusahaan diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2010 di kantor pusat Perusahaan di Jakarta. RUPSLB dipimpin oleh Sheikh Abdulla Muhammed S.A. Al Thani, Komisaris Utama Indosat dan dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya yang mewakili 92,36% dari saham disetor.

Pengumuman	Undangan	RUPSLB
29 Desember 2009 di dua surat kabar harian berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Inggris	13 Januari 2010 di dua surat kabar harian berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Inggris	28 Januari 2010

Agenda RUPSLB 28 Januari 2010

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

1.2. RUPST

RUPST Perseroan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2010 di kantor pusat Perseroan di Jakarta. RUPST dipimpin oleh Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al-Thani, Komisaris Utama Indosat dan dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya yang mewakili 93,25% dari saham disetor.

Pengumuman	Undangan	RUPST
21 Mei 2010 di dua surat kabar harian berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Inggris	7 Juni 2010 di dua surat kabar harian berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Inggris	22 Juni 2010

Agenda RUPST 22 Juni 2010

1. Menyetujui laporan tahunan dan untuk mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, serta melepaskan dan membebaskan anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab pengawasan dan anggota Direksi dari tanggung jawab manajerial untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sejauh tindakan mereka tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009, atas dasar bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan atau melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Menyetujui alokasi laba bersih untuk dana cadangan, dividen dan tujuan lain dan menyetujui penentuan jumlah, waktu dan tata cara pembayaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009.
3. Menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2010.
4. Menyetujui penunjukan Auditor Independen untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2010.
5. Menyetujui susunan Direksi untuk periode 2010-2015.

2. DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan. Wilayah pengawasan meliputi; rencana perluasan usaha, pelaksanaan anggaran dan rencana kerja tahunan Perusahaan, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham, pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta hukum dan peraturan. Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perusahaan dan melaporkannya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Komposisi Dewan Komisaris

Sejak 8 Februari 2011, susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani, Komisaris Utama
- Dr. Nasser Mohd. A. Marafih, Komisaris
- Richard Farnsworth Seney, Komisaris
- Rachmat Gobel, Komisaris
- Rionald Silaban, Komisaris
- Parikesit Suprapto, Komisaris
- Alexander Rusli, Komisaris Independen
- Soeprapto S.I.P, Komisaris Independen
- George Thia Peng Heok, Komisaris Independen
- Chris Kanter, Komisaris Independen

Parikesit Suprapto menggantikan Jarman per tanggal 8 Februari 2011.

Rapat Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengadakan 5 (lima) kali pertemuan dengan Direksi sepanjang tahun 2010, dalam rangka memantau perkembangan Perusahaan dan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Catatan kehadiran Komisaris individu pada pertemuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran/ Rapat
1.	Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani	5 / 5
2.	Dr. Nasser Mohd. A. Marafih	5 / 5
3.	Richard Farnsworth Seney	5 / 5
4.	Rachmat Gobel	5 / 5
5.	Jarman	5 / 5
6.	Rionald Silaban	5 / 5
7.	Alexander Rusli	5 / 5
8.	Soeprapto S.I.P	4 / 5
9.	Chris Kanter	5 / 5
10.	George Thia Peng Heok	5 / 5

Laporan Kegiatan Dewan Komisaris 2010

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan konsultasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, selama tahun buku 2010 Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Menelaah dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dan Anggaran tahun 2010 yang diusulkan oleh Direksi;
2. Memantau dan memberikan saran terhadap kinerja Direksi dalam melaksanakan Anggaran dan Rencana Kerja untuk tahun 2010 yang telah disetujui;
3. Menelaah dan menyetujui Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dan Anggaran untuk 2011 yang diusulkan oleh Direksi;
4. Menelaah dan menyetujui rencana pembiayaan hutang Perusahaan;
5. Menelaah dan menyetujui remunerasi Direksi untuk tahun 2010 berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi;
6. Memberi rekomendasi untuk RUPS atas penunjukan akuntan publik untuk memeriksa kondisi keuangan Perusahaan untuk dilaporkan kepada pemegang saham Perusahaan; dan

7. Menelaah dan menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan dan 20-F Perusahaan untuk diserahkan kepada otoritas pasar modal terkait dan bursa saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

Pelatihan untuk Dewan Komisaris

Selama tahun 2010 tidak ada pelatihan untuk Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi dibayar pada tahun 2010.
Detail dari jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris pada tahun 2010 tersaji dalam tabel berikut:

	2010 (Rp)		
	Semester 1	Semester 2	Total
Honor	2.910.137.040	2.898.265.020	5.808.402.060
Tunjangan/Biaya Komite	2.216.353.040	1.364.250.000	3.580.603.040
Insentif Jangka Panjang/RSUP 2009	1.638.776.000	1.420.341.000	3.059.117.000
Akhir Masa Tugas	1.104.100.008	–	1.104.100.008
Total	**7.869.366.088**	**5.682.856.020**	**13.552.222.108**

3. DIREKSI

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan operasional sehari-hari, di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk seorang President Director. Para anggota Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS, dengan ketentuan bahwa salah satu anggota Direksi harus dinominasikan oleh pemegang saham seri A.

Sebagai bagian dari upaya memastikan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

a. membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal;
b. mengadakan perjanjian, melakukan komitmen untuk, mengubah dan/atau mengakhiri perjanjian atau kerja sama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
c. membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan seluruh atau sebagian dari kegiatan usaha, hak atau aset tetap atau aset lain milik Perusahaan (termasuk seluruh kepentingan yang ada);
d. tidak menagih lagi dan menghapuskan piutang dari pembukuan serta persediaan barang;
e. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) atau dengan cara apapun sehingga Perusahaan menjadi bertanggung jawab terhadap hutang pihak lain, baik berdasarkan perjanjian untuk mengambil-alih hutang pihak lain, memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran di muka atau pinjaman untuk membayar lunas hutang pihak lain;
f. menerima atau memberikan atau melakukan komitmen untuk memberikan pinjaman jangka waktu menengah/panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku);
g. melakukan pembelian barang modal dalam 1 (satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
h. menerbitkan obligasi atau efek lain yang bisa dikonversi menjadi saham;
i. mengusulkan pengeluaran saham baru Perusahaan;
j. memberikan "indemnity" (ganti kerugian) kepada atau memberikan jaminan atas kewajiban suatu pihak;

k. menentukan dan/atau mengubah struktur manajemen Perusahaan;
l. membuat rencana bisnis baru atau mengubah rencana bisnis;
m. mengubah praktik dan sistem akuntansi, keuangan atau pajak di Perusahaan atau anak perusahaannya;
n. mengubah nama Perusahaan;
o. menyetujui laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham dalam RUPS;
p. menentukan anggaran tahunan Perusahaan dan anggaran tahunan anak perusahaannya;
q. melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perusahaan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal;
r. mendirikan anak perusahaan atau menyetujui pelepasan atau pengurangan kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap anak perusahaan atau mengambilalih saham di perusahaan lain atau melepaskan saham di perusahaan lain;
s. melakukan setiap tindakan korporasi atau investasi terkait dengan anak perusahaan;
t. menggunakan hak sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, atau pada perusahaan lain dimana Perusahaan mempunyai penyertaan saham;
u. menyetujui pembayaran bonus atau pembayaran yang sejenis kepada karyawan Perusahaan atau mengubah struktur remunerasi karyawan;
v. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
w. menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva dan kewajiban pembayaran (*asset liability management*) Perusahaan;
x. menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan menandatangani yang menyangkut transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian dan penjualan aktiva, pinjaman dan komitmen-komitmen lainnya;
y. mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, yang memiliki nilai mana yang lebih kecil dari 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh pendapatan, atau 2,5% (dua koma lima persen) atau lebih dari aktiva tidak lancar Perseroan yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah diaudit.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk menetapkan batasan nilai berkaitan dengan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a sampai dengan 4 huruf h, 4 huruf j dan 4 huruf u Pasal ini dan berhak untuk mengubah batasan nilai tersebut dari waktu ke waktu. Apabila tindakan-tindakan tersebut masih tercakup dalam batasan nilai, maka persetujuan dari Dewan Komisaris tidak diperlukan.

Komposisi Direksi

Pada tanggal 20 April 2011, komposisi keanggotaan Direksi adalah sebagai berikut:

- Harry Sasongko Tirtotjondro, President Director & CEO
- Peter Wladyslaw Kuncewicz, Director & CFO
- Fadzri Sentosa, Director & CWIO
- Hans Christiaan Moritz, Director & CTO
- Laszlo Imre Barta, Director & CCO

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2011, pemegang saham telah memberhentikan Stephen Edward Hobbs per tanggal 30 April 2011 dan menunjuk Hans Christiaan Moritz sebagai Direktur sejak 1 Mei 2011.

Rapat dan Kehadiran

Jumlah Rapat Direksi pada tahun 2010 adalah 43 kali. Tingkat kehadiran Direksi selama tahun 2010:

Sebelum 1 Mei 2010

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran/ Rapat
Harry Sasongko Tirtotjondro	President Director & CEO	15/16
Kaizad B. Heerjee	Director & CCO	14/16
Peter Wladyslaw Kuncewicz	Director & CFO	15/16
Fadzri Sentosa	Director & CWIO	14/16
Stephen Edward Hobbs	Director & CTO	11/16

Setelah 1 Mei 2010

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran/ Rapat
Harry Sasongko Tirtotjondro	President Director & CEO	24/27
Peter Wladyslaw Kuncewicz	Director & CFO	20/27
Fadzri Sentosa	Director & CWIO	21/27
Lazlo Imre Barta	Director & CCO	25/27
Stephen Edward Hobbs	Director & CTO	21/27

Pelatihan bagi Direksi

Seluruh anggota Direksi dan Chief Officers bersama-sama menghadiri Pelatihan Lintas Budaya dan Pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

- Pelatihan Lintas Budaya dilakukan 1 hari pada tanggal 7 Oktober 2010 di kantor pusat Perusahaan di Jakarta oleh Lembaga pelaksana Srikandi Mukti Indonesia (pelatih Sri M. Hagen).
- Pelatihan GCG dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010 di kantor pusat Perusahaan di Jakarta oleh Wahyuni Bahar/Dewie Pelitawati dari Bahar & Partner dan Matthew Sheridan dari Sidley Austin LLP.

Remunerasi bagi Direksi

Jumlah Remunerasi yang Dibayarkan Pada Tahun 2010. Detail dari jumlah bersih remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi pada tahun 2010 disajikan dalam tabel berikut:

4. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Untuk membantu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk sejumlah komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Anggaran.

Laporan dari setiap Komite disajikan di bagian akhir dari bab Tata Kelola Perusahaan ini.

5. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

5.1. Komite Komersial dan Harga

Tanggung Jawab

Tanggung jawab utama dari Komite adalah memastikan bahwa kinerja komersial Indosat secara keseluruhan adalah selaras dengan tujuan-tujuan strategis dan keuangan Perusahaan.

Kegiatan di Tahun 2010

Mengadakan 30 kali pertemuan.

5.2. Komite Investasi

Tanggung Jawab

Menelaah secara rinci kasus bisnis terkait rencana Operasional dan Belanja Modal yang membutuhkan persetujuan Direksi, sesuai dengan Tingkat Otoritas Keuangan Indosat saat ini.

	2010 (Rp)		
	Semester 1	Semester 2	Total
Gaji Dasar	6.780.000.000	6.780.000.000	13.560.000.000
Tunjangan Tetap	3.239.666.675	3.163.000.008	6.402.666.683
Awal Masa Tugas	–	–	–
Akhir Masa Tugas	2.297.333.334	–	2.297.333.334
Insentif Jangka Pendek/Tantiem 2009	2.457.298.700	–	2.457.298.700
Insentif Jangka Panjang/RSUP 2009	450.000.000	815.048.000	1.265.048.000
Total	**15.224.298.709**	**10.758.048.008**	**25.982.346.717**

Kegiatan di Tahun 2010
Mengadakan 11 kali pertemuan.

5.3. Komite Sumber Daya Manusia

Tanggung Jawab
Menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan mengembangkan karyawan yang berkualitas tinggi serta memberikan kontribusi kepada Perseroan.

Kegiatan di Tahun 2010
Mengadakan 6 kali pertemuan.

5.4. Komite Keterbukaan Informasi

Tanggung Jawab
Bertanggung jawab untuk mempelajari materialitas informasi dan menentukan kewajiban pengungkapan perusahaan secara tepat waktu, serta memastikan semua pengungkapan materi Perseroan adalah akurat, diproses, dan dilaporkan tepat waktu.

Kegiatan di Tahun 2010
Mengadakan 5 kali pertemuan.
Materi-materi informasi yang telah ditelaah:

No	Materi Informasi	Tanggal Diumumkan
	Laporan Tahunan	
1	Laporan Tahunan Glossy 2009	1 Juni 2010
2	Form 20-F, Laporan Tahunan 2009	1 Juni 2010
3	International Financial Reporting Standards, Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2009	1 Juni 2010
4	Laporan Berkelanjutan 2009	1 Juni 2010
	Laporan Keuangan	
5	Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2009	24 Maret 2010
6	Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan *Review* Akuntan Independen Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2010	24 Agustus 2010
7	Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2009 dan 2010 (Tidak Diaudit)	29 Oktober 2010
	Siaran Pers	
8	Ikhtisar Penting PT Indosat Tbk untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009	8 Maret 2010
9	Siaran Pers Tahunan 2009 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	24 Maret 2010
10	Investor Memo Tahunan 2009	26 Maret 2010
11	Ikhtisar Penting untuk Periode 3 Bulanan yang Berakhir 31 Maret 2010	22 April 2010
12	Laporan Keuangan Konsolidasi Q1-2010	10 Mei 2010
13	Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan *Review* Auditor Independen Tiga Bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009	10 Mei 2010
14	Indosat Menunda Penerbitan Investor Information Memorandum Q1-2011	27 Mei 2010
15	Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Perpanjangan Lebih Lanjut dari Tanggal Kadaluarsa untuk Persetujuan Consent Solicitation	8 Juni 2010
16	Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Perpanjangan Lebih Lanjut dari Tanggal Kadaluarsa untuk Persetujuan Consent Solicitation	30 Juni 2010
17	Indosat Mengumumkan Penyesuaian Jumlah Pelanggan	22 Juli 2010

No	Materi Informasi	Tanggal Diumumkan
18	Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Penundaan Tanggal Penerimaan Consent Solicitation	26 Juli 2010
19	Indosat Sukses Menerbitkan Obligasi-10 Tahun Senilai US$650 Juta, Penawaran Terbesar dari Perusahaan Indonesia Tahun Ini	Juli 2010
20	Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Hasil Akhir dari Consent Solicitation	31 Juli 2010
21	Indosat Melaporkan Ikhtisar Penting untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010	16 Agustus 2010
22	PT Indosat Tbk dan Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Pembelian Kembali Secara Penuh 7,75% Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010	20 Agustus 2010
23	Indosat Mengumumkan Hasil Penelaahan Terbatas Atas Periode yang Berakhir 30 Juni 2010	24 Agustus 2010
24	Investor Memo Q1 & H1 -2010	25 Agustus 2010
25	Ikhtisar Penting PT Indosat Tbk untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2010	21 Oktober 2010
26	Indosat Melakukan Pelunasan Pokok dan Bunga Obligasi III Seri B Tahun 2003	25 Oktober 2010
27	Penyampaian Laporan Keuangan Tidak Diaudit untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir 30 September 2010	29 Oktober 2010
28	Investor Memo untuk Periode Sembilan Bulan Tahun 2010	1 November 2010
	Pengumuman	
29	Pengumuman Tender Offer	12 Mei 2010
30	Draft Iklan untuk Dimuat di Surat Kabar tentang Moody's Rating	11 Maret 2010
31	Undangan RUPST Indosat Tangal 22 Juni 2010	7 Juni 2010
	Lain-lain	
32	Laporan Kinerja Satelit Palapa C2 dan Satelit D	15 Januari 2010
33	Laporan Kinerja Operasional 2009	11 Mei 2010

6. PENGENDALIAN INTERNAL

6.1. Grup Enterprise Risk Management

Tanggung jawab Enterprise Risk Management (ERM) Group adalah untuk menilai, menganalisis, dan memetakan risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan Perseroan, berdasarkan kebijakan manajemen risiko Perseroan. Pedoman dan peta risiko dimaksudkan untuk mengarahkan unit yang rawan-risiko dalam menerapkan manajemen risiko dalam operasi mereka. ERM Grup mendukung Direksi dengan mengkomunikasikannya kepada semua unit bisnis untuk memastikan pemahaman manajemen risiko yang konsisten dari seluruh Perusahaan. Grup terdiri dari 3 (tiga) divisi yang menangani keuangan dan pembangunan, teknis dan operasi, serta komersial.

Perseroan memiliki profil risiko dan melakukan penilaian secara berkala. Direksi melaporkan penilaian terhadap risiko secara triwulanan kepada Komite Manajemen Risiko. Sampai akhir tahun 2010, Perusahaan telah mengidentifikasikan berbagai risiko yang material yang berkaitan dengan strategi, operasi dan faktor eksternal.

Profil risiko digunakan sebagai pedoman bagi Grup Internal Audit untuk merencanakan dan melaksanakan program internal audit.

6.2. Grup Internal Audit

Grup Internal Audit (IA) dibentuk untuk memberi nasihat profesional kepada Direksi dan Komite Audit serta menjadi katalis untuk semua unit kerja dan perusahaan secara keseluruhan. IA bertanggung jawab untuk menyajikan nasehat audit secara independen serta menjamin kecukupan dan efektivitas manajemen risiko Perusahaan, pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas auditnya, Grup IA mengacu pada Standar Praktik Profesional Audit Internal yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors ("IIA") dan Piagam IA, serta peraturan-peraturan dari Bapepam dan Securities and Exchange Commission (SEC). Piagam IA terdiri dari Visi & Misi IA, Persyaratan Anggota, Lingkup Kerja, Kebutuhan Independensi & Pelaporan, Otoritas dan Tanggung Jawab IA, Standar Profesi, Hubungan Kerja dengan Komite Audit dan Auditor Eksternal, Mekanisme, Kode Etik, dan pengaturan penggantian, penunjukan atau pemberhentian Kepala IA. Piagam IA ditinjau dan diperbarui secara berkala. Piagam IA terbaru ditandatangani oleh President Director & CEO pada tanggal 8 September 2010 setelah disetujui oleh Komite Audit, Direksi dan Dewan Komisaris.

Group Head IA melaporkan hasil-hasil Audit kepada President Director & CEO dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan ke Direktur dan pimpinan grup terkait (jika diperlukan). IA juga berkoordinasi dengan Enterprise Risk Management (ERM) dan SOX (Sarbanes-oxley) Grup untuk memfasilitasi identifikasi risiko dan pengendalian; memastikan bahwa risiko telah dievaluasi dan pengendalian telah dijalankan dengan baik untuk meminimalisir risiko, mengevaluasi pelaporan risiko kunci dan pengendalian.

Dengan Informasi & Teknologi (TI) sebagai pendukung utama operasional Perseroan, IA telah mengembangkan divisinya dengan menambah Divisi IT Audit sejak Triwulan 4 tahun 2010 untuk menjalankan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh Divisi Bisnis. Pada tanggal 31 Desember 2010, struktur Grup IA terdiri dari 7 (tujuh) divisi, sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan & Dukungan Audit
2. Divisi Audit Bisnis
3. Divisi IT Audit
4. Divisi Operasi Teknik Audit
5. Divisi Regional & Dukungan Audit
6. Divisi Audit Investigasi Penipuan
7. Divisi Jaminan Kualitas

Selama tahun 2010, Grup IA melakukan 48 kali audit, terdiri dari audit reguler dan monitoring, dengan menggunakan Metodologi Audit berbasis risiko.

Grup IA dengan dukungan dari Presiden Direktur & CEO, Komite Audit dan Senior Manajemen terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Upaya signifikan terakhir adalah peningkatan Standar Operasional Prosedur dan Rencana Strategis (Roadmap 3-tahun) IA yang selesai pada Triwulan ke-4 tahun 2010.

Profil Group Head IA

Hanna Sitorus ditunjuk menjadi Group Head IA sejak Januari 2010. Ibu Sitorus memiliki pengalaman lebih dari 11 tahun dalam fungsi audit, termasuk audit eksternal dan internal. Ibu Sitorus sebelumnya bekerja di Kantor Akuntan terkemuka di dunia, PricewaterhouseCoopers, berlokasi di Indonesia dan Amerika Serikat (Negara Bagian Colorado dan California). Sebelumnya, beliau juga memberikan kontribusi dalam fungsi Audit Internal Bursa Efek Indonesia (BEI) selama hampir 2 tahun. Ibu Sitorus memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia dan memegang gelar Certified Public Accounting Indonesia. Saat ini, beliau adalah anggota dari Ikatan Internal Auditor (IIA) - Chapter Indonesia.

6.3. SOX Group

Karena Indosat juga mencatatkan sahamnya di New York Stock Exchange (NYSE), maka Perseroan mempunyai kewajiban untuk mematuhi Sarbanes-oxley Act (SOA), khususnya Pasal 404 dan 302. Menurut Undang-Undang, Manajemen wajib untuk menilai, menguji, mendokumentasikan dan melaporkan efektivitas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Internal Control over Financial Reporting/ICFR). Selanjutnya, Manajemen Indosat juga harus melaporkan setiap kekurangan material. Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Financial Officer (CFO) wajib untuk mengesahkan laporan pengendalian internal.

Grup SOX bertanggung jawab dalam membantu CEO dan CFO dalam mengelola kepatuhan Perseroan terhadap SOX. Grup SOX bertugas mengembangkan dan mendokumentasikan proses identifikasi Risiko Misstatement pada Laporan Keuangan, memberikan penilaian terhadap pengukuran dan pengendalian. Grup SOX berkoordinasi dengan unit bisnis, Enterprise Risk Management (Group ERM) dan Grup Internal Audit dalam melaksanakan hal-hal terkait. Selain itu, SOX Grup melakukan Uji Efektivitas (TOE) pada kontrol-kontrol kunci yang teridentifikasi yang dapat menekan risiko utama pada Mistatement Laporan Keuangan. Grup SOX berkoordinasi dengan unit bisnis dalam melakukan remediasi atas kelemahan yang berhasil diidentifikasi.

Proses dan dokumentasi kepatuhan SOX telah dilakukan untuk per tanggal 31 Desember 2010. Tidak ditemukan adanya kelemahan yang material dalam ICFR yang harus dilaporkan.

Kepatuhan dengan Pasal 404 Sarbanes-oxley Act

Perseroan berhasil melaksanakan ketentuan Pasal 404 dari Sarbanes-oxley Act 2002 (SOX) tentang Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan. Perseroan melaporkan bahwa Indosat telah mematuhi ketentuan Pasal 404 SOX secara penuh, sebagaimana yang disyaratkan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2010, menjadikan Indosat sebagai salah satu Perusahaan Indonesia pertama yang mematuhi ketentuan SOX.

Auditor Independen, Purwantono, Suherman & Surja, anggota dari Ernst & Young Global, telah melakukan pengesahan dan membuat laporan akhir tentang kepatuhan SOX Indosat, yang terlampir dalam Laporan Tahunan Indosat 2010 Form 20-F halaman F-3:

"Menurut pendapat kami, PT Indosat Tbk dan anak perusahaannya menjaga, dalam semua hal yang material, pengendalian internal yang efektif terhadap pelaporan keuangan per tanggal 31 Desember 2010, berdasarkan kriteria COSO."

6.4. Auditor Independen

Auditor Independen ditunjuk oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dalam RUPST tanggal 22 Juni 2010, pemegang saham menyetujui penunjukkan Purwantono, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global) sebagai Auditor Independen Indosat untuk tahun 2010. Pemegang Saham selanjutnya memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan syarat dan kondisi pengangkatan.

Untuk menjaga independensi Auditor Eksternal, melalui kebijakan rekrutmennya Indosat dilarang merekrut karyawan, mantan karyawan, atau kerabat dekat karyawan Auditor Eksternal. Penyediaan layanan non-audit oleh Auditor Independen untuk Indosat juga diatur. Selain itu, perekrutan mantan karyawan perusahaan audit independen harus melalui "cooling off period" atau "window period" sebelum dapat diterima untuk bekerja di Indosat, terutama untuk posisi-posisi tertentu. Kebijakan ini ditujukan untuk memenuhi peraturan Bapepam-LK No VIII A.2 dan Pasal 206 dari Sarbanes-Oxley Act.

Tabel berikut berisi ringkasan dari honorarium yang dibayarkan kepada Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, anggota Ernst & Young Global di Indonesia, eksternal auditor independen Indosat untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 dan 2009, serta honor yang dibayarkan kepada Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global di Indonesia, eksternal auditor independen Indosat untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010:

	2008	2009	2010
		(US$)	
Biaya Audit	1.963.307	2.330.298	2.287.934
Biaya Terkait Audit	953.962	1.279.708	1.543.584
Biaya Pajak	–	–	–
Biaya Lain	–	–	–
Total	**2.917.269**	**3.610.006**	**3.831.518**

6.5. Kantor Akuntan Publik

Dewan Komisaris selanjutnya diberikan kewenangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, serta pilihan alternatif bila Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk alasan apapun, tunduk kepada aturan yang berlaku dan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian.

7. PROSES PERKARA HUKUM

Dari waktu ke waktu, kami terlibat di dalam proses perkara hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan bisnis Perusahaan. Saat ini, kami tidak terlibat, dan belum terlibat di dalam, proses perkara pengadilan ataupun arbitrase yang menurut kami dapat memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan atau hasil usaha kami selain dari yang telah diungkapkan di dalam laporan tahunan ini.

Pada tanggal 5 Mei 2004, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung No. 1610K/PDT/2003 yang memenangkan Primer Koperasi Pegawai Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata (dikenal sebagai Primkopparseni), berkenaan dengan perselisihan transaksi valuta asing. Putusan Mahkamah Agung mengharuskan kami untuk membayar Rp13,7 miliar ditambah 6,0% bunga per tahun sejak tanggal 16 Februari 1998 sampai dengan tanggal pelunasan dan pada tanggal 22 Desember 2004, Perusahaan telah memenuhi putusan dengan melakukan pembayaran sebesar Rp19,3 miliar kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk menutup pengeluaran yang telah dibayarkan kepada Primkopparseni, Perusahaan kemudian mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut bahwa rapat anggota Primkopparseni dimana di dalamnya para anggota memutuskan untuk memperkarakan Perusahaan adalah tidak sah. Pada tanggal 19 Januari 2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa rapat anggota tersebut adalah tidak sah, tetapi tidak mewajibkan Primkopparseni untuk memberikan kompensasi kepada Perusahaan, telah mendorong Perusahaan dan Primkopparseni untuk mengajukan banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 1 Februari 2005. Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusannya No. 483/PDT/2005/PT.DKI memenangkan kami dengan mengeluarkan putusan bahwa rapat tersebut tidak sah, tetapi di sisi lain, tidak mewajibkan Primkopparseni untuk memberikan kompensasi kepada kami. Kami dan Primkopparseni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memohon ganti rugi atas biaya hukum dan atas pencemaran nama baik kami, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan kami pada tanggal 13 Agustus 2008 melalui putusannya No. 229/K/PDT/2008. Dikarenakan kami tidak mengambil tindakan hukum lebih lanjut terkait dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Schedule TO yang diajukan oleh Qtel tertanggal 20 Januari 2009 dan disampaikan kepada SEC pada tanggal 20 Januari 2009, pada 19 November 2007, KPPU memutuskan dan menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("Temasek"), bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. ("ST Telemedia"), STT, Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd. ("AMHC"), AMH, ICLM, ICLS, Singapore Telecomunications Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("Singtel"), dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("SingTel Mobile") telah melanggar hukum persaingan usaha Indonesia dan menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan STT, AMHC, AMH, ICLM, ICLS dan SingTel ("Entitas Afiliasi Temasek") untuk melepaskan kepemilikan sahamnya di Telkomsel atau Indosat dalam waktu dua tahun, efektif sejak tanggal putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hukum persaingan usaha Indonesia menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50,0% (lima puluh persen) pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu. Temasek dan para pihak lainnya yang terkait telah mengajukan banding atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan dan membenarkan keputusan KPPU, dan menghukum Temasek dan Entitas Afiliasi Temasek untuk melepaskan kepemilikannya di Telkomsel atau Indosat dalam jangka waktu dua belas

bulan setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 10 September 2008, Mahkamah Agung menolak kasasi dan membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi sebagai berikut: (1) menyatakan Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang No.5/1999; (2) menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek untuk menghentikan kepemilikan silang saham mereka di Telkomsel dan Indosat dengan mengalihkan sahamnya di Telkomsel atau Indosat, dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau mengurangi 50,0% kepemilikan sahamnya di masing-masing Telkomsel dan Indosat tidak lebih dari dua belas bulan dari tanggal keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; (3) menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek untuk menetapkan perusahaan dimana mereka akan melepaskan saham-saham tersebut dan melepaskan hak suara dan hak-hak untuk mengangkat direktur dan komisaris baik di Telkomsel maupun Indosat sampai dengan dilakukannya pelepasan seluruh saham yang dimilikinya atau dilakukannya penurunan kepemilikan saham sampai dengan 50,0% saham mereka di masing-masing Telkomsel dan Indosat sebagaimana disebutkan dalam butir 2 di atas. Pada 22 Juni 2008, Qtel membeli semua 40,81% kepemilikan saham Entitas Afiliasi Temasek yang ada di Indosat. Temasek dan Entitas Afiliasi Temasek mengajukan usul untuk mempertimbangkan kembali, tetapi berdasarkan website resmi Mahkamah Agung, usul untuk mempertimbangkan kembali tersebut ditolak berdasarkan putusan No. Reg. 128 PK/PDT.SUS/2009 tertanggal 5 Mei 2010. Dengan demikian, Temasek dan Entitas Afiliasi Temasek berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp15 miliar kepada KPPU.

Runtutan gugatan class action juga diajukan terhadap kami dan Telkomsel di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang sehubungan dengan kepemilikan silang saham Temasek sebelumnya di Indosat dan Telkomsel, yang dituduh mengakibatkan penetapan harga jasa telekomunikasi yang tinggi yang merugikan masyarakat. Pada tanggal 31 Oktober 2007, sekelompok pelanggan telepon seluler di Indonesia mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri di Bekasi menuntut di antaranya ganti rugi sebesar Rp1.231,7 miliar sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Kami juga menjadi pihak tergugat dalam class action yang sama yang diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2007 ("Class Action Tangerang"). Penggugat mewakili para pelanggan kami dan pelanggan dari Telkomsel dan XL di seluruh Indonesia yang menggunakan jasa-jasa Simpati, Mentari, Kartu As, IM3, Kartu Halo, Matrix, Jempol, Xplor dan Bebas dan menuntut kompensasi di antaranya sebesar Rp30.808,7 miliar. Pada tanggal 22 April 2008 kami menerima pemberitahuan bahwa kami, Temasek Holdings, ST Telemedia, STT, AMH, ICLM, ICLS. SingTel, SingTel Mobile, Telkomsel, Telkom dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah menjadi tergugat dalam gugatan class action yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"). Para penggugat mewakili pelanggan Telkomsel, Indosat dan XL dan telah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan class action di Tangerang. Para penggugat meminta di antaranya kompensasi sampai dengan Rp30.808,7 miliar. Pada Juli 2008, kami memperoleh pemberitahuan bahwa gugatan class action di Pengadilan Negeri Bekasi telah dicabut oleh Penggugat dan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah digabungkan dengan Class Action Tangerang. Gugatan class action di Pengadilan Negeri Tangerang ditunda dengan putusan penundaan hakim, dikarenakan menunggu putusan banding ke Mahkamah Agung oleh Penggugat dari gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 27 Maret 2009, kami memperoleh informasi bahwa Mahkamah Agung pada tanggal 21 Januari 2009 telah mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan gugatan class action. Pada tanggal 22 Desember 2009, Indosat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menyebutkan bahwa selama tidak ada bukti yang menunjukkan kerugian pelanggan selama jangka waktu kepemilikan STT. Di waktu yang sama, Indosat juga mempersiapkan eksepsi atas ketidakwenangan wakil dari perwakilan kelompok dan juga jawaban atas gugatan. Pada tanggal 5 Januari 2010, para tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi sehubungan dengan legal standing dari wakil kelompok berdasarkan ketentuan hukum acara gugatan perwakilan kelompok. Pada tanggal 27 Januari 2010, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Class action Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima dan memerintahkan para penggugat dan tergugat untuk

menghentikan kasus dikarenakan (i) penggugat menolak untuk membuktikan legal standing mereka dan (ii) dua anggota dari penggugat kolektif tidak memenuhi kualifikasi sebagai wakil dalam gugatan perwakilan kelompok. Jangka waktu untuk mengajukan banding telah lewat sejak tanggal 18 Maret 2010, keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2010 telah menjadi putusan akhir dan mengikat.

Pada tanggal 22 Maret 2010, sidang Class Action Tangerang berlanjut, namun para penggugat tidak hadir. Pada tanggal 3 Mei 2010, Perusahaan mengajukan eksepsi dan pada tanggal 24 Mei 2010 majelis hakim memutuskan bahwa gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima karena ketidakseriusan penggugat dalam mengajukan gugatan dan penggugat juga gagal untuk membuktikan pemenuhan syarat sebagai perwakilan dari Class Action. Dikarenakan batas waktu untuk mengajukan banding telah lewat sejak tanggal 21 Juli 2010, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 24 Mei 2010 menjadi berkekuatan hukum tetap.

Selain yang telah disebutkan diatas, kami telah menerima surat dari KPPU No. 398/AK/KTPP/XI/2007, tanggal 15 November 2007 sehubungan dengan kemungkinan pelanggaran atas Pasal 5 dari Undang-Undang No. 5/1999 tentang penetapan harga SMS yang dilakukan oleh operator telekomunikasi (pokok perkara nomor 26/KPPU-L/2007). Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa hanya Telkom, Telkomsel, XL, Bakrie Telecom, Mobile-8 dan Smart Telecom yang secara bersama melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5/ 1999. Telkomsel mengajukan keberatan dari putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sementara Mobile-8 mengajukan keberatan dari putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana XL, Telkomsel, Indosat, Telkom, Hutchison, Bakrie Telecom, Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler dipanggil sebagai turut termohon.

Pada pemeriksaan pajak terhadap pembayaran pajak kami untuk tahun 2004 dan 2005 oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara ("KPP BUMN"), pada tanggal 4 Desember 2006 dan 27 Maret 2007, kami diberitahu bahwa pemotongan pajak penghasilan untuk bunga pinjaman antar perusahaan (intercompany loans) yang dibayarkan kepada Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. sehubungan dengan Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2010 Perusahaan dengan jumlah pokok sebesar US$300,0 juta dan Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2012 dengan jumlah pokok sebesar US$250,0 juta adalah 20,0%, bukan 10,0%. Berdasarkan opini dari Penasihat Pajak kami dan pemahaman kami atas hukum Indonesia, kami berpendapat bahwa perhitungan kami pertama kali atas pemotongan pajak adalah benar dan kami telah mengajukan keberatan kepada KPP BUMN terhadap pemeriksaan tersebut. Pada tanggal 18 Februari 2008 dan 4 Juni 2008, kami menerima surat dari Direktorat Pajak yang menolak keberatan kami terhadap pembayaran pajak tahun 2004 dan 2005, masing-masing sebesar Rp60.493 juta dan Rp82.126 juta. Pada tanggal 14 Mei 2008, kami mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak tentang keberatan Perusahaan terhadap revisi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2004. Pada tanggal 2 Mei 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menolak keberatan Perusahaan terhadap revisi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun 2004. Perusahaan membebankan pembetulan pajak ke dalam usaha periode berjalan, yang ditunjukkan sebagai bagian dari "Pendapatan (beban) lain-lain – Lain-Lain – Bersih".

Kami juga mempermasalahkan kelebihan pembayaran pajak untuk tahun buku 2005 kepada Kantor Pajak. Pada tanggal 27 Maret 2007, kami menerima surat dari Kantor Pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyetujui pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan di tahun 2005 sebesar Rp135.766 juta dimana jumlah tersebut lebih rendah daripada Rp176.645 juta yang kami ketahui. Kami mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak pada tanggal 22 Juni 2007 dan menggugat adanya perbedaan jumlah yang bernilai sampai Rp40.879 juta. Pada tanggal 27 Mei 2008, kami menerima surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menerima sebagian keberatan kami, tetapi hanya berjumlah sampai Rp2.725 juta. Pada tanggal 21 Agustus 2008, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai keberatan Perusahaan atas sisa revisi pajak penghasilan badan tahun 2005. Pada tanggal 29 Oktober 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menerima keberatas Perusahaan terhadap revisi pajak penghasilan badan untuk tahun 2005 sebesar Rp38.155 juta, yang dikompensasikan dengan kurang bayar pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun 2008 dan 2009 berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang diterima oleh Perusahaan pada tanggal 17 September 2010.

Pada tanggal 24 Desember 2008, kami menerima surat kelebihan pembayaran pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atas fiskal untuk tahun 2004 dengan jumlah sebesar Rp84.650 juta, dimana jumlah tersebut lebih rendah daripada jumlah yang dinyatakan dalam surat keputusan sebelumnya yang kami terima pada tanggal 4 Juli 2008. Pada tanggal 21 Januari 2009, kami telah mengajukan banding terhadap perbedaan jumlah kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2004. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 17 November 2009, Pengadilan Pajak telah membatalkan Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-539/WPJ.19/BD.05/2008, tanggal 24 Desember 2008. Pada tanggal 17 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan putusan yang mendukung kedudukan Perusahaan, yang memberitahukan bahwa kelebihan bayar pajak untuk fiskal tahun 2004 seharusnya sebesar Rp126.403 juta bukanlah Rp84.650, yang mana memberikan hak kepada Perusahaan untuk mendapatkan pengembalian dari perbedaan jumlah tersebut, dengan jumlah yang bernilai sampai Rp41.753 juta. Selanjutnya Perusahaan menerima pembayaran dari pengembalian kelebihan bayar pajak sebesar Rp41.753 juta dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 13 April 2010.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari DGT untuk pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002 sebesar Rp105.809 juta (termasuk denda dan bunga). Perusahaan menerima suatu bagian dari revisi terhadap pajak penghasilan badan tahun 2002 sebesar Rp2.646 juta yang dibebankan ke dalam usaha periode berjalan tahun 2009. Berdasarkan Hukum Perpajakan Indonesia, wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak kurang bayar dengan jumlah sebagaimana dicantumkan dalam SKPKB dalam waktu satu bulan sejak tanggal SKPKB. Wajib pajak dapat menuntut kembali pajak yang dibayarkan melalui proses keberatan atau banding. Pada tanggal 28 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak mengenai sisa revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun 2002. Pada tanggal 15 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-357/WPJ.19/BD.05/2010 dari DGT yang menolak keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002. Pada tanggal 14 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002. Sampai dengan tanggal 20 April 2011, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait surat banding tersebut.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan juga menerima SKPKB dari DGT untuk pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003, masing-masing sebesar Rp51.546 juta dan Rp40.307 juta (termasuk denda dan bunga). Pada tanggal 27 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Pada tanggal 16 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-367/WPJ.19/BD.05/2010 dan KEP-368/WPJ.19/BD.05/2010 dari DGT yang menolak keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Pada tanggal 12 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Sampai dengan tanggal 20 April 2011, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait surat banding tersebut.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan menerima SKPKB dari DJP atas pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 4 ayat (2), dan PPN Satelindo untuk tahun pajak 2002 dan 2003 sejumlah Rp28.960 juta (termasuk denda dan bunga), yang dibebankan pada usaha tahun berjalan pada tahun 2009 sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) lain-lain - Lain-lain - Bersih".

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan menerima SKPKB dari DJP atas pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2003 sebesar Rp30.870 juta (termasuk bunga), yang dibebankan pada usaha tahun berjalan pada tahun 2009 sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) lain-lain - Lain-lain - Bersih".

Pada tanggal 7 Juli 2009, Perusahaan membayar semua SKPKB yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak dari pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), 21, 23 dan 26, dan PPN Satelindo untuk tahun pajak 2002 dan 2003 sejumlah Rp257.492 juta.

Pada tanggal 7 September 2009, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-335/WPJ.19/BD.05/2009 dari DGT yang menolak keberatan Perusahaan atas sisa revisi pajak penghasilan badan untuk tahun 2006. Pada tanggal 2 Desember 2009, Perseroan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai sisa revisi pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun 2006. Sampai

dengan tanggal 10 Februari 2011, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Pengadilan Pajak atas banding tersebut.

Pada tanggal 17 September 2010, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak dari DGT atas pajak kurang bayar untuk pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp80.018 juta (termasuk bunga). Pada tanggal 13 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat pembatalan kepada Kantor Pajak mengenai Surat Tagihan Pajak tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 16 November 2010, Perusahaan diwajibkan untuk membayar suatu bagian tertentu dari Surat Tagihan Pajak ini dengan menggunakan tuntutan kelebihan bayar pajak yang telah disetujui atas Pajak Penghasilan Perusahaan untuk tahun pajak 2005 sebesar Rp38.155 juta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, terdapat sisa sebesar Rp41.863 juta yang belum dibayar.

Kami tidak terlibat dalam perkara-perkara material lainnya, termasuk perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ataupun perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan secara material.

8. KODE ETIK

Indosat menerbitkan panduan Kode Etik bagi seluruh karyawan dan manajemen termasuk Direksi. Kode Etik merangkum prinsip-prinsip perilaku yang bertanggung jawab yang harus dipatuhi semua staf.

Berdasarkan Kode Etik, semua kegiatan usaha harus dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Kode Etik secara tegas melarang benturan kepentingan, melangar hukum dan perilaku tidak etis, *insider trading* dan tindakan lainnya yang dapat merugikan Perusahaan dan pemegang saham.

Setiap karyawan diwajibkan menandatangani surat tahunan yang menyatakan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik tersebut. Direksi dan karyawan Indosat diharap memahami dan mematuhi kebijakan yang digariskan dalam Kode Etik. Setiap Direktur atau pegawai yang terbukti secara sah telah melanggar Kode Etik akan dikenakan sangsi disiplin, sampai dengan dan termasuk pemutusan hubungan kerja.

Perseroan telah mengeluarkan 'Panduan Pelaksanaan Kode Etik PT Indosat Tbk ' pada tanggal 20 November 2010 sebagai sosialisasi dan penyegaran Keputusan Direksi atas Kode Etik No 002/DIREKSI/2007. Kode Etik ini berlaku untuk semua karyawan, termasuk Direksi. Kode Etik ini juga terdapat di website perseroan www.indosat.com, yang dapat diakses oleh publik.

8.1. Kebijakan Whistleblower

Kebijakan Whistleblower melindungi pihak eksternal atau internal yang ingin menyampaikan kekhawatiran atau keluhan kepada Komite Audit, yang berkaitan dengan adanya ketidakwajaran atau ketidakakuratan laporan keuangan, siaran pers, informasi yang diungkapkan secara publik, Kode Etik, akuntansi, pengendalian internal, audit atau material lainnya.

Prosedur rinci untuk mengajukan pengaduan terdapat di www.indosat.com, atau melalui email di auditcom@indosat.com atau infoGCG@indosat.com.

8.2. Perjanjian Kerja Bersama

Serikat Pekerja Indosat (SPI) didirikan pada tanggal 25 Agustus 1999. Secara historis, dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) telah melalui proses negosiasi, disetujui dan ditandatangani oleh Manajemen Indosat dan SPI untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Pada tanggal 31 Desember 2010, SPI menandatangani perjanjian dengan Manajemen Indosat, yang meliputi ketentuan umum yang mengatur jam kerja, gaji, perkembangan karyawan, kesehatan, Keamanan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), kesejahteraan karyawan, tunjangan sosial, prosedur disiplin dan mekanisme penyelesaian sengketa. Beberapa karyawan berhak untuk skema pensiun dimana mereka akan menerima pembayaran dan tunjangan bulanan melalui PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

9. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan berfungsi untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan secara transparan dan tepat waktu bagi masyarakat, sesuai dengan pedoman yang diberikan pihak berwenang dan dengan prosedur pengungkapan yang ditentukan sendiri.

Group Head Corporate Secretary, yang bertanggungjawab kepada Chief Corporate Services Officer, langsung di

bawah President Director dan Chief Executive Officer, memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan informasi material untuk mematuhi peraturan dan menjaga transparansi Perusahaan.

Sejak Maret 2004, posisi Group Head Corporate Secretary dijabat oleh Strasfiatri Auliana.

Strasfiatri Auliana memulai karirnya di Indosat pada tahun 1987. Lulusan Teknik Electronika Institut Teknologi Bandung ini ditunjuk menjadi Group Head Corporate Secretary Indosat sejak tahun 2004. Sepanjang perjalanan karirnya, yang lebih dari dua dekade, beliau telah memegang berbagai posisi senior di Indosat dan saat ini juga menjabat sebagai Group Head Enterprise Risk Management (ERM) (ERM). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Ahli untuk Ketua Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN).

Akses Informasi

Untuk lebih informasi Perseroan, silakan hubungi kami di:
Grup Sekretaris Perusahaan
PT Indosat Tbk
Tel.: 62-21 386 9614
Fax.: 62-21 3000 3754
E-mail: publicrelations@indosat.com

Atau kunjungi situs kami di www.indosat.com

9.1. Korespondensi dengan Bapepam-LK

No	Materi Informasi	Tanggal Diumumkan
1	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi VII Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009	11 Januari 2010
2	Penyampaian Iklan Panggilan RUPSLB	13 Januari 2010
3	Laporan Pengangkatan Group Head Internal Audit	13 Januari 2010
4	Rilis "RUPSLB Indosat Menyetujui Perubahan Susunan Dekom dan Direktur Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan - Indosat Melaporkan Jumlah Pelanggan Pada Akhir 2009 Sebesar 33,1 Juta"	29 Januari 2010
5	Penyampaian Iklan Hasil RUPSLB	1 Februari 2010
6	Rilis "PT Indosat Tbk : Ikhtisar Utama Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2009"	8 Maret 2010
7	Pemberitahuan Peringkat Baru Dari Moody's Investor Service	11 Maret 2010
8	Penyampaian Bukti Iklan Pemeringkatan PT Indosat Tbk.	12 Maret 2010
9	Rilis "Indosat Menyampaikan Laporan Keuangan Periode Yang Berakhir 31 Desember 2009"	24 Maret 2010
10	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Auditor Independen Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008	24 Maret 2010
11	Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 (Telah diaudit)	25 Maret 2010
12	Memo Investor Kinerja Tahun 2009	29 Maret 2010
13	Rencana Penyusunan Laporan Tahunan PT Indosat Tbk Tahun Buku 2009	4 April 2010
14	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Indosat VII Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009	8 April 2010
15	Rilis "PT Indosat Tbk : Ikhtisar Utama Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Maret 2010	22 April 2010
16	Penyampaian Laporan Konsolidasi Beserta Laporan Review Akuntan Independen Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009	10 Mei 2010

No	Materi Informasi	Tanggal Diumumkan
17	Rilis "Indosat Menyampaikan Pencapaian Periode Yang Berakhir 31 Maret 2010 Dengan Penelaahan Terbatas"	10 Mei 2010
18	Rilis "PT Indosat Tbk, Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. Mengumumkan Dimulainya Pelaksanaan Penawaran Tender Tunai dan Permohonan Persetujuan"	12 Mei 2010
19	Rilis "Indosat Palapa Company B.V. Memulai Penawaran 144A/REG S"	12 Mei 2010
20	Penyelenggaraan RUPST	14 Mei 2010
21	Keterbukaan Informasi	25 Mei 2010
22	Rilis "Indosat Menunda Penyampaian Memorandum Informasi Investor Perusahaan Periode TW1 2010"	27 Mei 2010
23	Penyampaian Laporan Tahunan	1 Juni 2010
24	Penyampaian Iklan Panggilan RUPST	7 Juni 2010
25	Keterbukaan Informasi	8 Juni 2010
26	Penyampaian Hasil Rapat dan Bukti Iklan RUPST	24 Juni 2010
27	Keterbukaan Informasi	30 Juni 2010
28	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Indosat VII Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009	7 Juli 2010
29	Keterbukaan Informasi	26 Juli 2010
30	Keterbukaan Informasi	31 Juli 2010
31	Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2"); (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1"); dan (iii) Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 ("Peraturan X.K.1")	2 Agustus 2010
32	Keterbukaan Informasi	3 Agustus 2010
33	Rilis "Indosat Melaporkan Ikhtisar Utama Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2010"	16 Agustus 2010
34	Rilis "PT Indosat Tbk dan Indosat Finance Company B.V. Mengumumkan Telah Dilunasinya Seluruh 7,75% Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2010"	20 Agustus 2010
35	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi Beserta Laporan Review Akuntan Independen Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2010 (direview) Dengan Angka Perbandingan Tahun 2009 (diaudit) dan Rilis : Indosat Menyampaikan Hasil Penelaahan Terbatas Periode Yang Berakhir 30 Juni 2010	24 Agustus 2010
36	Bukti Iklan Neraca Konsolidasi, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi PT Indosat Tbk dan Anak Perusahaan Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2010 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2009	25 Agustus 2010

No	Materi Informasi	Tanggal Diumumkan
37	Kinerja Triwulan Pertama dan Semester Pertama 2010 Investor Memo	25 Agustus 2010
38	Rilis "PT Indosat Tbk dan Indosat International Finance Company B.V. Mengumumkan Telah Dilunasinya Seluruh 7,125% Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2012"	6 September 2010
39	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Indosat VII Tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009	6 Oktober 2010
40	Penyampaian Bukti Iklan Pemeringkatan PT Indosat Tbk. dan Rilis "Pefindo Menegaskan Kembali Peringkat Indosat AA+ Stabil"	7 Oktober 2010
41	Rilis "PT Indosat Tbk : Ikhtisar Utama Untuk Periode Yang Berakhir Pada 30 September 2010"	21 Oktober 2010
42	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Pelunasan Obligasi Indosat III Seri B Tahun 2003	25 Oktober 2010
43	Rilis "Indosat Melunasi Pokok dan Bunga Obligasi Indosat III Seri B Tahun 2003"	25 Oktober 2010
44	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009 (tidak diaudit)	29 Oktober 2010
45	Rilis "Indosat Menyampaikan Laporan Keuangan Tidak Diaudit Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir 30 September 2010"	29 Oktober 2010
46	Kinerja Sembilan Bulan Tahun 2010 Investor Memo	1 November 2010

10. Pengungkapan Informasi Relevan

Berikut ini adalah beberapa informasi relevan yang mungkin diminta atau dibutuhkan oleh Pemangku Kepentingan Perseroan, termasuk lembaga yang berwenang mengatur dan Pemerintah.

10.1. Pengungkapan yang Wajar untuk Pemegang Saham

Perseroan selalu memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham, dimana setiap pemegang saham memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi material terbaru. Untuk menghindari terjadinya pembedaan pengungkapan informasi, seluruh informasi yang telah diungkapkan ke publik ditempatkan ke dalam website Indosat di http://www.indosat.com.

Untuk memastikan bahwa seluruh pemegang saham menerima informasi yang sama, sejak tahun 2007, Indosat telah melampirkan pula Form 20-F yang diserahkan kepada SEC AS dalam Laporan Tahunannya. Kedua laporan tersebut dilaporkan ke otoritas pasar modal Indonesia dan AS.

10.2. Pembatasan Insider Trading

Untuk menghindari adanya *insider trading*, Perseroan menerapkan kebijakan "Trading Window" setiap tiga bulan. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan konsep bahwa periode setelah pengungkapan laba perusahaan triwulanan adalah waktu aman bagi orang dalam untuk melakukan perdagangan saham perusahaan. Periode Trading Window dibuka dua hari kerja setelah pengumumah pencapaian triwulanan perusahaan dan ditutup 10 hari kerja setelah itu. Tujuan dari interval dua hari adalah untuk memberi waktu bagi pasar untuk bereaksi dan untuk mencerna informasi tersebut.

10.3. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Sebagai perusahaan telekomunikasi, Indosat senantiasa mematuhi Hukum dan UU Telekomunikasi terkait lainnya, yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Semua pelaporan, sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundangan bagi penyedia telekomunikasi, seperti RFR (Laporan Keuangan Regulator), QoS (Quality of Service), TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dan LKO (Lembar Kinerja Operasional) telah dilakukan sesuai dengan parameter dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Hal yang sama berlaku untuk Lisensi Radio untuk seluruh sistem radio yang digunakan oleh Indosat, yang dilakukan untuk mendukung jaringan operasional Indosat dari 18.108 BTS sampai dengan 31 Desember 2010.

10.4. Kepatuhan atas Ketentuan

Berdasarkan perjanjian kredit, perjanjian pinjaman dan/atau perjanjian perwaliamanatan, Perseroan mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Perseroan menyetujui beberapa ketentuan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Rupiah, termasuk, namun tidak terbatas pada, menyetujui untuk mempertahankan modal sendiri sedikitnya Rp5.000 milyar; rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5:1, sebagaimana dilaporkan dalam setiap Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian; rasio hutang terhadap ekuitas 2,5:1, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tiga bulanan, dan rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap laporan keuangan tahunan konsolidasi minimal 3,0:1.

10.5. Perubahan Anggaran Dasar

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyesuaikan Anggaran Dasar, Indosat telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk mengubah pasal Anggaran Dasar pada tanggal 11 Juni 2009.

Prinsip perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, rapat umum pemegang saham, kuorum, tugas dan wewenang Direksi, transaksi benturan kepentingan, merger, konsolidasi, akuisisi dan demerger, perubahan anggaran dasar, pembubaran, kebangkrutan, dan likuidasi. Pada tanggal 28 Januari 2010, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, antara lain: maksud, tujuan dan kegiatan usaha, kuorum, resolusi dan hak suara pada rapat umum pemegang saham dan konflik kepentingan.

10.6. Perangkapan Jabatan

Untuk menjaga independensi dan mencegah benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Indosat wajib menginformasikan kepada Perseroan mengenai jabatan/peran kepemimpinan pada perusahaan atau organisasi lain. Namun, diharapkan perangkapan jabatan oleh Komisaris dan Direksi di luar Indosat tidak akan menghalangi atau mengikat mereka dalam melaksanakan tugas mereka terhadap Perseroan.

10.7. Kepemilikan Saham Orang Dalam

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Indosat wajib mengungkapkan dan mengkonfirmasikan kepemilikan saham mereka di Indosat, termasuk kepemilikan saham di Indosat oleh anggota keluarga dekat. Pengungkapan ini dicatat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Rincian kepemilikan saham Indosat pada tahun 2010 didasarkan pada konfirmasi yang diberikan oleh anggota Direksi, yakni Fadzri Sentosa sejumlah 10.000 saham.

11. CAKUPAN KOMUNIKASI

Pada tahun 2010, Indosat aktif menjangkau para pemangku kepentingannya melalui berbagai media. Untuk memastikan bahwa para investor, pemangku kepentingan dan masyarakat senantiasa memperoleh informasi terkini mengenai kinerja dan aktivitas perusahaan, Indosat menggunakan beragam media komunikasi seperti website perseroan www.indosat.com, fact-sheet, buletin investor triwulanan, siaran perusahaan, surat menyurat, direct call, pertemuan dan konferensi pers.

Group Investor Relations, yang bertanggungjawab kepada Director & Chief Financial Officer, secara proaktif terus berupaya untuk menjangkau komunitas finansial, dalam rangka menjaga reputasi Indosat dalam hal transparansi dan pengungkapan. Setelah penyampaian laporan rutin keuangan triwulan kepada Bapepam-LK dan US-SEC, Indosat menyelenggarakan conference calls dengan para analis, investor dan lainnya untuk membahas kinerja Perseroan dan industri secara umum melalui sesi tanya jawab yang mendalam. Conference calls tersebut direkam

dan diupload di situs web perusahaan, sehingga pemegang saham dan investor yang tidak mengikuti conference calls dapat mengaksesnya.

Pada tahun 2010, kami mengadakan 3 kali conference calls triwulanan untuk analis dan investor, dilakukan kepada investor dalam *global non-deal roadshow*, menghadiri pertemuan dan konferensi dengan komunitas keuangan di beberapa kota seperti Singapura, Hong Kong, New York, Dubai dan Frankfurt.

Perseroan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang masuk melalui telepon dan e-mail, serta kunjungan dan telepon dari investor dan analis. Perseroan selalu memantau dan mengkomunikasikan rating kredit dan rating perusahaannya kepada investor dan publik secara tepat waktu melalui publikasi di surat kabar dan website. Untuk mengetahui rating Perseroan per tanggal 31 Desember 2010, silakan melihat di bagian Modal di Laporan Tahunan ini.

Perseroan terus mengumpulkan umpan balik dan kritik untuk bisa memperbaiki layanannya. Berbagai upaya nyata telah dilakukan oleh Perseroan untuk mencapai tingkat transparansi yang diinginkan, termasuk memperbaiki Laporan Tahunan ini dan berkomunikasi dengan semua departemen di Indosat untuk memastikan bahwa semua informasi material yang mereka miliki segera disalurkan pada pihak yang terkait.

11.1. Paparan Publik

Paparan Publik Tahunan Indosat 2010 diselenggarakan di kantor Indosat, Lantai 4, Jl. Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, pada tanggal 22 Juni 2010, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan BEI No 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010. Paparan Publik Tahunan ini berjalan dengan baik dan dihadiri oleh 44 peserta, sebagian besar adalah masyarakat dan perwakilan dari perusahaan sekuritas.

11.2. Komunikasi Internal

Perseroan berupaya untuk menerapkan pendekatan manajemen terbuka di perusahaan. Struktur perusahaan disusun dengan urutan sebagai berikut: dari Divisi ke Grup dan akhirnya ke Direktorat (terbesar). Setiap Grup mengadakan rapat mingguan untuk membahas kegiatan operasional. Pada skala yang lebih besar, diselenggarakan rapat direktorat yang diketuai oleh masing-masing direktur dan dihadiri oleh staf senior. Selain itu, rapat manajemen yang melibatkan seluruh Group Head dan Divisi diadakan minimal sekali setiap tiga bulan. Rapat pimpinan diadakan setahun sekali untuk semua Group Head dan Divisi untuk membahas rencana kerja tahunan Perusahaan.

Perusahaan juga menyelenggarakan forum triwulanan bagi Direksi dan karyawan untuk membahas berbagai perkembangan yang signifikan. Forum-forum tersebut dihadiri oleh seluruh karyawan, termasuk yang berada di kantor cabang dengan menggunakan video-conference. Para direktur secara bergantian mengunjungi kegiatan Indosat di berbagai daerah, untuk memotivasi staf dan berkomunikasi dengan mereka tentang tujuan dan target Perusahaan, perkembangan yang bersifat material dan hal-hal terkait lainnya. Semua inisiatif ini memungkinkan adanya dialog antara manajemen dan karyawan, dan juga memberi karyawan kesempatan untuk menyampaikan masukan konstruktif kepada Perusahaan.

Semua informasi, kebijakan dan kegiatan Perseroan dapat diakses secara online melalui portal 'MyIndosat'. Beberapa menu dan aplikasi portal tersedia untuk karyawan, termasuk 'I-policy' - sebuah bank data elektronik untuk semua kebijakan perusahaan, dan Peraturan Telekomunikasi, Pengetahuan Produk, dan, 'MyValues' fitur yang membantu karyawan menyegarkan kembali pengetahuan mereka tentang Nilai-Nilai Perusahaan. Berita-berita yang terkait dengan Indosat dan penyedia telekomunikasi lainnya juga tersedia di portal ini. Karyawan juga dapat mengakses fasilitas *e-learning* di portal MyIndosat untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ice Cube adalah menu baru di fasilitas *e-learning* yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menuangkan ide-ide inovatif mereka.

Perseroan juga membuat 'MyInfo', aplikasi yang memungkinkan setiap karyawan untuk meng-upload data pribadi seperti curriculum vitae dan permohonan cuti tahunan, dan untuk mengakses sistem apprasial secara elektronik, dan fungsi-fungsi lainnya. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi standar tertinggi dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Setiap bulan, perusahaan menerbitkan CEO Message yang didistribusikan kepada seluruh karyawan. Saluran komunikasi ini berisi semua informasi yang berkaitan dengan inisiatif terbaru perusahaan, arahan dan pencapaian target perusahaan. Perusahaan juga menyelenggarakan beberapa acara rutin seperti acara Temu karyawan, Peringatan Hari Kemerdekaan, Buka Puasa Bersama, Halal Bihalal, Donor Darah dan Ulang Tahun Perusahaan. Perusahaan secara berkala menyelenggarakan acara informal seperti makan siang dan coffee break bersama karyawan sebagai penghargaan terhadap karyawan berprestasi dan untuk mendapatkan masukan konstruktif dari mereka. Perusahaan juga mengoptimalkan saluran komunikasi internal yang lain seperti *wallpaper* di komputer dan materi cetak lainnya seperti poster dan *banner up* untuk menyampaikan informasi yang diperlukan.

LAPORAN KOMITE AUDIT

Latar Belakang

Komite Audit PT Indosat Tbk menjalankan fungsinya berdasarkan piagam tertulis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Mei 2003, dan yang telah dikaji ulang secara periodik dan telah beberapa kali disesuaikan kembali. Perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2009.

Piagam Komite Audit disusun berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), US Securities Exchange Commission (US SEC), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan New York Stock Exchange (NYSE).

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi Komite Audit terutama membantu Dewan Komisaris dalam tanggung jawab pengawasannya untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Pasar Modal baik domestik maupun di Amerika Serikat. Secara khusus, Komite Audit bertanggung jawab mengawasi penyajian laporan keuangan Perseroan, proses pelaporan keuangan, proses audit oleh Internal Audit maupun auditor eksternal, serta kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bekerja sama erat dengan Manajemen termasuk Direksi, Grup Risk Management dan terutama grup Implementasi Sarbanes-oxley (SOX Group), Internal Audit dan auditor eksternal.

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari:

Nama	Jabatan
George Thia Peng Heok	Ketua dan Komisaris Independen
Soeprapto S.I.P	Anggota dan Komisaris Independen
Chris Kanter	Anggota dan Komisaris Independen
Kanaka Puradiredja	Anggota dan Pihak Ahli Independen
USM Tampubolon	Anggota dan Pihak Ahli Independen

Chris Kanter ditunjuk sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 29 Januari 2010 menggantikan Michael F. Latimer yang mengundurkan diri.

Memenuhi persyaratan Bapepam-LK dan NYSE, George Thia Peng Heok dan Kanaka Puradiredja merupakan ahli di bidang keuangan.

Komite Audit mengadakan enam kali rapat sepanjang tahun 2010. Kehadiran masing-masing anggota dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran/ Rapat
George Thia Peng Heok	6/6
Soeprapto S.I.P	5/6
Chris Kanter	3/5
Kanaka Puradiredja	4/6
USM Tampubolon	6/6
Michael F. Latimer	1/1

Sesuai yang diatur dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit telah membentuk fungsi Audit Committee Working Group (ACWG) untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit.

ACWG terdiri dari 2 (dua) anggota independen Komite Audit dan 2 (dua) advisor independen. Sepanjang tahun 2010, ACWG mengadakan 25 kali rapat.

Setelah melakukan tugas-tugasnya dan mengkaji surat representasi dari Manajemen dan dari Auditor Eksternal, Komite Audit menyampaikan laporannya sebagai berikut:

Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan konsolidasi 2010 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan 2010 telah diaudit oleh Purwantono Suherman & Surja (PSS), anggota afiliasi Ernst & Young Global Limited, yang dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2011 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi 2010 Perseroan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk memenuhi persyaratan pelaporan US SEC, sejak tahun 2009, Perseroan juga telah menyiapkan laporan keuangan berdasarkan International Financial Reporting Standards (IFRS), sebagai ganti pengungkapan dalam bentuk rekonsiliasi terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat.

   Komite Audit telah mengkaji laporan keuangan konsolidasi tahun 2010 bersama-sama dengan pihak Manajemen dan PSS, termasuk hal-hal yang terkait dengan Sarbanes-oxley Act 2002 Section 204, yaitu kebijakan akuntansi penting, estimasi dan penilaian yang signifikan, perlakuan akuntansi alternatif, risiko

dalam pelaporan keuangan, serta penyesuaian audit yang signifikan.

Komite Audit tidak menemukan adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan konsolidasi, dan berpendapat bahwa seluruh penyesuaian audit yang material sebagaimana diusulkan oleh PSS telah diakomodasi dalam laporan keuangan konsolidasi 2010.

Pengendalian Internal

2. Berdasarkan informasi dari sistem whistle blower yang dibentuk oleh Komite Audit serta jawaban atas pertanyaan kepada Manajemen, Komite Audit tidak menemukan adanya kejadian kecurangan yang berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan konsolidasi 2010.

3. Komite Audit telah menilai proses pengendalian atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Manajemen sebagai mana difasilitasi oleh Group SOX sehubungan dengan persyaratan SOX 404, dan menyimpulkan bahwa Perseroan telah melakukan pengendalian internal yang efektif terhadap pelaporan keuangan dalam tiap aspek yang material.

   Patut disampaikan bahwa terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan oleh PSS dan bahwa Komite Audit telah meminta Manajemen untuk menindak-lanjutinya.

Auditor Eksternal

4. Komite Audit telah mengkaji independensi PSS sebagai auditor eksternal Perseroan, dan menyimpulkan bahwa PSS merupakan pihak independen untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010.

   PSS tidak melakukan penugasan lain yang termasuk jasa-jasa yang tidak diperbolehkan sesuai peraturan Bapepam dan LK dan US SEC.

Internal Audit

5. Sehubungan dengan aspek Internal Audit, Komite Audit mencatat adanya upaya-upaya berkelanjutan oleh Komite untuk memperbaiki aktivitas dan kinerja Internal Audit, termasuk pelaksanaan petunjuk dan acuan yang diberikan oleh Komite Audit. Salah satu upaya tersebut adalah diselesaikannya rencana transformasi Internal Audit, dengan bantuan konsultan PT PriceWaterhouseCoopers Indonesia Advisory (member of PriceWaterhouseCoopers Global), untuk diterapkan di tahun 2011.

Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

6. Komite Audit telah berkonsultasi dengan Manajemen dan PSS terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik Manajemen maupun PSS telah menyatakan bahwa tidak ada ketidak-patuhan yang diamati, dan oleh karenanya, Komite Audit berpendapat bahwa sejauh yang diketahui, tidak terdapat ketidak-patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Paket Remunerasi

7. Salah satu tanggung jawab Komite Audit adalah untuk mengkaji paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

   Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PSS atas perintah Komite Audit, disimpulkan bahwa paket remunerasi tahun 2010 untuk Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Juni 2010, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Tahunan ini.

Catatan
Riwayat Hidup anggota Komite Audit dapat dilihat di Profil Dewan Komisaris dan di Bab Data Perusahaan.



George Thia Peng Heok
Ketua Komite Audit

LAPORAN KOMITE ANGGARAN

Komite Anggaran membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas-tugas pengawasan dan advisori dengan mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait rencana strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (termasuk rencana Belanja Modal) Perseroan.

Sejak tanggal 28 Januari 2010, Komite Anggaran terdiri dari Dr. Nasser Mohammed Marafih sebagai ketua dan George Thia Peng Heok, Jarman dan Richard F. Seney sebagai Anggota.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 8 Februari 2011 telah menyetujui komposisi keanggotaan Dewan Komisaris, sehingga keanggotaan Komite Anggaran saat ini adalah Dr. Nasser Mohammed Marafih sebagai ketua, George Thia Peng Heok dan Richard F. Seney sebagai anggota.

Komite Anggaran mengadakan lima kali rapat pada tahun 2010. Daftar hadir Komisaris pada rapat-rapat Komite Anggaran disajikan di bawah ini:

Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat
Dr. Nasser Mohammed Marafih	5
George Thia Peng Heok	5
Jarman	5
Richard F. Seney	5

Aktivitas

Komite Anggran telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aktivitas utama Komite Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Kerja dan Anggaran 2010 yang diusulkan oleh Direksi; dan

2. Mengawasi pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran 2010 yang telah disetujui. Beberapa rencana strategis yang dibahas adalah 3G Second carrier, BWA Wimax, Bisnis Tower, Bisnis Satelit, Program Efisiensi Biaya dan Strategi CDMA.



Dr. Nasser Mohammed Marafih
Ketua Komite Anggaran

LAPORAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan penilaian risiko dan pengelolaan risiko serta dalam mengkaji kecukupan, kelengkapan dan efektivitas penerapan proses-proses manajemen risiko yag dilakukan Perseroan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan yang dirasakan perlu, kepada Dewan Komisaris.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari empat orang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari kalangan Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal 7 Februari 2011, keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari Rachmat Gobel sebagai Ketua, Jarman sebagai Anggota, Rionald Silaban sebagai Anggota, dan George Thia Peng Heok sebagai Anggota. Sejak tanggal 8 Februari 2011, setelah perubahan pada komposisi Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari Rachmat Gobel sebagai Ketua, Rionald Silaban sebagai Anggota, dan George Thia Peng Heok sebagai Anggota.

Komite Manajemen Risiko mengadakan tiga kali rapat pada tahun 2010. Di bawah ini adalah daftar kehadiran Komisaris pada rapat-rapat Komite Manajemen Risiko pada tahun 2010:

Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat
Rachmat Gobel	2
Jarman	2
Rionald Silaban	3
George Thia Peng Heok	3

Aktivitas

Komite Manajemen Risiko telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aktivitas utama yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Melakukan kajian atas Roadmap dan Rencana Kerja Enterprise Risk Management; dan

2. Melakukan kajian dan pemantauan atas Profil Risiko Utama Perusahaan tahun 2010 serta upaya-upaya mitigasi yang dilakukan Manajemen terhadap faktor-faktor risiko utama.



Rachmat Gobel
Ketua Komite Manajemen Risiko

LAPORAN KOMITE REMUNERASI

Komite Remunerasi bertanggung jawab memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi, bonus dan tunjangan bagi Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan lain maupun mengenai struktur, ketentuan dan penerapan skema insentif jangka panjang bagi Direksi.

Keanggotaan Komite Remunerasi terdiri dari sedikitnya tiga orang, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari kalangan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Januari 2010, keanggotaan Komite Remunerasi terdiri dari Dr. Nasser Mohammed Marafih sebagai Ketua, Michael Latimer serta Soeprapto S.I.P. sebagai Anggota. Setelah pengunduran diri Michael Latimer pada RUPSLB, Alexander Rusli ditunjuk sebagai Anggota pada tanggal
29 Januari 2010. Apabila dirasakan perlu, Komite Remunerasi berhak memperoleh bantuan profesional dari pihak ekternal untuk memberikan pandangan terhadap praktik-praktik remunerasi dan *talent management*.

Komite Remunerasi mengadakan lima kali rapat pada tahun 2010. Di bawah ini adalah daftar hadir Komisaris pada rapat-rapat Komite Remunerasi selama tahun berjalan:

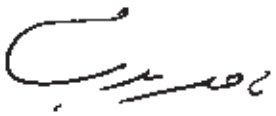
Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat
Dr. Nasser Mohammed Marafih	5
Soeprapto S.I.P	4
Alexander Rusli	5

Aktivitas

Komite remunerasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini adalah aktivitas utama Komite Remunerasi pada tahun 2010:

1. Mengkaji dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai struktur dan paket remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2010;
2. Mengkaji dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai struktur dan paket remunerasi (termasuk gaji, bonus dan insentif jangka panjang) bagi Direksi untuk tahun 2010;
3. Mengkaji dan merekomendaiskan kepada Dewan Komisaris mengenai Bonus Prestasi bagi Direksi untuk tahun 2009;
4. Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Remunerasi bagi Karyawan; dan
5. Berdasarkan pendelegasian wewenang dari Dewan Komisaris, mengkaji dan menyetujui perubahan terhadap struktur organisasi.



Dr. Nasser Mohammed Marafih
Ketua Komite Remunerasi





FAKTOR-FAKTOR RISIKO

FAKTOR-FAKTOR RISIKO

Risiko-Risiko yang berkaitan dengan Indonesia

Kami didirikan di Indonesia dan sebagian besar bisnis, aset dan pelanggan kami berada di Indonesia. Oleh karena itu, kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial di Indonesia di masa mendatang, serta tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin, atau mungkin tidak diambil atau diadopsi oleh Pemerintah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan tahun 1997 telah mempengaruhi Indonesia, antara lain, terjadinya depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi bisnis di Indonesia, termasuk memberikan dampak yang negatif bagi kualitas dan pertumbuhan basis pelanggan dan pemberian layanan kami, yang bergantung pada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, krisis ekonomi telah mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya. Banyak perusahaan Indonesia yang masih belum benar-benar pulih dari krisis ekonomi, dan masih dalam proses restrukturisasi hutang mereka atau terlibat dalam sengketa yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi atas kewajiban hutang tersebut. Krisis keuangan global yang sebagian dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat telah menyebabkan runtuhnya beberapa lembaga keuangan besar di negara tersebut dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Krisis ini mengakibatkan kegagalan pada beberapa bank Eropa dan menurunnya indeks saham di berbagai bursa efek, dan rontoknya harga pasar saham dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari melemahnya ekonomi dunia telah mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga dan melemahnya investasi karena hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya risiko akibat ketidakpastian ekonomi dunia. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak negatif pada bisnis dan konsumen Indonesia, dan dapat berakibat pada menurunnya permintaan jasa telekomunikasi.

Gejolak harga minyak dan kemungkinan berkurangnya persediaan makanan dapat pula menyebabkan penurunan perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia.

Penurunan tingkat perekonomian Indonesia dapat pula menyebabkan timbulnya wanprestasi oleh para debitur-debitur Indonesia dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kegiatan bisnis, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasional dan prospek kami. Pemerintah terus mengalami defisit fiskal dalam jumlah besar dan hutang luar negeri yang tinggi. Cadangan mata uang asing Pemerintah dalam jumlah yang rendah dan melemahnya sektor perbankan yang diakibatkan oleh tingginya kredit macet. Tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia juga dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan yang dibelanjakan oleh konsumen atau menyebabkan berkurangnya daya beli konsumen, yang dapat mengurangi permintaan untuk jasa telekomunikasi, termasuk jasa kami.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan di pasar yang sedang berkembang dan juga pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk memburuknya keadaan ekonomi global, dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada pasar uang Indonesia dan penurunan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Ketidakstabilan yang meningkat atau pertumbuhan yang menurun atau negatif dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Ketidakstabilan politik dan sosial dapat memberikan dampak negatif bagi Perusahaan

Sejak tahun 1998, Indonesia mengalami proses perubahan tatanan demokrasi yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa politik dan sosial yang menimbulkan ketidakpastian pada kerangka politik Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini mengakibatkan ketidakstabilan politik dan juga beberapa kerusuhan sosial dan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara demokrasi yang masih cukup baru, Indonesia masih menghadapi berbagai macam masalah sosiopolitik dan dari waktu ke waktu telah mengalami ketidakstabilan politik dan keresahan sosial politik.

Sejak tahun 2000, ribuan rakyat Indonesia berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia lainnya baik untuk mendukung maupun melawan Mantan Presiden Wahid, Mantan Presiden Megawati, dan Presiden Yudhoyono, serta untuk menanggapi berbagai isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi minyak, privatisasi aset-aset negara, kebijakan anti-korupsi, bail-out PT Bank Century pada tahun 2008, desentralisasi dan otonomi daerah dan kampanye militer Amerika di Afghanistan dan Irak.

Pada bulan Juni 2001, rangkaian demonstrasi dan mogok kerja mewarnai sekurang- kurangnya 19 kota setelah Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar sebesar 30,0%.

Demonstrasi serupa juga terjadi pada bulan Januari 2003 ketika Pemerintah kembali berupaya menaikkan harga bahan bakar, tarif listrik dan tarif telepon. Di dalam kedua peristiwa ini, Pemerintah terpaksa menangguhkan atau benar-benar menurunkan tingkat kenaikan tarif yang direncanakan. Pada bulan Maret 2005, Pemerintah memberlakukan kenaikan harga minyak sebesar sekitar 29,0%. Pada bulan Oktober 2005, Pemerintah memberhentikan subsidi minyak pada jenis premium dan minyak tanah serta mengurangi subsidi pada solar, yang mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar. Sebagai tanggapan, beberapa protes massa dilakukan untuk melawan kenaikan harga minyak domestik tersebut, dan tekanan politik akibat dari keputusan Pemerintah. Pada bulan Mei 2008, Pemerintah kembali mengurangi subsidi minyak kepada masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya demonstrasi. Walaupun demonstrasi-demonstrasi ini pada dasarnya dilakukan secara damai, beberapa berakhir dengan kekerasan. Kami tidak dapat memastikan bahwa situasi ini tidak akan berlanjut pada instabilitas politik dan sosial.

Ketidakstabilan politik regional dan pertikaian antara kelompok agama dan etnis tetap menjadi masalah. Gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok agama dan etnis telah berakibat pada keresahan sosial dan sipil di beberapa tempat di Indonesia. Di provinsi Aceh dan Papua (sebelumnya Irian Jaya), telah terjadi bentrokan antara pendukung gerakan separatis dan satuan militer Indonesia, walaupun hanya ada sedikit konflik di Aceh sejak ditandatanganinya Memo Kesepakatan pada bulan Agustus 2005. Pada bulan April 2006 beratus-ratus orang terlibat dalam aksi protes yang berujung pada kekerasan terhadap pengoperasian tambang emas Freeport di provinsi Papua. Dalam tahun-tahun terakhir, ketidakstabilan politik di Maluku dan Poso, sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, telah meningkat dan bentrokan-bentrokan antara kelompok-kelompok agama di daerah-daerah ini telah menyebabkan ribuan korban dan hilangnya orang-orang di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah pada beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah tidak membuat banyak kemajuan dalam negosiasi dengan daerah-daerah bermasalah ini, kecuali di Provinsi Aceh di mana pemilihan daerah yang damai telah dilaksanakan yang berujung dengan kelompok separatis memenangkan pemilihan dan menjadi Gubernur provinsi tersebut.

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden, dan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemilihan Umum dengan daftar calon terbuka. Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, rakyat Indonesia telah mulai memilih secara langsung kepala daerahnya sendiri. Pada tahun 2009, pemilihan umum kembali diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Aktivitas politik yang lebih tinggi dapat terjadi di Indonesia. Walaupun pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009 telah dilakukan dengan damai, kampanye politik di Indonesia dapat menyebabkan ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu, dan kami tidak dapat memastikan bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa yang akan datang dan dalam skala yang lebih besar atau bahwa gangguan tersebut tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak negatif pada bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Indonesia terletak pada zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan kerugian secara ekonomi

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan vulkanik dan musim kemarau, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa lainnya di luar kendali Perusahaan. Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia (selain tsunami Asia pada tahun 2004), termasuk letusan Gunung Merapi dan Gunung Bromo, tsunami di Mentawai, Sumatera Barat, yang mana keduanya terjadi pada tahun 2010, tsunami di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006, gempa bumi di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tahun 2006 serta semburan dan banjir lumpur panas di Jawa Timur pada tahun 2006 dan beberapa gempa bumi di Papua, Jawa Barat, Sulawesi, dan Sumatra pada tahun 2009. Indonesia juga mengalami banjir besar di Jakarta pada bulan Februari 2007 dan Solo, Jawa Tengah pada bulan Januari 2008. Pada bulan Maret 2009, hujan lebat telah mengakibatkan jebolnya bendungan di luar Jakarta, menenggelamkan rumah-rumah di daerah berpenduduk padat, dan mengakibatkan kematian atas kira-kira 100 orang. Banjir melanda ratusan rumah dan menyebabkan beberapa orang dilaporkan hilang. Akhir-akhir ini, pada Oktober 2010, setidaknya 145 orang meninggal pada banjir bandang di kelurahan Wasior, Papua Barat. Selain itu pada Oktober 2010, gempa bumi melanda pesisir Sumatera Barat yang menyebabkan tsunami pada Kepulauan Mentawai, dimana lebih dari 500 orang meninggal dunia. Sejak 24 Oktober 2010 hingga 5 November 2010, Gunung Merapi, sebuah gunung berapi di bagian selatan Jawa dekat Yogyakarta, meletus beberapa kali dan dipercaya telah menewaskan lebih dari 380 orang.

Sebagai akibat dari bencana-bencana alam tersebut, Pemerintah harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk bantuan keadaan darurat dan penempatan kembali. Sebagian besar dari biaya ini telah ditanggung oleh pemerintah negara lain dan organisasi bantuan internasional. Kami tidak dapat menjamin bahwa bantuan tersebut akan terus diberikan, atau bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada para penerimanya pada waktunya. Apabila Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan asing tersebut kepada masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut pada waktunya, keresahan sosial dan politik dapat terjadi. Sebagai tambahan, upaya perbaikan dan bantuan tersebut kemungkinan akan terus membebani keuangan Pemerintah, dan dapat berakibat pada kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hutang Pemerintah. Kegagalan Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya tersebut, atau pernyataan Pemerintah atau adanya moratorium atas hutang negara, dapat menimbulkan wanprestasi atas pinjaman pihak swasta termasuk pinjaman Perusahaan, sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek kami.

Kami tidak dapat menjamin bahwa asuransi kami akan cukup untuk melindungi kami dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh bencana-bencana alam tersebut dan hal-hal lain yang terjadi diluar kendali kami. Sebagai tambahan, kami tidak dapat menjamin bahwa premi yang dibayarkan untuk polis asuransi-asuransi tersebut pada saat perpanjangan jumlahnya tidak akan meningkat secara substansial, sehingga dapat secara material mengakibatkan dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil dari kegiatan operasional kami. Kami juga tidak dapat menjamin bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi, kerusakan geologis atau bencana alam di kota-kota yang memiliki populasi yang besar atau merupakan pusat keuangan di Indonesia dapat mengganggu perekonomian Indonesia dan menurunkan tingkat kepercayaan investor, sehingga menimbulkan dampak negatif yang material pada bisnis, keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek kami.

Kegiatan terorisme di Indonesia dapat membuat negara tidak stabil, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Beberapa insiden pengeboman telah terjadi di Indonesia, terutama pada bulan Oktober 2002 di Bali, suatu wilayah Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tempat yang aman dari kerusuhan-kerusuhan yang mempengaruhi bagian-bagian lain dari negeri ini. Selain itu, beberapa insiden pengeboman, walaupun dalam skala yang lebih kecil, juga telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk di tempat perbelanjaan dan tempat ibadah. Pada bulan April 2003, sebuah bom meledak di luar gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta, dan sebuah bom meledak di depan terminal domestik di Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Pada bulan Agustus 2003, sebuah bom meledak di Hotel JW Marriott di Jakarta, dan pada bulan September 2004, sebuah bom meledak di depan kedutaan besar Australia di Jakarta. Pada bulan Mei 2005, sebuah bom meledak di Sulawesi Tengah yang menyebabkan korban meninggal sebanyak 21 orang dan korban luka-luka sekurang-kurangnya 60 orang. Pada bulan Oktober 2005, terjadi ledakan bom di Bali, yang menewaskan sekurang-kurangnya 23 orang dan melukai sekurang-kurangnya 101 orang lainnya. Pejabat Pemerintah Indonesia, Australia dan AS mengindikasikan bahwa pengeboman ini kemungkinan terkait dengan organisasi teroris internasional. Beberapa demonstrasi juga terjadi di Indonesia sebagai reaksi atas rencana aksi militer dan penambahan pasukan AS, Inggris dan Australia di Irak. Pada Januari 2007, kelompok teroris sektarian melakukan beberapa pengeboman di Poso. Pada bulan Juli 2009, ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton Jakarta menewaskan 6 orang dan melukai sekurang-kurangnya 50 orang. Tindakan teroris lain mungkin saja terjadi di masa mendatang dan ditargetkan pada warga negara asing di Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari, dan mengarah pada, ketidakstabilan dan kerusuhan ini dapat menggoyahkan Indonesia dan Pemerintah dan telah, dan dapat terus memberikan dampak negatif yang material bagi investasi dan kepercayaan pada, serta kinerja perekonomian Indonesia, dan dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Usaha kami dapat dipengaruhi oleh menyebarnya virus Severe Acute Respiratory Syndrome ("SARS"), flu burung, flu babi (H1N1) atau epidemik lainnya

Pada tahun 2003, beberapa Negara di Asia, termasuk Indonesia, Cina, Vietnam, Thailand dan Kamboja, mengalami penyebaran SARS, atypical pneumonia yang sangat menular, yang menyebabkan gangguan serius pada aktivitas ekonomi di, dan penurunan permintaan pada, negara-negara yang terjangkit.

Selama empat tahun terakhir, sebagian besar Asia mengalami penyebaran baru dari flu burung. Per tanggal 2 Juni 2009, World Health Organization, atau WHO menyatakan bahwa total terdapat 262 kematian pada total 433 kasus yang dilaporkan kepada WHO, yang hanya mencakup pelaporan laboratorium atas kasus flu burung. Dari jumlah ini, Kementrian Kesehatan Indonesia melaporkan kepada WHO bahwa terdapat 115 kematian dari jumlah total 141 kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, pada bulan Juni 2006 WHO mengumumkan bahwa transmisi antara manusia akibat flu burung terjadi di Sumatra, Indonesia. Menurut United Nations Food and Agricultural Organization, virus flu burung berasal dari 31 propinsi dari 33 propinsi di Indonesia dan usaha untuk menahan penyebarannya telah gagal di Indonesia, hal mana meningkatkan kemungkinan virus tersebut untuk berubah menjadi bentuk yang lebih mematikan. Tidak ada vaksin efektif terhadap flu burung yang telah berhasil dikembangkan dan vaksin tersebut mungkin tidak akan ditemukan tepat waktu untuk mencegah pandemi virus flu burung.

Pada bulan April 2009, terjadi penyebaran virus Influenza A (H1N1), yang berasal dari Meksiko namun telah menyebar secara global, termasuk di wilayah Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura dan daerah lain di Asia. Virus Influenza A (H1N1) dipercaya bersifat sangat menular dan penyebarannya sulit dicegah.

Penyebaran virus SARS, flu burung, Influenza A (H1N1) atau epidemik yang serupa, atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari Negara-negara yang terjangkit, termasuk Indonesia, untuk melawan penyebaran tersebut, dapat berdampak bagi ekonomi Indonesia dan Negara lain dan mengurangi kepercayaan investor, dan oleh sebab itu akan memberikan dampak negatif secara material terhadap keadaan keuangan atau hasil usaha kami.

Gerakan dan kerusuhan buruh dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Liberalisasi peraturan yang mengijinkan pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan keadaan perekonomian yang lemah, telah menyebabkan, dan akan menyebabkan berlanjutnya keresahan dan aktivitas tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menerbitkan peraturan ketenagakerjaan yang mengijinkan tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari pengusaha. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah mengeluarkan undang-undang tenaga kerja, UU No. 13/2003 ("UU Tenaga Kerja"), yang, antara lain, meningkatkan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi pada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan mengharuskan forum bipartite yang diikuti oleh pemberi kerja dan pekerja untuk perusahaan yang memiliki 50 atau lebih pekerja. Untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan perusahaan tersebut, keanggotaan serikat pekerja harus lebih dari 50,0% dari jumlah total pekerja di perusahaan tersebut. Sebagai tanggapan terhadap keberatan atas keabsahan UU Tenaga Kerja tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Tenaga Kerja adalah sah, kecuali untuk beberapa ketentuan. Pemerintah mengusulkan untuk mengubah UU Tenaga Kerja dengan cara dimana, menurut pandangan aktivis tenaga kerja, dapat berakibat pada menurunnya manfaat pensiun, peningkatan pemakaian tenaga kerja outsourcing dan larangan serikat tenaga kerja untuk melakukan mogok kerja. Rancangan perubahan undang-undang tersebut telah ditunda pembahasannya dan peraturan Pemerintah mengenai pemutusan hubungan kerja belum berlaku efektif. Kerusuhan dan gerakan buruh dapat mengganggu bisnis kami dan dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lainnya, yang mana hal ini dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Depresiasi nilai rupiah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha, dan prospek Perusahaan

Salah satu dari penyebab yang paling utama atas terjadinya krisis ekonomi yang dimulai di Indonesia di pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan ketidakstabilan nilai tukar Rupiah, sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti Dolar AS. Walaupun Rupiah telah menguat secara tajam dari titik terendah sekitar Rp17.000 per Dolar AS pada tahun 1998, mata uang Rupiah dapat saja kembali mengalami ketidakstabilan di masa mendatang. Selama periode antara 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2010, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS bervariasi dari titik terendah Rp12.400 per Dolar AS hingga mencapai titik tertinggi, yaitu Rp8.888 per Dolar AS. Sebagai akibatnya, kami mencatat kerugian-bersih akibat nilai tukar mata uang asing masing-masing sebesar Rp885,7 miliar pada tahun 2008, keuntungan sebesar Rp1.656,4 miliar pada tahun 2009 dan keuntungan sebesar Rp492,4 miliar pada tahun 2010 . Kami tidak dapat memastikan bahwa depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing, termasuk Dolar AS tidak akan terjadi lagi. Apabila

Rupiah melemah lebih jauh dari nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2010, kewajiban kami atas hutang dagang, hutang pengadaan dan hutang pinjaman serta obligasi kami dalam mata uang asing akan meningkat dalam Rupiah. Depresiasi lebih lanjut atas Rupiah dapat berakibat pada bertambahnya kerugian pada nilai tukar valuta asing dan akan berdampak secara signifikan terhadap pendapatan lain-lain dan pendapatan bersih kami.

Sebagai tambahan, walaupun Rupiah secara umum bebas dikonversi dan ditransfer (kecuali bank-bank Indonesia dapat menolak melakukan transfer Rupiah kepada pihak-pihak di luar Indonesia yang tidak mempuyai tujuan perdagangan atau investasi yang jelas), Bank Indonesia, dari waktu ke waktu, telah melakukan intervensi dalam pasar uang dalam rangka melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah atau membeli Rupiah dengan menggunakan cadangan mata uang asing. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan nilai tukar mengambang dari Bank Indonesia tidak akan berubah, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lain untuk menstabilkan, mempertahankan atau menguatkan nilai Rupiah, ataupun bahwa salah satu tindakan-tindakan ini, apabila dilakukan, dapat membuahkan hasil yang baik. Perubahan kebijakan nilai tukar mengambang dapat berakibat pada sangat meningginya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas, diawasinya permodalan atau pertukaran valuta atau tidak diberikannya bantuan dana tambahan oleh para kreditur multinasional. Hal ini dapat berakibat menurunnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, terjadinya cidera janji dalam pembayaran hutang atau berkurangnya penggunaan oleh pelanggan kami, dan sebagai dampaknya, kami juga akan mengalami kesulitan dalam membiayai pengeluaran barang modal dan dalam menjalankan strategi bisnis kami. Salah satu dari konsekuensi-konsekuensi tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Penurunan peringkat kredit Pemerintah atau perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Sejak tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat hutang pemerintah (sovereign rating) Indonesia dan peringkat hutang dari berbagai instrumen kredit Pemerintah dan sejumlah besar bank dan perusahaan lainnya di Indonesia. Pada tanggal Laporan Tahunan ini (20 April 2011), hutang jangka panjang pemerintah Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat Ba1 oleh Moody's, BB oleh Standard & Poor's dan BBB- oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian atas kemampuan keuangan Pemerintah secara keseluruhan dalam membayar hutangnya dan kesanggupan dan kemauannya untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo.

Kami tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat hutang Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan. Setiap penurunan peringkat tersebut dapat memiliki dampak negatif bagi likuiditas di pasar uang Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan kami, untuk memperoleh pendanaan tambahan serta tingkat suku bunga serta ketentuan-ketentuan komersial lainnya dimana pendanaan tambahan tersedia. Tingkat suku bunga mengambang atas hutang dalam mata uang Rupiah kemungkinan juga akan naik. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak material yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional dan prospek kami.

Kami tunduk pada keterbukaan perusahaan dan persyaratan pelaporan yang berbeda dengan negara lain

Sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek New York, kami tunduk pada corporate governance atau tata penyelenggaraan perusahaan dan persyaratan pelaporan di Indonesia dan Amerika Serikat yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek dari yang berlaku untuk perusahaan yang ada di negara lain. Jumlah informasi yang disediakan untuk umum oleh emiten di Indonesia mungkin lebih sedikit dibanding dengan yang disediakan untuk umum oleh perusahaan sejenis di beberapa negara maju, serta informasi statistik dan keuangan tipe tertentu yang disediakan oleh perusahaan di beberapa negara maju mungkin tidak tersedia. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memiliki akses pada tingkat dan tipe yang sama yang disediakan di negara lain, dan perbandingan dengan perusahaan-perusahaan di negara lainnya tidak dapat dilakukan dalam semua aspek.

Kami didirikan di Indonesia, dan investor mungkin tidak dapat melakukan tindakan hukum atau melaksanakan keputusan terhadap kami di Amerika Serikat, atau untuk memberlakukan putusan pengadilan asing terhadap kami di Indonesia

Kami adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, menjalankan usaha dalam kerangka hukum Indonesia dengan status sebagai perusahaan modal asing, dan hampir semua

aktiva kami berada di Indonesia. Selain itu, beberapa Komisaris kami dan hampir seluruh Direksi kami bertempat tinggal di Indonesia dan sebagian besar aktiva dari pihak-pihak tersebut berada di luar Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, investor mungkin akan kesulitan dalam melakukan tindakan hukum, atau memberlakukan putusan pengadilan terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat, atau memberlakukan putusan pengadilan Amerika Serikat terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat.

Penasihat hukum Indonesia kami telah menyampaikan bahwa putusan pengadilan Amerika Serikat, termasuk putusan-putusan mengenai ketentuan kewajiban perdata dari undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat, tidak dapat diberlakukan di pengadilan Indonesia, meskipun putusan tersebut dapat dijadikan bukti yang tidak bersifat final dalam pemeriksaan perkara yang diajukan di pengadilan Indonesia. Tidak dapat dipastikan apakah pengadilan Indonesia akan mengeluarkan putusan berdasarkan gugatan asli yang diajukan di hadapannya, yang mana hanya didasarkan pada ketentuan kewajiban perdata (civil liability) dari undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihak penggugat harus mengajukan gugatan terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di pengadilan Indonesia.

Risiko-risiko yang berkaitan dengan Bisnis Perusahaan

Kami menjalankan usaha dalam keadaan dimana hukum dan perundang-undangan sedang mengalami reformasi. Reformasi ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang dapat mengakibatkan, antara lain, berkurangnya marjin dan pendapatan usaha, yang semua ini dapat memberikan dampak material yang negatif bagi kami

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 1999 telah mendorong liberalisasi industri telekomunikasi sampai pada titik tertentu, termasuk di antaranya kemudahan bagi para pemain baru untuk masuk ke sektor industri telekomunikasi dan perubahan struktur persaingan industri telekomunikasi. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan peraturan tersebut menjadi sedemikian banyak dan rumit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, seiring dengan terus berlangsungnya reformasi di sektor telekomunikasi Indonesia, para pesaing dengan sumber daya yang mungkin lebih besar dari kami mulai memasuki sektor telekomunikasi Indonesia dan bersaing dengan kami dalam menyediakan layanan telekomunikasi.

Sebagai contoh, sejak Januari 2007, Pemerintah, melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi ("Menkominfo"), telah bertanggung jawab untuk menetapkan tarif untuk layanan interkoneksi. Kami tergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami." Menkominfo menetapkan tarif interkoneksi untuk penyelenggara telekomunikasi dominan berdasarkan "biaya", berdasarkan Daftar Penawaran Interkoneksi ("DPI") yang diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi dominan, termasuk kami. Sebaliknya, penyelenggara telekomunikasi yang tidak masuk dalam klasifikasi penyelenggara dominan dapat hanya memberitahukan kepada Menkominfo mengenai tarif mereka dan menerapkan tarif tersebut kepada pelanggan tanpa persetujuan Menkominfo. Perbedaan perlakuan terhadap penyelenggara telekomunikasi dominan dan non-dominan dapat menciptakan peluang bagi pemain baru di bidang indutri telekomunikasi, memperbesar keleluasan bagi mereka dalam menetapkan tarif yang rendah dan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggannya. Sebagai tambahan, tarif DPI kami telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan kami memperkirakan penurunan ini akan berlanjut. Penurunan biaya interkoneksi ini dapat menurunkan pendapatan kami dan juga biaya trafik antar-operator.

Pada tanggal 25 Januari 2010, Menkominfo menerbitkan peraturan baru dimana penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah diberikan alokasi frekuensi dan kode akses untuk menyediakan jaringan tertentu dikecualikan dari proses seleksi berikutnya apabila penyelenggara tersebut bermaksud untuk mendapatkan ijin jaringan baru dengan kode akses yang lain. Hal ini diharapkan memungkinkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk melakukan ekspansi bisnisnya dengan lebih mudah.

Pada tanggal 13 Desember 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.76/2010 tentang Perubahan atas PP No.7/2009 tentang tipe dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang diterapkan terhadap Menkominfo. Peraturan ini mempengaruhi metode perhitungan dan pembayaran biaya spektrum atas spektrum yang dialokasikan untuk Perseroan (bands frekuensi sebesar 800 Mhz, 900 Mhz dan 1.800 Mhz).

Pada tanggal 31 Desember 2010, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI atau Indonesian Telecommunications Regulatory Bureau) juga menerbitkan Surat No. 227/BRTI/XII/2010 tentang pelaksanaan tarif interkoneksi yang mana mulai berlaku per 1 Januari 2011 dan akan digunakan seluruh operator telekomunikasi.

Di masa mendatang, Pemerintah akan mengumumkan atau memberlakukan perubahan peraturan lainnya, seperti perubahan kebijakan interkoneksi atau tarif yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis atau ijin yang kami miliki saat ini. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan berhasil bersaing dengan para penyelenggara telekomunikasi dalam negeri maupun asing atau bahwa pergantian, perubahan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau di kemudian hari oleh Pemerintah tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami mungkin tidak mampu untuk membiayai pengeluaran barang modal yang dibutuhkan untuk tetap bersikap kompetitif dalam industri telekomunikasi di Indonesia.

Penyelenggaraan layanan telekomunikasi bersifat padat modal. Agar dapat bersaing, kami harus terus melakukan perluasan, modernisasi dan pembaharuan teknologi infrastruktur telekomunikasi kami, yang memerlukan investasi modal dalam jumlah yang besar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, total pengeluaran barang modal konsolidasi aktual kami mencapai masing-masing Rp12.341,9 miliar, Rp11.584,5 miliar dan Rp5.515,0 (US$6,134,4 juta). Selama 2011, kami berencana untuk mengalokasikan sekitar US$794,5 juta untuk pengeluaran barang modal baru, yang mana diambil bersamaan dengan hasil estimasi pengeluaran modal aktual yang ditingkatkan untuk tahun 2011 untuk komitmen-komitmen pengeluaran modal pada periode-periode sebelumnya, akan menghasilkan nilai kurang lebih sebesar US$1.053,8 juta sebagai total pengeluaran modal aktual pada 2011. Kemampuan kami untuk membiayai pengeluaran barang modal di masa yang akan datang akan bergantung pada kinerja operasi kami di masa yang akan datang, yang bergantung pada keadaan ekonomi, tingkat suku bunga dan faktor keuangan, bisnis dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kekuasaan kami, dan juga terhadap kemampuan kami untuk memperoleh tambahan pendanaan eksternal. Kami tidak dapat memastikan bahwa pendanaan tambahan akan tersedia, atau apabila ada, dapat diterima secara komersial. Sebagai tambahan kami dapat mendapatkan pendanaan tambahan sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang kami. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat memastikan bahwa kami akan memiliki sumber dana yang mencukupi untuk meningkatkan atau memperluas teknologi infrastruktur telekomunikasi atau memperbaharui teknologi kami yang lainnya yang diperlukan agar dapat tetap bersaing di pasar telekomunikasi Indonesia. Kegagalan kami untuk melakukan hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami tergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami

Kami bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan seluler dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami dan infrastruktur terkait agar pengoperasian bisnis Perusahaan berhasil. Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian interkoneksi, baik yang disebabkan kegagalan pihak lainnya untuk melaksanakan kewajiban kontraktual atau karena alasan lainnya, maka satu satu atau lebih layanan kami dapat terhambat, terganggu atau berhenti sama sekali, kualitas layanan kami dapat menurun, churn pelanggan kami dapat meningkat atau tarif interkoneksi kami dapat meningkat. Perselisihan yang melibatkan perjanjian interkoneksi kami saat ini, dan juga kegagalan kami untuk menandatangani atau memperbaharui perjanjian interkoneksi dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami dapat menjadi subyek pembatasan kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 ("Peraturan Presiden") menetapkan jenis industri dan bidang usaha dalam mana investasi asing dilarang, dibatasi atau harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur oleh institusi Pemerintah yang terkait ("Daftar Negatif Investasi"). Industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi, dan oleh karena itu investasi asing dalam industri telekomunikasi Indonesia terpengaruh oleh pembatasan dan ketentuan yang berlaku. Daftar Negatif Investasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"). Pembatasan yang berlaku bagi industri telekomunikasi bergantung pada jenis usaha telekomunikasi yang dilakukan. Pembatasan yang berbeda berlaku tergantung pada apakah usaha tersebut terkait dengan jaringan atau layanan telekomunikasi. Batasan terhadap kepemilikan saham oleh asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang usaha jaringan telekomunikasi berkisar dari 49,0% sampai dengan 65,0%, dan batasan pada kepemilikan saham oleh asing pada perusahaan Indonesia yang bergerak dalam penyediaan jasa multimedia (termasuk komunikasi data seperti jasa wireless broadband), berkisar dari 49,0% sampai dengan 95,0%. Berdasarkan Pasal 8 dari Peraturan Presiden, pembatasan yang diatur dalam Peraturan tersebut tidak berlaku bagi investasi

yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Presiden; sesuai dengan persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh BKPM kecuali pembatasan tersebut lebih menguntungkan bagi investasi. Peraturan Presiden tidak mengubah pembatasan kepemilikan asing di dalam usaha kami.

Pada tanggal 22 Juni 2008, Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C. ("Qtel"), melalui anak perusahaannya, Qatar South East Asia Holding S.P.C. membeli seluruh saham yang diterbitkan dan yang beredar dari masing-masing Indonesia Communications Limited ("ICLM"), dan Indonesia Communications Ptd. Ltd. ("ICLS") dari Asia Mobile Holdings Pte.Ltd. ("AMH"), sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura. Setelah akuisisi ini, perubahan pengendalian terjadi di Perusahaan dan mewajibkan Qtel untuk melakukan penawaran tender. Sehubungan dengan penawaran tender, pada tanggal 23 Desember 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia ("Bapepam-LK"), mengeluarkan surat (i) menyatakan bahwa Bapepam-LK telah menerima surat dari BKPM tertanggal 19 Desember 2008, dimana BKPM mengkonfirmasikan bahwa jumlah maksimal kepemilikan saham asing di Perusahaan adalah 65,0%, dan bahwa Perusahaan masih tetap dapat melakukan kegiatan operasional jaringan selulernya dan usaha jaringan tetap lokal dan (ii) memberikan ijin kepada Qtel untuk melakukan penawaran tender. Menyusul keluarnya surat tersebut, Qtel melakukan penawaran tender untuk membeli hingga 1.314.466.775 Saham Seri B, mewakili kira-kira 24,19% dari total Saham Seri B yang telah diterbitkan dan telah beredar (termasuk Saham Seri B dalam bentuk ADS).

Sebagai perseroan terbuka, kami percaya bahwa Daftar Negatif Investasi tidak berlaku bagi kami. Apabila pihak regulator yang berwenang hendak memberlakukan Daftar Negatif Investasi terhadap Perusahaan, terlepas dari status Perusahaan sebagai perseroan terbuka, pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham asing lain kami dapat diminta untuk mengurangi kepemilikan sahamnya pada Perusahaan, hal mana dapat mempengaruhi penurunan harga perdagangan saham Perusahaan. Hal ini dapat membawa pengaruh negatif yang material terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek kami. Kami juga dapat diharuskan untuk memisahkan bidang usaha kami menjadi dua bagian, jaringan bergerak atau seluler dan jaringan tetap, agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemisahan bidang usaha kami ke dalam dua sektor dapat dilakukan melalui pengalihan kegiatan jaringan tetap atau jaringan bergerak atau seluler kami kepada anak Perusahaan atau pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami secara material dan dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan usaha kami. Sebagai tambahan, apabila pihak regulator yang berwenang menetapkan bahwa kepemilikan asing di Perusahaan masih melebihi batasan yang ditetapkan dalam Daftar Negatif Investasi, regulator yang berwenang mungkin melarang kami untuk mengikuti tender atau untuk memperoleh izin lain atau spektrum tambahan. Apabila hal ini terjadi, usaha, peluang, kondisi keuangan dan hasil usaha kami menjadi terpengaruh.

Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, gateway menuju jaringan kami atau jaringan para operator lainnya dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Untuk menyediakan layanan kami, Perusahaan sangat bergantung pada lancarnya pengoperasian jaringan. Misalnya, Perusahaan bergantung pada akses ke PSTN untuk terminasi dan sumber panggilan seluler ke dan dari telepon dengan jaringan tetap, dan sebagian besar dari trafik sambungan seluler dan sambungan jarak jauh internasional Perusahaan disalurkan melalui PSTN. Terbatasnya fasilitas interkoneksi PSTN yang tersedia untuk Perusahaan telah memberikan dampak negatif bagi bisnis kami pada masa lalu dan dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami di masa mendatang.

Oleh karena hambatan kapasitas interkoneksi, para pelanggan seluler kami sesekali mengalami kesulitan dalam melakukan panggilan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa fasilitas interkoneksi ini akan ditingkatkan atau dipertahankan pada level saat ini.

Perusahaan juga bergantung pada beberapa sistem informasi manajemen atau sistem lainnya yang canggih dalam hal teknologi, seperti sistem tagihan pelanggan yang membuat kami dapat menjalankan bisnis. Selain itu, kami cukup bergantung pada interkoneksi ke jaringan operator telekomunikasi lainnya yang menghubungkan sambungan telepon para pelanggan kami ke para pelanggan operator telepon jaringan tetap dan para operator seluler lainnya baik di dalam maupun di luar Indonesia. Jaringan kami, yang meliputi sistem informasi, teknologi informasi dan infrastruktur, dan jaringan para operator lainnya dengan mana para pelanggan kami berinterkoneksi, sangat rentan terhadap kerusakan dan gangguan operasi akibat berbagai hal seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, putusnya aliran listrik, tidak berfungsinya perangkat, cacat pada software jaringan, gangguan kabel transmisi atau peristiwa-peristiwa yang serupa. Misalnya, pusat

pengendali telekomunikasi dan fasilitas back-up teknologi informasi kami sangat berkonsentrasi di kantor pusat dan principal operating and tape back-up storage facilities di dua tempat di Jakarta. Setiap kegagalan yang mengakibatkan gangguan pada operasional kami atau penyediaan salah satu layanan, baik akibat gangguan operasional, bencana alam atau lainnya, dapat menghambat kami dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, yang mana hal ini dapat menyebabkan para pelanggan menjadi sangat tidak puas dan memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Industri telekomunikasi terbentuk dengan adanya perubahan teknologi yang sangat cepat. Kami dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dari segi teknologi yang saat ini sedang dikembangkan atau yang mungkin dikembangkan di kemudian hari. Perkembangan atau penerapan teknologi, layanan atau standar baru atau alternatif di masa mendatang memerlukan perubahan besar terhadap model bisnis Perusahaan, pengembangan produk baru, penyediaan layanan tambahan dan investasi baru dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, perkembangan teknologi konvergensi telepon tetap-seluler yang dapat membuat sambungan telepon yang berasal dari seluler tidak melalui jaringan seluler, tetapi sebaliknya melalui jaringan telepon tetap, dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis Perusahaan. Pengembangan produk dan layanan baru membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat mengakibatkan lahirnya pesaing baru di pasar. Kami tidak dapat secara akurat memperkirakan bagaimana perubahan teknologi yang baru muncul dan yang akan ada di kemudian hari dapat mempengaruhi operasional atau daya saing layanan kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa teknologi kami tidak akan menjadi usang, atau tidak akan mendapat persaingan dengan teknologi baru di masa mendatang, atau bahwa kami akan dapat memperoleh teknologi baru yang diperlukan, dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, agar dapat bersaing di situasi yang telah berubah. Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami secara merugikan.

Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dari para pesaing utama kami, yaitu Telkom dan Telkomsel. Pemerintah dapat memberikan prioritas pada bisnis Telkom dan Telkomsel daripada Perusahaan

Per tanggal 31 Desember 2010, Pemerintah memiliki saham sebanyak 14,29% di Perusahaan, termasuk satu saham Seri A, yang memiliki hak suara istimewa dan hak veto atas beberapa hal strategis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk keputusan untuk pembubaran, likuidasi dan mengajukan kepailitan dan memperbolehkan Pemerintah untuk menominasikan satu Direktur dari Direksi dan satu Komisaris dari Dewan Komisaris.

Per tanggal 31 Desember 2010, Pemerintah juga memiliki saham sebanyak 52,47% di Telkom, yang merupakan pesaing utama kami di sektor jasa telepon tetap SLI. Per tanggal yang sama, Telkom memiliki saham sebanyak 65,0% di Telkomsel, salah satu pesaing utama kami dalam penyelenggaraan jasa seluler. Persentase kepemilikan saham Pemerintah di Telkom jauh lebih besar dibandingkan di Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana Pemerintah akan banyak mendukung bisnis Perusahaan atau bahwa Pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada Telkom dan Telkomsel serta Perusahaan ketika memberlakukan keputusan-keputusan di kemudian hari, atau ketika menggunakan wewenang regulasinya terhadap industri telekomunikasi Indonesia. Jika Pemerintah memberikan prioritas kepada kegiatan usaha Telkom atau Telkomsel daripada Perusahaan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek perusahaan kami.

Kepentingan para pemegang saham pengendali kami dapat berbeda dengan kepentingan para pemegang saham lainnya

Per tanggal 31 Desember 2010, Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. ("Qtel Asia"), memiliki sekitar 65,0% saham yang telah ditempatkan dan disetor kami. Qtel Asia saat ini seluruhnya dimiliki dan dikendalikan oleh Qtel, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Qatar dan pihak terkaitnya. Qtel Asia dan pemegang saham pengendalinya dapat menggunakan kendalinya atas bisnis Perusahaan dan dapat membuat kami mengambil tindakan-tindakan yang tidak berhubungan dengan, atau dapat berbenturan dengan, kepentingan terbaik kami ataupun para pemegang saham lainnya dari Perusahaan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan kebijakan kami. Meskipun orang-orang yang ditunjuk oleh Qtel Asia memegang jabatan baik di dalam Dewan

Komisaris maupun Direksi Perusahaan, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa pemegang saham pengendali kami akan menunjuk direksi dan komisaris atau untuk dapat mempengaruhi usaha kami dengan cara yang menguntungkan para pemegang saham lainnya.

Kami mengandalkan personil manajemen inti, dan bisnis kami dapat terkena dampak negatif apabila tidak mampu mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti

Kami yakin bahwa tim manajemen kami saat ini telah memberikan kontribusi pengalaman dan keahlian yang besar dalam mengelola bisnis Perusahaan. Keberhasilan bisnis kami dan kemampuan kami dalam melaksanakan strategi-strategi bisnis kami di masa mendatang sangat bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh personil inti kami. Personil yang terampil di sektor industri telekomunikasi di Indonesia tidak banyak jumlahnya dan kelangkaan ini mungkin akan terus terjadi. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan personil ahli tertentu menjadi semakin tinggi. Selain itu, seiring dengan masuknya para pemain baru di pasar yang mulai menjalankan atau memperluas bisnisnya di Indonesia, beberapa karyawan inti kami dapat meninggalkan jabatannya saat ini. Ketidakmampuan kami dalam mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti dapat memberikan dampak negatif yang material bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang kami lakukan dapat menghambat kegiatan usaha kami dan dapat gagal dalam meraih hasil operasional jangka panjang yang lebih baik

Pada Januari 2011, Perseroan memperkenalkan program restrukturisasi organisasi yang merupakan bagian dari program transformasi kami yang dimulai pada 2009 dalam rangka meningkatkan produktivitas Perseroan dan meningkatkan hasil operasional jangka panjang. Perseroan menawarkan paket kompensasi khusus bagi karyawan yang memenuhi kirteria-kriteria tertentu sebagaimana diatur oleh Perseroan dan yang memilih untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi tersebut.

Kami mengantisipasi adanya pengurangan tenaga kerja secara signifikan yang dapat menimbulkan biaya-biaya tertentu, termasuk biaya-biaya sehubungan dengan pemberian paket-paket kompensasi khusus tersebut. Kami tidak dapat memastikan kepada anda bahwa konsekuensi dari pelaksanaan program restrukturisasi organisasi ini tidak akan membahayakan bisnis dan hasil dari kegiatan operasional kami.

Apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa kami terbukti bersalah melakukan penetapan harga dan gugatan class action, kami dapat dikenakan sanksi yang cukup besar sehingga dapat menurunkan pendapatan kami dan berdampak pada bisnis, reputasi dan keuntungan kami

Pada tanggal 1 November 2007, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"), telah mengeluarkan putusan mengenai pemeriksaan awal terhadap kami dan delapan perusahaan telekomunikasi lainnya dengan tuduhan penetapan harga SMS dan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli ("Undang-Undang No. 5/1999"). Pada 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa Telkom, Telkomsel, XL Axiata Tbk ("XL"), PT Bakrie Telecom ("Bakrie Telekom"), PT Mobile-8 Telecom Tbk ("Mobile 8"), dan PT Smart Telecom ("Smart Telecom") secara bersama-sama telah melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999. Mobile-8 mengajukan keberatan atas putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Telkomsel, XL, Telkom, Indosat, PT Hutchison CP Telecommunication ("Hutchison"), Bakrie Telecom, Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler ("Natrindo") dipanggil untuk menghadap sebagai turut terlapor dalam perkara ini, sedangkan Telkomsel mengajukan keberatan terhadap putusan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun KPPU memutuskan bahwa kami tidak bersalah terhadap tuduhan penetapan harga SMS, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa Pengadilan Negeri akan menguatkan putusan KPPU. Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan keberatan terhadap putusan KPPU berdasarkan pemeriksaan kembali atas putusan KPPU dan dokumen kasus yang diserahkan kepada KPPU. Jika Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan kepentingan kami, kami dapat diharuskan untuk membayar denda, yang jumlahnya akan berada sepenuhnya pada keputusan Pengadilan Negeri, hal mana dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Sebagai tambahan, selama tahun 2007 dan 2008 beberapa gugatan class action telah ditujukan kepada Perusahaan dan Telkomsel di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang, berkaitan dengan kepemilikan silang Temasek Holding sebelumnya di Indosat dan Telkomsel, yang dituduh telah mengakibatkan

pengaturan harga telekomunikasi sehingga merugikan masyarakat. Penggugat telah menarik kembali gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi. Pada tanggal 27 Januari 2010, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima karena para penggugat menolak untuk membuktikan kewenangan mereka dan bahwa dua anggota penggugat tidak memenuhi syarat sebagai perwakilan dari class action. Karena jangka waktu mengajukan banding telah berakhir pada tanggal 18 Maret 2010, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2010 menjadi mengikat. Perkara class action Tangerang dilanjutkan pada tanggal 3 Mei 2010, dimana tergugat memasukkan eksepsi dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2010 majelis hakim memutuskan bahwa gugatan class action di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima karena ketidakseriusan penggugat dalam mengajukan gugatan dan penggugat juga gagal untuk membuktikan pemenuhan syarat sebagai perwakilan dari class action. Karena jangka waktu mengajukan banding telah berakhir pada tanggal 21 Juli 2010, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 Mei 2010 menjadi mengikat. Lihat Walaupun gugatan class action tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang serta gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi telah ditarik kembali, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa pelanggan tidak akan mengajukan gugatan yang serupa di kemudian hari. Jika terdapat gugatan class action baru atau Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang menguntungkan para penggugat, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Kami terekspos dengan risiko tingkat bunga

Hutang kami mencakup pinjaman-pinjaman bank untuk membiayai usaha kami. Apabila memungkinkan, kami berusaha meminimalisir eksposur risiko tingkat bunga kami dengan mengadakan kontrak swap untuk mengubah tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap selama jangka waktu tertentu bagi pinjaman-pinjaman kami. Bagaimanapun, kebijakan lindung nilai kami tidak dapat secara cukup menutupi risiko kami terhadap fluktuasi tingkat bunga dan hal ini dapat berakibat pada beban bunga yang besar dan dapat mempengaruhi bisnis, keadaan keuangan dan hasil usaha kami secara negatif.

Kami terekspos dengan risiko counter-party

Kami dapat mengadakan beberapa transaksi dari waktu ke waktu yang dapat mengekspos kami kepada kredit para counter-party kami dan kemampuan mereka untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak mereka dengan kami. Sebagai contohnya, kami dapat menandatangani kesepakatan swap, yang mengekspos kami pada risiko di mana para counter-party dapat melakukan wanprestasi dalam kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang relevan. Apabila counter-party, termasuk institusi keuangan, dinyatakan pailit atau menjadi insolven, hal ini dapat berakibat pada penundaan dalam mendapatkan dana atau Perusahaan harus melakukan likuidasi terhadap posisi kami, yang dapat mengakibatkan kerugian.

Kami mungkin tidak dapat tidak dapat mengelola risiko pertukaran valuta asing kami secara sukses

Perubahan nilai tukar mata uang telah mempengaruhi dan mungkin terus mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha kami. Sebagian besar dari kewajiban pembayaran hutang kami adalah dalam Rupiah dan sebagian besar pengeluaran barang modal kami adalah dalam mata uang Dolar AS. Sebagian besar pendapatan kami adalah dalam mata uang Rupiah namun sebagian pendapatan usaha kami adalah dalam Dolar AS atau yang terkait dengan Dolar AS. Kami juga mungkin akan memiliki hutang jangka panjang lainnya dalam mata uang selain dari Rupiah, termasuk Dolar AS, untuk membiayai pengeluaran barang modal tambahan.

Kami saat ini melakukan lindung nilai atas sebagian kewajiban kami dalam mata uang asing terutama karena pendapatan usaha tahunan kami dalam mata uang Dolar AS lebih kecil dari seluruh biaya operasi kami dalam mata uang Dolar AS, seperti beban usaha kami dalam Dolar AS dan pembayaran hutang pokok dan bunga dalam mata uang Dolar AS. Pada tahun 2005, dalam rangka upaya mengelola eksposur valuta asing kami dan menurunkan biaya pendanaan kami secara keseluruhan, kami mengadakan kontrak swap valuta asing dengan tiga lembaga keuangan internasional yang berbeda. Dari tahun 2006 sampai tahun 2009, kami mengadakan beberapa kontrak swap valuta asing dengan tujuh lembaga keuangan internasional sebagai usaha untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing kami. Untuk kontrak-kontrak ini, kami membayar biaya di muka atau suku bunga premi tetap. Kami tidak dapat memastikan bahwa kami dapat berhasil mengelola risiko valuta asing di masa yang akan datang atau bahwa bisnis, keadaan keuangan atau hasil usaha kami tidak akan terkena dampak negatif dengan adanya eksposur terhadap risiko nilai tukar tersebut. Lihat "Diskusi Manajemen dan Analisa Keadaan Keuangan dan Hasil Usaha – Pengungkapan Kuantitatif dan kualitatif mengenai Risiko Pasar".

Risiko yang terkait dengan Bisnis Jasa Seluler Perusahaan

Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa seluler Perusahaan

Persaingan di industri jasa seluler di Indonesia sangat tinggi. Persaingan di antara para penyedia jasa seluler di Indonesia didasarkan pada berbagai faktor seperti harga, kualitas dan cakupan jaringan, ragam layanan, fitur yang ditawarkan serta pelayanan pelanggan. Bisnis jasa seluler kami bersaing terutama dengan Telkomsel dan XL. Beberapa penyelenggara GSM dan CDMA kecil lainnya juga menyediakan jasa seluler di Indonesia, termasuk Hutchison, Natrindo dan Smart Telecom. Selain para penyelenggara jasa seluler yang ada, Menkominfo dapat kembali memberikan ijin penyelenggaraan jasa seluler di kemudian hari, dan pemain baru tersebut akan bersaing dengan kami.

Kami memperkirakan persaingan dalam usaha jasa seluler akan semakin ketat. Penyedia jasa seluler yang baru maupun yang telah ada dapat menawarkan paket produk dan jasa yang lebih menarik atau teknologi baru atau konvergensi dari beberapa layanan telekomunikasi, dan mengakibatkan churn rates yang lebih tinggi, ARPU yang lebih rendah atau pengurangan, atau lambatnya pertumbuhan jumlah pelanggan seluler kami. Pada tahun 2010, persaingan yang berlanjut pada pemain lama dan pemain baru dalam pasar jasa seluler berakibat pada kampanye harga yang agresif oleh penyelenggara jasa seluler. Penurunan harga penggunaan seluler juga berakibat pada peningkatan jumlah pelanggan dan pada trafik jaringan, berakibat pada peningkatan kepadatan jaringan antara operator, yang mengharuskan kami untuk melakukan penambahan pengeluaran barang modal untuk terus memperluas jaringan kami. Di lain pihak, masuknya pelaku usaha di bidang telekomunikasi bergerak cukup tinggi dan kami mengantisipasi pertumbuhan bisnis yang melambat.

Lahan persaingan dalam bisnis jasa seluler juga dapat dipengaruhi oleh konsolidasi industri. Pada bulan Maret 2010, Smart Telecom dan Mobile-8 mengumumkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian kerja sama untuk memakai logo dan merek yang sama di bawah nama "smartfren."

Persaingan dari para operator yang menggunakan teknologi baru, serta dengan operator baru, operator lama yang hampir melebihi kapasitas dan konsolidasi antar operator dapat menimbulkan dampak merugikan bagi posisi, bisnis jasa seluler, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Banyaknya jaringan seluler dan terbatasnya ketersediaan spektrum dapat menghambat peningkatan jumlah pelanggan seluler kami dan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan seluler Perusahaan

Kami berniat untuk meneruskan rencana promosi kami untuk menarik pelanggan dan meningkatkan pemakaian jaringan kami oleh pelanggan seluler kami. Kami juga berniat untuk terus mempromosikan layanan data kami termasuk jasa BlackBerry™ dan layanan wireless broadband kami. Sebagai akibatnya, kami mungkin akan mengalami peningkatan kepadatan jaringan, yang dapat mempengaruhi performa jaringan kami dan merusak reputasi kami di mata pelanggan. Selain itu, pemakaian seluler yang lebih tinggi di area perkotaan yang padat mungkin menuntut kami untuk menggunakan teknik rekayasa frekuensi radio, yang meliputi kombinasi rancangan seluler makro, mikro dan indoor, untuk mempertahankan kualitas jaringan seluler kami walaupun terjadi gangguan frekuensi radio dan pola pemakaian ulang radio frekuensi yang lebih ketat. Meskipun demikian, apabila jumlah pengguna seluler kami atau penggunaan layanan suara dan data kami bertumbuh secara signifikan di area-area dengan kepadatan yang tinggi, kami tidak dapat menjamin bahwa usaha-usaha ini akan cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk mendukung permintaan tambahan bagi jaringan kami, kami mungkin dituntut untuk melakukan pengeluaran barang modal yang signifikan untuk memperbaiki cakupan jaringan kami. Pengeluaran barang modal tambahan tersebut, bersama dengan kemungkinan penurunan jasa seluler kami, dapat berdampak buruk bagi posisi persaingan kami, bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Terlepas dari dikeluarkannya dana yang besar untuk meningkatkan jumlah pelanggan seluler kami, jumlah pelanggan seluler meningkat tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan usaha kami

Kami telah menggunakan sumber dana yang cukup banyak untuk mengembangkan dan memperluas jaringan seluler kami serta untuk meningkatkan jumlah pelanggan seluler kami. Namun demikian, ketidakpastian atas situasi ekonomi di Indonesia dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dapat menurunkan daya beli pelanggan seluler kami. Terlebih lagi, terus menurunnya tarif efektif untuk penggunaan telepon sebagai dampak kampanye "free-talk" dan promosi diskon tarif baru-baru ini, peningkatan pemakaian SMS, dan penetrasi seluler yang lebih tinggi pada segmen pasar berpenghasilan rendah telah mengakibatkan

penurunan ARPU di tahun 2010. Jumlah pelanggan seluler kami (termasuk pelanggan wireless broadband) meningkat kurang lebih 36,5 juta per tanggal 31 Desember 2008 menjadi 33,0 juta per tanggal 31 Desember 2009, menjadi kurang lebih 44,3 juta per tanggal 31 Desember 2010. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, ARPU kami masing-masing adalah sebesar Rp38.639, Rp37.664 dan Rp34.712. Walaupun kami bermaksud untuk terus menggunakan sumber pendanaan yang signifikan untuk meningkatkan jumlah pelanggan seluler kami dan untuk memperluas jaringan seluler kami untuk mendukung permintaan dari penambahan jumlah pelanggan seluler, kami tidak dapat menjamin bahwa pengeluaran tersebut akan diikuti dengan peningkatan ARPU atau pendapatan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, biaya akuisisi pelanggan kami dan pengeluaran barang modal yang diperlukan untuk memperluas kapasitas jaringan kami dapat mengalami peningkatan tanpa mengakibatkan terjadinya peningkatan pada pendapatan atau laba kami, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan material terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami mengalami churn rate yang tinggi

Kami mengalami churn rate yang tinggi, sebagaimana umumnya dialami oleh operator telekomunikasi Indonesia yang menyelenggarakan jasa seluler pra-bayar. Kami percaya bahwa churn rate kami yang tinggi disebabkan oleh fakta bahwa banyak pelanggan pra-bayar kami yang memiliki lebih dari satu kartu SIM dari berbagai operator seluler, yang memungkinkan mereka untuk memilih paket yang termurah. Kami yakin bahwa high churn kami juga sebagai dampak atas usaha kami, selama sembilan bulan pertama tahun 2009, untuk membersihkan basis pelanggan kami dengan cara menekan perilaku "calling card" dan memfokuskan diri kepada loyalitas pelanggan. Kami percaya bahwa pelanggan-pelanggan tersebut merupakan pelanggan-pelanggan jangka pendek yang kemungkinan tidak mengisi ulang kartu SIM tersebut. Tingginya churn rates kami dapat berakibat pada menurunnya pendapatan, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek usaha kami. Pada akhir dari triwulan ke tiga pada tahun 2010, kami meluncurkan program penyimpanan dan kesetiaan yang diberi nama "Senyum Setia Indosat" yang memberikan keuntungan bagi para pelanggan kami yang terus berlangganan. Kami percaya bahwa program ini telah memberikan kontribusi dalam menurunkan churn rate kami menjadi 13,3% pada tahun 2010 dibandingkan dengan 15,1% pada tahun 2009.

Kami bergantung pada ketersediaan infrastuktur menara telekomunikasi

Kami sangat tergantung pada menara telekomunikasi kami dan yang lainnya, untuk menyediakan jaringan dan jasa telekomunikasi seperti seluler GSM, FWA dan 3G dan jasa telekomunikasi bergerak seluler dengan memasang pemancar dan antena penerima dan fasilitas pendukung BTS lainnya pada menara tersebut. Ketersediaan dan pemasangan menara telekomunikasi tersebut memerlukan ijin dari instansi berwenang di pusat dan daerah. Baru-baru ini, beberapa instansi berwenang di daerah telah memberlakukan peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dan mensyaratkan kewajiban berbagi penggunaan menara di antara berbagai operator telekomunikasi. Selain itu, pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo telah mengeluarkan Peraturan tentang penggunaan menara bersama telekomunikasi. Kewajiban Menara Telekomunikasi Bersama. Berdasarkan peraturan tersebut, pendirian menara telekomunikasi memerlukan izin dari Pemerintah yang berwenang dan pemerintah daerah berhak menentukan wilayah penempatan dan lokasi dapat dibangunnya menara telekomunikasi tersebut. Suatu peraturan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo, serta BKPM pada 30 Maret 2009, juga mewajibkan tiap menara yang dibangun dan digunakan untuk layanan telekomunikasi harus memperoleh ijin mendirikan menara untuk menunjukkan kepatuhan pada beberapa spesifikasi teknis. Apabila suatu menara tidak memperoleh ijin tersebut, maka pihak berwenang di daerah berhak untuk menentukan denda yang diberikan kepada pemilik menara. Selanjutnya, suatu penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara telekomunikasi wajib memperbolehkan operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menaranya (selain menara yang digunakan sebagai jaringan utamanya), tanpa diskriminasi apapun.

Peraturan ini mewajibkan kami untuk menyesuaikan rencana pembangunan menara telekomunikasi kami, dan rencana menyewakan, melakukan relokasi menara telekomunikasi yang sudah ada dan memperbolehkan operator lainnya untuk menggunakan menara kami serta melakukan hal-hal lain yang dapat berdampak pada meningkatnya biaya pendirian menara telekomunikasi, keterlambatan dalam konstruksi menara dan gangguan terhadap layanan untuk pelanggan kami. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban ini atau memenuhi target kapasitas jaringan untuk menara telekomunikasi kami, kami mungkin dapat memperoleh hambatan dalam mengembangkan dan menyediakan jasa GSM seluler,

FWA dan 3G. Ketergantungan kami terhadap menara telekomunikasi, digabungkan dengan beban penggunaan menara telekomunikasi bersama, dapat menyebabkan dampak negatif terhadap daya saing kepada operator lain. Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kapasitas jaringan kami, kinerja dan kualitas jaringan dan layanan kami, reputasi, bisnis, hasil usaha serta prospek Perusahaan.

Kemampuan kami untuk memelihara dan memperluas jaringan seluler atau menjalankan usaha kami dapat dipengaruhi oleh gangguan pemasokan dan layanan dari para pemasok utama kami

Kami bergantung pada beberapa pemasok utama untuk menyediakan sebagian besar perangkat yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperluas jaringan seluler, termasuk microwave backbone, dan pada beberapa pemasok lainnya berkenaan dengan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha kami. Kami mengandalkan perangkat dan barang dan jasa lainnya dari para pemasok tersebut untuk memelihara dan mengganti komponen utama dari jaringan seluler dan untuk menjalankan usaha kami. Apabila kami tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mencukupi secara tepat waktu atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, atau apabila terjadi kenaikan harga yang tajam atas barang atau jasa tersebut, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi kami untuk dapat memelihara dan memperluas jaringan seluler dan bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha serta prospek Perusahaan.

Kami bergantung pada ijin-ijin yang kami miliki untuk menyelenggarakan jasa seluler, dan ijin-ijin ini dapat dibatalkan apabila kami tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin tersebut

Kami bergantung pada ijin yang dikeluarkan oleh Menkominfo untuk penyelenggaraan jasa seluler serta penggunaan alokasi spektrum frekuensi. Menkominfo, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengubah ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atas kebijakannya sendiri. Apabila kami melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin-ijin tersebut atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka ijin-ijin kami dapat dicabut. Apabila terjadi pencabutan atau perubahan yang tidak menguntungkan terhadap ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atau kami tidak dapat memperbaharui ijin-ijin tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang serupa, maka hal ini dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Data pelanggan kami terkait dengan operasi kami tidak dapat dibandingkan antar periode

Kami mendefinisikan "pelanggan seluler aktif" sebagai pelanggan seluler pra-bayar yang melakukan pengisian ulang kartu SIM segera dalam 33-hari masa "tenggang waktu" setelah masa kartu SIM berakhir dengan cara menambah jumlah minimal pulsa ke dalam kartu SIM.

Kami telah dari waktu ke waktu mengurangi masa tenggang waktu yang berlaku untuk menghitung jumlah pelanggan seluler pra-bayar untuk lebih mencerminkan pelanggan pra-bayar yang mengisi ulang kartu SIM milik mereka secara lebih akurat. Penambahan atau pengurangan masa tenggang berakibat pada perhitungan jumlah pelanggan kami, Minutes per Usage setiap pelanggan dan ARPU.

Sebagai akibat diatas, jumlah pelanggan kami, Minutes per Usage setiap pelanggan dan ARPU tidak akan mencerminkan jumlah aktual dari pelanggan-pelangan dan tidak dapat dibandingkan antar periode. Dengan demikian, anda sebaiknya tidak menggantungkan keakuratan data ini atau membandingkan data ini dari waktu ke waktu.

Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha kami

Sebelumnya, kami diwajibkan untuk membayar biaya frekuensi untuk bands 800 MHz, 900 MHz dan 1800 Mhz yang didasari pada jumlah stasiun radio. Pada tanggal 15 Desember 2010, pemerintah telah mengubah biaya berbasis perhitungan frekuensi menjadi suatu perhitungan baru yang didasarkan pada lebar alokasi spektrum yang digunakan oleh para pelaku usaha. Sebagai pemegang spektrum terbesar di Indonesia, Indosat diharapkan untuk membayar sejumlah dana yang besar untuk biaya frekuensi mulai dari sekarang dan ke depannya. Peningkatan pada biaya frekuensi ini akan terutama didasarkan pada index harga konsumen dan populasi Indonesia.

Anggapan adanya risiko kesehatan sebagai akibat dari medan elektromagnetik yang ditimbulkan dari BTS dan peralatan telepon genggam, serta gugatan hukum dan publikasi mengenai hal tersebut, tanpa memperhatikan nilainya, dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami

Beberapa spekulasi mengenai risiko terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik dari BTS dan penggunaan telepon genggam telah timbul di masyarakat. Kami tidak dapat menjamin bahwa penelitian di masa mendatang mengenai risiko kesehatan ini tidak akan menyimpulkan adanya hubungan antara medan elektromagnetik dan dampak merugikan terhadap kesehatan sehingga Perusahaan dapat menjadi subyek gugatan dari individu yang menuduh adanya cidera atau hal-hal lainnya, yang dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha kami.

Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Layanan Data Tetap ("MIDI")

Persaingan layanan MIDI kami meningkat, dan kami mungkin akan mengalami penurunan marjin dari jasa tersebut seiring dengan meningkatnya persaingan

Layanan MIDI kami menghadapi persaingan yang semakin ketat dari para operator baru dan operator yang telah ada, yang mungkin memiliki basis pelanggan yang lebih banyak dan sumber dana yang lebih besar dari Perusahaan, seperti Telkom, yang memiliki jangkauan internasional dan regional dan infrastruktur dalam negeri yang telah berkembang. Selain itu, para operator seperti XL, First Media dan Icon+, beberapa di antaranya yang mempunyai aliansi dengan operator telekomunikasi asing, bersaing dengan kami di segmen bisnis ini. Pada tahun 2009, layanan jasa World Link kami menghadapi peningkatan persaingan dengan diluncurkannya layanan kabel internasional "Matrix" oleh PT NAP Info Lintas Nusa pada bulan Agustus 2008.

Bisnis satelit kami juga menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring dengan diluncurkannya satelit-satelit baru dan berkemampuan lebih besar dan dengan adanya beberapa perusahaan yang memperoleh ijin eksklusif untuk menyelenggarakan jasa penyiaran di Indonesia. Perjanjian Kapasitas Transponder Satelit Palapa-C2 dan Palapa D kami mencakup jangka waktu antara dua sampai tiga tahun, dan kami perkirakan sisa umur produktif satelit tersebut adalah berkisar tiga dan 9,7 tahun. Mengingat adanya satelit-satelit lain yang beroperasi dan sewa transponder kami yang akan berakhir atau diakhiri dan adanya persaingan harga yang semakin ketat, maka pihak penyewa transponder kami kemungkinan akan menggunakan satelit-satelit lain, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasional dan pendapatan usaha kami dari sektor jasa ini.

Satelit kami memiliki umur produktif yang terbatas dan dapat rusak atau benar-benar musnah selama pengoperasiannya. Hilangnya atau menurunnya kinerja satelit kami, baik yang disebabkan kerusakan perangkat atau dicabutnya ijin, dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan, hasil usaha dan kemampuan untuk menyediakan beberapa layanan Perusahaan

Satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami mempunyai umur produktif yang terbatas, saat ini diperkirakan berakhir masing-masing pada tahun 2014 dan 2020. Beberapa faktor mempengaruhi umur produktif satelit, di antaranya kualitas dari konstruksi, daya tahan sistem, subsistem dan komponen, cadangan minyak on-board, keakuratan dari peluncuran mereka menuju orbit, risiko badai mikrometeroit, atau bencana alam lain di luar angkasa, benturan dengan puing orbital, atau cara satelit tersebut dimonitor dan dioperasikan. Saat ini kami menggunakan kapasitas transponder satelit kami sehubungan dengan berbagai aspek dari bisnis kami, termasuk sewa langsung untuk kapasitas tersebut dan untuk menyalurkan sambungan jarak jauh internasional dan jasa seluler kami. Kami memperhatikan, bahwa berdasarkan faktor-faktor yang diatas, satelit Palapa-C2 kami dapat saja tidak berfungsi sebelum 2014 dan satelit Palapa-D dapat tidak berfungsi sebelum 2020, dan perbaikan di orbit tidak memungkinkan kecuali perbaikan-perbaikan terhadap perangkat lunak dasar –perbaikan peranti lunak atau operasional. Selanjutnya, Peraturan International Telecommunications Union ("ITU") menyatakan bahwa slot satelit yang telah ditentukan sudah dialokasikan untuk Indonesia, dan Pemerintah berhak menentukan pihak mana yang akan diberikan ijin untuk menggunakan slot tersebut. Meskipun kami saat ini memiliki ijin untuk menggunakan slot satelit yang telah ditentukan, apabila satelit Palapa-D kami mengalami masalah teknis atau tidak berfungsi, Pemerintah dapat menyatakan bahwa kami tidak berhasil memanfaatkan slot yang ada berdasarkan ijin yang diberikan kepada kami, dan dengan demikian Pemerintah dapat mencabut ijin kami dan memberikannya kepada salah satu pesaing kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami akan dapat terus mempertahankan penggunaan slot satelit yang telah ditentukan dengan cara yang dianggap baik oleh Pemerintah.

Kami memelihara asuransi in-orbit satelit Palapa-C2 dan satelit Palapa-D kami dengan syarat dan ketentuan yang konsisten dengan praktik industri. Terhitung sejak 31 Desember 2010, kami telah memiliki polis asuransi dengan total nilai pertanggungan sebesar US$153 juta, untuk jumlah kerugian keseluruhan dan sebagian yang diderita satelit Palapa-C2 dan Palapa D kami. Apabila kerusakan atau kegagalan tersebut mengakibatkan satelit kami tidak layak lagi untuk digunakan, maka kami mungkin akan memilih untuk menghentikan pengoperasian satelit atau menyewa kapasitas transponder dari penyelenggara pihak ketiga daripada membeli satelit baru. Penghentian bisnis satelit kami dapat meningkatkan biaya operasional yang terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi lainnya dan mungkin dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan dan hasil usaha Perusahaan.

Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Jasa Telekomunikasi Tetap Kami

Masuknya operator telekomunikasi Indonesia lainnya sebagai penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasi, pangsa pasar dan hasil usaha kami dari jasa telekomunikasi tetap

Telkom, perusahaan telekomunikasi Indonesia yang telah lama berdiri dengan sumber-sumber keuangan dan politik yang kuat, telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan jasa sambungan jarak jauh internasional dan meluncurkan layanan komersialnya di tahun 2004. Sebagai akibat dari masuknya Telkom ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, kami kehilangan pangsa pasar dan mengalami dampak negatif lainnya yang mempengaruhi usaha jasa telekomunikasi tetap kami. Pada akhir tahun 2006, Telkom telah menguasai pangsa pasar yang jauh lebih besar dari kami untuk sektor jasa sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, pada tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan ijin baru untuk penyelenggaraan jasa sambungan jarak jauh internasional kepada Bakrie Telekom dalam upaya untuk mendorong persaingan yang lebih besar lagi di pasar jasa sambungan jarak jauh internasional. Pemain lama dan munculnya operator baru ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, termasuk jasa penyelenggaraan VoIP yang dilakukan oleh sejumlah operator, secara berkelanjutan menimbulkan ancaman persaingan yang signifikan kepada Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa dampak negatif tersebut tidak akan terus berlanjut atau bahwa meningkatnya persaingan tidak akan terus mengikis pangsa pasar kami atau memberikan dampak negatif bagi marjin operasi dan hasil usaha kami di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional.

Kami menghadapi risiko berkenaan dengan pembukaan kode akses baru untuk sambungan jarak jauh

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan pada saat mereka melakukan telepon SLJJ. Pada tahun 2005, Menkominfo mengumumkan bahwa penggunaan kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilakukan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan akan memberikan kode akses "011" kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengijinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh "017" sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada bulan Desember 2007, Pemerintah menerbitkan peraturan baru untuk membuka kode akses SLJJ di kota pertama di Balikpapan pada bulan April 2008. Sejak tanggal pelaksanaan tersebut, penduduk Balikpapan akan dapat memilih untuk menggunakan kode akses "0", "011" atau "017" untuk melakukan panggilan jarak jauh.

Pada bulan April 2008, Perusahaan dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ dari masing-masing pelanggan kami di Balikpapan. Penggunaan kode akses SLJJ tersebut di kota-kota lain akan dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRTI. Implementasi akses SLJJ baru dapat secara potensial meningkatkan persaingan dengan menawarkan kepada pelanggan kami lebih banyak pilihan untuk layanan SLJJ. Selain itu, pembukaan kode akses SLJJ baru tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kompetisi dan berkurangnya kerjasama oleh operator saat ini, yang dapat mengakibatkan berkurangnya marjin dan pendapatan operasional, yang seluruhnya dapat menimbulkan dampak material yang negatif kepada kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kode akses kami akan terus ada atau dapat berhasil meningkatkan pendapatan Perusahaan dari sektor SLJJ.





ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Pembahasan berikut ini harus dibaca bersama dengan laporan-laporan keuangan konsolidasi Perusahaan yang telah diaudit dan catatan-catatannya per tanggal 31 Desember 2009 dan 2010. Laporan Keuangan konsolidasi per tanggal dan tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja (anggota Ernst & Young Global Limited dari Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tertulis dalam laporan mereka yang terlampir dalam Laporan Tahunan ini.

A. HASIL-HASIL USAHA

Kami adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan menyediakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2010, kami adalah operator seluler terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan seluler. Kami juga menyediakan jasa MIDI kepada para pelanggan korporat dan retail Indonesia maupun regional serta menyediakan jasa sambungan langsung jarak jauh di Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perusahaan

Hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk hal-hal sebagai berikut:

Basis Pelanggan Seluler dan Pola Pemakaian Seluler

Jumlah pelanggan seluler kami dan pemakaian jasa seluler secara langsung mempengaruhi pendapatan usaha seluler kami begitu juga dengan beban usaha kami, termasuk beban interkoneksi dan beban penyusutan dan amortisasi. Untuk memenuhi permintaan atas layanan kami yang semakin meningkat, kami kemungkinan harus memperluas cakupan dan kapasitas jaringan seluler kami, yang memerlukan tambahan pengeluaran barang modal. Peningkatan dalam pengeluaran barang modal kami mempengaruhi arus kas, beban bunga dan beban penyusutan kami.

Kami adalah penyedia jasa seluler yang terbesar kedua di Indonesia, bila diukur dari jumlah pelanggan seluler, dengan 44,3 juta pelanggan (termasuk pelanggan broadband nirkabel) pada tanggal 31 Desember 2010.

Pada tahun 2009, kami mengimplementasikan strategi untuk mengurangi tipe pelanggan "calling card" yang bernilai-rendah, yang kami percaya sebagai pelanggan jangka pendek yang tidak akan mengisi ulang kartu SIM mereka. Berdasarkan strategi ini, kami mengidentifikasi pelanggan prabayar yang tidak mengisi ulang paket perdana mereka setelah kami secara signifikan mengurangi manfaat (seperti bonus aktivasi dan on-net preloads) yang tersedia untuk pelanggan-pelanggan tersebut. Kami percaya bahwa strategi ini memberikan kontribusi secara signifikan dalam penurunan jumlah pelanggan kami selama tahun 2009. Karena strategi ini, selama sembilan bulan pertama tahun 2009, kami telah menghapus 6,8 juta pelanggan jenis tersebut. Jumlah pelanggan kami berkurang sekitar 9,7% dari tanggal 31 Desember 2008, namun pendapatan usaha seluler kami hanya berkurang sebanyak 1,1% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2008. Mulai triwulan ketiga tahun 2009, kami mulai melihat tanda-tanda stabilisasi dalam jumlah pelanggan kami dan kami menambah 4,4 juta pelanggan, setelah dikurangi dari pelanggan yang telah dideaktivasi, pada triwulan keempat tahun 2009. Jumlah pelanggan kami meningkat sekitar 34,3% dari 33,0 juta pada tahun 2009 menjadi 44,3 juta di tahun 2010.

Kompetisi

Kami menghadapi kompetisi yang sangat ketat pada seluruh segmen usaha kami. Kompetisi tersebut diantaranya berakibat kepada tarif yang dapat kami bebankan atas jasa, permintaan dan penggunaan jasa kami serta marjin usaha dan hasil usaha.

Bisnis layanan seluler di Indonesia telah menjadi sangat kompetitif, sebagaimana terlihat dengan adanya program akuisisi besar-besaran atas pelanggan seluler di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Secara historis, kompetisi pada industri seluler utamanya didasarkan kepada cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus serta kualitas dan layanan pelanggan. Sejak tahun 2007, kompetisi semakin terfokus pada harga, dimana seluruh operator, termasuk kami, mulai menawarkan berbagai promosi potongan harga untuk menarik pelanggan, yang kami percayai menyebabkan terjadinya churn rates yang tinggi. Tingkat churn rate pelangggan yang tinggi di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan sensitifitas harga para pelanggan, terutama pelanggan pra-bayar dan rendahnya biaya perpindahan pelanggan pasca bayar akibat pengikatan kontraktual terbatas. Sejak tahun 2009, fokus pasar kepada harga yang merupakan kunci utama terjadinya seleksi produk oleh pelanggan telah menurun dan para pelanggan kembali terfokus pada pendorong historis yaitu cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus.

Berdasarkan estimasi internal kami, ketiga penyelenggara mayoritas layanan nirkabel di Indonesia, Telkomsel, kami dan XL, secara bersama-sama menguasai sekitar 77% pangsa pasar jasa nirkabel di Indonesia pada tahun 2010. Kami berkompetisi dengan Telkomsel dan XL terutama pada cakupan jaringan, kualitas layanan dan harga. Dengan basis pelanggan "on-net" yang lebih besar dan penawaran harga yang lebih menarik bagi panggilan on-net, kami percaya bahwa jumlah pelanggan kami akan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan terhadap penyelenggaran seluler kecil lainnya, mengingat kami tidak perlu membayar biaya interkoneksi kepada pihak ketiga.

Kompetisi pada jasa MIDI juga semakin meningkat. Dalam beberapa tahun ini, kompetisi antar penyelenggara layanan komunikasi data semakin meningkat, yang utamanya disebabkan oleh penerbitan berbagai lisensi baru setelah terjadinya deregulasi pada industri telekomunikasi di Indonesia. Selain itu layanan satelit kami yang terdiri dari penyewaan transponder kepada broadcaster dan penyelenggara telekomunikasi layanan VSAT, seluler dan SLI serta ISP menghadapi kompetisi dari penyelenggara asing dan domestik yang memberikan layanan pada basis pelanggan yang sama.

Kami tidak lagi menjadi satu-satunya penyelenggara jasa SLI tradisional di Indonesia (seperti non VoIP). Pemerintah dapat menerbitkan lisensi baru untuk jasa SLI kepada

operator telekomunikasi lainnya yang akan menyebabkan meningkatnya kompetisi pada layanan telekomunikasi tetap.

Kami menyadari bahwa kompetisi tiga segmen usaha kami akan terus meningkat. Kompetisi telah dan akan memberikan dampak pada hasil operasi dan kondisi keuangan kami.

Tingkat Tarif dan Harga

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Menkominfo menetapkan formula tarif yang menentukan jumlah yang dapat dibebankan oleh operator atas layanan telekomunikasi tetap dan seluler. Namun demikian, Menkominfo mengijinkan operator telekomunikasi tetap dan seluler, termasuk kami, untuk menawarkan paket-paket promosi yang menawarkan harga yang lebih rendah daripada tarif plafon yang ditentukan berdasarkan formula tarif. Saat ini kami menetapkan harga kepada layanan seluler kami berdasarkan berbagai program promosi yang sedang berlangsung yang dimaksudkan untuk menarik pelanggan-pelanggan baru, menstimulasi permintaan dan meningkatkan posisi saing kami. Perubahan dalam struktur harga kami, baik sebagai akibat dari kebijakan tarif Pemerintah atau sebagai tanggapan terhadap persaingan, dapat berdampak bagi pendapatan, hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

Ekonomi Indonesia

Kami percaya bahwa pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia sebagian didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, dan permintaan atas jasa-jasa tersebut akan berlanjut, karena perekonomian Indonesia terus berkembang dan termodernisasi. Kinerja dan kualitas serta pertumbuhan jumlah pelanggan dan penawaran layanan kami tergantung pada kesehatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pengeluaran barang modal

Penyediaan jasa telekomunikasi bersifat sarat modal. Untuk dapat terus bersaing, kami harus terus-menerus melakukan perluasan, memodernisasi dan memperbarui teknologi kami, yang memerlukan pengeluaran barang modal yang besar. Dalam rangka memenuhi permintaan terkait dengan peningkatan yang substansial dalam jumlah pelanggan dan pemakaian jaringan selama tahun 2008 hingga 2010, kami harus meningkatkan pengeluaran barang modal kami secara substansial, terutama untuk memperluas kapasitas jaringan kami. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, pengeluaran barang modal konsolidasi aktual kami masing-masing berjumlah total Rp12.341,9 miliar, Rp11.584,5 miliar, dan Rp5.515,0 miliar (US$613,4 juta). Untuk tahun 2011, kami berencana untuk mengalokasikan US$794,5 juta untuk pengeluaran barang modal baru, yang bila memperhitungkan estimasi pengeluaran barang modal yang direalisasi untuk tahun 2011 untuk komitmen pengeluaran barang modal dari periode sebelumnya, akan menghasilkan jumlah aktual pengeluaran barang modal sekitar US$1.053,8 juta untuk tahun 2011, dimana kami bermaksud untuk menggunakannya bagi pengembangan aset tetap dalam segmen usaha seluler, data tetap dan telekomunikasi tetap kami. Lihat "—Pengeluaran Barang Modal".

Sebelumnya, kami telah membiayai pengeluaran barang modal melalui sumber internal dan arus kas dari kegiatan usaha Perusahaan, dan juga dari hutang pembiayaan melalui pinjaman bank dan pasar modal. Kami mengharapkan untuk terus membiayai pengeluaran barang modal melalui sumber-sumber tersebut. Kami menghadapi risiko likuiditas apabila peristiwa-peristiwa tertentu terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada, lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang kami harapkan, menurunnya peringkat hutang kami, atau menurunnya kinerja keuangan atau rasio keuangan kami. Apabila kami tidak mendapatkan jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung rencana pengeluaran barang modal kami untuk tahun 2011, kami mungkin tidak dapat memperbaiki atau memperluas infrastruktur telekomunikasi seluler kami atau memperbarui teknologi kami yang dibutuhkan untuk tetap bersaing dalam pasar telekomunikasi Indonesia,

dimana hal tersebut dapat berdampak bagi keadaan keuangan, hasil usaha serta prospek kami.

Selain itu, perubahan yang tidak diharapkan dalam teknologi, permintaan kapasitas jaringan yang lebih besar dari pelanggan kami dan tanggapan kepada usaha dan inovasi produk dari pesaing kami dapat mengharuskan kami untuk meningkatkan pengeluaran barang modal kami, yang dapat berdampak bagi pendapatan, hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

Ketidakstabilan Nilai Tukar Valuta Asing

Nilai mata uang Rupiah telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir dari nilai terendah yaitu sekitar Rp17.000 per dolar AS selama krisis keuangan Asia. Selama periode antara tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, nilai tukar Rupiah/ dolar AS berkisar dari nilai terendah Rp12.400 per dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp8.888 per dolar AS dan selama tahun 2010, berkisar dari nilai terendah Rp9.413 per dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp8.888 per dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai tukar Bank Indonesia yang berlaku saat itu adalah sebesar Rp8.991 per dolar AS. Meskipun sebagian besar dari pendapatan usaha kami dalam mata uang Rupiah, sebagian pendapatan usaha kami dalam mata uang Dolar AS. Selain itu, sebagian besar dari pinjaman, pengeluaran barang modal dan beban usaha Perusahaan, termasuk pembayaran bunga untuk Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020 dan Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS, adalah dalam mata uang selain dari Rupiah, terutama dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2010, 43,4% dari pinjaman kami adalah dalam mata uang Rupiah, dan sisanya adalah dalam mata uang Dolar AS. Melemahnya nilai Rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, antara lain nilai Rupiah dari beban yang harus dibayarkan dalam mata uang Dolar AS akan meningkat karena faktor tersebut sehingga kami harus mengkonversi mata uang Rupiah yang lebih banyak lagi guna membayar kewajiban Perusahaan dalam Dolar AS. Sebaliknya, meningkatnya nilai Rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, di antaranya, hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan dari panggilan masuk internasional yang dilakukan oleh pengguna layanan operator asing, roaming oleh pelanggan operator asing di Indonesia dan pendapatan usaha dari jasa MIDI dan operasi satelit kami. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, kami mencatat rugi selisih kurs bersih sebesar Rp885,7 miliar; untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, kami mencatat laba selisih kurs-bersih sebesar Rp1.656,4 miliar; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, kami mencatat laba selisih kurs bersih sebesar Rp492,4 miliar.

Sebagai tambahan, sebagian besar aset dan kewajiban moneter kami dapat terkena dampak risiko mata uang asing. Aset moneter ini terutama terdiri dari kas, setara kas, dan piutang usaha dari operator asing, dan piutang usaha dalam mata uang asing. Kewajiban moneter kami yang dapat terkena dampak risiko mata uang asing terdiri dari hutang pengadaan, hutang jangka panjang dan hutang obligasi yang timbul akibat kewajiban yang berkaitan dengan pengeluaran barang modal. Tingkat aset moneter bersih kami sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah panggilan masuk yang melebihi jumlah panggilan keluar dalam usaha SLI kami dan pendapatan dari mata uang asing kami. Dalam upaya mengelola risiko valuta asing kami dan menurunkan biaya pendanaan kami, kami menandatangani beberapa kontrak swap valuta asing. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami dapat berhasil mengelola tingkat risiko valuta asing kami di kemudian hari ataupun bahwa kami tidak akan terus-menerus terkena dampak risiko valuta asing. Risiko kami terhadap fluktuasi nilai tukar valuta asing, terutama terhadap mata uang dolar AS, dapat meningkat jika Perusahaan mengadakan hutang tambahan dalam mata uang dolar AS untuk membiayai rencana pengeluaran barang modal kami.

Pada bulan Februari dan Maret 2009, kami mendapatkan persetujuan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam

instrumen dan perjanjian hutang kami untuk memberikan tambahan fleksibilitas dalam kewajiban kami untuk mempertahankan ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas, hutang terhadap EBITDA dan EBITDA terhadap beban bunga. Sementara kami percaya bahwa perubahan tersebut akan memberikan ruang yang cukup jika terjadi ketidakstabilan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS , kami tidak dapat memastikan tidak terjadinya ketidakstabilan di masa mendatang dan tidak terjadinya ketidakstabilan yang lebih kuat dibandingkan yang dialami dalam 12 bulan terakhir, yang dapat mengakibatkan pelanggaran persyaratan keuangan kami. Lihat "— Pokok Terhutang."

Tinjauan Usaha

Pendapatan usaha

Kami memperoleh pendapatan usaha terutama melalui penyelenggaraan jasa seluler, MIDI dan telekomunikasi tetap (terutama sambungan jarak jauh internasional). Tabel berikut ini memperlihatkan perincian total pendapatan usaha Perusahaan dan persentase kontribusi dari masing-masing jasa terhadap total pendapatan usaha Perusahaan untuk setiap periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember					
	2008		2009		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	(Rp dalam miliar, kecuali persentase)					
Seluler	14.454,3	75,3	14.300,2	76,0	16.027,1	81,0
Layanan MIDI	2.735,5	14,2	2.721,0	14,4	2.476,2	12,5
Telekomunikasi Tetap	2.021,7	10,5	1.803,0	9,6	1.293,2	6,5
Jumlah Pendapatan Usaha	**19.211,5**	**100,0**	**18.824,2**	**100,0**	**19.796,5**	**100,0**

Faktor-faktor yang paling mempengaruhi pendapatan usaha kami untuk semua jenis jasa yang ditawarkan adalah jumlah pelanggan, tingkat pemakaian dan tarif. Tingkat pemakaian jasa-jasa kami dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan berkelanjutan untuk permintaan atas jasa telekomunikasi di Indonesia, terus berkembangnya perekonomian Indonesia dan persaingan.

Jasa Seluler. Kami menghasilkan pendapatan usaha jasa seluler berasal dari pendapatan pemakaian seluler, jasa nilai tambah, pendapatan langganan bulanan, penjualan modem broadband nirkabel dan telepon genggam seluler, dan pendapatan jasa penyambungan dan juga pendapatan interkoneksi dari penyelenggara telekomunikasi lainnya dan pendapatan sewa menara. Pada triwulan ke-empat tahun 2008, kami mulai mencatat penjualan modem broadband nirkabel dan pemakaian komunikasi data broadband nirkabel sebagai pendapatan usaha Perusahaan dari jasa seluler. Pendapatan tersebut sebelumnya dicatat sebagai bagian dari pendapatan usaha jasa MIDI.

Tabel berikut ini memperlihatkan komponen-komponen pendapatan usaha Perusahaan dari jasa seluler untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember						
	2008		2009		2010		
	Rp	%	Rp	%	Rp	US$	%
	(Rp dalam miliar, US$ dalam juta, kecuali persentase)						
IFRS:							
Pendapatan pemakaian	8.492,8	58,7	7.085,7	49,6	7.944,0	883,6	49,6
Jasa nilai tambah	5.052,6	35,0	5.999,0	42,0	7.039,2	782,9	43,9
Pendapatan interkoneksi	1.833,8	12,6	1.709,2	12,0	1.252,7	139,3	7,8
Sewa menara	–	–	62,4	0,4	252,0	28,0	1,6
Pendapatan langganan bulanan	66,3	0,5	184,2	1,3	200,5	22,3	1,3
Penjualan handsets Blackberry dan modem	82,5	0,6	206,5	1,4	35,0	3,9	0,2
Lain-lain	129,7	0,9	140,3	1,0	172.1	19,2	1,1
Program potongan dimuka dan kesetiaan pelanggan	(1.203,4)	-8,3	(1.087,1)	-7,7	(868.4)	-96,6	-5,5
Jumlah pendapatan usaha layanan seluler	**14.454,3**	**100,0**	**14.300,2**	**100,0**	**16.027,1**	**1.782,6**	**100,0**

Sebagian besar pelanggan seluler kami pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar kurang lebih 97,5% adalah pelanggan prabayar. Kami menawarkan beberapa jasa nilai tambah kepada pelanggan prabayar kami, yang telah meningkatkan pendapatan usaha jasa seluler dari jasa nilai tambah, terutama SMS dan SMS nilai tambah, yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses berbagai macam informasi, seperti berita politik, olahraga dan bisnis. Pendapatan dari jasa nilai tambah (termasuk SMS) mencerminkan masing-masing 35,0%, 42,0% dan 43,9% dari pendapatan usaha jasa seluler kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010. Kami mengharapkan pendapatan dari SMS dan jasa nilai tambah lainnya untuk terus meningkat, yang kami percaya akan didorong oleh layanan broadband nirkabel dan situs jejaring sosial yang berkembang dan perkembangan konten online populer lainnya.

Kami mengakui pendapatan seluler sebagai berikut:

- Pendapatan seluler yang berasal dari pemakaian pulsa dan roaming diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan seluler Perusahaan;
- Untuk pelanggan pasca-bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan;
- Untuk pelanggan pra-bayar, bagian aktivasi dari penjualan paket perdana ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode rata-rata yang diharapkan dari hubungan pelanggan. Penjualan voucher pulsa perdana/isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya;
- Penjualan modem broadband nirkabel dan telepon genggam seluler diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan;
- Pendapatan dari komunikasi data broadband nirkabel diakui berdasarkan durasi dari pemakaian atau tagihan tetap bulanan tergantung perjanjian dengan pelanggan;
- Pendapatan seluler disajikan sebesar jumlah bersih, setelah kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah;
- Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan perusahaan telekomunikasi dalam negeri dan internasional lainnya diakui setiap bulan berdasarkan lalu lintas komunikasi aktual yang tercatat selama bulan berjalan.

Jasa MIDI. Pendapatan usaha dari jasa MIDI terutama berasal dari (i) jasa Internet yang disediakan oleh kami, Indosat Mega Media ("IM2") dan PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"), (ii) jasa IP VPN, sewa jaringan berkecepatan tinggi dan frame relay yang diselenggarakan oleh kami dan Lintasarta, (iii) jasa digital data network yang diselenggarakan oleh Lintasarta, (iv) jasa satelit dan (v) World Link dan Direct Link.

Kami menangguhkan pendapatan instalasi untuk jasa internet, frame net, World link dan Direct link, pada saat penyelesaian instalasi atau koneksi dari peralatan, dan diakui sebagai pendapatan selama masa hubungan pelanggan yang diestimasi. Kami mengakui pendapatan dari biaya jasa bulanan dan jasa MIDI lainnya diakui pada saat jasa tersebut diberikan. Pendapatan dari pemakaian internet diakui setiap bulan berdasarkan durasi pemakaian Internet atau berdasarkan jumlah tetap, tergantung perjanjian dengan pelanggan. Kami mencatat pendapatan sewa satelit dengan metode garis lurus sesuai dengan masa sewa transponder. Biaya sewa bulanan untuk kapasitas transponder satelit didasarkan terutama pada kapasitas yang disewa.

Sebagian besar pendapatan usaha yang berasal dari jasa MIDI adalah dalam mata uang Dolar AS dan oleh karenanya dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Beberapa faktor lainnya juga mempengaruhi pendapatan usaha dari jasa MIDI, termasuk persaingan dengan para penyelenggara telekomunikasi domestik dan internasional, penurunan tarif dan migrasi dari layanan tradisional ke layanan berbasis IP. Kami memperkirakan tren ini akan terus berlangsung tetapi kami yakin bahwa hal ini akan terkompensasi dengan peningkatan jumlah layanan yang disewakan kepada pelanggan korporasi, peningkatan permintaan layanan yang customized, dan juga pengoperasian satelit Palapa-D kami yang baru.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Jasa telekomunikasi tetap meliputi jasa sambungan jarak jauh internasional, jasa telepon jaringan tetap nirkabel dan jasa telepon jaringan tetap. Jasa sambungan jarak jauh internasional yang terdiri dari layanan SLI "001" dan "008", "Flatcall 01016" dan juga layanan dengan bantuan operator dan jasa nilai tambah, memberikan kontribusi sebanyak 76,8% dari jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sementara sisanya berasal dari pendapatan jasa telepon jaringan tetap nirkabel dan telepon jaringan tetap.

Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional. Pendapatan usaha dari jasa sambungan jarak jauh internasional berasal dari dua sumber utama, yaitu pendapatan dari percakapan telepon dari luar negeri dan pendapatan dari percakapan telepon ke luar negeri. Kami telah menegosiasikan volume commitments dan accounting rates dengan para penyelenggara telekomunikasi asing, atau telah melaksanakan sistem tarif market termination based, dan menerima pembayaran dalam jumlah bersih dari operator-operator tersebut. Pembayaran dalam jumlah bersih dan accounting rates ini biasanya dilaksanakan dan dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah, khususnya mata uang Dolar AS; dengan demikian, pendapatan dari percakapan telepon dari luar negeri dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya.

Jasa Telepon Jaringan Tetap Nirkabel. Pada tanggal 31 Desember 2010, kami telah memiliki 550.130 pelanggan telepon jaringan tetap nirkabel di 82 kota di Indonesia. Pada akhir tahun 2010, kami memperluas jasa telepon jaringan tetap nirkabel ke beberapa kota lainnya dalam upaya meningkatkan kapasitas untuk sekitar empat juta pelanggan telepon jaringan tetap nirkabel. Dengan demikian, kami mengharapkan di masa mendatang jasa telepon jaringan tetap nirkabel ini akan menjadi sumber yang semakin penting bagi pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap.

Pendapatan telepon jaringan tetap nirkabel yang berasal dari pendapatan pemakaian diakui berdasarkan durasi panggilan telepon yang berhasil dilakukan melalui jaringan tetap kami. Untuk pelanggan pasca bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa tersebut diserahkan. Untuk pelanggan prabayar, komponen aktivasi dari penjualan paket perdana ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama estimasi hubungan dengan pelanggan. Pendapatan dari penjualan voucher pulsa perdana atau isi ulang diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya.

Jasa Telepon Jaringan Tetap. Saat ini kami memiliki cakupan lokal dan domestik jarak jauh di 82 kota di Indonesia. Pendapatan dari jasa instalasi telepon jaringan tetap ditangguhkan dan diakui selama estimasi masa hubungan pelanggan. Pendapatan dari pemakaian diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap Perusahaan.

Beban Usaha

Beban usaha utama Perusahaan meliputi beban jasa telekomunikasi, penyusutan dan amortisasi, beban karyawan, beban pemasaran dan beban administrasi dan umum.

Beberapa beban Perusahaan dinyatakan dalam mata uang Dolar AS atau mata uang selain Rupiah. Beban-beban tersebut meliputi penyelesaian interkoneksi internasional, beberapa perjanjian pemeliharaan dan biaya konsultasi.

Beban Jasa Telekomunikasi. Beban jasa telekomunikasi meliputi beban interkoneksi, ijin frekuensi radio, pemeliharaan, listrik, gas dan air, sewa, sewa sirkuit, harga pokok penjualan kartu SIM dan voucher isi ulang, USO, biaya akses Blackberry, pemasangan dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyusutan dan Amortisasi. Kami menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aset tetap, selama taksiran umur manfaatnya. Sebagian besar beban penyusutan kami terkait dengan aset yang digunakan untuk jasa seluler Perusahaan. Oleh karena kami terus memperluas dan meningkatkan cakupan, kapasitas dan kualitas jaringan kami, kami memperkirakan beban penyusutan akan terus meningkat.

Pemasaran. Beban pemasaran meliputi beban untuk pameran, promosi dan iklan yang berhubungan dengan program pemasaran kami.

Karyawan. Beban karyawan meliputi gaji, insentif dan imbalan kerja lainnya, bonus, pajak penghasilan karyawan, manfaat kesehatan setelah pensiun, pengobatan dan jasa karyawan outsourcing.

Administrasi dan Umum. Beban administrasi dan umum meliputi sewa, jasa tenaga profesional, listrik, gas dan air, cadangan penurunan nilai piutang, transportasi, dan kantor.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Komponen utama dari pendapatan (beban) lain-lain kami adalah pendapatan bunga, laba (rugi) selisih kurs bersih, beban pendanaan, laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif—bersih. Laba atau rugi selisih kurs biasanya dipengaruhi oleh besarnya hutang non-Rupiah yang belum dibayar, piutang usaha dari perusahaan internasional dan kas dan setara kas dalam mata uang asing. Kami saat ini sedang melakukan lindung nilai/hedging atas sebagian kewajiban kami terkait dengan Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS. Beban pendanaan meliputi bunga pinjaman, biaya bank dan kerugian akibat pelunasan Guaranteed Notes jatuh tempo 2010 dan 2012.

Perpajakan

Beban pajak periode berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode yang bersangkutan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan kewajiban antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu periode dialokasikan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat nilai aset direalisasikan atau nilai kewajiban tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau kewajiban, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing perusahaan tersebut.

Laba bersih

Laba bersih kami untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 tidak setara dengan pendapatan usaha dan laba usaha kami pada periode-periode tersebut. Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya fluktuasi yang besar pada beberapa pos non-usaha yang mempengaruhi laba bersih Perusahaan pada periode-periode tersebut. Pos non-usaha tersebut di antaranya adalah fluktuasi beban pajak penghasilan tangguhan, laba atau rugi selisih kurs-bersih, dan laba atau rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih.

Hasil Usaha

Tabel berikut ini memperlihatkan data pendapatan komprehensif yang dinyatakan dalam persentase dari total pendapatan usaha untuk periode-periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009	2010
	%	%	%
Pendapatan usaha:			
Seluler	75,3	76,0	81,0
MIDI	14,2	14,4	12,5
Telekomunikasi tetap	10,5	9,6	6,5
Jumlah pendapatan usaha	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Beban usaha:			
Beban jasa telekomunikasi	34,5	37,7	35,9
Penyusutan dan amortisasi	23,8	29,5	31,1
Karyawan	8,5	7,7	7,2
Pemasaran	4,8	4,3	5,0
Umum dan administrasi	3,8	3,7	3,3
Jumlah beban usaha	**75,4**	**82,9**	**82,5**
Laba bersih:			
Laba usaha	24,6	17,1	17,5
Pendapatan (beban) lain-lain – Bersih	(12,5)	(5,2)	(12,1)
Laba sebelum pajak penghasilan	12,1	11,9	5,5
Beban pajak penghasilan – bersih	(2,2)	(3,6)	(1,8)
Laba yang diperuntukan untuk pemilik perusahaan	(0,1)	(0,3)	(0,4)
Laba yang diperuntukan pemilik bukan pengendali	9,8	8,0	3,3

Tabel berikut ini memperlihatkan pendapatan usaha dari segmen-segmen usaha untuk periode-periode yang disebutkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember						
	2008		2009		2010		
	Rp	%	Rp	%	Rp	US$	%
	(Rp dalam miliar, US$ dalam juta, kecuali persentase)						
Jasa Seluler							
Pendapatan pemakaian	8,492.8	58.7	7,085.7	49.6	7,944.0	883.6	49.6
Jasa nilai tambah	5,052.6	35.0	5,999.0	42.0	7,039.2	782.9	43.9
Pendapatan interkoneksi	1,833.8	12.6	1,709.2	12.0	1,252.7	139.3	7.8
Sewa menara	–	–	62.4	0.4	252.0	28.0	1.6
Pendapatan langganan bulanan	66.3	0.5	184.2	1.3	200.5	22.3	1.3
Penjualan handset Blackberry dan modem	82.5	0.6	206.5	1.4	35.0	3.9	0.2
Lain-lain	129.7	0.9	140.3	1.0	172.1	19.2	1.1
Program potongan dimuka dan kesetiaan pelanggan	(1,203.4)	-8.3	(1,087.1)	-7.7	(868.4)	-96.6	-5.5
Sub jumlah	**14,454.3**	**100.0**	**14,300.2**	**100.0**	**16,027.1**	**1,782.6**	**100.0**
MIDI							
IP VPN	585.6	21.4	566.1	20.8	605.7	67.4	24.5
Internet	703.9	25.7	677.4	24.9	519.5	57.8	21.0
World link and direct link	456.7	16.7	394.2	14.5	278.8	31.0	11.3
Frame net	315.8	11.5	276.5	10.2	227.1	25.3	9.2
Sewa jaringan	231.6	8.5	211.1	7.8	189.0	21.0	7.6
Jasa aplikasi	118.9	4.3	146.1	5.4	168.2	18.7	6.8
Sewa satelit	96.3	3.5	113.1	4.2	136.0	15.1	5.5
Digital data network	124.9	4.6	144.6	5.3	94.7	10.5	3.8
MPLS	25.1	0.9	67.1	2.5	66.6	7.4	2.7
Lain-lain	76.6	2.9	124.8	4.4	190.6	21.2	7.6
Sub jumlah	**2,735.4**	**100.0**	**2,721.0**	**100.0**	**2,476.2**	**275.4**	**100.0**
Telekomunikasi tetap							
Telepon internasional	1,650.1	81.6	1,422.2	78.9	993.2	110.5	76.8
Telepon jaringan tetap nirkabel	244.3	12.1	249.9	13.9	174.1	19.4	13.5
Telepon jaringan tetap	126.7	6.3	129.9	7.2	125.4	13.9	9.7
Lain-lain	0.7	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Sub jumlah	**2,021.8**	**100.0**	**1,803.0**	**100.0**	**1,293.2**	**143.8**	**100.0**
Jumlah	**19,211.5**		**18,824.2**		**19,796.5**	**2,201.8**	

Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Total pendapatan usaha meningkat dari Rp18.824,2 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp19.796,5 miliar (US$2.201,8 juta), atau sebesar 5,2%, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan jasa seluler kami. Selama tahun 2010, pendapatan usaha dari jasa seluler meningkat sebesar Rp1.726,9 miliar, atau 12,1%, dari Rp14.300,2 miliar pada tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa MIDI menurun dari sebesar Rp244,8 miliar, atau 9,0% dari Rp2.721,0 miliar di tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap di tahun 2010 menurun sebesar Rp509,8 miliar, atau 28,3%, dari Rp1.803,0 miliar di tahun 2009.

Jasa Seluler. Pada tahun 2010, kami mencatat pendapatan usaha dari jasa seluler sebesar Rp16.027,1 miliar (US$1.782,6 juta), meningkat sebesar 12,1% dari Rp14.300,2 miliar pada tahun 2009. Kami percaya bahwa peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan jumlah pelanggan. Pendapatan usaha dari jasa seluler mewakili 81.0 % dari total pendapatan usaha kami pada tahun 2010 yang memiliki persentase yang lebih tinggi daripada persentase pada tahun 2009.

Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp858,3 miliar, atau 12,1%, dari tahun 2009, dan mewakili 49,6% dari total pendapatan usaha jasa seluler kami. Peningkatan dalam pemakaian terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah menit yang digunakan oleh pelanggan kami.

Pada tahun 2010, pendapatan usaha dari jasa seluler yang berasal dari jasa nilai tambah mengalami peningkatan sebesar Rp1,040.2 miliar, atau 17,3%, dibandingkan pada tahun 2009. Kontribusi jasa nilai tambah untuk pendapatan usaha dari jasa seluler meningkat sebesar 1,9% dari 42,0% pada tahun 2009 menjadi 43,9% pada tahun 2010.

Peningkatan pendapatan usaha dari jasa nilai tambah, demikian juga dengan peningkatan kontribusi pendapatan dari jasa nilai tambah kepada pendapatan usaha seluler kami secara keseluruhan, didorong oleh peningkatan dalam penggunaan SMS dan broadband nirkabel.

Jasa MIDI. Pada tahun 2010, pendapatan usaha dari jasa MIDI menurun sebesar Rp244,8 miliar dari Rp2.721,0 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.476,2 miliar (US$275,4 juta) pada tahun 2010. Pendapatan usaha IP VPN mencerminkan komponen terbesar dari pendapatan usaha dari jasa MIDI. Pendapatan usaha IP VPN meningkat sebesar Rp39,6 miliar dari Rp566,1 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp605,7 miliar pada tahun 2010. Penurunan pendapatan usaha dari jasa MIDI, termasuk juga dari jasa Internet, demikian juga dengan jasa sewa jaringan domestik dan internasional, terutama disebabkan oleh meningkatnya persaingan dan menurunnya tarif layanan kami.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Terdapat penurunan dalam pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap dari Rp1.803,0 miliar di tahun 2009 menjadi Rp1.293,2 miliar (US$143,8 juta) pada tahun 2010. Pendapatan usaha dari jasa telepon internasional dan telepon jaringan tetap nirkabel, masing-masing mencerminkan 76,8% dan 13,5%, dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap pada tahun 2010. Sedangkan 9,7% lainnya dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap berasal dari jasa telepon tetap dan layanan-layanan lainnya pada tahun 2010. Pendapatan yang berasal dari telepon internasional menurun dari Rp1.422,2 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp993,2 miliar (US$110,5 juta) pada tahun 2010 akibat dari penurunan lalu lintas telepon SLI ke luar negeri oleh pelanggan Indosat dan pelanggan bukan Indosat. Jumlah volume sambungan telepon internasional dari sambungan "001" dan "008" Perusahaan meningkat sebanyak 6,1% dari 2.060,5 juta menit pada tahun 2009 menjadi 2.186,9 juta menit pada tahun 2010. Jumlah lalu lintas percakapan masuk meningkat sebesar 10,6% dari 1.558,5 juta menit pada tahun 2009 menjadi 1.723,9 juta menit pada tahun

2010, terutama karena adanya volume commitments dari operator telekomunikasi asing. Lalu lintas percakapan keluar menurun sebanyak 7,8% dari 502,0 juta menit pada tahun 2009 menjadi 463,0 juta menit pada tahun 2010 terutama disebabkan oleh penurunan volume commitments dari operator telekomunikasi asing.

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar Rp711,4 miliar, atau 4,6%, dari Rp15.611,2 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp16.322,6 miliar (US$1.815,4 juta) pada tahun 2010, terutama karena adanya peningkatan beban penyusutan dan amortisasi, beban pemasaran dan pengeluaran untuk beban jasa telekomunikasi. Peningkatan ini sebagian diimbangi dengan penurunan beban karyawan, dan beban umum dan administrasi pada tahun tersebut.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp25,5 miliar, atau 0,4%, dari Rp7.087,9 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp7.113,4 miliar (US$791,2 juta) pada tahun 2010, terutama karena adanya peningkatan iuran Pemerintah untuk biaya frekuensi, USO dan biaya-biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi. Peningkatan ini juga terjadi karena pembayaran sewa untuk penambahan BTS, peningkatan biaya interkoneksi dan peningkatan dalam pemeliharaan terkait dengan peningkatan dalam aset tetap kami.

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar 10,6% dari Rp5.561,4 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp6.151,9 miliar (US$684,2 juta) pada tahun 2010, terutama sebagai akibat dari peningkatan dari jumlah aset tetap kami yang berkelanjutan, termasuk satelit Palapa-D kami yang baru. Total biaya dari aset tetap kami meningkat dari Rp74.818,5 miliar di tahun 2009 menjadi Rp78.101,2 miliar (US$8.686,6 juta) di tahun 2010.

Beban karyawan menurun sebesar Rp40,4 miliar, atau 2,8%, dari Rp1.451,6 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1.411,2 miliar (US$157,0 juta) pada tahun 2010, terutama karena penurunan manfaat setelah masa kerja, manfaat atas kelanjutan gaji sebelum pensiun (MPP) dan diimbangi dengan kenaikan gaji dan bonus.

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp169,1 miliar, atau 20,7%, dari Rp816,9 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp986,0 miliar (US$109,7 juta) pada tahun 2010, terutama karena adanya biaya tambahan yang dipergunakan untuk strategi pemberian insentif bagi para dealer yang mulai dilaksanakan pada tahun 2010. Kami percaya strategi pemberian insentif bagi para dealer akan membantu kami untuk menjaga kesetiaan para pelanggan, sekaligus dalam rangka menambah jumlah pelanggan setia baru.

Beban umum dan administrasi menurun sebesar Rp33,4 miliar, atau sebesar 4,8%, dari Rp693,4 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp660,0 miliar (US$73,4 juta) pada tahun 2010 terutama karena penurunan dalam cadangan penurunan nilai piutang, biaya sewa, biaya profesional dan beban perlengkapan kantor, sementara kami terus melaksanakan program efisiensi kami, yang dirancang untuk meminimalisasi biaya non-operasional.

Laba Usaha

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba usaha meningkat sebesar Rp260,9 miliar atau 8,1%, dari Rp3.213,0 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp3.473,9 miliar (US$386,4 juta) pada tahun 2010.

Beban Lain-lain – Bersih

Beban lain-lain bersih meningkat sebesar Rp1.411,1 miliar, dari Rp981,0 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.392,1 miliar (US$266,1 juta) pada tahun 2010, terutama karena laba selisih kurs yang lebih rendah, yang didorong oleh menguatnya Rupiah terhadap Dolar AS yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Laba selisih kurs sebesar Rp1.656,4 miliar pada tahun 2009 menurun menjadi Rp492,4 miliar (US$54,8 juta) pada tahun 2010. Kurs yang digunakan mengalami penurunan dari Rp9.400:US$1 per 31 Desember 2009 menjadi Rp8.991:US$ per 31

Desember 2010, dibandingkan dengan penurunan dari Rp10.950:US$1 per 31 Desember 2008 menjadi Rp9.400:US$1 per 31 Desember 2009.

Rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih menurun sebesar Rp99,6 miliar dari Rp517,7 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp418,1 miliar (US$46,5 juta) pada tahun 2010 disebabkan oleh menguatnya Rupiah terhadap Dolar AS.

Kami mencatat peningkatan pendapatan bunga menjadi Rp143,4 miliar (US$15,9 juta) pada tahun 2010, yang mencerminkan peningkatan sebesar Rp4.4 miliar, atau 3,2% selama tahun 2009, karena jumlah rata-rata kas kami yang lebih tinggi.

Beban lain-lain bersih mengalami penurunan sebesar Rp38,5 miliar dari Rp150,3 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp111,8 miliar (US$12,4 juta) pada tahun 2010 terutama akibat peningkatan pendapatan restorasi submarine cable dan laba dalam penjualan aset tetap.

Beban Pajak Penghasilan - Bersih

Kami mencatat beban pajak penghasilan sebesar Rp357,8 miliar (US$39,8 juta) pada tahun 2010 dibandingkan dengan Rp677,3 miliar pada tahun 2009. Penurunan dalam beban pajak penghasilan-bersih terutama disebabkan oleh pendapatan sebelum pajak yang lebih rendah terkait dengan laba selisih kurs yang lebih rendah dan beban pendanaan yang lebih tinggi.

Laba Bersih

Laba bersih kami menurun sebesar Rp851,0 miliar, atau 56,8%, dari Rp1.498,2 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp647,2 miliar (US$72,0 juta) dikarenakan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Total pendapatan usaha menurun secara marginal dari Rp19.211,5 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp18.824,2 miliar pada tahun 2009, atau sebesar 2,0%, terutama disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan jasa seluler kami. Selama tahun 2009, pendapatan usaha dari jasa seluler menurun sebesar Rp154,1 miliar, atau 1,1%, dari Rp14.454,3 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp14.300,2 miliar pada tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa MIDI menurun sebesar Rp14,5 miliar, atau 0,5% dari Rp2.735,5 miliar di tahun 2008 menjadi Rp2.721,0 miliar di tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap di tahun 2009 menurun secara marginal sebesar Rp218,7 miliar, atau 10,8%, dari Rp2.021,7 miliar di tahun 2008 menjadi Rp1.803,0 miliar di tahun 2009.

Jasa Seluler. Pada tahun 2009, kami mencatat pendapatan usaha dari jasa seluler sebesar Rp14.300,2 miliar, menurun sebesar 1,1% dari Rp14.454,3 miliar pada tahun 2008. Kami percaya bahwa penurunan tersebut terutama disebabkan karena strategi nilai kami, yang dimulai pada tahun 2009, untuk meminimalisir pelanggan bernilai rendah "calling card". Penghapusan jenis pelanggan "calling card" mengakibatkan penurunan kurang dari 1,6% dari pendapatan usaha dari seluler. Selain itu, kami yakin bahwa penurunan pendapatan usaha dari jasa seluler diakibatkan oleh penurunan ARPU kami dari Rp38.639 pada tahun 2008 menjadi Rp37.664 pada tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa seluler mewakili 76,0% dari total pendapatan usaha kami pada tahun 2009 yang memiliki persentase yang sama pada tahun 2008 75,8%.

Pendapatan pemakaian menurun sebesar Rp1.407,1 miliar, atau 16,6%, dari tahun 2008, dan mewakili 49,6% dari total pendapatan usaha jasa seluler kami. Penurunan dalam pemakaian terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pelanggan, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan pendapatan dari jasa nilai tambah.

Pada tahun 2009, pendapatan usaha dari jasa seluler yang berasal dari jasa nilai tambah mengalami peningkatan sebesar Rp946,3 miliar, atau 18,7%, dibandingkan pada tahun 2008. Kontribusi jasa nilai tambah untuk pendapatan usaha dari jasa seluler meningkat sebesar 7,0% dari 35,0% pada tahun 2008 menjadi 42,0% pada tahun 2009. Peningkatan pendapatan usaha dari jasa nilai tambah,

demikian juga dengan peningkatan kontribusi pendapatan dari jasa nilai tambah kepada pendapatan usaha seluler kami secara keseluruhan, didorong oleh peningkatan penggunaan layanan broadband nirkabel kami.

Jasa MIDI. Pada tahun 2009, pendapatan usaha dari jasa MIDI relatif konstan, dengan Rp2.735,5 miliar pada tahun 2008 dan Rp2.721,0 miliar pada tahun 2009. Pendapatan usaha internet terus mencerminkan komponen terbesar dari pendapatan usaha dari jasa MIDI, walaupun terjadi penurunan dalam pendapatan usaha dari Internet sebesar Rp26,5 miliar di tahun 2009. Penurunan pendapatan usaha dari jasa Internet, demikian juga dengan jasa sewa jaringan domestik dan internasional, terutama disebabkan oleh meningkatnya persaingan dan menurunnya tarif jasa kami.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Terdapat penurunan dalam pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap dari Rp2.021,8 miliar di tahun 2008 menjadi Rp1.803,0 miliar di tahun 2009 pada tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa telepon internasional dan telepon jaringan tetap nirkabel, masing-masing mencerminkan 76,8% dan 13,5%, dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap pada tahun 2009. Sedangkan 9,7% lainnya dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap berasal dari jasa telepon tetap dan jasa-jasa lainnya pada tahun 2009. Pendapatan yang berasal dari telepon internasional menurun dari Rp1.650,1 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.422,2 miliar pada tahun 2009 akibat dari penurunan lalu lintas telepon SLI keluar oleh pelanggan bukan Indosat. Jumlah volume sambungan telepon internasional dari sambungan "001" dan "008" Perusahaan meningkat sebanyak 0,2% dari 2.056,4 juta menit pada tahun 2008 menjadi 2.060,5 juta menit pada tahun 2009. Jumlah lalu lintas percakapan masuk menurun sebanyak 1,5%, dengan 1.582,4 juta menit pada tahun 2008 dan 1.558,5 juta menit pada tahun 2009, terutama karena adanya penurunan volume commitments dari operator telekomunikasi asing. Lalu lintas percakapan keluar meningkat sebanyak 5,9% dari 474,0 juta menit pada tahun 2008 menjadi 502,0 juta menit pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan lalu lintas pemakaian dari pelanggan kami, misalnya mereka yang menggunakan jasa "Flatcall 01016".

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar Rp1.133,0 miliar, atau 7,8%, dari Rp14.478,2 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp15.611,2 miliar pada tahun 2009 terutama karena adanya kenaikan beban penyusutan dan amortisasi dan beban jasa telekomunikasi, yang merupakan dua komponen beban usaha terbesar kami. Peningkatan ini sebagian diimbangi dengan penurunan beban karyawan, beban pemasaran dan beban umum dan administrasi pada tahun tersebut.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp460,1 miliar, atau 6,9%, dari Rp6.627,8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp7.087,9 miliar pada tahun 2009 terutama karena adanya peningkatan iuran Pemerintah untuk biaya frekuensi, pembayaran biaya ijin 3G tahunan, termasuk biaya penambahan spektrum pada tahun 2009, USO dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi. Peningkatan ini juga terjadi karena pembayaran sewa untuk penambahan BTS, peningkatan biaya pokok penjualan modem dan handset yang dipengaruhi dari tingginya penjualan Blackberry dan peningkatan beban terkait sewa jaringan, Internet dan penyewaan transponder.

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar 22,1% dari Rp4.555,9 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp5.561,4 miliar pada tahun 2009, terutama sebagai akibat dari pertumbuhan dari jumlah aset tetap kami yang berkelanjutan, termasuk satelit Palapa-D kami yang baru, serta percepatan penyusutan elemen yang tidak digunakan pada jaringan seluler kami. Biaya perolehan aset tetap kami meningkat dari Rp63.478,4 miliar di tahun 2008 menjadi Rp74.818,5 miliar di tahun 2009.

Beban karyawan menurun sebesar Rp187,4 miliar, atau 11,4%, dari Rp1.639,0 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.451,6 miliar pada tahun 2009, terutama karena penurunan tarif pajak penghasilan karyawan, serta penurunan bonus, insentif dan kenikmatan karyawan lainnya, beban pegawai outsourcing dan tunjangan kesehatan masa pensiun.

Beban pemasaran menurun sebesar Rp101,2 miliar, atau 11,0%, dari Rp918,1 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp816,9 miliar pada tahun 2009 terutama karena adanya penurunan beban iklan, promosi dan pameran, sejalan dengan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan program efisiensi yang kami lakukan.

Beban administrasi dan umum menurun sebesar Rp44,0 miliar, atau 6,0%, dari Rp737,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp693,4 miliar pada tahun 2009 terutama karena penurunan biaya transportasi, pelatihan, pendidikan dan penelitian, biaya jasa profesional, biaya kantor dan biaya makan karyawan, sementara kami terus melaksanakan program efisiensi yang dirancang untuk mengurangi biaya non-operasional.

Laba usaha

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba usaha menurun sebesar Rp1.520,3 miliar atau 32,1%, dari Rp4.733,3 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp3.213,0 miliar pada tahun 2009.

Beban Lain-lain – Bersih

Beban lain-lain - bersih menurun sebesar Rp1.427,2 miliar, dari Rp2.408,2 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp981,0 miliar pada tahun 2009, terutama karena adanya laba selisih kurs, yang didorong oleh menguatnya Rupiah terhadap Dolar AS. Dari rugi selisih kurs-bersih sebesar Rp885,7 miliar pada tahun 2008, kami mencatat laba selisih kurs-bersih sebesar Rp1.656,4 miliar pada tahun 2009.

Kami mencatat laba perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp136,6 miliar pada tahun 2008 dan rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp517,7 miliar pada tahun 2009 disebabkan oleh menguatnya rupiah terhadap Dolar AS.

Kami mencatat penurunan pendapatan bunga menjadi Rp139,0 miliar pada tahun 2009, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp321,1 miliar, atau 69,8% dari tahun 2008, karena jumlah rata-rata kas lebih rendah.

Beban lain-lain bersih mengalami peningkatan sebesar Rp116,8 miliar dari Rp33,5 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp150,3 miliar pada tahun 2009 terutama akibat peningkatan kerusakan aset tetap yang disebabkan bencana alam, seperti gempa bumi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2009 dibandingkan tahun 2008 yang menyebabkan perusahaan asuransi menurunkan jumlah yang dapat diklaim dari kerusakan aset tetap yang diasuransikan seiring dengan bertambahnya pembatasan dalam amandemen perjanjian asuransi, Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 8 Juni 2009 atas pajak penghasilan badan Satelindo dan Pajak Penghasilan pasal 4(2), 21, dan 23 untuk tahun pajak 2002 dan 2003 dan pemeriksaan pajak atas PPN Satelindo utnuk tahun pajak 2002 dan 2003.
Beban Pajak Penghasilan-Bersih

Kami mencatat beban pajak penghasilan-bersih sebesar Rp419,8 miliar pada tahun 2008 dibandingkan dengan Rp677,3 miliar pada tahun 2009. Peningkatan dalam beban pajak penghasilan-bersih terutama disebabkan oleh penyesuaian manfaat pajak penghasilan yang ditangguhkan karena adanya perubahan dalam tarif pajak penghasilan pada tahun 2008.

Laba Bersih

Laba bersih kami menurun sebesar Rp380,3 miliar, atau 20,2%, dari Rp1.878,5 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.498,2 miliar pada tahun 2009 dikarenakan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Secara historis, kebutuhan likuiditas kami timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal sehubungan dengan perluasan bisnis telekomunikasi Perusahaan. Bisnis telekomunikasi kami membutuhkan modal yang besar untuk membangun dan memperluas infrastruktur jaringan bergerak dan data dan untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan, terutama selama tahap pengembangan jaringan. Meskipun kami memiliki banyak infrastruktur jaringan yang telah ada, kami memperkirakan akan kembali melakukan pengeluaran

barang modal khususnya untuk pengembangan jaringan seluler di daerah-daerah yang diperkirakan sebagai daerah yang tinggi pertumbuhannya, dan juga untuk meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan yang telah ada.

Kami berkeyakinan kas dan setara kas kami, arus kas dari kegiatan usaha Perusahaan dan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia akan cukup memenuhi kebutuhan dana yang telah diantisipasi, termasuk kebutuhan dana untuk modal kerja dan pengeluaran barang modal yang telah direncanakan, di masa mendatang. Akan tetapi, apabila keadaan ekonomi dunia atau Indonesia memburuk, persaingan atau produk pengganti yang timbul lebih cepat di luar perkiraan saat ini atau nilai mata uang Rupiah melemah secara tajam terhadap Dolar AS, maka arus kas bersih Perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha dapat menurun dan jumlah pengeluaran barang modal yang dibutuhkan dalam mata uang Rupiah dapat meningkat, dimana salah satu di antaranya dapat memberikan dampak negatif bagi likuiditas kami.

Arus Kas

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai arus kas Perusahaan secara historis:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(Rp dalam miliar, US$ dalam juta)			
Arus kas bersih:				
Yang disediakan dari kegiatan usaha	6,513.3	4,051.2	6,839.0	760.6
Yang digunakan untuk kegiatan investasi	(10,286.9)	(10,670.7)	(5,970.7)	(664.1)
Yang disediakan dari kegiatan pendanaan	1,458.5	3,724.7	(1,629.7)	(181.2)

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Kegiatan Usaha

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha adalah masing-masing sebesar Rp6.513,3 miliar, Rp4.051,2 miliar, dan Rp6.839,0 miliar (US$760,6 juta) untuk tahun 2008, 2009 dan 2010. Pada tahun 2010, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha meningkat terutama karena penerimaan dari pelanggan.

Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Kegiatan Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi adalah masing-masing sebesar Rp10.286,9 miliar, Rp10.670,7 miliar dan Rp5.970,7 miliar (US$664,1 juta) untuk tahun 2008, 2009 dan 2010. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi untuk tahun 2008, 2009 dan 2010 terutama untuk perolehan aset tetap mencapai total masing-masing sebesar Rp10.307,9 miliar, Rp10.684,7 miliar dan Rp6.495,1 miliar (US$722,4 juta), seiring dengan dilakukannya perluasan cakupan dan kapasitas jaringan kami selama tahun-tahun tersebut. Aset tetap yang dibeli terutama meliputi aset sentral dan jaringan, perlengkapan pelanggan dan peralatan lain dan sarana penunjang, bangunan dan partisi.

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Kegiatan Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan adalah masing-masing sebesar Rp1.458,5 miliar, Rp3.724,7 miliar dan Rp1.629,7 miliar (US$181,2 juta) pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan pendanaan pada tahun 2010 terutama berkaitan dengan pembayaran kembali hutang jangka panjang, hutang obligasi, yang sebagian diimbangi oleh hasil dari hutang obligasi.

Pokok Terhutang

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah hutang yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010:

	Sampai dengan tanggal 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(Rp dalam miliar, US$ dalam juta)			
Hutang jangka panjang (setelah dikurangi biaya emisi pinjaman dan biaya consent solicitation yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek)	10.812,2	12.721,3	7.666,8	852,7
Hutang obligasi (setelah dikurangi biaya emisi hutang obligasi, diskon, biaya consent solicitation yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek)	10.315,6	8.472,2	12.114,1	1.347,4
Bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang	572,5	1.440,2	3.184,2	354,1
Bagian jangka pendek dari hutang obligasi	56,4	2.840,7	1.098,1	122,1

Penurunan hutang jangka panjang (setelah dikurangi biaya emisi pinjaman dan biaya consent solicitation yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek) menjadi sebesar Rp7.666,8 miliar (US$852,7 juta) pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp12.721,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh pembayaran lebih awal terhadap fasilitas kami dengan Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank DBS Indonesia. Peningkatan hutang obligasi (setelah dikurangi biaya emisi hutang obligasi, diskon, biaya consent solicitation yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek) dari Rp8.472,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp12.114,1 miliar (US$1.347,4 juta) pada tanggal 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh penerbitan atas Guaranteed Notes kami yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Beberapa instrumen hutang kami (selain dari Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020) mewajibkan kami untuk mempertahankan maksimum rasio tertentu atas hutang (atau pinjaman) terhadap ekuitas, atau rasio hutang terhadap ekuitas yang sebelum Februari 2009 adalah 1,75:1,0 atau 175%. Sebagai hasil dari perubahan-perubahan yang kami minta atas instrumen dan perjanjian-perjanjian tersebut, kami sepakat dengan pemberi pinjaman dan wali amanat di bulan Februari dan Maret 2009 bahwa rasio hutang terhadap ekuitas menjadi 2,50:1,0 atau 250%. Kami juga meminta dan mendapatkan persetujuan pada batasan-batasan tertentu pada rasio hutang terhadap ekuitas sehingga definisi tersebut menjadi seragam terhadap seluruh instrumen dan perjanjian-perjanjian. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020 tidak memuat persyaratan rasio hutang terhadap ekuitas.

Hutang kami meningkat sebesar 30,5% dari Rp16.692,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp21.756,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 terutama disebabkan oleh (i) peningkatan dalam penerbitan hutang baru untuk mendukung peningkatan pengeluaran barang modal pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 dan (ii) efek akuntansi dari penurunan nilai Rupiah terhadap Dolar AS. Nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah menurun dari Rp10.950 untuk US$1,00 pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp9.400 untuk US$1,00 pada tanggal 31 Desember 2009. Karena bagian kewajiban kami dalam mata uang Dolar AS, kami terkena imbas fluktuasi Rupiah. Depresiasi Rupiah dan peningkatan ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing mengekspos kami terhadap penyesuaian akuntansi jangka pendek yang mempengaruhi rasio keuangan kami.

Untuk membantu menangani efek fluktuasi mata uang tersebut di masa depan, pada tahun 2009, kami mengubah kesepakatan rasio hutang terhadap ekuitas dalam semua instrumen dan perjanjian hutang kami untuk meningkatkan rasio dari 1,75 menjadi 2,50, untuk memberikan kami "ruang" tambahan dalam hal terjadinya pergerakan nilai tukar mata uang asing yang merugikan. Kami juga mengubah ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas untuk mencerminkan secara lebih baik efek kebijakan lindung nilai pada rasio ini dan mengubah definisi "Hutang" dan "Ekuitas" dalam instrumen dan perjanjian hutang tersebut untuk memberikan ruang dalam butir-butir tersebut. Guaranteed Notes jatuh tempo tahun 2020 tidak mengandung ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas.

Sebagai bagian dari perubahan yang disetujui pada tahun 2009, kami mendapatkan persetujuan untuk mengubah definisi dalam beberapa instrumen dan perjanjian hutang kami: (i) mengecualikan hal-hal non-kas, termasuk laba atau rugi kurs valuta asing, dari definisi "EBITDA"; (ii) mengecualikan hutang pengadaan yang dikenakan bunga dari definisi "Hutang" kecuali apabila jatuh temponya lebih dari enam bulan dari tanggal tagihan (invoice); dan (iii) memasukkan dalam definisi "Ekuitas" (a) hak minoritas, untuk entitas yang hutangnya 100% terkonsolidasi oleh kami, dan (b) pinjaman subordinasi pemegang saham.

Walaupun kami yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut akan memberikan kami ruangan yang cukup dalam hal terjadi ketidakstabilan antara nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah, kami tidak dapat memastikan bahwa ketidakstabilan yang lebih besar daripada yang terjadi pada 12 bulan terakhir tidak akan terjadi, yang dapat mengakibatkan kami melanggar ketentuan keuangan kami.

Di bawah ini adalah penghitungan rasio keuangan kami secara historis yang terdapat dalam ketentuan keuangan kami berdasarkan SAK yang dipersyaratkan oleh perjanjian hutang kami. Rasio keuangan secara historis pada tanggal 31 Desember 2008 dihitung berdasarkan perubahan definisi "Hutang" (juga didefinisikan sebagai "Pinjaman" dalam beberapa terjemahan instrumen dan perjanjian hutang kami"), "Ekuitas" dan "EBITDA" dalam beberapa instrumen dan perjanjian kami seolah definisi tersebut telah berlaku sejak tanggal tersebut.

Persyaratan Ratio	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(Rp dalam miliar, US$ dalam juta, kecuali persentase)			
Posisi Keuangan dan Pendapatan Komprehensif				
Bagian jangka pendek dari:				
Hutang jangka panjang	572,5	1.440,2	3.184,2	354,1
Hutang obligasi	56,4	2.840,7	1.098,1	122,1
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.596,2	2.192,5	997,0	110,9
Pihak ketiga	9.216,0	10.528,8	6.669,8	741,8
Hutang obligasi – setelah dikurangi bagian jangka pendek	10.315,6	8.472,2	12.114,1	1.347,4
Biaya emisi hutang obligasi, biaya consent solicitation dan diskon yang belum diamortisasi	312,3	338,5	336,1	37,4
Jumlah hutang[1]	22.069,0	25.812,0	24.399,2	2.713,7
Jumlah aset	51.693,3	55.041,5	52.818,2	5.874,6
Jumlah Ikewajiban	33.994,8	36.753,2	34.581,7	3.846,3
Jumlah ekuitas[2]	17.698,5	18.288,3	18.236,5	2.028,3
Laba usaha	4.733,3	3.213,0	3.473,9	386,4
Penyusutan dan amortisasi	4.555,9	5.561,4	6.151,9	684,2
EBITDA[3]	9.289,2	8.774,4	9.625,8	1.070,6
Beban bunga[4]	1.776,5	1.808,6	2.080,3	231,3

Rasio Keuangan:					
Rasio hutang terhadap ekuitas[5]	<2,50x	1,25x	1,41x	1,34x	–
Rasio hutang terhadap EBITDA[6]	<3,50x	2,38x	2,94x	2,53x	–
Rasio EBITDA terhadap beban bunga[7]	>3,00x	5,23x	4,85x	4,63x	–

(1) Kami mendefinisikan total hutang sebagai jumlah dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi (bagian jangka pendek dan jangka panjang), biaya emisi yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang, obligasi dan notes), biaya consent solicitation yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang dan obligasi) dan diskon yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang dan notes).
Menurut definisi yang telah diubah, "Hutang" berarti, dalam hubungannya dengan suatu pihak pada setiap tanggal penentuan (tanpa duplikasi):
(a) jumlah hutang pokok dan premium (jika ada) sehubungan dengan hutang kepada pihak tersebut dan hutang yang sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat hutang, obligasi atau instrumen serupa lainnya untuk pembayaran kepada pihak yang bertanggung jawab atau besar kemungkinan terlibat dalam suatu hal, tingkat suku bunga atau mengandung bunga yang masih harus dibayar; dan
(b) seluruh kewajiban kepada suatu pihak sehubungan dengan hutang pengadaan yang merupakan hutang usaha kepada pemasok yang mengandung suku bunga atau mengandung bunga yang masih harus dibayar dan pembayaran yang memiliki jatuh tempo lebih dari enam (6) bulan setelah tanggal penerbitan tagihan yang terkait. Akan tetapi, sehubungan dengan anggota dari Perusahaan, atau penggantinya, atau Grup, tidak termasuk seluruh pinjaman yang diperoleh anggota grup dari pemegang saham Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) yang memiliki peringkat subordinasi terhadap hutang termasuk dalam poin (a) dan (b) di atas.

(2) Kami mendefinisikan ekuitas sebagai jumlah ekuitas para pemegang saham dan hak minoritas. Menurut definisi yang telah diubah, "Ekuitas" berarti jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban, dimana jumlah kewajiban tidak termasuk seluruh pinjaman anggota Grup kepada pemegang saham Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) yang mempunyai kedudukan subordinasi terhadap Hutang.

(3) Kami telah mendefinisikan EBITDA sebagai pendapatan sebelum bunga, amortisasi goodwill, pendapatan non-operasional dan beban, beban pajak penghasilan dan penyusutan, dan hak minoritas dalam laba bersih anak perusahaan sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi yang dihitung berdasarkan SAK. EBITDA bukanlah merupakan ukuran standar dalam SAK maupun IFRS. Sebagaimana bisnis telekomunikasi yang memerlukan modal yang banyak, ketentuan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang dan beban bunga dapat memiliki efek yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan dengan hasil operasional yang sama. Oleh karena itu, kami yakin bahwa EBITDA memberikan gambaran yang berguna bagi hasil operasional kami dan bahwa laba bersih adalah ukuran keuangan yang paling dapat secara langsung dibandingkan terhadap EBITDA sebagai indikator kinerja operasional. Anda tidak disarankan menganggap bahwa definisi kami tentang EBITDA merupakan indikator terhadap kinerja operasional, likuiditas atau ukuran standar lainnya berdasarkan SAK maupun IFRS, atau definisi perusahaan lainnya atas EBITDA. Definisi kami akan EBITDA tidak memperhitungkan pajak dan pengeluaran kas non-operasional lainnya. Dana yang didapat dari ukuran ini mungkin tidak dapat digunakan untuk pembayaran

hutang karena adanya pembatasan ketentuan, persyaratan pengeluaran barang modal dan komitmen lainnya. Menurut definisi yang telah diubah, "EBITDA" berarti, untuk periode adalah jumlah laba usaha (yang dihitung sebelum beban pendanaan, pajak, pendapatan atau biaya yang berasal dari kegiatan non-operasional dan biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah depresiasi dan amortisasi, serta untuk keperluan penghitungan rasio total Hutang terhadap EBITDA dari Grup, setelah memperhitungkan proforma dari adanya akuisisi atau pengalihan material atas aset atau usaha seolah-olah akuisisi atau pengalihan tersebut terjadi pada hari pertama periode tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan rekonsiliasi laba bersih berdasarkan SAK terhadap pengertian EBITDA berdasarkan periode-periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(Rp dalam miliar, US$ dalam juta)			
EBITDA berdasarkan SAK	9.289,2	8.774,4	9.625,8	1.070,6
Penyesuaian:				
Amortization of goodwill	(227,3)	(235,4)	(226,4)	(25,2)
Pendapatan bunga	460,1	139,0	143,4	15,9
Beban pendanaan (termasuk beban bunga)	(1.858,3)	(1,873,0)	(2.271,6)	(252,7)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif – bersih	136,6	(517,7)	(418,1)	(46,5)
Lain-lain – bersih	(33,6)	(150,3)	(111,8)	(12,4)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(885,7)	1.656,4	492,4	54,8
Beban pajak penghasilan – bersih	(419,8)	(677,3)	(357,8)	(39,8)
Penyusutan dan amortisasi	(4.555,9)	(5.561,4)	(6.151,9)	(684,2)
Laba untuk kepentingan bukan pengendali	(26,8)	(56,5)	(76,8)	(8,5)
Laba kepada pemilik perusahaan berdasarkan SAK	**1.878,5**	**1.498,2**	**647,2**	**72,0**

Tabel berikut ini menunjukkan rekonsiliasi EBITDA berdasarkan SAK terhadap IFRS berdasarkan periode-periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(Rp dalam miliar, US$ dalam juta)			
EBITDA berdasarkan SAK	9.289,2	8.774,4	9.625,8	1.070,6
Komisi Dealer	–	–	46,9	5,2
Penadapatan Jasa Penyambungan yang ditangguhkan	4,4	22,7	11,8	1,3
EBITDA berdasarkan IFRS	9.293,6	8.797,1	9.684,5	1.077,1

(4) "Beban Bunga" berarti, untuk setiap periode, beban bunga atas Hutang.
(5) menggunakan hasil IFRS, total Hutang akan mencapai masing-masing Rp22.069,0 miliar, Rp25.807,1 miliar dan Rp24.399,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, dan Total Ekuitas mencapai masing-masing sebesar Rp17.779,7 miliar, Rp18.574,9 miliar dan Rp18.702,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, sebagai akibatnya rasio Hutang terhadap Ekuitas adalah 124%, 139% dan 130% per 31 Desember 2008, 2009 dan 2010.
(6) menggunakan hasil IFRS, total Hutang akan mencapai masing-masing Rp22.069,0 miliar, Rp25.807,1 miliar dan Rp24.399,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, dan EBITDA akan mencapai Rp9.293,6 miliar, Rp8.797,1 miliar dan Rp9.684,5 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, mengakibatkan rasio Hutang terhadap EBITDA, masing-masing 237%, 293% dan 252% per tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010.
(7) menggunakan hasil IFRS, EBITDA sebesar Rp9.293,6 miliar, Rp8.797,1 miliar dan Rp9.684,5 miliar untuk tahun yang berakhir 31 December 2008, 2009 dan 2010, dan Beban Bunga Rp1.776,5 miliar, Rp1.808,6 miliar dan Rp2.080,3 miliar untuk tahun yang berakhir 31 December 2008, 2009 dan 2010, mengakibatkan rasio EBITDA terhadap Beban Bunga 523%, 486% dan 466% per 31 Desember 2008, 2009 dan 2010.

Dari waktu ke waktu, kami dapat membeli kembali bagian efek hutang kami melalui transaksi pasar terbuka berdasarkan kondisi pasar pada umumnya.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan hutang jangka panjang dan hutang obligasi utama kami per 31 Desember 2008, 2009 dan 2010.

	Per tanggal 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(Rp dalam miliar, US$ dalam juta)			
Hutang Obligasi:				
Guaranteed Notes Due 2020–net of unamortized discount and unamortized notes issuance cost	–	–	5.749,6	639,5
Obligasi Indosat Kelima – setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	2.593,1	2.587,2	2.589,0	288,0
Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2010 – setelah dikurangi biaya emisi GN yang belum diamortisasi	2.563,5	2.202,7	–	–
Obligasi Indosat Ketujuh – setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	–	1.293,8	1.294,6	144,0
Obligasi Indosat Keenam – setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	1.075,7	1.073,0	1.074,6	119,5
Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2012 – setelah dikurangi biaya emisi GN yang belum diamortisasi	1.185,3	1.018,8	–	–
Obligasi Indosat Keempat – setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	810,5	811,0	813,6	90,5
Obligasi Indosat Ketiga – setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	637,3	637,9	–	–
Indosat Sukuk Ijarah III – setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	567,8	566,4	567,4	63,1
Indosat Sukuk Ijarah II – setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	399,0	398,1	398,5	44,3

	Per tanggal 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(Rp dalam miliar, US$ dalam juta)			
Obligasi Indosat Syari'ah Ijarah – setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	283,4	283,6	284,5	31,6
Obligasi Indosat Kedua	200,0	199,4	199,3	22,2
Indosat Sukuk Ijarah IV – setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	–	199,0	199,1	22,1
Obligasi Terbatas II yang dikeluarkan Lintasarta(1)	31,1	25,0	25,0	2,8
Obligasi Terbatas I yang dikeluarkan Lintasarta(2)	25,3	17,0	17,0	1,9
Jumlah hutang obligasi	10.372,0	11.312,9	13.212,2	1.469,5
Dikurangi bagian jangka pendek	56,4	2.840,7	1.098,1	122,1
Jumlah obligasi: bagian jangka panjang	**10.315,6**	**8.472,2**	**12.114,1**	**1.347,4**
Hutang Jangka Panjang:				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa – setelah dikurangi biaya emisi pinjaman yang belum diamortisasi	1.796,1	2.592,4	1.297,1	144,2
Pihak ketiga – setelah dikurangi biaya emisi pinjaman yang belum diamortisasi	9.588,5	11.569,1	9.553,9	1.062,6
Jumlah hutang jangka pendek	11.384,6	14.161,8	10.851,0	1.206,8
Dikurangi bagian jangka pendek	572,5	1.440,2	3.184,2	354,1
Hutang jangka panjang: bagian jangka panjang	**10.812,2**	**12.721,3**	**7.666,8**	**852,7**

(1) Setelah dieliminasi dengan Obligasi Terbatas II yang diterbitkan kepada Perusahaan sebesar Rp35,0 miliar

(2) Setelah dieliminasi dengan Obligasi Terbatas I yang diterbitkan kepada Perusahaan sebesar Rp9,6 miliar

Obligasi Indosat

Ketentuan-ketentuan khusus untuk masing-masing Obligasi Indosat Kedua, Obligasi Indosat Ketiga, Obligasi Indosat Keempat, Obligasi Indosat Kelima, Obligasi Indosat Keenam dan Obligasi Indosat Ketujuh ("Obligasi Indosat") akan diuraikan di bawah ini. Obligasi Indosat tidak dijamin dengan aset tertentu atau dijamin oleh pihak lain dan berkedudukan pari passu dengan hutang lainnya yang tidak dijamin. Kami menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyetujui untuk mempertahankan:

- modal ekuitas sekurang-kurangnya Rp5.000,0 miliar;
- rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5 terhadap 1,00, sebagaimana dilaporkan dalam tiap-tiap laporan keuangan konsolidasi tahunan;
- rasio hutang terhadap ekuitas 2,5 berbanding 1, sebagaimana dilaporkan pada tiap-tiap laporan keuangan konsolidasi triwulanan; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam tiap-tiap laporan keuangan konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya 3,0 berbanding 1.

Pada tanggal 24 Maret 2009 kami mengadakan rapat dengan pemegang obligasi Rupiah, termasuk pemegang Obligasi Indosat, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Hutang," "EBITDA," memasukkan definisi baru "Ekuitas" dan "Grup" dan mengubah rasio Hutang terhadap Ekuitas dari 1,75 berbanding 1 menjadi 2,5 berbanding 1 dalam perjanjian perwaliamanatan yang mengatur obligasi-obligasi tersebut, berdasarkan perubahan perjanjian untuk Obligasi Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam.

Obligasi Indosat Kedua. Pada 6 November 2002, kami menerbitkan Obligasi Indosat II ("Obligasi Indosat Kedua"), dengan tingkat suku bunga tetap dan/atau mengambang, dimana satu-satunya seri yang masih terhutang adalah obligasi Seri B. Obligasi Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp200,0 miliar Rupiah, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 16,0% per tahun dan wajib dibayar setiap triwulan selama 30 tahun dimulai sejak 6 Februari 2003. Kami memiliki hak untuk membeli kembali obligasi Seri B, secara keseluruhan tapi tidak secara sebagian, setiap ulang tahun ke-5, 10, 15, 20 dan 25 atas penerbitan obligasi Seri B pada harga yang setara dengan 101% dari nilai nominal obligasi Seri B. Para pemegang obligasi Seri B memiliki suatu put right yang mengizinkan para pemegang tersebut untuk meminta pembayaran awal dari kami pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi Seri B pada saat (i) kapan pun, apabila peringkat dari obligasi tersebut turun menjadi "id AA-" atau lebih rendah (ii) setelah lewatnya salah satu dari ulang tahun ke-15, 20, dan 25 pada penerbitan obligasi Seri B. Obligasi Seri B jatuh tempo pada 6 November 2032.

Obligasi Indosat Ketiga. Pada 22 Oktober 2003, kami menerbitkan Obligasi Indosat III ("Obligasi Indosat Ketiga"), dimana satu-satunya seri yang terhutang adalah obligasi Seri B. Obligasi Seri B, yang mana akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp640,0 miliar, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,875% per tahun. Bunga atas Obligasi Indosat Ketiga dibayar setiap triwulan. Kami memiliki hak untuk melakukan pembayaran awal atas seluruh obligasi Seri B pada ulang tahun ke-empat dan ke-enam atas obligasi tersebut pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi. Setelah peringatan pertama penerbitan obligasi, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh bagian dari obligasi senilai harga pasar. Pada 22 Oktober 2010, kami membayar penuh seri dari Obligasi Indosat Ketiga senilai Rp640,0 miliar.

Obligasi Indosat Keempat. Pada 21 Juni 2005, kami menerbitkan Obligasi Indosat IV ("Obligasi Indosat Keempat"). Obligasi Indosat Keempat memiliki nilai nominal sebesar Rp815,0 miliar dan akan jatuh tempo pada 21 Juni 2011. Obligasi Indosat Keempat memiliki tingkat suku bunga tetap 12,0% per tahun, yang wajib dibayar setiap triwulannya. Kami memiliki hak untuk membeli kembali seluruh obligasi pada ulang tahun keempat obligasi-obligasi tersebut pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi tersebut. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar.

Obligasi Indosat Kelima. Pada 29 Mei 2007, kami menerbitkan Obligasi Indosat V ("Obligasi Indosat Kelima"), dalam dua seri dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.600,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan nilai nominal sebesar Rp1.230,0 miliar, akan jatuh tempo pada 29 Mei 2014 dan obligasi Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp1.370,0 miliar, akan jatuh tempo pada 29 Mei 2017. Obligasi Seri A memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 10,20% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 10,65% per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar, baik untuk disimpan ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

Obligasi Indosat Keenam. Pada 9 April 2008, kami menerbitkan Obligasi Indosat VI ("Obligasi Indosat Keenam"), dalam dua seri dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.080,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan jumlah sebesar Rp760,0 miliar, yang akan jatuh tempo pada 9 April 2013 dan Obligasi Seri B, dengan jumlah sebesar Rp320,0 miliar yang akan jatuh tempo pada 9 April 2015. Obligasi Seri A memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,80% per tahun. Setelah ulang tahun

pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar, baik untuk disimpan ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

Obligasi Indosat Ketujuh. Pada 8 Desember 2009, kami menerbitkan Obligasi Indosat VII ("Obligasi Indosat Ketujuh"), dalam dua seri dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.300,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan jumlah sebesar Rp700,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2014 dan obligasi Seri B, dengan jumlah sebesar Rp600,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2016. Obligasi seri A memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 11,25% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 11,75% per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar, baik untuk disimpan ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 dan Guaranteed Notes 2012

Pada bulan Oktober 2003, anak perusahaan kami di bidang pembiayaan, Indosat Finance Company B.V. ("Indosat Finance"), menerbitkan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 memiliki jumlah sebesar US$300,0 juta dan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2010. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,75% per tahun yang harus dibayar dalam cicilan enam bulanan dan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei dan 5 November setiap tahun, dimulai sejak tanggal 5 Mei 2004.

Pada 22 Juni 2005, anak perusahaan kami di bidang pembiayaan, Indosat International Finance Company B.V. ("Indosat International"), menerbitkan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 memiliki jumlah sebesar US$250,0 juta yang diterbitkan pada 99,3% dari nilai nominal tersebut dan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2012. Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,125% per tahun yang harus dibayar dalam cicilan enam bulanan, yang jatuh tempo pada tanggal 22 Juni dan 22 Desember setiap tahun, dimulai sejak tanggal 22 Desember 2005.

Pada tanggal 12 Mei 2010, kami, bersama-sama dengan Indosat Finance dan Indosat International, mengumumkan dimulainya penawaran tender tunai untuk membeli secara tunai semua dan setiap jumlah yang terhutang dari Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Indosat Finance dan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Indosat International. Sebagai tambahan dari penawaran untuk membeli Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010, Indosat Finance juga mengajukan, satu usulan, atas beberapa perubahan tertentu yang diusulkan atas Indenture yang diubah dan dinyatakan kembali, tanggal 25 Januari 2006 ("Indenture 2010") yang memperpendek periode pemberitahuan untuk opsi pelunasan dari Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 dan untuk melepaskan kedudukan Indosat International sebagai penjamin berdasarkan Indenture 2010.

Pada 2 Agustus 2010, Indosat Finance membayar sejumlah US$174,7 juta untuk Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 yang dibeli berdasarkan penawaran tender tunai, dengan nilai pokok sejumlah US$167,8 juta (untuk notes yang ditawarkan lebih awal) dan US$0,1 juta (untuk notes yang ditawarkan setelah tanggal penawaran awal), masing-masing pada harga senilai 102,1875% (untuk notes yang ditawarkan lebih awal) dan 101,9375% (untuk notes yang ditawarkan setelah tanggal penawaran awal) dari nilai pokok yang dibeli, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasan dan biaya tambahan lainnya. Pada 10 Agustus 2010, Indosat Finance membayar sejumlah US$69,5 juta untuk pembelian atas bagian yang tersisa dari Notes 2010 yang telah dibeli kembali, dengan nilai pokok sejumlah US$66,9 juta pada harga senilai 101,9375% dari nilai pokok yang

disebutkan, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasan dan biaya tambahan lainnya.

Pada 2 Agustus 2010, Indosat International membayar sejumlah US$58,6 juta untuk Notes 2012 yang dibeli berdasarkan penawaran tender tunai dengan nilai pokok sejumlah US$55,8 juta (untuk notes yang ditawarkan lebih awal) dan US$0,2 juta (untuk notes yang ditawarkan setelah tanggal penawaran awal), masing-masing pada harga senilai 103,8125% (untuk notes yang ditawarkan lebih awal) dan 103,5625% (untuk notes yang ditawarkan setelah tanggal penawaran awal) dari nilai pokok yang dibeli, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasan dan biaya tambahan lainnya. Pada 2 September 2010, Indosat International membayar sejumlah US$56,0 juta untuk pembelian bagian yang tersisa dari Notes 2010 yang telah dibeli kembali, dengan nilai pokok sejumlah US$53,4 juta pada harga senilai 103,5625% dari nilai pokok yang disebutkan, ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasan dan biaya tambahan lainnya.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020

Pada tanggal 29 Juli 2010, kami, melalui Indosat Palapa Company B.V. ("Indosat Palapa") menerbitkan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020 dengan jumlah sebesar US$650,0 juta. Notes tersebut diterbitkan pada 99,478% dari nilai nominal tersebut dan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2020. Notes tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,375% per tahun yang harus dibayar dalam cicilan enam bulanan, yang jatuh tempo pada tanggal 29 Januari dan 29 Juli setiap tahun, dimulai sejak tanggal 29 Januari 2011. Notes tersebut dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Palapa, secara keseluruhan atau sebagian, pada setiap waktu pada atau setelah tanggal 29 Juli 2015 dengan harga senilai 103,6875%, 102,4583%, 101,2292% dan 100% dari nilai pokok masing-masing selama periode 12 bulan yang dimulai sejak 29 Juli 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan seterusnya, ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar dan jumlah lainnya, jika ada. Selain itu, sebelum tanggal 29 Juli 2013, Indosat Palapa dapat membeli kembali sebanyak-banyaknya 35% dari seluruh nilai pokok GN dengan hasil satu atau lebih penawaran umum saham kami, dengan harga senilai 107,375% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar dan jumlah lainnya, jika ada. Notes tersebut juga dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Palapa atau kami, secara keseluruhan tetapi tidak sebagian pada setiap waktu, dengan harga senilai 100% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal pembelian kembali jumlah tambahan lainnya, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi pajak penghasilan di Indonesia dan Belanda. Apabila terjadi perubahan kendali di dalam Indosat (termasuk penjualan, pemindahan, pengalihan, penyewaan, penyerahan atau pelepasan lainnya atas semua atau sebagian besar aktiva kami), seorang pemegang surat hutang berhak meminta Indosat Palapa untuk membeli kembali semua atau sebagian dari surat hutang yang dimilikinya dengan harga senilai 101% dari nilai pokok tersebut, ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar dan jumlah lainnya, jika ada, sampai dengan tanggal pembelian.

Hasil bersih, setelah dikurangi biaya penjaminan emisi efek dan biaya penawaran, telah diterima pada 29 Juli 2010 dan digunakan (i) untuk membiayai penawaran untuk membeli Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 dan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 yang tersisa dan consent solicitation apapun terkait dengan, atau pembelian kembali atas, surat hutang tersebut dan (ii) untuk pembiayaan kembali sebagian dari hutang kami yang ada lainnya. Surat hutang tersebut dijamin secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh Indosat.

Berdasarkan indenture dari surat hutang tersebut, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan, seperti mempertahankan beberapa rasio keuangan.

Fasilitas Kredit Ekspor

Pada tanggal 12 Mei 2006, kami mengadakan perjanjian fasilitas berjangka dengan Finnish Export Credit Ltd, sebagai pemberi pinjaman, dan The Royal Bank of Scotland, N.V. (yang dulunya dikenal dengan nama ABN Amro Bank, N.V.) sebagai agen fasilitas (facility agent), untuk Fasilitas Kredit Ekspor, dengan total jumlah pokok sebesar US$38,0 juta. Jangka waktu Fasilitas Kredit Ekspor adalah 60 bulan sejak tanggal perjanjian dan harus dibayar dalam sepuluh kali cicilan dengan jumlah yang sama yang dibagi rata selama jangka waktu fasilitas. Fasilitas Kredit Ekspor memiliki tingkat suku bunga 4,15% per tahun, yang dihitung dengan merujuk pada tingkat suku bunga komersial untuk Dollar AS. Setelah nilai dari Fasilitas Kredit Ekspor ditarik dan dilunasi, jumlah tersebut tidak lagi tersedia untuk dipinjamkan secara berulang. Fasilitas Kredit Ekspor memuat ketentuan-ketentuan tertentu tentang keuangan. Selama tahun 2009 dan 2010, Indosat membayar cicilan atas fasilitas ini masing-masing dengan nilai sebesar US$7,6 juta dan US$7,6 juta.

Obligasi Syari'ah Ijarah (Sukuk Ijarah)

Ketentuan khusus atas setiap Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, Sukuk Ijarah Kedua, Sukuk Ijarah Ketiga, dan Sukuk Ijarah Keempat ("Obligasi Syari'ah Ijarah"), didiskusikan berikut ini. Obligasi Syari'ah Ijarah tidak dijaminkan dengan suatu aktiva apapun atau dijamin oleh suatu pihak manapun dan berkedudukan setingkat dengan hutang Indosat lainnya yang tidak dijaminkan.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah, Indosat setuju untuk tetap memberlakukan ketentuan-ketentuan tertentu yang termuat di dalam Obligasi Indosat. Selain itu, Indosat juga dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Disamping larang-larangan tersebut, tidak terdapat perbedaan yang material di antara ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Obligasi Syari'ah Ijarah dengan Obligasi Indosat. Pada 24 Maret 2009, Indosat menyelenggarakan rapat dengan para pemegang obligasi dengan mata uang Rupiah, termasuk dengan para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Hutang" dan "EBITDA", untuk menambah definisi-definisi baru bagi "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk mengubah rasio Hutang terhadap Ekuitas dari semula 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 pada perjanjian perwaliamanatan yang mengatur obligasi-obligasi ini.

Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama. Pada 21 Juni 2005, Indosat menerbitkan Obligasi Syari'ah Ijarah Indosat I ("Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama memiliki total nilai sebesar Rp285,0 miliar dan jatuh tempo pada 21 Juni 2011. Para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama adalah sebesar Rp34,2 miliar per tahun. Kami memiliki hak untuk melakukan pembayaran awal untuk seluruh Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama pada ulang tahun keempat dari Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi tersebut. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama tersebut senilai harga pasar, baik untuk disimpan maupun untuk tujuan pelunasan awal.

Sukuk Ijarah Kedua. Pada 29 Mei 2007, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat II ("Sukuk Ijarah Kedua"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku di dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Sukuk Ijarah kedua memiliki total nilai sampai dengan Rp400,0 miliar dan jatuh tempo pada 29 Mei 2014. Para pemegang Sukuk Ijarah Kedua menerima

cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Sukuk Ijarah Kedua adalah sebesar Rp40,8 miliar per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Sukuk Ijarah Kedua, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku.

Sukuk Ijarah Ketiga. Pada 9 April 2008, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat III ("Sukuk Ijarah Ketiga"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Sukuk Ijarah Ketiga memiliki total nilai sampai dengan Rp570,0 miliar dan jatuh tempo pada 9 April 2013. Para pemegang dari Sukuk Ijarah Ketiga menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Sukuk Ijarah Ketiga adalah sebesar Rp58,4 miliar per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Sukuk Ijarah Ketiga, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku.

Sukuk Ijarah Keempat. Pada 8 Desember 2009, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat IV ("Sukuk Ijarah Keempat"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Sukuk Ijarah Keempat memiliki total nilai sebesar Rp200,0 miliar. Sukuk Ijarah Seri A, yang memiliki total nilai sebesar Rp28,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2014 dan Sukuk Ijarah Seri B, yang memiliki total nilai sebesar Rp172,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2016. Para pemegang dari Sukuk Ijarah Keempat menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Sukuk Ijarah Keempat adalah sebesar Rp3,2 miliar per tahun untuk Sukuk Ijarah Keempat Seri A dan Rp20,2 miliar per tahun untuk Sukuk Ijarah Keempat Seri B. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Sukuk Ijarah Keempat, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku.

Fasilitas Pinjaman Goldman Sachs International

Pada tanggal 30 Mei 2007, kami menerima dari Goldman Sachs International ("GSI") suatu pinjaman sebesar Rp434,3 miliar, yang mana diterima dalam Dolar AS sebesar US$50,0 juta untuk keperluan pembelian perangkat telekomunikasi. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013. Pinjaman dikenakan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, yang harus dibayar setiap triwulanan pada tanggal 28 Februari, 30 Mei, 30 Agustus dan 30 November, yang dimulai sejak 30 Agustus 2007 sampai dengan 30 Mei 2012.

Perjanjian pinjaman tersebut memberikan opsi bagi GSI untuk mengkonversikan pinjaman tersebut menjadi pinjaman dalam Dolar AS sebesar US$50,0 juta pada tanggal 30 Mei 2012 ("Opsi Konversi"). Nilai wajar dari Opsi Konversi disajikan sebagai bagian dari hutang jangka panjang. Jika GSI menggunakan opsi tersebut, maka sejak tanggal 30 Mei 2012, pinjaman akan dikenakan suku bunga tetap sebesar 6,45% per tahun terhadap nilai pokok atas jumlah US$50.0 juta. Hutang pokok dalam mata uang Dolar AS dan bunga tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013.

Perusahaan diharuskan untuk memberitahukan GSI mengenai peristiwa-peristiwa berikut yang dapat mengakibatkan pengakhiran pinjaman seperti (i) perubahan-perubahan tertentu yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan di Inggris ataupun Indonesia, (ii) cidera janji berdasarkan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012, (iii) cidera janji berdasarkan notes yang telah diterbitkan atau dijamin oleh kami, dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang Dolar AS atau cidera janji berdasarkan notes yang telah diterbitkan atau dijamin oleh kami, dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, (iv) pembelian kembali, pembelian atau pembatalan Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 dan tidak

ada hutang lain dalam mata uang Dolar AS yang masih terhutang, setelah pembelian kembali, pembelian ataupun pembatalan dan (v) perubahan kendali dalam Perusahaan. Pada tanggal 24 Juni 2008, GSI tidak melaksanakan haknya untuk mengakhiri pinjaman tersebut sebagai hasil dari perubahan kendali yang dipicu oleh akuisisi Qtel terhadap 40,81% kepemilikan atas modal saham ditempatkan Perusahaan, pada Juni 2008.

Fasilitas Pinjaman Bank Central Asia

Pada tanggal 28 Agustus 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Central Asia ("BCA") sebesar Rp1.600,0 miliar untuk membayar kembali Fasilitas Pinjaman Sindikasi II dan membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk JIBOR tiga bulanan ditambah 1,5% per tahun; dan seluruh pembayaran bunga dilakukan setiap triwulanan. Pada tanggal 20 September 2007, kami memperoleh fasilitas kredit tambahan sebesar Rp400,0 miliar dari BCA. Akibatnya, keseluruhan jumlah pokok dari fasilitas kredit dengan BCA menjadi sebesar Rp2.000,0 miliar. Pembayaran kembali atas pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun kelima setelah penarikan pertama. Pada tanggal 27 September, 26 Oktober dan 27 Desember 2007, kami telah melakukan penarikan pinjaman pertama, kedua dan ketiga dengan jumlah total sebesar Rp2.000,0 miliar. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui beberapa ketentuan, termasuk mempertahankan ketentuan tersebut, yang mana serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Obligasi Indosat. Pada 27 September 2008 dan 25 September 2009, kami membayar cicilan pertama dan kedua tengah tahunan kami masing-masing sejumlah Rp200,0 miliar. Pada 27 September 2010 kami membayar cicilan ketiga tahunan kami sejumlah Rp300,0 miliar.

Pada 17 September 2008, kami membuat perjanjian fasilitas kredit tiga tahun tanpa jaminan dengan BCA yang bernilai Rp500,0 miliar untuk pembelian, dan/atau untuk pembiayaan ulang dari hutang yang timbul karena pembelian tersebut, atas perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan bunga JIBOR tiga bulanan ditambah 2,25% per tahun. Pembayaran kembali atas pinjaman yang ditarik akan dibuat setiap tahunnya, sebagai berikut: (a) 20% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun pertama, (b) 30% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun kedua, (c) 50% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga. Pada 16 Maret 2009, kami melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp500,0 miliar. Pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (secara keseluruhan atau sebagian dari pinjaman) diizinkan dengan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai yang dibayar awal tersebut. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, kami diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti ketentuan untuk mempertahankan suatu rasio keuangan tertentu. Pada 16 Maret 2010, kami membayar cicilan pertama tahunan kami sejumlah Rp100,0 miliar. Pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (secara keseluruhan atau sebagian dari pinjaman) diizinkan dengan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai yang dibayar awal tersebut. Pada 19 Oktober 2010, kami melakukan pembayaran kembali lebih awal atas fasilitas kredit ini sejumlah Rp400,0 miliar.

Pada 12 Februari 2009, kami merubah perjanjian fasilitas kredit lima tahun dan tiga tahun dengan BCA, berdasarkan surat kesepakatan yang diterima tanggal 6 Februari 2009, untuk merubah definisi dari "EBITDA," untuk menambahkan definisi baru dari "Pinjaman," "Ekuitas," dan "Grup" dan untuk merubah rasio antara Hutang terhadap Ekuitas dari awalnya 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 pada perjanjian pinjaman yang mengatur tentang fasilitas pinjaman tersebut.

Pada 8 Juni 2009, kami membuat perjanjian fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dengan BCA yang bernilai

Rp1.000,0 miliar untuk pengadaan, dan/atau pembiayaan ulang dari hutang yang timbul dari pembelian tersebut, atas perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan bunga JIBOR tiga bulanan ditambah 4,00% per tahun. Pembayaran kembali atas pinjaman yang ditarik akan dibuat setiap tahunnya, sebagai berikut: (a) 10% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun pertama dan kedua, (b) 15% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga dan keempat, dan (c) 50% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun kelima. Pada 25 Juni 2009, kami melakukan penarikan pinjaman yang bernilai Rp1.000,0 miliar. Pada 25 Juni 2010, kami membayar cicilan pertama tahunan sejumlah Rp100,0 miliar. Pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (secara keseluruhan atau sebagian dari pinjaman) adalah diizinkan, yang terikat pada 1% denda dari nilai yang dibayar awal tersebut, kecuali pembayaran dalam rangka membiayai kembali fasilitas ini. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, kami diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti ketentuan untuk mempertahankan suatu rasio pembiayaan tertentu. Pada 28 April 2010, kami menerima surat dari BCA mengenai perubahan suku bungan dari JIBOR berjangka tiga bulanan ditambah 4.00% per tahun menjadi JIBOR berjangka tiga bulanan ditambah 2.25% per tahun, efektif pada tanggal 25 Juni 2010. Pada 19 Oktober 2010, kami melakukan pembayaran kembali lebih awal atas fasilitas kredit ini sejumlah Rp900,0 miliar.

Pada tanggal 10 Februari 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas Time Loan Revolving dengan BCA sejumlah maksimum Rp1.000,0 miliar untuk membiayai pembelanjaan barang modal Perusahaan dan/atau untuk tujuan korporasi umum. Fasilitas ini akan tersedia dari 10 Februari 2011 sampai 10 Februari 2014 dan suku bunga penarikan sebesar JIBOR 1 bulanan ditambah 1,4% per tahun. Kami belum menarik fasilitas ini sampai dengan 20 April 2011.

Fasilitas Pinjaman Bank Mandiri

Pada 18 September 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Mandiri sebesar Rp2.000,0 miliar untuk membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk JIBOR tiga bulanan ditambah 1,5% per tahun, dan semua bunga harus dibayar setiap triwulanan. Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang ditarikdalam tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Pada tanggal 27 September dan 27 Desember 2007, kami telah melakukan penarikan pinjaman pertama dan kedua sebesar Rp2.000,0 miliar. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui beberapa ketentuan, termasuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Pada 27 September 2008 dan 25 September 2009, kami membayar cicilan pertama dan kedua tengah tahunan kami masing-masing sejumlah Rp200,0 miliar. Pada tanggal 23 Maret 2009, kami telah mengadakan perjanjian dengan Bank Mandiri untuk melakukan perubahan pada definisi "EBITDA", menambah definisi baru mengenai "Pinjaman", "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk merubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dalam pinjaman kami sesuai dengan ketentuan perjanjian perubahan. Pada 27 September 2010, kami membayar cicilan ketiga tahunan kami sejumlah Rp300,0 miliar berdasarkan fasilitas ini.

Pada 28 Juli 2009, kami membuat fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Mandiri sebesar Rp1.000 miliar untuk keperluan umum perseroan. Pinjaman dikenakan bunga pada suku bunga rata-rata JIBOR tiga bulanan ditambah 4,00% per tahun. Pada tanggal 31 Juli 2009, Perusahaan menarik sebesar Rp1.000,0 miliar dari fasilitas kredit tersebut. Pembayaran kembali dari pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, (c) 50% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (secara keseluruhan atau sebagian

dari pinjaman) adalah diizinkan, yang terikat pada 2% denda dari nilai yang dibayar awal tersebut. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, kami diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti ketentuan untuk mempertahankan suatu rasio keuangan tertentu. Pada 20 Mei 2010, kami menerima surat dari Bank Mandiri mengenai perubahan suku bunga dari suku bunga rata-rata JIBOR tiga bulanan ditambah 4,00% per tahun menjadi suku bunga rata-rata JIBOR tiga bulanan ditambah 2,25% per tahun, berlaku efektif mulai 31 Mei 2010. Pada 30 Juli 2010, kami membayar cicilan tahunan pertama sejumlah Rp100,0 miliar. Pada 15 November 2010, kami melakukan pembayaran kembali lebih awal atas fasilitas kredit ini sejumlah Rp900,0 miliar.

Fasilitas Pinjaman Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 1 November 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp500,0 miliar untuk membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman tersebut dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,7% untuk tahun pertama dan 10,4% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk sertifikat Bank Indonesia tiga bulan ditambah 1,5% per tahun; semua bunga harus dibayar setiap triwulanan. Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun kelima setelah penarikan pertama. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Pada 31 Januari 2008, kami menarik Rp500,0 miliar dari fasilitas tersebut. Pada 25 Maret 2009, kami membuat perjanjian dengan Bank DBS Indonesia untuk memasukkan definisi baru mengenai "Hutang", "EBITDA", "Ekuitas", dan "Grup" dan untuk merubah rasio Hutang terhadap Ekuitas pada perjanjian pinjaman yang mengatur fasilitas pinjaman ini. Pada 30 Januari 2009, kami membayar cicilan pertama tahunan sejumlah Rp50,0 miliar. Pada 25 Maret 2009, Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit berdasarkan surat persetujuan yang diterima pada 27 Februari 2009. Perubahan tersebut mencakup perubahan terhadap pengertian atas beberapa istilah dan perubahan terhadap rasio keuangan yang disyaratkan untuk dipertahankan. Pada 1 Februari 2010, kami membayar cicilan kedua tahunan sebesar Rp50,0 miliar. Pada 30 Oktober 2010, kami melakukan pembayaran kembali lebih awal atas fasilitas kredit ini sejumlah Rp400,0 miliar.

Pembiayaan Satelit HSBC

Pada 27 November 2007, kami menandatangani dua perjanjian fasilitas tanpa jaminan dengan HSBC Perancis dan satu perjanjian fasilitas tanpa jaminan dengan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta ("HSBC Jakarta") untuk membiayai satelit telekomunikasi kami yang baru. Gabungan fasilitas kredit ekspor dan fasilitas pembiayaan komersial ini terdiri dari:

- perjanjian fasilitas dengan jangka waktu 12 tahun sebesar US$157,2 juta untuk membiayai pembayaran 85,0% atas komponen yang dibuat di Perancis berdasarkan Kontrak Satelit Palapa-D ditambah 100% Premi COFACE, yang mana ketentuan tersebut diatur di dalam perjanjian fasilitas. Pinjaman dikenakan suku bunga tetap tahunan sebesar 5,69% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulanan. Pada 29 Maret, 29 September 2010 dan 29 Maret 2011 kami membayar cicilan pertama, kedua dan ketiga enam bulanan masing-masing sebesar US$7,9 juta;
- perjanjian fasilitas dengan jangka waktu 12 tahun sebesar US$44,2 juta untuk membiayai pembayaran 85,0% dari nilai Kontrak Jasa Peluncuran Satelit (sebagaimana yang didefinisikan di dalam perjanjian fasilitas) sehubungan dengan Satelit Palapa-D milik kami. Pinjaman dikenakan suku bunga mengambang atas dasar mata uang Dolar AS pada LIBOR ditambah 0,35% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulan. Pada 29 Maret 2010, 29 September 2010 dan 20 Maret 2011 kami membayar cicilan pertama, kedua dan ketiga enam bulanan masing-masing sebesar US$2,2 juta; dan

- Perjanjian Fasilitas Komersial dengan jangka waktu 9 tahun sebesar US$27,0 juta untuk membiayai pembangunan dan peluncuran satelit dan pembayaran premi yang berkaitan dengan polis asuransi kredit pembelian jangka menengah dan jangka panjang yang diterbitkan sehubungan dengan Fasilitas Sinosure. Pinjaman dikenakan suku bunga mengambang atas dasar mata uang Dollar AS pada LIBOR ditambah 1,45% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulanan. Pada 27 November 2009, kami membayar cicilan pertama enam bulanan sebesar US$1,4 juta. Pada 27 Mei dan 29 November 2010, kami membayar cicilan kedua dan ketiga enam bulanan, masing-masing sebesar US$1,4 juta.

Fasilitas memuat ketentuan-ketentuan keuangan tertentu. Pada 18 Maret 2009, kami membuat perjanjian-perjanjian dengan HSBC Perancis dan HSBC Jakarta untuk merubah definisi "Hutang", "EBITDA", dan "Ekuitas" dan rasio Hutang terhadap Ekuitas pada Perjanjian Fasilitas Berjangaka COFACE, Perjanjian Fasilitas Berjangka Sinosure dan Perjanjian Fasilitas Komersial, sebagaimana yang berlaku. Berdasarkan perjanjian tersebut, kami diwajibkan untuk mempertahankan: (i) modal pokok senilai lebih dari Rp5.000 miliar, (ii) rasio Hutang terhadap ekuitas yang tidak melebihi 2,5:1, (iii) rasio EBITDA terhadap bunga untuk tidak melebihi 2,5:1, dan (iv) rasio Hutang terhadap EBITDA yang tidak melebihi 3,5:1.

Selain itu, pada 4 Desember 2009, kami membuat Perjanjian Fasilitas Korporasi dengan HSBC untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek. Fasilitas tersebut terdiri atas suatu batasan kombinasi sebesar US$30 juta dan revolving loan sebesar US$30,0 juta. Kami belum melakukan penarikan atas fasilitas ini sampai dengan 31 Desember 2010.

Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS

Pada tanggal 12 Juni 2008, kami menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi sebesar US$450.0 juta dengan 13 bank dan lembaga keuangan, dengan ING Bank N.V., Cabang Singapura dan DBS Bank Ltd. bertindak sebagai arrangers. Jumlah bunga yang harus dibayar atas hutang tersebut adalah total dari (i) marjin yang berlaku sebesar 1,85% per tahun untuk pemberi pinjaman non-Indonesia atau 1,90% per tahun untuk pemberi pinjaman yang bertempat tinggal di Indonesia dan (ii) LIBOR. Pembayaran kembali atas hutang yang telah ditarik akan dibuat dengan cara cicilan per enam bulanan dimulai sejak tanggal 12 Juni 2011. Pada tanggal 24 Februari 2009, kami menandatangani suatu perjanjian dengan mayoritas kreditur untuk mengubah definisi "Hutang", "EBITDA", dan "Ekuitas" dan rasio Hutang terhadap Ekuitas dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/ DBS. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS, sebagaimana yang telah diubah berdasarkan akta-akta perubahannya, kami telah menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk namun tidak terbatas untuk mempertahankan ketentuan sebagai berikut:

- rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5 : 1;
- rasio total hutang terhadap ekuitas sebesar 2,5 : 1; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap akhir tahun buku dan pada akhir setiap 3 bulan pertama tahun buku kami, sekurang-kurangnya 2,5 : 1.

Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan setiap enam bulanan, sebagai berikut: (a) 25% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga setelah tanggal penandatanganan perjanjian (tanggal pembayaran kembali pertama), (b) 24% dari total pinjaman yang ditarik dalam bulan keenam setelah tanggal pembayaran kembali pertama, (c) masing-masing 8% dari total pinjaman yang ditarik dalam bulan ke-12 dan bulan ke-18 setelah tanggal pembayaran kembali pertama, dan (d) 35% dari total pinjaman yang ditarik dalam bulan ke-24 setelah tanggal pembayaran kembali pertama.

Pada 26 September dan 30 Oktober 2008, Perusahaan menerima penarikan pertama dan kedua dari fasilitas kredit ini sejumlah US$450,0 juta. Pada 31 Desember 2010, jumlah yang belum dibayar dalam fasilitas ini sebesar US$450,0 juta.

Fasilitas Pinjaman dari AB Svensk Exportkredit ("SEK") yang Dijamin oleh Export Kredit Namnden ("EKN")

Pada 18 Agustus 2009, kami memperoleh fasilitas kredit dari SEK, yang dijamin oleh EKN, suatu agen kredit ekspor dari Kerajaan Swedia, untuk total maksimum sebesar US$315.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan pembelian perangkat telekomunikasi Ericsson, dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC"), Hong Kong dan The Royal Bank of Scotland N.V. (yang sebelumnya dikenal dengan nama ABN AMRO Bank N.V.), Cabang Hong Kong sebagai kreditur asli dan arrangers, sementara HSBC Bank PLC, London, Inggris bertindak sebagai agen fasilitas dan agen EKN. Pada 2 September 2009, kreditur asli mentransfer hak dan kewajiban kepada SEK, berdasarkan kepada ketentuan perjanjian.

Fasilitas kredit tersebut terdiri atas fasilitas A, B, dan C dengan nilai maksimum masing-masing sebesar US$100,0 juta, US$155,0 juta, dan US$60 juta. Fasilitas A dikenakan tingkat suku bunga pada LIBOR ditambah 0,25% per tahun, bersama-sama dengan biaya dana SEK dan marjin premium EKN. Fasilitas B dan Fasilitas C dikenakan tingkat suku bunga sebesar 0,05% per tahun ditambah 2,60% per tahun ditambah Margin Premium EKN. Pembayaran kembali atas masing-masing fasilitas A, B dan C harus dilakukan dengan 14 kali cicilan masing-masing dimulai sejak enam bulan setelah 31 Mei 2009, 28 Februari 2010 dan 30 November 2010. Berdasarkan perjanjian tersebut, kami diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti mempertahankan rasio keuangan tertentu, yang mana secara garis besar adalah sama dengan ketentuan-ketentuan di bawah Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS. Selain itu, kami juga diwajibkan untuk mempertahankan modal konsolidasi minimum sebesar Rp5.000,0 miliar. Per 31 Maret 2011, kami telah menarik masing-masing US$100,0 juta, US$155,0 juta, dan US$60,0 juta untuk fasilitas A,B, dan C masing-masing.

Pada tanggal 30 November 2009, 27 Mei 2010 dan 30 November 2010, Perusahaan membayar cicilan 6 bulanan pertama, kedua dan ketiga, masing-masing, untuk Fasilitas A sebesar US$7,1 juta masing-masing. Pada tanggal 28 Agustus 2010 dan 28 Februari 2011, Perusahaan membayar cicilan 6 bulanan pertama dan kedua untuk Fasilitas B sejumlah US$11,1 juta masing-masing.

Lintasarta

Hutang jangka panjang Lintasarta terdiri dari beberapa fasilitas kredit investasi dari CIMB Niaga Tbk, sebelumnya PT Bank Niaga Tbk dan obligasi terbatas yang tidak dijamin. Pada tanggal 31 Desember 2010, fasilitas kredit investasi dari CIMB Niaga berjumlah Rp94,9 miliar, dan obligasi yang terhutang berjumlah Rp42,0 miliar.

Fasilitas Kredit Investasi V. Pada tanggal 10 Juli 2007, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga sebesar Rp50,0 miliar untuk pembelian peralatan telekomunikasi, komputer dan fasilitas pendukung lain. Pinjaman tersebut memiliki tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga tahunan yang berlaku bagi sertifikat Bank Indonesia berjangka satu bulan ditambah 2,25% per tahun. Kami memulai pelunasan secara triwulanan atas hutang pokok tersebut pada tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp5,0 miliar. Pembayaran kembali tersebut harus dibayar setiap twilunannya sampai dengan 10 Januari 2011.

Fasilitas Kredit Investasi VI. Pada 24 Februari 2009, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga dengan nilai sebesar Rp75,0 miliar untuk pembelian perangkat telekomunikasi, komputer, dan fasilitas pendukung lainnya. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar 14,5%, yang mana dapat diubah oleh CIMB Niaga berdasarkan kondisi pasar. Kami memulai pembayaran kembali setiap triwulanan atas pinjaman pokoknya pada 24 Mei 2010, dengan nilai sebesar Rp7,5 miliar. Pembayaran kembali tersebut harus dibayar setiap triwulanan sampai dengan 24 Agustus 2012. Pada tanggal 31 Desember 2010, Lintasarta telah sepenuhnya menarik fasilitas kredit ini.

Obligasi Terbatas I. Pada 2 Juni 2003, Lintasarta dan para pemegang sahamnya telah menyetujui untuk menerbitkan obligasi terbatas kepada para pemegang saham sebesar Rp40,0 miliar, yang sudah termasuk bagian kami sebesar Rp9,6 miliar. Obligasi terbatas tersebut tidak dijamin dan memiliki jatuh tempo awal pada tanggal 2 Juni 2006. Obligasi tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 16,0% per tahun untuk tahun pertama dan tingkat suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka tiga bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) ditambah marjin 3,0%, dengan batas maksimum sebesar 19,0% per tahun dan batas minimum sebesar 11,0% per tahun. Pembayaran bunga harus dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal 2 September 2003. Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta menyetujui dengan para pemegang obligasi untuk memperpanjang jatuh tempo dari tanggal 2 Juni 2006 menjadi 2 Juni 2009 dan nilai nominal Obligasi Terbatas menjadi Rp34,9 miliar, yang sudah termasuk bagian kami sebesar Rp9,6 miliar. Pada 2 Juni 2009, Lintasarta membayar kembali sebagian dari Obligasi Terbatas senilai Rp8.303 juta. Pada 25 Agustus 2009, perjanjian yang mengatur tentang Obligasi Terbatas I diubah dalam rangka merubah total nilai dari obligasi tersebut menjadi Rp26,6 miliar, memperpanjang tanggal jatuh tempo menjadi 2 Juni 2012, dan untuk merubah tingkat suku bunga mengambang menjadi berdasarkan JIBOR ditambah 4%, tanpa melebihi 19%, dengan tingkat suku bunga mengambang minimum sebesar 12,75%.

Obligasi Terbatas II. Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta menandatangani perjanjian dengan para pemegang sahamnya terlebih dahulu dalam rangka mengeluarkan Obligasi Terbatas II sebesar Rp66,2 miliar. Obligasi terbatas merupakan obligasi tidak dijamin dan memiliki jatuh tempo awal pada tanggal 14 Juni 2009 serta memiliki tingkat suku bunga mengambang yang ditentukan dengan menggunakan rata-rata tingkat suku bunga deposito rupiah berjangka tiga bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) ditambah premi tetap sebesar 3,0%. Batas maksimum dari suku bunga mengambang adalah sebesar 19,0% per tahun dan batas minimum adalah sebesar 11,0% per tahun. Pembayaran bunga harus dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal 14 September 2006. Hasil dari obligasi terbatas digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka memperluas jangkauan telekomunikasi Lintasarta.

Pada tanggal 17 Juli 2006, Lintasarta memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga atas penerbitan dari obligasi terbatas.

Pada tanggal 14 Juni 2009, Lintasarta membayar sebagian Obligasi Terbatas sejumlah Rp6,2 miliar. Berdasarkan Berita Acara Rapat Bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi Lintasarta yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2009, perwakilan dari pemegang saham Lintasarta setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo atas sisa dari Obligasi Terbatas II sebesar Rp60,0 miliar menjadi 14 Juni 2012 dan meningkatkan batas minimum suku bunga mengambang sebesar 12,75%. Pada tanggal 25 Agustus 2009, perjanjian Obligasi Terbatas II difinalisasi, setelah diubah dalam rangka mengakomodasi perubahan tanggal jatuh tempo dan batas minimum dari suku bunga mengambang.

Praktek Pembayaran Dividen

Pemegang saham kami menentukan pembayaran dividen pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2008, 2009 dan 2010, pemegang saham mengumumkan dividen tunai final sebesar 50,0% dari laba bersih kami untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, masing-masing. Kami berniat untuk terus melakukan pembayaran dividen dalam jumlah tersebut agar memungkinkan bagi kami untuk memenuhi tata kelola keuangan yang baik dan pengharapan investor.

Sumber-Sumber Permodalan

Kami percaya bahwa arus kas dari operasi dan penarikan dari fasilitas kredit kami akan menyediakan dana yang memadai untuk pembelanjaan barang modal, pembayaran hutang dan kewajiban bungan di masa mendatang serta kebutuhan operasional lainnya yang diperlukan untuk

rencana bisnis kami saat ini. Namun, kami menghadapi risiko likuiditas apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada lambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dari tingkat pertumbuhan yang kami harapkan, turunnya peringkat hutang Perusahaan atau melemahnya kinerja keuangan atau rasio keuangan Perusahaan.

Apabila kami tidak dapat membiayai pengeluaran barang modal yang direncanakan dari arus kas internal Perusahaan, kami akan berupaya memperoleh sumber pembiayaan eksternal lainnya. Kemampuan kami untuk dapat memperoleh hutang pembiayaan tambahan tergantung pada beberapa ketentuan yang diatur pada perjanjian hutang Perusahaan yang telah ada. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan yang sesuai (termasuk pembiayaan dari pihak penjual (vendor) atau pihak ketiga lainnya) untuk membiayai pengeluaran barang modal yang telah direncanakan oleh Perusahaan. Apabila kami tidak dapat mencari sumber pembiayaan eksternal tambahan, maka kami akan memutuskan untuk menurunkan jumlah pengeluaran barang modal yang telah direncanakan. Penurunan jumlah pengeluaran barang modal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kinerja operasional dan kondisi keuangan Perusahaan.

Pengeluaran Barang Modal

Historis Pengeluaran Barang Modal

Sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2010, jumlah total pengeluaran barang modal kami telah mencapai sebesar Rp29.441,4 miliar (US$2.972,9 juta). Dana ini, terutama kami gunakan untuk membeli peralatan dan jasa-jasa dari pemasok asing sehubungan dengan pembangunan jaringan seluler kami. Kami telah mencapai jumlah total pengeluaran barang modal sebesar Rp5.515,0 miliar (US$613,4 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, di mana investasi tersebut kami fokuskan pada perluasan cakupan seluler kami melalui penambahan 1.755 base transceiver stations.

Pengeluaran Barang Modal untuk tahun 2011

Berdasarkan program pengeluaran barang modal untuk berbagai kegiatan usaha kami, rencana pengeluaran barang modal kami berjumlah lebih sedikit dari pengeluaran pada tahun 2008 dan 2009 tetapi lebih banyak dari pengeluaran pada tahun 2010, dikarenakan kami lebih fokus pada upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan seluler, tetap dan MIDI dan infrastruktur telekomunikasi kami yang ada saat ini. Sepanjang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, jumlah total pengeluaran barang modal konsolidasi kami adalah sebesar masing-masing Rp12.341,9 miliar, Rp11.584,5 miliar dan Rp5.515,0 miliar (US$613,4 juta). Selama tahun 2011, kami bermaksud untuk mengalokasikan US$794,5 juta untuk pengeluaran barang modal yang baru, yang bila memperhitungkan estimasi pengeluaran barang modal yang direalisasi untuk tahun 2011 untuk komitmen pengeluaran barang modal dari periode sebelumnya, akan menghasilkan jumlah aktual pengeluaran barang modal sekitar US$1.053,8 juta untuk tahun 2011. Kami bermaksud untuk mengalokasikan pengeluaran barang modal tahun 2011 sebagai berikut:

- Investasi Jaringan Seluler: Kami berencana untuk menggunakan sebagian besar pengeluaran barang modal kami untuk membiayai kelanjutan pemutakhiran dan perluasan kapasitas dan cakupan jaringan seluler kami.
- Investasi lain: Kami berencana untuk menginvestasikan sisa anggaran pengeluaran barang modal untuk area-area di luar jaringan seluler, termasuk jaringan akses tetap, sebagaimana kami meningkatkan akses jaringan untuk pelanggan-pelanggan korporat kami, dan terus menyediakan untuk mereka servis suara, jarak jauh dan MIDI, serta mengadakan peningkatan kekuatan perusahaan kami.

Jumlah di atas merepresentasikan rencana anggaran investasi kami; pengeluaran aktual atas dasar kas akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor,

termasuk metode pembiayaan dan waktu penyelesaian pengiriman peralatan dan jasa yang dibeli. Secara historis, pengeluaran atas dasar jalur uang tunai dianggarkan akan menghabiskan biaya paling sedikit sekitar 20,0% dari anggaran kami.

Rencana pengeluaran barang modal di atas didasarkan pada pemahaman kami tentang keadaan pasar dan kondisi peraturan saat ini, dan kami dapat mengubah rencana kami dalam menanggapi perubahan kondisi-kondisi tersebut. Secara khusus, tergantung pada kerangka peraturan atas jasa jaringan tanpa kabel lainnya, kami dapat memutuskan untuk meningkatkan investasi kami pada jaringan dan layanan akses tetap tanpa kabel, baik melalui peningkatan pengeluaran barang modal, realokasi rencana pengeluaran yang ada, skema pembagian pendapatan atau kombinasi dari ketiga hal di atas. Skema pembagian pendapatan akan mencakup kerjasama dengan investor swasta di mana investor akan membiayai pembangunan proyek dengan imbalan pendapatan dari proyek tersebut, yang mirip dengan struktur build-operate-transfer.

Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan konsolidasi kami telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK Indonesia). Referensi untuk SAK Indonesia meliputi penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI).

Penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan serta pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan tersebut. Taksiran dan asumsi manajemen didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor lain yang relevan pada kondisi tersebut. Kami secara terus menerus mengevaluasi taksiran dan asumsi tersebut. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari taksiran di atas bila asumsi atau kondisi yang sebenarnya berbeda. Kami percaya bahwa dengan adanya perbedaan signifikan prinsip akuntansi, berikut ini mungkin akan melibatkan tingkat penilaian atau kompleksitas yang lebih tinggi.

Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya

Laporan keuangan konsolidasi dan hasil operasi mencerminkan entitas yang diakuisisi setelah penyelesaian dari proses akuisisi terkait. Kami menghitung entitas yang diakuisisi dengan menggunakan metode pembelian (purchase method) yang membutuhkan estimasi akuntansi dan penilaian untuk mengalokasikan harga akuisisi ke nilai pasar wajar dari aset dan kewajiban entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. Nilai lebih dari harga pembelian atas estimasi nilai pasar wajar dari aset bersih yang diakuisisi diakui sebagai goodwill pada laporan neraca konsolidasi. Proses akuisisi ini telah menghasilkan goodwill dan aset tak berwujud, yang masing-masing menjadi subjek untuk proses penurunan nilai dan amortisasi. Oleh karena itu, sejumlah penilaian yang diambil dalam mengestimasi nilai pasar wajar untuk dialokasikan ke aset dan kewajiban entitas yang diakusisi dan mempengaruhi kinerja keuangan kami secara signifikan.

Taksiran Umur Manfaat dan Penurunan Nilai Aset Tetap

Kami memperkirakan umur manfaat dari aset tetap kami berdasarkan pada ekspektasi masa penggunaan aset sebagaimana diatur dalam rencana usaha dan strategis (business plans and strategies) yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan kelakuan pasar (market behaviour). Taksiran masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penelaahan secara kolektif pada praktek industri (industry practice), evaluasi teknis secara internal dan pengalaman dengan aset-aset yang sejenis. Akan tetapi, terdapat kemungkinan hasil usaha di masa depan dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor disebutkan di atas.

Jumlah dan waktu dari beban yang diakui untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor-faktor tersebut. Pengurangan dalam taksiran masa manfaat dari

aset tetap kami akan meningkatkan beban usaha yang diakui dan menurunkan aset tidak lancar.

Estimasi Beban Pensiun dan Manfaat Karyawan Lainnya

Penentuan dari kewajiban dan biaya pensiun dan manfaat karyawan lainnya kami tergantung pada pemilihan beberapa asumsi yang digunakan oleh aktuaris untuk menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut termasuk, di antara hal lainnya, tingkat diskonto, tingkat pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan dan kenaikan tingkat kompensasi. Hasil sebenarnya yang berbeda dari estimasi kami diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi bersih dari laba atau rugi aktuarial pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari kelebihan kewajiban manfaat pensiun tetap dan nilai wajar aset dana pensiun pada tanggal tesebut.

Kami berkeyakinan bahwa asumsi mereka dapat diandalkan dan tepat, perbedaan signifikan dengan pengalaman aktual kami atau perubahan signifikan dalam asumsi mereka dapat mempengaruhi biaya dan kewajiban pensiun dan manfaat karyawan lainnya secara material.

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Kami menelaah nilai tercatat dari aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi jumlah tersebut sampai jumlah yang mungkin dapat direalisasikan dimana jumlah pendapatan kena pajak akan tersedia untuk memungkinkan semua atau sebagian aset pajak tangguhan dapat digunakan. Penelaahan kami terhadap pengakuan aset pajak tangguhan pada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan berdasarkan pada tingkat dan waktu dari pendapatan kena pajak yang diperkirakan untuk periode pelaporan selanjutnya. Perkiraan ini didasarkan pada hasil kami di masa lampau dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban sebagaimana juga strategi perencanaan pajak di masa datang.

Perkiraan Cadangan atas Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Kami memperkirakan cadangan atas kerugian penurunan nilai terkait dengan piutang usaha yang secara spesifik diidentifikasikan sebagai piutang yang mungkin tidak tertagih. Tingkat pencadangan ditelaah oleh manajemen dengan basis faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas dari piutang tersebut. Dalam kasus ini, kami menggunakan penilaian berdasarkan fakta terbaik yang tersedia dan keadaan-keadaan, termasuk tapi tidak terbatas pada, lama hubungan dengan pelanggan dan keadaan kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang umum, untuk mencatat pencadangan spesifik terhadap jumlah terhutang pelanggan yang telah jatuh tempo untuk mengurangi jumlah piutang kami menjadi jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Cadangan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan apabila terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Sebagai tambahan terhadap cadangan spesifik untuk piutang individual yang signifikan, kami juga menelaah cadangan penurunan nilai kolektif terhadap risiko kredit terhadap pelanggan-pelanggan mereka yang dikelompokkan berdasarkan risiko kredit yang sama, yang mana, meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan pencadangan, memiliki risiko yang lebih besar terhadap kegagalan bayar daripada sewaktu piutang tersebut diberikan kepada pelanggan pada awalnya. Cadangan kolektif ini didasarkan pada sejarah pengalaman kerugian dengan menggunakan faktor-faktor yang bervariasi seperti kinerja historis dari pelanggan dalam kelompok kolektif, penurunan di pasar yang mana pelanggan beroperasi dan kelemahan struktur yang teridentifikasi atau penurunan dalam arus kas dari pelanggan.

Penentuan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan

Kami mencatat beberapa aset dan kewajiban keuangan pada nilai wajar, yang memerlukan penggunaan estimasi akuntansi yang berkelanjutan dan penilaian untuk nilai wajar aset dan kewajiban keuangan. Sementara komponen signifikan untuk pengukuran nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti-bukti objektif yang dapat diverifikasi (contoh nilai tukar valuta asing, suku bunga dan tingkat volatilitas (volatility rates)), jumlah perubahan nilai wajar akan berbeda jika kami menggunakan metode penilaian yang berbeda. Setiap perubahan dalam nilai wajar aset keuangan ini akan langsung mempengaruhi laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan pendapatan komprehensif atau laporan perubahan ekuitas konsolidasi.

Standar Akuntansi Baru dan Interpretasi atas Standar yang Berlaku Efektif setelah tanggal 31 Desember 2010

Lihat Catatan 36 – Perkembangan Terkini yang Mempengaruhi Standar Akuntansi yang terlampir pada laporan keuangan konsolidasi untuk pembahasan standar akuntasi baru yang berlaku efektif setelah tanggal 31 Desember 2010.

C. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PATEN DAN LISENSI, DAN LAIN-LAIN

Untuk tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, kami tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat signifikan.

D. INFORMASI TENTANG TREN

Lihat pembahasan pendahuluan pada "Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha" di atas untuk keterangan lebih lanjut mengenai tren-tren penting yang memberikan dampak bagi hasil-hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan.

Pada bulan Januari 2011, Perusahaan memperkenalkan restrukturisasi organisasi sebagai bagian dari program transformasi yang dimulai sejak tahun 2009 untuk meningkatkan produktivitas dan hasil operasi jangka panjang Perusahaan. Perusahaan menawarkan paket kompensasi spesial untuk karyawan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan Perusahaan dan yang memilih untuk memutuskan hubungan kerja dengan Perusahaan sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi di bawah program VSS. IAS 37 mengenai Provisi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi mengharuskan kami untuk mengungkapkan jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam program ini dan kompensasi yang dibayarkan. Namun, kami tidak mengungkapkan informasi ini dalam laporan tahunan ini sebab dapat menimbulkan anggapan yang terlalu dini mengenai hasil dari program ini, karena saat ini Perusahaan masih menawarkan program ini kepada karyawannya.

E. PENYELENGGARAAN OFF-BALANCE SHEET

Pada tanggal 31 Desember 2010, kami tidak mempunyai penyelenggaraan off-balance sheet yang sewajarnya dapat memberikan pengaruh pada saat ini atau di kemudian hari terhadap kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, pendapatan atau pengeluaran, hasil usaha, likuiditas, pengeluaran barang modal atau sumber modal Perusahaan, yang bersifat material bagi para investor.

F. PENGUNGKAPAN DALAM BENTUK TABEL (TABULAR DISCLOSURE) TENTANG KEWAJIBAN KONTRAKTUAL

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan memiliki kewajiban kontraktual sebesar US$1.635,3 juta dari kontrak-kontrak dalam dolar AS dan Rp12.212,4 miliar dari kontrak-kontrak dalam mata uang Rupiah. Kewajiban kontraktual dalam dolar AS yang harus dibayar adalah

US$373,6 juta di 2011, US$365,5 juta dari 2012 sampai 2013 dan US$121,2 juta dari tahun 2014 sampai 2015 dan US$775 juta dari 2016 dan seterusnya. Kewajiban kontraktual dalam Rupiah mewajibkan pembayaran sampai dengan Rp2.304,1 miliar di 2011, Rp3.996,5 miliar dari tahun 2012 sampai 2013, Rp2.678,0 miliar dari 2014 sampai 2015 dan Rp3.233,8 miliar dari 2016 dan seterusnya.

	Pembayaran JatuhTempo per 31 Desember									
	Total		2011		2012-2013		2014-2015		2016 dan seterusnya	
	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$
	(Rp miliar, US$ juta)									
Kewajiban Kontraktual										
Hutang jangka panjang[1]	3.091,7	886,6	634,9	283,6	2.456,8	356,8	_	121,2	_	125,0
Hutang obligasi[1]	7.492,0	650,0	1.100,0	_	1.372,0	_	2.678,0	_	2.342,0	650,0
Kewajiban pembelian	569,2	90,0	569,2	90,0	_	_	_	_	_	_
Kewajiban tidak lancar dan kewajiban keuangan tidak lancar lainnya	1.059,5	8,7	_	_	167,7	8,7	_	_	891,8	_
Total Kewajiban Kontraktual Tunai	**12.212,4**	**1.635,3**	**2.304,1**	**373,6**	**3.996,5**	**365,5**	**2.678,0**	**121,2**	**3.233,8**	**775,0**

(1) Angka-angka ini tidak termasuk kewajiban bunga kontraktual yang terkait dan telah dihitung berdasarkan asumsi bahwa opsi yang terkait dengan hutang pinjaman dan obligasi tidak digunakan.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI RINGKAS
INTERIM TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2011 DAN 2010
PT INDOSAT TBK

BOARD OF DIRECTORS STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY TO THE
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS THREE MONTH S ENDED MARCH 31,
2011 and 2010
PT INDOSAT TBK

No. 002 /A00/FIN/2011

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Harry Sasongko
   Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
   Alamat Rumah : Jl. Ciasem III/1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 3869 600
   Jabatan : President Director and Chief Executive Officer

2. Nama : Peter Wladyslaw Kuncewicz
   Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
   Alamat Rumah : Jl Metro Alam IVPE 17-18 Pondok Indah-Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 3869 606
   Jabatan : Director and Chief Financial Officer

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

We the undersigned:

1. *Name* : *Harry Sasongko*
   Office Address : *Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110*
   Home Address : *Jl. Ciasem III/1 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan*
   Phone Number : *3869 600*
   Designation : *President Director and Chief Executive Officer*

2. *Name* : *Peter Wladyslaw Kuncewicz*
   Office Address : *Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110*
   Home Address : *Jl. Metro Alam IVPE 17-18 Pondok Indah-Jakarta Selatan*
   Phone Number : *3869 606*
   Designation : *Director and Chief Financial Officer*

hereby declares:

1. *Responsible to the preparation and the presentation of the company's financial statements;*
2. *The company's financial statements are prepared and presented according to the generally acceptable accounting principle;*
3. a. *All information contained in the company's financial statements is complete and true;*
   b. *The company's financial statement does not contain any false material information or facts, and does not omit any material information or facts;*
4. *Responsible to the company's internal control system.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 26 April 2011

President Director and
Chief Executive Officer

Harry Sasongko
NIK. 30000016

Director and
Chief Financial Officer

Peter Wladyslaw Kuncewicz
NIK. 30000017

155 LAPORAN KEUANGAN

297 LAPORAN TAHUNAN DALAM FORMAT 20-F

449 INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

LAPORAN KEUANGAN

PT Indosat Tbk dan anak perusahaan

Laporan keuangan konsolidasi beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2010 DAN 2009

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Neraca Konsolidasi.....	1 - 4
Laporan Laba Rugi Konsolidasi.....	5 - 6
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi.....	7
Laporan Arus Kas Konsolidasi.....	8 - 9
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi.....	10 - 131

****

ERNST & YOUNG

Purwantono, Suherman & Surja
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
www.ey.com/id

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-719/PSS/2011

Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dan Direksi
PT Indosat Tbk

Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Indosat Tbk ("Perusahaan") dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta laporan laba rugi konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasi tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Indosat Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha serta arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Purwantono, Suherman & Surja

Drs. Hari Purwantono
Izin Akuntan Publik No. 98.1.0065

10 Februari 2011

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2010	2009
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,2q,2v, 3,17,26,34	2.075.270	2.835.999
Investasi jangka pendek - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sejumlah Rp25.395 pada tahun 2010 dan 2009	2d,2q,17	-	-
Piutang	2e,2q,17,34		
Usaha	4		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sejumlah Rp47.640 pada tahun 2010 dan Rp57.538 pada tahun 2009	2v,26	222.506	125.912
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sejumlah Rp448.470 pada tahun 2010 dan Rp404.272 pada tahun 2009	37	1.325.920	1.259.213
Lain-lain - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sejumlah Rp15.281 pada tahun 2010 dan Rp16.544 pada tahun 2009	37	10.031	564.859
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan keusangan sebesar Rp13.961 pada tahun 2010 dan Rp10.769 pada tahun 2009	2f	105.885	112.260
Aset derivatif	2q,17,28,34	69.334	224.743
Uang muka	29e	67.273	35.173
Pajak dibayar di muka	2s,5,13	701.560	818.326
Biaya dibayar di muka	2g,2k,2p,2v, 25,26,28l	1.527.254	1.125.091
Aset keuangan lancar lainnya	2c,2q,2v,17, 26,34,37	53.119	35.173
Aset lancar lainnya	2v,26,37	702	2.878
Jumlah Aset Lancar		6.158.854	7.139.627

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2010	2009
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang hubungan istimewa - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sejumlah Rp646 pada tahun 2010 dan Rp1.182 pada tahun 2009	2e,2q,2v, 17,26,34	8.421	7.215
Aset pajak tangguhan - bersih	2s,13	95.018	85.812
Investasi pada perusahaan asosiasi - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sejumlah Rp56.300 pada tahun 2010 dan Rp56.586 pada tahun 2009	2h,6	-	422
Investasi jangka panjang lainnya - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sejumlah Rp99.977 pada tahun 2010 dan 2009	2h,2q,7,17,34	2.730	2.730
Aset tetap	2i,2j,2o,8, 15,29b		
Biaya perolehan		78.101.166	74.818.452
Akumulasi penyusutan		(34.431.545)	(30.291.034)
Penurunan nilai		(98.611)	(98.611)
Bersih		43.571.010	44.428.807
Goodwill dan aset tak berwujud lainnya - bersih	2l,9	1.374.060	1.580.080
Sewa dibayar di muka jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	2g,2v,10,26,37	750.472	735.185
Izin dibayar di muka jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	2g,2k	397.708	463.549
Uang muka jangka panjang	2v,11,26,29e	216.643	294.391
Pensiun dibayar di muka jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	2p,2v,25,26	111.344	147.380
Piutang jangka panjang	37	45.911	50.767
Aset keuangan tidak lancar lainnya	2c,2q,2v,17,26, 29e,29f,34,37	77.675	100.004
Aset tidak lancar lainnya	2v,26,37	8.341	5.518
Jumlah Aset Tidak Lancar		46.659.333	47.901.860
JUMLAH ASET		**52.818.187**	**55.041.487**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2010	2009
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang usaha	2q,17,34		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2v,26	22.260	38.670
Pihak ketiga		623.245	498.806
Hutang pengadaan	2q,2v,12,17,26,34	3.644.467	5.289.782
Hutang pajak	2s,13	169.445	161.820
Biaya masih harus dibayar	2q,2v,14,17, 25,26,34,37	1.710.885	1.525.561
Pendapatan diterima di muka	2n,29d,29e	1.143.852	941.223
Uang muka pelanggan	2q,17,34	50.279	22.463
Kewajiban derivatif	2q,17,28,34	215.403	200.202
Bagian jangka pendek dari:			
Hutang jangka panjang	2m,2q,2v, 15,17,26,34	3.184.147	1.440.259
Hutang obligasi	2m,2q,16,17,34	1.098.131	2.840.662
Kewajiban keuangan lancar lainnya	2q,17,34,37	23.127	43.721
Kewajiban lancar lainnya	2v,26,34,37	61.612	68.065
Jumlah Kewajiban Lancar		11.946.853	13.071.234
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Hutang hubungan istimewa	2q,2v,17,26,34	22.099	13.764
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	2s,13	1.772.337	1.535.202
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	2m,2q,15,17,34		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2v,26	997.045	2.192.489
Pihak ketiga		6.669.759	10.528.819
Hutang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek	2m,2q,16,17,34	12.114.104	8.472.175
Kewajiban imbalan kerja - setelah dikurangi bagian jangka pendek	2p,18,25,37	872.407	825.714
Kewajiban tidak lancar lainnya	2v,26,29e,34,37	187.097	113.807
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		22.634.848	23.681.970
JUMLAH KEWAJIBAN		**34.581.701**	**36.753.204**
HAK MINORITAS	2b	**385.840**	**330.593**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASI (lanjutan)
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2010	2009
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 setiap saham Seri A dan Seri B			
Modal dasar - 1 saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B	19	543.393	543.393
Agio saham		1.546.587	1.546.587
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi/anak perusahaan	2h	404.104	404.104
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2b	(2.727)	2.369
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya		134.446	119.464
Belum ditentukan penggunaannya		15.224.843	15.341.773
EKUITAS - BERSIH		**17.850.646**	**17.957.690**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**52.818.187**	**55.041.487**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2010	2009
PENDAPATAN USAHA	2n,2v,20,26, 30,31,32,37		
Selular		16.027.062	14.300.163
Multimedia, Komunikasi Data, Internet ("MIDI")		2.476.276	2.720.984
Telekomunikasi tetap		1.293.177	1.803.039
Jumlah Pendapatan Usaha		**19.796.515**	**18.824.186**
BEBAN USAHA	2n		
Beban jasa telekomunikasi	2k,2v,21,26, 29j,31,32,37	7.113.410	7.087.850
Penyusutan dan amortisasi	2i,2l,8,9	6.151.911	5.561.390
Karyawan	2o,2p,2v, 22,25,26	1.411.244	1.451.560
Pemasaran	2n	986.019	816.934
Umum dan administrasi	2v,23,26	659.987	693.437
Jumlah Beban Usaha		**16.322.571**	**15.611.171**
LABA USAHA		**3.473.944**	**3.213.015**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2n		
Laba kurs - bersih	2q,2r,4	492.401	1.656.407
Pendapatan bunga	2v,26	143.402	138.951
Beban pendanaan	2m,2v,15,16,24,26	(2.271.628)	(1.872.967)
Rugi perubahan nilai wajar derivatif - bersih	2q,28	(418.092)	(517.655)
Amortisasi goodwill	2l,9	(226.380)	(235.420)
Lain-lain - bersih	7,8,13	(111.830)	(150.338)
Beban Lain-lain - Bersih		**(2.392.127)**	**(981.022)**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**1.081.817**	**2.231.993**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2s,13		
Tahun berjalan		(128.171)	(460.973)
Tangguhan		(229.627)	(216.292)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		**(357.798)**	**(677.265)**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

	Catatan	2010	2009
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN		**724.019**	**1.554.728**
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN	2b	(76.845)	(56.483)
LABA BERSIH		**647.174**	**1.498.245**
LABA PER SAHAM DASAR	2u	**119,10**	**275,72**
LABA PER ADS DASAR (50 lembar saham Seri B per ADS)	2u	**5.954,93**	**13.786,01**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah)

Uraian	Catatan	Modal Saham - Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi/Anak Perusahaan	Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan	Saldo Laba		Bersih
						Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2009		**543.393**	**1.546.587**	**404.104**	**13.291**	**100.678**	**14.801.568**	**17.409.621**
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. dari euro, dan Indosat Singapore Pte. Ltd. dari dolar A.S. ke rupiah - setelah ditambah manfaat pajak penghasilan terkait masing-masing sebesar Rp1.172, Rp1.604 dan Rp3.641	2b	-	-	-	(10.922)	-	-	(10.922)
Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 11 Juni 2009	27							
Deklarasi dividen kas		-	-	-	-	-	(939.254)	(939.254)
Pembentukan dana cadangan		-	-	-	-	18.786	(18.786)	-
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	1.498.245	1.498.245
Saldo pada tanggal 31 Desember 2009		**543.393**	**1.546.587**	**404.104**	**2.369**	**119.464**	**15.341.773**	**17.957.690**
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. dari euro, dan Indosat Singapore Pte. Ltd. dan Indosat Palapa B.V. dari dolar A.S. ke rupiah - setelah ditambah manfaat pajak penghasilan terkait masing-masing sebesar Rp798, Rp368, Rp301 dan Rp231	2b	-	-	-	(5.096)	-	-	(5.096)
Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 Juni 2010	27							
Deklarasi dividen kas		-	-	-	-	-	(749.122)	(749.122)
Pembentukan dana cadangan		-	-	-	-	14.982	(14.982)	-
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	647.174	647.174
Saldo pada tanggal 31 Desember 2010		**543.393**	**1.546.587**	**404.104**	**(2.727)**	**134.446**	**15.224.843**	**17.850.646**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah)

	Catatan	2010	2009
ARUS KAS DARI KEGIATAN USAHA			
Penerimaan kas dari:			
Pelanggan		19.678.609	18.415.890
Pendapatan bunga		145.067	146.826
Pengembalian pajak	5	41.753	84.650
Pengeluaran kas kepada/untuk:			
Pemasok dan lainnya		(9.061.007)	(10.116.183)
Beban pendanaan		(2.175.997)	(1.730.149)
Karyawan		(1.310.556)	(1.359.817)
Pajak penghasilan		(215.874)	(878.137)
Kontrak swap suku bunga	28m-z	(117.231)	(47.715)
Beban swap dari kontrak swap valuta asing	28b-k	(121.449)	(125.748)
Penyelesaian kontrak derivatif	28b,28g	(24.431)	-
Izin dibayar di muka jangka panjang	1a,2k	-	(338.408)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Kegiatan Usaha		**6.838.884**	**4.051.209**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Penerimaan klaim asuransi Satelit Palapa-D	8	537.657	-
Penerimaan dividen kas dari investasi jangka panjang lainnya	7	19.281	26.774
Penerimaan dari penjualan aset tetap	8	7.741	2.253
Perolehan aset tetap	8	(6.495.146)	(10.684.690)
Perolehan aset tak berwujud	9	(40.052)	(15.044)
Penambahan investasi pada perusahaan asosiasi	6	(194)	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi		**(5.970.713)**	**(10.670.707)**
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Penerimaan dari hutang obligasi	16	5.851.301	1.500.000
Penerimaan dari hutang jangka panjang	15	1.092.059	3.892.786
Penyelesaian kontrak derivatif	28a	59.925	-
Penurunan (kenaikan) kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya		2.846	(18.206)
Pembayaran hutang jangka panjang	15	(4.098.277)	(632.814)
Pembayaran hutang obligasi	16	(3.720.815)	(14.453)
Pembayaran dividen kas oleh Perusahaan	27	(749.122)	(939.254)
Beban swap dari kontrak swap valuta asing	28a	(46.136)	(54.116)
Pembayaran dividen kas oleh anak perusahaan ke pemegang saham minoritas		(21.436)	(9.292)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan		**(1.629.655)**	**3.724.651**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

PT INDOSAT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah)

	Catatan	2010	2009
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(761.484)**	**(2.894.847)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		2.835.999	5.737.866
KAS DAN SETARA KAS DARI ANAK PERUSAHAAN YANG DILIKUIDASI*		-	(7.020)
KAS DAN SETARA KAS DARI ANAK PERUSAHAAN YANG DIAKUISISI	6	755	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3	**2.075.270**	**2.835.999**

* PT Satelindo Multi Media ("SMM") dilikuidasi pada tanggal 23 Juni 2009.

RINCIAN KAS DAN SETARA KAS:	**3**		
Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan deposito *on call*		1.791.783	2.611.529
Kas dan bank		283.487	224.470
Kas dan setara kas yang disajikan pada neraca konsolidasi		**2.075.270**	**2.835.999**
INFORMASI TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS:			
Transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas:			
Perolehan aset tetap yang dikreditkan ke:			
Uang muka jangka panjang		77.748	161.702
Hutang jangka panjang		-	723.112

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Indosat Tbk ("Perusahaan") didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan akta notaris Mohamad Said Tadjoedin, S.H. No. 55 tanggal 10 November 1967 di Negara Republik Indonesia. Akta pendirian ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No. 24. Pada tahun 1980, Perusahaan dijual oleh American Cable and Radio Corporation, anak perusahaan dari International Telephone & Telegraph, kepada Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (Persero).

Pada tanggal 7 Februari 2003, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Surat No. 14/V/PMA/2003 atas perubahan status dari Badan Usaha Milik Negara (Persero) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2003, Perusahaan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan perubahan status hukum tersebut.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan Akta Notaris No. 123 tanggal 28 Januari 2010 oleh Aulia Taufani, S.H. (sebagai notaris pengganti Sutjipto, S.H.), sebagaimana disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Januari 2010, dengan tujuan memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Indonesia No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-09555.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 dan No. AHU-AH.01.10-04964 tanggal 25 Februari 2010. Perubahan terkait, antara lain, perubahan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan, pengangkatan pejabat Direktur Utama, jika pemegang jabatan Direktur Utama tidak tersedia dan definisi benturan kepentingan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta teknologi informasi dan/atau jasa teknologi konvergensi dengan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta teknologi informasi dan/atau layanan konvergensi teknologi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyediaan jasa teleponi dasar, layanan multimedia, layanan telepon internet untuk keperluan publik, layanan interkoneksi internet, layanan akses internet, jaringan telekomunikasi bergerak dan jaringan telekomunikasi tetap; dan

b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan layanan transfer uang melalui jaringan telekomunikasi serta teknologi informasi dan/atau teknologi konvergensi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung usaha utama Perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut:

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

a. Merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, menyewa, menyewakan, serta memelihara prasarana/sarana termasuk sumber daya untuk mendukung usaha Perusahaan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, telekomunikasi jasa serta teknologi informasi dan/atau layanan konvergensi teknologi;

b. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (termasuk pengembangan, pemasaran dan penjualan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta teknologi informasi dan/atau jasa teknologi konvergensi oleh Perusahaan), termasuk penelitian, layanan pelanggan, pendidikan dan pelatihan (baik di dalam maupun luar negeri); dan

c. Menyelenggarakan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung dan/atau terkait dengan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta teknologi informasi dan/atau layanan konvergensi teknologi termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi elektronis dan penyediaan piranti keras, piranti lunak, konten serta jasa pengelolaan telekomunikasi.

Perusahaan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1969.

Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1991, Perusahaan telah ditegaskan kembali sebagai Badan Penyelenggara yang menyediakan jasa telekomunikasi internasional di bawah otorisasi Pemerintah.

Pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 36 mengenai Telekomunikasi ("Undang-undang Telekomunikasi") yang berlaku efektif tanggal 8 September 2000. Berdasarkan Undang-undang tersebut, penyelenggaraan jasa telekomunikasi meliputi:

- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
- Penyelenggaraan jasa telekomunikasi
- Penyelenggaraan telekomunikasi khusus

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Sedangkan penyelenggara telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum, selain penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.

Undang-undang Telekomunikasi melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan diharapkan menjadi pembuka jalan bagi liberalisasi pasar.

Berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi tersebut, status Perusahaan sebagai Badan Penyelenggara tidak berlaku lagi dan Perusahaan harus memperoleh izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tertentu.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 14 Agustus 2000, Pemerintah, melalui Menteri Perhubungan ("Menhub"), memberi izin prinsip kepada Perusahaan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi *Digital Communication System* ("DCS") 1800 nasional sebagai kompensasi atas terminasi dini efektif tanggal 1 Agustus 2003, hak eksklusif jasa telekomunikasi internasional Perusahaan yang diberikan sebelum izin tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2001, Perusahaan memperoleh izin penyelenggaraan dari Menhub. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Menhub No. KP.247 tanggal 6 November 2001, izin penyelenggaraan tersebut dialihkan kepada anak perusahaannya, PT Indosat Multi Media Mobile (lihat "e" di bawah).

Pada tanggal 7 September 2000, Pemerintah, melalui Menhub, memberikan izin prinsip kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan telepon lokal dan sambungan langsung jarak jauh dalam negeri sebagai kompensasi atas terminasi hak eksklusif jasa telekomunikasi internasional Perusahaan. Di lain pihak, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Telkom") telah diberikan izin prinsip untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional sebagai kompensasi atas terminasi dini hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal dan sambungan langsung jarak jauh dalam negeri.

Berdasarkan surat Menhub tanggal 1 Agustus 2002, Perusahaan diberikan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap lokal dengan wilayah operasi Jakarta dan Surabaya. Izin penyelenggaraan ini diperbaharui menjadi izin nasional pada tanggal 17 April 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menhub No. KP.130 Tahun 2003. Nilai izin yang diberikan kepada Telkom dan Perusahaan atas terminasi hak eksklusif mereka, masing-masing atas penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal/domestik dan internasional telah ditentukan oleh penilai independen.

Berikut adalah beberapa izin penyelenggaraan yang dimiliki Perusahaan dan PT Indosat Mega Media, anak perusahaan:

No. Izin	Tanggal Penerbitan Izin	Pemberi Izin	Periode Izin	Keterangan
KP.69/Thn 2004	15 Maret 2004	Menhub	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup nasional (VSAT, frame relay, dan lainnya) yang diamandemen dengan izin No. 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010
KP.203/Thn 2004	21 Mei 2004	Menhub	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan jaringan tetap dan jasa teleponi dasar yang meliputi jasa telepon lokal, sambungan langsung jarak jauh nasional dan sambungan internasional, yang diamandemen dengan izin No.311/KEP/M.KOMINFO/8/2010, No.312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 dan No.313/KEP/M.KOMINFO/8/2010
19/KEP/M.KOMINFO/02/2006 dan 29/KEP/M.KOMINFO/03/2006	14 Februari 2006 dan 27 Maret 2006	Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo")	10 tahun	Penetapan sebagai pemenang dan izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz (dikenal sebagai "3G") untuk 1 blok (2 x 5 Mhz) frekuensi (*)
102/KEP/M.KOMINFO/10/2006	11 Oktober 2006	Menkominfo	Dievaluasi setiap tahun	Amandemen izin nasional penyelenggaraan untuk jaringan bergerak selular GSM (termasuk layanan teleponi dasar dan hak dan kewajiban untuk jasa 3G)

(*) Sebagai salah satu pemenang dalam seleksi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000, Perusahaan berkewajiban, antara lain, melakukan pembayaran biaya nilai awal (*upfront fee*) sebesar Rp320.000 (Catatan 2k) dan biaya hak penggunaan pita frekuensi radio (Catatan 29g).

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

No. Izin	Tanggal Penerbitan Izin	Pemberi Izin	Periode Izin	Keterangan
181/KEP/M.KOMINFO/12/2006	12 Desember 2006	Menkominfo	-	Pengalokasian dua kanal frekuensi skala nasional, yaitu kanal 589 dan 630 pada pita frekuensi 800 Mhz untuk Layanan Jaringan Tetap Lokal Nirkabel dengan Mobilitas Terbatas
01/DIRJEN/2008	7 Januari 2008	Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT")	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan layanan internet
51/DIRJEN/2008	9 Januari 2008	DJPT	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan layanan interkoneksi internet (*Network Access Point*/NAP), untuk menggantikan izin sebelumnya yang diberikan kepada PT Satelit Palapa Indonesia ("Satelindo")
52/DIRJEN/2008	9 Januari 2008	DJPT	Dievaluasi setiap 5 tahun	Izin penyelenggaraan layanan internet teleponi untuk menggantikan izin penyelenggaraan *Voice over Internet Protocol* No.823/DIRJEN/2002 dengan cakupan nasional yang telah habis masa berlakunya di tahun 2007
237/KEP/M.KOMINFO/7/2009	27 Juli 2009	Menkominfo	10 tahun	Izin penyelenggaraan untuk Jaringan Tetap Lokal Berbasis "*Packet Switched*" yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (BWA) (**)
268/KEP/M.KOMINFO/9/2009	1 September 2009	Menkominfo	10 tahun	Izin penyelenggaraan untuk tambahan 1 blok (2 x 5 Mhz) frekuensi 3G (***)
198/KEP/M.KOMINFO/05/2010	27 Mei 2010	Menkominfo	Dievaluasi setiap 5 tahun	Amandemen izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup nasional (VSAT, frame relay, dan lainnya) untuk menggantikan izin sebelumnya (No. KP.69/Thn 2004) yang diberikan kepada Perusahaan
311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 dan 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010	24 Agustus 2010	Menkominfo	Dievaluasi setiap 5 tahun	Amandemen izin penyelenggaraan jaringan tetap dan jasa teleponi dasar yang meliputi jasa telepon lokal, sambungan langsung jarak jauh nasional dan sambungan internasional, untuk menggantikan izin sebelumnya (No. KP.203/Thn 2004) yang diberikan kepada Perusahaan

(**) PT Indosat Mega Media berkewajiban, antara lain, melakukan pembayaran biaya nilai awal sebesar Rp18.408 (Catatan 2k) dan biaya hak penggunaan pita frekuensi radio (Catatan 29g).
(***) Perusahaan berkewajiban, antara lain, melakukan pembayaran biaya nilai awal sebesar Rp320.000 (Catatan 2k) dan biaya hak penggunaan pita frekuensi radio (Catatan 29g).

Pada tanggal 9 Januari 2008, berdasarkan surat dari Bank Indonesia (Bank Sentral) No. 10/14/DASP, Perusahaan mendapat persetujuan untuk mengeluarkan kartu pra-bayar *"Indosat m-wallet"* yang berfungsi sebagai alat baru untuk melakukan pembayaran kepada *merchant* tertentu. Perusahaan juga ditunjuk sebagai *"Special Principal"* dan *"Technical Acquirer"* untuk kartu pra-bayar tersebut. Pada tanggal 19 November 2009, Perusahaan melakukan peluncuran "*Indosat m-wallet*" kepada masyarakat.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo mengeluarkan Keputusan Menteri No. 02/PER/M.KOMINFO/2008 mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Berdasarkan keputusan tersebut, pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang dan pemerintah daerah untuk menentukan penempatan dari menara dan lokasi dimana menara bisa dibangun. Selanjutnya, sebuah penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara telekomunikasi diwajibkan untuk mengijinkan penyelenggara telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasinya tanpa diskriminasi. Keputusan ini juga mengharuskan setiap kontraktor, penyedia dan pemilik menara adalah perusahaan yang 100% dimiliki oleh lokal.

Pada tanggal 30 Maret 2009, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo dan Kepala BKPM mengeluarkan Peraturan Bersama No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/09 dan No. 3/P/2009 mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Peraturan ini menjabarkan persyaratan dan prosedur baku untuk pembangunan menara. Penyedia menara bisa merupakan penyelenggara telekomunikasi atau bukan penyelenggara telekomunikasi. Apabila penyedia menara adalah bukan penyelenggara telekomunikasi, maka perusahaan tersebut harus merupakan perusahaan yang 100% dimiliki oleh lokal.

Pada tanggal 3 September 2010, berdasarkan surat dari Bank Indonesia (Bank Sentral) No. 12/67/DASP/25, Perusahaan mendapat persetujuan untuk menjadi "penyelenggara pengiriman uang" untuk para pelanggan dalam pasar lokal dan internasional.

Pada tanggal 13 Desember 2010, berdasarkan surat dari Badan Standardisasi Nasional No. 2619/BSN/D3-d3/12/2010, Perusahaan memperoleh *Issuer Identification Number* (IIN) untuk aplikasi "*Indosat m-wallet*" dan "penyelenggara pengiriman uang".

Pada tanggal 13 Desember 2010, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 76/2010 tentang perubahan atas PP No. 7/2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Menkominfo. Peraturan ini berdampak pada metode perhitungan dan pembayaran biaya spektrum yang dialokasikan ke Perusahaan (pita frekuensi 800 Mhz, 900 Mhz dan 1.800 Mhz).

Perusahaan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta dan memiliki 8 kantor regional yang terletak di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan dan Makassar.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Semua saham Seri B Perusahaan dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia (entitas baru setelah penggabungan usaha antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada bulan November 2007) sejak tahun 1994. *American Depositary Shares* (ADS, setiap ADS mewakili 50 saham Seri B) Perusahaan, mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York sejak tahun 1994.

Pada tanggal 31 Desember 2010, obligasi-obligasi Perusahaan dan Anak Perusahaan yang diterbitkan ke publik adalah sebagai berikut:

Obligasi (Catatan 16)	Tanggal Efektif	Didaftarkan dan Diperdagangkan di
1. Obligasi Indosat Kedua Seri B Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap	6 November 2002	Bursa Efek Indonesia
2. Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap	21 Juni 2005	Bursa Efek Indonesia

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan (lanjutan)

Obligasi (Catatan 16)	Tanggal Efektif	Didaftarkan dan Diperdagangkan di
3. Obligasi Syari'ah Ijarah Indosat Tahun 2005	21 Juni 2005	Bursa Efek Indonesia
4. Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap	29 Mei 2007	Bursa Efek Indonesia
5. Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	29 Mei 2007	Bursa Efek Indonesia
6. Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap	9 April 2008	Bursa Efek Indonesia
7. Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008	9 April 2008	Bursa Efek Indonesia
8. Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 dengan Tingkat Bunga Tetap	8 Desember 2009	Bursa Efek Indonesia
9. Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009	8 Desember 2009	Bursa Efek Indonesia
10. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2020	29 Juli 2010	*Singapore Exchange Securities Trading Limited*

c. Karyawan, Direktur, Komisaris dan Komite Audit

Berdasarkan keputusan dalam setiap Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tanggal 11 Juni 2009 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 118 oleh Aulia Taufani, S.H. (sebagai notaris pengganti Sutjipto, S.H.) pada tanggal yang sama dan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tanggal 22 Juni 2010 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 164 oleh Aulia Taufani, S.H. (sebagai notaris pengganti Sutjipto, S.H.) pada tanggal yang sama, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

	2010	2009
Komisaris Utama	Abdulla Mohammed S.A Al Thani	Abdulla Mohammed S.A Al Thani
Komisaris	Dr. Nasser Mohd. A. Marafih	Dr. Nasser Mohd. A. Marafih
Komisaris	Rachmad Gobel	Rachmad Gobel
Komisaris	Richard Farnsworth Seney	Richard Farnsworth Seney
Komisaris	Jarman	Jarman
Komisaris	Rionald Silaban	Rionald Silaban
Komisaris	Alexander Rusli *	Setyanto Prawira Santosa *
Komisaris	Chris Kanter *	Michael Francis Latimer *
Komisaris	Thia Peng Heok George *	Thia Peng Heok George *
Komisaris	Soeprapto *	Soeprapto *

* Komisaris independen

Direksi:

	2010	2009
Direktur Utama dan *Chief Executive Officer*	Harry Sasongko Tirtotjondro	Harry Sasongko Tirtotjondro
Direktur dan *Chief Financial Officer*	Peter Wladyslaw Kuncewicz	Peter Wladyslaw Kuncewicz
Direktur dan *Chief Commercial Officer*	Laszlo Imre Barta	Kaizad Bomi Heerjee
Direktur dan *Chief Technology Officer*	Stephen Edwards Hobbs	Stephen Edwards Hobbs
Direktur dan *Chief Wholesale and Infrastructure Officer*	Fadzri Sentosa	Fadzri Sentosa

1. UMUM (lanjutan)

c. Karyawan, Direktur, Komisaris dan Komite Audit (lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Ketua	Thia Peng Heok George	Thia Peng Heok George
Anggota	Chris Kanter	Michael Francis Latimer
Anggota	Soeprapto	Soeprapto
Anggota	Unggul Saut Marupa Tampubolon	Unggul Saut Marupa Tampubolon
Anggota	Kanaka Puradiredja	Kanaka Puradiredja

Perusahaan dan Anak Perusahaan (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perusahaan") mempunyai sekitar 6.694 dan 7.126 karyawan, termasuk pekerja harian lepas, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

d. Struktur Anak Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan mempunyai pemilikan langsung maupun tidak langsung pada anak perusahaan berikut:

Anak Perusahaan	Lokasi	Kegiatan Usaha	Mulai Beroperasi	Persentase Pemilikan (%) 2010	2009
Indosat Palapa Company B.V.("IPBV") [1]	Amsterdam	Keuangan	2010	100,00	-
Indosat Mentari Company B.V.("IMBV") [1]	Amsterdam	Keuangan	2010	100,00	-
Indosat Finance Company B.V.("IFB") [2]	Amsterdam	Keuangan	2003	100,00	100,00
Indosat International Finance Company B.V. ("IIFB") [3]	Amsterdam	Keuangan	2005	100,00	100,00
Indosat Singapore Pte. Ltd. ("ISPL")	Singapura	Telekomunikasi	2005	100,00	100,00
PT Indosat Mega Media ("IMM")	Jakarta	Multimedia	2001	99,85	99,85
PT Starone Mitra Telekomunikasi ("SMT")	Semarang	Telekomunikasi	2006	72,54	72,54
PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	Jakarta	Komunikasi Data	1989	72,36	72,36
PT Lintas Media Danawa ("LMD") (Catatan 6)	Jakarta	Layanan Informasi dan Komunikasi	2008	50,65	-
PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("APE") (Catatan 2b)	Jakarta	Telekomunikasi	2000	39,80	39,80

Anak Perusahaan	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) 2010	2009
IPBV [1]	5.966.764	-
IMBV [1]	5.946.885	-
IFB [2]	21.876	2.261.226
IIFB [3]	9.635	1.044.174
ISPL	54.353	28.779
IMM	815.130	745.204
SMT	155.297	139.903
Lintasarta	1.739.896	1.419.595
LMD (Catatan 6)	2.671	-
APE	221.297	179.681

[1] IPBV dan IMBV didirikan di Amsterdam pada tanggal 28 April 2010 untuk menjalankan kegiatan perbendaharaan, untuk memberikan pinjaman dan memperoleh pinjaman, baik dalam bentuk surat berharga atau lainnya, untuk melakukan pembiayaan di perusahaan-perusahaan, untuk memberikan surat berharga terkait dengan kewajibannya atau kewajiban kelompok perusahaannya dan kepada pihak ketiga.

[2] Berdasarkan keputusan pemegang saham IFB tanggal 6 November 2008, IFB memutuskan untuk melakukan pengembalian setoran modal sejumlah EUR99.996. Perusahaan menerima pengembalian modal tersebut pada bulan Februari 2009.

[3] Berdasarkan keputusan pemegang saham IIFB tanggal 6 November 2008, IIFB memutuskan untuk melakukan pengembalian setoran modal sejumlah EUR1.124.064. Perusahaan menerima pengembalian modal tersebut pada bulan Februari 2009.

1. UMUM (lanjutan)

e. Penggabungan Usaha Perusahaan, Satelindo, Bimagraha dan IM3

Berdasarkan Akta Penggabungan Usaha dari notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 57 tanggal 20 November 2003 ("tanggal penggabungan usaha"), Perusahaan, Satelindo, PT Bimagraha Telekomindo ("Bimagraha") dan PT Indosat Multi Media Mobile ("IM3") sepakat untuk melakukan penggabungan usaha, dengan Perusahaan sebagai entitas yang dipertahankan. Seluruh aset dan kewajiban yang dimiliki oleh Satelindo, Bimagraha dan IM3 dialihkan kepada Perusahaan pada tanggal penggabungan. Ketiga perusahaan tersebut bubar secara hukum tanpa kewajiban untuk melakukan proses likuidasi.

Nama "Satelindo" dan "IM3" dalam catatan atas laporan keuangan berikut mengacu pada entitas-entitas tersebut sebelum bergabung dengan Perusahaan, atau sebagai entitas yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang telah diambil alih oleh Perusahaan sebagai akibat dari penggabungan usaha.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan telah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto, dan instrumen keuangan yang dinyatakan berdasarkan nilai wajar.

Laporan arus kas konsolidasi mengelompokkan penerimaan dan pembayaran kas dalam kegiatan usaha, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari kegiatan usaha disajikan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah rupiah.

b. Prinsip Konsolidasi

Sesuai dengan SAK 4 (Revisi 2009), Perusahaan menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian Perusahaan.

Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas. Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

(a) Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
(b) Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
(c) Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
(d) Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasi juga mencakup akun-akun APE (anak perusahaan Lintasarta). Laporan keuangan APE pada tahun 2010 dan 2009 dikonsolidasi karena kebijakan keuangan dan operasinya dikendalikan oleh Lintasarta.

Akun-akun IPBV, IMBV, IFB, IIFB dan ISPL dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal neraca untuk akun neraca dan kurs rata-rata selama tahun berjalan untuk akun laporan laba rugi. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan IPBV, IMBV, IFB, IIFB dan ISPL disajikan sebagai "Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan" pada bagian Ekuitas dari neraca konsolidasi.

Hak minoritas pada anak perusahaan merupakan bagian pemilikan pemegang saham minoritas pada ekuitas (termasuk laba bersih) anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Semua transaksi dan saldo antar perusahaan telah dieliminasi dalam konsolidasi.

c. Kas dan Setara Kas

Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan deposito *on call* diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

Kas dan deposito berjangka yang dijadikan jaminan untuk bank garansi tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari "Kas dan Setara Kas". Kas dan deposito berjangka ini disajikan sebagai bagian dari "Aset Keuangan Lancar Lainnya" atau "Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya".

d. Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan sejak tanggal penempatan dicatat berdasarkan harga perolehan.

e. Cadangan Penurunan Nilai Piutang

Sebelum 2010, cadangan penurunan nilai atas piutang usaha ditetapkan berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut pada akhir tahun. Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan dan Anak Perusahaan menyediakan cadangan penurunan nilai atas piutang usaha berdasarkan SAK 55 (Revisi 2006) (Catatan 2q6).

f. Persediaan

Persediaan, terutama terdiri dari kartu SIM, modem *broadband,* paket perdana, voucher pulsa isi ulang dan telepon genggam selular (*cellular handset*) dinilai menurut nilai yang terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Sesuai dengan SAK 14 (Revisi 2008), Perusahaan dan Anak Perusahaan menerapkan panduan untuk menentukan biaya persediaan dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto, termasuk juga panduan rumus biaya yang digunakan untuk melakukan atribusi biaya ke persediaan.

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka, terutama terdiri dari biaya frekuensi, biaya sewa, biaya nilai awal izin 3G dan BWA, dan asuransi, dibebankan saat aset terkait digunakan. Bagian jangka panjang dari biaya sewa dan biaya nilai awal izin 3G dan BWA dibayar di muka masing-masing disajikan sebagai bagian dari "Sewa Dibayar Di Muka Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek" dan "Izin Dibayar Di Muka Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Investasi pada Perusahaan Asosiasi

Investasi saham dimana Perusahaan dan Anak Perusahaan mempunyai pemilikan modal minimal 20%, tetapi tidak lebih dari 50%, dinyatakan dengan metode ekuitas dimana harga perolehan dari investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan dan Anak Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal akuisisi serta dikurangi dengan pendapatan dividen yang diterima. Bagian Perusahaan dan Anak Perusahaan atas laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi akan disesuaikan dengan amortisasi garis lurus selama lima belas tahun dari perbedaan antara harga perolehan investasi dan bagian pemilikan Perusahaan dan Anak Perusahaan atas nilai wajar aset bersih pada tanggal akuisisi (goodwill).

Apabila bagian Perusahaan dan Anak Perusahaan atas ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi, setelah transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi, berbeda dengan bagian mereka atas ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi sebelum transaksi tersebut, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai kredit atau beban pada akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi/Anak Perusahaan", setelah dikurangi pajak penghasilan yang terkait, setelah menyesuaikan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi tersebut dengan kebijakan akuntansi mereka.

i. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan (termasuk kapitalisasi biaya pinjaman tertentu selama masa konstruksi), dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

(i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
(ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Perusahaan tidak dapat segera menghentikan pengakuan aset meskipun perolehan aset yang diserahkan diukur dengan cara seperti di atas. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal nilai wajarnya, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan.

Sesuai dengan SAK 16 (Revisi 2007), Perusahaan dan Anak Perusahaan telah memilih metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan penelaahan berkala dan penilaian masa manfaat ekonomis aset. Berikut adalah taksiran masa manfaat (dalam tahun).

	Tahun
Bangunan	20
Peralatan teknologi informasi	3 sampai 5
Peralatan kantor	3 sampai 5
Sarana penunjang bangunan dan partisi	3 sampai 15
Kendaraan	5
Peralatan teknis selular	10
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	10 sampai 15
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	10
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	3 sampai 5
Peralatan jaringan akses tetap	10

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar yang meningkatkan kondisi aset melebihi standar kinerja semula, dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan beserta akumulasi penyusutannya dihentikan pengakuannya dari kelompok aset tetap, dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

Aset dalam pembangunan dan pemasangan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Semua biaya pinjaman, termasuk bunga, amortisasi biaya yang terkait dengan perjanjian pinjaman (Catatan 15c dan 15f) dan selisih kurs (diestimasi setiap tiga bulanan, sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dengan membatasi selisih kurs yang diperhitungkan sebagai biaya pinjaman sebesar jumlah biaya pinjaman atas pinjaman yang setara dalam mata uang fungsional) yang dapat diatribusikan ke aset tertentu, dikapitalisasi ke harga perolehan aset dalam pembangunan dan pemasangan. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan dan pemasangan selesai dan aset yang dibangun atau dipasang tersebut siap untuk digunakan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

j. Penurunan Nilai Aset

Sesuai dengan SAK 48, “Penurunan Nilai Aset”, Perusahaan dan Anak Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal neraca. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Perusahaan dan Anak Perusahaan mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada usaha tahun berjalan.

k. Sewa

Sesuai dengan SAK 30 (Revisi 2007), suatu sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewa yang digunakan oleh *lessee* sesuai dengan sewa pembiayaan disusutkan secara konsisten dengan menggunakan metode yang sama untuk aset yang disusutkan yang dimiliki secara langsung atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan masa manfaat, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan kepemilikan pada akhir masa sewa.

Suatu sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pada tahun 2006, Perusahaan mendapatkan izin penyelenggaraan untuk menggunakan pita frekuensi radio 2,1 GHz (teknologi komunikasi bergerak generasi ketiga “3G” - Catatan 1a) oleh Menkominfo. Biaya nilai awal diakui sebagai Izin Dibayar di Muka Jangka Panjang untuk bagian jangka panjang dan Biaya Dibayar Di Muka untuk bagian jangka pendek dan diamortisasi sepanjang 10 tahun masa berlaku izin dengan menggunakan metode garis lurus.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Pada tahun 2009, Perusahaan mendapatkan izin tambahan 3G (Catatan 1a) dan IMM mendapatkan izin penyelenggaraan untuk Jaringan Tetap Lokal berbasis "*Packet Switched*" yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel [*Broadband Wireless Access ("BWA")*]. Perusahaan dan IMM berkewajiban, antara lain, untuk membayar biaya nilai awal dan biaya hak penggunaan pita frekuensi radio tahunan untuk masa 10 tahun (Catatan 29h).

Manajemen berkeyakinan, dengan didukung konfirmasi tertulis dari DJPT, bahwa izin 3G dan BWA tersebut dapat dikembalikan setiap saat tanpa adanya kewajiban finansial untuk membayar biaya penggunaan pita frekuensi radio tahunan yang tersisa (bentuk perizinan tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan).

Oleh karena itu, Perusahaan dan IMM mengakui biaya hak penggunaan pita frekuensi radio tahunan sebagai sewa operasi yang diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa hak penyelenggaraan izin 3G dan BWA. Manajemen melakukan evaluasi atas keberlangsungan penggunaan izin-izin tersebut setiap tahun.

l. Goodwill dan Aset Tak Berwujud Lainnya

Pada saat Perusahaan mengakuisisi suatu anak perusahaan yang bukan merupakan perusahaan sepengendali, selisih lebih antara harga perolehan di atas bagian pemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset anak perusahaan yang dapat diidentifikasi, setelah dikurangi kewajiban, pada tanggal akuisisi diakui sebagai goodwill.

Akuisisi dari hak minoritas pada sebuah anak perusahaan oleh Perusahaan dicatat dengan menggunakan *parent entity extension method*. Berdasarkan metode ini, aset dan kewajiban dari anak perusahaan tidak disajikan kembali untuk mencerminkan nilai wajar mereka pada tanggal akuisisi. Selisih antara harga pembelian dan bagian pemilikan pemegang saham minoritas atas aset dan kewajiban yang tercermin dalam neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi diakui sebagai goodwill.

Goodwill diamortisasi selama 15 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

Pada saat akuisisi suatu anak perusahaan, aset tak berwujud yang diakui diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tersebut sebagai berikut:

	Tahun
Basis pelanggan (*Customer base*)	
- Pra-bayar	6
- Pasca-bayar	5
Izin spektrum (*Spectrum license*)	5
Merk (*Brand*)	8

Piranti lunak yang bukan merupakan bagian integral dari piranti keras yang terkait diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun.

Perusahaan menelaah nilai tercatat goodwill dan aset tak berwujud lainnya pada saat terdapat peristiwa atau keadaan yang menunjukkan bahwa nilainya menurun. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada usaha tahun berjalan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Beban Emisi Pinjaman dan Obligasi dan Biaya *Solicitation*

Beban yang timbul sehubungan dengan penerbitan pinjaman dan obligasi dikurangkan dari hasil penerbitan pinjaman dan obligasi bersangkutan. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal pinjaman atau obligasi diakui sebagai premium atau diskonto yang diamortisasi selama umur pinjaman dan obligasi. Biaya *solicitation* yang berasal dari amandemen ketentuan tertentu dari perjanjian fasilitas pinjaman dan perjanjian perwaliamanatan, yang tidak dicatat sebagai suatu pengguguran (*"extinguishment"*), diakui sebagai penyesuaian terhadap nilai tercatat pinjaman dan obligasi, dan diamortisasi selama sisa umur pinjaman dan obligasi.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah menerapkan SAK 35, "Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi", dalam mengakui pendapatan untuk jasa telekomunikasi interkoneksi dan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri. Pada bulan Juni 2009, Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 1, "Pencabutan SAK 32, "Akuntansi Kehutanan", SAK 35, "Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi" dan SAK 37, "Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol"" telah diterbitkan, yang mengatur penentuan untuk peristiwa dan transaksi lainnya yang ada dalam SAK-SAK tersebut mengacu ke SAK-SAK lain yang relevan. Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan dan Anak Perusahaan mengacu ke SAK 23, "Pendapatan", dalam mengakui pendapatannya.

Selular

Pendapatan selular yang berasal dari pemakaian pulsa dan penjelajahan diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan selular Perusahaan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 telah disajikan secara neto. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan melakukan reklasifikasi akun atas laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 (Catatan 37). Mulai tanggal 1 Januari 2010, penjelajahan telah disajikan secara bruto. Perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan dampak dari pencabutan SAK 35.

Untuk pelanggan pasca-bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, untuk pelanggan pra-bayar, komponen aktivasi dari penjualan paket perdana diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan akhir. Mulai tanggal 1 Januari 2010, komponen aktivasi dari penjualan paket perdana telah ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama rata-rata masa hubungan yang diharapkan dengan pelanggan. Perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan dampak dari pencabutan SAK 35. Penjualan voucher pulsa perdana/isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya.

Penjualan modem *broadband* nirkabel dan telepon genggam selular diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan.

Pendapatan dari komunikasi data *broadband* nirkabel diakui berdasarkan durasi dari pemakaian atau tagihan tetap bulanan tergantung perjanjian dengan pelanggan.

Pendapatan selular disajikan sebesar jumlah bersih, setelah kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Program Loyalitas Pelanggan

Perusahaan menyediakan suatu program loyalitas pelanggan yang disebut "Poin Plus Plus", yang memperbolehkan para pelanggan untuk mengumpulkan poin dari setiap isi ulang dan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan pra-bayar dan pasca-bayar Perusahaan. Poin tersebut kemudian dapat ditukarkan dengan produk telekomunikasi atau non-telekomunikasi secara gratis, tergantung dari jumlah minimum poin yang telah diperoleh.

Poin penghargaan loyalitas pelanggan diakui sebagai sebuah komponen terpisah dari transaksi penjualan pada saat diberikan. Perusahaan mengakui kewajiban pada saat isi ulang dan pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan pra-bayar dan pasca-bayar, berdasarkan nilai wajar yang diharapkan akan terjadi untuk menyalurkan produk tersebut di masa yang akan datang. Penerimaan yang diperoleh dialokasikan antara produk selular yang terjual dan jumlah poin yang dikeluarkan, dimana penerimaan yang dialokasikan ke poin setara dengan nilai wajarnya. Nilai wajar poin yang dikeluarkan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat poin tersebut ditukarkan atau pada saat periode penukaran berakhir.

Komisi Penjualan untuk Agen Penjual (Dealer)

Imbalan dalam bentuk potongan penjualan yang diberikan oleh Perusahaan kepada agen penjual diakui sebagai pengurang dari pendapatan.

Apabila Perusahaan menerima, atau akan menerima, suatu manfaat yang teridentifikasi sebagai pertukaran atas imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada agen penjual, dan nilai wajar dari manfaat imbalan tersebut dapat diestimasi secara wajar, maka imbalan akan dicatat sebagai beban pemasaran.

Sewa Menara

Pendapatan dari sewa menara diakui dengan metode garis lurus selama masa sewa berdasarkan jumlah yang tercantum dalam perjanjian antara Perusahaan dan *lessee*. Berdasarkan pada hasil penelaahan yang dilakukan Perusahaan atas perjanjian sewa menara yang ada saat ini, maka transaksi sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi (Catatan 2k).

Multimedia, Komunikasi Data, Internet ("MIDI")

Internet

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, pendapatan dari jasa instalasi diakui pada saat instalasi selesai dilakukan. Mulai tanggal 1 Januari 2010, pendapatan dari jasa instalasi ditangguhkan dan diakui selama rata-rata masa hubungan yang diharapkan dengan pelanggan. Perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan dampak dari pencabutan SAK 35. Pendapatan dari biaya jasa bulanan diakui pada saat jasa tersebut diberikan. Pendapatan dari pemakaian diakui setiap bulan berdasarkan durasi pemakaian internet atau berdasarkan jumlah tetap, tergantung perjanjian dengan pelanggan.

Frame Net, World Link dan Direct Link

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, pendapatan dari jasa instalasi telah diakui pada saat penyelesaian instalasi perangkat yang digunakan untuk tujuan koneksi jaringan di tempat pelanggan. Mulai tanggal 1 Januari 2010, pendapatan dari jasa instalasi ditangguhkan dan diakui selama rata-rata masa hubungan yang diharapkan dengan pelanggan. Perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan dampak dari pencabutan SAK 35. Pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan.

Sewa Satelit

Pendapatan satelit diakui dengan metode garis lurus selama periode sewa.

Pendapatan jasa MIDI lainnya diakui pada saat penyerahan jasa tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Telekomunikasi Tetap

Telepon Internasional

Pendapatan telepon internasional ke luar negeri ("*outgoing*") dicatat berdasarkan lalu lintas komunikasi aktual yang tercatat selama periode berjalan dan disajikan dalam jumlah neto, sampai tanggal 31 Desember 2009 setelah alokasi kepada perusahaan telekomunikasi internasional. Mulai tanggal 1 Januari 2010, pendapatan telepon internasional ke luar negeri dilaporkan secara bruto. Perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan dampak dari pencabutan SAK 35.

Sebagai tambahan, sejak 1 Januari 2010, Perusahaan memutuskan untuk melakukan reklasifikasi sebagian pendapatan percakapan telepon dari luar negeri ke Indonesia yang termasuk bagian dari segmen selular Perusahaan. Perusahaan berkeyakinan bahwa perubahan ini akan membuat penyajian pendapatan Perusahaan sejalan lebih dekat dengan kinerja laba rugi Perusahaan dan menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan kepada para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan.

Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan melakukan reklasifikasi akun atas laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 (Catatan 37).

Telepon Jaringan Tetap Nirkabel

Pendapatan telepon jaringan tetap nirkabel dari pemakaian pulsa diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap Perusahaan.

Untuk pelanggan pasca-bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, untuk pelanggan pra-bayar, bagian aktivasi dari penjualan paket perdana diakui pada saat aktivasi oleh pelanggan akhir. Mulai tanggal 1 Januari 2010, komponen aktivasi dari penjualan paket perdana telah ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama rata-rata masa hubungan yang diharapkan dengan pelanggan. Perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan dampak dari pencabutan SAK 35. Penjualan voucher pulsa perdana/isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya.

Telepon Jaringan Tetap

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, pendapatan dari jasa instalasi telepon jaringan tetap diakui pada saat instalasi selesai dilakukan. Mulai tanggal 1 Januari 2010, pendapatan dari jasa instalasi telepon jaringan tetap ditangguhkan dan diakui selama rata-rata masa hubungan yang diharapkan dengan pelanggan. Perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan dampak dari pencabutan SAK 35. Pendapatan dari pemakaian diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap Perusahaan.

Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan perusahaan telekomunikasi dalam negeri dan internasional lainnya diakui setiap bulan berdasarkan lalu lintas komunikasi aktual yang tercatat setiap bulannya.

Beban

Beban Interkoneksi

Beban dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi domestik dan internasional lainnya dicatat sebagai beban usaha pada tahun terjadinya.

Beban-beban lainnya

Beban diakui pada saat terjadinya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Beban Karyawan

Beban karyawan yang langsung berhubungan dengan pengembangan, pembangunan dan pemasangan aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan aset yang bersangkutan.

p. Dana Pensiun dan Kenikmatan Karyawan

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan dan Anak Perusahaan, ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari imbalan pascakerja diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih dari masing-masing imbalan yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi mana yang lebih tinggi diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset dana pensiun, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang melebihi 10% batas koridor diakui secara merata selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari karyawan. Biaya jasa lalu dari imbalan pascakerja diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested.* Apabila imbalan tersebut *vested* setelah program imbalan pasti diperkenalkan atau program tersebut diubah, biaya jasa lalu diakui segera.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu dari imbalan kerja jangka panjang lainnya langsung diakui pada laporan laba rugi konsolidasi tahun berjalan.

Perusahaan dan Anak Perusahaan menerapkan SAK 24 (Revisi 2004), “Imbalan Kerja”, yang mengatur akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja, yang meliputi imbalan kerja jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit) dan imbalan kerja jangka panjang (misalnya cuti-berimbalan jangka panjang, imbalan kesehatan pasca-kerja).

q. Instrumen Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah menerapkan SAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan SAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan SAK 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan SAK 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

SAK 50 (Revisi 2006), berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasikan informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. SAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

SAK 55 (Revisi 2006) mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan *items* non-keuangan. SAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

q1. Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup SAK 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif atau mana yang sesuai. Perusahaan dan Anak Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.

Seluruh aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan dan Anak Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang hubungan instimewa, instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi, instrumen keuangan derivatif dan aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

  Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

  Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang ditandatangani Perusahaan yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam SAK 55 (Revisi 2006). Derivatif, termasuk derivatif melekat dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan dalam laporan neraca konsolidasi pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi.

  Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif terpisah dan dicatat pada nilai wajar apabila karakteristik ekonomi dan risikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak untuk diperdagangkan atau diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Derivatif melekat ini diukur dengan nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi konsolidasi. Penilaian kembali hanya terjadi jika terdapat perubahan dalam ketentuan-ketentuan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang akan diperlukan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

q1. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari Aset Derivatif.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

  Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi konsolidasi.

  Kas dan setara kas (Catatan 2c), piutang usaha dan piutang lainnya, piutang hubungan istimewa, aset keuangan lancar lainnya, dan aset keuangan tidak lancar lainnya Perusahaan dan Anak Perusahaan termasuk dalam kategori ini.

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo [*Held-To-Maturity* ("HTM")]

  Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai HTM ketika Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Amortisasi biaya perolehan dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi konsolidasi.

  Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak memiliki investasi HTM selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual [*Available For Sale* ("AFS")]

  Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya, pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif diakui, atau terjadi penurunan nilai, pada saat kerugian kumulatif direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

q1. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki investasi berikut yang diklasifikasikan sebagai AFS:

- Investasi saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20%, dan investasi jangka panjang lainnya. Investasi ini dinyatakan sebesar biaya perolehan.

- Investasi saham ekuitas yang nilai wajarnya tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20% dan yang diklasifikasikan dalam kelompok AFS. Investasi ini dicatat sebesar nilai wajarnya.

q2. Kewajiban keuangan

Pengakuan awal

Kewajiban keuangan dalam lingkup SAK 55 (Revisi 2006) dapat dikategorikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan hutang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan dan Anak Perusahaan menentukan klasifikasi kewajiban keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh kewajiban keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan hutang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Kewajiban keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan meliputi hutang usaha, hutang pengadaan, biaya masih harus dibayar, uang muka pelanggan, hutang jangka panjang dan hutang obligasi, hutang hubungan istimewa, instrumen keuangan derivatif dan kewajiban keuangan lancar lainnya.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran kewajiban keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

  Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk kewajiban keuangan untuk diperdagangkan dan kewajiban keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

  Kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini termasuk instrumen keuangan derivatif yang ditandatangani Perusahaan yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam SAK 55 (Revisi 2006). Derivatif melekat dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

  Keuntungan atau kerugian atas kewajiban yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

q2. Kewajiban keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- Pinjaman dan Hutang

  Setelah pengakuan awal, pinjaman dan hutang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

  Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi pada saat kewajiban tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

q3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca konsolidasi jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

q4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan acuan pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

Penyesuaian risiko kredit

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi kewajiban keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

q5. Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

q6. Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan dan Anak Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

q6. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

  Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan dan Anak Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan dan Anak Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

  Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

  Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan dengan tujuan untuk mengukur kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan dan Anak Perusahaan. Jika, pada periode berikutnya, jumlah taksiran kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi.

- Aset keuangan AFS

  Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, bukti obyektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

  Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif - yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi - direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi konsolidasi; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

q6. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan AFS (lanjutan)

  Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan dengan tujuan untuk mengukur kerugian penurunan nilai. Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Pendapatan bunga" dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi konsolidasi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi konsolidasi.

q7. Penghentian pengakuan aset dan kewajiban keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*pass-through*"; dan baik (a) Perusahaan dan Anak Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan dan Anak Perusahaan secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Kewajiban keuangan

Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu kewajiban keuangan yang ada digantikan oleh kewajiban keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substantial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu kewajiban yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing kewajiban diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi.

q8. Instrumen keuangan derivatif

Perusahaan menandatangani kontrak swap valuta asing, swap suku bunga, dan instrumen lainnya yang diperbolehkan, jika dianggap perlu, untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga yang berasal dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi Perusahaan dalam mata uang asing. Instrumen keuangan derivatif tersebut tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam SAK 55 (Revisi 2006) dan pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan kemudian diukur kembali pada nilai wajarnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Instrumen Keuangan (lanjutan)

q8. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)

Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat memiliki nilai wajar positif dan sebagai kewajiban keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif selama tahun berjalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai diakui langsung pada laporan laba rugi konsolidasi.

Aset dan kewajiban derivatif disajikan masing-masing sebagai aset dan kewajiban lancar. Derivatif melekat disajikan bersama dengan kontrak utamanya pada neraca konsolidasi yang mencerminkan penyajian yang tepat atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan.

Perubahan bersih nilai wajar instrumen derivatif, pendapatan atau beban swap, pendapatan atau beban terminasi, dan penyelesaian dari instrumen derivatif dikreditkan (dibebankan) pada "Rugi Perubahan Nilai Wajar Derivatif - Bersih", yang disajikan sebagai Penghasilan (Beban) Lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasi.

r. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan dan pemasangan.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, kurs yang digunakan (dalam jumlah penuh) masing-masing adalah Rp8.991 dan Rp9.400 untuk AS$1, yang dihitung dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli mata uang asing yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun tersebut.

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan kewajiban antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu tahun dialokasikan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak yang akan dikenakan pada tahun saat nilai aset direalisasikan atau nilai kewajiban tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika Perusahaan dan Anak Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau kewajiban, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing perusahaan tersebut.

t. Pelaporan Segmen

Perusahaan dan Anak Perusahaan menerapkan SAK 5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen", dalam penyajian laporan segmen pada laporan keuangannya. SAK 5 (Revisi 2000) memberikan panduan yang lebih terinci dalam mengidentifikasi pelaporan segmen usaha dan segmen geografis. Informasi keuangan yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi kinerja segmen disajikan pada Catatan 33.

u. Laba per Saham/ADS Dasar

Sesuai dengan SAK 56, "Laba per Saham", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam tahun berjalan.

Laba per ADS dasar dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 50, sesuai dengan jumlah saham per ADS.

v. Transaksi dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam SAK 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Rincian akun dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa disajikan pada Catatan 26.

w. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan, dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode yang dilaporkan. Hasil sebenarnya dapat berbeda dari taksiran tersebut.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Kas		
Rupiah	1.682	1.581
Dolar A.S. (AS$12)	110	-
	1.792	1.581
Bank		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	45.792	28.750
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	11.345	752
PT Bank Pembangunan Daerah NTT ("BPD - NTT")	4.476	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	4.461	10.877
PT Bank Pembangunan Daerah Papua ("BPD - Papua")	2.473	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	1.270	-
PT Bank Syariah Mandiri ("Mandiri Syariah")	1.215	2.310
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta ("BPD - DKI")	935	4.652
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000)	1.638	3.408
Dolar A.S.		
Mandiri (AS$4.606 pada tahun 2010 dan AS$4.228 pada tahun 2009)	41.412	39.748
BNI (AS$60 pada tahun 2010 dan AS$137 pada tahun 2009)	542	1.286
Lain-lain (AS$60)	548	-
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga")	21.845	10.715
PT Bank Bukopin Tbk ("Bukopin")	9.308	-
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	2.284	11.966
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5.000)	16.307	16.684
Dolar A.S.		
Fortis Bank N.V., Belanda (AS$6.960 pada tahun 2010 dan AS$4.497 pada tahun 2009)	62.577	42.272
Citibank N.A., Cabang Singapura (AS$4.945 pada tahun 2010 dan AS$2.343 pada tahun 2009)	44.464	22.024
Citibank N.A., Cabang Jakarta ("Citibank") (AS$677 pada tahun 2010 dan AS$948 pada tahun 2009)	6.087	8.913
CIMB Niaga (AS$160 pada tahun 2010 dan AS$838 pada tahun 2009)	1.435	7.875
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("DB") (AS$91 pada tahun 2010 dan AS$1.121 pada tahun 2009)	817	10.540
Lain-lain (AS$52 pada tahun 2010 dan AS$12 pada tahun 2009)	464	117
	281.695	222.889

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2010	2009
Deposito berjangka dan deposito *on call*		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)		
Rupiah		
Mandiri	421.400	1.379.950
BNI	141.185	195.820
BTN	88.500	117.000
BRI	68.500	171.500
Mandiri Syariah	31.000	105.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ("BPD - Jawa Barat")	8.350	-
PT Bank BRI Syariah	5.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta ("BPD - Yogyakarta")	1.000	1.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ("BPD - Jawa Tengah")	-	3.500
Dolar A.S.		
BRI (AS$80.000)	719.280	-
Mandiri (AS$1.540 pada tahun 2010 dan AS$265 pada tahun 2009)	13.845	2.489
BPD - Jawa Barat (AS$165)	1.484	-
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk ("Muamalat")	48.500	125.500
CIMB Niaga	22.500	81.000
Bukopin	21.400	18.900
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon")	15.900	22.800
PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk ("HS 1906")	15.400	-
PT Bank Mega Syariah	13.250	5.250
PT Bank International Indonesia ("BII")	13.000	2.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	12.000	18.500
DB	5.232	40.209
PT Bank DBS Indonesia ("DBS")	-	100.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5.000)	13.080	7.500
Dolar A.S.		
DB (AS$5.454 pada tahun 2010 dan AS$17.725 pada tahun 2009)	49.038	166.611
Muamalat (AS$5.000 pada tahun 2010 dan 2009)	44.955	47.000
CIMB Niaga (AS$2.000)	17.984	-
	1.791.783	2.611.529
Jumlah	**2.075.270**	**2.835.999**

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Deposito berjangka dan deposito *on call* dalam rupiah memperoleh bunga per tahun berkisar antara 2,50% sampai 10,00% pada tahun 2010 dan antara 2,50% sampai 14,50% pada tahun 2009, sedangkan deposito berjangka dan *deposito on call* dalam dolar A.S. memperoleh bunga per tahun berkisar antara 0,05% sampai 4,75% pada tahun 2010 dan antara 0,001% sampai 6,00% pada tahun 2009.

Tingkat bunga yang diperoleh dari deposito berjangka dan deposito *on call* pada bank yang mempunyai hubungan istimewa sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga.

4. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)		
Telkom (termasuk AS$55 pada tahun 2010 dan AS$75 pada tahun 2009)	56.108	31.724
Lain-lain (termasuk AS$7.764 pada tahun 2010 dan AS$6.322 pada tahun 2009)	214.038	151.726
Sub jumlah	270.146	183.450
Dikurangi cadangan penurunan nilai	47.640	57.538
Bersih	**222.506**	**125.912**
Pihak ketiga		
Perusahaan telekomunikasi internasional (AS$93.755 pada tahun 2010 dan AS$98.042 pada tahun 2009)	842.954	921.595
Perusahaan dalam negeri (termasuk AS$13.956 pada tahun 2010 dan AS$15.291 pada tahun 2009)	628.224	463.069
Pelanggan pasca-bayar dari:		
Selular	255.973	252.008
Telepon telekomunikasi tetap	47.239	26.813
Sub jumlah	1.774.390	1.663.485
Dikurangi cadangan penurunan nilai	448.470	404.272
Bersih	**1.325.920**	**1.259.213**
Jumlah	**1.548.426**	**1.385.125**

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Umur Piutang	2010 Jumlah	2010 Persentase (%)	2009 Jumlah	2009 Persentase (%)
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
0 - 6 bulan	201.256	74,50	121.522	66,24
7 - 12 bulan	47.973	17,76	27.207	14,83
13 - 24 bulan	6.913	2,56	2.661	1,45
Lebih dari 24 bulan	14.004	5,18	32.060	17,48
Jumlah	**270.146**	**100,00**	**183.450**	**100,00**
Pihak ketiga				
0 - 6 bulan	787.871	44,40	820.082	49,30
7 - 12 bulan	279.806	15,77	287.533	17,28
13 - 24 bulan	308.808	17,40	285.407	17,16
Lebih dari 24 bulan	397.905	22,43	270.463	16,26
Jumlah	**1.774.390**	**100,00**	**1.663.485**	**100,00**

Perubahan cadangan penurunan nilai piutang pada akun piutang usaha adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Pihak Ketiga
31 Desember 2010			
Saldo awal tahun	461.810	57.538	404.272
Cadangan (pembalikan) - bersih (Catatan 23)	67.041	(9.712)	76.753
Penghapusan	(23.586)	-	(23.586)
Efek bersih penyesuaian kurs	(9.155)	(186)	(8.969)
Saldo akhir tahun	496.110	47.640	448.470
Penurunan nilai secara individual	182.175	37.576	144.599
Penurunan nilai secara kolektif	313.935	10.064	303.871
Jumlah	496.110	47.640	448.470
Jumlah bruto piutang, penurunan nilai secara individual, sebelum dikurangi dengan cadangan penurunan nilai yang dinilai secara individual	405.926	118.486	287.440
31 Desember 2009			
Saldo awal tahun	496.163	69.444	426.719
Cadangan (Catatan 23)	98.042	6.635	91.407
Penghapusan	(101.586)	(9.398)	(92.188)
Efek bersih penyesuaian kurs	(29.560)	(9.143)	(20.417)
Pengurangan karena likuidasi SMM*	(1.249)	-	(1.249)
Saldo akhir tahun	461.810	57.538	404.272

* Anak perusahaan yang dilikuidasi pada tanggal 23 Juni 2009

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Efek bersih penyesuaian selisih kurs disebabkan oleh menguatnya atau melemahnya rupiah terhadap dolar A.S. atas piutang dalam dolar A.S. yang sebelumnya telah disisihkan dan dikreditkan atau dibebankan pada "Laba atau Rugi Kurs".

Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai dari tidak tertagihnya piutang.

5. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Tagihan pajak	651.657	580.305
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	47.701	232.773
Lain-lain	2.202	5.248
Jumlah	**701.560**	**818.326**

Tagihan pajak pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 terutama terdiri dari pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun pajak 2010, 2009, 2006, 2005 dan 2004, pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun pajak 2009, 2008, 2005 dan 2004, dan pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2002 dan pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2003 dan 2002 Satelindo.

Pada tanggal 14 Mei 2008, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2004 sebesar Rp60.493 (termasuk denda). Pada tanggal 25 Mei 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menolak keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2004. Perusahaan membebankan koreksi pajak tersebut pada usaha tahun berjalan, yang disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) - Lain-lain - Bersih".

Pada tanggal 21 Agustus 2008, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan keberatan atas koreksi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2005 yang tersisa. Pada tanggal 29 Oktober 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menerima keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2005 sebesar Rp38.155, yang disalinghapuskan dengan jumlah kurang bayar atas pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun pajak 2008 dan 2009 berdasarkan beberapa Surat Tagihan Pajak ("STP") yang diterima Perusahaan pada tanggal 17 September 2010 (Catatan 13).

Pada tanggal 2 September 2008, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2005 sebesar Rp82.126 (termasuk denda dan bunga). Pada tanggal 25 Mei 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menolak keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2005. Perusahaan membebankan koreksi pajak tersebut pada usaha tahun berjalan, yang disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) - Lain-lain - Bersih".

5. PAJAK DIBAYAR DI MUKA (lanjutan)

Pada tanggal 4 Juli 2008, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-00080/WPJ.19/KP.0303/2008 (KEP-00080) dari Pengadilan Pajak yang menerima keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2003 sebesar Rp126.403. Pada tanggal 24 Desember 2008, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") No. KEP-539/WPJ.19/BD.05/2008 yang meningkatkan jumlah kelebihan pembayaran dari Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") untuk tahun pajak 2004 sebesar Rp84.650, dimana jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah yang ditetapkan dalam KEP-00080. Pada tanggal 21 Januari 2009, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai peningkatan SKPLB untuk tahun pajak 2004 sebagaimana disebutkan dalam KEP-00080. Pada tanggal 2 Februari 2009, Perusahaan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak sebesar Rp84.650 untuk tambahan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2004. Pada tanggal 4 Desember 2009, Perusahaan menerima Keputusan Pengadilan Pajak No. Put.20644/PP/M.II/2009 yang menyetujui peningkatan SKPLB untuk tahun pajak 2004. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2009, DJP mengeluarkan Surat Keputusan No. KEP-00101/WPJ.19/KP.0303/2009 untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Pajak tersebut. Pada tanggal 13 April 2010, Perusahaan menerima pengembalian pajak dari Kantor Pajak sebesar Rp41.753 atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2004 yang tersisa.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari DJP atas pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002 sebesar Rp105.809 (termasuk denda dan bunga) (Catatan 13). Perusahaan menerima sebagian dari koreksi pajak penghasilan tahun 2002 sebesar Rp2.646 yang dibebankan pada usaha tahun berjalan pada tahun 2009. Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan di Indonesia, wajib pajak diharuskan membayar jumlah kekurangan pembayaran pajak yang tertera di SKPKB dalam waktu satu bulan dari tanggal SKPKB. Wajib pajak dapat meminta kembali pajak yang sudah dibayarkan melalui proses keberatan atau banding. Pada tanggal 28 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak mengenai koreksi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002 yang tersisa. Pada tanggal 15 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari DJP No. KEP-357/WPJ.19/BD.05/2010 yang menolak keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002. Pada tanggal 14 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak atas koreksi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002. Sampai dengan tanggal 10 Februari 2011, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait surat banding tersebut.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan juga menerima SKPKB dari DJP atas pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun pajak 2003 dan 2002 masing-masing sebesar Rp40.307 dan Rp51.546 (termasuk denda dan bunga) (Catatan 13). Pada tanggal 27 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak mengenai koreksi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun pajak 2002 dan 2003. Pada tanggal 16 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari DJP No. KEP-367/WPJ.19/BD.05/2010 dan KEP-368/WPJ.19/BD.05/2010 yang menolak keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun pajak 2002 dan 2003. Pada tanggal 12 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak terkait keberatan Perusahaan atas koreksi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun pajak 2002 dan 2003. Sampai dengan tanggal 10 Februari 2011, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait surat banding tersebut.

Pada tanggal 7 September 2009, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-335/WPJ.19/BD.05/2009 dari DJP yang menolak keberatan Perusahaan atas sisa koreksi pajak penghasilan badan tahun 2006. Pada tanggal 2 Desember 2009, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai koreksi yang tersisa atas pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun pajak 2006. Sampai dengan tanggal 10 Februari 2011, Perusahaan belum menerima keputusan dari Pengadilan Pajak terkait surat banding tersebut.

6. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, akun ini terdiri dari investasi yang dicatat dengan metode ekuitas sebagai berikut:

	Lokasi	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Harga Perolehan	Bagian Perusahaan atas Akumulasi Bagian Rugi Bersih Perusahaan Asosiasi Yang Belum Dibagikan	Nilai Tercatat
2010						
PT Multi Media Asia Indonesia	Indonesia	Telekomunikasi berbasis satelit	26,67	56.512	(212)	56.300
Dikurangi cadangan penurunan nilai						56.300
Bersih						**-**
2009						
PT Multi Media Asia Indonesia	Indonesia	Telekomunikasi berbasis satelit	26,67	56.512	(212)	56.300
LMD *	Indonesia	Layanan informasi dan komunikasi	35,00	700	(278)	422
PT Swadharma Marga Inforindo **	Indonesia	Layanan informasi dan telekomunikasi	20,00	400	(114)	286
Jumlah				57.612	(604)	57.008
Dikurangi cadangan penurunan nilai						56.586
Bersih						**422**

* LMD adalah perusahaan asosiasi dari Lintasarta. LMD didirikan pada tanggal 28 Juli 2008 untuk menyediakan jasa layanan informasi dan komunikasi, seperti layanan pusat data, *e-learning* dan *distant learning* untuk layanan pendidikan masyarakat dan layanan *content* berbasis Protokol Internet (misalnya IPTV, permainan internet dan sentra gerbang pembayaran internet).

Lintasarta secara bertahap meningkatkan kepemilikannya di LMD dari 35% menjadi 55% pada tanggal 24 November 2010 dan dari 55% menjadi 70% pada tanggal 21 Desember 2010. Efektif pada tanggal 24 November 2010, LMD tidak lagi perusahaan asosiasi, tetapi merupakan Anak Perusahaan dari Lintasarta (Catatan 1d).

** PT Swadharma Marga Inforindo ("SMI") adalah perusahaan asosiasi dari Lintasarta, yang akhirnya dilikuidasi pada bulan Oktober 2010.

Perusahaan dan Anak Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai sebesar Rp56.300 dan Rp56.586 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas investasi di atas.

7. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, akun ini terdiri dari:

Investasi pada saham yang dicatat dengan metode biaya - bersih	2.631
Efek ekuitas yang tersedia untuk dijual*	99
Jumlah	**2.730**

* terdiri dari BNI dan Telkom masing-masing sebesar Rp89 dan Rp10

Rincian dari investasi pada saham pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dicatat dengan metode biaya adalah sebagai berikut:

	Lokasi	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Harga Perolehan/ Nilai Tercatat
PT First Media Tbk	Indonesia	Televisi kabel dan penyelenggara layanan jaringan internet	1,07*/ 2,29	50.000
ICO Global Communication (Holdings) Limited	Bahamas	Layanan satelit	0,0087	49.977
Asean Cableship Pte. Ltd. ("ACPL")**	Singapura	Perbaikan dan pemeliharaan kabel laut	16,67	1.265
Lain-lain			12,80 - 14,29	1.366
Jumlah				102.608
Dikurangi cadangan penurunan nilai				99.977
Bersih				**2.631**

* Pada tanggal 20 Mei 2010, kepemilikan Perusahaan di PT First Media Tbk terdilusi menjadi 1,07% karena Perusahaan tidak menggunakan hak memesan terlebih dahulu sehubungan dengan *right issue* yang dilaksanakan oleh PT First Media Tbk.

** Perusahaan menerima pendapatan dividen dari investasi di ACPL masing-masing sejumlah AS$2.140 (setara dengan Rp19.281) dan AS$2.736 (setara dengan Rp26.774) selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

Perusahaan telah membentuk cadangan penurunan nilai investasi saham yang dicatat dengan metode biaya sejumlah Rp99.977 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, yang menurut keyakinan Perusahaan adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas investasi.

8. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	2010				
		Transaksi selama Tahun Berjalan			
	Saldo Awal Tahun	Penambahan	Penghentian Pengakuan	Reklasifikasi	Saldo Akhir Tahun
Biaya Perolehan					
Hak atas tanah	504.620	15.977	-	20.490	541.087
Bangunan	652.677	4.088	-	157.426	814.191
Peralatan teknologi informasi	2.162.426	114	(14.141)	353.493	2.501.892
Peralatan kantor	1.682.984	50.632	(15.016)	57.829	1.776.429
Sarana penunjang bangunan dan partisi	10.924.318	-	(70.346)	1.120.713	11.974.685
Kendaraan	24.389	635	(1.500)	1.176	24.700
Peralatan teknis selular	31.170.449	158.285	(1.741.072)	5.262.382	34.850.044
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	16.349.982	205.849	(324.912)	2.098.301	18.329.220
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	1.284.431	-	(22.070)	82.796	1.345.157
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	1.286.658	-	(1.315)	69.920	1.355.263
Peralatan jaringan akses tetap	1.069.005	-	(1.851)	59.460	1.126.614
Aset dalam pembangunan dan pemasangan	7.706.513	5.039.357*	-	(9.283.986)	3.461.884
Jumlah	74.818.452	5.474.937	(2.192.223)	-	78.101.166
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	283.781	29.940	-	-	313.721
Peralatan teknologi informasi	1.686.303	286.175	(14.141)	-	1.958.337
Peralatan kantor	1.209.518	148.219	(14.994)	-	1.342.743
Sarana penunjang bangunan dan partisi	3.952.460	920.854	(70.324)	-	4.802.990
Kendaraan	15.761	3.588	(703)	-	18.646
Peralatan teknis selular	14.044.917	3.026.386	(1.582.787)	-	15.488.516
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	6.925.779	1.435.193	(324.912)	-	8.036.060
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	434.990	121.922	(22.070)	-	534.842
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	959.924	134.989	(1.315)	-	1.093.598
Peralatan jaringan akses tetap	777.601	66.342	(1.851)	-	842.092
Jumlah	30.291.034	6.173.608	(2.033.097)	-	34.431.545
Penurunan nilai aset	98.611	-	-	-	98.611
Nilai Buku Bersih	**44.428.807**				**43.571.010**

* termasuk penambahan aset tetap yang dibeli dari Lintasarta sebesar Rp71.423 (bersih dari rugi antar perusahaan Rp11.683).

8. ASET TETAP (lanjutan)

	2009					
		Transaksi selama Tahun Berjalan				
	Saldo Awal Tahun	Penambahan	Penghentian Pengakuan	Reklasifikasi	Anak Perusahaan Yang Dilikuidasi	Saldo Akhir Tahun
Biaya Perolehan						
Hak atas tanah	473.109	-	-	31.511	-	504.620
Bangunan	551.700	18.922	-	82.055	-	652.677
Peralatan teknologi informasi	1.856.437	144	-	311.892	(6.047)	2.162.426
Peralatan kantor	1.605.201	56.211	(33.249)	55.391	(570)	1.682.984
Sarana penunjang bangunan dan partisi	8.651.137	-	(14.604)	2.287.855	(70)	10.924.318
Kendaraan	24.171	641	(1.258)	835	-	24.389
Peralatan teknis selular	22.649.669	-	(817)	8.521.597	-	31.170.449
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	10.750.328	156.742	(88.631)	5.531.543	-	16.349.982
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	904.347	-	-	380.084	-	1.284.431
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	1.098.407	2.129	-	186.122	-	1.286.658
Peralatan jaringan akses tetap	986.961	-	-	82.044	-	1.069.005
Aset dalam pembangunan dan pemasangan	13.926.944	11.334.716	(84.218)	(17.470.929)	-	7.706.513
Jumlah	63.478.411	11.569.505	(222.777)	-	(6.687)	74.818.452
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	258.796	24.985	-	-	-	283.781
Peralatan teknologi informasi	1.406.186	285.131	-	-	(5.014)	1.686.303
Peralatan kantor	1.100.225	142.940	(33.246)	-	(401)	1.209.518
Sarana penunjang bangunan dan partisi	3.130.120	832.047	(9.637)	-	(70)	3.952.460
Kendaraan	13.930	2.944	(1.113)	-	-	15.761
Peralatan teknis selular	11.359.453	2.686.281	(817)	-	-	14.044.917
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	5.905.416	1.108.994	(88.631)	-	-	6.925.779
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	312.799	122.191	-	-	-	434.990
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	791.781	168.143	-	-	-	959.924
Peralatan jaringan akses tetap	707.021	70.580	-	-	-	777.601
Jumlah	24.985.727	5.444.236	(133.444)	-	(5.485)	30.291.034
Penurunan nilai aset	98.611	-	-	-	-	98.611
Nilai Buku Bersih	**38.394.073**					**44.428.807**

Kabel laut (disajikan sebagai bagian dari peralatan transmisi dan *cross-connection*) merupakan bagian investasi Perusahaan pada sirkit kabel laut yang dibangun, dioperasikan, dipelihara dan dimiliki bersama-sama dengan negara lain, berdasarkan kontrak dan/atau perjanjian pembangunan dan pemeliharaan.

8. ASET TETAP (lanjutan)

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi sebesar Rp6.173.608 dan Rp5.444.236 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap atau pemulihan cadangan penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam SAK 48 selama tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Agustus 2009, Perusahaan meluncurkan Satelit Palapa D. Satelit tersebut mengalami gangguan kinerja dari kendaraan peluncur (*launch vehicle*) dalam proses penempatannya pada posisi orbit yang ditentukan. Akibatnya, masa orbit dari satelit menjadi berkurang. Klaim asuransi untuk kerusakan sebagian ("*partial loss*") telah dibuat dan diakui sebagai pengurang biaya perolehan Satelit. Satelit tersebut mulai beroperasi pada bulan November 2009 setelah mengalami proses pengujian dan penempatan pada posisi orbitnya pada bulan September dan Oktober 2009. Pada tanggal 4 dan 19 Januari 2010, Perusahaan menerima klaim asuransi untuk Satelit Palapa D sebesar AS$58.008 (setara dengan Rp537.657) sebagai kompensasi kerugian dari penurunan masa manfaat Satelit dari 15 tahun menjadi 10,77 tahun yang disebabkan karena gangguan kinerja dari kendaraan peluncur (*launch vehicle*) dalam proses pengorbitannya.

Pada tanggal 31 Desember 2010, sekitar Rp31.691 aset tetap digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh Lintasarta (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah mengasuransikan aset tetapnya (kecuali kabel laut dan hak atas tanah) dengan nilai pertanggungan sebesar AS$232.785 dan Rp40.306.958, termasuk asuransi atas satelit Perusahaan sebesar AS$153.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan ini dapat menutup kemungkinan kerugian akibat kebakaran, ledakan, petir, kerusakan pesawat udara dan bencana alam lainnya.

Rincian aset dalam pembangunan dan pemasangan Perusahaan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	Persentase Penyelesaian	Biaya Perolehan	Estimasi Penyelesaian
2010			
Peralatan teknis selular	5 - 99	2.170.612	Januari - Desember 2011
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	5 - 99	955.425	Januari - Desember 2011
Sarana penunjang bangunan dan partisi	6 - 95	242.194	Januari - Desember 2011
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50.000)	5 - 95	93.653	Januari - Desember 2011
Jumlah		**3.461.884**	

	Persentase Penyelesaian	Biaya Perolehan	Estimasi Penyelesaian
2009			
Peralatan teknis selular	5 - 99	5.682.137	Januari - September 2010
Peralatan transmisi dan *cross-connection*	5 - 95	912.720	Januari - September 2010
Sarana penunjang bangunan dan partisi	6 - 60	686.883	Januari 2010 - Januari 2011
Peralatan teknologi informasi	90 - 95	108.980	Januari - Juni 2010
Pusat operasi dan pemeliharaan dan unit pengukuran	40 - 90	102.981	Januari - Juni 2010
Bangunan	20 - 75	79.709	Januari - Desember 2010
Peralatan teknis jaringan tetap nirkabel	5 - 95	72.754	Januari - September 2010
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50.000)	8 - 95	60.349	Januari - Juli 2010
Jumlah		**7.706.513**	

8. ASET TETAP (lanjutan)

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan dan pemasangan adalah masing-masing sebesar Rp18.698 dan Rp181.522 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, penjualan atau pertukaran aset tetap tertentu adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Pertukaran Aset (Catatan 29b)		
Jumlah tercatat aset yang diterima	158.285	-
Jumlah tercatat aset yang diserahkan	(158.285)	-
Penjualan Aset		
Penerimaan	7.741	2.253
Nilai buku bersih	(841)	(5.115)
Laba (rugi)	**6.900**	**(2.862)**

Dalam pertukaran aset di atas, nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal, sehingga nilainya diukur berdasarkan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan.

9. GOODWILL DAN ASET TAK BERWUJUD LAINNYA

Goodwill diperoleh dari akuisisi saham Satelindo dan Bimagraha masing-masing pada tahun 2002 dan 2001, dan dari akuisisi tambahan kepemilikan di Lintasarta pada tahun 2005, di SMT pada tahun 2008 dan LMD pada tahun 2010.

Rincian aset tak berwujud yang diperoleh dari akuisisi Satelindo pada tahun 2002 adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Izin spektrum (*Spectrum license*)	222.922
Basis pelanggan (*Customer base*)	
- Pasca-bayar	154.220
- Pra-bayar	73.128
Merk (*Brand*)	147.178
Jumlah	**597.448**

Perubahan dalam akun goodwill dan aset tak berwujud lainnya adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Saldo awal tahun - bersih	1.580.080	1.833.392
Penambahan :		
Piranti lunak yang tak terintegrasi	40.052	15.044
Amortisasi goodwill	(226.380)	(235.420)
Amortisasi aset tak berwujud lainnya	(19.692)	(32.936)
Saldo akhir tahun - bersih	**1.374.060**	**1.580.080**

10. SEWA DIBAYAR DI MUKA JANGKA PANJANG - SETELAH DIKURANGI BAGIAN JANGKA PENDEK

Akun ini terutama merupakan bagian jangka panjang dari sewa dibayar di muka atas *sites* dan menara.

11. UANG MUKA JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan uang muka kepada pemasok dan kontraktor untuk pengadaan dan pembangunan/pemasangan aset tetap, yang akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tetap yang dibeli sudah diterima atau setelah pembangunan/pemasangan aset tetap mencapai tahap penyelesaian persentase tertentu.

12. HUTANG PENGADAAN

Akun ini terdiri dari hutang untuk pengeluaran barang modal dan operasional yang terdiri dari:

	2010	2009
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26) (termasuk AS$404 pada tahun 2010 dan AS$631 pada tahun 2009)	68.681	117.284
Pihak ketiga (termasuk AS$246.211 pada tahun 2010 dan AS$309.520 pada tahun 2009)	3.575.786	5.172.498
Jumlah	**3.644.467**	**5.289.782**

Hutang pengadaan yang telah ditagih adalah masing-masing sebesar Rp360.508 dan Rp1.478.057 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Hutang pengadaan yang belum ditagih adalah masing-masing sebesar Rp3.283.959 dan Rp3.811.725 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

13. HUTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Taksiran hutang pajak penghasilan, dikurangi pembayaran pajak di muka sebesar Rp123.281 pada tahun 2010 dan Rp439.147 pada tahun 2009	4.890	21.826
Pajak penghasilan:		
Pasal 4(2)	14.299	22.614
Pasal 21	14.032	26.290
Pasal 22	-	3.826
Pasal 23	9.177	8.664
Pasal 25	18.899	40.122
Pasal 26	88.787	33.622
PPN	18.107	3.298
Lain-lain	1.254	1.558
Jumlah	**169.445**	**161.820**

13. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak) Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Laba sebelum pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi konsolidasi	1.081.817	2.231.993
Laba Anak Perusahaan sebelum pajak penghasilan dan dampak dari eliminasi konsolidasi antar perusahaan	(197.537)	(190.669)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	884.280	2.041.324
Koreksi positif		
Ketetapan dan denda pajak penghasilan	82.534	55.347
Amortisasi goodwill dan aset tak berwujud laginnya	35.811	23.118
Cadangan penurunan nilai piutang	34.739	48.640
Penyisihan penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian	32.869	30.898
Sumbangan	18.653	12.774
Beban pensiun berkala - bersih	17.013	1.446
Kenikmatan karyawan masih harus dibayar - bersih	15.278	115.312
Amortisasi beban emisi pinjaman dan hutang obligasi, biaya *solicitation* dan diskon (Catatan 15 dan 16)	10.318	-
Representasi dan jamuan	5.709	7.979
Lain-lain	143.143	126.642
Koreksi negatif		
Penyusutan - bersih	(1.692.108)	(888.571)
Rugi atas penjualan aset tetap - bersih	(344.221)	(3.701)
Bagian laba bersih anak perusahaan/perusahaan asosiasi	(241.230)	(224.842)
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(109.844)	(119.490)
Amortisasi izin dibayar dimuka jangka panjang	(35.005)	(7.435)
Penghapusan piutang	-	(98.905)
Amortisasi beban emisi pinjaman dan hutang obligasi, biaya *solicitation* dan diskon (Catatan 15 dan 16)	-	(2.620)
Taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak) Perusahaan	**(1.142.061)**	**1.117.916**

Perhitungan beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak) Perusahaan	**(1.142.061)**	**1.117.916**
Beban pajak penghasilan - tahun berjalan (sesuai tarif pajak yang berlaku)		
Perusahaan	-	313.016
Anak Perusahaan	128.171	147.957
Jumlah beban pajak penghasilan - tahun berjalan	128.171	460.973

13. HUTANG PAJAK (lanjutan)

	2010	2009
Beban (manfaat) pajak penghasilan - tangguhan - pengaruh perbedaan temporer pada tarif pajak maksimum		
Perusahaan		
Penyusutan - bersih	423.027	228,846
Rugi penjualan aset tetap - bersih	86.055	1.036
Bagian laba bersih anak perusahaan/perusahaan asosiasi	60.308	56.211
Amortisasi izin dibayar dimuka jangka panjang	8.751	1.722
Rugi pajak	(285.515)	-
Amortisasi goodwill dan aset tak berwujud lainnya	(8.953)	(6.614)
Penghapusan piutang (penurunan nilai) - bersih	(8.685)	15.517
Penyisihan penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian	(8.217)	(7.662)
Beban pensiun berkala - bersih	(4.253)	(115)
Kenikmatan karyawan masih harus dibayar - bersih	(3.820)	(27.818)
Amortisasi beban emisi pinjaman dan hutang obligasi, biaya *solicitation* dan diskon (Catatan 15 dan 16)	(2.580)	548
Lain-lain	(19.012)	(31.608)
Bersih	237.106	230.063
Anak Perusahaan	(7.479)	(13.771)
Beban pajak penghasilan bersih - tangguhan	229.627	216.292
Jumlah beban pajak penghasilan	**357.798**	**677.265**

Perhitungan taksiran hutang pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Beban pajak penghasilan - tahun berjalan		
Perusahaan	-	313.016
Anak Perusahaan	128.171	147.957
Jumlah beban pajak penghasilan - tahun berjalan	128.171	460.973
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka Perusahaan		
Pasal 22	52.126	101.137
Pasal 23	6.810	7.071
Pasal 25	28.795	299.289
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka Perusahaan	87.731	407.497
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka Anak Perusahaan		
Pasal 22	1.107	7.534
Pasal 23	3.696	3.306
Pasal 25	194.309	151.693
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka Anak Perusahaan	199.112	162.533
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	286.843	570.030

13. HUTANG PAJAK (lanjutan)

	2010	2009
Taksiran hutang pajak penghasilan Anak Perusahaan	**4.890**	**21.826**
Tagihan pajak (disajikan sebagai bagian dari "Pajak Dibayar Di muka")		
Perusahaan	87.731	94.481
Anak Perusahaan	75.831	36.402
Jumlah	**163.562**	**130.883**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak 25% pada tahun 2010 dan 28% pada tahun 2009 terhadap laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan seperti pada laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Laba sebelum pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi konsolidasi	**1.081.817**	**2.231.993**
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	270.454	624.958
Bagian Perusahaan atas laba Anak Perusahaan sebelum pajak penghasilan dan pembalikan eliminasi konsolidasi antar perusahaan	57.427	66.082
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap		
Ketetapan dan denda pajak penghasilan	20.844	15.497
Kenikmatan karyawan	16.180	15.815
Sumbangan	6.037	3.577
Representasi dan jamuan	2.343	2.825
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(36.200)	(41.764)
Lain-lain	8.818	(8.451)
Lain-lain	11.895	(1.274)
Beban pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi konsolidasi	**357.798**	**677.265**

13. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Jumlah pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Aset pajak tangguhan		
Rugi pajak	285.515	-
Kenikmatan karyawan masih harus dibayar - bersih	235.104	223.067
Cadangan penurunan nilai piutang	118.195	109.510
Cadangan penurunan nilai investasi pada perusahaan asosiasi dan investasi jangka panjang lainnya	39.069	39.069
Beban pensiun	22.143	17.890
Cadangan penurunan nilai pada investasi jangka pendek	6.349	6.349
Lain-lain	3.300	1.992
Jumlah	709.675	397.877
Kewajiban pajak tangguhan		
Aset tetap	2.220.158	1.711.076
Investasi pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi - setelah dikurangi amortisasi goodwill dan aset tak berwujud lainnya	229.239	196.498
Izin dibayar dimuka jangka panjang	13.562	4.811
Beban emisi pinjaman dan hutang obligasi, biaya *solicitation* dan diskon tangguhan	10.526	13.106
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi/anak perusahaan	1.460	1.460
Lain-lain	659	1.448
Jumlah	2.475.604	1.928.399
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	**1.765.929**	**1.530.522**

Rincian saldo aset dan kewajiban pajak tangguhan setiap perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010		2009	
	Aset Pajak Tangguhan	Kewajiban Pajak Tangguhan	Aset Pajak Tangguhan	Kewajiban Pajak Tangguhan
Perusahaan	-	1.765.929	-	1.530.522
Anak Perusahaan				
Lintasarta	77.755	-	74.513	-
IMM	17.263	-	11.299	-
APE	-	4.383	-	3.070
SMT	-	1.597	-	991
ISPL	-	428	-	619
LMD	-	-	-	-
Jumlah	**95.018**	**1.772.337**	**85.812**	**1.535.202**

13. HUTANG PAJAK (lanjutan)

Aset pajak tangguhan Lintasarta sebagian besar berkaitan dengan pajak tangguhan atas perbedaan temporer dalam pengakuan penyusutan aset tetap.

Perbedaan temporer signifikan atas mana aset pajak tangguhan dihitung, tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan sampai kenikmatan karyawan masih harus dibayar telah dibayarkan, piutang ragu-ragu dihapuskan, cadangan penurunan nilai investasi pada perusahaan asosiasi dan investasi jangka panjang lainnya terealisasi pada saat penjualan investasi dan beban pensiun dibayar.

Kewajiban pajak tangguhan signifikan berasal dari perbedaan dasar pencatatan aset tetap, investasi pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi, beban emisi pinjaman dan hutang obligasi, biaya *solicitation* dan diskon dan izin dibayar di muka jangka panjang menurut pembukuan dan pelaporan pajak.

Perusahaan mencadangkan kewajiban dan aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan dasar pencatatan investasi pada anak perusahaan dalam negeri menurut pembukuan dan pelaporan pajak karena Perusahaan berkeyakinan bahwa untuk beberapa anak perusahaan, investasi tersebut akan terpulihkan melalui penjualan saham yang merupakan transaksi kena pajak dan untuk beberapa anak perusahaan, perbedaan tersebut dapat dikurangkan dari pendapatan sebagai akibat penggabungan usaha.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan menerima SKPKB dari DJP atas pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 4 ayat (2), dan PPN Satelindo untuk tahun pajak 2002 dan 2003 sejumlah Rp28.960 (termasuk denda dan bunga), yang dibebankan pada usaha tahun berjalan pada tahun 2009 sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) lain-lain - Lain-lain - Bersih".

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan menerima SKPKB dari DJP atas pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2003 sebesar Rp30.870 (termasuk bunga), yang dibebankan pada usaha tahun berjalan pada tahun 2009 sebagai bagian dari "Penghasilan (Beban) lain-lain - Lain-lain - Bersih".

Pada tanggal 7 Juli 2009, Perusahaan membayar semua SKPKB yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak dari pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), 21, 23 dan 26, dan PPN Satelindo untuk tahun pajak 2002 dan 2003 sejumlah Rp257.492 (Catatan 5).

Pada tanggal 17 September 2010, Perusahaan menerima beberapa STP dari DJP atas kekurangan pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun pajak 2008 dan 2009 sejumlah Rp80.018 (termasuk bunga). Pada tanggal 13 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat pembatalan kepada Kantor Pajak atas STP tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 16 November 2010, Perusahaan diwajibkan untuk membayar sebagian tertentu dari STP tersebut dengan menggunakan tagihan pajak yang telah disetujui atas pajak penghasilan badan perusahaan untuk tahun pajak 2005 (Catatan 5) sebesar Rp38.155. Pada tanggal 31 Desember 2010, jumlah yang tersisa sebesar Rp41.863 belum dibayarkan (Catatan 35a).

Akumulasi rugi pajak SMT dan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dapat dikompensasikan sampai dengan tahun 2015 berdasarkan jadwal sebagai berikut:

Tahun Jatuh Tempo	Jumlah
2011	14.190
2012	30.205
2013	26.660
2014	31.901
2015	1.192.832
Jumlah	**1.295.788**

14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Bunga	339.957	228.743
Perbaikan dan perawatan jaringan telekomunikasi	265.428	301.857
Kenikmatan karyawan (Catatan 18 dan 25)	216.732	152.447
Biaya hak penggunaan frekuensi radio	195.686	240.718
Insentif agen penjual (*dealer*) (Catatan 2n)	125.836	80.778
Pemasaran	120.092	125.908
Listrik, gas dan air	85.650	94.359
Jasa konsultan	65.288	66.218
Kewajiban pelayanan universal ("USO") (Catatan 31)	59.899	62.378
Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (Catatan 31)	38.005	2.468
Jaringan	31.111	7.204
Sewa	28.090	18.225
Administrasi dan umum	27.706	25.546
Biaya layanan akses Blackberry	20.679	10.340
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp20.000)	90.726	108.372
Jumlah	**1.710.885**	**1.525.561**

15. HUTANG JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 26)		
Mandiri - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp2.955 pada tahun 2010 dan Rp7.511 pada tahun 2009	1.297.045	2.592.489
Pihak ketiga - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp189.979 pada tahun 2010 dan Rp250.888 pada tahun 2009; diskon pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp19.267 pada tahun 2010 dan Rp25.892 pada tahun 2009	9.553.906	11.569.078
Jumlah hutang jangka panjang	10.850.951	14.161.567
Dikurangi bagian jangka pendek (setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp373 pada tahun 2010)		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	300.000	400.000
Pihak ketiga	2.884.147	1.040.259
Jumlah bagian jangka pendek	3.184.147	1.440.259
Bagian jangka panjang		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	997.045	2.192.489
Pihak ketiga	6.669.759	10.528.819
Jumlah bagian jangka panjang	**7.666.804**	**12.721.308**

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Rincian hutang jangka panjang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit 1

  Pada tanggal 18 September 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit tanpa jaminan selama lima tahun dari Mandiri untuk pembelian peralatan telekomunikasi sebesar Rp2.000.000. Pinjaman ini dikenakan (i) suku bunga tetap untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun berikutnya berdasarkan tingkat bunga tahunan yang berlaku dari rata-rata *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") berjangka 3 bulanan ditambah 1,5% per tahun. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 8,96% per tahun. Bunga terhutang setiap triwulanan. Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama dan (c) 50% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian.

  Pada tanggal 27 September dan 27 Desember 2007, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman pertama dan kedua yang mewakili jumlah penuh dari fasilitas.

  Pembayaran lebih awal secara sukarela (seluruh atau sebagian dari pinjaman) diperbolehkan tanpa dikenakan denda jika pembayaran tersebut dilakukan setelah bulan ke-24 dari tanggal perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 7 hari sebelumnya. Pembayaran sebelum bulan ke-24 setelah tanggal perjanjian diperbolehkan dengan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah yang dibayarkan.

  Pada tanggal 27 September 2008 dan 25 September 2009, Perusahaan membayar cicilan tahunan pertama dan keduanya masing-masing sebesar Rp200.000.

  Pada tanggal 23 Maret 2009, perjanjian fasilitas kredit tanpa jaminan selama lima tahun dengan Mandiri diamandemen berdasarkan surat persetujuan yang diterima pada tanggal yang sama, yang mewakili jumlah pokok pinjaman sebesar Rp1.800.000. Amandemen tersebut mencakup perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

  Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan membayar cicilan tahunan ketiganya sebesar Rp300.000.

- Fasilitas Kredit 2

  Pada tanggal 28 Juli 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit tanpa jaminan selama lima tahun dengan Mandiri sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan umum Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berdasarkan tingkat bunga rata-rata JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 4,00% per tahun. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 11,31% per tahun. Bunga terhutang setiap triwulanan. Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari jumlah pokok pinjaman pada tahun pertama dan kedua setelah penarikan pinjaman, (b) 15% dari jumlah pokok pinjaman pada tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pinjaman dan (c) 50% dari jumlah pokok pinjaman pada tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian.

  Pada tanggal 31 Juli 2009, Perusahaan melakukan penarikan fasilitas pinjaman ini secara penuh.

  Pembayaran lebih awal secara sukarela (seluruhnya atau sebagian dari pinjaman) diperbolehkan dengan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah yang dibayarkan.

  Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

- Fasilitas Kredit 2 (lanjutan)

  Pada tanggal 20 Mei 2010, Perusahaan menerima surat dari Mandiri mengenai perubahan suku bunga rata-rata JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 4,00% per tahun menjadi rata-rata JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 2,25% per tahun, efektif pada tanggal 31 Mei 2010.

  Pada tanggal 30 Juli 2010, Perusahaan membayar cicilan tahunan pertamanya sebesar Rp100.000.

  Pada tanggal 15 November 2010, Perusahaan melakukan pelunasan lebih awal fasilitas kredit ini sebesar Rp900.000.

Pinjaman dari pihak ketiga terdiri dari:

	2010	2009
Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S. - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp27.122 pada tahun 2010 dan Rp44.563 pada tahun 2009	4.018.828	4.185.437
AB Svensk Export Kredit, Swedia dengan Jaminan dari Export Kredit Namnden - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp27.593 pada tahun 2010 dan Rp36.909 pada tahun 2009	1.972.905	1.200.551
HSBC Perancis - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp129.167 pada tahun 2010 dan Rp156.357 pada tahun 2009	1.500.434	1.736.678
BCA - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp2.903 pada tahun 2010 dan Rp7.055 pada tahun 2009	1.297.097	3.092.945
Goldman Sachs International		
Pokok Pinjaman, setelah dikurangi diskon yang belum diamortisasi sebesar Rp19.267 pada tahun 2010 dan Rp25.892 pada tahun 2009	415.033	408.408
Opsi Konversi Nilai Tukar Mata Uang Asing [*Foreign Exchange* (FX)]	54.595	103.758
Pinjaman Komersial 9 Tahun - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp2.821 pada tahun 2010 dan Rp3.707 pada tahun 2009	203.805	237.733
Fasilitas Kredit Investasi 6 dari CIMB Niaga	52.483	23.772
Finnish Export Credit Ltd. - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp373 pada tahun 2010 dan Rp1.113 pada tahun 2009	33.793	106.047
Fasilitas Kredit Investasi 5 dari CIMB Niaga	4.933	24.933
DBS - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp1.184	-	448.816
Jumlah	9.553.906	11.569.078
Dikurangi bagian jangka pendek (setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp373 pada tahun 2010)	2.884.147	1.040.259
Bagian jangka panjang	**6.669.759**	**10.528.819**

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S. - 13 Lembaga Keuangan

Pada tanggal 12 Juni 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit selama lima tahun tanpa jaminan dengan 13 lembaga keuangan dengan ING Bank N.V. dan DBS Bank Ltd. sebagai pengatur pinjaman (*arranger*) dan DBS sebagai fasilitator pinjaman (*facility agent*), dengan jumlah keseluruhan AS$450.000. Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan Perusahaan berupa (i) pengeluaran barang modal, (ii) pembelian kembali sebagian dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dan/atau *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012, dan/atau (iii) kebutuhan modal kerja. Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang berdasarkan *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") dolar A.S. ditambah marjin (1,9% per tahun untuk *onshore lenders* dan 1,85% per tahun untuk *offshore lenders*), yang terhutang setiap 6 bulanan. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 5,78% per tahun.

Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap 6 bulanan, sebagai berikut: (a) 25% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga setelah tanggal penandatanganan perjanjian (tanggal pembayaran pertama), (b) 24% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada bulan ke-6 setelah tanggal pembayaran pertama, (c) 8% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada bulan ke-12 dan ke-18 setelah tanggal pembayaran pertama, dan (d) 35% dari total pinjaman yang ditarik pada bulan ke-24 setelah tanggal pembayaran pertama.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Pembayaran lebih awal secara sukarela hanya diperbolehkan jika pembayaran dilakukan setelah bulan ke-6 dari tanggal perjanjian pinjaman dengan pemberitahuan tertulis 15 hari sebelumnya. Perusahaan boleh membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo (dengan jumlah minimum sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000).

Pada tanggal 26 September dan 30 Oktober 2008, Perusahaan menerima penarikan pertama dan kedua yang mewakili jumlah penuh dari fasilitas kredit ini sejumlah AS$450.000 (setara dengan Rp4.704.650).

Pada tanggal 24 Februari 2009, Perusahaan melakukan amandemen terhadap Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S. berdasarkan surat persetujuan yang diterima pada tanggal 19 Februari 2009 dari DBS Bank Ltd., yang mencakup persetujuan yang diberikan oleh sebagian besar dari 13 lembaga keuangan yang mana memiliki jumlah pokok pinjaman sebesar AS$405.000 atau 90% dari saldo pinjaman tersebut. Amandemen tersebut mencakup perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

b. AB Svensk Exportkredit ("SEK"), Swedia dengan Jaminan dari Export Kredit Namnden ("EKN")

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit yang dijamin oleh EKN, Swedia dengan jumlah maksimum berjumlah AS$315.000 untuk pembelian peralatan telekomunikasi Ericsson, dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC"), Hong Kong dan The Royal Bank of Scotland N.V. (sebelumnya ABN-AMRO N.V.), Cabang Hong Kong sebagai *original lenders* dan pengatur pinjaman ("*arranger*"), sementara HSBC Bank PLC, London, Inggris bertindak sebagai fasilitator pinjaman ("*facility agent*") dan agen EKN.

Perjanjian ini juga mengatur bahwa *original lenders* dapat mengalihkan sebagian dari haknya atau melakukan transfer atas sebagian hak dan kewajibannya, seperti tertera dalam perjanjian kepada bank atau lembaga keuangan lainnya atau SEK atau EKN. Pada tanggal 2 September 2009, *original lenders* mengalihkan hak dan kewajibannya kepada SEK.

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. AB Svensk Exportkredit ("SEK"), Swedia dengan Jaminan dari Export Kredit Namnden ("EKN") (lanjutan)

Fasilitas kredit ini terdiri dari fasilitas A, B dan C dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar AS$100.000, AS$155.000 dan AS$60.000. Pinjaman dari fasilitas tersebut dikenakan suku bunga pada tingkat tertentu per tahun sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dan bunga terkait terhutang setiap tengah tahunan sampai tanggal jatuh tempo masing-masing fasilitas. Fasilitas A dan B memiliki suku bunga efektif masing-masing sebesar 3,23% dan 4,21% per tahun. Pembayaran untuk setiap fasilitas A, B dan C akan dilakukan dalam 14 kali cicilan yang masing-masing dimulai enam bulan setelah tanggal 31 Mei 2009, 28 Februari 2010 dan 30 November 2010.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Pembayaran lebih awal secara sukarela untuk setiap fasilitas hanya diperbolehkan jika fasilitas A, B dan C dibayarkan pada saat bersamaan dan dalam jumlah yang proporsional untuk fasilitas A, B dan C setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 20 hari sebelumnya. Perusahaan boleh membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo (dengan jumlah minimum sebesar AS$5.000 dan kelipatan AS$500). Setiap pembayaran lebih awal tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu (*inverse chronological order*) untuk fasilitas yang terkait.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan telah melakukan penarikan pinjaman masing-masing sebesar AS$100.000 dan AS$155.000 dari fasilitas A dan B.

Pada tanggal 30 November 2009, 27 Mei 2010 dan 30 November 2010, Perusahaan membayar cicilan tengah tahunan pertama, kedua dan ketiganya untuk fasilitas A masing-masing sebesar AS$7.142,86.

Pada tanggal 28 Agustus 2010, Perusahaan membayar cicilan tengah tahunan pertamanya untuk fasilitas B sebesar AS$11.071,43.

c. HSBC Perancis

Pada tanggal 27 November 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan HSBC Perancis terkait dengan:

- Perjanjian Fasilitas Berjangka COFACE 12 Tahun ("Fasilitas COFACE")

  Fasilitas ini berjumlah AS$157.243 untuk membiayai pembayaran 85% atas komponen yang dibuat di Perancis sesuai dengan Kontrak Satelit Palapa D ditambah 100% premi COFACE. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tetap tahunan sebesar 5,69% yang terhutang setiap 6 bulanan. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 7,86% per tahun. Jumlah pinjaman setelah periode ketersediaan akan dibayar kembali dalam 20 kali cicilan tengah tahunan. Pembayaran pokok pinjaman dalam cicilan tengah tahunan akan dimulai 6 bulan setelah mana yang lebih dulu dari (a) tanggal penyelesaian dari "*Satellite In-Orbit Acceptance Review*" sesuai dengan Kontrak Satelit Palapa D dan (b) tanggal 29 September 2009.

  Perusahaan telah melakukan penarikan dari fasilitas kredit ini sejumlah AS$157.186,69.

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. HSBC Perancis (lanjutan)

- Perjanjian Fasilitas Berjangka COFACE 12 Tahun ("Fasilitas COFACE") (lanjutan)

  Pembayaran lebih awal secara sukarela hanya diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas SINOSURE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Perusahaan boleh membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo (dengan jumlah minimum sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000). Setiap pembayaran lebih awal tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu (*inverse chronological order*).

  Pada tanggal 29 Maret dan 29 September 2010, Perusahaan membayar cicilan tengah-tahunan pertama dan keduanya masing-masing sebesar AS$7.859,34.

- Perjanjian Fasilitas Berjangka SINOSURE 12 Tahun ("Fasilitas SINOSURE")

  Fasilitas ini berjumlah AS$44.200 untuk membiayai pembayaran 85% atas Kontrak Layanan Peluncuran (*Launch Service Contract*). Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang berdasarkan LIBOR dolar A.S. ditambah 0,35% per tahun, yang terhutang setiap 6 bulanan. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 2,90% per tahun. Jumlah pinjaman setelah periode ketersediaan akan dibayar kembali dalam 20 kali cicilan tengah tahunan. Pembayaran pokok pinjaman dalam cicilan tengah tahunan akan dimulai 6 bulan setelah mana yang lebih dulu dari (a) tanggal penyelesaian dari "*Satellite In-Orbit Acceptance Review*" sesuai dengan Kontrak Satelit Palapa D dan (b) tanggal 29 September 2009.

  Perusahaan telah melakukan penarikan secara penuh sejumlah AS$44.200 dari fasilitas kredit ini.

  Pembayaran lebih awal secara sukarela hanya diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas COFACE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Perusahaan boleh membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo (dengan jumlah minimum sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000). Setiap pembayaran lebih awal tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu (*inverse chronological order*).

  Pada tanggal 29 Maret dan 29 September 2010, Perusahaan membayar cicilan tengah-tahunan pertama dan keduanya masing-masing sebesar AS$2.210.

  Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

  Pada tanggal 18 Maret 2009, Perusahaan melakukan amandemen atas Perjanjian Fasilitas COFACE dan SINOSURE dengan HSBC Perancis berdasarkan dua surat persetujuan yang diterima pada tanggal 11 Maret 2009 yang mewakili saldo pokok pinjaman masing-masing sebesar AS$157.243 dan AS$44.200. Amandemen ini mencakup perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. BCA

- Fasilitas Kredit 1

  Pada tanggal 28 Agustus 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit selama lima tahun tanpa jaminan dari BCA sebesar Rp1.600.000 untuk pembayaran Fasilitas Pinjaman Sindikasi 2 dan pembelian peralatan telekomunikasi. Pinjaman ini dikenakan (i) suku bunga tetap untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku dari JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 1,5% per tahun. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 9,03% per tahun. Pada tanggal 20 September 2007, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas kredit sebesar Rp400.000. Sebagai hasilnya, fasilitas kredit ini menjadi sebesar Rp2.000.000. Bunga terhutang setiap triwulanan. Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, dan (c) 50% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik, pada tahun kelima setelah penarikan pertama.

  Pada tanggal 27 September, 26 Oktober dan 27 Desember 2007, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman pertama, kedua dan ketiga yang mewakili jumlah penuh dari fasilitas.

  Pembayaran lebih awal secara sukarela (seluruhnya atau sebagian dari pinjaman) diperbolehkan tanpa dikenakan denda jika pembayaran tersebut dilakukan setelah bulan ke-24 dari tanggal perjanjian pinjaman dengan pemberitahuan tertulis 7 hari sebelumnya. Pembayaran sebelum bulan ke-24 dari tanggal perjanjian pinjaman diperbolehkan dengan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah yang dibayarkan.

  Pada tanggal 27 September 2008 dan 25 September 2009, Perusahaan membayar cicilan tahunan pertama dan keduanya masing-masing sebesar Rp200.000.

  Pada tanggal 27 September 2010, Perusahaan membayar cicilan tahunan ketiganya sebesar Rp300.000.

- Fasilitas Kredit 2

  Pada tanggal 17 September 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit selama tiga tahun tanpa jaminan dari BCA sebesar Rp500.000 untuk pendanaan ulang (*refinancing*) hutang dan/ atau pembelian peralatan telekomunikasi. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan suku bunga JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 2,25% per tahun. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 11,69% per tahun. Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 20% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun pertama, (b) 30% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun kedua, dan (c) 50% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga.

  Pada tanggal 16 Maret 2009, Perusahaan telah melakukan penarikan dalam jumlah penuh dari fasilitas kredit ini.

  Pada tanggal 16 Maret 2010, Perusahaan membayar cicilan tahunan pertamanya sebesar Rp100.000.

  Pembayaran lebih awal secara sukarela (seluruhnya atau sebagian dari pinjaman) diperbolehkan dengan denda sebesar 1% dari jumlah yang dibayarkan.

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. BCA (lanjutan)

- Fasilitas Kredit 2 (lanjutan)

  Pada tanggal 12 Februari 2009, Perusahaan melakukan amandemen terhadap perjanjian fasilitas kredit 5 tahun dan 3 tahun dengan BCA berdasarkan surat persetujuan yang diterima pada tanggal 6 Februari 2009, yang mewakili saldo pokok pinjaman masing-masing sebesar Rp1.800.000 dan Rp500.000. Amandemen tersebut mencakup perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

  Pada tanggal 19 Oktober 2010, Perusahaan melakukan pelunasan lebih awal fasilitas kredit ini sebesar Rp400.000.

- Fasilitas Kredit 3

  Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit selama lima tahun tanpa jaminan dari BCA sebesar Rp1.000.000 untuk pendanaan ulang (*refinancing*) hutang dan/atau pembelian peralatan telekomunikasi. Pinjaman ini dikenakan suku bunga berdasarkan tingkat bunga JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 4,00% per tahun yang dapat diubah oleh BCA tergantung pada kondisi pasar. Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun pertama dan kedua, (b) 15% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga dan keempat, dan (c) 50% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun kelima. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 11,65% per tahun.

  Pada tanggal 25 Juni 2009, Perusahaan telah melakukan penarikan dalam jumlah penuh dari fasilitas kredit ini.

  Pada tanggal 28 April 2010, Perusahaan menerima surat dari BCA mengenai perubahan suku bunga dari JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 4,00% per tahun menjadi JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 2,25% per tahun, efektif pada tanggal 25 Juni 2010.

  Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan membayar cicilan tahunan pertamanya sebesar Rp100.000.

  Pembayaran lebih awal secara sukarela (seluruhnya atau sebagian dari pinjaman) diperbolehkan dengan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah yang dibayarkan, kecuali untuk pembayaran pendanaan ulang fasilitas kredit ini.

  Pada tanggal 19 Oktober 2010, Perusahaan melakukan pelunasan lebih awal fasilitas kredit ini sebesar Rp900.000.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

e. Goldman Sachs International ("GSI")

Pada tanggal 30 Mei 2007, Perusahaan menerima pinjaman dari GSI sebesar Rp434.300 yang diterima dalam dolar A.S. sebesar AS$50.000 untuk membiayai pembelian peralatan telekomunikasi. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun atas Rp434.300 dan terhutang setiap triwulan pada tanggal 28 Februari, 30 Mei, 30 Agustus dan 30 November mulai tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 10,86% per tahun.

Perjanjian ini memberikan opsi kepada GSI untuk melakukan konversi pinjaman tersebut menjadi pinjaman dolar A.S. sebesar AS$50.000 pada tanggal 30 Mei 2012 ("Opsi Konversi FX"). Nilai wajar Opsi Konversi FX pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebesar AS$6.072,20 (setara dengan Rp54.595) dan AS$11.038,10 (setara dengan Rp103.758). Apabila GSI mengambil opsi tersebut, maka mulai tanggal 30 Mei 2012, pinjaman akan dikenakan bunga tetap sebesar 6,45% per tahun atas pokok pinjaman AS$50.000 dan baik pokok pinjaman maupun bunga dalam dolar A.S. akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memberitahukan GSI tentang beberapa kejadian yang dapat menyebabkan terminasi pinjaman, diantaranya (i) perubahan yang berhubungan dengan perpajakan di Inggris atau Indonesia, (ii) kegagalan pelunasan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2012 (Catatan 16), (iii) kegagalan pelunasan *Notes* dolar A.S. dan obligasi rupiah Perusahaan (Catatan 16), (iv) penarikan kembali, pembelian, atau pembatalan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2012 (Catatan 16) dan tidak terdapat saldo *Notes* dolar A.S. Indosat yang tehutang karena penarikan kembali, pembelian atau pembatalan tersebut, dan (v) perubahan kendali dalam Perusahaan.

Pada tanggal 24 Juni 2008, Perusahaan menerima surat pernyataan melepaskan tuntutan (*waiver letter*) dari GSI yang menegaskan bahwa GSI tidak akan melakukan terminasi atas pinjaman sehubungan dengan perubahan kendali dalam Perusahaan (Catatan 19).

f. Pinjaman Komersial 9 Tahun dengan HSBC Cabang Jakarta, CIMB Niaga (sebelumnya PT Bank Lippo Tbk) dan Bank of China Limited, Cabang Jakarta

Pada tanggal 27 November 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan HSBC Cabang Jakarta sebagai "pengatur pinjaman" ("*arranger*") dan HSBC Limited, Hongkong sebagai "fasilitator pinjaman" ("*facility agent*"), terkait dengan Perjanjian Pinjaman Komersial 9 Tahun sebesar AS$27.037 dari HSBC Cabang Jakarta untuk membiayai pembangunan dan peluncuran satelit serta pembayaran premi SINOSURE sehubungan dengan Fasilitas SINOSURE (Catatan 14d). Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang berdasarkan LIBOR dolar A.S. ditambah 1,45% per tahun, yang terhutang setiap 6 bulanan. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 2,36% per tahun.

Pembayaran pinjaman akan dilakukan dalam lima belas cicilan tengah tahunan setelah 24 bulan dari tanggal perjanjian pinjaman. Untuk 5 cicilan pertama, Perusahaan akan membayar masing-masing sebesar AS$1.351,85 dan sebesar AS$2.027,78 untuk cicilan berikutnya.

Perjanjian ini juga mengatur bahwa HSBC Cabang Jakarta dapat mengalihkan sebagian dari haknya atau melakukan transfer atas sebagian hak dan kewajibannya seperti tertera dalam perjanjian kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada tanggal 10 Maret 2008, HSBC Cabang Jakarta memindahkan hak dan kewajibannya kepada CIMB Niaga dan Bank of China Limited, Cabang Jakarta.

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

f. Pinjaman Komersial 9 Tahun dengan HSBC Cabang Jakarta, CIMB Niaga (sebelumnya PT Bank Lippo Tbk) dan Bank of China Limited, Cabang Jakarta (lanjutan)

Pada tanggal 1 April 2008, Perusahaan menerima penarikan secara penuh untuk Fasilitas Pinjaman Komersial 9 Tahun. Penarikan ini terdiri dari AS$13.537 (setara dengan Rp124.527) dari HSBC Cabang Jakarta, AS$10.000 (setara dengan Rp91.990) dari CIMB Niaga dan AS$3.500 (setara dengan Rp32.197) dari Bank of China Limited, Cabang Jakarta.

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Pembayaran lebih awal secara sukarela hanya diperbolehkan pada setiap tanggal pembayaran kembali setelah tanggal pembayaran pertama dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Perusahaan boleh membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman sebelum jatuh tempo (dengan jumlah minimum sebesar AS$5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000). Setiap pembayaran lebih awal tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman secara proporsional.

Pada tanggal 18 Maret 2009, Perusahaan melakukan amandemen fasilitas Pinjaman Komersial 9 Tahun berdasarkan surat persetujuan yang diterima pada tanggal 5 Maret 2009 dari HSBC Limited, Hongkong yang mewakili pokok pinjaman sejumlah AS$17.057 atau 63% dari saldo pinjaman. Amandemen tersebut mencakup perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

Pada tanggal 27 November 2009, 27 Mei 2010 dan 29 November 2010, Perusahaan membayar cicilan tengah-tahunan pertama, kedua dan ketiganya masing-masing sebesar AS$1.351,85.

g. Fasilitas Kredit Investasi 6 dari CIMB Niaga

Pada tanggal 24 Februari 2009, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga untuk pembelian peralatan telekomunikasi, komputer dan peralatan penunjang lainnya sebesar Rp75.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 14,5%, yang dapat dirubah oleh CIMB Niaga tergantung keadaan pasar. Pembayaran pokok pinjaman dalam cicilan 3 bulanan sebesar Rp7.500 akan dimulai pada tanggal 24 Mei 2010 dan akan berlanjut sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012. Lintasarta telah melakukan penarikan penuh dari fasilitas kredit ini.

Pembayaran lebih awal secara sukarela hanya diperbolehkan pada tanggal pembayaran bunga dengan pemberitahuan tertulis 15 hari sebelumnya. Lintasarta boleh membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo hanya dengan menggunakan dana dari kegiatan operasional Lintasarta. Pembayaran kembali dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pinjaman pihak lain diperkenankan dengan membayar denda yang ditentukan oleh CIMB Niaga.

Pinjaman ini dijamin dengan seluruh peralatan (Catatan 8) yang dibeli dari penerimaan fasilitas kredit ini. Pinjaman ini juga mempunyai pembatasan yang sama seperti Fasilitas Kredit Investasi 5.

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

h. Finnish Export Credit Ltd. ("FEC")

Pada tanggal 12 Mei 2006, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari FEC sebesar AS$38.000 dengan The Royal Bank of Scotland N.V. (sebelumnya Bank ABN-AMRO N.V.), Cabang Jakarta sebagai "pengatur pinjaman" ("*arranger*") dan The Royal Bank of Scotland N.V. (sebelumnya Bank ABN-AMRO N.V.), Cabang Stockholm sebagai "fasilitator pinjaman" ("*facility agent*") untuk pembelian peralatan telekomunikasi. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tetap sebesar 4,15% per tahun. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 3,56% per tahun. Pokok pinjaman, beserta dengan bunga, terhutang dalam cicilan tengah tahunan sampai dengan tanggal 12 Mei 2011.

Pembayaran lebih awal secara sukarela hanya diperbolehkan jika pembayaran dilakukan setelah 60 hari dari tanggal pinjaman dengan pemberitahuan tertulis 15 hari sebelumnya. Perusahaan boleh membayar seluruh atau sebagian pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo (dengan jumlah minimum sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000).

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 20 Maret 2009, Perusahaan melakukan amandemen perjanjian fasilitas kredit dengan FEC berdasarkan surat persetujuan yang diterima pada tanggal 27 Februari 2009 dari Bank ABN-AMRO N.V., Cabang Stockholm, yang mewakili saldo pokok pinjaman sebesar AS$19.000. Amandemen tersebut mencakup perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

i. Fasilitas Kredit Investasi 5 dari CIMB Niaga

Pada tanggal 10 Juli 2007, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga sebesar Rp50.000 untuk pembelian peralatan telekomunikasi, komputer dan peralatan penunjang lainnya. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka 1 bulanan yang berlaku ditambah 2,25% per tahun. Pembayaran pokok pinjaman dalam cicilan 3 bulanan sebesar Rp5.000 dimulai pada tanggal 10 Oktober 2008 dan akan berlanjut sampai dengan tanggal 10 Januari 2011. Lintasarta telah melakukan penarikan penuh dari fasilitas kredit ini.

Pembayaran lebih awal secara sukarela hanya diperbolehkan pada tanggal pembayaran bunga dengan pemberitahuan tertulis 3 hari sebelumnya. Lintasarta boleh membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo hanya dengan menggunakan dana dari kegiatan operasional Lintasarta. Pembayaran kembali dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pinjaman pihak lain diperkenankan dengan membayar denda 1% dari jumlah pembayaran lebih awal.

Pinjaman ini dijamin dengan seluruh peralatan (Catatan 8) yang dibeli dari penerimaan fasilitas kredit ini. Pinjaman ini juga mempunyai pembatasan yang sama seperti Fasilitas Kredit Investasi 6 dari CIMB Niaga.

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

j. DBS

Pada tanggal 1 November 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit selama lima tahun tanpa jaminan dari DBS untuk pengeluaran barang modal dan pengeluaran umum Perusahaan dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000. Pinjaman ini dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,7% untuk tahun pertama dan 10,4% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku dari Sertifikat Bank Indonesia berjangka 3 bulanan ditambah 1,5% per tahun. Pinjaman ini memiliki suku bunga efektif sebesar 10,54% per tahun. Bunga terhutang setiap triwulanan. Pembayaran pokok pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15% dari setiap jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama dan (c) 50% dari jumlah pokok pinjaman yang ditarik pada tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian.

Pada tanggal 31 Januari 2008, Perusahaan melakukan penarikan fasilitas pinjaman ini secara penuh.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Pembayaran lebih awal secara sukarela diperbolehkan pada setiap tanggal pembayaran bunga tanpa dikenakan denda jika pembayaran tersebut dilakukan setelah bulan ke-24 dari tanggal penarikan pertama dengan pemberitahuan tertulis 15 hari sebelumnya. Pembayaran lebih awal sebelum bulan ke-24 dari tanggal perjanjian diperbolehkan dengan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah yang dibayarkan.

Pada tanggal 30 Januari 2009 dan 1 Februari 2010, Perusahaan melakukan pembayaran cicilan tahunan pertama dan keduanya masing-masing sebesar Rp50.000.

Pada tanggal 25 Maret 2009, Perusahaan melakukan amandemen perjanjian fasilitas kredit berdasarkan surat persetujuan yang diterima pada tanggal 27 Februari 2009, yang mewakili saldo pokok pinjaman sebesar Rp450.000. Amandemen tersebut mencakup perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

Pada tanggal 30 Oktober 2010, Perusahaan melakukan pelunasan lebih awal fasilitas kredit ini sebesar Rp400.000.

15. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Jadwal pembayaran pokok semua pinjaman hutang jangka panjang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan sesudahnya pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	Dua belas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015 dan sesudahnya**	**Jumlah**
Dalam rupiah						
Mandiri	300.000	1.000.000	-	-	-	1.300.000
BCA	300.000	1.000.000	-	-	-	1.300.000
GSI	-	-	434.300	-	-	434.300
CIMB Niaga	34.933	22.483	-	-	-	57.416
Sub-jumlah	**634.933**	**2.022.483**	**434.300**	**-**	**-**	**3.091.716**
Dalam dolar A.S.						
Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S. (AS$450.000)	1.982.516	647.352	1.416.082	-	-	4.045.950
SEK, Swedia (AS$222.500)	327.529	327.529	327.529	327.529	690.382	2.000.498
HSBC Perancis (AS$181.248,02)	181.067	181.067	181.067	181.067	905.333	1.629.601
Fasilitas Pinjaman Komersial 9 Tahun (AS$22.981,45)	24.309	36.463	36.463	36.463	72.928	206.626
GSI (AS$6.072,20)	-	-	54.595	-	-	54.595
FEC (AS$3.800)	34.166	-	-	-	-	34.166
Sub-jumlah	**2.549.587**	**1.192.411**	**2.015.736**	**545.059**	**1.668.643**	**7.971.436**
Jumlah	**3.184.520**	**3.214.894**	**2.450.036**	**545.059**	**1.668.643**	**11.063.152**
Dikurangi:						
- beban emisi pinjaman dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi						(192.934)
- diskon pinjaman yang belum diamortisasi						(19.267)
Bersih						**10.850.951**

Amortisasi beban emisi pinjaman, diskon dan biaya *solicitation* masing-masing adalah sebesar Rp72.091 dan Rp35.838 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Catatan 24).

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

16. HUTANG OBLIGASI

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020 - setelah dikurangi beban emisi hutang yang belum diamortisasi sebesar Rp64.885 dan diskon hutang yang belum diamortisasi sebesar Rp29.666	5.749.599	-
Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp11.041 pada tahun 2010 dan Rp12.793 pada tahun 2009	2.588.959	2.587.207
Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp5.362 pada tahun 2010 dan Rp6.198 pada tahun 2009	1.294.638	1.293.802
Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp5.414 pada tahun 2010 dan Rp7.050 pada tahun 2009	1.074.586	1.072.950
Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp1.382 pada tahun 2010 dan Rp4.050 pada tahun 2009	813.618	810.950
Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp2.625 pada tahun 2010 dan Rp3.601 pada tahun 2009	567.375	566.399
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp1.517 pada tahun 2010 dan Rp1.872 pada tahun 2009	398.483	398.128
Obligasi Syari'ah Ijarah Indosat Tahun 2005 - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp487 pada tahun 2010 dan Rp1.429 pada tahun 2009	284.513	283.571
Obligasi Indosat Kedua Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang - setelah dikurangi biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp652 pada tahun 2010 dan Rp656 pada tahun 2009	199.348	199.344
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp873 pada tahun 2010 dan Rp982 pada tahun 2009	199.127	199.018
Obligasi Terbatas II yang diterbitkan oleh Lintasarta*	25.000	25.000
Obligasi Terbatas I yang diterbitkan oleh Lintasarta**	16.989	16.989
Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 - setelah dikurangi beban emisi hutang yang belum diamortisasi sebesar Rp3.879	-	2.202.743

* setelah dieliminasi dengan Obligasi Terbatas II yang diterbitkan kepada Perusahaan sejumlah Rp35.000.
** setelah dieliminasi dengan Obligasi Terbatas I yang diterbitkan kepada Perusahaan sejumlah Rp9.564.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

	2010	2009
Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 - setelah dikurangi diskon hutang yang belum diamortisasi sebesar Rp3.116 dan beban emisi hutang yang belum diamortisasi sebesar Rp6.521	-	1.018.817
Obligasi Indosat Ketiga Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp2.081	-	637.919
Jumlah hutang obligasi	13.212.235	11.312.837
Dikurangi bagian jangka pendek (setelah dikurangi beban emisi hutang dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi sebesar Rp1.869 pada tahun 2010 dan Rp5.960 pada tahun 2009)	1.098.131	2.840.662
Bagian jangka panjang	**12.114.104**	**8.472.175**

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020

Pada tanggal 29 Juli 2010, IPBV menerbitkan *Guaranteed Notes* ("GN") Jatuh Tempo Tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap dan dengan nilai nominal keseluruhan sebesar AS$650.000. GN ini diterbitkan dengan nilai 99,478% dari nilai nominal. GN ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,375% per tahun terhutang dalam cicilan tengah-tahunan pada tanggal 29 Januari dan 29 Juli setiap tahun, mulai tanggal 29 Januari 2011. GN ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 7,62% per tahun. GN ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2020.

GN dapat ditarik kembali atas opsi IPBV, seluruh atau sebagian, setiap saat pada atau setelah tanggal 29 Juli 2015 dengan harga 103,6875%, 102,4583%, 101,2292% dan 100% dari nilai pokok GN selama periode 12 bulan masing-masing mulai dari tanggal 29 Juli 2015, 2016, 2017 dan 2018, dan selanjutnya, ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada. Lebih lanjut, sebelum tanggal 29 Juli 2013, IPBV dapat menarik kembali sampai dengan 35% dari seluruh nilai pokok GN, dengan dana dari satu atau lebih penawaran saham umum (*Public Equity Offerings*) Perusahaan dengan harga 107,375% dari nilai pokok, ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada. GN juga dapat ditarik kembali atas opsi IPBV atau Perusahaan, seluruh tetapi tidak sebagian, setiap saat, dengan pemberitahuan tidak kurang dari 30 hari atau lebih dari 60 hari, dengan harga 100% dari nilai pokok ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal penarikan kembali, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi potongan pajak di Indonesia dan Belanda. Atas perubahan kendali dari Perusahaan (termasuk penjualan, pengalihan, penunjukan, penyewaan, pemindahan atau penghapusan seluruh atau sebagian besar aset Perusahaan), pemegang GN memiliki hak untuk meminta IPBV untuk membeli kembali seluruh atau sebagian GN miliknya dengan harga 101% dari nilai pokok GN ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada, pada tanggal pembelian.

Hasil bersih GN ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, diterima pada tanggal 29 Juli 2010 dan digunakan untuk (i) mendanai penawaran untuk membeli GN Jatuh Tempo Tahun 2010 dan GN Jatuh Tempo Tahun 2012 dan *consent solicitation* sehubungan dengan, atau penarikan kembali, atas GN tersebut dan (ii) membayar kembali sebagian hutang Perusahaan lainnya.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020 (lanjutan)

GN ini dijamin penuh oleh Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan GN, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Agustus dan Desember 2010), GN tersebut memiliki peringkat BB (*stable outlook*), Ba1 (*negative outlook*) dan BBB- (*stable outlook*), masing-masing dari Standard & Poor's ("S&P"), Moody's Investors Service ("Moody's") dan Fitch Ratings ("Fitch").

Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 29 Mei 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Indosat Kelima"), dengan BRI sebagai wali amanat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp2.600.000. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri:

- Obligasi Seri A sebesar Rp1.230.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,20% per tahun mulai tanggal 29 Mei 2007. Obligasi ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 10,33% per tahun. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2014.

- Obligasi Seri B sebesar Rp1.370.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,65% per tahun mulai tanggal 29 Mei 2007. Obligasi ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 10,75% per tahun. Obligasi Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2017.

Obligasi tersebut juga akan jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), selaku agen pembayaran, berkewajiban membayar bunga obligasi, sebagai berikut:

Seri A : pada tanggal 29 Agustus 2007 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 29 Mei 2014.
Seri B : pada tanggal 29 Agustus 2007 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 29 Mei 2017.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi pada tanggal 31 Mei 2007. Hasil bersih obligasi ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset Perusahaan, kecuali aset yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") tanggal 24 Maret 2009, para pemegang Obligasi Indosat Kelima setuju untuk merubah Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2010), obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA+ (*stable outlook*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 8 Desember 2009, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Indosat Ketujuh"), dengan BRI sebagai wali amanat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp1.300.000. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri:

- Obligasi Seri A sebesar Rp700.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun mulai tanggal 8 Desember 2009. Obligasi ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 11,38% per tahun. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2014.
- Obligasi Seri B sebesar Rp600.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 11,75% per tahun mulai tanggal 8 Desember 2009. Obligasi ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 11,85% per tahun. Obligasi Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 8 Desember 2016.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal.

KSEI sebagai agen pembayaran, berkewajiban membayar bunga obligasi, sebagai berikut:

Seri A : pada tanggal 8 Maret 2010 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 8 Desember 2014.
Seri B : pada tanggal 8 Maret 2010 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 8 Desember 2016.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi pada tanggal 8 Desember 2009. Hasil bersih obligasi ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, digunakan untuk pembelian *Base Station Subsystem* dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2010), obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 9 April 2008, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Indosat Keenam"), dengan BRI sebagai wali amanat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp1.080.000. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri:

- Obligasi Seri A sebesar Rp760.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun mulai tanggal 9 April 2008. Obligasi ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 10,5% per tahun. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2013.
- Obligasi Seri B sebesar Rp320.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,80% per tahun mulai tanggal 9 April 2008. Obligasi ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 11,0% per tahun. Obligasi Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2015.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap (lanjutan)

Obligasi tersebut akan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal.

KSEI sebagai agen pembayaran, berkewajiban membayar bunga obligasi, sebagai berikut:

Seri A : pada tanggal 9 Juli 2008 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 9 April 2013.
Seri B : pada tanggal 9 Juli 2008 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 9 April 2015.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi pada tanggal 9 April 2008. Hasil bersih obligasi ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan Risalah RUPO tanggal 24 Maret 2009, para pemegang Obligasi Indosat Keenam setuju untuk merubah Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2010), obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 21 Juni 2005, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Indosat Keempat”), dengan BRI sebagai wali amanat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp815.000 dengan nilai nominal Rp50 per lembar obligasi. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12% per tahun, terhutang dalam cicilan tiga-bulanan. Obligasi ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 12,38% per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2011.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi pertama, Perusahaan menggunakan opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk sementara atau sebagai pelunasan awal. Perusahaan tidak menggunakan opsi pelunasan awal untuk melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh obligasi pada ulang tahun emisi keempat pada tingkat harga 100% dari nilai pokok obligasi.

Hasil obligasi ini digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Indosat Keempat Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap (lanjutan)

Berdasarkan Risalah RUPO tanggal 24 Maret 2009, para pemegang Obligasi Indosat Keempat setuju untuk merubah Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2010), obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 ("Sukuk Ijarah III")

Pada tanggal 9 April 2008, Perusahaan menerbitkan Sukuk Ijarah III, dengan BRI sebagai wali amanat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp570.000. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2013.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo jika, setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar.

Pemegang obligasi berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp58.425, terhutang setelahnya pada tanggal 9 Juli 2008 dan setiap tiga bulanan setelahnya sampai dengan tanggal 9 April 2013. Obligasi ini memiliki tingkat Cicilan Imbalan Ijarah efektif sebesar 10,49% per tahun.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi pada tanggal 9 April 2008. Hasil obligasi ini digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan Risalah RUPO tanggal 24 Maret 2009, para pemegang Sukuk Ijarah Indosat III setuju untuk merubah Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2010), obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA$_{(sy)}$+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 ("Sukuk Ijarah II")

Pada tanggal 29 Mei 2007, Perusahaan menerbitkan Sukuk Ijarah II, dengan BRI sebagai wali amanat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp400.000. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2014.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar.

Pemegang obligasi berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp40.800, terhutang setelahnya pada tanggal 29 Agustus 2007 dan setiap tiga bulanan setelahnya sampai dengan tanggal 29 Mei 2014. Obligasi ini memiliki tingkat Cicilan Imbalan Ijarah efektif sebesar 10,34% per tahun.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 ("Sukuk Ijarah II") (lanjutan)

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi pada tanggal 31 Mei 2007. Hasil obligasi ini digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan Risalah RUPO tanggal 24 Maret 2009, para pemegang Sukuk Ijarah Indosat II setuju untuk merubah Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2010), obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}AA_{(sy)}$+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Obligasi Syari'ah Ijarah Indosat Tahun 2005 ("Obligasi Syari'ah Ijarah")

Pada tanggal 21 Juni 2005, Perusahaan menerbitkan Obligasi Syari'ah Ijarah, dengan BRI sebagai wali amanat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp285.000 dengan nilai nominal Rp50 per lembar obligasi. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2011.

Pemegang obligasi berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp34.200, terhutang setelahnya pada tanggal 21 September 2005 dan setiap tiga bulanan setelahnya sampai dengan tanggal 21 Juni 2011. Obligasi ini memiliki tingkat Cicilan Imbalan Ijarah efektif sebesar 12,39% per tahun.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo jika pada ulang tahun emisi pertama, Perusahaan menggunakan opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk sementara atau sebagai pelunasan awal. Perusahaan tidak menggunakan opsi pelunasan awal untuk melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh obligasi pada ulang tahun emisi keempat pada tingkat harga 100% dari nilai pokok obligasi.

Hasil obligasi ini digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan Risalah RUPO tanggal 24 Maret 2009, para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Indosat setuju untuk merubah Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2010), obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}AA_{(sy)}$+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Indosat Kedua Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang

Pada tanggal 6 November 2002, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Kedua Tahun 2002 dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang ("Obligasi Indosat Kedua"), dengan BRI sebagai wali amanat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi ini diterbitkan dalam tiga seri. Obligasi Seri A dan Seri C telah jatuh tempo pada tanggal 6 November 2007.

Obligasi Seri B berjumlah Rp200.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 16% per tahun selama 30 tahun dimulai pada tanggal 6 Februari 2003. Obligasi ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 16,05% per tahun. Obligasi tersebut akan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo jika Perusahaan atau pemegang obligasi melaksanakan opsi-opsi sebagai berikut:

- *Opsi Beli* : Perusahaan mempunyai hak untuk membayar lebih awal seluruh Obligasi Seri B pada ulang tahun emisi ke-5, ke-10, ke-15, ke-20 dan ke-25 pada tingkat harga 101% dari nominal obligasi.

- *Opsi Jual* : pemegang obligasi mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan awal dari Perusahaan seharga 100% dari nominal obligasi pada: 1) setiap saat, apabila peringkat obligasi turun menjadi $_{id}$AA- atau lebih rendah (Opsi Jual Khusus) atau 2) ulang tahun emisi ke-15, ke-20 dan ke-25 (Opsi Jual Reguler).

KSEI, sebagai agen pembayaran, berkewajiban membayar bunga obligasi Seri B pada tanggal 6 Februari 2003 dan setiap tiga bulanan setelahnya sampai dengan tanggal 6 November 2032.

Hasil obligasi ini digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman modal kerja dari Mandiri dan fasilitas pinjaman berjangka dari BCA.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan Risalah RUPO tanggal 24 Maret 2009, para pemegang Obligasi Indosat Kedua setuju untuk merubah Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2010), obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}$AA+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 ("Sukuk Ijarah IV")

Pada tanggal 8 Desember 2009, Perusahaan menerbitkan Sukuk Ijarah IV, dengan BRI sebagai wali amanat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai nominal obligasi keseluruhan adalah Rp200.000. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri:

- Sukuk Seri A sebesar Rp28.000 memiliki Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp3.150, terhutang setelahnya pada tanggal 8 Maret 2010 dan setiap tiga bulanan setelahnya sampai dengan tanggal 8 Desember 2014. Obligasi ini memiliki tingkat Cicilan Imbalan Ijarah efektif sebesar 11,38% per tahun.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 ("Sukuk Ijarah IV") (lanjutan)

- Sukuk Seri B sebesar Rp172.000 memiliki Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp20.210, terhutang setelahnya pada tanggal 8 Maret 2010 dan setiap tiga bulanan setelahnya sampai dengan tanggal 8 Desember 2016. Obligasi ini memiliki tingkat Cicilan Imbalan Ijarah efektif sebesar 11,86% per tahun.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi ke-1, Perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi pada tanggal 8 Desember 2009. Hasil bersih obligasi ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, digunakan untuk pembelian *Base Station Subsystem* dalam rangka pengembangan jaringan selular Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Oktober 2010), obligasi tersebut memiliki peringkat $_{id}AA_{(sy)}$+ (*stable outlook*) dari Pefindo.

Obligasi Terbatas II yang diterbitkan oleh Lintasarta

Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta mengadakan perjanjian dengan para pemegang sahamnya untuk menerbitkan Obligasi Terbatas II sebesar Rp66.150. Obligasi terbatas ini merupakan obligasi tanpa jaminan yang semula jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2009 dan memiliki tingkat bunga mengambang yang dihitung berdasarkan rata-rata deposito berjangka rupiah 3 bulanan Mandiri, BNI, BRI dan BTN ditambah premi tetap sebesar 3%. Batas maksimum tingkat bunga mengambang sebesar 19% dan batas minimum sebesar 11% per tahun. Bunga obligasi terhutang setiap tiga-bulanan mulai tanggal 14 September 2006. Hasil obligasi terbatas ini digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka pengembangan peralatan telekomunikasi Lintasarta.

Pada tanggal 17 Juli 2006, Lintasarta memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga atas penerbitan obligasi terbatas ini (Catatan 15).

Pada tanggal 14 Juni 2009, Lintasarta melunasi sebagian dari Obligasi Terbatas II sejumlah Rp6.150. Berdasarkan Risalah Rapat Bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Mei 2009, perwakilan dari pemegang saham Lintasarta setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo dari Obligasi Terbatas II yang tersisa sebesar Rp60.000 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 dan meningkatkan batas minimum dari tingkat bunga mengambang menjadi 12,75%. Pada tanggal 25 Agustus 2009, perjanjian Obligasi Terbatas II, setelah diamandemen untuk mengakomodasi perubahan tanggal jatuh tempo dan batas minimum dari tingkat bunga mengambang, telah difinalisasi.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Terbatas I yang diterbitkan oleh Lintasarta

Pada bulan Juni 2003, Lintasarta mengadakan perjanjian dengan para pemegang sahamnya untuk menerbitkan Obligasi Terbatas I sejumlah Rp40.000. Obligasi terbatas ini merupakan obligasi tanpa jaminan yang semula jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2006 dan memiliki tingkat bunga tetap sebesar 16% per tahun untuk tahun pertama dan tingkat bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya.

Pada tanggal 2 Juni 2006, Lintasarta melunasi sebagian dari Obligasi Terbatas I sejumlah Rp5.144 dan sisanya sebesar Rp34.856 diperpanjang jatuh temponya sampai dengan tanggal 2 Juni 2009. Perpanjangan tanggal jatuh tempo ini dibuat berdasarkan amandemen pertama Perjanjian Obligasi Terbatas I pada tanggal 14 Juni 2006. Tingkat bunga mengambang dari obligasi ini dihitung berdasarkan rata-rata deposito berjangka rupiah 3 bulanan Mandiri, BNI, BRI dan BTN ditambah premi tetap sebesar 3%. Batas maksimum tingkat bunga mengambang sebesar 19% dan batas minimum sebesar 11% per tahun.

Pada tanggal 17 Juli 2006, Lintasarta memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga atas perubahan tanggal jatuh tempo dan nilai nominal dari Obligasi Terbatas I.

Pada tanggal 2 Juni 2009, Lintasarta melunasi sebagian dari Obligasi Terbatas I sejumlah Rp8.303. Berdasarkan Risalah Rapat Bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Mei 2009, perwakilan dari pemegang saham Lintasarta setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo dari Obligasi Terbatas I yang tersisa sebesar Rp26.553 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012 dan meningkatkan batas minimum dari tingkat bunga mengambang menjadi 12,75%. Pada tanggal 25 Agustus 2009, perjanjian Obligasi Terbatas I, setelah diamandemen untuk mengakomodasi perubahan tanggal jatuh tempo dan batas minimum dari tingkat bunga mengambang, telah difinalisasi.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010

Pada bulan Oktober 2003, Perusahaan, melalui IFB, menerbitkan GN Jatuh Tempo Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap dan dengan nilai nominal keseluruhan sebesar AS$300.000. GN ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun terhutang dalam cicilan tengah-tahunan pada tanggal 5 Mei dan 5 November setiap tahun, mulai tanggal 5 Mei 2004. GN ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 7,93% per tahun. GN ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2010.

GN dapat ditarik kembali atas opsi IFB, seluruh atau sebagian, setiap saat pada atau setelah tanggal 5 November 2008. GN dapat ditarik kembali dengan harga 103,8750%, 101,9375% dan 100,0000% dari nilai pokok GN selama periode 12 bulan masing-masing mulai dari tanggal 5 November pada tahun 2008, 2009 dan 2010. GN juga dapat ditarik kembali atas opsi IFB, seluruh tetapi tidak sebagian, setiap saat, dengan harga 103,5625% dari nilai pokok GN ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penarikan kembali, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi potongan pajak di Indonesia dan Belanda yang mensyaratkan IFB atau Perusahaan untuk membayar jumlah tambahan sehubungan dengan jumlah GN di atas jumlah tertentu. Atas perubahan kendali dari Perusahaan (termasuk penjualan, pengalihan, penunjukan, penyewaan, pemindahan atau penghapusan seluruh atau sebagian besar aset Perusahaan), pemegang GN berhak meminta IFB untuk membeli kembali seluruh atau sebagian GN miliknya dengan harga 101% dari nilai pokok GN ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada, pada tanggal pembelian.

Hasil bersih GN ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, diterima pada tanggal 5 November 2003 dan terutama digunakan untuk membayar sebagian hutang Indosat (termasuk Satelindo dan IM3) sebesar Rp1.500.000 dan AS$447.500.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 (lanjutan)

Berdasarkan ketentuan GN, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

GN ini dijamin penuh oleh Perusahaan dan IIFB.

Pada tanggal 11 Januari 2006, IFB mengeluarkan *consent solicitation statement* ("*solicitation*") sehubungan dengan GN Jatuh Tempo Tahun 2010. Tujuan utama *solicitation* ini adalah untuk mengubah pembatasan tertentu dalam ketentuan GN untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam persyaratan GN Jatuh Tempo Tahun 2012. Usulan amandemen terhadap ketentuan tersebut mencakup, antara lain, perubahan batas pinjaman yang diperkenankan untuk diperoleh IFB dan Lintasarta, dan kemampuan IFB untuk memperoleh pinjaman baru.

Pada tanggal 24 Januari 2006, IFB menerima persetujuan dari para pemegang GN yang mewakili jumlah pokok pinjaman sebesar AS$239.526 atau 79,842% dari saldo GN tersebut.

Pada tanggal 22 Juli 2008, IFB mengumumkan Penawaran atas Perubahan Kendali kepada semua pemegang GN. Penawaran tersebut adalah untuk membeli GN dengan harga 101% dari nilai pokok ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pembayaran dan jumlah tambahan lainnya. Penawaran tersebut berakhir pada tanggal 17 September 2008. Pemegang GN melaksanakan haknya untuk meminta IFB untuk membeli kembali seluruh atau sebagian GN miliknya.

Pada tanggal 19 September 2008, IFB melakukan pembayaran sejumlah AS$67.805 (setara dengan Rp642.109) untuk bagian GN yang dibeli dengan jumlah nilai pokok sebesar AS$65.253 (setara dengan Rp617.946) dengan harga 101% dari nilai pokok yang dibeli, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penyelesaian dan biaya tambahan lainnya.

Pada tanggal 12 Mei 2010, Perusahaan, bersama dengan IFB dan IIFB, mengumumkan permulaan penawaran kas (*cash tender offer*) oleh IFB dan IIFB untuk membeli secara tunai sebagian atau seluruh dari GN Jatuh Tempo Tahun 2010 ("GN 2010") yang diterbitkan IFB dan GN Jatuh Tempo 2012 ("GN 2012") yang diterbitkan IIFB. Sebagai tambahan dari penawaran untuk membeli GN 2010, IFB juga melakukan *solicitation*, dalam satu proposal, persetujuan untuk amandemen tertentu yang diajukan terhadap ketentuan *Notes* yang telah diamandemen dan dinyatakan kembali pada tanggal 25 Januari 2006 ("*2010 Indenture*") yang akan memperpendek waktu pemberitahuan untuk opsi pelunasan dari GN 2010 dan untuk melepaskan IIFB sebagai penjamin (*guarantor*) dalam *2010 Indenture.*

Pada tanggal 2 Agustus 2010, IFB membayar sejumlah AS$174.699 (setara dengan Rp1.561.460) untuk bagian GN 2010 yang dibeli melalui penawaran tender dengan jumlah nilai pokok sebesar AS$167.774 (setara dengan Rp1.499.564) dan AS$100 (setara dengan Rp894), masing-masing dengan harga 102,1875% dan 101,9375% dari nilai pokok yang dibeli, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penyelesaian, biaya *solicitation* sebesar AS$9 (setara dengan Rp83) dan biaya tambahan lainnya (Catatan 24).

Pada tanggal 10 Agustus 2010, IFB membayar sejumlah AS$69.536 (setara dengan Rp622.556) untuk pembelian GN 2010 yang tersisa yang ditarik (*called*) dengan jumlah nilai pokok sebesar AS$66.873 (setara dengan Rp598.715) dengan harga setara dengan 101,9375% dari nilai pokoknya, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penyelesaian dan biaya tambahan lainnya (Catatan 24).

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012

Pada tanggal 22 Juni 2005, Perusahaan, melalui IIFB, menerbitkan GN Jatuh Tempo Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap dan dengan nilai nominal keseluruhan sebesar AS$250.000. GN ini diterbitkan dengan harga 99,323% dari nilai pokoknya. GN ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,125% per tahun terhutang dalam cicilan tengah-tahunan pada tanggal 22 Juni dan 22 Desember setiap tahun, mulai tanggal 22 Desember 2005. GN ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 8,13% per tahun. GN ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2012.

GN dapat ditarik kembali atas opsi IIFB, seluruh atau sebagian, setiap saat pada atau setelah tanggal 22 Juni 2010 dengan harga 103,5625%, 101,7813% dan 100,0000% dari nilai pokok GN selama periode 12 bulan masing-masing mulai dari tanggal 22 Juni pada tahun 2010, 2011 dan 2012, ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada. Lebih lanjut, sebelum tanggal 22 Juni 2008, IIFB dapat menarik kembali sampai dengan 35% dari seluruh nilai pokok GN, dengan dana dari satu atau lebih penawaran saham umum (*Public Equity Offerings*) Perusahaan dengan harga 107,125% dari nilai pokok GN, ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada. GN juga dapat ditarik kembali atas opsi IIFB, seluruh tetapi tidak sebagian, setiap saat, dengan harga 103,5625% dari nilai pokok GN ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penarikan kembali, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi potongan pajak di Indonesia dan Belanda yang mensyaratkan IIFB atau Perusahaan untuk membayar jumlah tambahan sehubungan dengan jumlah GN di atas jumlah tertentu. Atas perubahan kendali dari Perusahaan (termasuk penjualan, pengalihan, penunjukan, penyewaan, pemindahan atau penghapusan seluruh atau sebagian besar aset Perusahaan), pemegang GN berhak untuk meminta IIFB untuk membeli kembali seluruh atau sebagian GN miliknya dengan harga 101% dari nilai pokok GN ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar, jika ada, pada tanggal pembelian.

Hasil bersih GN ini, setelah dikurangi beban penjaminan dan penawaran, diterima pada tanggal 23 Juni 2005 dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Perusahaan, termasuk pengeluaran barang modal.

Berdasarkan ketentuan GN, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

GN ini dijamin penuh oleh Perusahaan.

Pada tanggal 22 Juli 2008, IIFB mengumumkan Penawaran atas Perubahan Kendali kepada semua pemegang GN. Penawaran tersebut ditujukan untuk membeli GN dengan harga 101% dari nilai pokok ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pembayaran dan jumlah tambahan. Penawaran tersebut berakhir pada tanggal 17 September 2008. Pemegang GN melaksanakan haknya untuk meminta IIFB untuk membeli kembali seluruh atau sebagian GN miliknya.

Pada tanggal 19 September 2008, IIFB melakukan pembayaran sejumlah AS$144.441 (setara dengan Rp1.367.858) untuk bagian GN yang dibeli dengan jumlah nilai pokok sebesar AS$140.590 (setara dengan Rp1.331.387) dengan harga 101% dari nilai pokok yang dibeli kembali, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penyelesaian dan biaya tambahan lainnya.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 (lanjutan)

Pada tanggal 12 Mei 2010, Perusahaan, bersama dengan IFB dan IIFB, mengumumkan permulaan penawaran kas (*cash tender offer*) oleh IFB dan IIFB untuk membeli secara tunai sebagian atau seluruh dari GN 2010 yang diterbitkan IFB dan GN 2012 yang diterbitkan IIFB.

Pada tanggal 2 Agustus 2010, IIFB membayar sejumlah AS$58.614 (setara dengan Rp523.892) untuk bagian GN 2012 yang dibeli melalui penawaran tender dengan jumlah nilai pokok sebesar AS$55.835 (setara dengan Rp499.053) dan AS$200 (setara dengan Rp1.788), masing-masing dengan harga setara 103,8125% dan 103,5625% dari nilai pokok yang dibeli, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penyelesaian dan biaya tambahan lainnya (Catatan 24).

Pada tanggal 2 September 2010, IIFB membayar sejumlah AS$56.016 (setara dengan Rp504.592) untuk pembelian GN 2012 yang tersisa yang ditarik (*called*) dengan jumlah nilai pokok sebesar AS$53.375 (setara dengan Rp480.802) dengan harga setara dengan 103,5625% dari nilai pokoknya, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal penyelesaian dan biaya tambahan lainnya.

Obligasi Indosat Ketiga Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap

Pada tanggal 22 Oktober 2003, Perusahaan menerbitkan Obligasi Indosat Ketiga Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Indosat Ketiga"), dengan BRI sebagai wali amanat, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi tersebut diterbitkan dalam dua seri. Obligasi Seri A jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2008.

Obligasi Seri B sebesar Rp640.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 12,875% per tahun selama 7 tahun mulai tanggal 22 Oktober 2003. Pada tanggal 22 Oktober 2010, Perusahaan melunasi Obligasi Seri B sejumlah Rp640.000. Obligasi ini memiliki tingkat bunga efektif sebesar 13,31% per tahun.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo jika setelah ulang tahun emisi pertama, Perusahaan menggunakan opsi untuk membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi pada harga pasar untuk sementara atau sebagai pelunasan awal. Perusahaan tidak menggunakan opsi pelunasan awal untuk melakukan pembayaran lebih awal untuk seluruh obligasi pada ulang tahun emisi keenam pada tingkat harga 100% dari nilai pokok obligasi.

KSEI sebagai agen pembayaran, berkewajiban membayar bunga obligasi Seri B mulai tanggal 22 Januari 2004 dan setiap tiga-bulanan sampai dengan 22 Oktober 2010.

Hasil obligasi ini digunakan untuk setoran modal ke Satelindo, yang selanjutnya digunakan untuk membayar hutangnya dan Obligasi Bunga Mengambang yang Dijamin.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti memelihara rasio keuangan tertentu.

Hutang obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan maupun oleh pihak lain. Seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang telah ditentukan spesifik merupakan jaminan bagi kreditor lainnya, digunakan sebagai jaminan *pari-passu* untuk semua kewajiban Perusahaan termasuk obligasi ini.

Berdasarkan Risalah RUPO tanggal 24 Maret 2009, para pemegang Obligasi Indosat Ketiga setuju untuk merubah Perjanjian Perwaliamanatan sehubungan dengan perubahan beberapa definisi tertentu dan rasio keuangan tertentu yang harus dipelihara.

16. HUTANG OBLIGASI (lanjutan)

Jadwal pembayaran pokok hutang obligasi pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	Dua belas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2011	2012	2013	2014	2015 dan sesudahnya *	Jumlah
Dalam dolar A.S.						
Guaranteed Notes *						
Jatuh Tempo Tahun 2020 (AS$650.000)	-	-	-	-	5.844.150	5.844.150
Dalam rupiah						
Obligasi Indosat Kelima*	-	-	-	1.230.000	1.370.000	2.600.000
Obligasi Indosat Ketujuh*	-	-	-	700.000	600.000	1.300.000
Obligasi Indosat Keenam*	-	-	760.000	-	320.000	1.080.000
Obligasi Indosat Keempat*	815.000	-	-	-	-	815.000
Sukuk Ijarah III*	-	-	570.000	-	-	570.000
Sukuk Ijarah II*	-	-	-	400.000	-	400.000
Obligasi Syari'ah Ijarah*	285.000	-	-	-	-	285.000
Obligasi Indosat Kedua*	-	-	-	-	200.000	200.000
Sukuk Ijarah IV*	-	-	-	28.000	172.000	200.000
Obligasi Terbatas II	-	25.000	-	-	-	25.000
Obligasi Terbatas I	-	16.989	-	-	-	16.989
Sub-jumlah	**1.100.000**	**41.989**	**1.330.000**	**2.358.000**	**2.662.000**	**7.491.989**
Jumlah	**1.100.000**	**41.989**	**1.330.000**	**2.358.000**	**8.506.150**	**13.336.139**
Dikurangi :						
- beban emisi GN yang belum diamortisasi						(64.885)
- beban emisi hutang obligasi dan biaya *solicitation* yang belum diamortisasi						(29.353)
- diskon GN yang belum diamortisasi						(29.666)
Bersih						**13.212.235**

* Mengacu ke pembahasan sebelumnya mengenai opsi pelunasan awal untuk masing-masing obligasi/GN.

Amortisasi beban emisi dan biaya *solicitation* hutang obligasi, beban emisi GN dan diskon hutang GN masing-masing sebesar Rp18.025 dan Rp15.467 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Catatan 24).

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan dan Anak Perusahaan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Ketentuan GN dan Perjanjian Perwaliamanatan.

17. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN

Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki berbagai aset keuangan seperti piutang usaha dan lain-lain, kas dan setara kas dan investasi jangka pendek, yang timbul secara langsung dari kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan. Kewajiban keuangan pokok Perusahaan dan Anak Perusahaan, selain derivatif, terdiri dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi, biaya masih harus dibayar, hutang pengadaan, hutang usaha dan lain-lain. Tujuan utama dari kewajiban keuangan tersebut adalah untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan. Perusahaan juga mengadakan transaksi derivatif, terutama swap valuta asing dan swap suku bunga dengan tujuan untuk mengelola risiko valuta asing dan suku bunga yang berasal dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi Perusahaan dalam mata uang asing.

17. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan kewajiban keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009:

	2010	2009
Aset Keuangan		
Kelompok diperdagangkan		
Aset derivatif	69.334	224.743
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Kas dan setara kas	2.075.270	2.835.999
Piutang - usaha dan lain-lain - bersih	1.558.457	1.949.984
Aset keuangan lancar lainnya	53.119	35.173
Piutang hubungan istimewa - bersih	8.421	7.215
Aset keuangan tidak lancar lainnya	77.675	100.004
Tersedia untuk dijual		
Investasi jangka pendek - bersih	-	-
Investasi jangka panjang lainnya - bersih	2.730	2.730
Jumlah Aset Keuangan	**3.845.006**	**5.155.848**
Kewajiban Keuangan		
Kelompok diperdagangkan		
Kewajiban derivatif	215.403	200.202
Kewajiban dicatat pada biaya perolehan diamortisasi		
Hutang usaha	645.505	537.476
Hutang pengadaan	3.644.467	5.289.782
Biaya masih harus dibayar	1.710.885	1.525.561
Uang muka pelanggan	50.279	22.463
Hutang jangka panjang - bagian jangka pendek	3.184.147	1.440.259
Hutang obligasi - bagian jangka pendek	1.098.131	2.840.662
Kewajiban keuangan lancar lainnya	23.127	43.721
Hutang hubungan istimewa	22.099	13.764
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	7.666.804	12.721.308
Hutang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek	12.114.104	8.472.175
Jumlah Kewajiban Keuangan	**30.374.951**	**33.107.373**

17. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan yang dicatat di laporan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2010:

	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan setara kas	2.075.270	2.075.270
Investasi jangka pendek - bersih	-	-
Piutang - usaha dan lain-lain - bersih	1.558.457	1.558.457
Aset derivatif	69.334	69.334
Aset keuangan lancar lainnya	53.119	53.119
Jumlah aset keuangan lancar	**3.756.180**	**3.756.180**
Aset Keuangan Tidak Lancar		
Piutang hubungan istimewa - bersih	8.421	7.176
Investasi jangka panjang lainnya - bersih	2.730	2.730
Aset keuangan tidak lancar lainnya	77.675	73.309
Jumlah aset keuangan tidak lancar	**88.826**	**83.215**
Jumlah Aset Keuangan	**3.845.006**	**3.839.395**
Kewajiban Keuangan Lancar		
Hutang usaha	645.505	645.505
Hutang pengadaan	3.644.467	3.644.467
Biaya masih harus dibayar	1.710.885	1.710.885
Uang muka pelanggan	50.279	50.279
Kewajiban derivatif	215.403	215.403
Hutang jangka panjang - bagian jangka pendek	3.184.147	3.155.634
Hutang obligasi - bagian jangka pendek	1.098.131	1.110.737
Kewajiban keuangan lancar lainnya	23.127	23.127
Jumlah kewajiban keuangan lancar	**10.571.944**	**10.556.037**
Kewajiban Keuangan Tidak Lancar		
Hutang hubungan istimewa	22.099	18.833
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	7.666.804	7.510.510
Hutang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek	12.114.104	13.228.171
Jumlah kewajiban keuangan tidak lancar	**19.803.007**	**20.757.514**
Jumlah Kewajiban Keuangan	**30.374.951**	**31.313.551**

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan disajikan dalam jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi kini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*), bukanlah dalam penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

17. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

Aset dan kewajiban keuangan jangka pendek:

- *Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya, hutang usaha, hutang pengadaan, biaya masih harus dibayar, uang muka pelanggan dan kewajiban keuangan lancar lainnya).*

  Instrumen keuangan ini mendekati nilai tercatat mereka sebagian besar karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek.

- *Instrumen Keuangan Derivatif*

  Kontrak swap valuta asing (termasuk derivatif melekat yang dipisahkan)

  Derivatif ini diukur pada nilai wajarnya dengan menggunakan teknik penilaian internal karena tidak terdapat kuotasi harga pasar untuk instrumen tersebut. Teknik utama yang digunakan untuk menilai instrumen tersebut adalah penggunaan diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Data masukan termasuk kurva imbalan suku bunga (*interest rate yield curves*), nilai tukar mata uang asing, *Credit Default Spread* ("CDS"), dan harga spot dari instrumen yang dijadikan acuan (*underlying instruments*).

  Kontrak swap suku bunga

  Derivatif ini diukur pada nilai wajarnya, dihitung menggunakan diskonto arus kas berdasarkan masukan dari pasar yang dapat diamati yang meliputi kurva imbalan suku bunga (*interest rate yield curves*) dan tanggal-tanggal pembayaran.

Aset dan kewajiban keuangan jangka panjang:

- *Kewajiban keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel (hutang jangka panjang dan hutang obligasi yang tidak dikuotasikan)*

  Nilai wajar dari kewajiban keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- *Aset dan kewajiban keuangan jangka panjang lainnya (piutang/hutang hubungan istimewa, investasi jangka panjang lainnya dan aset keuangan jangka panjang lainnya)*

  Estimasi nilai wajar didasarkan pada nilai diskonto dari arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko pihak lawan (untuk aset keuangan) dan risiko kredit Perusahaan dan Anak Perusahaan (untuk kewajiban keuangan) dan menggunakan suku bunga bebas risiko (*risk-free rates*) untuk instrumen yang serupa.

- *Instrumen keuangan yang dikuotasikan dalam pasar aktif*

  Nilai wajar dari obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar kuotasi.

  Untuk investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia-untuk-dijual, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010.

18. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Akun ini terdiri dari bagian jangka panjang dari kewajiban imbalan kerja sebagai berikut:

	2010	2009
Jaminan kesehatan masa pensiun (Catatan 25)	639.271	549.007
Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 (Catatan 25)	187.944	147.790
Penghargaan	43.058	31.265
Akumulasi manfaat cuti	2.134	1.391
Manfaat masa pensiun atas kelanjutan gaji sebelum pensiun*	-	96.261
Jumlah	**872.407**	**825.714**

* Sebelum tanggal 31 Desember 2010, bagian jangka pendek dari manfaat masa pensiun atas kelanjutan gaji sebelum pensiun termasuk sebagai biaya masih harus dibayar (Catatan 14) sebesar Rp1.412 dan bagian jangka panjang termasuk sebagai kewajiban imbalan kerja sebesar Rp117.773, sebelum dikurangi pembayaran manfaat selama tahun berjalan sebesar Rp852. Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan dan Serikat Pekerja mencapai Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") untuk pembatalan manfaat masa pensiun atas kelanjutan gaji sebelum pensiun efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Pembatalan ini menghapus kewajiban legal atau konstruktif Perusahaan atas manfaat tersebut. Sebagai akibatnya, Perusahaan membalik saldo cadangan atas manfaat tersebut pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp118.333.

19. MODAL SAHAM

Pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Jumlah	Persentase Kepemilikan (%)
2010			
Saham Seri A			
Pemerintah	1	-	-
Saham Seri B			
Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. (sebelumnya ICLS)	3.532.056.600	353.206	65,00
Pemerintah	776.624.999	77.662	14,29
SKAGEN Funds (SKAGEN AS)	277.824.400	27.782	5,11
Direksi:			
Fadzri Sentosa	10.000	1	0,00
Publik lainnya (persentase pemilikan di bawah 5%)	847.417.500	84.742	15,60
Jumlah	**5.433.933.500**	**543.393**	**100,00**
2009			
Saham Seri A			
Pemerintah	1	-	-
Saham Seri B			
Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd.	3.532.056.600	353.206	65,00
Pemerintah	776.624.999	77.662	14,29
Direksi:			
Fadzri Sentosa	10.000	1	0,00
Publik lainnya (persentase pemilikan di bawah 5%)	1.125.241.900	112.524	20,71
Jumlah	**5.433.933.500**	**543.393**	**100,00**

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Saham "Seri A" adalah saham khusus yang dimiliki oleh Pemerintah dan mempunyai hak suara khusus. Hak dan batasan yang berlaku pada saham "Seri B" juga berlaku bagi saham "Seri A", kecuali bahwa Pemerintah tidak dapat mengalihkan saham "Seri A", dan mempunyai hak veto sehubungan dengan (i) perubahan maksud dan tujuan Perusahaan; (ii) penambahan modal tanpa hak memesan terlebih dahulu; (iii) penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan; (iv) perubahan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak saham "Seri A" sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; dan (v) pembubaran, kepailitan dan likuidasi Perusahaan. Saham "Seri A" juga memiliki hak untuk menunjuk satu orang direktur dan satu orang komisaris Perusahaan.

Pada tanggal 8 Januari 2009, Qtel melakukan pendaftaran pernyataan penawaran tender (*tender offer statement*) kepada United States Securities and Exchange Commission ("U.S. SEC") dan BAPEPAM-LK untuk pembelian tambahan saham Perusahaan yang efektif pada tanggal 16 Januari 2009. Selanjutnya, seperti yang dipersyaratkan oleh U.S. SEC, pada tanggal 20 Januari 2009, Perusahaan melakukan pendaftaran *schedule 14D-9, Solicitation/Recommendation Statement*, kepada U.S. SEC sebagai tanggapan atas penawaran tender yang dilakukan oleh Qtel di Amerika Serikat dan Indonesia melalui ICLS, anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Qtel, untuk melakukan pembelian Saham Seri B (termasuk Saham Seri B yang dimiliki dalam bentuk ADS, yang masing-masing mewakili 50 Saham Seri B) yang mewakili kurang lebih 24,19% dari jumlah Saham Seri B Perusahaan yang diterbitkan dan beredar. Pada tanggal 4 Maret 2009, ICLS meningkatkan kepemilikannya pada Perusahaan dari 0,85% menjadi 25,04%.

Pada tanggal 29 Mei 2009, ICL menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham (*Share Purchase Agreement*) untuk menjual 39,96% kepemilikannya di Perusahaan kepada ICLS. Proses penutupan dari penjualan tersebut dilakukan pada tanggal 4 Juni 2009; sebagai akibatnya, semenjak tanggal tersebut ICLS menjadi pemegang 3.532.056.600 saham seri B yang mewakili 65,00% kepemilikan di Perusahaan.

Pada tanggal 11 September 2009, ICLS berganti nama menjadi Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd.

20. PENDAPATAN USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Selular		
Pendapatan pemakaian	7.943.960	7.085.741
Jasa nilai tambah	7.039.243	5.998.963
Pendapatan interkoneksi (Catatan 32)	1.252.751	1.709.193
Sewa menara (Catatan 29d)	251.981	62.365
Pendapatan langganan bulanan	200.519	184.174
Penjualan telepon genggam Blackberry	34.956	206.481
Lain-lain	172.080	140.310
Potongan harga di muka dan Program Loyalitas Pelanggan (Catatan 2n)	(868.428)	(1.087.064)
Bersih	**16.027.062**	**14.300.163**

20. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

	2010	2009
MIDI		
Internet Protocol Virtual Private Network ("IP VPN")	605.685	566.105
Internet	519.553	677.375
World link dan direct link	278.788	394.189
Frame net	227.051	276.477
Sewa jaringan	189.112	211.092
Jasa aplikasi	168.196	146.137
Sewa satelit	136.008	113.060
Digital data network	94.686	144.619
Multiprotocol Label Switching ("MPLS")	66.579	67.141
Lain-lain	190.618	124.789
Sub-jumlah	**2.476.276**	**2.720.984**
Telekomunikasi Tetap		
Telepon Internasional	993.165	1.422.268
Telepon Jaringan Tetap Nirkabel	174.157	249.886
Telepon Jaringan Tetap	125.383	129.935
Lain-lain	472	950
Sub-jumlah	**1.293.177**	**1.803.039**
Jumlah	**19.796.515**	**18.824.186**

Pendapatan usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa berjumlah Rp1.640.591 dan Rp1.474.208 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Jumlah ini merupakan 8,29% dan 7,83% dari jumlah pendapatan usaha, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Catatan 26).

Pendapatan usaha dari jasa interkoneksi disajikan secara kotor (Catatan 2o).

21. BEBAN USAHA - JASA TELEKOMUNIKASI

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Interkoneksi (Catatan 32)	1.735.942	1.880.105
Biaya hak penggunaan frekuensi radio (Catatan 1)	1.612.375	1.331.416
Pemeliharaan	943.503	922.225
Listrik, gas dan air	715.349	772.450
Sewa	517.432	449.759
Sewa sirkit	377.580	487.074

21. BEBAN USAHA - JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

	2010	2009
Harga pokok penjualan kartu SIM dan voucher pulsa isi ulang	259.323	326.472
USO (Catatan 32)	214.636	218.210
Biaya akses Blackberry	197.434	50.068
Pemasangan	133.746	97.142
Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (Catatan 32)	112.404	83.970
Pengiriman dan transportasi	84.075	80.157
Harga pokok modem dan telepon genggam	74.266	247.135
Penagihan dan penerimaan	54.816	44.297
Perizinan	31.543	67.030
Lain-lain	48.986	30.340
Jumlah	**7.113.410**	**7.087.850**

Interkoneksi terkait dengan beban untuk interkoneksi antara jaringan telekomunikasi Perusahaan dengan jaringan yang dimiliki Telkom atau penyelenggara telekomunikasi lainnya (Catatan 2n).

22. BEBAN USAHA - KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Gaji	492.452	451.150
Insentif dan tunjangan lainnya	277.361	260.884
Bonus	236.950	207.690
Tunjangan pajak penghasilan karyawan	131.630	145.421
Tunjangan kesehatan masa pensiun (Catatan 25)	104.600	88.615
Pengobatan	69.509	68.471
Tenaga kontrak	60.858	74.809
Beban pensiun (Catatan 25)	45.688	32.336
Penyelesaian pemutusan hubungan kerja, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (Catatan 25)	42.833	40.972
Pensiun dini*	16.253	38.106
Manfaat masa pensiun atas kelanjutan gaji sebelum pensiun (Catatan 18)	(96.820)	14.933
Lain-lain	29.930	28.173
Jumlah	**1.411.244**	**1.451.560**

* Pada tanggal 27 Juni 2006, Direksi Perusahaan mengeluarkan Keputusan No. 051/DIREKSI/2006 tentang "Manfaat Tambahan bagi Karyawan yang mengajukan Pengunduran Diri Sukarela". Berdasarkan keputusan ini, karyawan yang memenuhi syarat untuk pensiun dini dan sukarela mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan dari Direksi diberikan manfaat tambahan berupa tambahan gaji, uang perjalanan dan paket pelatihan. Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, terdapat masing-masing 19 dan 66 karyawan yang mengambil opsi tersebut.

22. BEBAN USAHA - KARYAWAN (lanjutan)

Beban karyawan yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan dan pemasangan masing-masing sebesar Rp38.668 dan Rp34.092 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

23. BEBAN USAHA - ADMINISTRASI DAN UMUM

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Sewa	120.428	144.585
Honorarium tenaga ahli	109.374	103.916
Listrik, gas dan air	97.518	77.318
Cadangan penurunan nilai piutang (Catatan 4)	67.041	98.042
Transportasi	64.485	58.882
Kantor	48.370	44.710
Asuransi	39.807	29.183
Makan karyawan	25.585	20.730
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp20.000)	87.379	116.071
Jumlah	**659.987**	**693.437**

24. BEBAN LAIN-LAIN - BEBAN PENDANAAN

Akun ini terdiri dari:

	2010	2009
Bunga pinjaman	2.080.274	1.808.620
Rugi atas pelunasan GN 2010 dan GN 2012 (Catatan 16)	96.487	-
Amortisasi beban emisi pinjaman dan hutang obligasi, biaya *solicitation* dan diskon (Catatan 15 dan 16)	90.116	51.305
Biaya bank	4.751	13.042
Jumlah	**2.271.628**	**1.872.967**

25. DANA PENSIUN

Perusahaan, Satelindo dan Lintasarta menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang memenuhi syarat.

Program Pensiun Manfaat Pasti

Perusahaan, Satelindo dan Lintasarta menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk karyawannya dimana manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, mengelola program pensiun ini. Kontribusi pensiun ditentukan dengan perhitungan aktuaria secara periodik yang dilakukan oleh Jiwasraya.

25. DANA PENSIUN (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Berdasarkan amandemen program pensiun Perusahaan tanggal 22 Desember 2000, yang diamandemen lebih lanjut pada tanggal 29 Maret 2001, pola manfaat dan pembayaran premi diubah. Sebelum amandemen tersebut, premi dibayar tahunan sampai program tersebut dibiayai penuh dan manfaat terdiri dari manfaat pensiun (pensiun rutin bulanan atau *lump-sum*) dan asuransi kematian. Sehubungan dengan amandemen tersebut, jumlah premi yang jatuh tempo pada tanggal 1 September 2000 untuk membiayai penuh program ini dihitung dan dibayarkan dalam beberapa tahap sampai dengan bulan Januari 2002. Amandemen tersebut juga mencakup tambahan manfaat dalam bentuk Pensiun Hari Tua bulan ketigabelas yang dibayarkan setiap tahun yaitu empat belas hari menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Amandemen ini berlaku bagi karyawan yang tercatat sebagai peserta program pensiun pada tanggal 1 September 2000 dan termasuk kenaikan gaji dasar pensiun sebesar 9% secara majemuk setiap tahun terhitung sejak 1 September 2001. Amandemen ini juga menyatakan bahwa tidak akan dilakukan kenaikan premi, termasuk jika terjadi pemberhentian karyawan secara massal atau perubahan status perkawinan.

Jumlah cicilan premi keseluruhan berdasarkan amandemen perjanjian adalah sebesar Rp355.000 dan dibayarkan Perusahaan pada tanggal jatuh tempo.

Pada tanggal 1 Maret 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Jiwasraya untuk penyediaan program asuransi kematian pasti untuk 1.276 karyawan pada tanggal 1 Januari 2007, yang tidak tercatat sebagai peserta program pensiun manfaat pasti seperti yang dijelaskan di atas. Berdasarkan perjanjian tersebut, seorang karyawan akan menerima:

- Jaminan ekspirasi setara dengan nilai tunai pada usia pensiun normal, atau
- Jaminan kematian bukan karena kecelakaan setara dengan 100% uang asuransi ditambah nilai tunai ketika karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan, atau
- Jaminan kematian karena kecelakaan setara dengan 200% uang asuransi ditambah nilai tunai ketika karyawan meninggal dunia karena kecelakaan.

Premi sebesar Rp7.600 dibayarkan secara penuh pada tanggal 29 Maret 2007. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2007, bulan Februari sampai Desember 2008, bulan Januari sampai Desember 2009, dan bulan Januari sampai Desember 2010, Perusahaan melakukan pembayaran premi tambahan masing-masing sebesar Rp275 untuk tambahan 55 orang karyawan, Rp805 untuk tambahan 161 orang karyawan, Rp415 untuk tambahan 81 orang karyawan, dan Rp120 untuk tambahan 14 orang karyawan.

Pada tanggal 25 Juni 2003, Satelindo menandatangani perjanjian dengan Jiwasraya untuk mengubah pola manfaat dan pembayaran premi program pensiun sebelumnya. Amandemen ini berlaku bagi karyawan yang tercatat sebagai peserta program pensiun pada tanggal 25 Desember 2002 sampai dengan tanggal 25 Juni 2003. Ketentuan lain yang baru mencakup hal-hal berikut:

- Kenaikan gaji dasar pensiun sebesar 6% secara majemuk setiap tahun terhitung sejak tanggal 25 Desember 2002
- Tunjangan pensiun bulan ketigabelas yang dibayarkan setiap tahun yaitu empat belas hari menjelang Hari Raya Idul Fitri
- Kenaikan pembayaran berkala manfaat pensiun sebesar 6% secara majemuk setiap tahun terhitung satu tahun setelah menerima manfaat pensiun berkala yang pertama
- Apabila tingkat bunga rata-rata tahunan deposito berjangka bank pemerintah melebihi 15%, manfaat pensiun peserta program pensiun akan meningkat sebesar persentase tertentu sesuai dengan formula yang disetujui oleh kedua belah pihak.

25. DANA PENSIUN (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Pada tanggal 15 April 2005, Lintasarta menandatangani perjanjian dengan Jiwasraya untuk menggantikan perjanjian yang ada. Berdasarkan pada perjanjian yang baru, pola manfaat dan pembayaran premi diubah. Perjanjian ini mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2005. Jumlah cicilan premi berdasarkan perjanjian adalah sebesar Rp61.623, yang terhutang dalam 10 cicilan tahunan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.

Perjanjian baru ini berlaku bagi karyawan yang tercatat sebagai peserta program pensiun pada tanggal 1 April 2003. Ketentuan lain yang baru mencakup hal-hal berikut:

- Kenaikan gaji dasar pensiun sebesar 3% (sebelumnya diproyeksikan 8%) secara majemuk setiap tahun terhitung sejak 1 April 2003
- Kenaikan pembayaran berkala manfaat pensiun sebesar 5% secara majemuk setiap tahun dimulai sejak satu tahun setelah menerima manfaat pensiun berkala yang pertama
- Apabila tingkat bunga rata-rata tahunan deposito berjangka bank pemerintah melebihi 15%, manfaat pensiun peserta program pensiun akan meningkat sebesar persentase tertentu sesuai dengan formula yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 2 Mei 2005, Lintasarta menandatangani perjanjian dengan Jiwasraya untuk mengubah perjanjian di atas. Amandemen ini berlaku bagi karyawan yang tercatat sebagai peserta program pensiun pada tanggal 1 April 2003 sampai dengan tanggal 30 November 2004 dengan jumlah tambahan 10 cicilan premi tahunan sejumlah Rp1.653 yang terhutang mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.

Jumlah kontribusi yang dilakukan Lintasarta ke Jiwasraya berjumlah Rp9.653 untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

Beban pensiun berkala bersih program pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dihitung berdasarkan penilaian aktuaria masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Penilaian aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *"projected-unit-credit"* dan dengan menerapkan asumsi berikut:

	2010	2009
Tingkat diskonto tahunan	8,5 - 9,0%	10,5 - 10,7%
Ekspektasi tingkat pengembalian aset dana pensiun tahunan	4,5 - 9,0%	4,5 - 9,0%
Tingkat kenaikan kompensasi tahunan	3,0 - 9,0%	3,0 - 9,0%
Tabel kematian (Tabel Mortalitas Indonesia - TMI)	TMI 1999	TMI 1999

25. DANA PENSIUN (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

a. Komposisi beban pensiun berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Beban bunga	74.558	63.648
Beban jasa	41.749	39.510
Amortisasi atas rugi (laba) aktuaria yang belum diakui	850	(1.429)
Pengembalian aset dana pensiun	(71.469)	(69.393)
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 22)	**45.688**	**32.336**

b. Status pendanaan program pensiun pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Nilai wajar aset dana pensiun	852.958	813.588
Kewajiban pensiun yang diproyeksikan	(750.625)	(726.427)
Kelebihan aset dana pensiun atas kewajiban pensiun yang diproyeksikan	102.333	87.161
Rugi aktuaria yang belum diakui	10.928	62.659
Jumlah pensiun dibayar di muka	**113.261**	**149.820**

c. Perubahan pensiun dibayar di muka untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Saldo awal		
Perusahaan	124.720	154.441
Lintasarta	25.100	18.659
Beban pensiun berkala bersih		
Perusahaan	(41.505)	(29.487)
Lintasarta	(4.183)	(2.849)
Pengembalian dari Jiwasraya		
Perusahaan	(464)	(649)
Lintasarta	(180)	(363)
Kontribusi ke Jiwasraya		
Perusahaan	120	415
Lintasarta	9.653	9.653
Saldo akhir		
Perusahaan	**82.871**	**124.720**
Lintasarta	**30.390**	**25.100**

25. DANA PENSIUN (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

d. Pensiun dibayar di muka terdiri dari:

	2010	2009
Bagian jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari "Biaya Dibayar di Muka")		
Perusahaan	1.401	1.715
Lintasarta	516	725
	1.917	2.440
Bagian jangka panjang		
Perusahaan	81.470	123.005
Lintasarta	29.874	24.375
	111.344	147.380
Jumlah beban pensiun dibayar di muka	**113.261**	**149.820**

Aset dana pensiun pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 terutama terdiri dari deposito berjangka, efek hutang, investasi jangka panjang dalam bentuk saham dan properti.

Program Pensiun Iuran Pasti

Pada bulan Mei 2001 dan Januari 2003, Perusahaan dan Satelindo membantu karyawan mereka untuk memiliki program pensiun iuran pasti, sebagai tambahan atas program pensiun manfaat pasti seperti disebut di atas. Mulai bulan Juni 2004, Perusahaan juga membantu karyawan eks-IM3 untuk memiliki program pensiun iuran pasti. Berdasarkan program pensiun iuran pasti tersebut, kontribusi karyawan adalah sebesar 10% - 20% dari gaji pokoknya, sedangkan Perusahaan tidak memberikan kontribusi. Jumlah kontribusi karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebesar Rp46.557 dan Rp19.451. Aset dana pensiun dikelola oleh tujuh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Perusahaan dan Satelindo, berdasarkan pilihan karyawan.

Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Perusahaan, Lintasarta dan IMM mencatat beban manfaat karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan ("UUK") No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Karyawan mereka akan menerima manfaat sejumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini atau program pensiun manfaat pasti, mana yang lebih tinggi.

Beban pensiun berkala bersih berdasar UUK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dihitung berdasarkan penilaian aktuaria masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Penilaian aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "*projected-unit-credit*" dan dengan menggunakan asumsi berikut:

	2010	2009
Tingkat diskonto tahunan	8,5 - 9,0%	10,5%
Tingkat kenaikan kompensasi tahunan	8,0 - 9,0%	9,0 - 10,0%

25. DANA PENSIUN (lanjutan)

Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (lanjutan)

a. Komposisi beban pensiun berkala berdasarkan UUK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Beban jasa	21.747	19.587
Beban bunga	19.586	18.639
Amortisasi rugi aktuaria yang belum diakui	1.500	1.842
Pengakuan segera biaya jasa lalu – manfaat tertanam	-	904
Jumlah beban pensiun berkala berdasarkan UUK (Catatan 22)	**42.833**	**40.972**

b. Komposisi beban pensiun yang masih harus dibayar berdasarkan UUK pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Kewajiban pensiun yang diproyeksikan	217.754	187.888
Rugi aktuaria yang belum diakui	(17.245)	(27.147)
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(9.632)	(10.348)
Beban pensiun masih harus dibayar	**190.877**	**150.393**

c. Perubahan beban pensiun yang masih harus dibayar berdasarkan UUK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Saldo awal		
Perusahaan	131.416	100.518
Lintasarta	12.771	8.609
IMM	6.206	4.202
Beban pensiun berkala berdasarkan UUK		
Perusahaan	35.019	34.739
Lintasarta	4.974	4.209
IMM	2.840	2.024
Pembayaran manfaat		
Perusahaan	(2.150)	(3.841)
Lintasarta	(97)	(47)
IMM	(102)	(20)
Saldo akhir		
Perusahaan	**164.285**	**131.416**
Lintasarta	**17.648**	**12.771**
IMM	**8.944**	**6.206**

25. DANA PENSIUN (lanjutan)

Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, bagian jangka pendek dari beban pensiun berdasarkan UUK disajikan sebagai bagian dari biaya masih harus dibayar (Catatan 14) masing-masing sebesar Rp2.933 dan Rp2.603 dan untuk bagian jangka panjang masing-masing sebesar Rp187.944 dan Rp147.790 dalam kewajiban imbalan kerja (Catatan 18).

Jaminan Kesehatan Masa Pensiun

Perusahaan menyediakan jaminan kesehatan masa pensiun untuk para karyawannya yang meninggalkan Perusahaan setelah memenuhi persyaratan pensiun dini. Pasangan dan anak-anak dari karyawan yang telah terdaftar secara resmi dalam catatan administrasi Perusahaan juga memenuhi syarat untuk menerima manfaat tersebut. Jika karyawan tersebut meninggal dunia, pasangan dan anak-anak dari karyawan tersebut masih memenuhi syarat untuk menerima jaminan kesehatan masa pensiun sampai dengan pasangan tersebut meninggal atau menikah kembali dan anak-anak tersebut mencapai usia 25 atau telah menikah.

Pemanfaatan dari jaminan kesehatan masa pensiun ini dibatasi sampai dengan batas maksimum tahunan yang mengacu ke pensiun bulanan dari Jiwasraya sebagai berikut:

- 16 kali dari pensiun bulanan Jiwasraya untuk pensiunan yang menerima pensiun bulanan dari Jiwasraya
- 16 kali setara dengan pensiun bulanan untuk pensiunan yang menjadi pegawai tetap setelah tanggal 1 September 2000
- 16 kali dari pensiun bulanan terakhir untuk pensiunan yang pensiun setelah tanggal 1 Juli 2003 dan tidak menerima pensiun bulanan Jiwasraya.

Beban jaminan kesehatan masa pensiun berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dihitung berdasarkan penilaian aktuaria masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Penilaian aktuaria dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "*projected-unit-credit*" dan dengan menggunakan asumsi berikut:

	2010	2009
Tingkat diskonto tahunan	9,5%	11,0%
Tingkat tren biaya maksimum	6,0%	6,0%
Tingkat tren tahun depan	14,0%	16,0%
Periode untuk mencapai tingkat tren biaya maksimum	4 tahun	5 tahun

a. Komposisi beban jaminan kesehatan masa pensiun berkala untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Beban bunga	65.919	58.535
Beban jasa	28.229	19.628
Amortisasi biaya jasa lalu yang belum diakui	10.452	10.452
Beban jaminan kesehatan masa pensiun berkala (Catatan 22)	**104.600**	**88.615**

25. DANA PENSIUN (lanjutan)

Jaminan Kesehatan Masa Pensiun (lanjutan)

b. Komposisi beban jaminan kesehatan masa pensiun masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Kewajiban pensiun yang diproyeksikan	846.636	605.660
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(31.253)	(41.705)
Rugi aktuaria yang belum diakui	(161.443)	(2.150)
Beban jaminan kesehatan masa pensiun masih harus dibayar	**653.940**	**561.805**

c. Perubahan beban jaminan kesehatan masa pensiun masih harus dibayar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Saldo awal	561.805	483.772
Beban jaminan kesehatan masa pensiun berkala bersih	104.600	88.615
Pembayaran manfaat	(12.465)	(10.582)
Saldo akhir	**653.940**	**561.805**

d. Efek dari perubahan satu poin persentase dalam tingkat tren biaya jaminan kesehatan masa pensiun yang diasumsikan akan menghasilkan beban jasa dan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan akumulasi kewajiban jaminan kesehatan masa pensiun pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut:

	2010	2009
Kenaikan		
Beban jasa dan bunga	116.581	95.709
Akumulasi kewajiban jaminan kesehatan masa pensiun	1.030.938	725.664
Penurunan		
Beban jasa dan bunga	76.868	64.493
Akumulasi kewajiban jaminan kesehatan masa pensiun	702.632	510.522

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, bagian jangka pendek dari jaminan kesehatan masa pensiun disajikan sebagai bagian dari biaya masih harus dibayar (Catatan 14) masing-masing sebesar Rp14.669 dan Rp12.798 dan untuk bagian jangka panjang, masing-masing sebesar Rp639.271 dan Rp549.007 dalam kewajiban imbalan kerja (Catatan 18).

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Rincian akun dan transaksi signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi, kecuali disebutkan lain) adalah sebagai berikut:

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/Kewajiban (%)	
	2010	2009	2010	2009
Kas dan setara kas (Catatan 3)				
Bank-bank milik negara	**1.615.651**	**2.068.042**	**3,06**	**3,76**
Piutang usaha (Catatan 4)				
Bank-bank milik negara	91.774	42.860	0,17	0,08
Telkom	56.108	31.724	0,11	0,06
PT Televisi Republik Indonesia (Persero) ("TVRI")	38.261	25.322	0,07	0,04
PT Citra Sari Makmur ("CSM")	13.135	13.807	0,02	0,02
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")	9.073	5.318	0,02	0,01
PT Pos Indonesia (Persero)	8.935	10.752	0,02	0,02
PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN")	8.607	2.746	0,02	0,00
Qtel	2.827	3.460	0,01	0,01
PT Perusahaan Tambang Minyak Negara (Persero) ("Pertamina")	2.281	1.737	0,00	0,00
PT Indonesia Comnet Plus ("Comnet")	1.683	-	0,00	-
Lain-lain	37.462	45.724	0,07	0,09
Jumlah	270.146	183.450	0,51	0,33
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang	47.640	57.538	0,09	0,10
Bersih	**222.506**	**125.912**	**0,42**	**0,23**
Biaya dibayar di muka				
Menkominfo	1.186.669	783.533	2,16	1,42
Kopindosat	3.294	2.306	0,01	0,00
Telkom	2.452	1.434	0,00	0,00
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("INTI")	1.947	2.116	0,00	0,00
Jiwasraya (Catatan 25)	1.917	2.440	0,00	0,01
Lain-lain	5.367	3.051	0,01	0,01
Jumlah	**1.201.646**	**794.880**	**2,18**	**1,44**
Aset keuangan lancar lainnya				
Bank-bank milik negara	**35.957**	**20.173**	**0,07**	**0,04**
Aset lancar lainnya				
Lain-lain	**-**	**54**	**-**	**0,00**
Piutang hubungan istimewa				
Kopindosat	5.958	5.958	0,01	0,01
Manajemen senior	1.362	68	0,01	-
Telkomsel	1.053	1.558	0,00	0,00
Lain-lain	694	813	0,00	0,00
Jumlah	9.067	8.397	0,02	0,01
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang	646	1.182	0,00	0,00
Bersih	**8.421**	**7.215**	**0,02**	**0,01**
Pensiun dibayar di muka jangka panjang (Catatan 25)				
Jiwasraya	**111.344**	**147.380**	**0,21**	**0,27**

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/Kewajiban (%)	
	2010	2009	2010	2009
Uang muka jangka panjang				
INTI	3.705	3.108	0,01	0,01
Kopindosat	1.016	2.059	0,00	0,00
Jumlah	**4.721**	**5.167**	**0,01**	**0,01**
Sewa dibayar di muka jangka panjang				
Telkom	18.164	19.598	0,03	0,04
Kopindosat	12.817	11.982	0,02	0,03
INTI	3.658	5.499	0,01	0,01
Lain-lain	2.850	2.608	0,01	0,00
Jumlah	**37.489**	**39.687**	**0,07**	**0,08**
Aset keuangan tidak lancar lainnya				
Bank-bank milik negara	**55.274**	**46.170**	**0,10**	**0,08**
Aset tidak lancar lainnya				
Lain-lain	**87**	**-**	**0,00**	**-**
Hutang usaha				
Telkomsel	20.292	30.901	0,06	0,09
Comnet	1.345	2.793	0,00	0,01
Telkom	456	4.447	0,00	0,01
Lain-lain	167	529	0,00	0,00
Jumlah	**22.260**	**38.670**	**0,06**	**0,11**
Hutang pengadaan (Catatan 12)				
INTI	24.048	30.143	0,07	0,08
Kopindosat	22.123	25.509	0,06	0,07
PT Personel Alih Daya (“Persada”)	13.210	13.907	0,04	0,04
PT Pembangunan Perumahan	7.007	-	0,02	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”)	210	35.911	0,00	0,10
TVRI	-	11.797	-	0,03
Lain-lain	2.083	17	0,01	0,00
Jumlah	**68.681**	**117.284**	**0,20**	**0,32**
Biaya masih harus dibayar				
Menkominfo (Catatan 14)	293.590	305.564	0,85	0,83
PLN	81.578	94.337	0,23	0,26
Manajemen senior	33.553	27.825	0,10	0,08
Persada	16.906	9.305	0,05	0,03
Kopindosat	13.838	6.702	0,04	0,01
Telkom	1.063	1.112	0,00	0,00
Jumlah	**440.528**	**444.845**	**1,27**	**1,21**
Kewajiban lancar lainnya				
Telkomsel	**1.664**	**1.664**	**0,00**	**0,00**

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Jumlah Aset/Kewajiban (%)	
	2010	2009	2010	2009
Hutang hubungan istimewa				
TVRI	19.141	10.147	0,06	0,03
Kopindosat	1.490	1.490	0,00	0,01
Bank-bank milik negara	101	977	0,00	0,00
Lain-lain	1.367	1.150	0,00	0,00
Jumlah	**22.099**	**13.764**	**0,06**	**0,04**
Hutang jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek) (Catatan 15)				
Mandiri	**1.297.045**	**2.592.489**	**3,75**	**7,05**
Kewajiban tidak lancar lainnya				
Telkomsel	6.454	8.118	0,02	0,02
Kas Negara	3.895	-	0,01	-
Jumlah	**10.349**	**8.118**	**0,03**	**0,02**

	Jumlah		Persentase terhadap Pendapatan atau Beban Bersangkutan (%)	
	2010	2009	2010	2009
Pendapatan usaha (Catatan 20)				
Telkom	587.386	672.225	2,97	3,57
Telkomsel	414.860	260.345	2,10	1,38
Bank - bank milik negara	387.546	301.434	1,96	1,60
Qtel	36.521	6.714	0,18	0,04
PSN	23.694	7.202	0,12	0,04
Badan Pemerintahan	23.478	12.668	0,12	0,07
TVRI	19.698	22.547	0,10	0,12
PT Pos Indonesia	15.378	14.379	0,08	0,08
Pertamina	10.431	11.238	0,05	0,06
Universitas negeri	8.445	17.348	0,04	0,09
Comnet	8.121	5.831	0,04	0,03
CSM	7.124	14.855	0,04	0,08
PT Angkasa Pura (Persero)	6.213	3.887	0,03	0,02
Badan Pusat Statistik	3.922	430	0,02	0,00
PLN	2.527	2.667	0,01	0,01
PT Infomedia Nusantara	2.248	2.274	0,01	0,01
Badan Meteorologi dan Geofisika (“BMG”)	2.217	3.027	0,01	0,02
PT Aneka Tambang Tbk	1.623	1.591	0,01	0,01
Lain-lain	79.159	113.546	0,40	0,60
Jumlah	**1.640.591**	**1.474.208**	**8,29**	**7,83**

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	Jumlah		Persentase terhadap Pendapatan atau Beban Bersangkutan (%)	
	2010	2009	2010	2009
Beban usaha				
Beban jasa telekomunikasi				
Menkominfo (Catatan 21)	1.939.415	1.633.596	11,88	10,46
Telkom	550.124	711.784	3,37	4,56
Telkomsel	528.067	566.334	3,23	3,63
PLN	508.473	617.953	3,12	3,96
Persada	80.902	57.714	0,50	0,37
Kopindosat	59.205	5.661	0,36	0,04
Comnet	27.681	36.741	0,17	0,23
Qtel	27.375	2.821	0,17	0,02
PT Pos Indonesia	14.947	6.121	0,09	0,04
INTI	10.040	3.367	0,06	0,02
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN")	1.933	3.213	0,01	0,02
PSN	1.024	1.692	0,01	0,01
Jumlah	**3.749.186**	**3.646.997**	**22,97**	**23,36**
Karyawan				
Manajemen senior	131.906	145.510	0,81	0,93
Jiwasraya (Catatan 25)	45.688	32.336	0,28	0,21
Persada	40.139	56.613	0,24	0,36
Jumlah	**217.733**	**234.459**	**1,33**	**1,50**
Umum dan administrasi				
PLN	88.697	75.967	0,54	0,49
Kopindosat	26.072	24.465	0,16	0,16
Persada	17.914	35.912	0,11	0,23
Telkom	2.393	658	0,02	0,01
Usaha Gedung Bank Dagang Negara ("UGBDN")	1.603	887	0,01	0,00
Bank-bank milik negara	1.567	1.971	0,01	0,01
Lain-lain	6.727	3.464	0,04	0,02
Jumlah	**144.973**	**143.324**	**0,89**	**0,92**
Penghasilan (beban) lain-lain				
Pendapatan bunga				
Bank - bank milik negara	106.177	101.693	4,44	10,37
Lain-lain	754	306	0,03	0,03
Jumlah	**106.931**	**101.999**	**4,47**	**10,40**
Beban pendanaan				
Bank - bank milik negara	(231.530)	(225.216)	(9,68)	(22,96)
Lain-lain	-	(5.624)	-	(0,57)
Jumlah	**(231.530)**	**(230.840)**	**(9,68)**	**(23,53)**
Bersih	**(124.599)**	**(128.841)**	**(5,21)**	**(13,13)**

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

No.	Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
1.	Bank-bank milik negara	Entitas sepengendali	Kas dan setara kas, hutang jangka panjang dan pendapatan usaha - MIDI
2.	Telkom (Catatan 29j dan 32)	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - selular, telekomunikasi tetap dan MIDI; beban usaha - jasa telekomunikasi
3.	TVRI	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - MIDI
4.	CSM	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - MIDI
5.	Telkomsel (Catatan 32)	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - selular dan telekomunikasi tetap
6.	PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - MIDI
7.	PSN	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - MIDI
8.	Qtel	Pemegang saham utama	Pendapatan usaha - telekomunikasi tetap
9.	Pertamina	Entitas sepengendali	Piutang hubungan istimewa, pendapatan usaha - MIDI
10.	Comnet	Entitas sepengendali	Beban usaha - jasa telekomunikasi
11.	Menkominfo	Instansi Pemerintah	Pendapatan usaha - MIDI; beban usaha - jasa telekomunikasi
12.	Kopindosat	Koperasi Pegawai Perusahaan	Beban usaha - karyawan, beban umum dan administrasi
13.	INTI	Entitas sepengendali	Hutang pengadaan
14.	Jiwasraya	Entitas sepengendali	Pensiun dibayar di muka jangka panjang

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

No.	Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Hubungan	Sifat Saldo Akun/ Transaksi
15.	Manajemen senior	Karyawan kunci	Beban usaha - karyawan, biaya dibayar di muka - bagian yang belum diamortisasi dari uang muka perumahan dan transformasi, dan insentif transformasi
16.	Persada	Dibawah pengaruh signifikan yang sama	Beban usaha - karyawan dan beban jasa telekomunikasi
17.	PT Pembangunan Perumahan	Entitas sepengendali	Hutang pengadaan
18.	PLN	Entitas sepengendali	Beban usaha - jasa telekomunikasi
19.	Kas Negara	Instansi Pemerintah	Kewajiban tidak lancar lainnya
20.	Badan Pemerintahan	Instansi Pemerintah	Pendapatan usaha - MIDI
21.	Universitas Negeri	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - MIDI
22.	PT Angkasa Pura (Persero)	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - MIDI
23.	Badan Pusat Statistik	Instansi Pemerintah	Pendapatan usaha - MIDI
24.	PT Infomedia Nusantara	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - MIDI
25.	BMG	Instansi Pemerintah	Pendapatan usaha - MIDI
26.	PT Aneka tambang Tbk	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - MIDI
27.	PGN	Entitas sepengendali	Pendapatan usaha - MIDI
28.	UGBDN	Entitas sepengendali	Beban usaha - jasa telekomunikasi

27. PEMBAGIAN LABA DAN PEMBENTUKAN SALDO LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan, para pemegang saham Perusahaan antara lain memutuskan, untuk menetapkan penggunaan laba bersih tahunan untuk dana cadangan kerugian dan pembagian dividen kas, sebagai berikut, dan jumlah selebihnya dialokasikan untuk reinvestasi dan modal kerja.

Tanggal RUPS	Dana Cadangan (Rp)	Dividen per Saham (Rp)	Tanggal Pembayaran Dividen
Laba Bersih Tahun 2008			
11 Juni 2009	18.786	172,85	22 Juli 2009
Laba Bersih Tahun 2009			
22 Juni 2010	14.982	137,86	2 Agustus 2010

Pembayaran dividen kepada Pemerintah dilakukan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

28. DERIVATIF

Perusahaan menandatangani beberapa kontrak swap. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya (setelah penyesuaian risiko kredit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009:

	Jumlah Nosional (AS$)	Nilai Wajar (Rp)			
		2010		2009	
		Piutang	Hutang	Piutang	Hutang
Kontrak Swap Valuta Asing:					
a. Goldman Sachs International ("GSI") (*)	100.000	-	-	88.523	-
b. GSI (*)	25.000	-	-	-	10.033
c. GSI	75.000	50.866	-	70.588	-
d. StandChart	25.000	-	12.055	-	458
e. StandChart	25.000	-	1.731	12.003	-
f. StandChart	25.000	9.443	-	22.996	-
g. HSBC, Cabang Jakarta (**)	25.000	-	-	14.451	-
h. Merrill Lynch International Bank Limited, Cabang London ("MLIB")	50.000	-	2.234	-	7.058
i. MLIB	25.000	2.154	-	3.382	-
j. MLIB	25.000	3.778	-	5.541	-
k. DBS	25.000	3.093	-	1.619	-
l. GSI (***)	84.000	-	-	5.640	-
Sub-jumlah		**69.334**	**16.020**	**224.743**	**17.549**
Kontrak Swap Suku Bunga:					
m. HSBC, Cabang Jakarta	27.037 dengan jumlah menurun	-	13.100	-	11.842
n. HSBC, Cabang Jakarta	44.200 dengan jumlah menurun	-	29.027	-	30.144
o. GSI	100.000	-	90.273	-	80.840
p. DBS	25.000 dengan jumlah menurun	-	9.238	-	11.791
q. DBS	25.000 dengan jumlah menurun	-	9.343	-	10.959

(*) kontrak ditandatangani pada bulan Mei 2005 dan diselesaikan pada bulan November 2010
(**) kontrak ditandatangani pada bulan Agustus 2006 dan diselesaikan pada bulan November 2010
(***) kontrak ditandatangani pada bulan Desember 2008 dan diselesaikan pada bulan November 2010

28. DERIVATIF (lanjutan)

	Jumlah Nosional (AS$)	Nilai Wajar (Rp)			
		2010		2009	
		Piutang	Hutang	Piutang	Hutang
r. Bank of Tokyo MUFJ ("BTMUFJ")	25.000 dengan jumlah menurun	-	6.656	-	5.668
s. BTMUFJ	25.000 dengan jumlah menurun	-	5.885	-	4.327
t. BTMUFJ	25.000 dengan jumlah menurun	-	5.297	-	3.305
u. StandChart	40.000 dengan jumlah menurun	-	6.814	-	1.447
v. DBS	26.000 dengan jumlah menurun	-	4.966	-	3.699
w. DBS	26.000 dengan jumlah menurun	-	4.303	-	2.500
x. BTMUFJ	36.500 dengan jumlah menurun	-	7.347	-	6.758
y. ING Bank N.V.	25.000 dengan jumlah menurun	-	4.014	-	4.459
z. ING Bank N.V.	33.500	-	3.120	-	4.914
Sub-jumlah		**-**	**199.383**	**-**	**182.653**
Jumlah		**69.334**	**215.403**	**224.743**	**200.202**

Perubahan nilai wajar kontrak swap bersih dan derivatif melekat (Catatan 15e), pendapatan atau beban swap, pendapatan atau beban terminasi, dan penyelesaian dari instrumen derivatif sejumlah (Rp418.092) dan (Rp517.655) masing-masing pada tahun 2010 dan 2009, dibebankan ke "Rugi Perubahan Nilai Wajar Derivatif - Bersih" yang disajikan sebagai bagian dari Penghasilan (Beban) Lain-lain pada laporan laba rugi konsolidasi.

Berikut adalah rincian dari kontrak:

Kontrak Swap Valuta Asing

No.	*Counter-parties*	Periode Kontrak dan Jumlah Swap	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Pembayaran/ Amortisasi Premi Swap (Rp)	
					2010	2009
a.	GSI [(i)]	13 Mei 2005 - 5 November 2010 Jumlah swap sebesar Rp832.250 untuk AS$100.000	(i) Tingkat bunga tetap sebesar 6,96% per tahun untuk AS$50.000 dan (ii) tingkat bunga LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 2,62% per tahun untuk AS$50.000, dan dikurangi dengan (a) tingkat bunga LIBOR dolar A.S. 6 bulanan per tahun dikalikan dengan AS$11.750 selama periode 13 Mei 2005 sampai dengan 13 Mei 2008 dan (b) jumlah sebesar AS$11.750 pada tanggal 13 Mei 2008. Pada tanggal 14 Mei 2008, Perusahaan menerima pembayaran dalam jumlah tetap sebesar AS$11.750 (setara dengan Rp109.099) sehubungan dengan kontrak swap valuta asing dari GSI.	Setiap tanggal 5 Mei dan 5 November	46.136	54.116
b.	GSI [(ii)]	13 Mei 2005 - 5 November 2010 Jumlah swap sebesar Rp245.000 untuk AS$25.000	4,30% dari AS$25.000	Setiap tanggal 5 Mei dan 5 November	9.841	10.906

(i) Pada tanggal 5 November 2010, kontrak ini berakhir dan Perusahaan menerima laba penyelesaian kontrak swap valuta asing sebesar Rp59.929.
(ii) Pada tanggal 5 November 2010, kontrak ini berakhir dan Perusahaan membayar rugi penyelesaian kontrak swap valuta asing sebesar Rp21.881.

28. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Valuta Asing (lanjutan)

No.	*Counter-parties*	Periode Kontrak dan Jumlah Swap	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Pembayaran/ Amortisasi Premi Swap (Rp)	
					2010	2009
c.	GSI	22 Agustus 2005 - 22 Juni 2012 Perusahaan akan melakukan swap sebagai berikut: ■ AS$75.000 setara dengan AS$75.000 dikalikan dengan yang paling rendah antara kurs nilai tukar rupiah/AS$ dari periode 22 Agustus 2005 – 22 Juni 2012 jika kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih kecil dari atau setara dengan yang paling rendah dari nilai tukar rupiah/AS$ yang disebutkan di atas ditambah Rp4.300 (dalam jumlah penuh) ■ AS$75.000 setara dengan AS$75.000 dikalikan dengan kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi dikurangi Rp4.300 (dalam jumlah penuh) jika kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari yang terendah antara kurs nilai tukar rupiah/AS$ yang disebutkan di atas ditambah Rp4.300 (dalam jumlah penuh)	3,28% dari AS$75.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	22.866	24.357
d.	StandChart	11 Januari 2006 - 22 Juni 2012 Jumlah swap sebesar Rp236.250 untuk AS$25.000	4,78% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	11.034	11.791
e.	StandChart	15 Maret 2006 - 22 Juni 2012 Jumlah swap sebesar Rp228.550 untuk AS$25.000	3,75% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	8.657	9.250
f.	StandChart	12 Mei 2006 - 22 September 2012 Jumlah swap sebesar Rp217.500 untuk AS$25.000	3,45% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	7.964	8.510
g.	HSBC [iii]	8 Agustus 2006 - 5 November 2010 Jumlah swap sebesar Rp225.000 untuk AS$25.000	4,00% dari AS$25.000	Setiap tanggal 5 Mei dan 5 November	9.074	10.145
h.	MLIB	8 Agustus 2008 - 22 Juni 2012 Perusahaan akan menerima sebagai berikut: ■ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi kurang dari atau sama dengan Rp8.950 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$50.000 dikalikan dengan (1 - Rp8.950 dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$) (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp8.950, tetapi kurang dari atau sama dengan Rp11.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$50.000 dikalikan dengan (Rp11.000 - Rp8.950) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp11.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	4,22% dari AS$50.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	23.965	22.778

[iii] Pada tanggal 5 November 2010, kontrak ini berakhir dan Perusahaan membayar rugi penyelesaian kontrak swap valuta asing sebesar Rp2.550.

28. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Valuta Asing (lanjutan)

No.	*Counter-parties*	Periode Kontrak dan Jumlah Swap	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Pembayaran/ Amortisasi Premi Swap (Rp)	
					2010	2009
i.	MLIB	2 September 2008 - 12 Juni 2013 Perusahaan akan menerima sebagai berikut: ■ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi kurang dari atau sama dengan Rp8.800 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu sesuai kontrak dikalikan dengan (kurs spot rupiah/AS$ - Rp8.800) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp8.800, tetapi kurang dari atau sama dengan Rp12.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu sesuai kontrak dikalikan dengan (Rp3.200 dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$) (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp12.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	4,10% dari AS$25.000 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011, dan 4,10% dari jumlah dolar A.S. yang menurun sebagaimana telah diatur di dalam kontrak sampai dengan tanggal 12 Juni 2013	Setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember	11.852	11.230
j.	MLIB	8 September 2008 - 22 Juni 2012 Perusahaan akan menerima sebagai berikut: ■ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi kurang dari atau sama dengan Rp9.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$25.000 dikalikan dengan (1 - Rp9.000 dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$) (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp9.000, tetapi kurang dari atau sama dengan Rp11.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$25.000 dikalikan dengan (Rp11.000 - Rp9.000) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp11.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	2,52% dari AS$25.000	Setiap tanggal 22 Juni dan 22 Desember	7.156	6.801

28. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Valuta Asing (lanjutan)

No.	*Counter-parties*	Periode Kontrak dan Jumlah Swap	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Pembayaran/ Amortisasi Premi Swap (Rp)	
					2010	2009
k.	DBS	10 September 2008 - 12 Juni 2013 Perusahaan akan menerima sebagai berikut: ■ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal pembayaran sama dengan atau kurang dari Rp8.800 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan jumlah dolar A.S. pada tanggal pembayaran dikalikan dengan (kurs spot rupiah/AS$ - Rp8.800) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal pembayaran lebih besar dari Rp8.800, dan sama dengan atau kurang dari Rp12.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan jumlah dolar A.S. pada tanggal pembayaran dikalikan dengan (Rp12.000 - Rp8.800) dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$ (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal pembayaran lebih besar dari Rp12.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	3,945% dari AS$25.000 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011, dan 3,945% dari jumlah dolar A.S. yang menurun sesuai kontrak sampai dengan tanggal 12 Juni 2013	Setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember	9.044	9.980
l.	GSI [(iv)]	16 Desember 2008 - 5 November 2010 Perusahaan akan menerima sebagai berikut: ■ nol apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi kurang dari atau sama dengan Rp11.500 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$84.000 dikalikan dengan (kurs spot rupiah/AS$ - Rp11.500 dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$) (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp11.500, tetapi kurang dari atau sama dengan Rp15.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh) ■ sejumlah dolar A.S. tertentu yang setara dengan AS$84.000 dikalikan dengan (Rp3.500 dibagi dengan kurs spot rupiah/AS$) (dalam jumlah penuh), apabila kurs spot rupiah/AS$ pada tanggal terminasi lebih besar dari Rp15.000 terhadap AS$1 (dalam jumlah penuh)	Premi dibayar dimuka sebesar AS$9.500 (setara dengan Rp105.212) yang pembayarannya dilakukan secara penuh pada tanggal 19 Desember 2008. Premi ini (dibebankan pada biaya dibayar di muka) diamortisasi selama periode kontrak.	-	47.323	55.899

[(iv)] Pada tanggal 5 November 2010, kontrak ini berakhir dan Perusahaan menerima penyelesaian nol atas kontrak swap valuta asing.

28. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Valuta Asing (lanjutan)

Seluruh kontrak swap valuta asing dengan GSI (kontrak nomor a, b dan c) dirancang dengan memasukkan *credit-linkage* dengan Perusahaan sebagai entitas referensi dan dengan (i) kebangkrutan Perusahaan, (ii) kegagalan untuk melakukan pembayaran atas hutang tertentu atau (iii) restrukturisasi hutang tertentu sebagai peristiwa kredit *(credit events)* yang relevan. Atas terjadinya salah satu dari peristiwa kredit ini, kewajiban Perusahaan dan GSI yang timbul dari kontrak swap tersebut akan diterminasi tanpa pembayaran atau penyelesaian lebih lanjut dari atau ke masing-masing pihak, termasuk pembayaran oleh salah satu pihak atas nilai pasar dari kontrak swap tersebut.

Kontrak Swap Suku Bunga

No.	*Counter-parties*	Periode Kontrak	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Penghasilan (Beban) Swap yang Diterima (Dibayar) (Rp)	
					2010	2009
m.	HSBC	23 April 2008 - 27 November 2016	5,42% dari AS$27.037, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,45% per tahun	Setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober sampai dengan bulan Oktober 2009, dan setiap tanggal 27 Mei dan 27 November sampai dengan tanggal terminasi	(7.589)	(4.320)
n.	HSBC	23 April 2008 - 29 September 2019	4,82% dari AS$44.200, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. ditambah 0,35% per tahun	Setiap tanggal 28 Januari dan 28 Juli sampai dengan bulan Juli 2009, dan setiap tanggal 29 Maret dan 29 September sampai dengan tanggal terminasi	(16.920)	(7.309)
o.	GSI	2 September 2008 - 12 Juni 2013	(8,10% - *underlyer return*) dari AS$100.000 per tahun, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 10 Juni dan 10 Desember sampai dengan bulan Juni 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(39.332)	(24.051)
p.	DBS	5 September 2008 - 12 Juni 2013	5,625% dari AS$25.000 per tahun, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 10 Juni dan 10 Desember sampai dengan bulan Desember 2010, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(7.289)	(4.539)
q.	DBS	23 Oktober 2008 - 12 Juni 2013	5,28% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(6.676)	(2.106)
r.	BTMUFJ	1 Desember 2008 - 12 Juni 2013	4,46% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(4.778)	(1.107)
s.	BTMUFJ	4 Desember 2008 - 12 Juni 2013	4,25% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(4.291)	(935)

28. DERIVATIF (lanjutan)

Kontrak Swap Suku Bunga (lanjutan)

No.	*Counter-parties*	Periode Kontrak	Suku Bunga Premi Swap Tahunan	Tanggal Pembayaran Premi Swap	Jumlah Penghasilan (Beban) Swap yang Diterima (Dibayar) (Rp)	
					2010	2009
t.	BTMUFJ	12 Desember 2008 - 12 Juni 2013	4,09% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(3.921)	(835)
u.	StandChart	19 Desember 2008 - 12 Juni 2013	3,85% dari AS$40.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(5.384)	(504)
v.	DBS	22 Desember 2008 - 12 Desember 2012	4,02% dari AS$26.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(3.909)	(558)
w.	DBS	21 Januari 2009 - 12 Desember 2012	3,83% dari AS$26.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(3.451)	(302)
x.	BTMUFJ	2 Maret 2009 - 12 Juni 2012	4,10% dari AS$36.500, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(5.758)	(627)
y.	ING Bank N.V.	3 Maret 2009 - 12 Desember 2011	4,0094% dari AS$25.000, dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan setiap tanggal 12 Juni dan 12 Desember sampai dengan tanggal terminasi	(3.734)	(522)
z.	ING Bank N.V.	14 April 2009 - 12 Juni 2011	3,75% dari AS$33.500, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar A.S. 6 bulanan ditambah 1,85% per tahun	Setiap tanggal 25 Maret dan 25 September sampai dengan bulan Maret 2011, dan tanggal 12 Juni 2011	(4.199)	-

29. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pada tanggal 31 Desember 2010, ikatan pengeluaran barang modal yang merupakan perjanjian kontraktual yang belum terealisasi sehubungan dengan pengadaan dan instalasi aset tetap adalah sebesar AS$90.015 (Catatan 35j) dan Rp569.173.

Ikatan pengeluaran barang modal signifikan adalah sebagai berikut:

Tanggal Kontrak	Keterangan Kontrak	Pemasok	Nilai Kontrak/*Purchase Orders ("PO")* yang Telah Diterbitkan	Nilai Kontrak/PO yang Belum Dilaksanakan
10 Desember 2010	*The Procurement of Technology Upgrade for 2G and 3G Telecommunication Network in Kalimantan (lihat "b" dibawah)*	PT Nokia Siemens Networks and Nokia Siemens Networks Oy	AS$38.439	AS$17.959
16 Juni 2010	*The Procurement of Telco Infrastructure*	PT Nokia Siemens Networks dan Nokia Siemens Networks Oy	AS$106.655 dan Rp461.479	AS$13.344 dan Rp142.002
16 Mei 2007	*Supply of GSM Cellular Infrastructure*	PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy dan Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG.	AS$318.446 dan Rp1.385.390	AS$4.118 dan Rp55.310
20 April 2007	*Telecommunications Equipment Supply and Service*	PT Alcatel Lucent Indonesia dan Alcatel Shanghai Bell Co. Ltd.	AS$79.311 dan Rp679.301	AS$2.334 dan Rp41.105
3 April 2007	*Supply of GSM Infrastructure*	PT Ericsson Indonesia dan Ericsson AB	AS$383.104 dan Rp1.110.375	AS$358 dan Rp24.871

b. Pada tanggal 10 Desember 2010, Perusahaan bersama PT Nokia Siemens Networks dan Nokia Siemens Networks OY ("Nokia") setuju untuk menyatakan kembali dan mengubah perjanjian "*The Procurement of Technology Upgrade for 2G and 3G Telecommunication Network in Kalimantan*" yang ditandatangani pertama kali pada tanggal 30 Juni 2010. Berdasarkan perjanjian yang baru, Perusahaan setuju untuk menukar peralatan teknis selular tertentu yang berada di area Kalimantan dengan peralatan baru dari Nokia dengan jumlah AS$75.243 terdiri dari peralatan teknis selular dengan nilai buku AS$66.963 (dikurangi potongan harga sebesar AS$2.029) untuk 1.325 unit *Base Transceiver Station* (BTS) 2G, 24 unit *Base Station Controller* (BSC), 11 unit *Transcoders*, 66 unit peralatan *Node B* and 3 unit *Radio Network Controller* (RNC) dan membayar sebesar AS$6.251 ke Nokia untuk jasa pemasangan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, nilai tercatat dari peralatan teknis selular yang diserahkan (122 unit BTS 2G, 5 unit BSC, 25 unit peralatan Node B and 1 unit RNC) sejumlah Rp158.285 (Catatan 8). Perusahaan juga melakukan perikatan dengan Nokia untuk pengadaan peralatan tambahan dari Nokia dengan jumlah AS$11.708 sampai dengan akhir tahun 2012.

c. Pada tanggal 18 Agustus 2010, Perusahaan dan Telkom menandatangani sebuah nota kesepakatan tentang kerjasama pemanfaatan *filing* jaringan satelit pada slot orbit 150,5 derajat Bujur Timur. Kerjasama ini akan mencakup pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan satelit antara Perusahaan dan Telkom untuk memanfaatkan *filing* jaringan satelit pada slot orbit 150,5 derajat Bujur Timur setelah berakhirnya pengoperasian Satelit Palapa C-2 yang dimiliki oleh Perusahaan. Pengeluaran barang modal terkait kerjasama tersebut akan ditanggung secara pro rata antara Perusahaan dan Telkom.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan belum melakukan pengeluaran barang modal terkait dengan kerjasama tersebut.

29. PERJANJIAN DAN IKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Pada tanggal 29 Januari, 15 April, 24 Mei dan 3 Juni 2010, Perusahaan setuju untuk menyewakan menara telekomunikasi dan *sites* miliknya masing-masing kepada PT Hutchison CP Telecommunication ("Hutchison") selama jangka waktu 12 tahun, PT Natrindo Telepon Selular ("NTS") selama jangka waktu 10 tahun, PT XL Axiata Tbk ("XL Axiata", sebelumnya PT Excelcomindo Pratama atau "Excelcom") selama jangka waktu 10 tahun dan PT Berca Global Access ("Berca") selama jangka waktu 10 tahun. Hutchison, NTS dan XL Axiata (secara tahunan) dan Berca (secara tiga bulanan) diwajibkan membayar biaya sewa dan pemeliharaan di muka yang dicatat sebagai bagian dari pendapatan diterima di muka.

Perjanjian-perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhir dengan kondisi tertentu, seperti dinyatakan dalam perjanjian.

e. Pada tanggal 15 April 2010, Lintasarta, anak perusahaan, menandatangani perjanjian dengan Menkominfo-Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (Menkominfo-BTIP), dimana Lintasarta setuju untuk menyediakan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan (PLIK) untuk Paket Pekerjaan 7, 8 dan 9 yang meliputi provinsi-provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku dan Papua. Pada tanggal 22 Desember 2010, perjanjian-perjanjian tersebut diamandemen untuk meningkatkan nilai kontrak. Perjanjian tersebut meliputi empat tahun yang dimulai dari tanggal 15 Oktober 2010 dengan jumlah nilai kontrak masing-masing sebesar Rp91.895, Rp143.668 dan Rp116.721 untuk Paket Pekerjaan 7, 8 dan 9. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, Lintasarta telah menerima pembayaran uang muka dari Menkominfo-BTIP terkait dengan perjanjian sebesar Rp56.573 dan Rp11.739 yang masing-masing diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan diterima dimuka untuk bagian jangka pendek dan kewajiban tidak lancar lainnya untuk bagian jangka panjang. Sesuai dengan perjanjian, Lintasarta menempatkan deposito berjangka sejumlah Rp18.200 sebagai jaminan pelaksanaan untuk periode kontrak empat tahun yang diklasifikasikan sebagai bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya (Catatan 2c).

Pada tanggal 6 Mei 2010, Lintasarta menandatangani perjanjian dengan PT Wira Eka Bhakti (WEB), untuk pengadaan peralatan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan PLIK, sesuai kesepakatan dengan Menkominfo-BTIP diatas, dengan nilai kontrak sejumlah Rp189.704. Pada tanggal 20 Oktober 2010, perjanjian tersebut diamandemen untuk meningkatkan nilai kontrak menjadi Rp203.776. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, Lintasarta telah membayar uang muka kepada WEB sejumlah Rp39.107 dan Rp2.668, yang masing-masing diklasifikasikan sebagai uang muka untuk bagian jangka pendek dan uang muka jangka panjang untuk bagian jangka panjang.

Pada tanggal 12 Desember 2010, Lintasarta menandatangani perjanjian dengan Menkominfo-BTIP untuk menyediakan Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan Bergerak (PLIKB) untuk Paket Pekerjaan 2, 3, 11, 15, 16 dan 18 yang meliputi provinsi-provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Perjanjian tersebut meliputi empat tahun yang dimulai dari tanggal 22 Juni 2011 dengan jumlah nilai kontrak masing-masing sebesar Rp79.533, Rp92.003, Rp71.879, Rp84.583, Rp69.830 dan Rp60.149 untuk Paket Pekerjaan 2, 3, 11, 15, 16 dan 18. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, Lintasarta telah menerima pembayaran uang muka dari Menkominfo-BTIP terkait dengan perjanjian sebesar Rp9.725 dan Rp73.543, yang masing-masing diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan diterima di muka untuk bagian jangka pendek dan kewajiban tidak lancar lainnya untuk bagian jangka panjang.

29. PERJANJIAN DAN IKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Pada tanggal 25 Mei 2007, Perusahaan dan enam operator telekomunikasi lainnya menandatangani sebuah nota kesepakatan tentang pembangunan jaringan serat optik nasional Palapa Ring untuk bagian timur Indonesia ("Tahap I Proyek Palapa Ring") dimana Perusahaan akan menanggung sebesar 10% dari jumlah nilai proyek sebesar Rp3.000.000. Sebagai tambahan, para pihak juga sepakat untuk menanggung biaya persiapan dan implementasi ("biaya persiapan") dari Tahap I Proyek Palapa Ring secara sama rata sampai dengan jumlah sebesar Rp2.000. Jika biaya persiapan melebihi Rp2.000, maka akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh para pihak. Namun, salah satu operator telekomunikasi tersebut kemudian memutuskan untuk mundur dari proyek ini.

Pada tanggal 10 November 2007, Perusahaan dan lima operator telekomunikasi lainnya (termasuk Telkom, pihak yang mempunyai hubungan istimewa) menandatangani perjanjian konsorsium untuk pembangunan dan pemeliharaan Palapa Ring dimana Perusahaan setuju untuk menanggung 13,36% dari total biaya proyek sebesar AS$225.037. Perjanjian ini menggantikan nota kesepakatan sebelumnya.

Selanjutnya, tiga dari operator telekomunikasi lainnya juga tidak lagi bergabung dalam proyek ini. Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 2010, operator-operator telekomunikasi yang masih berkomitmen pada proyek ini adalah Perusahaan, Telkom dan Bakrie Telecom. Oleh karena itu, ikatan atas proyek ini sedang dievaluasi untuk mengakomodasi perubahan jumlah operator telekomunikasi yang berpartisipasi.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan telah membayar sejumlah AS$1.503 yang dicatat sebagai bagian dari aset keuangan tidak lancar lainnya.

g. Perusahaan dan IMM mempunyai ikatan untuk membayar biaya frekuensi radio tahunan sepanjang periode izin 3G dan BWA, selama Perusahaan dan IMM memegang izin 3G dan BWA (Catatan 1a). Jumlah pembayaran setiap tahun adalah berdasarkan skema pembayaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menkominfo No. 7/PER/M.KOMINFO/2/2006, No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 dan No. 237/KEP/M.KOMINFO/7/2009 masing-masing pada tanggal 8 Februari 2006, 1 September 2009 dan 27 Juli 2009.

h. Pada tanggal 20 Juli 2005, Perusahaan memperoleh fasilitas dari HSBC untuk mendanai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perusahaan. Fasilitas tersebut diamandemen pada tanggal 14 Mei 2007 untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo menjadi tanggal 28 Februari 2008. Pada tanggal 4 Desember 2009, fasilitas ini diamandemen kembali untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo menjadi tanggal 30 April 2010. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2010, fasilitas ini diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 30 April 2011. Fasilitas ini terdiri dari:

- Fasilitas *Overdraft* sebesar AS$2.000 (termasuk fasilitas *overdraft* dalam mata uang rupiah sebesar Rp17.000). Bunga dikenakan berdasarkan saldo harian sebesar 3,75% per tahun dan 6% per tahun di bawah suku bunga pinjaman terbaik HSBC *(HSBC Best Lending Rate)* masing-masing untuk pinjaman dalam mata uang rupiah dan dolar A.S.

- Fasilitas pinjaman *revolving* sebesar AS$30.000 (termasuk pinjaman *revolving* dalam mata uang rupiah sebesar Rp255.000). Pinjaman ini jatuh tempo dengan jangka waktu maksimum 180 hari dan dapat ditarik dalam beberapa *tranche* dengan nilai minimum sebesar AS$500 dan Rp500, masing-masing untuk pinjaman dalam mata uang dolar A.S. dan rupiah. Bunga dikenakan berdasarkan saldo harian sebesar 3% per tahun diatas suku bunga pinjaman HSBC *(HSBC Cost of Fund Rate)* masing-masing untuk pinjaman dalam mata uang rupiah atau dolar A.S.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini.

29. PERJANJIAN DAN IKATAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Pada tahun 1994, Perusahaan ditunjuk sebagai Administrator Keuangan [*Financial Administrator* ("FA")] oleh sebuah konsorsium yang didirikan untuk membangun dan menjual/menyewakan kabel laut *Asia Pacific Cable Network* ("APCN") untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sebagai FA, Perusahaan mengumpulkan dan mendistribusikan dana hasil penjualan *Indefeasible Right of Use* ("IRU"), *Defined Underwritten Capacity* ("DUC") dan *Occassional Commercial Use* ("OCU") APCN.

Dana penjualan IRU, DUC dan OCU serta dana yang diterima untuk meng-*upgrade* kabel APCN bukan merupakan milik Perusahaan dan oleh karena itu, tidak dicatat dalam pembukuan Perusahaan. Namun, Perusahaan mengelola dana ini dalam rekening terpisah.

Pada tanggal 31 Desember 2010, saldo dana (termasuk perolehan bunga) yang dalam pengelolaan Perusahaan berjumlah AS$5.428. Selain dana dari penjualan IRU, DUC dan OCU, anggota konsorsium juga akan menerima bagian mereka atas bunga yang diperoleh atas penempatan dana tersebut.

j. Perjanjian lain yang dibuat bersama Telkom adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan perjanjian kerjasama, kompensasi kepada Telkom sehubungan dengan jasa penyewaan sirkit/saluran, seperti *world link* dan *bit link* adalah sebesar 15% dari pendapatan tertagih Perusahaan yang berasal dari jasa tersebut.

  Perusahaan dan Satelindo juga menyewa sirkit dari Telkom untuk menghubungkan Jakarta, Medan dan Surabaya.

- Pada tahun 1994, Satelindo mengadakan perjanjian penyerahan penggunaan sebidang tanah hak pengelolaan ("*Land Transfer Agreement*") dengan Telkom untuk penyerahan penggunaan lahan tanah seluas 134.925 meter persegi yang berlokasi di Daan Mogot, Jakarta Barat, dimana terletak stasiun pengendali bumi (*earth control station*) milik Satelindo. Berdasarkan perjanjian tersebut, Satelindo berhak menggunakan lahan tanah untuk jangka waktu 30 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian, dengan harga setara AS$40.000 dikurangi Rp43.220. Jangka waktu perjanjian tersebut dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

  Perjanjian ini selanjutnya digantikan oleh perjanjian sewa tanah tanggal 6 Desember 2001, dengan syarat yang sama seperti perjanjian *land transfer agreement*.

- Pada tahun 1999, Lintasarta mengadakan perjanjian dengan Telkom, dimana Telkom menyewakan transponder kepada Lintasarta. Perjanjian ini telah mengalami beberapa amandemen, terakhir berdasarkan amandemen kesembilan tanggal 24 Mei 2010. Sewa transponder yang dibebankan pada usaha sebesar Rp27.547 dan Rp30.255 masing-masing pada tahun 2010 dan 2009 yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Usaha - Beban Jasa Telekomunikasi" dalam laporan laba rugi konsolidasi.

30. SISTEM TARIF

a. Jasa Telekomunikasi Internasional

Tarif jasa ("tarif") dengan perusahaan telekomunikasi internasional ditentukan berdasarkan peraturan telekomunikasi internasional yang dibuat oleh *International Telecommunications Union* ("ITU"). Peraturan ini mensyaratkan bahwa pengelola telekomunikasi internasional, berdasarkan perjanjian timbal balik, menyusun dan merevisi tarif perhitungan ("*accounting rate*") yang akan diterapkan, dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan jasa telekomunikasi spesifik dan rekomendasi dari *Consultative Committee on International Telegraph and Telephone* ("CCITT"). Tarif ini dibagi dalam porsi terminal yang dibayarkan kepada pengelola di negara terminal, dan bila harus melalui transit, dalam porsi transit yang dibayarkan kepada pengelola di negara transit.

ITU juga mengatur bahwa unit moneter yang digunakan, bila tidak diatur secara khusus dalam perjanjian, adalah Special Drawing Right ("SDR") atau Gold Franc, yang setara dengan 1/3,061 SDR. Tiap pengelola sesuai dengan hukum negaranya masing-masing, akan menentukan biaya yang akan ditagih dari pelanggan masing-masing.

Tarif yang ditagih kepada pelanggan telepon internasional di Indonesia, yang disebut juga tarif pungut, ditetapkan dengan surat keputusan Menhub, yang biasanya lebih tinggi dari tarif perhitungan. Selama periode 1996 sampai dengan 1998, Menhub telah melakukan perubahan tarif yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 1997, 15 Maret 1998 dan 15 November 1998.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/02/06 tanggal 28 Februari 2006, tarif pungut dihitung dengan formula tarif yang disebut formula *price cap* yang telah memperhitungkan indeks harga konsumen mulai tanggal 1 Januari 2007.

b. Jasa Selular

Tarif jasa telepon dasar melalui jaringan bergerak selular ditentukan berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 28 Februari 2006. Berdasarkan peraturan ini, tarif selular terdiri dari:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan

Penyelenggara jaringan bergerak selular harus mengimplementasikan tarif baru yang disebut sebagai "tarif bawah". Untuk biaya penggunaan, tarif bawah adalah biaya originasi ditambah biaya terminasi (jumlah biaya interkoneksi), sementara untuk biaya aktivasi dan biaya berlangganan bulanan, tarif bawah tergantung pada struktur biaya dari setiap penyelenggara jaringan bergerak selular.

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 mengenai tata cara penetapan tarif jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular. Berdasarkan peraturan baru ini, operator selular harus menerapkan tarif baru yang disebut batas harga ("*price cap*"). Jenis tarif untuk layanan telekomunikasi melalui jaringan selular terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
- Tarif jelajah
- Tarif jasa multimedia

Tarif retail seharusnya dihitung berdasarkan Biaya Elemen Jaringan, Biaya Aktivasi Layanan Retail dan Marjin Laba.

Penerapan tarif baru untuk penyelenggara telekomunikasi dominan wajib mendapat persetujuan dari Pemerintah. Penyelenggara telekomunikasi dominan adalah penyelenggara telekomunikasi yang memiliki pendapatan lebih dari 25% atas jumlah pendapatan industri pada segmen tertentu.

30. SISTEM TARIF (lanjutan)

b. Jasa Selular (lanjutan)

Mulai bulan Mei 2008, Perusahaan telah menerapkan secara penuh sistem tarif telekomunikasi selular baru ini.

c. Jasa Telekomunikasi Tetap

Pada bulan Februari 2006, Menkominfo mengeluarkan Peraturan No. 09/PER/M.KOMINFO/02/ 2006 mengenai tarif jasa teleponi dasar melalui jasa jaringan tetap.

Pada tanggal 30 April 2008, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menteri No. 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 mengenai tata cara penetapan tarif jasa teleponi yang disalurkan melalui jaringan tetap. Peraturan ini juga diterapkan untuk layanan telepon jaringan tetap nirkabel.

Berdasarkan peraturan baru ini, tarif untuk jasa teleponi dasar dan pesan singkat ("SMS") harus dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam Peraturan. Penyelenggara telekomunikasi jaringan tetap harus menerapkan tarif baru yang disebut batas harga ("*price cap*").

Mulai bulan Mei 2008, Perusahaan telah menerapkan secara penuh sistem tarif telekomunikasi tetap baru ini.

31. TARIF INTERKONEKSI

Tarif interkoneksi antar operator telekomunikasi dalam negeri ditetapkan berdasarkan Keputusan Menhub No. KM.108/PR.301/MPPT-94 tanggal 28 Desember 1994. Peraturan ini telah diperbaharui beberapa kali dengan perubahan terakhir Keputusan No. KM.37 Tahun 1999 ("Keputusan No. 37") tanggal 11 Juni 1999. Keputusan ini, bersama dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.46/PR.301/MPPT-98 ("Keputusan No. 46") tanggal 27 Februari 1998, menetapkan struktur dan besaran tarif interkoneksi antara jaringan telekomunikasi selular dengan PSTN, jaringan telekomunikasi selular dengan jaringan telekomunikasi internasional, jaringan telekomunikasi selular dengan jaringan telekomunikasi selular dalam negeri lainnya, jaringan telekomunikasi internasional dengan PSTN dan antara dua PSTN dalam negeri.

Berdasarkan keputusan Menhub, pengaturan tarif interkoneksi adalah sebagai berikut:

1. Struktur dan Besaran Tarif Interkoneksi

a. Antara internasional dengan PSTN lokal

Berdasarkan Keputusan No. 37 tanggal 11 Juni 1999, tarif interkoneksi adalah sebagai berikut:

	Tarif	Dasar Perhitungan
Tarif akses	Rp850 untuk setiap panggilan	Jumlah panggilan ke luar negeri *(outgoing)* dan dari luar negeri *(incoming)* yang berhasil tersambung
Tarif pemakaian	Rp550 untuk setiap menit percakapan	Jumlah waktu (durasi) percakapan dari panggilan ke luar negeri *(outgoing)* dan dari luar negeri *(incoming)* yang berhasil tersambung

31. TARIF INTERKONEKSI (lanjutan)

1. Struktur dan Besaran Tarif Interkoneksi (lanjutan)

b. Antara PSTN dalam negeri dan PSTN dalam negeri lainnya

Biaya interkoneksi untuk percakapan telekomunikasi dalam negeri (lokal dan SLJJ) antara PSTN dalam negeri dengan PSTN dalam negeri lainnya diatur dan disepakati bersama antara penyelenggara PSTN dalam negeri.

c. Antara STBS dan PSTN dalam negeri

Berdasarkan Keputusan No. 46 tanggal 27 Februari 1998 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 April 1998, tarif interkoneksi adalah sebagai berikut:

(1) Percakapan Lokal

Untuk percakapan lokal yang berasal dari STBS ke pelanggan PSTN, operator selular membayar operator PSTN sebesar 50% dari tarif percakapan lokal yang berlaku. Untuk percakapan lokal dari PSTN ke pelanggan selular, operator selular menerima biaya *airtime* yang dibebankan operator PSTN kepada pelanggannya.

(2) SLJJ

Untuk SLJJ yang berasal dari PSTN ke pelanggan selular, operator selular menerima sebagian tarif SLJJ, dengan proporsi berkisar mulai 15% dari tarif ditambah biaya airtime dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tidak diselenggarakan oleh operator selular tersebut, sampai dengan 60% dari tarif ditambah biaya airtime dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tersebut diselenggarakan oleh operator selular tersebut.

Untuk SLJJ yang berasal dari STBS ke pelanggan PSTN, operator selular berhak memperoleh sebagian tarif SLJJ, dengan proporsi berkisar mulai 15% dari tarif dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tidak diselenggarakan oleh operator selular tersebut, sampai dengan 60% dari tarif dalam hal seluruh bagian jarak jauh diselenggarakan oleh operator selular tersebut.

d. Antara STBS dan STBS lainnya

Berdasarkan Keputusan No. 46, tarif interkoneksi adalah sebagai berikut:

(1) Percakapan Lokal

Untuk percakapan lokal yang berasal dari STBS ke STBS lainnya, operator selular “asal” membayar biaya airtime kepada operator selular “tujuan”. Jika percakapan dilakukan melalui PSTN, operator selular asal membayar operator PSTN 50% dari tarif percakapan lokal yang berlaku.

(2) SLJJ

Untuk SLJJ yang berasal dari STBS, operator selular berhak memperoleh sebagian tarif SLJJ, dengan proporsi berkisar mulai 15% dari tarif dalam hal seluruh percakapan jarak jauh tidak diselenggarakan oleh operator selular tersebut, sampai dengan 85% dari tarif dalam hal seluruh percakapan jarak jauh diselenggarakan oleh operator selular tersebut dan percakapan ditujukan kepada operator selular lainnya, dan sampai dengan 100% jika percakapan ditujukan kepada operator selular yang sama.

31. TARIF INTERKONEKSI (lanjutan)

1. Struktur dan Besaran Tarif Interkoneksi (lanjutan)

   e. Antara PSTN internasional dengan STBS

      Mulai tahun 1998, tarif interkoneksi untuk percakapan selular internasional ke atau dari pelanggan selular luar negeri dari atau ke pelanggan selular dalam negeri, baik yang percakapannya dilakukan melalui PSTN dalam negeri maupun tidak, menggunakan tarif yang sama dengan percakapan melalui PSTN domestik sebagaimana disebutkan dalam catatan "a" di atas. Akan tetapi, berdasarkan kesepakatan bersama dengan operator telekomunikasi selular, Perusahaan (termasuk Satelindo sampai saat penggabungan - Catatan 1e) sampai dengan 31 Desember 2006 masih menggunakan perjanjian awal pembagian kontraktual untuk tarif interkoneksi (Catatan 32).

   f. Interkoneksi antar Sentral Gerbang Internasional

      Biaya interkoneksi untuk percakapan telekomunikasi internasional antar sentral gerbang internasional diatur dan disepakati bersama antara badan penyelenggara jasa telekomunikasi internasional dengan badan usaha patungan penyelenggara jasa telekomunikasi internasional.

2. USO

   Pada tanggal 30 September 2005, Menkominfo menerbitkan Peraturan No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 yang mengatur kebijakan program USO dan mengharuskan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia untuk memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari pendapatan kotor tahunan (setelah dikurangi piutang tak tertagih dan beban interkoneksi) untuk pengembangan USO.

   Menkominfo juga mengeluarkan Peraturan No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007, yang memberikan panduan tata cara provisi USO seperti mekanisme pelelangan, tarif, wilayah pelayanan USO dan persyaratan teknis.

   Pada tanggal 16 Januari 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 7 Tahun 2009, yang meningkatkan kontribusi untuk pengembangan USO dari 0,75% menjadi 1,25% dan menurunkan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dari 1% menjadi 0,50% dari pendapatan kotor tahunan (setelah dikurangi piutang tak tertagih dan biaya interkoneksi), efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

3. Pembagian Pendapatan

   Pendapatan dari tarif akses dan biaya pemakaian yang berasal dari percakapan telekomunikasi internasional yang melibatkan interkoneksi jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh beberapa penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri yang tidak diatur oleh Keputusan No. 08/PER/M.KOMINFO/02.2006, dibagi secara proporsional ke setiap penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri, dimana bagian pendapatan interkoneksi tersebut akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian bilateral diantara penyelenggara.

Keputusan No. 37 dan Keputusan No. 46 selanjutnya digantikan oleh Keputusan Menhub No. 32 Tahun 2004 mengenai interkoneksi berbasis biaya menggantikan perjanjian interkoneksi yang berbasis pembagian pendapatan. Berdasarkan keputusan baru tersebut, penyelenggara tujuan panggilan menetapkan biaya interkoneksi berdasarkan formula yang diputuskan oleh Pemerintah, yang mengharuskan penyelenggara telekomunikasi membebankan interkoneksi berdasarkan biaya menyelenggarakan panggilan tersebut.

31. TARIF INTERKONEKSI (lanjutan)

Tanggal berlaku efektif keputusan baru ini yang sebelumnya mulai tanggal 1 Januari 2005 ditunda sampai dengan tanggal 1 Januari 2007 berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tanggal 8 Februari 2006 (Catatan 32).

Penerapan tagihan interkoneksi antara penyelenggara telekomunikasi dimulai dari perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Semua perjanjian interkoneksi harus mengacu pada Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") (*Reference Interconnection Offer)*. Semua penyelenggara telekomunikasi harus menerbitkan DPI dan penyelenggara telekomunikasi dominan harus mendapat persetujuan dari Pemerintah.

Pada tanggal 4 Agustus 2006, DJPT mengeluarkan keputusan No. 278/DIRJEN/2006 yang menyetujui DPI yang berasal dari Perusahaan dan dua penyelenggara telekomunikasi dominan lainnya (Telkom dan Telkomsel). Keputusan ini diterapkan efektif mulai tanggal 1 Januari 2007 yang disepakati oleh semua penyelenggara telekomunikasi dan disetujui oleh Pemerintah. Pada tanggal 11 April 2008, DJPT menyetujui diberlakukannya DPI yang baru dari penyelenggara telekomunikasi dominan (Telkom, Telkomsel dan Perusahaan). DJPT mengharuskan agar seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri mengubah perjanjian interkoneksi agar sesuai dengan DPI baru mulai tanggal 1 April 2008. Pada tanggal 1 April 2008, Perusahaan telah menerapkan tarif interkoneksi yang baru berdasarkan DPI yang disetujui.

Namun, pada tanggal 31 Desember 2010, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengeluarkan surat No. 227/BRTI/XII/2010 tentang penerapan tarif interkoneksi baru berdasarkan implementasi biaya interkoneksi berbasis biaya, yang akan digunakan oleh semua operator telekomunikasi efektif 1 Januari 2011.

32. PERJANJIAN INTERKONEKSI

Perusahaan (termasuk Satelindo dan IM3 sampai dilakukan merger - Catatan 1e) mengadakan perjanjian interkoneksi dengan operator-operator dalam negeri dan luar negeri. Beberapa perjanjian interkoneksi yang signifikan adalah sebagai berikut:

1. Telkom

   Perjanjian/transaksi interkoneksi yang signifikan dengan Telkom adalah sebagai berikut:

   a. Pelayanan telekomunikasi tetap

      Pada tanggal 23 September 2005, Perusahaan dan Telkom mengadakan perjanjian interkoneksi jaringan tetap lokal, jarak jauh dan internasional. Hal-hal pokok yang dicakup dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

      - Interkoneksi antara jaringan tetap lokal, jarak jauh dan internasional Perusahaan dan Telkom yang memungkinkan pelanggan jasa telekomunikasi tetap Perusahaan untuk melakukan atau menerima panggilan ke atau dari pelanggan atau sentral gerbang internasional Telkom.
      - Jasa panggilan internasional Perusahaan dan Telkom dapat diakses dan terus menerus terbuka pada jaringan tetap kedua belah pihak.
      - Perusahaan dan Telkom bertanggung jawab atas sarana telekomunikasi masing-masing.
      - Kompensasi untuk jasa yang disediakan didasarkan pada tarif interkoneksi yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

32. PERJANJIAN INTERKONEKSI (lanjutan)

1. Telkom (lanjutan)

   a. Pelayanan telekomunikasi tetap (lanjutan)

   - Masing-masing pihak melakukan penagihan atas jasa panggilan internasional pihak lainnya yang digunakan oleh pelanggan pihak lainnya. Masing-masing pihak harus membayar kepada pihak lainnya 1% dari penerimaan tagihan yang dilakukan oleh pihak lainnya, ditambah biaya proses penagihan sebesar Rp82 *per record of outgoing call* sebagai kompensasi atas proses penagihan. Namun, biaya penerimaan tagihan dan proses penagihan tersebut diubah menjadi biaya layanan ("*service charge*"), yang dihitung sebesar Rp1.250 per menit dari *outgoing call* berlaku mulai 1 April 2008. Berdasarkan perjanjian terakhir, biaya layanan diubah menjadi Rp1.200 per menit dari *outgoing call* mulai tanggal 1 Januari 2009.

   Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Telkom menandatangani nota kesepakatan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru sesuai dengan peraturan interkoneksi berbasis biaya yang efektif mulai tanggal 1 Januari 2007. Nota kesepakatan ini diubah menjadi perjanjian tanggal 18 Desember 2007. Perjanjian ini telah diamandemen beberapa kali. Amandemen terakhir adalah tanggal 30 Desember 2009 (Catatan 35c).

   b. Jasa Selular

   Pada tanggal 1 Desember 2005, Perusahaan dan Telkom menandatangani perjanjian interkoneksi antara jaringan bergerak selular Perusahaan dengan jaringan tetap Telkom. Berdasarkan perjanjian tersebut, interkoneksi antara jaringan bergerak selular Perusahaan dengan jaringan tetap Telkom memungkinkan pelanggan selular Perusahaan untuk melakukan atau menerima panggilan ke atau dari pelanggan telekomunikasi tetap Telkom.

   Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Telkom menandatangani nota kesepakatan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru sesuai dengan peraturan interkoneksi berbasis biaya yang efektif mulai tanggal 1 Januari 2007. Nota kesepakatan ini diubah menjadi perjanjian tanggal 18 Desember 2007. Perjanjian ini diamandemen beberapa kali. Amandemen terakhir adalah tanggal 30 Desember 2009.

2. XL Axiata Tbk, PT Mobile-8 Telecom Tbk ("Mobile-8") dan Telkomsel

   Hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

   - Interkoneksi antara sentral gerbang internasional Perusahaan dan Satelindo dengan jaringan STBS operator tersebut untuk melakukan percakapan internasional dari atau ke luar negeri melalui sentral gerbang internasional Perusahaan dan Satelindo.
   - Perusahaan dan Satelindo menerima sebagian pendapatan operator tersebut dari percakapan yang dilakukan melalui sentral gerbang internasional Perusahaan dan Satelindo sebagai kompensasi atas interkoneksi tersebut.
   - Satelindo dan IM3 juga mengadakan perjanjian dengan operator tersebut di atas untuk interkoneksi STBS GSM milik Satelindo dan IM3 dengan jaringan operator tersebut, yang memungkinkan pelanggan operator tersebut melakukan panggilan/mengirim SMS kepada atau menerima panggilan/SMS dari pelanggan Satelindo dan IM3.
   - Perjanjian ini dapat diperbaharui setiap tahun.

32. PERJANJIAN INTERKONEKSI (lanjutan)

2. XL Axiata Tbk, PT Mobile-8 Telecom Tbk ("Mobile-8") dan Telkomsel (lanjutan)

   Perusahaan (termasuk Satelindo dan IM3 sampai saat penggabungan - Catatan 1e) dan operator di atas masih tetap melakukan perhitungan berdasarkan perjanjian tersebut dengan menerapkan perhitungan kompensasi semula, kecuali untuk biaya interkoneksi.

   Pada tanggal 8, 27 dan 28 Desember 2006, Perusahaan menandatangani nota kesepakatan masing-masing dengan Telkomsel, Mobile-8 dan XL Axiata mengenai penerapan tarif interkoneksi baru berbasis biaya yang efektif pada tanggal 1 Januari 2007 sesuai dengan Peraturan Menkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 (Catatan 2n). Nota kesepakatan dengan masing-masing Mobile-8, XL Axiata dan Telkomsel digantikan dengan perjanjian masing-masing pada tanggal 14 September, 17 dan 19 Desember 2007. Perjanjian dengan Mobile-8 dan XL Axiata diamandemen pada tanggal 31 Maret 2008, sedangkan perjanjian dengan Telkomsel diamandemen pada tanggal 18 Februari 2008. Lebih lanjut, perjanjian dengan Telkomsel telah diamandemen pada tanggal 7 September 2010.

3. PT Bakrie Telecom Tbk ("Bakrie Telecom")

   Hal-hal yang diatur dalam amandemen terakhir dari perjanjian tanggal 10 Juni 2009 adalah yang berhubungan dengan interkoneksi antara jaringan selular bergerak dan sentral gerbang internasional Perusahaan dengan jaringan Bakrie Telecom, termasuk jaringan SLI 009 (Catatan 35c).

Pendapatan (beban) interkoneksi - bersih dari (kepada) operator tersebut adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Telkom	169.389	142.514
Mobile-8	10.455	11.841
Telkomsel	(158.860)	(131.127)
XL Axiata	(103.125)	(71.339)
Bakrie Telecom	(5.381)	(8.103)
Beban bersih	**(87.522)**	**(56.214)**

33. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan dan Anak Perusahaan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya dalam tiga segmen dilaporkan: selular, telekomunikasi tetap dan MIDI. Segmen usaha diatur secara terpisah karena masing-masing menawarkan jasa/produk yang berbeda dan melayani pasar yang berbeda pula. Perusahaan dan Anak Perusahaan hanya beroperasi dalam satu wilayah geografis, oleh karena itu informasi segmen geografis tidak disajikan.

Hasil segmen dan aset segmen termasuk pos-pos yang dapat diatribusikan secara langsung maupun yang dialokasikan dengan dasar yang memadai. Pengeluaran untuk aset segmen adalah jumlah pengeluaran selama periode berjalan untuk memperoleh aset segmen yang penggunaannya diharapkan lebih dari satu tahun.

33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi konsolidasi menurut segmen industri adalah sebagai berikut:

	Segmen Utama			
	Selular	Telekomunikasi Tetap	MIDI	Jumlah Segmen
2010				
Pendapatan usaha				
Pendapatan dari pelanggan eksternal	16.027.062	1.293.177	2.476.276	19.796.515
Pendapatan antar segmen	-	-	563.726	563.726
Jumlah pendapatan usaha	16.027.062	1.293.177	3.040.002	20.360.241
Eliminasi pendapatan antar segmen				(563.726)
Pendapatan usaha - bersih				**19.796.515**
Penghasilan				
Laba (rugi) usaha	2.745.063	(34.495)	763.376	3.473.944
Laba kurs - bersih				492.401
Pendapatan bunga				143.402
Beban pendanaan				(2.271.628)
Rugi perubahan nilai wajar derivatif - bersih				(418.092)
Beban pajak penghasilan				(357.798)
Amortisasi goodwill				(226.380)
Lain-lain - bersih				(111.830)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan				**724.019**
Informasi Lainnya				
Aset segmen	45.875.021	2.020.957	8.459.948	56.355.926
Aset yang tidak dapat dialokasikan				4.264.808
Eliminasi aset antar segmen				(7.802.547)
Aset - bersih				**52.818.187**
Kewajiban segmen	27.195.689	630.442	3.250.615	31.076.746
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan				9.724.480
Eliminasi kewajiban antar segmen				(6.219.525)
Kewajiban - bersih				**34.581.701**
Pengeluaran barang modal	4.455.608	210.770	848.611	5.514.989
Penyusutan dan amortisasi	5.052.691	297.334	801.886	6.151.911

33. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

	Segmen Utama			
	Selular	Telekomunikasi Tetap	MIDI	Jumlah Segmen
2009				
Pendapatan usaha				
Pendapatan dari pelanggan eksternal	14.300.163	1.803.039	2.720.984	18.824.186
Pendapatan antar segmen	-	-	515.961	515.961
Jumlah pendapatan usaha	14.300.163	1.803.039	3.236.945	19.340.147
Eliminasi pendapatan antar segmen				(515.961)
Pendapatan usaha - bersih				**18.824.186**
Penghasilan				
Laba usaha	2.003.034	330.401	879.580	3.213.015
Laba kurs - bersih				1.656.407
Pendapatan bunga				138.951
Beban pendanaan				(1.872.967)
Beban pajak penghasilan				(677.265)
Rugi perubahan nilai wajar derivatif - bersih				(517.655)
Amortisasi goodwill				(235.420)
Lain-lain - bersih				(150.338)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan				**1.554.728**
Informasi Lainnya				
Aset segmen	43.871.953	2.606.166	7.776.333	54.254.452
Aset yang tidak dapat dialokasikan				5.740.701
Eliminasi aset antar segmen				(4.953.666)
Aset - bersih				**55.041.487**
Kewajiban segmen	31.678.430	1.028.375	3.748.888	36.455.693
Kewajiban yang tidak dapat dialokasikan				3.840.474
Eliminasi kewajiban antar segmen				(3.542.963)
Kewajiban - bersih				**36.753.204**
Pengeluaran barang modal	9.661.360	579.862	1.343.327	11.584.549
Penyusutan dan amortisasi	4.585.081	335.270	641.039	5.561.390

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

A. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko ekuitas, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko-risiko tersebut telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

A. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. *Exposure* Perusahaan dan Anak Perusahaan terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan hutang jangka panjang dan hutang obligasi mereka dengan suku bunga mengambang.

Kebijakan Perusahaan terkait dengan risiko suku bunga adalah sebagai berikut:
(1) Mengelola biaya bunga melalui kombinasi hutang dengan suku bunga tetap dan variabel. Perusahaan mengevaluasi perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar uang. Berdasarkan penilaian manajemen, pembiayaan baru akan ditentukan harganya pada suku bunga tetap atau mengambang, dan
(2) Mengelola *exposure* atas suku bunga yang berasal dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi dengan menandatangani kontrak swap suku bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2010, lebih dari 60% hutang Perusahaan dan Anak Perusahaan berada pada suku bunga tetap.

Beberapa kontrak swap suku bunga ditandatangani untuk melindungi nilai suku bunga mengambang dari hutang dalam mata uang dolar A.S. Kontrak ini dicatat sebagai transaksi yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai, dimana perubahan nilai wajar akan dikreditkan atau dibebankan langsung pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga, dimana semua variabel lainnya dianggap tetap, terhadap laba bersih konsolidasi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (melalui dampak atas hutang dengan suku bunga mengambang yang didasarkan pada suku bunga LIBOR untuk hutang dalam dolar A.S. dan suku bunga JIBOR untuk hutang dalam Rupiah).

Kenaikan/penurunan basis poin:	
Dolar A.S.	31
Rupiah	41

Dampak terhadap laba bersih konsolidasi untuk tahun berjalan:	
Dolar A.S.	AS$1.445 (setara dengan Rp12.994)
Rupiah	Rp9.490

Manajemen melakukan survei di antara bank-bank Perusahaan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga LIBOR dan JIBOR sampai dengan tanggal pelaporan Perusahaan berikutnya pada tanggal 31 Maret 2011. Perkiraan tersebut adalah suku bunga LIBOR dan JIBOR dapat bergerak 31 dan 41 basis poin, masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah daripada suku bunga pada akhir triwulan keempat 2010.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

A. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko suku bunga (lanjutan)

Jika suku bunga LIBOR menjadi 31 basis poin lebih tinggi atau lebih rendah daripada suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2010, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, maka laba bersih konsolidasi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan ekuitas konsolidasi masing-masing akan menjadi Rp634.180 atau Rp660.168 dan Rp17.837.652 atau Rp17.863.640, yang lebih rendah atau lebih tinggi dari hasil aktual untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh beban bunga yang lebih tinggi atau lebih rendah atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Jika suku bunga JIBOR menjadi 41 basis poin lebih tinggi atau lebih rendah daripada suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2010, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, maka laba bersih konsolidasi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan ekuitas konsolidasi masing-masing akan menjadi Rp637.684 atau Rp656.664 dan Rp17.841.156 atau Rp17.860.136, yang lebih rendah atau lebih tinggi dari hasil aktual untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh beban bunga yang lebih tinggi atau lebih rendah atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. *Exposure* Perusahaan dan Anak Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi, piutang usaha, hutang usaha dan hutang pengadaan dalam mata uang dolar A.S.

Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, Perusahaan menandatangani beberapa kontrak swap valuta asing dan instrumen lainnya yang diperbolehkan. Kontrak ini dicatat sebagai transaksi yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai, dimana perubahan nilai wajar dikreditkan atau dibebankan langsung pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Akun hutang usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan terutama merupakan hutang bersih dari pembayaran dalam mata uang asing kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri, sedangkan sebagian besar akun piutang usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan merupakan tagihan dalam mata uang rupiah Indonesia dari penyelenggara telekomunikasi dalam negeri.

Apabila penurunan nilai tukar mata uang rupiah Indonesia berlanjut melemah dari nilai tukar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2010, kewajiban Perusahaan dan Anak Perusahaan berupa hutang jangka panjang dan hutang obligasi, hutang usaha dan hutang pengadaan akan meningkat dalam mata uang rupiah Indonesia. Namun, kenaikan kewajiban ini akan dihapus oleh peningkatan nilai deposito berjangka dan piutang usaha dalam mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2010, sebanyak 17,90% dari hutang Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam mata uang dolar A.S. dilindungi dari risiko nilai tukar mata uang asing dengan menandatangani beberapa kontrak swap valuta asing.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

A. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan aset dan kewajiban konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam mata uang dolar A.S. pada tanggal 31 Desember 2010:

	2010	
	Dolar A.S.	**Rupiah ***
Aset:		
Kas dan setara kas	111.782	1.005.042
Piutang		
Usaha	115.530	1.038.726
Lain-lain	544	4.893
Aset derivatif	7.711	69.334
Aset keuangan lancar lainnya	1.715	15.418
Piutang hubungan istimewa	117	1.047
Aset keuangan tidak lancar lainnya	1.427	12.833
Jumlah asset	**238.826**	**2.147.293**
Kewajiban:		
Hutang usaha	32.788	294.797
Hutang pengadaan	246.615	2.217.320
Biaya masih harus dibayar	46.263	415.953
Uang muka pelanggan	1.477	13.275
Kewajiban derivatif	23.958	215.403
Kewajiban keuangan lancar lainnya	67	602
Kewajiban lancar lainnya	6.124	55.058
Hutang jangka panjang (termasuk bagian jangka pendek)	886.602	7.971.436
Hutang obligasi (termasuk bagian jangka pendek)	650.000	5.844.150
Kewajiban tidak lancar lainnya	8.730	78.494
Jumlah kewajiban	**1.902.624**	**17.106.488**
Posisi kewajiban bersih	**1.663.798**	**14.959.195**

** Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan dolar A.S. ke rupiah adalah sebesar Rp8.991 per AS$1 (dalam jumlah penuh) yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010.*

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam nilai tukar mata uang dolar A.S., dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, terhadap laba bersih konsolidasi Perusahaan untuk tahun berjalan:

Perubahan dalam nilai tukar dolar A.S.	2%
Pengaruh pada laba bersih konsolidasi pada tahun berjalan	(224.388)

Manajemen melakukan survei di antara bank-bank Perusahaan untuk mendapatkan perkiraan mengenai nilai tukar mata uang dolar A.S. sampai dengan tanggal pelaporan Perusahaan berikutnya pada tanggal 31 Maret 2011. Perkiraan tersebut adalah bahwa nilai tukar mata uang dolar A.S. dapat menguat sebesar 2% dibandingkan dengan nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2010.

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

A. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Jika nilai tukar mata uang dolar A.S. menguat sebesar 2% dibandingkan dengan nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2010, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, maka laba bersih konsolidasi Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 akan menjadi Rp422.786 yang lebih rendah dari hasil aktual terutama disebabkan rugi selisih kurs - bersih konsolidasi atas penjabaran kewajiban bersih dalam mata uang dolar A.S.

Risiko harga ekuitas

Investasi jangka panjang Perusahaan dan Anak Perusahaan terutama terdiri dari investasi minoritas dalam ekuitas perusahaan swasta Indonesia dan perusahaan asing. Sehubungan dengan perusahaan Indonesia dimana Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki investasi, kinerja keuangan perusahaan tersebut kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan dan Anak Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perusahaan dan Anak Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Perusahaan dan Anak Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang ragu-ragu.

Tabel di bawah menunjukkan maksimum *exposure* risiko kredit untuk komponen dalam laporan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2010.

	Maximum Exposure **Bruto (1)**	***Maximum Exposure*** **Neto (2)**
Pinjaman yang diberikan dan piutang:		
Kas dan setara kas	2.075.270	2.075.270
Piutang		
Usaha - bersih	1.548.426	1.548.426
Lain-lain - bersih	10.031	10.031
Aset keuangan lancar lainnya	53.119	53.119
Piutang hubungan istimewa - bersih	8.421	8.421
Aset keuangan tidak lancar lainnya	77.675	77.675
Kelompok diperdagangkan:		
Swap valuta asing	69.334	69.334
Investasi tersedia-untuk-dijual:		
Investasi jangka panjang lainnya - bersih	2.730	2.730
Jumlah	**3.845.006**	**3.845.006**

(1) aset keuangan bruto sebelum memperhitungkan agunan yang ditahan atau pemutakhiran (enhancement) *kredit lain atau perjanjian saling hapus* (offsetting).
(2) aset keuangan bruto setelah memperhitungkan agunan yang ditahan atau pemutakhiran (enhancement) *kredit lain atau perjanjian saling hapus* (offsetting).

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

A. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perusahaan dan Anak Perusahaan menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas Perusahaan dan Anak Perusahaan secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal terkait dengan perluasan bisnis telekomunikasi. Bisnis telekomunikasi Perusahaan dan Anak Perusahaan membutuhkan modal yang substansial untuk membangun dan memperluas infrastruktur selular dan jaringan data dan untuk mendanai operasional, khususnya pada tahap pengembangan jaringan. Meskipun Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki jaringan infrastruktur yang substansial, Perusahaan dan Anak Perusahaan berharap untuk menambah pengeluaran barang modal terutama berfokus pada pengembangan jaringan selular di daerah yang diantisipasi mereka sebagai daerah dengan pertumbuhan tinggi, serta untuk meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan yang ada.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan dan Anak Perusahaan memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan Anak Perusahaan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perusahaan dan Anak Perusahaan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadual jatuh tempo hutang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana. Kegiatan ini meliputi pinjaman bank, ekuitas hutang dan penerbitan ekuitas pasar modal.

Tabel di bawah ini merupakan jadual jatuh tempo kewajiban keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan.

	Akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember							
	2011	2012	2013	2014	2015 dan sesudahnya	Jumlah	Diskon/ beban emisi hutang dan biaya solicitation	Nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2010
Hutang usaha	645.505	-	-	-	-	645.505	-	645.505
Hutang pengadaan	3.644.467	-	-	-	-	3.644.467	-	3.644.467
Biaya masih harus dibayar	1.710.885	-	-	-	-	1.710.885	-	1.710.885
Uang muka pelanggan	50.279	-	-	-	-	50.279	-	50.279
Kewajiban derivatif	215.403	-	-	-	-	215.403	-	215.403
Kewajiban keuangan lancar lainnya	23.127	-	-	-	-	23.127	-	23.127
Hutang hubungan istimewa	-	22.099	-	-	-	22.099	-	22.099
Hutang jangka panjang								
Dalam rupiah	634.933	2.022.483	434.300	-	-	3.091.716	(25.125)	3.066.591
Dalam dolar A.S.	2.549.587	1.192.411	2.015.736	545.059	1.668.643	7.971.436	(187.076)	7.784.360
Jumlah hutang jangka panjang	3.184.520	3.214.894	2.450.036	545.059	1.668.643	11.063.152	(212.201)	10.850.951
Hutang obligasi								
Dalam rupiah	1.100.000	41.989	1.330.000	2.358.000	2.662.000	7.491.989	(29.353)	7.462.636
Dalam dolar A.S.	-	-	-	-	5.844.150	5.844.150	(94.551)	5.749.599
Jumlah hutang obligasi	1.100.000	41.989	1.330.000	2.358.000	8.506.150	13.336.139	(123.904)	13.212.235
Jumlah	**10.574.186**	**3.278.982**	**3.780.036**	**2.903.059**	**10.174.793**	**30.711.056**	**(336.105)**	**30.374.951**

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

B. JAMINAN

Hutang jangka panjang Lintasarta, anak perusahaan, yang diperoleh dari CIMB Niaga, dijamin dengan seluruh peralatan (Catatan 8, 15g dan 15i) yang dibeli oleh Lintasarta dari hasil fasilitas kredit tersebut. Tidak terdapat persyaratan dan kondisi signifikan lainnya terkait dengan penggunaan jaminan.

Perusahaan sendiri tidak memiliki jaminan pada tanggal 31 Desember 2010.

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

a. Pada tanggal 1 Januari 2011, Lintasarta membayar cicilan terakhir sebesar Rp4.933 Fasilitas Kredit Investasi 5 dari CIMB Niaga (Catatan 15i).

b. Pada tanggal 7 Januari 2011, Perusahaan membayar sisa kurang bayar pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun pajak 2008 dan 2009 berdasarkan STP dari DJP sejumlah Rp41.863 (Catatan 13).

c. Pada tanggal 11 Januari 2011 dan 9 Februari 2011, Perusahaan setuju untuk melakukan amandemen terhadap perjanjian interkoneksi terakhir masing-masing dengan Telkom dan Bakrie Telecom (Catatan 32) untuk memenuhi ketentuan dalam surat BRTI No. 227/BRTI/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 mengenai penerapan tarif interkoneksi baru pada tahun 2011.

d. Pada tanggal 20 Januari 2011, Dewan Direksi Perusahaan mengeluarkan Keputusan Direksi No. 003/Direksi/2011 mengenai Program Restrukturisasi Organisasi melalui penawaran program berdasarkan persetujuan kedua belah pihak antara Perusahaan dan karyawan-karyawan tertentu (Skema Pemisahan Sukarela / *Voluntary Separation Scheme*) yang efektif pada tanggal yang sama.

e. Pada tanggal 4 Februari 2011, Perusahaan dan PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel") menandatangani perjanjian penyewaan menara. Mitratel dapat menyewakan kembali menara Perusahaan kepada Telkom dan Telkomsel dengan tambahan biaya untuk infrastruktur akan ditanggung oleh Mitratel.

f. Pada tanggal 8 Februari 2011, Perusahaan mengadakan RUPS Luar Biasa yang menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan (sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2012) dan Dewan Direksi Perusahaan (sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2015).

g. Pada tanggal 10 Februari 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* berjangka dengan BCA dengan jumlah maksimum Rp1.000.000 untuk membiayai pengeluaran barang modal Perusahaan dan/atau keperluan umum Perusahaan. Fasilitas ini akan tersedia dari tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan 10 Februari 2014 dan penarikan pinjaman akan dikenakan tingkat bunga JIBOR berjangka 1 bulanan ditambah 1,4% per tahun.

h. Pada tanggal 10 Februari 2011, SKAGEN AS meningkatkan kepemilikannya di Perusahaan menjadi 5,15%.

i. Pada tanggal 10 Februari 2011, Perusahaan setuju untuk menyewakan sebagian menara telekomunikasi dan *sites* kepada PT First Media Tbk (FM) untuk masa 5 tahun. FM diharuskan untuk membayar biaya sewa dan perawatan di muka setiap tengah tahunan.

35. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

j. Pada tanggal 10 Februari 2011, kurs yang berlaku adalah Rp8.924 untuk AS$1 (dalam jumlah penuh), sementara pada tanggal 31 Desember 2010, kurs yang berlaku adalah Rp8.991 untuk AS$1 (dalam jumlah penuh). Apabila menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 10 Februari 2011, Perusahaan dan Anak Perusahaan memperoleh laba kurs sekitar Rp111.474 (tidak termasuk dampak penilaian kembali kontrak derivatif pada tanggal 10 Februari 2011) atas kewajiban dalam mata uang asing, setelah dikurangi aset dalam mata uang asing, pada tanggal 31 Desember 2010 (Catatan 34).

Penjabaran kewajiban dalam mata uang asing, setelah dikurangi aset dalam mata uang asing, tidak dapat ditafsirkan bahwa kewajiban dan aset dalam mata uang asing ini telah, telah dapat, atau akan dapat dikonversikan ke rupiah di masa depan dengan kurs Rupiah pada dolar A.S. pada tanggal 31 Desember 2010 atau kurs lainnya.

Ikatan untuk pengeluaran barang modal dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2010 seperti yang diungkapkan dalam Catatan 29a akan menjadi sekitar Rp803.294 jika dijabarkan dengan kurs pada tanggal 10 Februari 2011.

36. PERKEMBANGAN TERKINI YANG MEMPENGARUHI STANDAR AKUNTANSI

Berikut ini adalah ringkasan standar akuntansi revisi dan interpretasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan tetapi belum efektif pada tanggal 31 Desember 2010:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- SAK 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”, menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.

- SAK 2 (Revisi 2009), “Laporan Arus Kas”, mensyaratkan penyediaan informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan selama suatu periode.

- SAK 3 (Revisi 2010), “Pelaporan Keuangan Interim”, menetapkan isi minimum dari laporan keuangan interim dan prinsip pengakuan dan pengukuran laporan keuangan yang disajikan untuk periode interim.

- SAK 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri”, diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

- SAK 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi”, mensyaratkan informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

36. PERKEMBANGAN TERKINI YANG MEMPENGARUHI STANDAR AKUNTANSI (lanjutan)

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 (lanjutan):

- SAK 7 (Revisi 2010), "Pihak-pihak Berelasi", mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak yang berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Penerapan dini diperkenankan.

- SAK 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan", menetapkan kapan suatu entitas harus menyesuaikan laporan keuangan untuk peristiwa setelah periode pelaporan dan pengungkapan yang harus dibuat Perusahaan terkait tanggal dimana laporan diotorisasi untuk dipublikasikan dan peristiwa setelah periode pelaporan. SAK ini juga mensyaratkan suatu entitas untuk tidak menyiapkan laporan keuangan dengan basis berkelangsungan jika peristiwa setelah periode pelaporan menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha ini tidak terpenuhi.

- SAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi-transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan suatu entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam suatu mata uang pelaporan.

- SAK 15 (Revisi 2009), "Investasi Pada Entitas Asosiasi", diterapkan untuk akuntansi investasi dalam entitas asosiasi dan menggantikan SAK 15 (1994), "Akuntansi untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi" dan SAK 40 (1997), "Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi".

- SAK 19 (Revisi 2010), "Aset Tak Berwujud", menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam SAK lain. SAK ini mensyaratkan untuk mengakui aset tak berwujud jika, dan hanya jika, kriteria tertentu dipenuhi, dan juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tak berwujud dan menentukan pengungkapan yang berhubungan.

- SAK 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi, keandalan dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan dampaknya.

- SAK 23 (Revisi 2010), "Pendapatan", mengidentifikasikan keadaan saat kriteria mengenai pengakuan pendapatan akan terpenuhi, sehingga pendapatan dapat diakui. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan.

- SAK 25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", menentukan kriteria untuk pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan koreksi kesalahan.

- SAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkan dan jika terjadi penurunan nilai pada aset tersebut, rugi penurunan nilai harus diakui.

36. PERKEMBANGAN TERKINI YANG MEMPENGARUHI STANDAR AKUNTANSI (lanjutan)

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011 (lanjutan):

- SAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi", bertujuan untuk mengatur kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang tepat diterapkan untuk provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

- SAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan", mengatur akuntansi untuk aset yang dimiliki untuk dijual, serta penyajian dan pengungkapan atas operasi yang dihentikan.

- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") 7, "Konsolidasi - Entitas Bertujuan Khusus", diterapkan ketika sebuah entitas bertujuan khusus ("SPE") harus dikonsolidasi oleh perusahaan pelapor berdasarkan prinsip-prinsip konsolidasi dalam SAK 4. Dalam ISAK 7, Perusahaan harus mengkonsolidasikan SPE ketika, secara substansi, Perusahaan mempunyai kendali atas SPE tersebut.

- ISAK 9, "Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi dan Liabilitas Serupa", diterapkan terhadap setiap perubahan pengukuran atas aktivitas purna-operasi, restorasi atau liabilitas yang serupa yang diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap sesuai SAK 16 dan sebagai liabilitas sesuai SAK 57.

- ISAK 10, "Program Loyalitas Pelanggan", diterapkan untuk kredit penghargaan loyalitas pelanggan yang diberikan kepada pelanggan sebagai bagian dari transaksi penjualan, dan tergantung pemenuhan atas setiap kondisi lebih lanjut yang dipersyaratkan, pelanggan dapat menukar kredit untuk barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga di masa yang akan datang.

- ISAK 17, "Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai", mensyaratkan bahwa entitas tidak membalik rugi penurunan nilai yang diakui pada periode interim sebelumnya berkaitan dengan goodwill atau investasi pada instrumen ekuitas atau aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

- SAK 18 (Revisi 2010), "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya", mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini melengkapi SAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".

- SAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja", mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja.

- SAK 34 (Revisi 2010), "Akuntansi Kontrak Konstruksi", mengatur perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi.

- SAK 46 (Revisi 2010), "Akuntansi Pajak Penghasilan", mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan; serta transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan.

- SAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.

36. PERKEMBANGAN TERKINI YANG MEMPENGARUHI STANDAR AKUNTANSI (lanjutan)

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 (lanjutan):

- SAK 53 (Revisi 2010), "Pembayaran Berbasis Saham", mengatur pelaporan keuangan entitas yang melakukan transaksi pembayaran berbasis saham.

- SAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", mensyaratkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan; dan jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut.

- SAK 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah", diterapkan untuk akuntansi, dan pengungkapan, atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah.

- ISAK 15, "SAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya", memberikan pedoman bagaimana menilai pembatasan jumlah surplus dalam program imbalan pasti yang dapat diakui sebagai aset dalam SAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".

- ISAK 18, "Bantuan Pemerintah - Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi", menetapkan bantuan pemerintah kepada entitas yang memenuhi definisi hibah pemerintah dalam SAK 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah", bahkan jika tidak ada persyaratan yang secara spesifik terkait dengan aktivitas operasi entitas selain persyaratan untuk beroperasi pada daerah atau sektor industri tertentu.

- ISAK 20, "Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham", membahas bagaimana suatu entitas memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan karena perubahan dalam status pajaknya atau pemegang sahamnya.

Perusahaan dan Anak Perusahaan sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari standar yang direvisi dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasinya.

37. REKLASIFIKASI AKUN

Berikut adalah akun-akun pada laporan keuangan konsolidasi tahun 2009 yang direklasifikasi untuk memungkinkan daya banding akun-akun tersebut pada laporan keuangan konsolidasi tahun 2010:

Dilaporkan sebelumnya	Diklasifikasikan kembali	Jumlah	Alasan
Piutang - lain-lain	Piutang usaha - pihak ketiga	28.428	Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian di tahun 2010
Aset lancar lainnya	Aset keuangan lancar lainnya	35.173	Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan penyajian dalam SAK 50 (Revisi 2006)

37. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

Dilaporkan sebelumnya	Diklasifikasikan kembali	Jumlah	Alasan
Aset tidak lancar lainnya	Sewa dibayar di muka jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	735.185	Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian di tahun 2010
	Aset keuangan tidak lancar lainnya	84.160	Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan penyajian dalam SAK 50 (Revisi 2006)
Kewajiban lancar lainnya	Kewajiban keuangan lancar lainnya	43.721	Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan penyajian dalam SAK 50 (Revisi 2006)
Biaya masih harus dibayar	Kewajiban lancar lainnya	58.171	Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan penyajian dalam SAK 50 (Revisi 2006)
Kewajiban tidak lancar lainnya	Kewajiban imbalan kerja - setelah dikurangi bagian jangka pendek	825.714	Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian di tahun 2010
	Kewajiban lancar lainnya	3.112	Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan persyaratan penyajian dalam SAK 50 (Revisi 2006)
Pendapatan usaha - selular	Beban usaha - beban jasa telekomunikasi	217.421	Reklasifikasi sebagai dampak dari pencabutan SAK 35
Pendapatan usaha - telekomunikasi tetap	Beban usaha - beban jasa telekomunikasi	213.749	Reklasifikasi sebagai dampak dari pencabutan SAK 35
	Pendapatan usaha - selular	154.140	Reklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian di tahun 2010

38. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang diselesaikan pada tanggal 10 Februari 2011.

Reconciliations/Reclassifications of Indonesian GAP to IFRS as of December 31, 2010

Tabel berikut ("Tabel Rekonsiliasi") menyajikan rekonsiliasi antara laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2010 dan laporan pendapatan komprehensif konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 untuk masing-masing perbedaan antara laporan keuangan berdasarkan IFRS dan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan PSAK.

Rekonsiliasi antara laporan posisi keuangan konsolidasi berdasarkan PSAK dan IFRS yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2010:

	PSAK	Rekonsiliasi / Reklasifikasi	IFRS
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2.075.270	-	2.075.270
Investasi jangka pendek - bersih	-	-	-
Piutang			
Usaha	1.548.426	-	1.548.426
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa-setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	222.506	-	222.506
Pihak ketiga-setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	1.325.920	-	1.325.920
Lain-lain	10.031	-	10.031
Persediaan - bersih	105.885	-	105.885
Aset derivatif	69.334	-	69.334
Uang muka	67.273	-	67.273
Pajak dibayar dimuka	701.560	(701.560)	-
Piutang pajak	-	479.786	479.786
Biaya dibayar dimuka	1.527.254	-	1.527.254
Aset keuangan lancar lainnya	53.119	-	53.119
Aset lancar lainnya	702	221.774	222.476
Jumlah Aset Lancar	**6.158.854**	**-**	**6.158.854**
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang hubungan istimewa - bersih	8.421	-	8.421
Aset pajak tangguhan - bersih	95.018	-	95.018
Investasi pada perusahaan asosiasi	-	-	-
Investasi jangka panjang lainnya	2.730	-	2.730
Aset tetap - bersih	43.571.010	(81.609)	43.489.401
Goodwill dan aset tak berwujud lainnya - bersih	1.374.060	689.117	2.063.177
Sewa dibayar dimuka jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	750.472	-	750.472
Izin dibayar dimuka jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	397.708	-	397.708
Uang muka jangka panjang	216.643	-	216.643
Pensiun dibayar dimuka jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	111.344	-	111.344
Piutang jangka panjang	45.911	-	45.911
Aset keuangan tidak lancar lainnya	77.675	-	77.675
Aset tidak lancar lainnya	8.341	-	8.341
Jumlah Aset Tidak Lancar	**46.659.333**	**607.508**	**47.266.841**

	PSAK	Rekonsiliasi / Reklasifikasi	IFRS
JUMLAH ASET	**52.818.187**	**607.508**	**53.425.695**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang usaha	645.505	-	645.505
Hutang pengadaan	3.644.467	-	3.644.467
Hutang pajak	169.445	(145.656)	23.789
Biaya masih harus dibayar	1.710.885	-	1.710.885
Pendapatan diterima dimuka	1.143.852	(36.938)	1.106.914
Uang muka pelanggan	50.279	-	50.279
Kewajiban derivatif	215.403	-	215.403
Bagian jangka pendek dari:			
Hutang jangka panjang	3.184.147	-	3.184.147
Hutang obligasi	1.098.131	-	1.098.131
Kewajiban keuangan lancar lainnya	23.127	-	23.127
Kewajiban lancar lainnya	61.612	145.656	207.268
Jumlah Kewajiban Lancar	**11.946.853**	**(36.938)**	**11.909.915**
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Hutang hubungan istimewa	22.099	-	22.099
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	1.772.337	178.969	1.951.306
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:	7.666.804	-	7.666.804
Hutang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek:	12.114.104	-	12.114.104
Kewajiban imbalan kerja - setelah dikurangi bagian jangka pendek	872.407	-	872.407
Kewajiban tidak lancar lainnya	187.097	-	187.097
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	**22.634.848**	**178.969**	**22.813.817**
JUMLAH KEWAJIBAN	**34.581.701**	**142.031**	**34.723.732**
HAK MINORITAS	**385.840**	**(385.840)**	-
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK PERUSAHAAN			
Modal saham	543.393	-	543.393
Agio saham	1.546.587	-	1.546.587

	PSAK	Rekonsiliasi / Reklasifikasi	IFRS
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	134.446	-	134.446
Belum ditentukan penggunaannya	15.224.843	466.930	15.691.773
Komponen ekuitas lainnya	401.377	-	401.377
Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perusahaan	**17.850.646**	**466.930**	**18.317.576**
Kepentingan non-pengendali	385.840	(1.453)	384.387
JUMLAH EKUITAS	**18.236.486**	**465.477**	**18.701.963**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**52.818.187**	**607.508**	**53.425.695**
PENDAPATAN USAHA			
Selular	16.027.062	(159.971)	15.867.091
MIDI	2.476.276	11.834	2.488.110
Telekomunikasi tetap	1.293.177	-	1.293.177
Jumlah Pendapatan Usaha	**19.796.515**	**(148.137)**	**19.648.378**
BEBAN USAHA			
Beban jasa telekomunikasi	7.113.410	-	7.113.410
Penyusutan dan amortisasi	6.151.911	10.940	6.162.851
Karyawan	1.411.244	-	1.411.244
Pemasaran	986.019	(206.827)	779.192
Administrasi dan umum	659.987	-	659.987
Jumlah Beban Usaha	**16.322.571**	**(195.887)**	**16.126.684**
LABA USAHA	**3.473.944**	**47.750**	**3.521.694**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Laba selisih kurs - bersih	492.401	-	492.401
Pendapatan bunga	143.402	-	143.402
Beban pendanaan	(2.271.628)	-	(2.271.628)
Rugi perubahan nilai wajar derivatif bersih	(418.092)	(30.739)	(448.831)
Amortisasi goodwill	(226.380)	226.380	-
Lain-lain - bersih	(111.830)	-	(111.830)
Beban Lain-lain - Bersih	**(2.392.127)**	**195.641**	**(2.196.486)**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**1.081.817**	**243.391**	**1.325.208**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Tahun berjalan	(128.171)	-	(128.171)
Tangguhan	(229.627)	(64.540)	(294.167)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**(357.798)**	**(64.540)**	**(422.338)**

	PSAK	Rekonsiliasi / Reklasifikasi	IFRS
LABA TAHUN BERJALAN	**724.019**	**178.851**	**902.870**
LABA KOMPREHENSIF LAIN-LAIN			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	(6.795)	(6.795)
Efek pajak	-	1.699	1.699
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan - bersih	**-**	**(5.096)**	**(5.096)**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF - bersih	**724.019**	**173.755**	**897.774**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Perusahaan	647.174	177.463	824.637
Kepentingan non-pengendali	76.845	1.388	78.233
Jumlah	**724.019**	**178.851**	**902.870**
LABA KOMPREHENSIF LAIN-LAIN - bersih YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Perusahaan	-	(5.096)	(5.096)
Kepentingan non-pengendali	-	-	-
Jumlah	**-**	**(5.096)**	**(5.096)**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF - bersih YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Perusahaan	647.174	172.367	819.541
Kepentingan non-pengendali	76.845	1.388	78.233
Jumlah	**724.019**	**173.755**	**897.774**

Rekonsiliasi antara laporan keuangan berdasarkan PSAK dan IFRS ini tidak mempunyai dampak yang material terhadap laporan arus kas konsolidasi.

Rekonsiliasi:

a. Hak atas Tanah

Menurut SAK, hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan. Beban sehubungan dengan perolehan ijin pemerintah untuk menggunakan tanah (seperti biaya notaris, pajak dan biaya lainnya) harus diamortisasi selama perkiraan masa pemakaian hak atas tanah yang diperoleh dari Pemerintah, yang dalam hal Perusahaan, berkisar antara 20 sampai 30 tahun.

Sebelum 1 Januari 2010, berdasarkan IFRS, biaya perolehan hak atas tanah dan beban lain sehubungan dengan perolehan hak atas tanah di kapitalisasi sebagai sewa tanah di bayar di muka, dan diamortisasi selama masa sewa yang diperoleh dari Pemerintah yang berkisar antara 20 sampai 30 tahun.

Berdasarkan amandemen IAS 17 (bagian dari Improvements Project), sejak 1 Januari 2010, Perusahaan dan Anak Perusahaan mengklasifikasikan sewa tanah sebagai sewa pembiayaan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam laporan keuangan. Perusahaan dan Anak Perusahaan menerapkan amandemen ini secara retrospektif dan melakukan amortisasi atas sewa tanah selama 50 tahun (sewa tanah awal selama 30 tahun ditambah satu kali perpanjangan selama 20 tahun).

b. Goodwill

Menurut SAK, goodwill diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaatnya.

Menurut IFRS yang diterbitkan IASB, nilai tercatat dari goodwill pada tanggal 1 Januari 2008 adalah nilai tercatat menurut SAK pada tanggal tersebut. Setelah tanggal tersebut, goodwill tidak diamortisasi tetapi subjek dari penelaahan penurunan nilai yang diharuskan dalam IAS 36 "Impairment of Assets", setelah tanggal transisi.

c. Pengakuan Pendapatan

Menurut SAK, sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, pendapatan dari aktivasi dan instalasi diakui sebagai pendapatan pada saat penyambungan selesai dilakukan (untuk layanan pasca-bayar) atau pada saat aktivasi kartu perdana oleh pelanggan (untuk layanan pra-bayar). Sejak 1 Januari 2010, komponen aktivasi dari penjualan paket perdana telah ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama rata-rata masa hubungan yang diharapkan dengan pelanggan. Perubahan kebijakan akuntansi ini merupakan dampak dari pencabutan PSAK 35 yang berlaku secara prospektif.

Menurut IFRS yang diterbitkan IASB, pendapatan dari aktivasi dan instalasi harus ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyambungan selesai dilakukan (untuk layanan pasca-bayar) atau pada saat aktivasi kartu perdana oleh pelanggan (untuk layanan pra-bayar). Sejak 1 Januari 2010, tidak terdapat rekonsiliasi untuk aktivasi dan instalasi, kecuali pengakuan pendapatan dari saldo pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2009.

d. Penyesuaian Risiko Kredit

Menurut SAK, sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan dalam menentukan nilai wajar instrumen derivatif, tidak menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi kewajiban keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen tidak diperhitungkan. Sejak 1 Januari 2010, Perusahaan memperhitungkan risiko kredit berdasarkan SAK 55 (Revisi 2006).

Menurut IFRS yang diterbitkan IASB, Perusahaan dalam menentukan nilai wajar instrumen derivatif, menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi kewajiban keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan. Sejak 1 Januari 2010, tidak terdapat rekonsiliasi untuk penyesuaian risiko kredit, kecuali yang dihasilkan dari pembalikan saldo per 31 Desember 2009.

e. Komisi Penjualan untuk Agen Penjual (Dealer)

Menurut SAK, apabila Perusahaan menerima, atau akan menerima, suatu manfaat yang teridentifikasi sebagai pertukaran atas imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada agen penjual, dan nilai wajar dari manfaat imbalan tersebut dapat diestimasi secara wajar, maka imbalan akan dicatat sebagai beban pemasaran.

Menurut IFRS yang diterbitkan IASB, imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada agen penjual dicatat sebagai pengurang pendapatan berdasarkan alokasi imbalan yang di peroleh secara sistematik dan rasional dan diklaim oleh agen penjual atas semua perkembangan transaksi penjualan untuk memperoleh imbalan. Bagian imbalan penjualan yang terkait dengan pendapatan yang belum dapat diakui disajikan sebagai pengurang pendapatan diterima di muka.

Reklasifikasi:

Beberapa akun direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan keperluan penyajian IFRS pada laporan keuangan 2010. Hal-hal berikut ini mendiskusikan reklasifikasi yang signifikan:

a. Menurut SAK, hak minoritas disajikan di luar bagian ekuitas pada lapopran posisi keuangan konsolidasi, dimana menurut IFRS, hak minoritas disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

b. Format penyajian yang berbeda digunakan untuk laporan pendapatan komprehensif konsolidasi sebagai hasil dari penerapan IAS 1 (Revisi), yang memperkenalkan penggunaan laporan pendapatan komprehensif. Perubahan pada ekuitas minoritas pada tahun berjalan seperti translasi valuta asing dan perubahan ekuitas perusahaan asosiasi/anak perusahaan, yang diperlihatkan dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasi berdasarkan SAK dan IFRS, sekarang disajikan sebagai pendapatan komprehensif lainnya dalam laporan pendapatan komprehensif konsolidasi. Menurut IFRS, laporan perubahan ekuitas hanya berisi rincian transaksi dengan pemilik perusahaan, dengan perubahan pada ekuitas minoritas disajikan dalam rekonsiliasi pada setiap komponen dari ekuitas.

c. Menurut SAK, pajak dibayar di muka dan hutang pajak terdiri dari piutang dan hutang terkait dengan Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan lainnya.

   Menurut IFRS, pajak dibayar di muka dan hutang pajak hanya terdiri dari pajak dalam negeri dan luar negeri berdasarkan penghasilan kena pajak dan pajak ditahan, yang terhutang oleh anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan joint venture yang dilaporkan oleh entitas pelapor (reporting entity). Semua piutang dan hutang pajak lainnya dicatat sebagai aset lancar lainnya atau kewajiban lancar lainnya.

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP LAPORAN TAHUNAN 2010

Laporan Tahunan 2010 ini berikut perhitungan tahunan/laporan keuangan dan informasi lain yang terkait di dalamnya dipersiapkan oleh PT Indosat Tbk.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Indosat Tbk membubuhkan tanda tangannya masing-masing dibawah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Informasi keuangan yang dilaporkan di sini disusun berdasarkan prinsip akuntasi yang berlaku di Indonesia dan pada bagian-bagian tertentu mencakup beberapa perkiraan yang dibuat berdasarkan estimasi maupun penilaian terbaik oleh Direksi PT Indosat Tbk.

DEWAN KOMISARIS

Sheikh Abdulla Mohammed S.A. Al Thani
Komisaris Utama

Dr. Nasser Mohammed Marafih
Komisaris

Richard Farnsworth Seney
Komisaris

Rachmat Gobel
Komisaris

Rionald Silaban
Komisaris

Parikesit Suprapto
Komisaris

Soeprapto S.I.P
Komisaris Independen

Alexander Rusli
Komisaris Independen

George Thia Peng Heok
Komisaris Independen

Chris Kanter
Komisaris Independen

DIREKSI

Harry Sasongko Tirtotjondro
President Director and
Chief Executive Officer

Peter Wladyslaw Kuncewicz
Director and
Chief Financial Officer

Stephen Edward Hobbs
Director and
Chief Technology Officer

Fadzri Sentosa
Director and Chief Wholesale
and Infrastructure Officer

Laszlo Imre Barta
Director and
Chief Commercial Officer

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN TAHUNAN
DALAM FORMAT 20-F

(Filed with the US-Securities and Exchange Commission)

DAFTAR ISI

		Halaman
DEFINISI, ATURAN UMUM DAN INFORMASI UMUM		299
FORWARD-LOOKING STATEMENTS		299
DAFTAR ISTILAH		300
BAGIAN I		
Butir 1:	IDENTITAS DIREKSI, MANAJEMEN SENIOR DAN PENASIHAT	305
Butir 2:	STATISTIK YANG DIAJUKAN DAN PERKIRAAN JADWAL	305
Butir 3:	INFORMASI PENTING	305
Butir 4:	INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN	331
Butir 5:	ANALISA OPERASIONAL DAN KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA	369
Butir 6:	DIREKTUR, MANAJEMEN SENIOR DAN KARYAWAN	402
Butir 7:	PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	412
Butir 8:	INFORMASI KEUANGAN	414
Butir 9:	PENAWARAN DAN PENCATATAN	419
Butir 10:	INFORMASI TAMBAHAN	422
Butir 11:	PENGUNGKAPAN DARI SEGI KUANTITATIF DAN KUALITATIF RISIKO PASAR	436
Butir 12:	PENJELASAN TENTANG EFEK SELAIN DARI EFEK EKUITAS	441
BAGIAN II		
Butir 13:	CIDERA JANJI YANG BELUM DIBAYAR DAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN	442
Butir 14:	PERUBAHAN MATERIAL TERHADAP HAK PEMEGANG EFEK DAN PENGGUNAAN HASIL	442
Butir 15:	PENGAWASAN DAN PROSEDUR	442
Butir 16A:	AHLI KEUANGAN DARI KOMITE AUDIT	443
Butir 16B:	KODE ETIK	443
Butir 16C:	BIAYA DAN JASA AKUNTAN	443
Butir 16D:	PENGECUALIAN DARI STANDAR PENCATATAN UNTUK KOMITE AUDIT	444
Butir 16E:	PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS OLEH PERUSAHAAN DAN PIHAK TERAFILIASI	445
Butir 16F:	PERUBAHAN DALAM PENDAFTARAN AKUNTAN BERSERTIFIKAT	445
Butir 16G:	TATA KELOLA PERUSAHAAN (*CORPORATE GOVERNANCE*)	445
BAGIAN III		
Butir 17:	LAPORAN KEUANGAN	446
Butir 18:	LAPORAN KEUANGAN	446

DEFINISI, ATURAN UMUM DAN INFORMASI UMUM

Kecuali dinyatakan lain, istilah "Perusahaan", "Indosat" dan "kami" di dalam Laporan Tahunan dalam Format 20-F ("Format 20-F") ini merujuk pada PT Indosat Tbk dan anak-anak perusahaan terkonsolidasi. Semua istilah "Indonesia" merujuk pada negara Republik Indonesia. Semua istilah "Pemerintah" merujuk pada Pemerintah Republik Indonesia. Istilah "Amerika Serikat" atau "AS" merujuk pada negara Amerika Serikat. Istilah "Inggris" merujuk pada Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara. Istilah "Rupiah" atau "Rp" merujuk pada mata uang yang sah dari negara Indonesia dan istilah "dolar AS" atau "US$" merujuk pada mata uang yang sah dari negara Amerika Serikat. Beberapa angka (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk kemudahan, dan oleh karenanya setiap jumlah, perbandingan, persentase dan rasio dapat berbeda.

Laporan keuangan konsolidasi kami pada tanggal 1 Januari 2009 dan 31 Desember 2009 dan 2010, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 yang terlampir dalam laporan tahunan ini telah kami persiapkan sesuai dengan *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standards Board* ("IASB"). Laporan keuangan konsolidasi kami pada tanggal 1 Januari 2009 dan 31 Desember 2009 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 yang termasuk dalam laporan tahunan ini mencakup penyajian kembali posisi keuangan konsolidasi kami dan penyajian pendapatan komprehensif dan laporan perubahan ekuitas konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2009, untuk memenuhi perubahan kebijakan akuntansi tentang kontrak sewa yang diperinci dalam Catatan 2g di dalam laporan keuangan konsolidasi kami yang termasuk di dalam laporan tahunan ini. Sebelum 1 Januari 2010, berdasarkan IFRS, biaya untuk membeli hak atas tanah, serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan akuisisi tersebut dikapitalisasi dan dicatat sebagai sewa hak atas tanah dibayar dimuka dan diamortisasi selama sepanjang periode hak penggunaan tanah yang diberikan oleh Pemerintah, yang berkisar antara 20 sampai dengan 30 tahun. Sejak 1 Januari 2010, berdasarkan perubahan pada IAS 17, kami mengklasifikasikan sewa tanah sebagai pembiayaan dan menyajikannya sebagai aset tetap dalam laporan keuangan kami. Kami menerapkan perlakuan retroaktif terhadap perubahan akuntansi ini, dan mengamortisasi sewa tanah kami selama periode 50 tahun.

Semata-mata untuk memudahkan para pembaca, sejumlah nilai dalam mata uang Rupiah telah dikonversi menjadi dolar AS dengan nilai tukar tertentu. Kecuali dinyatakan lain, informasi keuangan dalam mata uang dolar AS untuk nilai-nilai dalam mata uang Rupiah telah dikonversi berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2010, yaitu Rp8.991 untuk US$1,00. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dolar AS pada tanggal 20 April 2011 adalah Rp8.657 untuk US$1,00. Federal Reserve Bank of New York untuk keperluan pabean tidak menetapkan nilai tukar beli siang hari untuk transfer dalam mata uang Rupiah. Kami tidak membuat pernyataan apapun bahwa mata uang Rupiah maupun dolar AS yang tercantum di dalam Format 20-F ini seharusnya dapat atau dapat dikonversi menjadi dolar AS atau Rupiah, yang berlaku, dengan nilai tukar tertentu atau apapun. Lihat "Butir 3: Informasi Penting—Informasi tentang Nilai Tukar" untuk informasi lebih lanjut mengenai nilai tukar Rupiah atau dolar AS.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Format 20-F ini memuat "*forward-looking statements*" (pernyataan mengenai proyeksi di masa mendatang), sebagaimana didefinisikan dalam Section 27A of the Securities Act, Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana diubah atau "Exchange Act" dan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act of 1995, yang meliputi pernyataan-pernyataan mengenai proyeksi kami untuk kinerja operasi dan prospek Bisnis Perusahaan di masa mendatang. Kata-kata seperti "yakin," "harap," "antisipasi," "estimasi," "perkiraan," dan kata-kata serupa merupakan *forward-looking statements*. Selain itu, semua pernyataan kecuali pernyataan tentang fakta historis yang dimuat dalam Format 20-F ini merupakan *forward-looking statements*. Meskipun kami yakin bahwa proyeksi yang tercermin dalam *forward-looking statements* di dalam Format 20-F adalah wajar, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa proyeksi tersebut akan terbukti benar adanya. *Forward looking statements* ini dapat dipengaruhi oleh beberapa risiko dan ketidakpastian, termasuk perubahan lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. "Butir 3: Informasi Penting—Faktor-faktor Risiko" dan di bagian lain dari Format 20-F ini menjelaskan faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil yang sebenarnya menjadi sangat berbeda dengan proyeksi kami.

DAFTAR ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah-istilah teknis di bawah ini dimaksudkan untuk membantu Anda memahami istilah-istilah tersebut, tetapi tidak dimaksudkan sebagai definisi teknis.

"2G"	generasi kedua dari teknologi telepon tanpa kabel yang terdiri dari GSM, Interim Standar-95 (IS-95) dan teknologi personnel digital cellular (PDC)
"3G"	generasi ketiga dari standar telekomunikasi bergerak, termasuk Wideband Code Division Multiple Access/Universal Mobile Telecommunication System (WCDMA/UMTS)
"ADS"	*American Depository Share*, suatu jenis efek yang membuktikan kepemilikan atas saham oleh penerbit asing swasta. Masing-masing dari ADS kami mewakili 50 lembar saham yang telah kami keluarkan.
"analog"	Sinyal, baik itu suara, video atau data yang dikirim dalam bentuk serupa, atau sinyal analog, yang biasanya digunakan untuk menjelaskan transmisi telepon dan/atau layanan-layanan yang memanfaatkan *switching* bukan digital
"ARPM"	Pendapatan rata-rata bulanan per menit (dalam Rupiah), yang dihitung dengan membagi pendapatan bulanan dari jasa selular prabayar dan pasca bayar, tidak termasuk pendapatan *nonrecurring* seperti biaya aktifasi dan lelang khusus nomor telepon, untuk periode relevan, dengan jumlah menit (yang sudah tertagih dan belum tertagih) dari panggilan keluar penggunaan selular pra bayar dan pasca bayar oleh pelanggan untuk periode tertentu.
"ARPU"	*Average Revenue Per User*, suatu evaluasi statistik untuk mengukur basis pelanggan operator selular. ARPU dihitung dengan membagi pendapatan *recurring* dari jasa selular pra bayar dan pasca bayar (biaya penggunaan, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan biaya langganan bulanan), tidak termasuk pendapatan *non-reccuring* seperti biaya aktifasi dan lelang khusus nomer telepon, untuk periode yang relevan dengan jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar adalah jumlah total pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Kami mendefinisikan "pelanggan selular aktif" sebagai pelanggan selular yang mana: (i) dalam hal pelanggan selular pasca bayar, tidak memiliki saldo yang terhutang lebih dari 120 hari setelah tanggal terakhir penagihan; atau (ii) dalam hal pelanggan pra bayar, mengisi kembali kartu SIM dalam 33 hari masa tenggang segera setelah masa berlaku kartu SIM berakhir dengan menambah jumlah minimum tertentu ke dalam kartu SIM. Karena perubahan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular pra bayar, ARPU kami yang tercantum dalam laporan tahunan tidak dapat dibandingkan dengan periode-periode tertentu. Lihat: "Item 3: Informasi Penting – Faktor-faktor Risiko berkaitan dengan Jasa Selular Kami – Data Pelanggan kami yang terkait data operasional mungkin tidak dapat diperbandingkan antar periode."
"ATM"	*Asynchronous Transfer Mode*, standar protokol *packet-switching protocol* untuk mengirim dan menerima data melalui *cell relay uniform (53-byte cells),* dimana informasi untuk beberapa jenis layanan, seperti suara, video atau data disampaikan di dalam cells yang kecil dan berukuran tetap.
"Attenuation"	kehilangan intensitas sinyal frekuensi secara bertahap karena penyerapan dan Penyebaran
"backbone"	Tingkat tertinggi dalam hirarki jaringan dan dirancang untuk menyalurkan trafik yang sangat besar. *Backbone* dapat berupa *switched* (sistem *switching*) (menggunakan ATM, *frame relay* atau keduanya) atau *routed* (hanya menggunakan *routers* dan tidak ada *switches*). Link transmisi antara nodes atau fasilitas *switching* dapat berupa jaringan gelombang mikro, kabel laut, satelit, serat optik atau teknologi transmisi lainnya

"bandwidth"	Kapasitas saluran komunikasi
"base station controller"	Perangkat pengontrol dalam jaringan 2G yang mengkoordinasikan pengoperasian dari beberapa BTS
"BTS"	*Base Transceiver Station*, suatu *mobile phone base station* yang terdiri dari pemancar radio dan unit penerima yang digunakan untuk menyalurkan dan menerima suara dan data ke dan dari telepon bergerak di suatu sel area tertentu
"CDMA"	*Code Division Multiple Access*, suatu teknologi transmisi dimana setiap transmisi dikirimkan ke beberapa frekuensi dan suatu kode tertentu diberikan untuk setiap pengiriman data atau suara, yang dapat membuat beberapa pengguna menggunakan spektrum frekuensi yang sama
"cellular backhaul"	jaringan transmisi yang menghubungkan *base station controllers*, BTS dan *mobile switching centers*
"churn rate"	Deaktivasi (pemberhentian) pelanggan untuk suatu periode tertentu, yang dihitung dengan membagi jumlah deaktivasi baik secara sukarela maupun tidak sukarela selama suatu periode tertentu dengan jumlah rata-rata pelanggan pada periode yang sama. Jumlah rata-rata pelanggan selular adalah jumlah dari total pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua
"dBW"	*decibel* yang merujuk pada satu watt
"digital"	Metode penyimpanan, pemrosesan dan pengiriman informasi dengan menggunakan *electronic* atau *optical pulses* tertentu yang dinyatakan dalam angka binary 0 dan 1. Teknologi transmisi dan *switching* digital menggunakan urutan dari *pulses* ini untuk menyampaikan informasi yang merupakan kebalikan dari sinyal variabel analog yang terus menerus. Dibandingkan dengan jaringan analog, jaringan digital mempunyai kapasitas yang lebih besar, tingkat gangguan yang lebih kecil, terlindung dari penyadapan dan koreksi kesalahan secara otomatis
"SLJJ"	Sambungan Langsung Jarak Jauh, jasa telekomunikasi sambungan jarak jauh dalam suatu negara
"EDGE"	*Enhanced Data GSM Environment*, versi tercepat dari *global system* untuk layanan nirkabel GSM yang dirancang untuk mengirim data pada tingkat kecepatan sampai dengan 384 Kbps, sehingga dapat mengirimkan aplikasi multimedia dan *broadband* bagi pemakai selular
"kabel serat optik"	Media transmisi yang dibangun dari bahan gelas yang sangat murni dan konsisten, dimana sinyal digital ditransmisikan sebagai kecepatan cahaya. Kabel serat optik mempunyai kapasitas transmisi yang lebih besar dengan tingkat gangguan sinyal yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel tembaga yang biasa digunakan
"Fixed telecommunication"	Disebut juga sebagai "layanan telepon tetap" dan termasuk SLI, SLJJ dan layanan telepon tetap lokal. Layanan ini juga termasuk FWA.
"frame relay"	Bentuk sistem *packet switching* yang memecah data menjadi paket data kecil yang dikenal dengan nama "*frame*", yang dilengkapi dengan alat deteksi kesalahan dan pengecekan atas perbaikan yang lebih baik daripada bentuk *packet switching* yang biasa (juga disebut sebagai "*frame net*" di dalam laporan keuangan kami yang telah diaudit sebagaimana terlampir di bagian lain dari laporan tahunan ini)
"FWA"	*Fixed Wireless Access service*, pelayanan telekomunikasi bergerak terbatas yang terhubung dengan suatu kode area

"GSM"	*Global System for Mobile Communications*, suatu sistem telekomunikasi selular digital yang distandarisasi oleh *European Telecommunications Standards Institute* yang didasarkan pada rancangan transmisi digital dan jaringan selular dengan daya jelajah di seluruh Eropa, Jepang dan berbagai negara lainnya
"GPRS"	*General Packet Radio Service*, suatu standar komunikasi selular yang mendukung kapasitas *bandwidth* yang besar, terutama untuk pengiriman dan penerimaan data, termasuk *e-mail* dan aplikasi *bandwidth* tinggi lainnya
"HSDPA"	*High-Speed Downlink Packet Access*, suatu layanan paket data atau protocol di 3G (WCDMA/UMTS) standar untuk transmisi data downlink dengan kecepatan dari sampai dengan 14,4 Mbps
"HSPA +"	*High Speed Packet Access* +, layanan paket data atau protokol di 3G (WCDMA/UMTS) standar yang memberikan kecepatan transmisi data *downlink* dan *uplink* yang lebih besar dengan menggunakan *order modulation* yang lebih tinggi dan menggunakan *multiple-input* dan *multiple-output* dan *multicarrier* teknologi, mencapai kecepatan *downlink* sampai dengan 42 Mbps dan kecepatan uplink sampai dengan 11,6 Mbps
"SLI"	Sambungan Langsung Internasional, suatu layanan telekomunikasi yang dapat membuat penggunanya melakukan sambungan telepon jarak jauh internasional tanpa melalui jasa operator
"interkoneksi"	Suatu tindakan yang dapat membuat suatu penyelenggara telekomunikasi dapat menghubungkan jaringannya ke jaringan atau unsur-unsur jaringan dari beberapa penyelenggara telekomunikasi lainnya untuk dapat melakukan terminasi trafik yang berasal dari pelanggan jaringan milik penyelenggara telekomunikasi tersebut ke pelanggan jaringan milik penyelenggara telekomunikasi lainnya
"IPLC"	suatu *international private line circuit*
"IP VPN"	*Internet Protocol Virtual Private Network*, layanan *packet-based IP routing* yang memberikan fasilitas transaksi data ekonomi di antara lokasi-lokasi pelanggan selama menjaga tingkat kerahasiaan, keandalan dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh bisnis yang berkembang begitu pesat. Layanan IP VPN memberikan konektivitas yang fleksibel dari satu titik ke titik lainnya mana saja dengan menggunakan *Internet Protocol* dan memungkinkan kegiatan-kegiatan bisnis untuk berkomunikasi secara rahasia dengan kantor-kantor cabangnya, bertukar saluran jaringan kerja korporasi, dan menciptakan komunikasi dengan pihak ketiga yang dipercaya yang berlokasi di wilayah dengan biaya jaringan kerja yang rendah.
"ISP"	*Internet Service Provider*, suatu perusahaan yang menyediakan akses ke Internet dengan menyediakan *interface* ke *Internet backbone*
"Kbps"	*kilobits per second*, ukuran kecepatan transmisi digital
"LAN"	*Local Area Network*, suatu jaringan jarak dekat yang dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer dalam satu lingkungan agar dapat berbagi data dan melakukan komunikasi lainnya
"Mbps"	*megabits per second*, ukuran kecepatan transmisi digital
"media gateway"	Unit penerjemahan antar jaringan-jaringan telekomunikasi yang menggunakan standar yang berbeda, seperti PSTN, *next generation networks dan radio access networks*
"MIDI"	Layanan data tetap, yang termasuk Multimedia, Komunikasi Data dan layanan Internet

"Minutes of Usage"	*minutes per usage* dari pelanggan selular, yang dihitung dengan membagi jumlah total menit penggunaan panggilan keluar dari pelanggan selular pra bayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan pasca bayar adalah jumlah total pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Kami mendefinisikan "pelanggan selular aktif" sebagai pelanggan selular: (i) dalam hal pelanggan selular pasca bayar, tidak memiliki saldo yang terhutang lebih dari 120 hari setelah tanggal terakhir penagihan; atau (ii) dalam hal pelanggan pra bayar, mengisi kembali kartu SIM dalam waktu 33 hari masa tenggang segera setelah masa berlaku kartu SIM berakhir dengan menambah jumlah minimum tertentu ke dalam kartu SIM. Karena perubahan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular pra bayar, ARPU kami yang tercantum dalam laporan tahunan tidak dapat dibandingkan dengan periode-periode tertentu. Lihat: "Item 3: Informasi Penting – Faktor-faktor Risiko berkaitan dengan Jasa Selular – Data Pelanggan prabayar kami – terkait data operasional mungkin tidak dapat diperbandingkan antar periode.
"MMS"	*Multimedia Messaging Service*, sistem telekomunikasi selular yang dapat mengirimkan pesan SMS dalam bentuk grafik, suara atau komponen video.
"MPLS"	*Multi-Protocol Label Switching*, jaringan data komunkasi teknologi yang dapat meningkatan efisiensi arus data trafik melalui *traffic management pattern* yang mengklasifikasikan data berdasarkan aplikasi.
"infrastruktur jaringan"	Perangkat infrastruktur tetap yang terdiri dari kabel-kabel serat optik, perangkat transmisi, perangkat *multiplexing, switches*, pemancar radio, antena, sistem informasi manajemen dan perangkat lainnya yang menerima, mengirim dan memproses sinyal dari dan ke perangkat pelanggan dan/atau antara jaringan nirkabel dan jaringan tetap
"Node B"	BTS untuk jaringan 3G
"PSTN"	*Public Switched Telephone Network*, jaringan telepon tetap yang dioperasikan dan dikelola oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
"DPI"	Daftar Penawaran Interkoneksi, suatu istilah perundang-undangan atas suatu dokumen yang meliputi aspek teknis, operasional, ekonomi dan aspek lain dari akses interkoneksi oleh satu penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk kepentingan penyelenggara telekomunikasi lainnya
"roaming"	Fitur telekomunikasi selular yang dapat membuat pelanggan dari suatu jaringan menggunakan telepon genggam dan nomor teleponnya di suatu wilayah dimana terdapat cakupan jaringan selular yang diselenggarakan oleh penyelenggara lain
"SIM" atau "kartu SIM"	*Subscriber Identity Module*, kartu "pintar" yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam telepon genggam, yang memuat semua data yang berhubungan dengan pengguna, seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori penyimpanan pesan-pesan
"SMS"	*Short Message Service*, sarana untuk mengirim atau menerima pesan yang berisi huruf dan angka kepada atau dari telepon genggam selular
"VoIP"	*Voice over Internet Protocol*, sarana pengiriman informasi suara dengan menggunakan Internet *protocol*. Informasi suara dikirimkan dengan *discrete packets* dalam bentuk digital, bukan melalui *circuit-committed protocols* dari PSTN seperti biasanya, sehingga dapat menghindari biaya yang dikenakan oleh para penyelenggara sambungan jarak jauh konvensional

"VSAT"	*Very Small Aperture Terminal*, *satellite dish* yang ukurannya relatif kecil, biasanya berdiameter 1,5 sampai dengan 3,8 meter, yang diletakkan di tempat pengguna dan digunakan untuk komunikasi data dua arah melalui satelit
"WAP"	*Wireless Application Protocol*, suatu teknologi *platform* standar yang bersifat terbuka dan global yang dapat membuat pengguna selular mengakses dan berinteraksi dengan layanan informasi bergerak seperti e-mail, situs internet (situs), informasi keuangan, informasi *online banking*, informasi hiburan, permainan dan pembayaran mikro
"x.25"	Standar *packet-switching* data yang banyak digunakan, yang sebagian telah diganti oleh layanan *frame relay*

BAGIAN I

Butir 1: IDENTITAS DIREKSI, MANAJEMEN SENIOR DAN PENASIHAT

Tidak berlaku.

Butir 2: STATISTIK YANG DIAJUKAN DAN PERKIRAAN JADWAL

Tidak berlaku.

Butir 3: INFORMASI PENTING

Beberapa Data Keuangan dan Data Lainnya

Tabel-tabel berikut ini menyajikan beberapa informasi keuangan konsolidasi kami dan statistik kegiatan usaha kami pada tanggal-tanggal dan untuk setiap periode-periode yang disebutkan. Informasi keuangan tertentu pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit yang disusun sesuai dengan IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. Informasi keuangan konsolidasi tertentu pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2009 yang disajikan di bawah ini telah disesuaikan untuk dapat merefleksikan penyajian kembali posisi keuangan konsolidasi dan laporan pendapatan komprehensif konsolidasi kami untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2009, yang mana dijelaskan dengan lebih lengkap pada bagian depan laporan tahunan ini dan pada Catatan 2g pada laporan keuangan konsolidasi kami yang dimasukkan di dalam laporan tahunan ini. Informasi keuangan tertentu pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu secara keseluruhan kepada laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit, termasuk catatan-catatan di dalamnya, dan informasi-informasi lainnya yang terkandung di suatu tempat dalam laporan tahunan ini. Informasi keuangan tertentu pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 adalah berdasarkan laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit dan disusun sesuai dengan estándar akuntansi keuangan di Indonesia ("SAK") dengan rekonsiliasi terhadap US GAAP. Informasi keuangan tertentu pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu secara keseluruhan kepada laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit, termasuk catatan-catatan di dalamnya, dan informasi-informasi lainnya yang terkandung di suatu tempat dalam laporan tahunan kami sebelumnya yang dilaporkan kepada U.S. SEC pada tanggal 8 Mei 2008. Oleh karena itu, informasi keuangan untuk tahun 2008, 2009 dan 2010 tidak dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan pada tahun 2006 dan 2007 dan disajikan secara terpisah. Laporan keuangan konsolidasi kami yang telah diaudit pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2007, 2008 dan 2009 telah diaudit oleh Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, dan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit pada dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Purwantono, Suherman & Surja, *Indonesian member firm of* Ernst & Young Global.

	Per 31 Desember			
	2008 (Disajikan kembali)	2009 (Disajikan kembali)	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$ [1]
	(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US$ kecuali jumlah saham)			
Data Posisi Keuangan:				
IFRS:				
Aset				
Kas dan setara kas	5.737,9	2.836,0	2.075,3	230,8
Aset lancar lainnya (selain kas dan setara kas) – bersih	3.953,9	4.302,9	4.083,6	454,2
Piutang hubungan istimewa – bersih	42,5	7,2	8,4	0,9
Aset pajak tangguhan – bersih	70,8	88,0	95,0	10,5
Investasi jangka panjang	3,4	3,2	2,7	0,3
Aset tetap – bersih	38.333,6	44.358,1	43.489,4	4.837,0
Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya – bersih	2.060,7	2.042,8	2.063,2	229,5
Aset tidak lancar lainnya	1.659,7	1.796,8	1.608,1	178,9
Total Aset	51.862,5	55.435,0	53.425,7	5.942,1
Kewajiban				
Kewajiban lancar	10.719,7	13.067,3	11.909,9	1.324,6
Kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	14,7	13,8	22,1	2,5
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	1.348,8	1.651,8	1.951,3	217,0
Hutang jangka panjang (setelah dikurangi bagian jangka pendek)	10.812,2	12.715,5	7.666,8	852,7
Hutang obligasi (setelah dikurangi bagian jangka pendek)	10.315,6	8.472,2	12.114,1	1.347,4
Kewajiban tidak lancar lainnya	871,8	939,5	1.059,5	117,8
Total Kewajiban	34.082,8	36.860,1	34.723,7	3.862,0
Aset Bersih (total aset - total kewajiban)	17.779,7	18.574,9	18.702,0	2.080,1
Modal Saham	543,4	543,4	543,4	60,4
Ekuitas	17.779,7	18.574,9	18.702,0	2.080,1
Total Kewajiban dan Ekuitas	51. 862,5	55.435,0	53.425,7	5.942,1
Jumlah saham beredar	5.433.933.500	5.433.933.500	5.433.933.500	N/A

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember,			
	2008 (Disajikan kembali)	2009 (Disajikan kembali)	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$[(1)]
	(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US$ kecuali jumlah saham)			
Data Pendapatan Komprehensif				
IFRS:				
Pendapatan usaha				
Selular	14.460,8	14.331,3	15.867,1	1.764,8
MIDI	2.733,4	2.712,6	2.488,1	276,7
Telekomunikasi tetap	2.021,8	1.803,0	1.293,2	143,8
Total Pendapatan Usaha	19.216,0	18.846,9	19.648,4	2.185,3
Jumlah beban usaha	14.487,8	15.621,4	16.126,7	1.793,6
Laba usaha	4.728,2	3.225,5	3.521,7	391,7
Penghasilan (beban) lain-lain				
Pendapatan bunga	460,1	139,0	143,4	15,9
Laba (rugi) kurs – bersih	(885,7)	1.656,4	492,4	54,8
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif – bersih	136,6	(486,9)	(448,8)	(49,9)
Beban pendanaan	(1.858,3)	(1.873,0)	(2.271,6)	(252,7)
Beban lain-lain – bersih	(25,6)	(116,8)	(111,8)	(12,4)
Total beban lain-lain – bersih	(2.172,9)	(681,3)	(2.196,4)	(244,3)
Beban pajak penghasilan –bersih	(485,3)	(783,9)	(422,4)	(47,0)
Laba tahun berjalan	2.070,0	1.760,3	902,9	100,4
Yang menjadi hak milik Perusahaan	2.043,8	1.704,0	824,7	91,7
Yang menjadi hak pemegang saham bukan pengendali	26,2	56,3	78,2	8,7
Jumlah saham disetor	5.433.933.500	5.433.933.500	5.433.933.500	N/A
Laba dasar dan dilusi per saham yang menjadi hak pemilik perusahaan (jumlah penuh) [(2)]	376,11	313,57	151,76	–
Dividen yang dibagikan per saham (dalam jumlah penuh) [(2)]	172,85	137,86	–	–
Dividen yang dibagikan per saham (dalam jumlah penuh) (dalam US$) [(2)(4)]	0,02	0,015	–	–
Dividen yang dibagikan per ADS (dalam jumlah penuh) (dalam US$) [(2)(3)(4)]	0,86	0,77	–	–

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember,			
	2008 (Disajikan Kembali)	2009 (Disajikan Kembali)	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$[1]
	(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US$ kecuali jumlah saham yang ditempatkan, EBITDA dan rasio keuangan)			
IFRS:				
Data arus kas				
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk):				
Kegiatan usaha	6.513,3	4.051,2	6.839,0	760.6
Kegiatan investasi	(10.286,9)	(10.670,7)	(5.970,7)	(664.1)
Kegiatan pendanaan	1.458,5	3.724,7	(1.629,7)	(181.2)
Data Keuangan Lainnya (tidak diaudit)				
EBITDA[5]	9.293,6	8.797,1	9.684,5	1.077,1
Marjin EBITDA[6]	48,4%	46,7%	49,3%	49,3%
Data keuangan lainnya				
Pengeluaran barang modal[7]	12.341,9	11.584,5	5.515,0	613,4
Rasio keuangan (tidak diaudit)				
Total hutang terhadap EBITDA[8]	2,38x	2,93x	2,52x	–
Hutang bersih terhadap EBITDA[9]	1,76x	2,90x	2,48x	–
EBITDA terhadap beban bunga	5,23	4,86x	4,66x	–

	Per 31 Desember	
	2006	2007
	Rp	Rp
	(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US$ kecuali jumlah saham)	
Data Neraca		
SAK:		
Aset		
Kas dan Setara Kas	2.807,3	8.053,0
Aset lancar lainnya (selain kas dan setara kas)	2.858,2	2.773,1
Piutang hubungan istimewa – bersih	23,3	56,5
Aset pajak tangguhan – bersih	46,6	87,1
Investasi jangka panjang	8,8	3,0
Aset tetap – bersih	24.918,6	30.572,8
Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya – bersih	2.394,5	2.087,2
Aset tidak lancar lainnya	1.171,4	1.672,4
Total Aset	34.228,7	45.305,1
Kewajiban		
Kewajiban lancar	6.803,2	11.658,6
Kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	29,4	64,9
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	1.244,5	1.482,2
Hutang yang masih harus dibayar (setelah dikurangi bagian jangka pendek)	1.504,8	4.249,0
Hutang obligasi (setelah dikurangi bagian jangka pendek)	8.734,0	10.088,7
Kewajiban tidak lancar lainnya	510,4	919,6
Total Kewajiban	18.826,3	28.463,0
Aset Bersih (Total aset – total kewajiban)	15.402,4	16.842,1
Hak Minoritas	200,6	297,4
Ekuitas	15.201,8	16.544,7
Total Kewajiban dan Ekuitas	34.228,7	45.305,1
Jumlah saham yang ditempatkan	5.433.933.500	5.433.933.500
U.S.GAAP:[10]		
Total Aset	36.990,9	48.840,1
Total ekuitas	16.574,8	18.260,6

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember,	
	2006	2007
	Rp	Rp
	(dalam miliar Rupiah dan dalam juta US$, kecuali per saham dan per ADS)	
Data Laporan Laba Rugi:		
SAK:		
Pendapatan Usaha:		
Selular[11][17]	9.446,9	12.924,8
MIDI	1.902,6	2.168,6
Telekomunikasi Tetap[17]	1.146,8	1.780,4
Jumlah pendapatan usaha	12.496,3	16.873,8
Total beban usaha[11]	9.097,6	12.354,2
Laba usaha	3.398,7	4.519,6
Penghasilan (beban) lain-lain:		
Pendapatan bunga	212,8	232,4
Laba (rugi) kurs-bersih	304,4	(155,3)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif-bersih		68,0
Amortisasi goodwill	(226,5)	(226,5)
Beban pendanaan	(1.248,9)	(1.428,6)
Beban lain-lain – bersih	21,2	(80,0)
Jumlah beban lain-lain – bersih	(1.375,8)	(1.590,0)
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	(0,2)	–
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(36,5)	(28,1)
Beban pajak penghasilan – bersih	(576,1)	(859,5)
Laba bersih	1.410,1	2.042,0
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor	5.404.654.859	5.433.933.500
Laba usaha dari hasil operasi per saham	628,8	831,7
Dilusi laba per saham	258,8	375,8
Laba per saham dasar[2]	260,9	375,8
Dividen yang dibagikan per saham[2]	129,75	187,90
Dividen yang dibagikan per saham (dalam US$)[2][4]	0,014	0,017
Dividen yang dibagikan per saham (dalam US$)[2][3][4]	0,69	0,86
U.S. GAAP:[10]		
Laba bersih	1.751,0	2.475,8
Laba per saham dasar[2]	324,0	455,6
Laba per saham dilusian[2][3]	16.199,3	22.781,0
Laba per saham dilusian	321,9	455,6
Laba per ADS dilusian	16.097,2	22.781,0

	Pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember,	
	2006	2007
	Rp	Rp
	(dalam miliar rupiah dan dalam juta US$ kecuali jumlah saham, marjin EBITDA dan rasio keuangan)	
SAK:		
Data Arus Kas		
Kas bersih yang diperoleh (digunakan untuk):		
Kegiatan usaha	5.669,6	8.273,9
Kegiatan investasi	(6.331,0)	(7.290,4)
Kegiatan pendanaan	(1.248,7)	4.237,0
Data keuangan lainnya (tidak diaudit)		
EBITDA[12]	7.027,2	8.682,8
Marjin EBITDA[13]	56,2%	51,4%
Data keuangan lainnya		
Pengeluaran barang modal[14]	6.921,3	9.726,4
Rasio Keuangan (tidak diaudit)		
Jumlah hutang terhadap EBITDA[15]	1,64x	1,94x
Hutang bersih terhadap EBITDA[16]	1,24x	1,01x
EBITDA terhadap beban bunga	5,83x	6,22x

Catatan kaki terhadap Informasi Keuangan:

(1) Dikonversi ke dalam dolar A.S berdasarkan tingkat konversi Rp8.991= US$1.00, kurs rata-rata Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2010. Lihat "Informasi Nilai Tukar" di bawah ini.

(2) Laba per saham dasar/ADS, dan dividen yang dibagikan per saham/ADS dilaporkan dalam mata uang Rupiah dan Dolar. Laba bersih per saham dasar/ADS dan dividen yang dibagikan per saham/ADS untuk seluruh periode yang ditunjukkan telah dihitung berdasarkan jumlah rata-rata saham yang ditempatkan dan disetor, setelah mempertimbangkan opsi saham yang berlaku.

(3) Laba dan dividen yang dibagikan per ADS dihitung atas dasar setiap ADS mewakili 50 saham biasa dan tidak menggunakan penyisihan untuk pajak dimana pemegang ADS terikat.

(4) Dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada setiap tanggal pembayaran dividen.

(5) Kami mendefinisikan EBITDA sebagai pendapatan sebelum pajak, laba non operasional dan beban, beban pajak penghasilan, depresiasi dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi tahunan yang disusun berdasarkan IFRS. EBITDA bukan merupakan standar pengukuran berdasarkan IFRS. Mengingat kegiatan telekomunikasi memerlukan modal yang besar, kebutuhan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang serta beban bunga yang bisa berdampak signifikan terhadap laba bersih perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan serupa. Dengan demikian, kami percaya bahwa EBITDA memberikan refleksi yang berguna untuk menunjukkan kinerja operasional dan bahwa laba bersih merupakan ukuran keuangan yang dapat langsung dibandingkan dengan EBITDA sebagai indikator kinerja operasional. Anda tidak dapat membandingkan definisi EBITDA secara terpisah atau sebagai indikator kinerja operasional, likuiditas atau ukuran standar lainnya berdasarkan IFRS, atau definisi EBITDA perusahaan lain. Definisi EBITDA tidak mempertimbangkan pajak dan beban tunai dari non operasional. Dana dari perhitungan ini mungkin tidak tersedia untuk membayar pinjaman karena adanya batasan-batasan ketentuan, persyaratan pengeluaran barang modal dan komitmen lain.

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi laba yang diperuntukkan kepada pemilik Perusahaan sesuai dengan IFRS terhadap definisi kami untuk EBITDA untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember,		
	2008 (Disajikan kembali)	2009 (Disajikan kembali)	2010
	Rp	Rp	Rp
	(dalam miliar Rupiah)		
EBITDA	9.293,6	8.797,1	9.684,5
Penyesuaian:			
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(885,7)	1.656,4	492,4
Pendapatan bunga	460,1	139,0	143,4
Beban pendanaan (termasuk beban bunga)	(1.858,3)	(1.873,0)	(2.271,6)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif – bersih	136,6	(486,9)	(448,8)
Lain-lain – bersih	(25,6)	(116,8)	(111,8)
Beban pajak penghasilan - bersih	(485,3)	(783,9)	(422,4)
Penyusutan dan amortisasi	(4.565,4)	(5.571,6)	(6.162,8)
Laba yang diperuntukan kepada pemilik bukan pengendali	(26,2)	(56,3)	(78,2)
Laba yang diperuntukan kepada pemilik Perusahaan	2.043,8	1.704,0	824,7

(6) Margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA sebagaimana didefinisikan dalam catatan (5) di atas, dengan total pendapatan usaha sesuai dengan IFRS.

(7) Pengeluaran barang modal dihitung dengan menambahkan jumlah tambahan aset tetap dan goodwill serta aset tidak berwujud sesuai dengan IFRS.

(8) Kami mendefinisikan hutang bersih sebagai jumlah hutang jangka panjang dan hutang obligasi (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang), beban emisi yang tidak diamortisasi (hutang, obligasi dan *notes*), biaya *solicitation* yang tidak diamortisasi (hutang dan obligasi) dan diskon yang tidak diamortisasi (hutang dan *notes*) sesuai dengan IFRS.

(9) Kami mendefinisikan hutang bersih sebagai jumlah hutang dikurangi kas dan setara kas sesuai dengan IFRS.

(10) Jumlah US-GAAP menunjukkan penyesuaian sebagai akibat dari perbedaan perlakuan akuntansi dalam kapitalisasi beban bunga, kapitalisasi rugi kurs, pengakuan pendapatan, bagian laba (rugi) bersih dari perusahaan asosiasi, amortisasi goodwill, amortisasi hak atas tanah, manfaat karyawan masa pensiun, dana pensiun, dan penyesuaian pajak penghasilan tangguhan berdasarkan U.S. GAAP.

(11) Pada tahun 2007, Pemerintah telah menetapkan sistem baru mengenai interkoneksi berbasis biaya, menggantikan sistem interkoneksi yang berbasis pembagian pendapatan. Berdasarkan sistem ini, kami melaporkan pendapatan operasional kami dalam jumlah kotor (*gross*) dan tidak dalam jumlah bersih (*net*). Dengan menggunakan metode pencatatan dalam jumlah bersih (*net*), pendapatan interkoneksi dicatat setelah dikurangi beban interkoneksi. Pada pencatatan dalam jumlah kotor (*gross*), kami mencatat pendapatan interkoneksi dalam pendapatan usaha dan beban interkoneksi dalam beban usaha.

(12) Kami telah mendefinisikan EBITDA sebagai pendapatan sebelum beban pendanaan (termasuk beban bunga), pendapatan bunga, beban pajak (bersih), beban depresiasi dan amortisasi, amortisasi goodwill, rugi kurs (bersih), laba rugi perubahan nilai wajar derivatif (bersih), beban non operasional lain-lain (bersih), dan hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi yang dimasukkan dalam laporan ini yang disiapkan berdasarkan SAK. EBITDA bukan merupakan standar pengukuran berdasarkan SAK maupun U.S. GAAP. Mengingat kegiatan telekomunikasi yang memerlukan modal yang besar, kebutuhan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang serta beban bunga yang bisa berdampak yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan-perusahaan yang memiliki kegiatan serupa. Dengan demikian, kami percaya bahwa EBITDA memberikan refleksi yang berguna untuk menunjukkan kinerja operasional dan bahwa laba bersih merupakan ukuran keuangan yang dapat langsung dibandingkan dengan EBITDA sebagai indikator kinerja operasional. Anda tidak dapat membandingkan definisi EBITDA secara terpisah atau sebagai indikator kinerja operasional, likuiditas atau ukuran standar lainnya, baik berdasarkan SAK maupun U.S. GAAP, maupun definisi EBITDA perusahaan-perusahaan lain. Dana dari perhitungan ini mungkin tidak tersedia untuk membayar pinjaman karena adanya batasan-batasan ketentuan, persyaratan pengeluaran barang modal dan komitmen lain. Definisi EBITDA berdasarkan perjanjian tertentu sehubungan dengan hutang kami dapat berbeda dari definisi yang kami gunakan di sini. Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi laba bersih kami sesuai dengan SAK terhadap definisi kami untuk EBITDA untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember,	
	2006	2007
	Rp	Rp
	(dalam miliar rupiah dan juta US$))	
EBITDA	7.027,2	8.682,8
Penyesuaian:		
Pendapatan (beban) lain-lain		
Pendapatan bunga	212,8	232,4
Laba (rugi) kurs – bersih	304,4	(155,3)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif – bersih	(438,8)	68,0
Amortisasi goodwill	(226,5)	(226,5)
Beban pendanaan	(1.248,9)	(1.428,6)
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	21,2	(80,0)
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	(0,2)	–
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(36,5)	(28,1)
Beban pajak penghasilan – bersih	(576,1)	(859,5)
Penyusutan dan amortisasi	(3.628,5)	(4.163,2)
Laba bersih	**1.410,1**	**2.042,0**

(13) Marjin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA sebagaimana didefinisikan dalam catatan (12) di atas, dengan jumlah pendapatan usaha sesuai SAK.
(14) Pengeluaran barang modal dihitung dengan menambahkan jumlah tambahan aset tetap dan goodwill serta aset tidak berwujud sesuai SAK.
(15) Kami mendefinisikan jumlah hutang sebagai jumlah hutang jangka panjang dan hutang obligasi (bagian jangka pendek dan bagian jangka panjang), beban emisi yang tidak diamortisasi (hutang, obligasi dan *notes*), biaya *solicitation* yang tidak diamortisasi (hutang dan obligasi) dan diskon yang tidak diamortisasi (hutang dan *notes*) sesuai SAK.
(16) Kami mendefinisikan hutang bersih sebagai jumlah hutang dikurangi kas dan setara kas sesuai SAK.
(17) Pendapatan selular yang berasal dari pemakaian pulsa dan penjelajahan diakui berdasarkan durasi percakapan yangberhasil tersambung melalui jaringan selular Perusahaan, yang sampai dengan 31 Desember 2007 telah disajikan secara neto. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan melakukan reklasifikasi akun atas laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2007.

Informasi Kurs

	Nilai Tukar rupiah per US$			
	Akhir Periode	Rata-rata[1][2]	Rendah	Tinggi
Periode				
2006	9.020	9.141	9.395	8.775
2007	9.419	9.137	9.479	8.672
2008	10.950	9.761	12.400	9.051
2009	9.400	10.398	12.065	9.293
2010	8.991	9.085	9.413	8.888
Oktober	8.928	8.928	8.947	8.913
November	9.013	8.938	9.033	8.888
Desember	8.991	9.023	9.050	8.978
2011				
Januari	9.057	9.037	9.088	8.976
Februari	8.823	8.913	9.042	8.823
Maret	8.709	8.761	8.824	8.708
April (sampai dengan 20 April 2011)	8.657	8.666	8.699	8.641

Sumber: Bank Indonesia
(1) Kurs rata-rata per tahun dihitung berdasarkan rata-rata kurs dari setiap periode akhir kurs.
(2) Kurs rata-rata per bulan dihitung berdasarkan rata-rata dari kurs setiap penutupan hari.

Bank Indonesia adalah satu-satunya penerbit mata uang rupiah dan bertanggung jawab dalam mempertahankan stabilitas rupiah. Sejak tahun 1970, Indonesia telah menggunakan tiga sistem kurs: (i) kurs tetap antara 1970 sampai dengan 1978; (ii) kurs mengambang antara 1978 sampai dengan 1997; dan (iii) kurs bebas mengambang sejak 14 Agustus 1997. Berdasarkan sistem kurs mengambang, Bank Indonesia telah mempertahankan nilai rupiah dengan kebijakan *trading band*, di mana Bank Indonesia masuk ke pasar valuta asing dan membeli atau menjual rupiah, bila diperlukan, ketika perdagangan rupiah melebihi harga permintaan dan penawaran yang diumumkan oleh Bank Indonesia setiap harinya. Pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia tidak lagi menerapkan kebijakan *trading band* dan membiarkan kurs rupiah mengambang tanpa nilai tukar yang diumumkan di mana Bank Indonesia dapat melakukan intervensi, yang berakibat pada penurunan yang substansial pada nilai mata uang rupiah terhadap Dolar AS. Berdasarkan sistem yang digunakan saat ini, kurs rupiah ditentukan oleh pasar, yang merupakan refleksi dari interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Namun demikian, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mempertahankan kurs yang stabil. Kurs yang berlaku adalah Rp10.950 = US$1,00 per 31 Desember 2008, Rp9.400 = US$1.00 per 31 Desember 2009 dan Rp8.991 = US$1.00 per 31 Desember 2010. Pada 20 April 2011, kurs rupiah terhadap Dolar AS adalah Rp8.657 per dolar AS. The Federal Reserve Bank of New York untuk keperluan pabean tidak menetapkan kurs tengah hari (*noon buying rate*) untuk transfer dalam mata uang rupiah.

Mata uang rupiah sebelumnya dan saat ini secara umum dapat dikonversi atau dipindahkan secara bebas. Bank Indonesia memberlakukan peraturan yang melarang pemindahan mata uang rupiah dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di luar negeri tanpa dasar alasan perdagangan atau investasi, dan karenanya perdagangan luar negeri terbatas pada sumber likuiditas yang ada. Selain itu, Bank Indonesia berwenang untuk meminta informasi dan data mengenai kegiatan kurs dari semua orang dan badan hukum yang berdomisili, atau berencana untuk tinggal, di Indonesia sekurang-kurangnya satu tahun.

Valuta Asing

Pengawasan kurs telah dihapuskan pada tahun 1971, dan Indonesia saat ini memberlakukan sistem kurs bebas yang memperbolehkan aliran kurs secara bebas. Transaksi modal, termasuk pengiriman modal, keuntungan, dividen dan bunga, bebas dari pengawasan kurs. Akan tetapi ada beberapa peraturan yang berdampak pada sistem kurs. Bank Indonesia belum lama ini memberlakukan peraturan yang melarang pemindahan mata uang rupiah dari bank-bank di Indonesia ke bank-bank di luar negeri tanpa dasar alasan perdagangan atau investasi, dan karenanya perdagangan luar negeri terbatas pada sumber likuiditas yang ada. Selain itu, Bank Indonesia berwenang untuk meminta informasi dan data mengenai kegiatan valuta asing dari semua orang dan badan hukum yang berdomisili, atau berencana untuk tinggal, di Indonesia sekurang-kurangnya selama satu tahun.

FAKTOR-FAKTOR RISIKO

Risiko-Risiko yang berkaitan dengan Indonesia

Kami didirikan di Indonesia dan sebagian besar bisnis, aset dan pelanggan kami berada di Indonesia. Oleh karena itu, kondisi politik, ekonomi, hukum dan sosial di Indonesia di masa mendatang, serta tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin, atau mungkin tidak diambil atau diadopsi oleh Pemerintah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Perubahan ekonomi dalam negeri, regional atau global dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan tahun 1997 telah mempengaruhi Indonesia, antara lain, terjadinya depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi bisnis di Indonesia, termasuk memberikan dampak yang negatif bagi kualitas dan pertumbuhan basis pelanggan dan pemberian layanan kami, yang bergantung pada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, krisis ekonomi telah mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya. Banyak perusahaan Indonesia yang masih belum benar-benar pulih dari krisis ekonomi, dan masih dalam proses restrukturisasi hutang mereka atau terlibat dalam sengketa yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi atas kewajiban hutang tersebut. Krisis keuangan global yang sebagian dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat telah menyebabkan runtuhnya beberapa lembaga keuangan besar di negara tersebut dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Krisis ini mengakibatkan kegagalan pada beberapa bank Eropa dan menurunnya indeks saham di berbagai bursa efek, dan rontoknya harga pasar saham dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampak dari melemahnya ekonomi dunia telah mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga dan melemahnya investasi karena hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya risiko akibat ketidakpastian ekonomi dunia. Keadaan-keadaan ini memberikan dampak negatif pada bisnis dan konsumen Indonesia, dan dapat berakibat pada menurunnya permintaan jasa telekomunikasi.

Gejolak harga minyak dan kemungkinan berkurangnya persediaan makanan dapat pula menyebabkan penurunan perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Penurunan tingkat perekonomian Indonesia dapat pula menyebabkan timbulnya wanprestasi oleh para debitur-debitur Indonesia dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kegiatan bisnis, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasional dan prospek kami. Pemerintah terus mengalami defisit fiskal dalam jumlah besar dan hutang luar negeri yang tinggi. Cadangan mata uang asing Pemerintah dalam jumlah yang rendah dan melemahnya sektor perbankan yang diakibatkan oleh tingginya kredit macet. Tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia juga dapat menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan yang dibelanjakan oleh konsumen atau menyebabkan berkurangnya daya beli konsumen, yang dapat mengurangi permintaan untuk jasa telekomunikasi, termasuk jasa kami.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan di pasar yang sedang berkembang dan juga pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk memburuknya keadaan ekonomi global, dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada pasar uang Indonesia dan penurunan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Ketidakstabilan yang

meningkat atau pertumbuhan yang menurun atau negatif dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Ketidakstabilan politik dan sosial dapat memberikan dampak negatif bagi Perusahaan

Sejak tahun 1998, Indonesia mengalami proses perubahan tatanan demokrasi yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa politik dan sosial yang menimbulkan ketidakpastian pada kerangka politik Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini mengakibatkan ketidakstabilan politik dan juga beberapa kerusuhan sosial dan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara demokrasi yang masih cukup baru, Indonesia masih menghadapi berbagai macam masalah sosiopolitik dan dari waktu ke waktu telah mengalami ketidakstabilan politik dan keresahan sosial politik.

Sejak tahun 2000, ribuan rakyat Indonesia berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia lainnya baik untuk mendukung maupun melawan Mantan Presiden Wahid, Mantan Presiden Megawati, dan Presiden Yudhoyono, serta untuk menanggapi berbagai isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi minyak, privatisasi aset-aset negara, kebijakan anti-korupsi, *bail-out* PT Bank Century pada tahun 2008, desentralisasi dan otonomi daerah dan kampanye militer Amerika di Afghanistan dan Irak.

Pada bulan Juni 2001, rangkaian demonstrasi dan mogok kerja mewarnai sekurang-kurangnya 19 kota setelah Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar sebesar 30,0%. Demonstrasi serupa juga terjadi pada bulan Januari 2003 ketika Pemerintah kembali berupaya menaikkan harga bahan bakar, tarif listrik dan tarif telepon. Di dalam kedua peristiwa ini, Pemerintah terpaksa menangguhkan atau benar-benar menurunkan tingkat kenaikan tarif yang direncanakan. Pada bulan Maret 2005, Pemerintah memberlakukan kenaikan harga minyak sebesar sekitar 29,0%. Pada bulan Oktober 2005, Pemerintah memberhentikan subsidi minyak pada jenis premium dan minyak tanah serta mengurangi subsidi pada solar, yang mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar. Sebagai tanggapan, beberapa protes massa dilakukan untuk melawan kenaikan harga minyak domestik tersebut, dan tekanan politik akibat dari keputusan Pemerintah. Pada bulan Mei 2008, Pemerintah kembali mengurangi subsidi minyak kepada masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya demonstrasi. Walaupun demonstrasi-demonstrasi ini pada dasarnya dilakukan secara damai, beberapa berakhir dengan kekerasan. Kami tidak dapat memastikan bahwa situasi ini tidak akan berlanjut pada instabilitas politik dan sosial.

Ketidakstabilan politik regional dan pertikaian antara kelompok agama dan etnis tetap menjadi masalah. Gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok agama dan etnis telah berakibat pada keresahan sosial dan sipil di beberapa tempat di Indonesia. Di provinsi Aceh dan Papua (sebelumnya Irian Jaya), telah terjadi bentrokan antara pendukung gerakan separatis dan satuan militer Indonesia, walaupun hanya ada sedikit konflik di Aceh sejak ditandatanganinya Memo Kesepakatan pada bulan Agustus 2005. Pada bulan April 2006 beratus-ratus orang terlibat dalam aksi protes yang berujung pada kekerasan terhadap pengoperasian tambang emas Freeport di provinsi Papua. Dalam tahun-tahun terakhir, ketidakstabilan politik di Maluku dan Poso, sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, telah meningkat dan bentrokan-bentrokan antara kelompok-kelompok agama di daerah-daerah ini telah menyebabkan ribuan korban dan hilangnya orang-orang di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah pada beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah tidak membuat banyak kemajuan dalam negosiasi dengan daerah-daerah bermasalah ini, kecuali di Provinsi Aceh di mana pemilihan daerah yang damai telah dilaksanakan yang berujung dengan kelompok separatis memenangkan pemilihan dan menjadi gubernur provinsi tersebut.

Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden, dan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemilihan Umum dengan daftar calon terbuka. Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, rakyat Indonesia telah mulai memilih secara langsung kepala daerahnya sendiri. Pada tahun 2009, pemilihan umum kembali diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Aktivitas politik yang lebih tinggi dapat terjadi di Indonesia. Walaupun pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009 telah dilakukan dengan damai, kampanye politik di Indonesia dapat menyebabkan ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu, dan kami tidak dapat memastikan bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa yang akan datang dan dalam skala yang lebih besar atau bahwa gangguan tersebut tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak negatif pada bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Indonesia terletak pada zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan kerugian secara ekonomi

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan vulkanik dan musim kemarau, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa lainnya di luar kendali Perusahaan. Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia (selain tsunami Asia pada tahun 2004), termasuk letusan Gunung Merapi dan Gunung Bromo, tsunami di Mentawai, Sumatera Barat, yang mana keduanya terjadi pada tahun 2010, tsunami di Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006, gempa bumi di Yogyakarta, Jawa Tengah pada tahun 2006 serta semburan dan banjir lumpur panas di Jawa Timur pada tahun 2006 dan beberapa gempa bumi di Papua, Jawa Barat, Sulawesi, dan Sumatra pada tahun 2009. Indonesia juga mengalami banjir besar di Jakarta pada bulan Februari 2007 dan Solo, Jawa Tengah pada bulan Januari 2008. Pada bulan Maret 2009, hujan lebat telah mengakibatkan jebolnya bendungan di luar Jakarta, menenggelamkan rumah-rumah di daerah berpenduduk padat, dan mengakibatkan kematian atas kira-kira 100 orang. Banjir melanda ratusan rumah dan menyebabkan beberapa orang dilaporkan hilang. Akhir-akhir ini, pada Oktober 2010, setidaknya 145 orang meninggal pada banjir bandang di kelurahan Wasior, Papua Barat. Selain itu pada Oktober 2010, gempa bumi melanda pesisir Sumatera Barat yang menyebabkan tsunami pada Kepulauan Mentawai, dimana lebih dari 500 orang meninggal dunia. Sejak 24 Oktober 2010 hingga 5 November 2010, Gunung Merapi, sebuah gunung berapi di bagian selatan Jawa dekat Yogyakarta, meletus beberapa kali dan dipercaya telah menewaskan lebih dari 380 orang.

Sebagai akibat dari bencana-bencana alam tersebut, Pemerintah harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar untuk bantuan keadaan darurat dan penempatan kembali. Sebagian besar dari biaya ini telah ditanggung oleh pemerintah negara lain dan organisasi bantuan internasional. Kami tidak dapat menjamin bahwa bantuan tersebut akan terus diberikan, atau bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada para penerimanya pada waktunya. Apabila Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan asing tersebut kepada masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut pada waktunya, keresahan sosial dan politik dapat terjadi. Sebagai tambahan, upaya perbaikan dan bantuan tersebut kemungkinan akan terus membebani keuangan Pemerintah, dan dapat berakibat pada kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hutang Pemerintah. Kegagalan Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya tersebut, atau pernyataan Pemerintah atau adanya moratorium atas hutang negara, dapat menimbulkan wanprestasi atas pinjaman pihak swasta termasuk pinjaman Perusahaan, sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek kami.

Kami tidak dapat menjamin bahwa asuransi kami akan cukup untuk melindungi kami dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh bencana-bencana alam tersebut dan hal-hal lain yang terjadi diluar kendali kami. Sebagai tambahan, kami tidak dapat menjamin bahwa premi yang dibayarkan untuk polis asuransi-asuransi tersebut pada saat perpanjangan jumlahnya tidak akan meningkat secara substansial, sehingga dapat secara material mengakibatkan dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil dari kegiatan operasional kami. Kami juga tidak dapat menjamin bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi, kerusakan geologis atau bencana alam di kota-kota yang memiliki populasi yang besar atau merupakan pusat keuangan di Indonesia dapat mengganggu perekonomian Indonesia dan menurunkan tingkat kepercayaan investor, sehingga menimbulkan dampak negatif yang material pada bisnis, keadaan keuangan, hasil operasional dan prospek kami.

Kegiatan terorisme di Indonesia dapat membuat negara tidak stabil, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Beberapa insiden pengeboman telah terjadi di Indonesia, terutama pada bulan Oktober 2002 di Bali, suatu wilayah Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tempat yang aman dari kerusuhan-kerusuhan yang mempengaruhi bagian-bagian lain dari negeri ini. Selain itu, beberapa insiden pengeboman, walaupun dalam skala yang lebih kecil, juga telah terjadi

di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, termasuk di tempat perbelanjaan dan tempat ibadah. Pada bulan April 2003, sebuah bom meledak di luar gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta, dan sebuah bom meledak di depan terminal domestik di Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Pada bulan Agustus 2003, sebuah bom meledak di Hotel JW Marriott di Jakarta, dan pada bulan September 2004, sebuah bom meledak di depan kedutaan besar Australia di Jakarta. Pada bulan Mei 2005, sebuah bom meledak di Sulawesi Tengah yang menyebabkan korban meninggal sebanyak 21 orang dan korban luka-luka sekurang-kurangnya 60 orang. Pada bulan Oktober 2005, terjadi ledakan bom di Bali, yang menewaskan sekurang-kurangnya 23 orang dan melukai sekurang-kurangnya 101 orang lainnya. Pejabat Pemerintah Indonesia, Australia dan AS mengindikasikan bahwa pengeboman ini kemungkinan terkait dengan organisasi teroris internasional. Beberapa demonstrasi juga terjadi di Indonesia sebagai reaksi atas rencana aksi militer dan penambahan pasukan AS, Inggris dan Australia di Irak. Pada Januari 2007, kelompok teroris sektarian melakukan beberapa pengeboman di Poso. Pada bulan Juli 2009, ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton Jakarta menewaskan 6 orang dan melukai sekurang-kurangnya 50 orang. Tindakan teroris lain mungkin saja terjadi di masa mendatang dan ditargetkan pada warga negara asing di Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari, dan mengarah pada, ketidakstabilan dan kerusuhan ini dapat menggoyahkan Indonesia dan Pemerintah dan telah, dan dapat terus memberikan dampak negatif yang material bagi investasi dan kepercayaan pada, serta kinerja perekonomian Indonesia, dan dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Usaha kami dapat dipengaruhi oleh menyebarnya virus Severe Acute Respiratory Syndrome ("SARS"), flu burung, flu babi (H1N1) atau epidemik lainnya

Pada tahun 2003, beberapa Negara di Asia, termasuk Indonesia, Cina, Vietnam, Thailand dan Kamboja, mengalami penyebaran SARS, *atypical pneumonia* yang sangat menular, yang menyebabkan gangguan serius pada aktivitas ekonomi di, dan penurunan permintaan pada, negara-negara yang terjangkit.

Selama empat tahun terakhir, sebagian besar Asia mengalami penyebaran baru dari flu burung. Per tanggal 2 Juni 2009, *World Health Organization*, atau WHO menyatakan bahwa total terdapat 262 kematian pada total 433 kasus yang dilaporkan kepada WHO, yang hanya mencakup pelaporan laboratorium atas kasus flu burung. Dari jumlah ini, Kementrian Kesehatan Indonesia melaporkan kepada WHO bahwa terdapat 115 kematian dari jumlah total 141 kasus flu burung di Indonesia. Selain itu, pada bulan Juni 2006 WHO mengumumkan bahwa transmisi antara manusia akibat flu burung terjadi di Sumatra, Indonesia. Menurut *United Nations Food and Agricultural Organization*, virus flu burung berasal dari 31 propinsi dari 33 propinsi di Indonesia dan usaha untuk menahan penyebarannya telah gagal di Indonesia, hal mana meningkatkan kemungkinan virus tersebut untuk berubah menjadi bentuk yang lebih mematikan. Tidak ada vaksin efektif terhadap flu burung yang telah berhasil dikembangkan dan vaksin tersebut mungkin tidak akan ditemukan tepat waktu untuk mencegah pandemi virus flu burung.

Pada bulan April 2009, terjadi penyebaran virus Influenza A (H1N1), yang berasal dari Meksiko namun telah menyebar secara global, termasuk di wilayah Hong Kong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura dan daerah lain di Asia. Virus Influenza A (H1N1) dipercaya bersifat sangat menular dan penyebarannya sulit dicegah.

Penyebaran virus SARS, flu burung, Influenza A (H1N1) atau epidemik yang serupa, atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari Negara-negara yang terjangkit, termasuk Indonesia, untuk melawan penyebaran tersebut, dapat berdampak bagi ekonomi Indonesia dan Negara lain dan mengurangi kepercayaan investor, dan oleh sebab itu akan memberikan dampak negatif secara material terhadap keadaan keuangan atau hasil usaha kami.

Gerakan dan kerusuhan buruh dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Liberalisasi peraturan yang mengijinkan pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan keadaan perekonomian yang lemah, telah menyebabkan, dan akan menyebabkan berlanjutnya keresahan dan aktivitas tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah menerbitkan peraturan ketenagakerjaan yang mengijinkan tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari pengusaha. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah mengeluarkan undang-undang tenaga kerja, UU No. 13/2003 ("UU Tenaga Kerja"), yang, antara lain, meningkatkan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan

uang ganti rugi pada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan mengharuskan forum bipartite yang diikuti oleh pemberi kerja dan pekerja untuk perusahaan yang memiliki 50 atau lebih pekerja. Untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan perusahaan tersebut, keanggotaan serikat pekerja harus lebih dari 50,0% dari jumlah total pekerja di perusahaan tersebut. Sebagai tanggapan terhadap keberatan atas keabsahan UU Tenaga Kerja tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Tenaga Kerja adalah sah, kecuali untuk beberapa ketentuan. Pemerintah mengusulkan untuk mengubah UU Tenaga Kerja dengan cara dimana, menurut pandangan aktivis tenaga kerja, dapat berakibat pada menurunnya manfaat pensiun, peningkatan pemakaian tenaga kerja *outsourcing* dan larangan serikat tenaga kerja untuk melakukan mogok kerja. Rancangan perubahan undang-undang tersebut telah ditunda pembahasannya dan peraturan Pemerintah mengenai pemutusan hubungan kerja belum berlaku efektif. Kerusuhan dan gerakan buruh dapat mengganggu bisnis kami dan dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lainnya, yang mana hal ini dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Depresiasi nilai rupiah dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha, dan prospek Perusahaan

Salah satu dari penyebab yang paling utama atas terjadinya krisis ekonomi yang dimulai di Indonesia di pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan ketidakstabilan nilai tukar Rupiah, sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti Dolar AS. Walaupun Rupiah telah menguat secara tajam dari titik terendah sekitar Rp17.000 per Dolar AS pada tahun 1998, mata uang Rupiah dapat saja kembali mengalami ketidakstabilan di masa mendatang. Selama periode antara 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2010, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS bervariasi dari titik terendah Rp12.400 per Dolar AS hingga mencapai titik tertinggi, yaitu Rp8.888 per Dolar AS. Sebagai akibatnya, kami mencatat kerugian-bersih akibat nilai tukar mata uang asing masing-masing sebesar Rp885,7 miliar pada tahun 2008, keuntungan sebesar Rp1.656,4 miliar pada tahun 2009 dan keuntungan sebesar Rp492,4 pada tahun 2010. Kami tidak dapat memastikan bahwa depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing, termasuk Dolar AS tidak akan terjadi lagi. Apabila Rupiah melemah lebih jauh dari nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2010, kewajiban kami atas hutang dagang, hutang pengadaan dan hutang pinjaman serta obligasi kami dalam mata uang asing akan meningkat dalam Rupiah. Depresiasi lebih lanjut atas Rupiah dapat berakibat pada bertambahnya kerugian pada nilai tukar valuta asing dan akan berdampak secara signifikan terhadap pendapatan lain-lain dan pendapatan bersih kami.

Sebagai tambahan, walaupun Rupiah secara umum bebas dikonversi dan ditransfer (kecuali bank-bank Indonesia dapat menolak melakukan transfer Rupiah kepada pihak-pihak di luar Indonesia yang tidak mempuyai tujuan perdagangan atau investasi yang jelas), Bank Indonesia, dari waktu ke waktu, telah melakukan intervensi dalam pasar uang dalam rangka melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah atau membeli Rupiah dengan menggunakan cadangan mata uang asing. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan nilai tukar mengambang dari Bank Indonesia tidak akan berubah, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lain untuk menstabilkan, mempertahankan atau menguatkan nilai Rupiah, ataupun bahwa salah satu tindakan-tindakan ini, apabila dilakukan, dapat membuahkan hasil yang baik. Perubahan kebijakan nilai tukar mengambang dapat berakibat pada sangat meningginya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas, diawasinya permodalan atau pertukaran valuta atau tidak diberikannya bantuan dana tambahan oleh para kreditur multinasional. Hal ini dapat berakibat menurunnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, terjadinya cidera janji dalam pembayaran hutang atau berkurangnya penggunaan oleh pelanggan kami, dan sebagai dampaknya, kami juga akan mengalami kesulitan dalam membiayai pengeluaran barang modal dan dalam menjalankan strategi bisnis kami. Salah satu dari konsekuensi-konsekuensi tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Penurunan peringkat kredit Pemerintah atau perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Sejak tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's, Standard & Poor's dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat hutang pemerintah (*sovereign rating*) Indonesia dan peringkat hutang dari berbagai instrumen kredit Pemerintah dan sejumlah besar bank dan perusahaan lainnya di Indonesia. Pada tanggal 20 April 2011, hutang jangka panjang pemerintah Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat Ba1 oleh Moody's, BB oleh Standard & Poor's dan BBB- oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian atas kemampuan keuangan Pemerintah secara keseluruhan dalam membayar hutangnya dan kesanggupan dan kemauannya untuk menyelesaikan kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo.

Kami tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat hutang Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan. Setiap penurunan peringkat tersebut dapat memiliki dampak negatif bagi likuiditas di pasar uang Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perusahaan kami, untuk memperoleh pendanaan tambahan serta tingkat suku bunga serta ketentuan-ketentuan komersial lainnya dimana pendanaan tambahan tersedia. Tingkat suku bunga mengambang atas hutang dalam mata uang Rupiah kemungkinan juga akan naik. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak material yang negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil kegiatan operasional dan prospek kami.

Kami tunduk pada keterbukaan perusahaan dan persyaratan pelaporan yang berbeda dengan negara lain

Sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek New York, kami tunduk pada *corporate governance* atau tata penyelenggaraan perusahaan dan persyaratan pelaporan di Indonesia dan Amerika Serikat yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek dari yang berlaku untuk perusahaan yang ada di negara lain. Jumlah informasi yang disediakan untuk umum oleh emiten di Indonesia mungkin lebih sedikit dibanding dengan yang disediakan untuk umum oleh perusahaan sejenis di beberapa negara maju, serta informasi statistik dan keuangan tipe tertentu yang disediakan oleh perusahaan di beberapa negara maju mungkin tidak tersedia. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memiliki akses pada tingkat dan tipe yang sama yang disediakan di negara lain, dan perbandingan dengan perusahaan–perusahaan di negara lainnya tidak dapat dilakukan dalam semua aspek.

Kami didirikan di Indonesia, dan investor mungkin tidak dapat melakukan tindakan hukum atau melaksanakan keputusan terhadap kami di Amerika Serikat, atau untuk memberlakukan putusan pengadilan asing terhadap kami di Indonesia

Kami adalah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia, menjalankan usaha dalam kerangka hukum Indonesia dengan status sebagai perusahaan modal asing, dan hampir semua aktiva kami berada di Indonesia. Selain itu, beberapa Komisaris kami dan hampir seluruh Direksi kami bertempat tinggal di Indonesia dan sebagian besar aktiva dari pihak-pihak tersebut berada di luar Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, investor mungkin akan kesulitan dalam melakukan tindakan hukum, atau memberlakukan putusan pengadilan terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat, atau memberlakukan putusan pengadilan Amerika Serikat terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di Amerika Serikat.

Penasihat hukum Indonesia kami telah menyampaikan bahwa putusan pengadilan Amerika Serikat, termasuk putusan-putusan mengenai ketentuan kewajiban perdata dari undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat, tidak dapat diberlakukan di pengadilan Indonesia, meskipun putusan tersebut dapat dijadikan bukti yang tidak bersifat final dalam pemeriksaan perkara yang diajukan di pengadilan Indonesia. Tidak dapat dipastikan apakah pengadilan Indonesia akan mengeluarkan putusan berdasarkan gugatan asli yang diajukan di hadapannya, yang mana hanya didasarkan pada ketentuan kewajiban perdata (*civil liability*) dari undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat atau undang-undang pasar modal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Oleh karena itu, pihak penggugat harus mengajukan gugatan terhadap kami atau pihak-pihak tersebut di pengadilan Indonesia.

Risiko-risiko yang berkaitan dengan Bisnis Perusahaan

Kami menjalankan usaha dalam keadaan dimana hukum dan perundang-undangan sedang mengalami reformasi. Reformasi ini menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang dapat mengakibatkan, antara lain, berkurangnya marjin dan pendapatan usaha, yang semua ini dapat memberikan dampak material yang negatif bagi kami

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 1999 telah mendorong liberalisasi industri telekomunikasi sampai pada titik tertentu, termasuk di antaranya kemudahan bagi para pemain baru untuk masuk ke sektor industri telekomunikasi dan perubahan struktur persaingan industri telekomunikasi. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan peraturan tersebut menjadi sedemikian banyak dan rumit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, seiring dengan terus berlangsungnya reformasi di sektor telekomunikasi Indonesia, para pesaing dengan sumber daya yang mungkin lebih besar dari kami mulai memasuki sektor telekomunikasi Indonesia dan bersaing dengan kami dalam menyediakan layanan telekomunikasi.

Sebagai contoh, sejak Januari 2007, Pemerintah, melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi ("Menkominfo"), telah bertanggung jawab untuk menetapkan tarif untuk layanan interkoneksi. Lihat Butir 3 : Informasi Penting – Faktor-faktor Risiko "Risiko-Risiko Terkait Bisnis Kami—Kami tergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami." Menkominfo menetapkan tarif interkoneksi untuk penyelenggara telekomunikasi dominan berdasarkan "biaya", berdasarkan Daftar Penawaran Interkoneksi ("DPI") yang diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi dominan, termasuk kami. Sebaliknya, penyelenggara telekomunikasi yang tidak masuk dalam klasifikasi penyelenggara dominan dapat hanya memberitahukan kepada Menkominfo mengenai tarif mereka dan menerapkan tarif tersebut kepada pelanggan tanpa persetujuan Menkominfo. Perbedaan perlakuan terhadap penyelenggara telekomunikasi dominan dan non-dominan dapat menciptakan peluang bagi pemain baru di bidang indutri telekomunikasi, memperbesar keleluasan bagi mereka dalam menetapkan tarif yang rendah dan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggannya. Sebagai tambahan, tarif DPI kami telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan kami memperkirakan penurunan ini akan berlanjut. Penurunan biaya interkoneksi ini dapat menurunkan pendapatan kami dan juga biaya trafik antar-operator.

Pada tanggal 25 Januari 2010, Menkominfo menerbitkan peraturan baru dimana penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah diberikan alokasi frekuensi dan kode akses untuk menyediakan jaringan tertentu dikecualikan dari proses seleksi berikutnya apabila penyelenggara tersebut bermaksud untuk mendapatkan ijin jaringan baru dengan kode akses yang lain. Hal ini diharapkan memungkinkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk melakukan ekspansi bisnisnya dengan lebih mudah.

Pada tanggal 13 Desember 2010, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.76/2010 tentang Perubahan atas PP No.7/2009 tentang tipe dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang diterapkan terhadap Menkominfo. Peraturan ini mempengaruhi metode perhitungan dan pembayaran biaya spektrum atas spektrum yang dialokasikan untuk Perseroan (*bands* frekuensi sebesar 800 Mhz, 900 Mhz dan 1.800 Mhz).

Pada tanggal 31 Desember 2010, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI atau Indonesian Telecommunications Regulatory Bureau) juga menerbitkan Surat No. 227/BRTI/XII/2010 tentang penerapan tarif interkoneksi baru yang mana mulai berlaku per 1 Januari 2011 dan akan digunakan seluruh operator telekomunikasi.

Di masa mendatang, Pemerintah akan mengumumkan atau memberlakukan perubahan peraturan lainnya, seperti perubahan kebijakan interkoneksi atau tarif yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis atau ijin yang kami miliki saat ini. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan berhasil bersaing dengan para penyelenggara telekomunikasi dalam negeri maupun asing atau bahwa pergantian, perubahan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau di kemudian hari oleh Pemerintah tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami mungkin tidak mampu untuk membiayai pengeluaran barang modal yang dibutuhkan untuk tetap bersikap kompetitif dalam industri telekomunikasi di Indonesia.

Penyelenggaraan layanan telekomunikasi bersifat padat modal. Agar dapat bersaing, kami harus terus melakukan perluasan, modernisasi dan pembaharuan teknologi infrastruktur telekomunikasi kami, yang memerlukan investasi modal dalam jumlah yang besar. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, total pengeluaran barang modal konsolidasi aktual kami mencapai masing-masing Rp12.341,9 miliar, Rp11.584,5 miliar dan Rp5.515,0 milyar (US$613,4 juta). Selama 2011, kami berencana untuk mengalokasikan sekitar US$794,5 juta untuk pengeluaran barang modal baru, yang mana diambil bersamaan dengan hasil estimasi pengeluaran modal aktual yang ditingkatkan untuk tahun 2011 untuk komitmen-komitmen pengeluaran modal pada periode-periode sebelumnya, akan menghasilkan nilai kurang lebih sebesar US$1.053,8 juta sebagai total pengeluaran modal aktual pada 2011. Kemampuan kami untuk membiayai pengeluaran barang modal di masa yang akan datang akan bergantung pada kinerja operasi kami di masa yang akan datang, yang bergantung pada keadaan ekonomi, tingkat suku bunga dan faktor keuangan, bisnis dan faktor-faktor lainnya, yang berada di luar kekuasaan kami, dan juga terhadap kemampuan kami untuk memperoleh tambahan pendanaan eksternal. Kami tidak dapat memastikan bahwa pendanaan tambahan akan tersedia, atau apabila ada, dapat diterima secara komersial. Sebagai tambahan kami dapat mendapatkan pendanaan tambahan sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang kami. Sebagai akibatnya, kami tidak dapat memastikan bahwa kami akan memiliki sumber dana yang mencukupi untuk meningkatkan atau memperluas teknologi infrastruktur telekomunikasi atau memperbaharui teknologi kami yang lainnya yang diperlukan agar dapat tetap bersaing di pasar telekomunikasi Indonesia. Kegagalan kami untuk melakukan hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami tergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami

Kami bergantung pada perjanjian interkoneksi dengan jaringan selular dan jaringan telepon tetap milik para pesaing kami dan infrastruktur terkait agar pengoperasian bisnis Perusahaan berhasil. Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian interkoneksi, baik yang disebabkan kegagalan pihak lainnya untuk melaksanakan kewajiban kontraktual atau karena alasan lainnya, maka satu satu atau lebih layanan kami dapat terhambat, terganggu atau berhenti sama sekali, kualitas layanan kami dapat menurun, *churn* pelanggan kami dapat meningkat atau tarif interkoneksi kami dapat meningkat. Perselisihan yang melibatkan perjanjian interkoneksi kami saat ini, dan juga kegagalan kami untuk menandatangani atau memperbaharui perjanjian interkoneksi dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami dapat menjadi subyek pembatasan kepemilikan asing dalam bidang usaha jasa telekomunikasi

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 ("Peraturan Presiden") menetapkan jenis industri dan bidang usaha dalam mana investasi asing dilarang, dibatasi atau harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur oleh institusi Pemerintah yang terkait ("Daftar Negatif Investasi"). Industri telekomunikasi adalah salah satu industri yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi, dan oleh karena itu investasi asing dalam industri telekomunikasi Indonesia terpengaruh oleh pembatasan dan ketentuan yang berlaku. Daftar Negatif Investasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"). Pembatasan yang berlaku bagi industri telekomunikasi bergantung pada jenis usaha telekomunikasi yang dilakukan. Pembatasan yang berbeda berlaku tergantung pada apakah usaha tersebut terkait dengan jaringan atau layanan telekomunikasi. Batasan terhadap kepemilikan saham oleh asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang usaha jaringan telekomunikasi berkisar dari 49,0% sampai dengan 65,0%, dan batasan pada kepemilikan saham oleh asing pada perusahaan Indonesia yang bergerak dalam penyediaan jasa multimedia (termasuk komunikasi data seperti jasa *wireless broadband*), berkisar dari 49,0% sampai dengan 95,0%. Berdasarkan Pasal 8 dari Peraturan Presiden, pembatasan yang diatur dalam Peraturan tersebut tidak berlaku bagi investasi yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Presiden; sesuai dengan persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh BKPM kecuali pembatasan tersebut lebih menguntungkan bagi investasi. Peraturan Presiden tidak mengubah pembatasan kepemilikan asing di dalam usaha kami.

Pada tanggal 22 Juni 2008, Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C. ("Qtel"), melalui anak perusahaannya, Qatar South East Asia Holding S.P.C. membeli seluruh saham yang diterbitkan dan yang beredar dari masing-masing Indonesia Communications Limited ("ICLM"), dan Indonesia Communications Pte. Ltd. ("ICLS") dari Asia Mobile Holdings Pte.Ltd. ("AMH"), sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura. Setelah akuisisi ini, perubahan pengendalian terjadi di Perusahaan dan mewajibkan

Qtel untuk melakukan penawaran tender. Sehubungan dengan penawaran tender, pada tanggal 23 Desember 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia ("Bapepam-LK"), mengeluarkan surat (i) menyatakan bahwa Bapepam-LK telah menerima surat dari BKPM tertanggal 19 Desember 2008, dimana BKPM mengkonfirmasikan bahwa jumlah maksimal kepemilikan saham asing di Perusahaan adalah 65,0%, dan bahwa Perusahaan masih tetap dapat melakukan kegiatan operasional jaringan selularnya dan usaha jaringan tetap lokal dan (ii) memberikan ijin kepada Qtel untuk melakukan penawaran tender. Menyusul keluarnya surat tersebut, Qtel melakukan penawaran tender untuk membeli hingga 1.314.466.775 Saham Seri B, mewakili kira-kira 24,19% dari total Saham Seri B yang telah diterbitkan dan telah beredar (termasuk Saham Seri B dalam bentuk ADS).

Sebagai perseroan terbuka, kami percaya bahwa Daftar Negatif Investasi tidak berlaku bagi kami. Apabila pihak regulator yang berwenang hendak memberlakukan Daftar Negatif Investasi terhadap Perusahaan, terlepas dari status Perusahaan sebagai perseroan terbuka, pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham asing lain kami dapat diminta untuk mengurangi kepemilikan sahamnya pada Perusahaan, hal mana dapat mempengaruhi penurunan harga perdagangan saham Perusahaan. Hal ini dapat memiliki pengaruh negatif yang material terhadap usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek kami. Kami juga dapat diharuskan untuk memisahkan bidang usaha kami menjadi dua bagian, jaringan bergerak atau selular dan jaringan tetap, agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemisahan bidang usaha kami ke dalam dua sektor dapat dilakukan melalui pengalihan kegiatan jaringan tetap atau jaringan bergerak atau selular kami kepada anak Perusahaan atau pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami secara material dan dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan usaha kami. Sebagai tambahan, apabila pihak regulator yang berwenang menetapkan bahwa kepemilikan asing di Perusahaan masih melebihi batasan yang ditetapkan dalam Daftar Negatif Investasi, regulator yang berwenang mungkin melarang kami untuk mengikuti tender atau untuk memperoleh izin lain atau spektrum tambahan. Apabila hal ini terjadi, usaha, peluang, kondisi keuangan dan hasil usaha kami menjadi terpengaruh.

Kegagalan untuk melanjutkan pengoperasian jaringan, beberapa sistem utama, gateway menuju jaringan kami atau jaringan para operator lainnya dapat memberikan dampak yang negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan

Untuk menyediakan layanan kami, Perusahaan sangat bergantung pada lancarnya pengoperasian jaringan. Misalnya, Perusahaan bergantung pada akses ke PSTN untuk terminasi dan sumber panggilan selular ke dan dari telepon dengan jaringan tetap, dan sebagian besar dari trafik sambungan selular dan sambungan jarak jauh internasional Perusahaan disalurkan melalui PSTN. Terbatasnya fasilitas interkoneksi PSTN yang tersedia untuk Perusahaan telah memberikan dampak negatif bagi bisnis kami pada masa lalu dan dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami di masa mendatang.

Oleh karena hambatan kapasitas interkoneksi, para pelanggan selular kami sesekali mengalami kesulitan dalam melakukan panggilan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa fasilitas interkoneksi ini akan ditingkatkan atau dipertahankan pada level saat ini.

Perusahaan juga bergantung pada beberapa sistem informasi manajemen atau sistem lainnya yang canggih dalam hal teknologi, seperti sistem tagihan pelanggan yang membuat kami dapat menjalankan bisnis. Selain itu, kami cukup bergantung pada interkoneksi ke jaringan operator telekomunikasi lainnya yang menghubungkan sambungan telepon para pelanggan kami ke para pelanggan operator telepon jaringan tetap dan para operator selular lainnya baik di dalam maupun di luar Indonesia. Jaringan kami, yang meliputi sistem informasi, teknologi informasi dan infrastruktur, dan jaringan para operator lainnya dengan mana para pelanggan kami berinterkoneksi, sangat rentan terhadap kerusakan dan gangguan operasi akibat berbagai hal seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, putusnya aliran listrik, tidak berfungsinya perangkat, cacat pada *software* jaringan, gangguan kabel transmisi atau peristiwa-peristiwa yang serupa. Misalnya, pusat pengendali telekomunikasi dan fasilitas *back-up* teknologi informasi kami sangat berkonsentrasi di kantor pusat dan *principal operating and tape back-up storage facilities* di dua tempat di Jakarta. Setiap kegagalan yang mengakibatkan gangguan pada operasional kami atau penyediaan salah satu layanan, baik akibat gangguan operasional, bencana alam atau lainnya, dapat menghambat kami dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, yang mana hal ini dapat menyebabkan para pelanggan

menjadi sangat tidak puas dan memberikan dampak negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis kami

Industri telekomunikasi terbentuk dengan adanya perubahan teknologi yang sangat cepat. Kami dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat dari segi teknologi yang saat ini sedang dikembangkan atau yang mungkin dikembangkan di kemudian hari. Perkembangan atau penerapan teknologi, layanan atau standar baru atau alternatif di masa mendatang memerlukan perubahan besar terhadap model bisnis Perusahaan, pengembangan produk baru, penyediaan layanan tambahan dan investasi baru dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, perkembangan teknologi konvergensi telepon tetap-selular yang dapat membuat sambungan telepon yang berasal dari selular tidak melalui jaringan selular, tetapi sebaliknya melalui jaringan telepon tetap, dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis Perusahaan. Pengembangan produk dan layanan baru membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat mengakibatkan lahirnya pesaing baru di pasar. Kami tidak dapat secara akurat memperkirakan bagaimana perubahan teknologi yang baru muncul dan yang akan ada di kemudian hari dapat mempengaruhi operasional atau daya saing layanan kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa teknologi kami tidak akan menjadi usang, atau tidak akan mendapat persaingan dengan teknologi baru di masa mendatang, atau bahwa kami akan dapat memperoleh teknologi baru yang diperlukan, dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, agar dapat bersaing di situasi yang telah berubah. Kegagalan kami untuk tanggap terhadap perubahan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami secara merugikan.

Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dari para pesaing utama kami, yaitu Telkom dan Telkomsel. Pemerintah dapat memberikan prioritas pada bisnis Telkom dan Telkomsel daripada Perusahaan

Per tanggal 31 Desember 2010, Pemerintah memiliki saham sebanyak 14,29% di Perusahaan, termasuk satu saham Seri A, yang memiliki hak suara istimewa dan hak veto atas beberapa hal strategis sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk keputusan untuk pembubaran, likuidasi dan mengajukan kepailitan dan memperbolehkan Pemerintah untuk menominasikan satu Direktur dari Direksi dan satu Komisaris dari Dewan Komisaris.

Per tanggal 31 Desember 2010, Pemerintah juga memiliki saham sebanyak 52,47% di Telkom, yang merupakan pesaing utama kami di sektor jasa telepon tetap SLI. Per tanggal yang sama, Telkom memiliki saham sebanyak 65,0% di Telkomsel, salah satu pesaing utama kami dalam penyelenggaraan jasa selular. Persentase kepemilikan saham Pemerintah di Telkom jauh lebih besar dibandingkan di Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana Pemerintah akan banyak mendukung bisnis Perusahaan atau bahwa Pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada Telkom dan Telkomsel serta Perusahaan ketika memberlakukan keputusan-keputusan di kemudian hari, atau ketika menggunakan wewenang regulasinya terhadap industri telekomunikasi Indonesia. Jika Pemerintah memberikan prioritas kepada kegiatan usaha Telkom atau Telkomsel daripada Perusahaan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek perusahaan kami.

Kepentingan para pemegang saham pengendali kami dapat berbeda dengan kepentingan para pemegang saham lainnya

Per tanggal 31 Desember 2010, Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. ("Qtel Asia"), memiliki sekitar 65,0% saham yang telah ditempatkan dan disetor kami. Qtel Asia saat ini seluruhnya dimiliki dan dikendalikan oleh Qtel, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Qatar dan pihak terkaitnya. Qtel Asia dan pemegang saham pengendalinya dapat menggunakan kendalinya atas bisnis Perusahaan dan dapat membuat kami mengambil tindakan-tindakan yang tidak berhubungan dengan, atau dapat berbenturan dengan, kepentingan terbaik kami ataupun para pemegang saham lainnya dari Perusahaan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan kebijakan kami. Meskipun orang-orang yang ditunjuk oleh Qtel Asia memegang jabatan baik di dalam Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa pemegang saham pengendali kami akan menunjuk direksi dan komisaris atau untuk dapat mempengaruhi usaha kami dengan cara yang menguntungkan para pemegang saham lainnya.

Kami mengandalkan personil manajemen inti, dan bisnis kami dapat terkena dampak negatif apabila tidak mampu mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti

Kami yakin bahwa tim manajemen kami saat ini telah memberikan kontribusi pengalaman dan keahlian yang besar dalam mengelola bisnis Perusahaan. Keberhasilan bisnis kami dan kemampuan kami dalam melaksanakan strategi-strategi bisnis kami di masa mendatang sangat bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh personil inti kami. Personil yang terampil di sektor industri telekomunikasi di Indonesia tidak banyak jumlahnya dan kelangkaan ini mungkin akan terus terjadi. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkan personil ahli tertentu menjadi semakin tinggi. Selain itu, seiring dengan masuknya para pemain baru di pasar yang mulai menjalankan atau memperluas bisnisnya di Indonesia, beberapa karyawan inti kami dapat meninggalkan jabatannya saat ini. Ketidakmampuan kami dalam mempekerjakan, melatih, mempertahankan dan memberikan motivasi pada personil inti dapat memberikan dampak negatif yang material bagi usaha, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang kami lakukan dapat menghambat kegiatan usaha kami dan dapat gagal dalam meraih hasil operasional jangka panjang yang lebih baik

Pada Januari 2011, Perseroan memperkenalkan program restrukturisasi organisasi yang merupakan bagian dari program transformasi kami yang dimulai pada 2009 dalam rangka meningkatkan produktivitas Perseroan dan meningkatkan hasil operasional jangka panjang. Perseroan menawarkan paket kompensasi khusus bagi karyawan yang memenuhi kirteria-kriteria tertentu sebagaimana diatur oleh Perseroan dan yang memilih untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi tersebut berdasarkan Program Rencana Pemisahan Sukarela (RPS).

Kami mengantisipasi adanya pengurangan tenaga kerja secara signifikan yang dapat menimbulkan biaya-biaya tertentu, termasuk biaya-biaya sehubungan dengan pemberian paket-paket kompensasi khusus tersebut. Kami tidak dapat memastikan kepada anda bahwa konsekuensi dari pelaksanaan program restrukturisasi organisasi ini tidak akan membahayakan bisnis dan hasil dari kegiatan operasional kami.

Apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa kami terbukti bersalah melakukan penetapan harga dan gugatan class action, kami dapat dikenakan sanksi yang cukup besar sehingga dapat menurunkan pendapatan kami dan berdampak pada bisnis, reputasi dan keuntungan kami

Pada tanggal 1 November 2007, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU"), telah mengeluarkan putusan mengenai pemeriksaan awal terhadap kami dan delapan perusahaan telekomunikasi lainnya dengan tuduhan penetapan harga SMS dan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli ("Undang-Undang No. 5/1999"). Pada 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa Telkom, Telkomsel, XL Axiata Tbk ("XL"), PT Bakrie Telecom ("Bakrie Telekom"), PT Mobile-8 Telecom Tbk ("Mobile-8") yang mana menurut pemahaman kami telah merubah nama perseroannya menjadi PT Smartfren Telecom Tbk, yang mulai berlaku sejak Maret 2011 dan PT Smart Telecom ("Smart Telecom") secara bersama-sama telah melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999. Mobile-8 mengajukan keberatan atas putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Telkomsel, XL, Telkom, Indosat, PT Hutchison CP Telecommunication ("Hutchison"), Bakrie Telecom, Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Selular ("Natrindo") dipanggil untuk menghadap sebagai turut terlapor dalam perkara ini, sedangkan Telkomsel mengajukan keberatan terhadap putusan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun KPPU memutuskan bahwa kami tidak bersalah terhadap tuduhan penetapan harga SMS, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa Pengadilan Negeri akan menguatkan putusan KPPU. Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan keberatan terhadap putusan KPPU berdasarkan pemeriksaan kembali atas putusan KPPU dan dokumen kasus yang diserahkan kepada KPPU. Jika Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan kepentingan kami, kami dapat diharuskan untuk membayar denda, yang jumlahnya akan berada sepenuhnya pada keputusan Pengadilan Negeri, hal mana dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Sebagai tambahan, selama tahun 2007 dan 2008 beberapa gugatan *class action* telah ditujukan kepada Perusahaan dan Telkomsel di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang, berkaitan dengan kepemilikan silang Temasek Holding sebelumnya di Indosat dan Telkomsel, yang dituduh telah mengakibatkan pengaturan harga telekomunikasi sehingga merugikan masyarakat. Penggugat telah menarik kembali gugatan yang diajukan kepada

Pengadilan Negeri Bekasi. Pada tanggal 27 Januari 2010, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima karena para penggugat menolak untuk membuktikan kewenangan mereka dan bahwa dua anggota penggugat tidak memenuhi syarat sebagai perwakilan dari *class action*. Karena jangka waktu mengajukan banding telah berakhir pada tanggal 18 Maret 2010, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2010 menjadi mengikat. Perkara *class action* Tangerang dilanjutkan pada tanggal 3 Mei 2010, dimana tergugat memasukkan eksepsi dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2010 majelis hakim memutuskan bahwa gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima karena ketidakseriusan penggugat dalam mengajukan gugatan dan penggugat juga gagal untuk membuktikan pemenuhan syarat sebagai perwakilan dari *class action*. Karena jangka waktu mengajukan banding telah berakhir pada tanggal 21 Juli 2010, keputusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 24 Mei 2010 menjadi mengikat. Lihat "Butir 8: Informasi Keuangan – Proses Perkara Hukum." Walaupun gugatan *class action* tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang serta gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi telah ditarik kembali, kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa pelanggan tidak akan mengajukan gugatan yang serupa di kemudian hari. Jika terdapat gugatan *class action* baru atau Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang menguntungkan para penggugat, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, reputasi dan keuntungan kami.

Kami terekspos dengan risiko tingkat bunga

Hutang kami mencakup pinjaman-pinjaman bank untuk membiayai usaha kami. Apabila memungkinkan, kami berusaha meminimalisir eksposur risiko tingkat bunga kami dengan mengadakan kontrak *swap* untuk mengubah tingkat bunga mengambang menjadi tingkat bunga tetap selama jangka waktu tertentu bagi pinjaman-pinjaman kami. Bagaimanapun, kebijakan lindung nilai kami tidak dapat secara cukup menutupi risiko kami terhadap fluktuasi tingkat bunga dan hal ini dapat berakibat pada beban bunga yang besar dan dapat mempengaruhi bisnis, keadaan keuangan dan hasil usaha kami secara negatif.

Kami terekspos dengan risiko counter-party

Kami dapat mengadakan beberapa transaksi dari waktu ke waktu yang dapat mengekspos kami kepada kredit para *counter-party* kami dan kemampuan mereka untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak mereka dengan kami. Sebagai contohnya, kami dapat menandatangani kesepakatan *swap*, yang mengekspos kami pada risiko di mana para *counter-party* dapat melakukan wanprestasi dalam kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang relevan. Apabila *counter-party*, termasuk institusi keuangan, dinyatakan pailit atau menjadi insolven, hal ini dapat berakibat pada penundaan dalam mendapatkan dana atau Perusahaan harus melakukan likuidasi terhadap posisi kami, yang dapat mengakibatkan kerugian.

Kami mungkin tidak dapat mengelola risiko pertukaran valuta asing kami secara sukses

Perubahan nilai tukar mata uang telah mempengaruhi dan mungkin terus mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha kami. Sebagian besar dari kewajiban pembayaran hutang kami adalah dalam Rupiah dan sebagian besar pengeluaran barang modal kami adalah dalam mata uang Dolar AS. Sebagian besar pendapatan kami adalah dalam mata uang Rupiah namun sebagian pendapatan usaha kami adalah dalam Dolar AS atau yang terkait dengan Dolar AS. Kami juga mungkin akan memiliki hutang jangka panjang lainnya dalam mata uang selain dari Rupiah, termasuk Dolar AS, untuk membiayai pengeluaran barang modal tambahan.

Kami saat ini melakukan lindung nilai atas sebagian kewajiban kami dalam mata uang asing terutama karena pendapatan usaha tahunan kami dalam mata uang Dolar AS lebih kecil dari seluruh biaya operasi kami dalam mata uang Dolar AS, seperti beban usaha kami dalam Dolar AS dan pembayaran hutang pokok dan bunga dalam mata uang Dolar AS. Pada tahun 2005, dalam rangka upaya mengelola eksposur valuta asing kami dan menurunkan biaya pendanaan kami secara keseluruhan, kami mengadakan kontrak swap valuta asing dengan tiga lembaga keuangan internasional yang berbeda. Dari tahun 2006 sampai tahun 2009, kami mengadakan beberapa kontrak swap valuta asing dengan tujuh lembaga keuangan internasional sebagai usaha untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing kami. Untuk kontrak-kontrak ini, kami membayar biaya di muka atau suku bunga premi tetap. Kami tidak dapat memastikan bahwa kami dapat berhasil mengelola risiko valuta asing di masa yang akan datang atau bahwa bisnis, keadaan keuangan atau hasil usaha kami tidak akan terkena dampak

negatif dengan adanya eksposur terhadap risiko nilai tukar tersebut. Lihat "Butir 11: Pengungkapan Dari Segi Kuantitatif dan Kualitatif Risiko Pasar".

Risiko yang terkait dengan Bisnis Jasa Selular Perusahaan

Persaingan dari para pemain lama dan para pemain baru dalam industri dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis jasa selular Perusahaan

Persaingan di industri jasa selular di Indonesia sangat tinggi. Persaingan di antara para penyedia jasa selular di Indonesia didasarkan pada berbagai faktor seperti harga, kualitas dan cakupan jaringan, ragam layanan, fitur yang ditawarkan serta pelayanan pelanggan. Bisnis jasa selular kami bersaing terutama dengan Telkomsel dan XL. Beberapa penyelenggara GSM dan CDMA kecil lainnya juga menyediakan jasa selular di Indonesia, termasuk Hutchison, Natrindo dan Smart Telecom. Selain para penyelenggara jasa selular yang ada, Menkominfo dapat kembali memberikan ijin penyelenggaraan jasa selular di kemudian hari, dan pemain baru tersebut akan bersaing dengan kami.

Kami memperkirakan persaingan dalam usaha jasa selular akan semakin ketat. Penyedia jasa selular yang baru maupun yang telah ada dapat menawarkan paket produk dan jasa yang lebih menarik atau teknologi baru atau konvergensi dari beberapa layanan telekomunikasi, dan mengakibatkan *churn rates* yang lebih tinggi, ARPU yang lebih rendah atau pengurangan, atau lambatnya pertumbuhan jumlah pelanggan selular kami. Pada tahun 2010, persaingan yang berlanjut pada pemain lama dan pemain baru dalam pasar jasa selular berakibat pada kampanye harga yang agresif oleh penyelenggara jasa selular. Penurunan harga penggunaan selular juga berakibat pada peningkatan jumlah pelanggan dan pada trafik jaringan, berakibat pada peningkatan kepadatan jaringan antara operator, yang mengharuskan kami untuk melakukan penambahan pengeluaran barang modal untuk terus memperluas jaringan kami. Di lain pihak, masuknya pelaku usaha di bidang telekomunikasi bergerak cukup tinggi dan kami mengantisipasi pertumbuhan bisnis yang melambat.

Lahan persaingan dalam bisnis jasa selular juga dapat dipengaruhi oleh konsolidasi industri. Pada bulan Maret 2010, Smart Telecom dan Mobile-8 mengumumkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian kerja sama untuk memakai logo dan merek yang sama di bawah nama "smartfren."

Persaingan dari para operator yang menggunakan teknologi baru, serta dengan operator baru, operator lama yang hampir melebihi kapasitas dan konsolidasi antar operator dapat menimbulkan dampak merugikan bagi posisi, bisnis jasa selular, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Banyaknya jaringan selular dan terbatasnya ketersediaan spektrum dapat menghambat peningkatan jumlah pelanggan selular kami dan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan selular Perusahaan

Kami berniat untuk meneruskan rencana promosi kami untuk menarik pelanggan dan meningkatkan pemakaian jaringan kami oleh pelanggan selular kami. Kami juga berniat untuk terus mempromosikan layanan data kami termasuk jasa BlackBerry™ dan layanan *wireless broadband* kami. Sebagai akibatnya, kami mungkin akan mengalami peningkatan kepadatan jaringan, yang dapat mempengaruhi performa jaringan kami dan merusak reputasi kami di mata pelanggan. Selain itu, pemakaian selular yang lebih tinggi di area perkotaan yang padat mungkin menuntut kami untuk menggunakan teknik rekayasa frekuensi radio, yang meliputi kombinasi rancangan selular makro, mikro dan *indoor*, untuk mempertahankan kualitas jaringan selular kami walaupun terjadi gangguan frekuensi radio dan pola pemakaian ulang radio frekuensi yang lebih ketat. Meskipun demikian, apabila jumlah pengguna selular kami atau penggunaan layanan suara dan data kami bertumbuh secara signifikan di area-area dengan kepadatan yang tinggi, kami tidak dapat menjamin bahwa usaha-usaha ini akan cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk mendukung permintaan tambahan bagi jaringan kami, kami mungkin dituntut untuk melakukan pengeluaran barang modal yang signifikan untuk memperbaiki cakupan jaringan kami. Pengeluaran barang modal tambahan tersebut, bersama dengan kemungkinan penurunan jasa selular kami, dapat berdampak buruk bagi posisi persaingan kami, bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Terlepas dari dikeluarkannya dana yang besar untuk meningkatkan jumlah pelanggan selular kami, jumlah pelanggan selular meningkat tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan usaha kami

Kami telah menggunakan sumber dana yang cukup banyak untuk mengembangkan dan memperluas jaringan selular kami serta untuk meningkatkan jumlah pelanggan selular kami. Namun demikian, ketidakpastian atas situasi ekonomi di Indonesia dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dapat menurunkan daya beli pelanggan selular kami. Terlebih lagi, terus menurunnya tarif efektif untuk penggunaan telepon sebagai dampak kampanye "free-talk" dan promosi diskon tarif baru-baru ini, peningkatan pemakaian SMS, dan penetrasi selular yang lebih tinggi pada segmen pasar berpenghasilan rendah telah mengakibatkan penurunan ARPU di tahun 2010. Jumlah pelanggan selular kami (termasuk pelanggan *wireless broadband*) meningkat kurang lebih 36,5 juta per tanggal 31 Desember 2008 menjadi 33,0 juta per tanggal 31 Desember 2009, menjadi kurang lebih 44,3 juta per tanggal 31 Desember 2010. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, ARPU kami masing-masing adalah sebesar Rp38.639, Rp37.664 dan Rp34.712. Walaupun kami bermaksud untuk terus menggunakan sumber pendanaan yang signifikan untuk meningkatkan jumlah pelanggan selular kami dan untuk memperluas jaringan selular kami untuk mendukung permintaan dari penambahan jumlah pelanggan selular, kami tidak dapat menjamin bahwa pengeluaran tersebut akan diikuti dengan peningkatan ARPU atau pendapatan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, biaya akuisisi pelanggan kami dan pengeluaran barang modal yang diperlukan untuk memperluas kapasitas jaringan kami dapat mengalami peningkatan tanpa mengakibatkan terjadinya peningkatan pada pendapatan atau laba kami, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan material terhadap bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami.

Kami mengalami churn rate yang tinggi

Kami mengalami *churn rate* yang tinggi, sebagaimana umumnya dialami oleh operator telekomunikasi Indonesia yang menyelenggarakan jasa selular pra-bayar. Kami percaya bahwa *churn rate* kami yang tinggi disebabkan oleh fakta bahwa banyak pelanggan pra-bayar kami yang memiliki lebih dari satu kartu SIM dari berbagai operator selular, yang memungkinkan mereka untuk memilih paket yang termurah. Kami yakin bahwa *high churn* kami juga sebagai dampak atas usaha kami, selama sembilan bulan pertama tahun 2009, untuk membersihkan basis pelanggan kami dengan cara menekan perilaku "*calling card*" dan memfokuskan diri kepada loyalitas pelanggan. Kami percaya bahwa pelanggan-pelanggan tersebut merupakan pelanggan-pelanggan jangka pendek yang kemungkinan tidak mengisi ulang kartu SIM tersebut. Tingginya *churn rates* kami dapat berakibat pada menurunnya pendapatan, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek kami. Pada akhir dari triwulan ke tiga pada tahun 2010, kami meluncurkan program penyimpanan dan kesetiaan yang diberi nama "Senyum Setia Indosat" yang memberikan keuntungan bagi para pelanggan kami yang terus berlangganan. Kami percaya bahwa program ini telah memberikan kontribusi dalam menurunkan *churn rate* kami menjadi 13,3% pada tahun 2010 dibandingkan dengan 15,1% pada tahun 2009.

Kami bergantung pada ketersediaan infrastuktur menara telekomunikasi

Kami sangat tergantung pada infrastruktur menara telekomunikasi kami dan yang lainnya, untuk menyediakan jaringan GSM, FWA dan 3G dan jasa telekomunikasi bergerak selular dengan memasang pemancar dan antena penerima dan fasilitas pendukung BTS lainnya pada menara tersebut. Ketersediaan dan pemasangan menara telekomunikasi tersebut memerlukan ijin dari instansi berwenang di pusat dan daerah. Baru-baru ini, beberapa instansi berwenang di daerah telah memberlakukan peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dan mensyaratkan kewajiban berbagi penggunaan menara di antara berbagai operator telekomunikasi. Selain itu, pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo telah mengeluarkan Peraturan tentang penggunaan menara bersama telekomunikasi. Lihat Butir 4: Informasi tentang Perusahaan - Peraturan mengenai Industri Telekomunikasi di Indonesia – Kewajiban Menara Telekomunikasi Bersama. Berdasarkan peraturan tersebut, pendirian menara telekomunikasi memerlukan ijin dari Pemerintah yang berwenang dan pemerintah daerah berhak menentukan wilayah penempatan dan lokasi dapat dibangunnya menara telekomunikasi tersebut. Suatu peraturan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menkominfo, serta BKPM pada 30 Maret 2009, juga mewajibkan tiap menara yang dibangun dan digunakan untuk layanan telekomunikasi harus memperoleh ijin mendirikan menara untuk menunjukkan kepatuhan pada beberapa spesifikasi teknis. Apabila suatu menara tidak memperoleh ijin tersebut, maka pihak berwenang di daerah berhak untuk menentukan denda yang diberikan

kepada pemilik menara. Selanjutnya, suatu penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara telekomunikasi wajib memperbolehkan operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menaranya (selain menara yang digunakan sebagai jaringan utamanya), tanpa diskriminasi apapun.

Peraturan ini mewajibkan kami untuk menyesuaikan rencana pembangunan menara telekomunikasi kami, dan rencana menyewakan, melakukan relokasi menara telekomunikasi yang sudah ada dan memperbolehkan operator lainnya untuk menggunakan menara kami serta melakukan hal-hal lain yang dapat berdampak pada meningkatnya biaya pendirian menara telekomunikasi, keterlambatan dalam konstruksi menara dan gangguan terhadap layanan untuk pelanggan kami. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban ini atau memenuhi target kapasitas jaringan untuk menara telekomunikasi kami, kami mungkin dapat memperoleh hambatan dalam mengembangkan dan menyediakan jasa GSM selular, FWA dan 3G. Ketergantungan kami terhadap menara telekomunikasi, digabungkan dengan beban penggunaan menara telekomunikasi bersama, dapat menyebabkan dampak negatif terhadap daya saing kepada operator lain. Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kapasitas jaringan kami, kinerja dan kualitas jaringan dan layanan kami, reputasi, bisnis, hasil usaha serta prospek Perusahaan.

Kemampuan kami untuk memelihara dan memperluas jaringan selular atau menjalankan usaha kami dapat dipengaruhi oleh gangguan pemasokan dan layanan dari para pemasok utama kami

Kami bergantung pada beberapa pemasok utama untuk menyediakan sebagian besar perangkat yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperluas jaringan selular, termasuk *microwave backbone*, dan pada beberapa pemasok lainnya berkenaan dengan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha kami. Kami mengandalkan perangkat dan barang dan jasa lainnya dari para pemasok tersebut untuk memelihara dan mengganti komponen utama dari jaringan selular dan untuk menjalankan usaha kami. Apabila kami tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mencukupi secara tepat waktu atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara komersial, atau apabila terjadi kenaikan harga yang tajam atas barang atau jasa tersebut, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi kami untuk dapat memelihara dan memperluas jaringan selular dan bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha serta prospek Perusahaan.

Kami bergantung pada ijin-ijin yang kami miliki untuk menyelenggarakan jasa selular, dan ijin-ijin ini dapat dibatalkan apabila kami tidak dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin tersebut

Kami bergantung pada ijin yang dikeluarkan oleh Menkominfo untuk penyelenggaraan jasa selular serta penggunaan alokasi spektrum frekuensi. Menkominfo, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengubah ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atas kebijakannya sendiri. Apabila kami melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari ijin-ijin tersebut atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka ijin-ijin kami dapat dicabut. Apabila terjadi pencabutan atau perubahan yang tidak menguntungkan terhadap ketentuan-ketentuan ijin yang kami miliki, atau kami tidak dapat memperbaharui ijin-ijin tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang serupa, maka hal ini dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi bisnis, keadaan keuangan, hasil usaha dan prospek Perusahaan.

Data pelanggan kami terkait dengan operasi kami tidak dapat dibandingkan antar periode

Kami mendefinisikan "pelanggan selular aktif" sebagai pelanggan selular pra-bayar yang melakukan pengisian ulang kartu SIM segera dalam 33-hari masa "tenggang waktu" setelah masa kartu SIM berakhir dengan cara menambah jumlah minimal pulsa ke dalam kartu SIM.

Kami telah dari waktu ke waktu mengurangi masa tenggang waktu yang berlaku untuk menghitung jumlah pelanggan selular pra-bayar untuk lebih mencerminkan pelanggan pra-bayar yang mengisi ulang kartu SIM milik mereka secara lebih akurat. Penambahan atau pengurangan masa tenggang waktu berakibat pada perhitungan jumlah pelanggan kami, *Minutes per Usage* setiap pelanggan dan ARPU.

Sebagai akibat diatas, jumlah pelanggan kami, *Minutes per Usage* setiap pelanggan dan ARPU tidak akan mencerminkan jumlah aktual dari pelanggan-pelangan dan tidak dapat dibandingkan antar periode. Dengan demikian, anda sebaiknya tidak menggantungkan keakuratan data ini atau membandingkan data ini dari waktu ke waktu.

Peningkatan yang signifikan atas biaya frekuensi dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha kami

Sebelumnya, kami diwajibkan untuk membayar biaya frekuensi untuk *bands* 800 MHz, 900 MHz dan 1800 Mhz yang didasari pada jumlah stasiun radio. Pada tanggal 15 Desember 2010, pemerintah telah mengubah biaya berbasis perhitungan frekuensi menjadi suatu perhitungan baru yang didasarkan pada lebar alokasi spektrum yang digunakan oleh para pelaku usaha. Sebagai pemegang spektrum terbesar di Indonesia, Indosat diharapkan untuk membayar sejumlah dana yang besar untuk biaya frekuensi mulai dari sekarang dan ke depannya. Peningkatan pada biaya frekuensi ini akan terutama didasarkan pada index harga konsumen dan populasi Indonesia.

Anggapan adanya risiko kesehatan sebagai akibat dari medan elektromagnetik yang ditimbulkan dari BTS dan peralatan telepon genggam, serta gugatan hukum dan publikasi mengenai hal tersebut, tanpa memperhatikan nilainya, dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami

Beberapa spekulasi mengenai risiko terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik dari BTS dan penggunaan telepon genggam telah timbul di masyarakat. Kami tidak dapat menjamin bahwa penelitian di masa mendatang mengenai risiko kesehatan ini tidak akan menyimpulkan adanya hubungan antara medan elektromagnetik dan dampak merugikan terhadap kesehatan sehingga Perusahaan dapat menjadi subyek gugatan dari individu yang menuduh adanya cidera atau hal-hal lainnya, yang dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha kami.

Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Layanan Data Tetap ("MIDI")

Persaingan layanan MIDI kami meningkat, dan kami mungkin akan mengalami penurunan marjin dari jasa tersebut seiring dengan meningkatnya persaingan

Layanan MIDI kami menghadapi persaingan yang semakin ketat dari para operator baru dan operator yang telah ada, yang mungkin memiliki basis pelanggan yang lebih banyak dan sumber dana yang lebih besar dari Perusahaan, seperti Telkom, yang memiliki jangkauan internasional dan regional dan infrastruktur dalam negeri yang telah berkembang. Selain itu, para operator seperti XL, First Media dan Icon+, beberapa di antaranya yang mempunyai aliansi dengan operator telekomunikasi asing, bersaing dengan kami di segmen bisnis ini. Pada tahun 2009, layanan jasa *World Link* kami menghadapi peningkatan persaingan dengan diluncurkannya layanan kabel internasional "Matrix" oleh PT NAP Info Lintas Nusa pada bulan Agustus 2008.

Bisnis satelit kami juga menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring dengan diluncurkannya satelit-satelit baru dan berkemampuan lebih besar dan dengan adanya beberapa perusahaan yang memperoleh ijin eksklusif untuk menyelenggarakan jasa penyiaran di Indonesia. Perjanjian kapasitas *transponder* satelit Palapa-C2 dan Palapa D kami mencakup jangka waktu antara dua sampai lima tahun, dan kami perkirakan sisa umur produktif satelit tersebut adalah berkisar tiga dan 9,7 tahun. Mengingat adanya satelit-satelit lain yang beroperasi dan sewa *transponder* kami yang akan berakhir atau diakhiri dan adanya persaingan harga yang semakin ketat, maka pihak penyewa *transponder* kami kemungkinan akan menggunakan satelit-satelit lain, dan karenanya dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasional dan pendapatan usaha kami dari sektor jasa ini.

Satelit kami memiliki umur produktif yang terbatas dan dapat rusak atau benar-benar musnah selama pengoperasiannya. Hilangnya atau menurunnya kinerja satelit kami, baik yang disebabkan kerusakan perangkat atau dicabutnya ijin, dapat memberikan dampak negatif bagi keadaan keuangan, hasil usaha dan kemampuan untuk menyediakan beberapa layanan Perusahaan

Satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami mempunyai umur produktif yang terbatas, saat ini diperkirakan berakhir masing-masing pada tahun 2014 dan 2020. Beberapa faktor mempengaruhi umur produktif satelit, di antaranya kualitas dari konstruksi, daya tahan sistem, subsistem dan komponen, cadangan minyak *on-board*, keakuratan dari peluncuran mereka menuju orbit, risiko badai mikrometeroit, atau bencana alam lain di luar angkasa, benturan dengan puing orbital, atau cara satelit tersebut dimonitor dan dioperasikan. Saat ini kami menggunakan kapasitas *transponder* satelit kami sehubungan dengan berbagai aspek dari bisnis kami, termasuk sewa langsung untuk kapasitas tersebut dan untuk menyalurkan sambungan jarak

jauh internasional dan jasa selular kami. Kami memperhatikan, bahwa berdasarkan faktor-faktor yang diatas, satelit Palapa-C2 kami dapat saja tidak berfungsi sebelum 2014 dan satelit Palapa-D dapat tidak berfungsi sebelum 2020, dan perbaikan di orbit tidak memungkinkan kecuali perbaikan-perbaikan terhadap perangkat lunak dasar –perbaikan peranti lunak atau operasional. Selanjutnya, Peraturan *International Telecommunications Union* ("ITU") menyatakan bahwa slot satelit yang telah ditentukan sudah dialokasikan untuk Indonesia, dan Pemerintah berhak menentukan pihak mana yang akan diberikan ijin untuk menggunakan slot tersebut. Meskipun kami saat ini memiliki ijin untuk menggunakan slot satelit yang telah ditentukan, apabila satelit Palapa-D kami mengalami masalah teknis atau tidak berfungsi, Pemerintah dapat menyatakan bahwa kami tidak berhasil memanfaatkan slot yang ada berdasarkan ijin yang diberikan kepada kami, dan dengan demikian Pemerintah dapat mencabut ijin kami dan memberikannya kepada salah satu pesaing kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami akan dapat terus mempertahankan penggunaan slot satelit yang telah ditentukan dengan cara yang dianggap baik oleh Pemerintah.

Kami memelihara asuransi *in-orbit* satelit Palapa-C2 dan satelit Palapa-D kami dengan syarat dan ketentuan yang konsisten dengan praktik industri. Terhitung sejak 31 Desember 2010, kami telah memiliki polis asuransi dengan total nilai pertanggungan sebesar US$153 juta, untuk jumlah kerugian keseluruhan dan sebagian yang diderita satelit Palapa-C2 dan Palapa D kami. Apabila kerusakan atau kegagalan tersebut mengakibatkan satelit kami tidak layak lagi untuk digunakan, maka kami mungkin akan memilih untuk menghentikan pengoperasian satelit atau menyewa kapasitas *transponder* dari penyelenggara pihak ketiga daripada membeli satelit baru. Penghentian bisnis satelit kami dapat meningkatkan biaya operasional yang terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi lainnya dan mungkin dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, keadaan keuangan dan hasil usaha Perusahaan.

Risiko yang berkaitan dengan Bisnis Jasa Telekomunikasi Tetap Kami

Masuknya operator telekomunikasi Indonesia lainnya sebagai penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional dapat memberikan dampak negatif bagi marjin operasi, pangsa pasar dan hasil usaha kami dari jasa telekomunikasi tetap

Telkom, perusahaan telekomunikasi Indonesia yang telah lama berdiri dengan sumber-sumber keuangan dan politik yang kuat, telah memperoleh ijin untuk menyelenggarakan jasa sambungan jarak jauh internasional dan meluncurkan layanan komersialnya di tahun 2004. Sebagai akibat dari masuknya Telkom ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, kami kehilangan pangsa pasar dan mengalami dampak negatif lainnya yang mempengaruhi usaha jasa telekomunikasi tetap kami. Pada akhir tahun 2006, Telkom telah menguasai pangsa pasar yang jauh lebih besar dari kami untuk sektor jasa sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, pada tahun 2009, Pemerintah telah mengeluarkan ijin baru untuk penyelenggaraan jasa sambungan jarak jauh internasional kepada Bakrie Telekom dalam upaya untuk mendorong persaingan yang lebih besar lagi di pasar jasa sambungan jarak jauh internasional. Pemain lama dan munculnya operator baru ke pasar jasa sambungan jarak jauh internasional, termasuk jasa penyelenggaraan VoIP yang dilakukan oleh sejumlah operator, secara berkelanjutan menimbulkan ancaman persaingan yang signifikan kepada Perusahaan. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa dampak negatif tersebut tidak akan terus berlanjut atau bahwa meningkatnya persaingan tidak akan terus mengikis pangsa pasar kami atau memberikan dampak negatif bagi marjin operasi dan hasil usaha kami di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional.

Kami menghadapi risiko berkenaan dengan pembukaan kode akses baru untuk sambungan jarak jauh

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan pada saat mereka melakukan telepon SLJJ. Pada tahun 2005, Menkominfo mengumumkan bahwa penggunaan kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilakukan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan akan memberikan kode akses "011" kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengijinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh "017" sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada bulan Desember 2007, Pemerintah menerbitkan peraturan baru untuk membuka kode akses SLJJ di kota pertama di Balikpapan pada bulan April 2008. Sejak tanggal pelaksanaan tersebut, penduduk Balikpapan akan dapat memilih untuk menggunakan kode akses "0", "011" atau "017" untuk melakukan panggilan jarak jauh.

Pada bulan April 2008, Perusahaan dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ dari masing-masing pelanggan kami di Balikpapan. Penggunaan kode akses SLJJ tersebut di kota-kota lain akan dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRTI. Implementasi akses SLJJ baru dapat secara potensial meningkatkan persaingan dengan menawarkan kepada pelanggan kami lebih banyak pilihan untuk layanan SLJJ. Selain itu, pembukaan kode akses SLJJ baru tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kompetisi dan berkurangnya kerjasama oleh operator saat ini, yang dapat mengakibatkan berkurangnya marjin dan pendapatan operasional, yang seluruhnya dapat menimbulkan dampak material yang negatif kepada kami. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kode akses kami akan terus ada atau dapat berhasil meningkatkan pendapatan Perusahaan dari sektor SLJJ.

Butir 4: INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN

Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT Indosat Tbk didirikan pada tanggal 10 November 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing untuk memberikan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1969 untuk membangun, mentransfer dan mengoperasikan stasiun bumi International Telecommunications Satellite Organization ("Intelsat"), di Indonesia untuk mengakses satelit-satelit di wilayah Samudera Hindia milik Intelsat untuk jangka waktu selama 20 tahun. Pada tahun 2001, sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah untuk merestrukturisasi industri telekomunikasi, kami mengadakan suatu perjanjian dengan Telkom yang bertujuan untuk menghapus kepemilikan silang kami masing-masing di beberapa anak-anak perusahaan, yaitu:

- pembelian 22,5% kepemilikan saham Telkom di Satelindo oleh Perusahaan (pada saat tersebut merupakan operator selular terbesar kedua di Indonesia);
- pembelian 35,0% kepemilikan saham kami di Telkomsel oleh Telkom; dan
- pembelian 37,2% kepemilikan saham Telkom di Lintasarta oleh Perusahaan dan pembelian obligasi konversi Lintasarta yang dipegang oleh Telkom.

Setelah diadakan perjanjian dengan Telkom, kami menyelesaikan proses akuisisi sisa saham minoritas di Satelindo pada bulan Juni 2002. Sejak memasuki pasar selular Indonesia melalui pembelian Satelindo dan pendirian IM3 dan integrasi lebih lanjut dari perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun 2003, layanan selular telah menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan usaha kami.

Pada bulan Agustus 2002, kami memasuki sektor jasa telekomunikasi tetap domestik setelah memperoleh ijin penyelenggaraan jasa jaringan tetap lokal di wilayah Jakarta dan Surabaya.

Pada tahun 2002, Pemerintah melakukan divestasi secara dua tahap atas 517,5 juta sahamnya, yaitu sekitar 50,0% dari saham Seri B Perusahaan pada saat itu. Pada bulan Mei 2002, Pemerintah menjual 8,1% dari saham biasa yang ditempatkan di Perusahaan melalui tender global yang dipercepat. Pada bulan Desember 2002, Pemerintah melakukan divestasi atas 41,9% dari saham Seri B di Perusahaan kepada (bekas) anak perusahaan dari STT Communication Ltd ("STT").

Pada bulan Juni 2008, Qtel melakukan akuisisi atas saham kami di STT, dan menimbulkan kewajiban penawaran tender oleh Qtel untuk membeli sampai dengan 1.314.466.775 saham Seri B, yang merupakan 24,19% dari total saham Seri B kami yang telah ditempatkan dan disetor, dengan harga pembelian dalam mata uang Dolar A.S. yang setara dengan Rp369.400 per ADS dan Rp7.388 per saham Seri B. Qtel adalah sebuah perusahaan publik yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara Qatar dan entitas terkaitnya. Qtel beroperasi berdasarkan hukum negara Qtar dengan saham yang terdaftar pada *Doha Securities Market*, serta *Abu Dhabi Securities Market*, dan *Global Depository Receipts* dan diperdagangkan di *London Stock Exchange*.

Per 31 Desember 2010, Pemerintah memiliki 14,29% dari saham disetor kami, termasuk 1 saham Seri A, dan Qtel Asia memiliki kurang lebih 65,00% dari saham Seri B kami yang telah ditempatkan dan SKAGEN AS memiliki kurang lebih 5,11%

dari saham Seri B ditempatkan kami. Qtel Asia dimiliki oleh Qtel. Sisa 15,59% dari saham Seri B ditempatkan kami dimiliki oleh pemegang saham publik per tanggal 31 Desember 2010. Lihat "Butir 6: Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan—Kepemilikan Saham."

Untuk penjelasan mengenai pengeluaran barang modal pokok kami sejak 1 Januari 2008 dan pengeluaran barang modal pokok kami yang sedang dijalankan saat ini, termasuk jumlah yang diinvestasikan dan metode pembiayaan, lihat "Butir 5: Tinjauan Usaha dan Keuangan serta Prospek-Likuiditas dan Sumber Pendanaan-Pengeluaran Barang Modal."

Kantor kami berlokasi di Gedung Indosat, jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta 10110, Republik Indonesia, dan nomor telepon kami adalah +62 (21) 3869615. *Website* perusahaan kami dapat diakses melalui URL *http://www.indosat.com*. Informasi yang ada dalam *website* kami bukan merupakan bagian dari laporan tahunan ini dan tidak dijadikan sebagai referensi dalam laporan tahunan ini. *Service Agent* kami di Amerika Serikat sehubungan dengan ADS adalah Bank of New York Mellon, Divisi Depository Receipt, 101 Barclay Street, New York, New York 10286, U.S.A.

Tinjauan Usaha

Kami adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan kami menawarkan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Kami adalah operator selular terbesar kedua, berdasarkan jumlah pelanggan selular, dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan langsung internasional di Indonesia. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, total pendapatan usaha kami masing-masing adalah sebesar Rp19.216,0 miliar, Rp18.864,9 miliar dan Rp19.648,4 miliar (US$2.185,3 juta).

Produk dan jasa utama kami meliputi:

- *Jasa selular*. Kami menyediakan jasa selular GSM 900 dan 1800 dan 3G kepada sekitar 44,3 juta pelanggan selular (termasuk pelanggan *broadband* nirkabel) di seluruh Indonesia, per tanggal 31 Desember 2010. Kami juga menyediakan layanan *broadband* nirkabel menggunakan platform 3G kami pada tahun 2006 dan pada tanggal 31 Desember 2010, telah memiliki kurang lebih 536.675 pelanggan.
- *Layanan MIDI*. Kami menyediakan layanan MIDI *broadband* dan *narrowband* yang terdiri dari layanan Internet dan layanan Data Komunikasi, seperti Penyewaan Sirkuit Internasional dan Domestik, layanan *Frame Relay*, dan layanan berbasis MPLS. Kami juga menyediakan layanan berbasis satelit, seperti penyewaan *Transponder*, layanan VSAT dan Layanan Bernilai Tambah, seperti Pusat Pemulihan Bencana dan Layanan Data. Kami menyediakan layanan-layanan ini secara langsung dan melalui anak perusahaan kami, Lintasarta dan IM2. Kami menawarkan paket produk dan layanan ini khususnya kepada pelanggan korporasi dan *wholesaler* kami sebagai usaha untuk menjadi penyedia solusi informasi dan telekomunikasi.
- *Jasa telekomunikasi tetap (telepon tetap)*. Kami adalah salah satu penyelenggara jasa sambungan langsung jarak jauh internasional terkemuka di Indonesia, berdasarkan jumlah menit sambungan masuk dan keluar untuk tahun 2010. Untuk mendukung jasa selular kami dan meningkatkan akses kami ke pelanggan jasa sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional, kami juga menyediakan jasa telepon tetap nirkabel menggunakan teknologi CDMA 2000 1x. Kami juga menyediakan jasa SLJJ sejak tahun 2003 dan jasa teleponi tetap lokal sejak 2002.

Bisnis kami tidak mengalami perubahan trend permintaan yang signifikan.
Pemegang saham utama kami adalah Qtel Asia, dengan kepemilikan saham sekitar 65,00% dari saham biasa kami, dan Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham sebesar 14,29% dari saham biasa kami, termasuk satu saham Seri A dan SKAGEN AS, dengan kepemilikan saham sebanyak kurang lebih 5,11% dari saham biasa kami, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010. Qtel Asia adalah perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Qtel.

Sebagai jaringan telekomunikasi Indonesia yang terintegrasi secara penuh dan pelaku penyedia jasa, kamu menawarkan kepada pelanggan kami di Indonesia jasa-jasa telekomunikasi nasional dan internasional secara lengkap, termasuk jasa selular

dan jasa internasional jarak jauh. Sejak 31 Desember 2010, pelanggan pasca bayar produk selular kami dapat melakukan *roaming* secara internasional pada 153 negara. Selain itu, untuk jasa internasional jarak jauh kami, kami mempertahankan sambungan langsung dengan 64 operator telekomunikasi asing di 40 negara.

Sebagai bagian dari lingkup global yang kami tawarkan kepada pelanggan kami, kami menawarkan jasa panggilan internasional ke Iran dan ke Kuba, Sudan dan Siriah. Terdapat pengaturan-pengaturan *roaming* di antara Indosat dan masing-masing Mobile Company of Iran ("MCI"), C Com, Syriatel Mobile Telecom SA ("Syriatel") dan Sudanese Mobile Telephone Co. ("Mobitel") untuk masing-masing Iran, Kuba, Siriah dan Sudan. Kami menganggap bahwa kegiatan usaha di antara Indosat dan Telecommunications Company of Iran ("TCI"), MCI, C Com, Syriatel dan Mobitel, serta kegiatan usaha di Iran, Kuba, Siriah dan Sudan relatif tidak signifikan untuk ukuran kami.

	Per dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember,		
	2008	2009[7]	2010
		(tidak diaudit)	
Data operasional usaha:	9.293,6	8.797,1	9.684,5
Selular:	(885,7)	1.656,4	492,4
Jumlah pelanggan selular (tidak termasuk broadband nirkabel)	460,1	139,0	143,4
Prabayar	35.591.033	31.163.859	43.170.139
Pasca bayar (Matrix)	661.213	1.082.215	565.503
Total pelanggan selular	36.252.246	32.246.074	43.735.642
Jumlah pelanggan broadband nirkabel:[2]			
Prabayar	116.341	610.446	448.116
Pasca bayar	141.659	110.681	88.559
Total pelanggan broadband nirkabel	258.000	721.127	536.675
Total pelanggan selular	36.510.246	32.967.201	44.272.317
ARPU (Rp)[3]	38.639	37.664	34.712
Menit pemakaian[4]	98	102	113
ARPM (Rp)[5]	287	220	163
Jumlah base station site[6]	13.662	16.353	18.108
Jumlah base station controllers[6]	265	315	330
Jumlah pusat mobile switching[6]	73	95	87
MIDI:			
International High Speed Leased Circuit ('000's)	46	80	218
Domestic High Speed Leased Circuit ('000's)	129	171	251
Telekomunikasi Tetap:			
Panggilan masuk (dalam juta menit)	1.582	1.559	1.724
Panggilan keluar (dalam juta menit)	474	502	463
Rasio panggilan masuk/keluar	3,3	3,1	3,7

(1) Dikarenakan perubahan dalam metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular prabayar kami, jumlah pelanggan selular, menit pemakaian untuk setiap pelanggar selular dan ARPU yang dijelaskan dalam laporan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat "Butir 3: Informasi Penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."

(2) Jumlah pelanggan *wireless broadband* hanya memasukkan mereka yang berlangganan layanan *wireless broadband* kami dan tidak termasuk mereka yang menggunakan layanan *"broadband on demand."*

(3) Rata-rata pendapatan bulanan (dalam Rupiah) untuk setiap pelanggan selular, atau ARPU, dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan layanan selular prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan penyambungan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular kami, ARPU kami yang tercantum dalam lamporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat "Butir 3: Informasi penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."

(4) Menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular dihitung dengan membagi jumlah menit untuk pemakaian panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan selular prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan dalam metode untuk menghitung jumlah pelanggan prabayar kami, maka jumlah menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular yang tertera dalam laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara beberapa periode. Lihat "Butir 3: Informasi penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."

(5) ARPM (dalam Rupiah) dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan dari pelanggan prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan penyambungan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode tertentu, dengan jumlah menit pemakaian untuk panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode-periode tersebut.

(6) Sebelum triwulan pertama 2010, base station sites, base station controllers atau mobile switching centers yang baru dibangun atau baru dibeli tetapi belum dioperasikan dimasukkan dalam jumlah base station sites, base station controllers atau mobile switching centers yang dilaporkan oleh Perusahaan ("perhitungan lama"). Pada awal triwulan pertama 2010, seperti yang diungkapkan disini Perusahaan memasukkan *base station sites*, *base station controllers* atau *mobile switching centers* yang baru dibangun atau baru dibeli dalam berbagai laporan hanya pada saat *base station sites*, *base station controllers* atau *mobile switching centers* tersebut dioperasikan. Berdasarkan perhitungan lama, Perusahaan akan melaporkan bahwa Perusahaan memiliki 14,162, 16.804 dan 18.704 base station sites, 279, 315 dan 331 *base station controllers* dan 73, 96 dan 92 *mobile switching centers* masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 2009, dan 2010.

(7) Sebagaimana dilaporkan di dalam Formulir 6-K yang diajukan pada 22 Juli 2010, kami menerbitkan penyajian kembali basis pelanggan selular kami per tanggal 31 Maret 2010 dari 39,1 juta menjadi 37,7 juta. Perbedaan angka ini timbul selama kompilasi data dari beberapa sistem pelaporan. Permasalahan yang sama disebabkan oleh pelaporan berlebihan oleh para pelanggan pada triwulan kedua dan ketiga pada 2009. Oleh karena itu, jumlah pelanggan yang mencapai 33,0 juta dan ARPU yang mencapai 33,1 juta pada tahun 2009sebagaimana dilaporkan di atas merefleksikan angka penyajian ulang, yang dibandingkan dengan jumlah akan pelanggan yang mencapai 33,1 juta dan ARPU yang mencapai 37,330 yang sebelumnya dilaporkan.

Tabel di bawah ini menyajikan detail mengenai pendapatan usaha untuk tiap periode yang ditunjukkan dan persentase kontribusi dari tiap layanan kami terhadap pendapatan usaha:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2008 (Disajikan kembali)		2009 (Disajikan kembali)		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	(dalam milliar Rp, kecuali persentase)					
Selular	14.460,8	75,3	14.331,3	76,0	15.867,1	80,8
MIDI	2.733,4	14,2	2.712,6	14,4	2.488,1	12,7
Telekomunikasi tetap	2.021,8	10,5	1.803,0	9,6	1.293,2	6,5
Total pendapatan usaha	19.216,0	100,0	18.846,9	100,0	19.648,4	100,0

Jasa selular

Jasa selular telah membukukan pendapatan sebesar Rp15.867 miliar (US$1.764,8juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang merupakan 80,8% dari total pendapatan usaha konsolidasi Perusahaan di tahun 2010. Perusahaan adalah penyelenggara jasa selular terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular, yaitu 44,3 juta pelanggan (termasuk pelanggan *broadband* nirkabel) per tanggal 31 Desember 2010. Untuk tahun 2010, kami menguasai sekitar 24,8% dari pangsa pasar, berdasarkan estimasi dengan menggunakan data pasar yang tersedia. Jaringan selular kami saat ini menyediakan cakupan jaringan di semua kota besar dan pusat kependudukan di seluruh Indonesia. Kami menyediakan jasa selular dengan teknologi GSM 900 dan GSM 1800 dan, untuk platform 3G kami, teknologi IMT-2000. Kami juga merupakan salah satu penyelenggara terdepan dalam layanan *broadband* nirkabel prabayar dan pasca bayar di Indonesia. Per 31 Desember 2010, kami memiliki kurang lebih 536.675 pelanggan *broadband* nirkabel prabayar dan pasca bayar.

Layanan-layanan

Layanan selular utama kami merupakan jasa penyediaan transfer suara dan data, yang kami jual melalui program pra-bayar dan pasca bayar. Pelanggan prabayar dan pasca bayar kami dapat menerima dan melakukan panggilan suara "on-net" ke dan dari pelanggan Indosat lainnya (termasuk pelanggan Matrix, Mentari dan IM3 kami) pada jaringan telekomunikasi kami, serta panggilan suara "*off-net*" ke dan dari pelanggan dari operator telekomunikasi lain pada jaringan telekomunikasi selular dan tetap mereka.

Kami menawarkan program pra-bayar dengan merek "Mentari" dan "IM3". Kedua produk memiliki tingkat pengakuan merek yang tinggi, sehingga memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan di pasar yang bersaing. Kami membedakan dua merek pra-bayar kami berdasarkan segmen pasar. Pemisahan tersebut

membuat kami dapat menetapkan target pemakaian dan pola pengeluaran dari segmen-segmen pelanggan yang berbeda melalui rencana promosi kami. Merek Mentari dipasarkan untuk pasar yang lebih dewasa, dimana tarif telepon dipromosikan dengan harga yang bersaing. Merek IM3 dipasarkan untuk generasi muda. dengan paket-paket suara, SMS dan data yang sangat menarik. Kami terus mengembangkan merek "Mentari" dan "IM3", menawarkan promosi dan membuat iklan yang disesuaikan untuk segmen pasar khusus tersebut. Frontier Consulting Group dan Marketing Magazine menganugerahi kami dengan "*Top Brand Award*" pada tahun 2008, 2009 dan 2010 kepada merek Mentari dan IM3 untuk pencapaian dalam membangun kesadaran merek dan pangsa pasar.

Kami menawarkan program pasca bayar, didesain untuk pengguna *high-end professional* dan korporasi, di bawah merek "Matrix." Matrix adalah paket layanan dasar dengan program pembayaran pasca bayar yang menyediakan kemampuan untuk mendaftar dengan berbagai rencana-rencana tambahan, layanan dengan nilai tambah dan layanan berbasis korporasi.

Kami menawarkan berbagai paket "Matrix" dengan fitur-fitur berbeda dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami. Merek Matrix kami mendapatkan "*Top Brand Award*" pada tahun 2010 dari Frontier Consulting Group dan Marketing Magazine.

Para pelanggan pasca bayar dan pra-bayar memiliki akses ke sambungan telepon lokal, SLJJ dan sambungan langsung jarak jauh internasional. Selain itu, kami menawarkan berbagai layanan nilai tambah, fungsi dan fitur untuk para pelanggan kami. Layanan-layanan, fungsi, dan fitur tersebut, yang, pada kasus-kasus tertentu, gratis, dapat dibeli secara terpisah, atau dikemas sesuai dengan paket yang dipilih, yang mencakup:

- *SMS*: para pelanggan dapat mengirimkan teks pesan pendek ke layar selular milik pengguna lainnya;
- *MMS*: para pelanggan jasa GSM dapat mengirimkan gambar, teks dan suara dalam satu paket pesan;
- *Voice SMS*: para pelanggan dapat mengirim pesan suara;
- *Ring-back tone*: para pelanggan dapat memilih lagu favorit mereka sebagai nada panggil yang dapat didengar oleh penelpon untuk telepon yang masuk;
- *GPRS*: menyediakan komunikasi mobile data dengan teknologi berbasis GSM, yaitu mobile Internet, data transfer dan push e-mail (layanan Blackberry™);
- *Layanan mobile data dan broadband*: para pelanggan dapat melihat-lihat dan mengunduh *content* olah raga, berita, horoskop, film, musik dan keuangan ke telepon genggam mereka, menghubungkan dengan komputer sebagai modem dan mengirim serta menerima dengan menggunakan GPRS dan jaringan 3G untuk kualitas *broadband*;
- Layanan faksimili: para pelanggan dapat mengirim dan menerima faks;
- Layanan BlackBerry™: para pelanggan dapat mendaftar dan menggunakan semua fitur dari layanan-layanan BlackBerry™, termasuk email, *chat*, *browsing*, GPS, dan berbagai aplikasi lainnya dalam BlackBerry™;
- *Voicemail*: penelepon dapat merekam pesan suara mereka yang kemudian akan didengar oleh pelanggan;
- *Caller identification*: menampilkan nomor telepon yang masuk pada layar telepon genggam pelanggan;
- *Call holding*: para pelanggan dapat menahan telepon masuk atau keluar ketika sedang melakukan sambungan atau menerima telepon lainnya;
- *Call waiting*: sinyal bagi pelanggan bahwa ada telepon masuk ketika telepon sedang digunakan. Setelah mendengar sinyal tersebut, pelanggan dapat menerima telepon kedua yang masuk sambil tetap menahan telepon pertama yang masuk;
- *Call forwarding*: para pelanggan dapat mengalihkan telepon yang masuk ke nomor selular atau telepon tetap;
- *Tagihan terperinci*: memberikan tagihan yang terperinci kepada pelanggan yang menunjukkan durasi dan biaya telepon yang dilakukan ke dan dari telepon selular tertentu;
- *Pembayaran debit langsung*: memberikan opsi pembayaran yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank atau kartu kredit pelanggan;
- *Isi ulang via SMS dan automatic teller machines*: pelanggan dapat mengisi ulang program pra-bayar mereka via SMS dan *automatic teller machines* yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank milik pelanggan; dan

- *International roaming*: baik pelanggan pra-bayar maupun pasca bayar dapat mengirim atau menerima layanan SMS, telepon dan data (GPRS/3G) ketika *roaming* di jaringan selular luar negeri.

Layanan faksimili, tagihan terperinci dan pembayaran debit-langsung hanya tersedia untuk para pelanggan pasca-bayar. Sejak tahun 2009, pelanggan pasca bayar telah mampu meminta pengiriman tagihan atau pernyataan tagihan tercetak melalui e-mail, yang meminimalisir kemungkinan tagihan tidak diterima. Kami menawarkan sejumlah layanan gratis, seperti *caller identification*, *call holding*, *call waiting* dan *call forwarding* sementara layanan lainnya, seperti SMS, *mobile data*, *broadband*, BlackBerry™, faksimili dan tagihan terperinci dikenakan biaya tambahan.

Kami menyediakan layanan SMS kepada pelanggan selular pra-bayar dan pasca bayar. Tingkat pemakaian telah meningkat dari rata-rata kurang lebih 90,4 juta pesan teks (tidak termasuk layanan SMS bernilai tambah, misalnya SMS terkait promosi oleh *content providers* dan *advertisers*) per hari di bulan Desember 2007 hingga rata-rata perhari kurang lebih masing-masing 516,0 juta pesan teks (tidak termasuk SMS bernilai tambah) pada bulan Desember 2010. Pada tahun 2008, 2009 dan 2010, penggunaan SMS memberikan kontribusi yang penting pada pendapatan usaha kami dari jasa nilai tambah seluler dan fitur-fitur tambahan. Namun, akhir-akhir ini kami telah mengalami peningkatan pendapatan dari layanan data mobile. Kami berharap agar SMS dapat terus memberikan kontribusi yang cukup penting dari jasa nilai tambah seluler dan fitur-fitur tambahan, namun kami juga mengantisipasi kelanjutan peningkatan pendapatan dari GPRS, BlackBerry™ dan layanan data mobile lainnya di masa yang akan datang.

Kami telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan operator telekomunikasi Indonesia lainnya agar jaringan selular kami dapat melakukan interkoneksi dengan PSTN yang dioperasikan oleh Telkom, *gateway* internasional kami dan jaringan pada masing-masing operator nirkabel selular dan tetap Indonesia lainnya, dan oleh karenanya pelanggan selular kami dapat berkomunikasi dengan pelanggan dari penyelenggara layanan telekomunikasi lainnya.

Kami menawarkan layanan *roaming* internasional kepada pelanggan selular kami sehingga mereka dapat melakukan dan menerima panggilan dan mengirim serta menerima pesan SMS dan menggunakan koneksi Data (pada GPRS atau 3G) ketika berada di luar Indonesia. Kami telah mengadakan perjanjian *roaming* dengan operator jaringan selular GSM di Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Selatan dan Asia. Per tanggal 31 Desember 2010, pelanggan selular pasca bayar kami dapat melakukan *roaming* internasional pada 468 jaringan, yang dimiliki oleh 336 operator di 153 negara, dan pelanggan selular prabayar kami dapat melakukan *roaming* internasional pada 20 jaringan, yang dimiliki oleh 20 operator di 16 negara.

Pada tanggal 12 Desember 2006, kami menjadi anggota perkumpulan operator telekomunikasi internasional terbesar di Asia, CONEXUS yang didirikan untuk meningkatkan nilai saing dari setiap anggotanya dalam memberikan layanan telekomunikasi internasional di negara mereka masing-masing dan di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Untuk mendukung layanan *roaming* saat ini melalui GSM, GPRS dan *wideband code division multiple access* atau W-CDMA, para anggota aliansi bekerja sama dalam menyediakan *roaming* dengan teknologi HSDPA. Aliansi ini telah memperluas cakupan layanannya menjadi lebih dari 150 juta pelanggan di sembilan negara, termasuk Indonesia. Di dalam jaringan CONEXUS dan DIGI (Malaysia), pelanggan pasca bayar kami dapat menikmati *flat rate* khusus atas penggunaan data/internet/ BlackBerry™ sebesar Rp25.000 per hari untuk penggunaan data yang tidak terbatas.

Jasa Mobile Data

Kami meluncurkan portofolio layanan *mobile data* kami pada tahun 2000. Layanan *mobile data* dapat diakses melalui, antara lain, SMS, sambungan langsung *dial-up* ke WAP *server* atau *broadband* nirkabel, di mana pelanggan dapat mengakses berbagai informasi, termasuk daftar film, *stock quote*, nilai tukar valuta asing, berita olahraga dan bisnis dan ramalan bintang, serta mengisi ulang kartu SMS prabayar mereka. Selain itu, pelanggan dapat mengirim dan menerima email dan menikmati layanan *mobile banking* dengan beberapa bank-bank terkemuka melalui telepon genggam mereka.

Kami menyajikan layanan GPRS dengan teknologi EDGE di sebagian besar kota-kota besar di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kami adalah penyelenggara telekomunikasi pertama yang meluncurkan layanan

BlackBerry™ di Indonesia. Bekerjasama dengan Research-In-Motion ("RIM"), kami memperkenalkan Layanan BlackBerry™ Enterprise untuk pelanggan Pascabayar/Matrix korporat kami pada bulan Desember 2004 dan layanan BlackBerry™ untuk pelanggan Pascabayar/Matrix pribadi pada bulan Maret 2005. Pada bulan Juni 2008, untuk membedakan kami dari operator layanan BlackBerry™ lainnya, kami meluncurkan aplikasi I-GPS dan I-Stock yang membuat pelanggan BlackBerry™ dapat melakukan akses ke sistem navigasi dan harga saham *real-time*. Pada bulan Januari 2009, kami memperkenalkan layanan langganan BlackBerry™ melalui merek prabayar kami, yaitu Mentari dan IM3. Pada bulan Oktober 2010, kami meningkatkan kapasitas sambungan ke RIM menjadi 500 Mbps *dual link*, sehingga memberikan akses yang lebih cepat bagi pelanggan BlackBerry™ kami. Dengan peningkatan ini berarti kami memiliki kapasitas sambungan ke RIM yang terbesar di Indonesia. Kami memiliki kurang lebih 600.000 pelanggan BlackBerry™ per tanggal 31 Desember 2010. Indonesia adalah pasar dengan pertumbuhan terbesar kedua di dunia untuk perangkat BlackBerry™.

Pada tanggal 8 Februari 2006, Pemerintah mengadakan tender terbuka untuk ijin spektrum 3G dan, setelah berakhirnya proses tender, kami memperoleh satu ijin spektrum 3G untuk frekuensi 5 MHz dari spektrum yang ditenderkan. Pada tender yang sama, Telkomsel dan XL juga diberikan izin spektrum 3G. Pada tahun 2007, kami mulai menawarkan layanan *broadband* 3G yang ditingkatkan ("3.5G") menggunakan teknologi HSDPA, sebuah layanan telekomunikasi bergerak nirkabel dengan teknologi 3G yang lebih maju. Pada bulan Agustus 2009, kami memperoleh spektrum tambahan berdasarkan izin yang telah kami miliki, sehingga kami dapat menggandakan kapasitas jaringan kami untuk melayani pelanggan *broadband* kami. Pada tahun 2009, kami mulai menyebarkan jaringan 3.5G yang baru dengan menggunakan teknologi HSPA+, dengan kecepatan *downlink* hingga 42Mbps dan kecepatan *uplink* hingga 5,6Mbps, dan kami mulai memberikan layanan tersebut pada tahun 2010.

Pada tahun 2007, kami mulai menawarkan layanan 3.5G *broadband*, suatu layanan telekomunikasi bergerak nirkabel dengan tekhnologi 3.5G. Pada bulan Agustus 2009, kami memperoleh spektrum tambahan untuk *carrier* 3.5G kedua, yang kami yakini dapat memungkinkan kami untuk menggandakan kapasitas jaringan kami untuk melayani pelanggan *broadband* kami. Kami telah mulai memasarkan jaringan HSPA+ 3.5G yang baru, dengan kecepatan *downlink* hingga 42Mbps dan kecepatan *uplink* hingga 5,6Mbs. Kami telah mengatur kembali portfolio *broadband* kami untuk lebih memfokuskan diri kepada target segmen kami. Sejak bulan September 2009, layanan *pure data/broadband* Internet, yang dipergunakan pada komputer pribadi (hanya data/layar besar), telah dikelola dan dijual oleh IM2. Layanan broadband nirkabel untuk telepon genggam (untuk penggunaan layar kecil) disediakan melalui Matrix, Mentari dan IM3. Pada bulan Desember 2009, kami berhasil meluncurkan program "*Broadband-On-Request*" kami yang diaktivasi oleh pelanggan sendiri melalui SMS atau USSD, untuk pelanggan Mentari dan IM3, dan pada bulan Oktober 2010 bagi pelanggan Matrix kami menyediakan pilihan paket harian, mingguan dan bulanan, dengan kuota yang dialokasikan untuk periode berlangganan masing-masing dan paket-pakat yang tidak terbatas.

Para Pelanggan dan Pemasaran

Kami membagi penduduk Indonesia berdasarkan lokasi, pendapatan dan faktor lainnya yang kami percaya menunjukkan keinginan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk membeli produk dan layanan kami. Kemudian kami menargetkan wilayah yang umumnya lebih makmur karena daerah ini cenderung menghasilkan kepadatan yang lebih tinggi untuk pelanggan selular yang potensial. Melalui pendekatan ini, kami berhasil mendapatkan pelanggan selular tersebar di seluruh pusat-pusat populasi besar di Indonesia. Kami menerapkan strategi ini untuk beradaptasi dalam rangka kompetisi dengan pendatang baru dan tekanan harga di kota-kota besar.

Jumlah pelanggan prabayar kami telah tumbuh secara signifikan pada tiga tahun terakhir relatif dengan jumlah pelanggan pasca bayar. Per tanggal 31 Desember 2008, kami memiliki 661.213 pelanggan selular pasca bayar dan 35.591.033 pelanggan selular prabayar. Per 31 Desember 2009 pelanggan kami berkembang menjadi 1.082.215 pelanggan selular pasca bayar dan 31.163.859 pelanggan selular prabayar. Per 31 Desember 2010, kami memiliki 565.503 pelanggan selular pasca bayar (Matrix) dan 43.170.139 pelanggan selular prabayar. Kami melakukan aktivitas pemasaran dan promosi secara nasional untuk mempertahankan pelanggan selular kami yang telah ada dan untuk mendapatkan pelanggan selular baru. Kami percaya bahwa pelanggan selular Indonesia cenderung mendukung kenyamanan, kemudahan aktivasi, menghindari

komitmen tetap dan mengurangi pemeriksaan kredit terkait dengan program selular prabayar. Dengan demikian, basis fokus kami yaitu pada pelanggan tertentu dalam upaya pemasaran.

Tabel di bawah ini menunjukan informasi tentang basis pelanggan selular kami, ARPU, penggunaan menit, dan ARPM per tanggal yang dinyatakan di bawah ini:

	Per tahun atau untuk tahun yang berakhir 31 Desember		
	2008	2009[7]	2010
Jumlah pelanggan selular (tidak termasuk *wireless broadband*)[1][2]	(885,7)	1.656,4	492,4
Prabayar	35.591.033	31.163.859	43.170.139
Pascabayar (Matrix)	661.213	1.082.215	565.503
Jumlah pelanggan selular	36.252.246	32.246.074	43.735.642
Jumlah pelanggan *broadband* nirkabel[3]:			
Prabayar	116.341	610.446	448.116
Pascabayar	141.659	110.681	88.559
Jumlah pelanggan *broadband* nirkabel	258.000	721.127	536.675
Jumlah pelanggan selular:	36.510.246	32.967.201	44.272.317
ARPU (Rp)[4]	38.639	37.664	34.712
Penggunaan Menit[5]	98	102	113
Pendapatan rata-rata per Menit (Rp)[6]	287	220	163

(1) Dikarenakan perubahan dalam metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular prabayar kami, jumlah pelanggan selular, menit pemakaian untuk setiap pelanggar selular dan ARPU yang dijelaskan dalam laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat "Butir 3: Informasi penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."

(2) Jumlah pelanggan *wireless broadband* hanya termasuk pelanggan layanan *wireless broadband* kami dan tidak termasuk pelanggan layanan "*broadband on demand*."

(3) Rata-rata pendapatan bulanan (dalam Rupiah) untuk setiap pelanggan selular, atau ARPU, dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan layanan selular prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan langganan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dicatat sesuai dengan SAK, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan selular prabayar kami, ARPU kami yang tercantum dalam laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara periode-periode tertentu. Lihat "Butir 3: Informasi penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu."

(4) Menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular dihitung dengan membagi jumlah menit untuk pemakaian panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan selular prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. Dikarenakan perubahan dalam metode untuk menghitung jumlah pelanggan prabayar kami, maka jumlah menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular yang tertera dalam laporan tahunan ini tidak dapat dibandingkan antara beberapa periode. Lihat "Butir 3: Informasi penting – Faktor-faktor Risiko – Risiko terkait dengan usaha layanan selular kami – data operasional pelanggan kami mungkin tidak dapat dibandingkan diantara periode-periode tertentu.

(5) ARPM (dalam Rupiah) dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan dari pelanggan prabayar dan pasca bayar tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dicatat sesuai dengan SAK, untuk periode tertentu, dengan jumlah menit pemakaian (tertagih dan tak tertagih) untuk panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode-periode tersebut.

(6) Sebelum triwulan pertama 2010, base station sites, base station controllers atau mobile switching centers yang baru dibangun atau baru dibeli tetapi belum dioperasikan dimasukkan dalam jumlah *base station sites*, *base station controllers* atau *mobile switching centers* yang dilaporkan oleh Perusahaan ("perhitungan lama"). Pada awal triwulan pertama 2010, seperti yang diungkapkan disini Perusahaan memasukkan *base station sites*, *base station controllers* atau *mobile switching centers* yang baru dibangun atau baru dibeli dalam berbagai laporan hanya pada saat *base station sites*, *base station controllers* atau *mobile switching centers* tersebut dioperasikan. Berdasarkan perhitungan lama, Perusahaan akan melaporkan bahwa Perusahaan memiliki 10.760, 14.162 dan 16.804 *base station sites*, 226, 279 dan 315 *base station controllers* dan 56, 73 dan 96 *mobile switching centers* masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009.

(7) Sebagaimana dilaporkan pada Form 6-K kami yang telah diajukan pada 22 Juli 2010, kami menerbitkan pernyataan kembali basis pelanggan seluler kami per tanggal 31 Maret 2010 dari 39,1 juta menjadi 37,7 juta. Perbedaan ini terjadi selama penyatuan data dari berbagai sistem pelaporan. Permasalahan yang sama disebabkan oleh pelaporan berlebihan pada jumlah pelanggan pada triwulan kedua dan ketiga di tahun 2009. Oleh karena itu, jumlah pelanggan sebesar 33,0 juta dan ARPU sebesar Rp37.664 di tahun 2009 sebagaimana dilaporkan di atas menunjukkan angka-angka yang dinyatakan kembali, dibandingkan dengan jumlah pelanggan sebesar 33,1 juta dan ARPU sebesar Rp37.330 sebagaimana yang sebelumnya dilaporkan.

Per tanggal 31 Desember 2010, kami memiliki kurang lebih 44.272.317 pelanggan, termasuk kurang lebih 536.675 pelanggan bagi layanan *broadband* nirkabel kami.

Untuk mengkonsolidasi saluran pemasaran kami untuk layanan selular, kami telah membuka pusat *walk-in* terintegrasi, dengan nama "Galeri Indosat," yang kami operasikan, dan "Griya Indosat," yang dioperasikan oleh distributor eksklusif kami. Pusat *walk-in* ini berfungsi sebagai oultet penjualan dan menyajikan layanan pelanggan dan informasi produk kepada

pelanggan selular yang ada dan potensial. Kami juga mempunyai tim karyawan yang berdedikasi untuk mengkoordinasi penjualan dan layanan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia.

Untuk melengkapi jalur pemasaran langsung kami, kami mempertahankan jaringan sebanyak sekitar 51 dealer independen, kepada mereka menawarkan berbagai insentif untuk promosi dan penjualan layanan-layanan kami. Dealer independen regional dan multi regional ini memiliki jalur distribusi di seluruh Indonesia dan mempromosikan layanan selular kami, terutama untuk perorangan. Dealer ini termasuk distributor besar perangkat telepon genggam dan umumnya memiliki jaringan retail sendiri, penjualan langsung dan sub dealer di Indonesia. Outlet ini tersedia sebagai tambahan outlet untuk kami dan menawarkan jangkauan luas untuk layanan, termasuk produk dan informasi layanan, layanan pelanggan dan proses pembayaran tagihan. Pelanggan lama dan baru dapat mengaktivasi dan mendaftar serta membayar untuk seluruh layanan selular prabayar pada outlet tersebut. Kami terus menjaga hubungan kami dengan dealer kami untuk meningkatkan volume penjualan melalui penempatan produk yang lebih baik, jaringan yang terintegrasi dengan dealer dan meningkatkan kesetiaan dealer.

Struktur Tarif dan Penetapan Harga

Menkominfo menetapkan formula tarif yang menentukan jumlah yang dapat dibebankan oleh operator untuk layanan selular prabayar dan pascabayar dengan tetap memperbolehkan penyedia layanan selular untuk menawarkan program promosi yang menawarkan harga lebih rendah dari tarif tertinggi. Saat ini kami menentukan harga layanan selular dengan variasi program promosi dimana kami menawarkan berbagai macam insentif untuk menarik pelanggan baru, mendorong permintaan dan meningkatkan posisi kompetisi kami. Kami dapat membebankan tarif yang berbeda untuk layanan selular prabayar dan pascabayar tergantung pada berbagai faktor yang berlaku untuk tipe tertentu. Misalnya biaya penagihan yang kami kenakan untuk pelanggan pasca bayar yang lebih tinggi dan sesuai dengan itu, tarif layanan selular pascabayar cenderung lebih tinggi dibanding layanan selular prabayar.

Pasar telekomunikasi selular Indonesia menggunakan sistem pihak yang menelpon yang membayar ("*calling party pays*") yang mengharuskan pihak yang menelpon untuk membayar biaya telepon. Jika pelanggan kami melakukan panggilan pada jaringan yang berbeda, kami membebankan biaya interkoneksi. SMS menggunakan basis "*sender keeps all*", yang berarti kami memperoleh pendapatan ketika pelanggan selular kami mengirimkan SMS, tetapi tidak pada saat pelanggan operator telekomunikasi lainnya mengirimkan SMS kepada pelanggan selular kami. Untuk layanan GPRS, kami membebankan pelanggan selular Rp3 per kilobyte untuk 300k data pertama yang diunduh dan Rp0,5/kB sampai dengan Rp2/kB (di luar pajak) setelahnya, tergantung pada waktu pengunduhan (masa ramai atau tidak ramai). Kami menerima *roaming* dari operator telekomunikasi asing ketika pelanggan selular mereka berada pada jaringan kami. Untuk layanan *broadband* nirkabel, kami menawarkan berbagai paket harga tergantung cara pembayarannya (prabayar atau pascabayar), kecepatan transmisi dan kuota bulanan.

Biaya aktivasi dan biaya langganan bulanan. Biaya aktivasi menunjukkan biaya koneksi awal yang dibebankan pada pelanggan prabayar baru ketika mulai berlangganan jaringan selular. Biaya langganan bulanan menunjukkan jumlah tetap yang dibebankan untuk pelanggan pasca bayar, terutama pengguna Layanan BlackBerry™ korporat yang mensyaratkan pelanggannya untuk memiliki perangkat lunak BlackBerry™. Sejak 1998 kami tidak pernah membebankan biaya aktivasi pada pelanggan pasca bayar kami. Kami menawarkan beberapa program untuk pelanggan pasca bayar termasuk memberikan penggunaan minimum bulanan sebesar Rp25.000, program paket "Matrix Strong" untuk Rp50.000 yang memberikan 75 panggilan-*on-net* gratis dan 75 SMS, program paket "Matrix Unlimited" yang menyediakan panggilan tak terbatas untuk 1 atau 2 nomor Indosat yang terdaftar mulai dari Rp60.000 per bulan dan program promosi lainnya.

Pendapatan pemakaian. Terdapat 3 tipe panggilan: lokal, jarak jauh domestik dan panggilan internasional. Panggilan dibebankan dengan metode pembebanan yang berbeda-beda, dari metode per detik hingga metode per menit, tergantung pada program paket yang dipilih oleh para pelanggan. Panggilan dapat dilakukan pada selular, jaringan tetap atau jaringan satelit. Untuk panggilan on-net, pelanggan kami dibebankan tarif yang menguntungkan karena kemampuan kami untuk menawarkan berbagai produk seperti layanan selular dan panggilan internasional jarak jauh. Untuk panggilan *offnet*, biaya

penggunaan yang dibebankan pada pelanggan lebih besar karena biaya interkoneksi, panggilan jarak jauh domestik dan panggilan jarak jauh internasional.

Layanan Nilai tambah. Sebelum tahun 2008, tarif untuk layanan nilai tambah tidak diatur oleh pemerintah. Sejak April 2008, Menkominfo bertanggung jawab untuk mengatur formula untuk tarif layanan SMS. Sebagaimana layanan suara, kami menawarkan diskon promosi untuk SMS dan layanan data *mobile* untuk pelanggan pascabayar dan prabayar.

Interkoneksi

Biaya untuk berlangganan layanan pasca bayar terdiri dari biaya langganan bulanan dan biaya interkoneksi berbasis pemakaian. Biaya untuk berlangganan layanan prabayar juga termasuk biaya interkoneksi berbasis pemakaian.
Biaya interkoneksi berbasis pemakaian yang dibebankan untuk layanan prabayar dan pascabayar dihitung dengan mempertimbangkan 3 biaya interkoneksi: biaya originasi, pengalihan (*transit*) dan terminasi.

Sejak Januari 2007, Menkominfo telah menetapkan formula tarif untuk layanan interkoneksi. Menkominfo menetapkan formula tarif berdasarkan basis biaya, berdasarkan DPI yang disampaikan oleh penyedia layanan yang dominan di Indonesia, termasuk kami. Menkominfo menyetujui DPI yang kami sampaikan pada tahun 2007 dan 2008 yang masih belum disesuaikan untuk tahun 2009 dan 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010, BRTI mengeluarkan surat No. 227/BRTI/XII/2010 yang menetapkan dasar tarif interkoneksi baru. Tarif interkoneksi baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan akan direfleksikan pada perubahan DPI kami. Kami menetapkan biaya yang telah ditetapkan dalam DPI kami untuk perjanjian interkoneksi kami dengan operator lain. Biaya berdasarkan DPI kami telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan kami memperkirakan kelanjutan penurunan ini.

Kami saat ini terhubung dengan jaringan telepon tetap dan selular yang dioperasikan oleh semua operator jaringan di banyak lokasi di seluruh Indonesia. Untuk meminimalisasi biaya interkoneksi kami, kami menggunakan fasilitas transmisi *backbone* kami sendiri bilamana dimungkinkan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Misalnya, untuk *routing* panggilan langsung jarak jauh dari seorang pelanggan di Surabaya ke pelanggan yang dituju di Jakarta dilakukan melalui saluran transmisi serat optik atau *microwave* milik kami sendiri sehingga kami dapat menghindari penggunaan jaringan milik operator lainnya dan dengan demikian mengurangi biaya interkoneksi yang terkait dengan *routing* penggunaan intra-jaringan kami.

Aktivasi, Penagihan dan Pembayaran

Pelanggan selular prabayar dapat membeli paket baru dari tempat-tempat penjualan kami dan titik-titik distribusi atau melalui berbagai dealer independen kami. Untuk aktivasi layanan, pelanggan selular prabayar baru harus mendaftar pada kami dengan cara mengikuti instruksi yang menggunakan menú interaktif. Pelanggan pascabayar potensial dapat mendaftar untuk layanan selular kami pada tempat penjualan dan distribusi atau melalui dealer independen kami. Banyak dari dealer independen kami yang hanya dapat memproses aplikasi baru untuk pelanggan layanan pascabayar yang mana akan diteruskan kepada kami untuk diproses. Pelanggan potensial untuk layanan pascabayar kami disyaratkan untuk memberikan bukti bahwa pelanggan tersebut memenuhi persyaratan minimum kredit. Jika pelanggan potensial tidak dapat memenuhi persyaratan pascabayar kami, perwakilan penjualan kami akan merekomendasikan layanan prabayar kami. Saat disetujui, kartu SIM untuk layanan pascabayar akan diaktivasi dalam waktu 24 jam.

Kami akan menagih para pelanggan pasca bayar kami setiap bulannya melalui divisi penagihan kami yang terpusat. Untuk pelanggan prabayar, sistem tagihan nirkabel akan otomatis mengurangi nilai rekening pelanggan prabayar ketika biaya originasi, pengalihan (*transit*) dan terminasi dikenakan. Para pelanggan pasca bayar kami memiliki berbagai pilihan cara pembayaran untuk melunasi tagihan bulanan mereka. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan kartu kredit terkemuka melalui galeri Indosat, *teller* bank atau cabang kantor pos. Selain itu, para pelanggan dapat juga melakukan pembayaran dengan cara debit otomatis melalui bank atau kartu kredit, transfer bank, *Automatic Teller Machines*, *Electronic Data Capture*, *mobile banking*, *Internet banking*, dan *phone banking*. Jatuh tempo pembayaran adalah 20 hari sejak tanggal surat tagihan. Setelah 27 hari sejak tanggal surat tagihan, kami akan mengingatkan pelanggan yang belum membayar

tagihannya dan memblokir sambungan telepon keluar mereka. Kami memblokir sambungan telepon masuk atau keluar pelanggan 40 hari setelah tanggal peringatan pertama apabila pelanggan belum membayar tagihan mereka. Kami akan menangguhkan layanan untuk rekening yang tagihannya telah melewati jatuh tempo lebih dari 50 hari dan menghapus data pelanggan tersebut dari jaringan kami serta memutuskan secara permanen nomor dan kartu SIM pelanggan setelah 120 hari sejak tanggal surat tagihan.

Kami telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penipuan dan meminimalisasi kerugian. Kami mengirimkan *voucher* prabayar kepada para dealer independen kami hanya berdasarkan pembayaran tunai pada saat diserahkan dan kami tidak menerima pembayaran layanan kami dari para pelanggan selular melalui dealer independen kami. Selain itu, tergantung pada tingkat penggunaan, kami dapat mewajibkan pemberian uang jaminan yang dapat dikembalikan kepada para pelanggan. Kami akan mengkaji secara berkala rekening dari para pelanggan yang tingkat penggunaannya tinggi untuk memastikan agar uang jaminan mereka tetap memadai jumlahnya.

Kompetisi

Dalam beberapa tahun ini, bisnis layanan selular di Indonesia menjadi sangat kompetitif. Kompetisi pada industri komunikasi selular utamanya didasarkan kepada cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus serta kualitas dan layanan pelanggan. Berdasarkan estimasi internal kami, tiga penyelenggara jasa nirkabel di Indonesia, Telkomsel (yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Telkom), kami dan XL (yang secara tidak langsung mayoritas sahamnya dimiliki oleh Axiata Bhd dari Malaysia), secara bersama-sama menguasai sekitar 77% pangsa pasar jasa nirkabel di Indonesia pada tahun 2010.

Kami juga bersaing dengan operator layanan akses nirkabel tetap lainnya. Pada bulan Mei 2003, Telkom memperkenalkan produk TelkomFlexi, suatu layanan CDMA 2000-1X di wilayah Jakarta. Saat ini, Telkom menyediakan layanan ini secara nasional. Telkom menyediakan layanan ini sebagai jasa akses telepon tetap nirkabel, akan tetapi layanan ini telah berkembang baik mobilitas maupun fitur nilai tambahnya sehingga menyerupai jasa selular. Setelah menerima permohonan dari asosiasi industri, Menkominfo mengeluarkan sebuah Keputusan Menteri yang menyatakan bahwa wilayah layanan untuk akses jaringan tetap nirkabel hanya terbatas pada wilayah yang sama dengan kode area dari layanan jaringan telepon tetap lokal. Dengan demikian, operator layanan akses telepon tetap nirkabel dilarang memperluas layanan *roaming*nya ke kode area yang berbeda, namun operator CDMA tetap memiliki kemampuan untuk mencapai hasil yang sama dengan memberikan nomor baru kepada pelanggan ketika mereka pindah ke kota-kota lain. Selain TelkomFlexi, operator telekomunikasi lainnya menawarkan layanan yang serupa misalnya Bakrie Telecom dan Mobile-8, yang menawarkan layanan mereka secara nasional.

Dari waktu ke waktu, operator telekomunikasi Indonesia yang melaksanakan program perolehan pelanggan secara agresif dengan target meningkatkan pangsa pasar mereka masing-masing. Dengan menawarkan potongan harga, bonus dan tarif khusus, para operator berupaya membedakan layanannya dari layanan operator lainnya, terutama berdasarkan tarifnya. Persaingan ini mengakibatkan tarif menurun, dan dengan demikian kami yakin bahwa ARPU pelanggan selular terus mengalami penurunan untuk sebagian besar operator telekomunikasi Indonesia.

Kami yakin bahwa persaingan layanan 3G akan semakin ketat karena para operator telekomunikasi mulai memindahkan jaringannya ke lokasi berpenduduk banyak. Saat ini, ada lima operator telekomunikasi yang memegang ijin layanan 3G, yaitu: Telkomsel, Hutchison, Natrindo, XL dan kami. Kami menyediakan layanan *broadband* nirkabel menggunakan platform 3G kami pada tahun 2009, dan per tanggal 31 Desember 2009, kami telah menyediakan layanan 3G di 50 kota di seluruh Indonesia.

Kompetitor utama kami untuk layanan *broadband* nirkabel adalah Telkomsel dengan layanan "Flash" dan XL dengan layanan "XL unlimited", keduanya menggunakan teknologi 3.5G W-CDMA. Operator lainnya seperti Smart Telecom dan Mobile 8 juga menyediakan layanan wireless broadband dengan teknologi EVDO-CDMA.

Kami yakin bahwa rintangan untuk masuk ke industri jasa selular dan akses telepon tetap nirkabel Indonesia saat ini cukup tinggi mengingat terbatasnya spektrum frekuensi yang tersedia, iklim permodalan yang tinggi, sulitnya memperoleh lahan menara untuk perluasan jaringan dan sudah terbentuknya pasar dari tiga pemain yang ada, yaitu kami, Telkomsel dan XL. Namun demikian, kami mengantisipasi adanya peningkatan persaingan di dalam industri layanan selular dan akses telepon tetap nirkabel secara umum. Dalam menanggapi hal ini, kami bermaksud memfokuskan sebagian besar pengeluaran barang modal di masa mendatang untuk bisnis selular kami dalam upaya meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan dan menyediakan berbagai layanan nilai tambah.

Jasa MIDI

Produk dan jasa yang kami tawarkan dalam segmen bisnis ini meliputi *leased line* berbasis *point-to-point* domestik dan internasional yang berkecepatan tinggi dengan kapasitas *broadband* dan *narrowband*, layanan *packet-switching* berkinerja tinggi, dan layanan internet, layanan multi lapisan berbasis MPLS, penyewaan transponder satelit untuk para penyedia telekomunikasi dan segmen pelaku *broadcast*, dan layanan nilai tambah seperti Pusat Pemulihan Bencana dan Pusat Data. Mengingat potensi pertumbuhan yang signifikan atas layanan data dan layanan jaringan lainnya—termasuk layanan berbasis Internet—dan keperluannya yang meningkat terhadap keseluruhan strategi bisnis kami, kami telah memberikan perhatian yang cukup pada segmen usaha ini. Pertumbuhan ditekankan pada transmisi data yang *reliable* dan interkoneksitas pelanggan korporat kami, terutama mereka yang memiliki berbagai cabang atau lokasi, sehingga memberikan kesempatan yang sangat baik bagi kami. Jasa layanan MIDI memberikan pendapatan sebesar Rp2.488,1 miliar (US$276,7 juta) atau 12,7% dari total pendapatan operasional konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010.

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2008	2009	2010
MIDI:			
Sirkit Disewakan Berkecepatan Tinggi Internasional ('000s)	46	80	218
Sirkit Disewakan Berkecepatan Tinggi Nasional ('000s)	129	171	251

Jasa-Jasa

World Link, Direct Link dan Domestic Link. *World Link* adalah IPLC yang menyediakan sambungan internasional untuk sirkit data digital berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point* melalui kabel bawah laut dan terrestrial dan memberikan sambungan berkecepatan mulai dari 64Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2Mbps untuk *narrowband* atau 45 Mbps dan lebih untuk *broadband*. *Direct Link* adalah jasa *leased line* melalui satelit/sambungan VSAT yang menyediakan sirkuit data digital berkecepatan tinggi berbasis *point-to-multipoint* dan memberikan kecepatan sambungan mulai dari 64Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband*. *Domestic Link* adalah jasa sirkuit *leased* domestik berkecepatan tinggi berbasis *point-to-point*, dan memberikan kecepatan sambungan sebesar 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau sebesar 45 Mbps dan lebih untuk *broadband*. Sebagian besar pelanggan *broadband World Link* adalah para penyelenggara telekomunikasi yang membutuhkan *dedicated broadband international data links*, dan pelanggan *narrowband World Link* kami sebagian besar terdiri dari para pengguna perusahaan yang berlangganan jasa *World Link* untuk keperluan internal mereka. Koneksi *Direct Link* digunakan untuk sambungan internasional dan pengguna l*eased line* lainnya yang berlokasi di daerah yang tidak dicakup oleh jaringan-jaringan terrestrial domestik. Pelanggan *Domestic Link broadband* kami di pasar domestik meliputi penyedia jasa telekomunikasi yang memerlukan sambungan data *broadband* domestik yang berdedikasi dan pelanggan *narrowband Domestic Link* kami yang mana mayoritas adalah pelanggan korporasi yang menggunakan layanan untuk kepentingan mereka sendiri. Kami mencatat pendapatan usaha sebesar Rp278,8 miliar (US$31,0 juta), dari usaha *World Link*, *Direct Link* dan *Domestic Link* mewakili 11,2% dari pendapatan usaha konsolidasi jasa MIDI kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

IP VPN. Kami menyediakan jasa IP VPN baik internasional maupu nasional melalui Indosat, Lintasarta dan IM2, yang memberikan kepada para pelanggan konektivitas yang bersifat *multi-point* untuk komunikasi data melalui jaringan IP kami yang kuat. Layanan-layanan ini membantu fleksibilitas, skalabilitas dan mengakomodasi aplikasi perhitungan yang rumit,

sambil tetap menjaga kualitas layanan, keamanan dan kehandalan yang letaknya dekat dengan sirkuit *leased* milik swasta. Per 31 Desember 2010, layanan IP VPN domestik Indosat, Lintasarta dan IM2 tersedia di 74 kota besar di Indonesia, dan layanan IP VPN internasional Indosat memiliki kehadiran yang kuat di Asia Tenggara, dengan cakupan sampai ke Asia Utara, Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, bekerjasama dengan beberapa operator layanan global seperti AT&T, C&W, BT dan NTT. Kami mencatat pendapatan usaha sebesar Rp605,7miliar (US$67,4 juta) dari usaha IP VPN, mewakili 24,3% dari pendapatan usaha layanan MIDI konsolidasi kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

MPLS dan Metro Ethernet. MPLS dan Metro Ethernet adalah layanan *leased line* domestik dan internasional, melalui kumpulan jaringan Internet Protocol kami yang kuat. MPLS merupakan suatu sarana teknologi yang memiliki kecepatan untuk memberikan berbagai kelas layanan pada sebuah jaringan Internet Protocol, yang menghasilkan sebuah *link* komunikasi data yang telah diamankan, dapat diandalkan, terukur dan fleksibel, baik yang berbasis *point-to-point* maupun yang berbasis *multipoint* pada suatu jaringan domestik dalam kota maupun internasional. Layanan berbasis MPLS kami terdiri atas Premium Ethernet Point to Point, Premium Ethernet Multi Point dan IP VPN; serta menawarkan kecepatan sambungan sebesar 64 Kbps dan kelipatannya sampai dengan 2 Mbps untuk *narrowband* atau sebesar 45 Mbps dan 155 Mbps untuk *broadband*. Metro Ethernet memberikan *bandwidth* berkecepatan tinggi untuk jaringan domestik dalam kota dengan kecepatan *line port* sebesar 10 Mbps, 100 Mbps dan 1 Gbps dan basis Ethernet dengan kenaikan *bandwidth* sebesar nx1 Mbps yang dijamin.

Frame Relay dan ATM. Kami menyediakan jasa *Frame Relay* dan ATM, baik internasional maupun domestik, suatu teknologi *leased packet switch* berkecepatan tinggi, terutama melalui Indosat dan Lintasarta, yang memberikan para pelanggannya konektivitas yang bersifat multilateral, interkoneksi LAN dan kekuatan yang dapat diandalkan untuk membantu aplikasi perhitungan yang rumit.

Kami menawarkan berbagai layanan konektivitas data – *World Link*, *Direct Link*, *Domestic Link*, IP VPN, MPLS dan *Metro Ethernet Frame Relay* dan ATM – kepada berbagai pelanggan perusahaan kami, termasuk perusahaan multinasional, dibuat untuk menyesuaikan persyaratan informasi dan telekomunikasi tertentu dari pelanggan, parameter harga, ketentuan kecepatan, dan pertimbangan keamanan mereka yang spesifik.

Layanan Satelit. Kami menyewakan kapasitas *transponder* satelit Palapa-D kami yang berada di orbital slot yang terletak di wilyah Asia-Pasifik bagi perusahaan penyiaran dan operator telekomunikasi. Indonesia memiliki pasar televisi yang besar dimana sejumlah perusahaan penyiaran domestik swasta dan *programer* internasional bersaing dengan perusahaan penyiaran milik negara dan banyak perusahaan penyiaran baik domestik dan internasional menyewa kapasitas *transponder* satelit kami. Kami mengadakan perjanjian sewa *transponder* satelit Palapa-D kami yang berbeda-beda jangka waktunya, akan tetapi umumnya berakhir dalam waktu dua sampai dengan lima tahun sejak tanggal berlakunya sewa. Sewa *transponder* dapat diakhiri karena adanya pelanggaran perjanjian sewa dan sebagian besar dari perjanjian sewa mengatur bahwa pihak penyewa dapat mengakhiri sewa dengan pemberitahuan (umumnya enam sampai dengan 12 bulan) dengan memberikan pembayaran pengakhiran perjanjian oleh penyewa yang besarnya sama dengan persentase dari uang sewa yang seharusnya dibayarkan apabila sewa *transponder* tidak diakhiri. Terlepas dari pemakaian oleh kami sendiri, kami juga menyewakan kapasitas *transponder* pada satelit Palapa-C2 kami, dengan jangka waktu penyewaan maksimal tiga tahun, kepada operator telekomunikasi lainnya.

Kami juga menyediakan berbagai jasa satelit tambahan lainnya, termasuk penggunaan sesekali atas jasa TV, Indosat TV link, jasa jaringan privat, akses Internet dan multimedia dan *video conferencing*. Kami perkirakan permintaan atas jasa satelit akan terus meningkat, terutama disebabkan oleh semakin berkembangnya jasa derivatif satelit. Tekanan tarif diperkirakan akan melunak sebagai konsekuensi dari meningkatnya permintaan. Jasa satelit menghasilkan Rp136,0 miliar (US$15,1 juta) atau 5,5% dari pendapatan usaha jasa MIDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Layanan Internet. Kami menyediakan jasa *Internet Network Provider* bagi perusahaan ISP dan *Dedicated Internet Access* bagi para pelanggan pengguna akhir dan perusahaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, kami

mengoperasikan tiga ISP yang mengkontribusi pendapatan sebesar Rp519,6 miliar (US$57,8 juta). IM2 menyediakan jasa dial-up, dan per tanggal 31 Desember 2010, IM2 memiliki 2.130 pelanggan korporasi dan usaha kecil hingga menengah dan 12.756 pelanggan eceran. Dalam mengantisipasi meningkatnya persaingan di segmen bisnis Internet, IM2 telah mengembangkan strategi untuk memperluas bisnisnya dengan cara membangun *Internet protocol backbone* di wilayah-wilayah yang berpotensi berkembang, menempatkan jasa *public hotspot*, mendirikan pusat layanan pelanggan, mengembangkan jaringannya melalui investasi bersama dengan menggunakan teknologi *hybrid fiber* dan *coaxial* serta memperbaiki proses bisnisnya.

Lintasarta menawarkan kepada para pelanggan Internetnya layanan "IdOLA" dan layanan "LintasartaNet" untuk pelanggan korporat. Dengan IdOLA dan LintasartaNet, para pelanggan dapat mengakses informasi dari berbagai penyelenggara konten di Indonesia dan di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan LintasartaNet untuk promosi Internet, alokasi software dan komputer, kerjasama usaha atau transaksi perdagangan domestik dan internasional. Kami membukukan 20,9% dari pendapatan usaha konsolidasi jasa MIDI kami dari jasa Internet untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

VSAT Net/IP dan VSAT Link. Layanan VSAT Net/IP dan VSAT Link Lintasarta merupakan sistem data *networking* berbasis satelit. VSAT Net/IP menghubungkan dan mengendalikan trafik data antar lokasi yang berjauhan, yang dapat membangun data secara cepat untuk para pelanggan jaringan yang trafiknya rendah sampai dengan menengah, seperti di sektor jasa keuangan, transportasi, perdagangan dan distribusi. VSAT Link menyediakan transmisi digital berbasis *point-to-point* untuk lokasi yang jauh oleh perusahaan dengan trafik menengah sampai padat seperti pabrik, pertambangan dan industri jasa keuangan.

Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center – DRC) dan Pusat Data. Kami menyediakan DRC dan Pusat Data melalui Indosat dan Lintasarta. Kami menawarkan *co-location*, *rack*, *cage*, *power* dan fasilitas pendukung lainnya sebagai layanan bernilai tambah untuk para pelanggan korporasi kami. Kami juga menyediakan layanan *leased line backbone* atau domestik dari lokasi-lokasi DRC atau Pusat Data kami kepada kantor-kantor pusat para pelanggan kami, sebagai bagian dari layanan telekomunikasi menyeluruh yang kami sediakan.

Pelanggan dan Pemasaran

Pelanggan layanan MIDI kami terutama adalah pelanggan korporat dan SME, walaupun kami juga memiliki pelanggan grosir dan ritel untuk layanan-layanan tertentu, seperti jasa Internet. Kegiatan pemasaran untuk layanan MIDI meliputi presentasi kelompok, pengiriman pos langsung, promosi dengan mitra, program mempertahankan pelanggan dan iklan di publikasi dan media cetak. Pada Juni 2010, kami meluncurkan situs *Indosat Corporate Solutions Micro* kami, yang bertujuan untuk memfasilitasi para pelanggan korporasi dalam memperoleh informasi mengenai produk-produk Solusi Korporasi Indosat dan meningkatkan pengetahuan para pelanggan kami atas merek dagang dan layanan kami. Masing-masing unit usaha berupaya mempertahankan hubungan pelanggan melalui kegiatan seperti forum pengguna, seminar pelatihan, kunjungan dan pertemuan informal dengan para pelanggan. Lintasarta berfokus pada perluasan pangsa pasarnya di segmen industri di luar kompetensi utamanya yaitu di bidang perbankan dan keuangan, mengingat kemungkinan adanya konsolidasi dan restrukturisasi industri-industri tersebut di Indonesia. Selain itu, Lintasarta telah semakin berfokus pada upaya penjualan dan pemasarannya pada perusahaan berskala kecil sampai menengah atau UKM, dengan mengemas ulang produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Lintasarta sedang memperluas cakupan geografis produk dan jasanya yang sudah ada dalam rangka menghadapi permintaan yang meningkat atas infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil sebagai dampak dari perkembangan politik Indonesia, di antaranya pertumbuhan otonomi daerah.

Kami mendukung para pelanggan kami melalui staf lokal, *24-hour help desk* dan manajemen jaringan *realtime* terpadu. Pada bulan April 2000, Lintasarta memperoleh sertifikasi ISO 9002 untuk layanan *frame relay*, *digital data network* dan VSAT. Pada bulan Januari 2002, kami memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk layanan *frame relay*, *digital data network* VSAT, yang membuktikan komitmen kami terhadap kepuasan pelanggan dan peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan. Sebagai hasilnya, Frontier dan majalah Marketing memberikan penghargaan "Top Brand Award" untuk kategori ISP untuk

tahun 2005 hingga 2010 dan "*Best Contact Center Award*" untuk tahun 2007, 2008 dan 2009. Sebagai bentuk apresiasi dari komitmen kami terhadap kegiatan operasional yang unggul, pada bulan Juni 2010, *Cable and Wireless* menganugerahi Indosat sebagai "Mitra Terbaik" dalam kategori Pengelolaan dan Pencapaian Operasional Unggul di Asia dalam Pertemuan Para Mitra Global Cable and Wireless di Singapura.

Struktur Tarif dan Harga

Para pelanggan berbagai layanan MIDI kami dikenakan biaya berdasarkan jenis produk dan jasa yang disediakan, kapasitas yang disewakan kepada mereka, sektor industri mereka, lokasi geografis dan lamanya kontrak jasa mereka dengan Perusahaan (yang umumnya berkisar satu sampai tiga tahun). Tarif layanan ini biasanya meliputi komponen-komponen sebagai berikut: biaya instalasi awal; biaya bulanan (berdasarkan lokasi dan kecepatan akses); biaya per transaksi (berdasarkan volume, waktu dan/atau jarak yang dilalui untuk trafik jaringan); dan biaya-biaya jasa lainnya, seperti konsultasi atau manajemen proyek.

Tarif sewa *transponder* satelit untuk penyewa internasional dinegosiasikan secara sendiri-sendiri dengan pelanggan dan bergantung pada persediaan dan permintaan jasa di wilayah yang dicakup oleh satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami. Sewa untuk luar negeri kami rata-rata mencapai US$1,03 juta per tahun untuk *transponder* yang penuh. Hampir semua pembayaran sewa untuk luar negeri dilakukan setiap tiga bulan di muka dalam mata uang dolar A.S. dan mata uang lainnya yang lazim digunakan.

Persaingan

Para penyelenggara jasa komunikasi data di Indonesia terutama bersaing dalam hal harga, ragam jasa yang disediakan dan kualitas jasa pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan di antara para penyelenggara jasa komunikasi data semakin meningkat terutama karena dikeluarkannya ijin-ijin baru sebagai dampak dari deregulasi di sektor industri telekomunikasi Indonesia. Kami perkirakan persaingan akan terus semakin ketat. Menurut kami pesaing utama kami adalah Citra Sari Makmur, Tangara Mitracom, Satkomindo dan Primacom untuk jasa VSAT, dan Telkom, XL, Indonesia Comnet Plus (Icon+), dan Citra Sari Makmur untuk jasa sewa jaringan. Pada Juni 2010, layanan sewa jaringan internasional kami menghadapi tantangan besar dari para operator baru, seperti Matrix dan Moratel, selain dari para kompetitor utama kami yaitu Telkom dan XL. Pemerintah menyatakan Telkom sebagai operator dominan untuk penyewaan sirkit pada 2007. Sebagai hasil dari deklarasi ini, kami percaya bahwa Telkom akan memerlukan persetujuan regulasi ketika kami dapat mengajukan tarif baru tanpa persyaratan untuk persetujuan Pemerintah.

ISP di Indonesia bersaing pada dasar kualitas jaringan, harga dan jangkauan jaringan. Sehubungan dengan Internet terkait denga jasa nilai tambah, kami bersaing dengan Telkom dan ISP yang telah ada seperti First Media, Biznet, CBN, Berca dan Indonet. Kami juga menghadapi kompetisi yang signifikan dari ISP baru yang izinnya disetujui oleh Menkominfo.

Dengan adanya permintaan pasar perusahaan yang lebih cepat dengan harga terjangkau, banyak dari pemasok *bandwidth* sudah mulai melakukan investasi secara signifikan menuju pembangunan, infrastruktur superior dengan teknologi baru, seperti "Dense Wavelength Division Multiplexing" dan teknologi DWDM. Teknologi DWDM merupakan ancaman yang kompetitif terhadap bisnis kami karena infrastrukturnya memungkinkan pemasok *bandwidth* untuk menawarkan lebih banyak kapasitas *bandwidth* dengan efisiensi biaya yang lebih baik. Industri *bandwidth* telah menghadapi menghadapi tantangan baru dari munculnya operator baru, seperti Moratel dan Matrix Cable System, yang mengatur kabel internasional yang menghubungkan Indonesia dan Singapura pada tahun 2008.

Perusahaan-perusahaan di sektor bisnis satelit terutama bersaing dalam hal kekuatan *transponder*, penawaran produk dan tarif. Umumnya, tarif layanan bergantung pada kombinasi dari kekuatan dan cakupan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, persaingan di sektor bisnis satelit di wilayah Asia-Pasifik semakin meningkat. Pengoperasian satelit terutama meliputi sewa *transponder* untuk perusahaan penyiaran dan operator layanan VSAT, selular dan SLI dan ISP. Kami menghadapi persaingan dari penyelenggara jasa domestik dan asing di masing-masing bidang ini. Dalam menyewakan *transponder* kami di satelit Palapa-D, kami bersaing sangat ketat di Indonesia dengan Telkom dan PT Pasifik Satelit Nusantara ("Pasifik

Satelit Nusantara"). Pasifik Satelit Nusantara juga memiliki *transponder* pada Mabuhay Philippines Satellite. Telkom saat ini mengoperasikan satelitnya sendiri (Telkom-1 dan Telkom-2) dan stasiun bumi, terutama untuk menyediakan hubungan transmisi *backbone* untuk jaringannya. Telkom juga menyewakan kapasitas *transponder* satelit dan menyediakan layanan stasiun bumi satelit *uplinking* dan *downlinking* kepada para pengguna domestik dan internasional. Satelit swasta lainnya yang ada dalam pasar penyiaran dalam wilayah cakupan satelit Palapa adalah AsiaSat-4, AsiaSat-3S, Apstar-2R, Apstar-5, Apstar-6, ThaiCom4, ThaiCom5, Measat-3, Measat-3a, Intelsat7, Intelsat8, Intelsat10 dan Intelsat12. Measat Sdn. Bhd, yang mengoperasikan satelit-satelit Measat, APT Satellite, yang mengoperasikan satelit-satelit Apstar, dan ThaiCom Public Company Ltd, yang mengoperasikan satelit-satelit ThaiCom, juga bersaing secara langsung dengan kami di dalam pasar regional Asia. Selain itu, dengan meningkatnya popularitas televisi Direct-To-Home atau DTH, bisnis satelit kami akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan diluncurkannya satelit-satelit regional yang baru dan berkemampuan tinggi. DTH adalah penerimaan program satelit dengan piringan satelit/*dish* tersendiri yang ditempatkan pada masing-masing rumah. Perusahaan penyiaran nasional berupaya memperoleh ijin DTH agar dapat menyediakan jasa penyiaran yang berskala nasional di Indonesia. Televisi DTH akan memungkinkan para perusahaan penyiaran untuk menyalurkan isi program mereka tanpa menggunakan dukungan jaringan telekomunikasi kami. Selain itu, karena popularitas DTH yang semakin bertambah, kami menghadapi kemungkinan hilangnya pelanggan karena DTH menggunakan platform satelit yang tidak kami sediakan.

Jasa Telekomunikasi Tetap

Jasa telekomunikasi tetap kami meliputi layanan sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional serta jasa akses telepon tetap nirkabel. Untuk 31 Desember 2010, kami mencatat pendapatan operasional sebesar Rp1.293,2 miliar (US$143,8 juta) dari jasa telekomunikasi tetap, yang mewakili 6,5% dari total pendapatan usaha konsolidasi kami. Kecuali yang berhubungan dengan pembayaran selular, pelanggan nirkabel tetap dan pelanggan jaringan tetap, kami tidak menerima pembayaran langsung dari pengguna akhir jasa sambungan jarak jauh internasional. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 12,4% dari pendapatan usaha telekomunikasi tetap dihasilkan dari jumlah yang diterima atau terpiutang dari Telkom dan penyedia layanan telekomunikasi domestik lainnya untuk panggilan keluar, 64,4% dihasilkan dari pendapatan bersih dengan penyedia layanan telekomunikasi luar negeri untuk panggilan keluar dan panggilan masuk dan sisanya 23,2% berasal dari layanan akses nirkabel tetap, tagihan langsung untuk jasa-jasa spesifik, seperti *calling card* dan pelanggan jaringan tetap untuk periode yang sama.

Layanan-Layanan

Jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh Internasional. Kami menyediakan berbagai jasa telekomunikasi suara internasional dan jasa telekomunikasi internasional baik *switched* maupun *non-switched*. Layanan *switched* memerlukan interkoneksi dengan PSTN atau fasilitas milik operator selular lainnya; sedangkan layanan *non-switched* dapat dilakukan melalui fasilitas transmisi kami tanpa perlu interkoneksi.

Melalui layanan jasa sambungan internasional "001" dan "008", saat ini Perusahaan menguasai kurang lebih 25% bisnis SLI di Indonesia. Demi meningkatkan kompetisi yang bersumber dari deregulasi industri, kami meluncurkan "FlatCall 016" pada bulan Maret 2005 dan memasarkannya sebagai produk baru yang ditujukan kepada konsumen pada segmen pasar yang paling sensitif harga. Mulai bulan Januari 2007, dalam rangka mematuhi keputusan dari Pemerintah, kami mengubah kode akses menjadi lima digit dan menamakannya "FlatCall 01016". Produk "FlatCall 01016" menawarkan tingkat tarif bersaing untuk beberapa negara tujuan sembari menawarkan tingkat tarif VoIP regular untuk negara-negara lain.

Sambungan keluar internasional jarak jauh kami disalurkan melalui salah satu dari empat sentral gerbang internasional kami. Dari gerbang ini, layanan sambungan langsung jarak jauh internasional akan ditransfer via satelit atau kabel laut berdasarkan program routing yang telah ditetapkan, yang dikembangkan berdasarkan kolaborasi dengan para operator telekomunikasi asing. Operator asing yang menerima panggilan melalui sentral gerbang internasional bertanggung jawab untuk mengakhiri panggilan kepada penerima panggilan. Demikian pula, panggilan internasional jarak jauh yang diterima oleh sentral gerbang internasional kami dialihkan dari sentral gerbang internasional menuju tujuan mereka di dalam negeri melalui jaringan lokal Telkom, jaringan selular, jaringan tetap lokal atau operator selular lainnya dimana kami memiliki perjanjian interkoneksinya.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, pendapatan kami yang berasal dari jasa sambungan jarak jauh internasional adalah sebesar Rp993,2 milliar (US$110,5 juta).

Tabel berikut ini memuat data operasional tertentu dari jasa layanan sambungan internasional langsung untuk periode berikut:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember					
	2008		2009		2010	
	Jumlah Menit	% Perubahan	Jumlah Menit	% Perubahan	Jumlah Menit	% Perubahan
	(dalam jutaan, kecuali persentase)					
Jumlah menit masuk yang dibayarkan	1.582,4	23,2	1.558,5	-1,5	1.723,9	10,6
Jumlah menit keluar yang dibayarkan	474,0	59,6	502,0	5,9	463,0	-7,8
Jumlah menit masuk dan keluar yang dibayarkan	2.056,4	30,0	2.060,5	0,2	2.186,9	6,1
Rasio lalu lintas masuk terhadap lalu lintas keluar	3,3	–	3,0	–	3,7	

Catatan: Sejak tahun 2010, kami menghitung sambungan interkoneksi domestik sebagai bagian dari sambungan masuk internasional; sebelum tahun 2010, kami mengeluarkan sambungan ini dari penghitungan sambungan masuk.

Selama tahun 2008, 2009 dan 2010, sambungan keluar internasional kami yang diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan meningkat sebesar 59,6% 5,9% dan menurun sebesar 7,8%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan panggilan masuk internasional yang diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan meningkat sebesar 23,2%, menurun sebesar 1,5% dan meningkat sebesar 10,6% untuk periode yang sama. Panggilan masuk dan keluar yang dikombinasikan, juga diukur berdasarkan jumlah menit yang dibayarkan, masing-masing meningkat sebesar 30,0% dan 0,2% dan 6,1% selama tahun 2008, 2009 dan 2010. Kami percaya pertumbuhan yang lebih kuat di tahun 2010 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh strategi bisnis agresif kami yang menekankan volume penjualan berbasis volume. Kami percaya bahwa meningkatnya kompetisi dari Telkom dan operator VoIP, beberapa di antaranya tidak mempunyai ijin, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha kami di masa depan.

Layanan Akses Telepon Tetap Nirkabel. Kami meluncurkan jasa akses telepon nirkabel tetap kami di tahun 2004 untuk mengembangkan bisnis telekomunikasi tetap kami dan untuk memperluas layanan selular kami. Dengan menggunakan teknologi CDMA 2000 1x, jasa telepon tetap nirkabel kami menawarkan alternatif yang lebih ekonomis bagi pelanggan yang memerlukan pergerakan terbatas. Per tanggal 31 Desember 2010, layanan akses telepon tetap nirkabel kami, "StarOne," memiliki total basis pelanggan sebanyak 550.130 dengan 61.123 pelanggan pasca bayar dan 489.007 pelanggan prabayar. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, pendapatan yang berasal dari layanan akses telepon tetap nirkabel sebesar Rp174,1 milliar (US$19,4 juta). Pada tanggal 12 Desember 2006, Pemerintah memberikan ijin untuk dua saluran layanan akses telepon tetap nirkabel berskala nasional pada frekuensi 800MHz. Ijin ini menggantikan ijin akses telepon tetap nirkabel 1900MHz kami yang lama dan pada akhir tahun 2007 kami melakukan migrasi frekuensi CDMA dari 1900MHz ke frekuensi baru 800MHz di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami memperluas layanan StarOne ke 82 kota pada bulan Desember 2010.

Sambungan Lokal dan Sambungan Langsung Jarak Jauh Domestik. Kami telah meluncurkan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik dari titik akses Indosat seperti "StarOne" dan "INDOSAT phone" di bulan Oktober 2005. Kami saat ini telah memiliki cakupan sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik di 82 kota besar di Indonesia

Pelanggan dan Pemasaran

Pelanggan utama dari jasa telekomunikasi tetap kami adalah pelanggan korporat, selular, pelanggan telekomunikasi tetap dan pelanggan akses telepon tetap nirkabel kami, serta pelanggan dari operator telekomunikasi lainnya.

Kami mempekerjakan tim penjualan yang kuat, yaitu kelompok penjual yang memfokuskan pada 500 pelanggan terbesar kami, termasuk hotel, pelanggan korporat besar, kantor pemerintahan dan kedutaan. Kami juga mengimplementasikan program loyalitas pelanggan, yang memberikan insentif kepada pelanggan reguler. Selain itu, kami berusaha untuk memperluas basis pelanggan kami dengan melakukan kerjasama promosi dengan perusahaan telekomunikasi internasional lainnya untuk mempromosikan layanan kami. Kami berusaha untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi yang dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan.

Kami telah melakukan berbagai inisiatif pemasaran untuk meningkatkan layanan untuk pelanggan telekomunikasi tetap kami. Strategi pemasaran kami berfokus pada: (i) memperkuat strategi *price-tiering* dengan mengimplementasikan "FlatCall 01016" untuk menyaingi layanan VoIP; (ii) memperluas pangsa pasar sementara tetap mempertahankan pelanggan kami melalui inisiatif *bundling*, (iii) menetapkan komitmen volume untuk lalu lintas masuk dari operator telekomunikasi asing; (iv) memperluas cakupan layanan akses tetap nirkabel kami. Kami selalu melakukan kampanye iklan nasional melalui media televisi, surat kabar, majalah, website dan radio untuk meningkatkan kesadaran merek diantara pelanggan bisnis dan ritel. Kami juga mengoperasikan 8 lokasi kantor penjualan regional di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2010, sebesar kurang lebih 36,8% dari jumlah menit sambungan keluar internasional jarak jauh (termasuk panggilan yang ditempatkan melalui "Flatcall 01016") sebagian besar berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, diikuti oleh Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara, yang jika dihitung secara bersama-sama adalah sebesar 23,9% dari jumlah menit sambungan keluar internasional jarak jauh kami.

Kami memiliki database informasi pelanggan, sehingga kami dapat menganalisa preferensi konsumen dan pola penggunaan dan merancang pola pemasaran dan produk. Kami melakukan riset pasar sendiri dan juga bekerja sama dengan konsultan untuk melakukan riset yang lebih luas pada perilaku dan kebutuhan pelanggan.

Struktur Tarif, Kewajiban Pelayanan Universal dan Harga

Tarif. Sebelum tahun 2008, Menkominfo menetapkan tarif untuk jasa telekomunikasi tetap, yang berdasarkan pada pembagian untuk seluruh tujuan ke dalam enam zona. Pada tanggal 30 April 2008, Menkominfo menetapkan rumusan tarif untuk layanan-layanan dasar pada jaringan tetap dan mengharuskan operator untuk menghitung harga menggunakan rumus berbasis-biaya, yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah untuk memperoleh persetujuan. Namun, tarif jarak jauh internasional kami tidak mengalami perubahan, dan dengan demikian kami berniat untuk tetap memakai tarif jarak-jauh internasional berdasarkan peraturan sebelumnya yang mendasarkan tarif pada enam zona untuk tujuan panggilan.

Penyediaan layanan sambungan jarak jauh di antara dua negara biasanya diadakan antara para penyelenggara telekomunikasi secara bilateral. Kami biasanya menerapkan sistem harga berbasis tingkat terminasi pasar, yaitu kami setuju untuk menggunakan tarif harga asimetris untuk panggilan masuk dan keluar. Kami memiliki sambungan langsung dengan 64 operator telekomunikasi asing di 40 negara. Perjanjian kami dengan para penyelenggara ini menetapkan ketentuan pembayaran dari kami kepada operator telekomunikasi asing dalam rangka penggunaaan fasilitas mereka dalam menghubungkan layanan jarak jauh internasional yang ditagih di Indonesia dan oleh operator telekomunikasi asing kepada kami dalam rangka penggunaan fasilitas (dan jaringan lokal Indonesia) sehubungan dengan layanan internasional jarak jauh yang akan ditagih di luar negeri. Praktek diantara penyelenggara telekomunikasi ini adalah untuk tagihan yang telah jatuh tempo sehubungan dengan penggunaan jaringan luar negeri akan dicatat, ditagihkan dan diteruskan oleh penyelenggara operator telekomunikasi dari negara dimana panggilan tersebut ditagih. Berdasarkan harga yang dinegosiasikan dengan setiap operator telekomunikasi asing, kami melakukan pembayaran kepada penyelenggara lalu lintas panggilan keluar yang ditagih di Indonesia, dan kami menerima pembayaran dari penyelenggara tersebut untuk lalu lintas panggilan masuk yang ditagih di luar wilayah Indonesia. Penyelesaian pembayaran diantara penyelenggara biasanya dilakukan secara triwulan

dengan metode *net-basis*. Koresponden penyelenggara terbesar kami berlokasi di Malaysia, Singapura, Taiwan, Timur Tengah dan Hong Kong.

Para penyelenggara layanan VoIP dapat menentukan biaya penagihan mereka sendiri, dan masing-masing penyelenggara harus bernegosiasi dengan penyelenggara jaringan yang terkait untuk biaya interkoneksi. Kami telah menandatangani perjanjian dengan Telkom untuk menjadi penyedia jaringan kami untuk sambungan VoIP.

Interkoneksi dengan Jaringan Domestik. Meskipun kami menyediakan sentral gerbang internasional untuk sambungan telepon keluar dari dan telepon masuk ke Indonesia, semua layanan sambungan langsung jarak jauh internasional harus berakhir pada salah satu jaringan telepon tetap domestik atau selular. Menkominfo telah menetapkan biaya interkoneksi untuk layanan sambungan langsung jarak jauh internasional yang melewati jaringan telepon tetap domestik dan akses jaringan tetap nirkabel. Kami memiliki perjanjian interkoneksi terpisah, yang mencerminkan tarif-tarif ini, dengan para penyelenggara yang berinterkoneksi secara langsung dengan sentral gerbang internasional kami.

Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations). Pemerintah menetapkan tarif Kewajiban Pelayanan Universal ("USO"), yang sejak tahun 2005 hingga 2009 adalah 0,75% dari pendapatan kotor tahunan dikurangi dari biaya interkoneksi yang dibayarkan kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya dan piutang ragu-ragu. Pada Januari 2009, Pemerintah meningkatkan tarif USO dari 0,75% dari pendapatan kotor tahunan menjadi 1,25% dari pendapatan kotor tahunan (setelah dikurangi beban-beban interkoneksi dan hutang-hutang dengan kinerja buruk).

Tagihan Pelanggan dan Biaya Interkoneksi

Para operator domestik melakukan proses penagihan dan penerimaan dari panggilan internasional jarak jauh yang dilakukan melalui jaringan domestik. Operator domestik akan memotong biaya interkoneksi yang terhutang kepadanya dari jumlah uang yang diperoleh dan membayar sisanya (tanpa bunga) dalam mata uang Rupiah kepada kami dalam waktu paling lambat 25 hari setelah perolehan pembayaran dari pelanggan di Indonesia. Siklus perolehan pembayaran untuk sebagian besar operator domestik adalah sekitar 30 hari. Kami bertanggung jawab atas penerbitan dan pengiriman informasi tagihan kepada para operator domestik, melalui modul yang dikenal sebagai layanan *System Online Clearing Interconnection*, pada tanggal 12 setiap bulannya, yang kemudian ditagihkan oleh operator domestik kira-kira lima hari setelah penerimaan dari kami, hal ini menjadikan siklus perolehan pembayaran kami menjadi kurang lebih 50 sampai dengan 80 hari. Untuk keperluan laporan keuangan, kami membukukan pendapatan per bulanan berdasarkan catatan trafik kami sendiri. Kami melakukan penagihan kepada operator selular dalam negeri pada pertengahan bulan berikutnya dan mewajibkan pembayaran pada akhir bulan. Oleh sebab itu, siklus penagihan yang normal untuk operator selular domestik adalah kurang lebih 20 sampai dengan 60 hari.

Kami mengirimkan tagihan interkoneksi kepada operator yang relevan untuk panggilan yang masuk pada jaringan domestik. Kami umumnya menagih biaya tersebut dalam waktu 20 sampai dengan 60 hari dengan melakukan *off-set* terhadap piutang dari panggilan keluar. Pembayaran dari operator telekomunikasi asing biasanya dilakukan dalam mata uang *dolar* A.S., yang akan didepositokan di Indonesia, dan jumlah yang mewakili pembayaran interkoneksi yang dibayarkan kepada kami melalui jaringan operator domestik dibayarkan dalam mata uang Rupiah.

Pemakaian pelanggan atas layanan jaringan tetap nirkabel dan sambungan domestik jarak jauh dihitung dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Penagihan kepada pelanggan dilakukan dari awal bulan berikutnya dan diselesaikan pada tanggal kelima dari bulan yang bersangkutan. Laporan tagihan diterima oleh pelanggan tidak lebih dari tanggal sepuluh tiap bulannya dan pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal dua puluh setiap bulannya. Untuk layanan akses tetap nirkabel, kami memblokir pelanggan untuk melakukan panggilan apabila mereka belum melakukan pembayaran dari tagihan yang jatuh tempo pada tanggal dua puluh setiap bulannya. Kami memblokir pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan selama empat puluh hari setelah tanggal penagihan apabila mereka belum melunasi tagihannya. Kami akan memutuskan layanan dan menghapuskan akun secara permanen untuk pelanggan dengan tagihan yang telah melewati enam puluh hari sejak hari pertama diterbitkannya tagihan. Untuk layanan domestik jarak jauh, kami akan memblokir

pelanggan untuk melakukan panggilan di akhir bulan apabila mereka belum membayar tagihannya. Untuk pelanggan yang belum melakukan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo di bulan kedua, kami akan memblokir pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan. Kami akan memutuskan layanan dan menghapuskan akun secara opermanen untuk pelanggan dengan tagihan yang telah melewati sembilan puluh hari dari hari pertama diterbitkannya tagihan.

Persaingan

Kami bukan lagi satu-satunya penyedia resmi jasa sambungan SLI tradisional (i.e., non VoIP) di Indonesia. Menkominfo telah memberikan izin operasional untuk menyediakan jasa sambungan SLI kepada Telkom, termasuk hak untuk menggunakan kode akses SLI "007" untuk memasuki pasar sambungan internasional jarak-jauh, dan Bakrie Telecom. Pemerintah juga menerbitkan izin-izin baru untuk penggunaan layanan SLI untuk operator telekomunikasi lain, yang akan meningkatkan persaingan. Selain itu, Telkom tidak lagi melakukan monopoli untuk jasa layanan SLJJ. Pasar SLI tradisional telah menjadi semakin kompetitif dengan adanya kenaikan penggunakan teknologi VoIP. Bisnis VoIP kami telah meningkat secara signifikan dari 201,9 juta menit, 442,4 juta menit, dan 411,7 juta menit masing-masing pada tahun 2008, 2009 dan 2010.

Pada bulan April 2008, kami dan Telkom sepakat untuk membuka akses SLJJ dari pelanggan kami di Balikpapan, dimana pelanggan jaringan tetap Telkom dapat menggunakan "011" untuk mengakses jaringan SLJJ kami sementara pelanggan jaringan tetap lokal kami dapat menggunakan "017" untuk mengakses jaringan Telkom. Selain itu, pada tahun 2008, Bakrie Telecom telah memperoleh izin baru sebagai penyelenggara SLJJ. Pembukaan akses SLJJ diantara para kompetitor dan dimulainya kegiatan usaha oleh dari penyelenggara SLJJ baru diharapkan dapat meningkatkan persaingan dengan memberikan pilihan yang lebih banyak kepada pelanggan untuk layanan SLJJ.

Kami juga menghadapi persaingan dari penyedia layanan akses tetap nirkabel lainnya. Saat ini, Telkom, merupakan operator akses tetap nirkabel terbesar, menawarkan TelkomFlexi, sebuah layanan CDMA 2000 1x di Indonesia. Bakrie Telecom, yang menawarkan layanan di Indonesia, dan Mobile-8, juga telah diberikan izin baru untuk layanan akses tetap nirkabel secara nasional, yang meningkatkan persaingan lebih lanjut di dalam segmen ini
.

Fasilitas dan Infrastruktur

Berikut ini adalah pembahasan mengenai jaringan selular, jaringan telekomunikasi tetap (termasuk jaringan SLI), serta fasilitas dan infrastruktur komunikasi lainnya milik kami, termasuk milik anak perusahaan utama kami yang beroperasi.

Jaringan Selular

Komponen-komponen utama dari jaringan selular kami adalah sebagai berikut:

- *base transceiver/Node B stations*: terdiri dari *transmitter* dan *receiver* dan berfungsi sebagai jembatan antara para pengguna selular dalam satu *cell* dan *mobile switching centers* melalui *base station controllers* dan *radionetwork controllers*;
- *base station controllers/radio network controllers*: merupakan alat untuk menghubungkan ke dan mengendalikan *base station* dalam setiap *cell site*;
- *mobile switching centers*: pusat yang mengendalikan *base station controllers* dan yang melakukan routing sambungan telepon; dan
- transmission lines: sambungan yang menghubungkan *mobile switching centers*, *base station controllers*, *base stations* dan PSTN.

Jaringan selular kami saat ini beroperasi dengan menggunakan *bandwidth* frekuensi radio 10 MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 900 GSM, *bandwidth* frekuensi 20MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum 1800 DCS dan 5MHz x 2 *uplink* dan *downlink* pada spektrum IMT-2000. Berikut adalah tabel yang memuat beberapa informasi mengenai jaringan selular kami per tanggal-tanggal yang disebutkan:

	Per 31 Desember,		
	2008	2009	2010
Base transceiver stations(1)	12.237	14.385	15.216
Node B Stations (3G BTS)(1)	1.425	1.968	2.892
Jumlah BTS (termasuk 2G dan 3G)(1)	13.662	16.353	18.108
Base station controllers(1)	265	315	330
Mobile switching center(1)	73	95	87
Radio network controllers(1)	14	20	34
Media gateways(1)	40	73	79

(1) Sebelum triwulan pertama di tahun 2010, *base transceiver stations*, *node B stations*, BTS, *base station controllers*, *mobile switching centers*, *radio network controllers* atau *media gateways* yang baru dibangun/dibeli dan belum beroperasi termasuk dalam pencatatan Perusahaan. Di awal triwulan pertama di tahun 2010, seperti yang diungkapkan di sini, Perusahaan memasukkan *base transceiver stations*, *node B stations*, BTS, *base station controllers*, *mobile switching centers*, *radio network controllers* atau *media gateways* yang baru dibangun/dibeli dalam berbagai laporan hanya jika barang-barang tersebut sudah beroperasi. Berdasarkan perhitungan awal, Perusahaan melaporkan angka-angka sebagai berikut:

	Per 31 Desember,		
	2008	2009	2010
Base transceiver stations(1)	12.677	14.621	15.870
Node B Stations (3G BTS)(1)	1.485	2.183	2.834
Jumlah BTS (termasuk 2G dan 3G)(1)	14.162	16.804	18.704
Base station controllers(1)	279	315	331
Mobile switching center(1)	73	96	92
Radio network controllers(1)	16	21	34
Media gateways(1)	54	80	87

Kami membeli peralatan telekomunikasi selular kami terutama dari pemasok Eropa dan Cina. Jaringan kami adalah sebuah sistem terintegrasi yang menggunakan peralatan *switching*, *cell site*, dan jaringan transmisi *point-to-point microwave* radio. Sebagian besar dari cell site dan basis stasiun radio kami berlokasi di atau pada gedung atau di lahan kosong, yang kami miliki, atau yang sewanya telah dinegosiasikan oleh kami dengan jangka waktu yang bervariasi dari lima hingga 20 tahun.

Sebagai hasil pengoperasian tiga jaringan lama yang menggunakan peralatan dari berbagai pemasok, pengeluaran barang modal kami secara historis pernah lebih tinggi dibandingkan apabila kami mengoperasikan suatu jaringan dengan pemasok yang lebih sedikit. Sejak tahun 2009, sebagai bagian dari strategi pengaturan fungsional kami, kami mulai merasionalisasikan pengeluaran barang modal dan rencana pengadaan kami melalui komite investasi kami yang baru dibentuk. Kami telah memfokuskan pengadaan kami pada jumlah pemasok yang lebih sedikit dan telah mengadopsi sebuah pendekatan perjanjian utama (*framework agreement*) dengan para pemasok tersebut, yang kami percaya akan meningkatkan efisiensi program pengeluaran barang modal kami secara signifikan.

Kami mempertimbangkan berbagai pilihan sehubungan dengan operasional, kepemilikan, dan penggunaan dari aset-aset menara kami yang kami percaya dapat mengoptimalkan nilai dari aset-aset tersebut.

Jaringan Telepon Tetap

Kami telah membangun jaringan telekomunikasi telepon tetap yang terdiri dari enam sentral gerbang internasional yang didukung oleh sirkit satelit, kabel laut dan transmisi *microwave*. Pada akhir tahun 2010, kami menyediakan jasa telepon tetap nirkabel di 82 kota di Indonesia.

Sentral Gerbang Internasional. Untuk bisnis sambungan langsung jarak jauh internasional, kami mengoperasikannya dengan menggunakan enam gerbang, tiga gerbang di Jakarta, dan masing-masing satu gerbang di Surabaya, Medan dan Batam, yang menyediakan seluruh koneksi untuk layanan kami ke jaringan sambungan langsung jarak jauh internasional kami. Kami membeli perangkat *gateway-switching* dari Lucent Technologies, Inc. (yang telah bergabung dengan Alcatel) dan Siemens.

Per tanggal 31 Desember 2010, kami memiliki kapasitas *bandwidth* internasional sebesar 1.998,72 Mbps untuk suara dan 21.387,00 Mbps untuk transmisi data. Seluruh tujuan kami terkoneksi secara digital. *Bandwidth* yang tersedia untuk kami jauh lebih banyak dari kapasitas yang digunakan sehingga dapat mengakomodasi pertumbuhan trafik di masa mendatang. Kami memiliki kebijakan untuk mempertahankan rata-rata penggunaan kurang dari 80,0% dari kapasitas untuk dapat mengakomodasi peningkatan penggunaan pada jam sibuk.

Setiap sentral gerbang internasional berhubungan dengan sentral gerbang internasional lainnya, sehingga setiap sambungan telepon mempunyai beberapa pilihan routing dan menyediakan sistem dengan kemampuan back-up apabila terjadi kerusakan perangkat atau kesibukan yang luar biasa pada salah satu *gateway*. Kami telah menempatkan perangkat interkoneksi di beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Telkom dan beberapa operator selular lainnya untuk menghubungkan jaringan sambungan langsung jarak jauh internasional kami ke jaringan telekomunikasi domestik.

Transmisi suara dan data secara internasional antar sentral gerbang internasional terjadi melalui sirkit satelit atau kabel laut. Sirkit satelit tidak terpengaruh oleh jarak dan menyediakan jasa penyiaran yang membuatnya bersifat fleksibel sehubungan dengan tujuan sambungan telepon. Kabel laut, terutama kabel serat optik digital, dapat memberikan layanan berkualitas tinggi yang lebih murah. Akan tetapi, biaya kabel akan meningkat seiring dengan jauhnya jarak dan tujuannya harus tetap. Sirkit satelit dapat terpengaruh oleh kondisi atmosfir, sedangkan kabel laut dapat rusak akibat ulah manusia atau alam. Secara umum, kami menggunakan kabel laut dengan *cable-to-cable backup* untuk sambungan jarak menengah di Asia dan *satellite links backup* untuk transmisi yang berjarak lebih jauh. Kami menggunakan *link microwave* dan serat optik untuk koneksi antara *gateway* dan stasiun bumi, dan untuk gateway Batam yang memiliki *microwave links* ke Singapura. Kami memiliki kebijakan untuk mempertahankan 100% *redundancy* untuk semua sambungan jarak jauh internasional kami (yang mungkin membutuhkan *routing* melalui negara ketiga) dalam upaya memberikan layanan berkualitas tinggi kepada para pelanggan kami.

Kabel laut. Kami memiliki hak kepemilikan di dalam dan akses ke kapasitas kabel laut yang menghubungkan wilayah Asia-Pasifik, Afrika Utara dan Eropa, dan yang menghubungkan wilayah Asia-Pasifik dengan Amerika Utara. Tabel berikut ini memuat cakupan geografis, umur dan kapasitas yang dialokasikan dari jaringan kabel kami, per tanggal 31 Desember 2010:

Jaringan Kabel Bawah Laut	Cakupan Geografis	Kapasitas (dalam Mbps)
APCN-2	Cina, Jepang, Malaysia, Philippina, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan	310,00
SEA-ME-WE 3	Australia, Austria, Belgia, Brunei, Kanada, Cina, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, Hong Kong, India, Iran, Italia, Jepang, Macau, Malaysia, Myanmar, Belanda, Oman, Pakistan, Portugal, Arab Saudi, Qatar, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat dan Inggris	47.753,00
Jakabare	Singapura	143.860,00
China-US	Cina, Taiwan, Korea Selatan dan Amerika Serikat	1.414,00
Asia America Gateway	Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, Hongkong, Philipina dan Amerika Serikat	4.000,00
Jakabare	Jawa, Kalimantan, Batam (Indonesia)	118.205,00
Jakasusi	Jawa, Kalimantan, Sulawesi (Indonesia)	56.470,00
Jasutra	Jawa, Sumatera (Indonesia)	179.375,00
Jakarta-Surabaya	Jawa (Indonesia)	36.200,00
Total		**587.587,00**

Untuk mendukung pengoperasian jaringan kami di Surabaya, kami telah mengoperasikan kabel laut serat optik yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya sejak bulan Januari 1997. Link ini meningkatkan keandalan jaringan dan kualitas layanan kami di wilayah Surabaya.

Kami, bersama dengan Telecommunication Company of Iran ("TCI"), merupakan bagian dari lebih dari 80 perseroan lainnya yang mempunyai kepemilikan dan akses kapasitas atas kabel bawah laut SEA-ME-WE 3. Kepemilikan kami di dalam kabel bawah laut SEA-ME-WE 3 tersebut adalah sebesar 3,4%, sementara kepemilikan TCI atas kabel bawah laut SEA-ME-WE 3 tersebut adalah sebesar 0,3%. Kabel bawah laut SEA-ME-WE 3 tersebut tidak memiliki titik pendaratan di Iran. Sambungan di Iran dilakukan melalui sistem kabel bawah laut UEA-Iran yang berujung di Stasiun Pendaratan Kabel Fujairah (UEA).

Sirkit Satelit Internasional. Per tanggal 31 Desember 2010, sirkit data melalui stasiun bumi di gerbang kami di Jakarta adalah sebesar 0,64 Mbps. Kapasitas satelit kami saat ini diperoleh terutama dari Intelsat dan, sebagian kecil, dari satelit Palapa D. Sejak tanggal 31 Desember 2002, kami telah memindahkan trafik dari transmisi satelit menjadi kabel laut oleh karena kualitasnya yang lebih baik, ketersediaan yang lebih banyak dan biaya yang lebih hemat dengan penggunaan kabel laut.

Jaringan akses tetap nirkabel kami saat ini beroperasi dengan menggunakan *bandwidth* frekuensi radio 5MHz pada spektrum 800MHz. Tabel berikut ini memuat beberapa informasi tentang jaringan akses tetap nirkabel kami per tanggal-tanggal yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember,		
	2008	2009	2010
Base transceiver stations(1)	1.454	1.421	1.576
Base station controllers(1)	34	31	37
Mobile switching centers(1)	9	8	8
Media gateways(1)	17	25	29

(1) Sebelum triwulan pertama di tahun 2010, *base transceiver stations*, *node B stations*, BTS, *base station controllers, mobile switching centers, radio network controllers* atau *media gateways* yang baru dibangun/dibeli dan belum beroperasi termasuk dalam pencatatan Perusahaan. Di awal triwulan pertama di tahun 2010, seperti yang diungkapkan di sini, Perusahaan memasukkan *base transceiver stations, node B stations, BTS, base station controllers, mobile switching centers, radio network controllers* atau *media gateways* yang baru dibangun/dibeli dalam berbagai laporan hanya jika barang-barang tersebut sudah beroperasi. Berdasarkan perhitungan awal, Perusahaan melaporkan angka-angka sebagai berikut:

	Per tanggal 31 Desember,		
	2008	2009	2010
Base transceiver stations	1.454	1.505	1.505
Base station controllers	34	34	34
Mobile switching centers	9	9	9
Media gateways	17	17	17

Fasilitas Komunikasi Lainnya

Sistem komunikasi Satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami dan serat optik kami terhubung ke pusat perdagangan utama serta wilayah terpencil di Indonesia dan digunakan untuk menyediakan layanan MIDI kami dan untuk backhaul selular.

Sistem Komunikasi Satelit. Sistem komunikasi satelit digunakan untuk berbagai hal bergantung pada fitur seperti jelajah, atau cakupan wilayah; kekuatan *transponder* (biasanya dinyatakan dalam dBW) dan *bandwidth transponder*. *Bandwidth transponder*, yang dinyatakan dalam megahertz, berbeda antara C-band dan Ku-band transponder. C-band digunakan di seluruh dunia sebagai standar komunikasi satelit untuk mengirim sinyal dengan gangguan atmosfir yang minim. C-band memberikan cakupan yang sangat luas meliputi sebagian besar benua Asia, yang membuatnya menjadi sangat populer untuk diaplikasikan seperti untuk penyiaran televisi. Sedangkan *Ku-band transponde*r beroperasi dengan frekuensi berkisar 11-14 gigahertz. Meskipun frekuensi *Ku-band* lebih rentan terhadap gangguan kelembaban dan pengikisan oleh hujan daripada frekuensi *C-band*, *Ku-band* lebih cocok untuk aplikasi antena kecil. Ku-band umumnya digunakan untuk tujuan yang sama seperti halnya dengan *C-band*, dan juga untuk *satellite news gathering* (*truck-mounted antennas*) dan beberapa aplikasi VSAT. Ku-band terutama digunakan di wilayah yang banyak memakai sistem ground-based microwave. Untuk mengkompensasi atas hilangnya kekuatan sinyal akibat gangguan kelembaban dan pengikisan oleh hujan, *transponder Ku-*

band umumnya mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan *transponder C-band* dan cakupan layanan yang lebih kecil.

Pada tanggal 31 Agustus 2009, kami meluncurkan satelit baru, Palapa-D, untuk menggantikan Palapa-C2 pada *orbital slot* 113E, yang secara signifikan akan meningkatkan kapasitas *transponder* kami dan memberikan cakupan satelit yang lebih luas. Setelah transfer trafik yang berhasil dilakukan dari Palapa-C2 ke Palapa-D pada awal bulan November 2009, Palapa-C2 berpindah ke *orbital slot* 150.5E dan beroperasi pada *inclined orbit* hingga kira-kira tahun 2014 untuk melakukan cellular backhaul kami. Ketika satelit Palapa-D kami beroperasi, kami secara signifikan meningkatkan kapasitas *transponder* kami, yang memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan *transponde*r satelit kami sendiri, sebagai tambahan dari kebutuhan pelanggan yang menyewa kapasitas *transponder* dari kami. Oleh sebab itu, kira-kira 60% dari kapasitas standar *C-band transponder* Palapa-D kami saat ini dipakai untuk disewakan kepada pihak ketiga sementara 40% sisanya dipakai untuk kebutuhan kami. Kami telah berhasil mengalihkan sumber dari kebutuhan satelit kami dari Palapa-D ke Palapa-C2, sehingga menghasilkan kira-kira 40% dari kapasitas *transponder C-band* standar Palapa-D, sebagai tambahan bagi 11 *extended C-Band transponder* untuk Palapa-D yang baru ditambahkan, yang tersedia untuk penyewaan kepada pihak ketiga pada triwulan ketiga di tahun 2011.

Satelit Palapa-D memiliki sebelas *extended C-band transponder* dengan frekuensi 36-megahertz, serta 24 standar *Cband transponder* dengan frekuensi 36-megahertz dan lima *Ku-band transponder* dengan frekuensi 36-megahertz yang sepenuhnya dimiliki oleh kami. Kekuatan maksimum dari masing-masing *C-band* dan *Ku-band transponder* adalah 43 dan 53 dBW. Satelit Palapa-D menyediakan cakupan *C-band* ke hampir seluruh wilayah Asia yang membentang dari Arabian Peninsula sampai Jepang dan dari Cina sampai Selandia Baru, termasuk Australia bagian tengah dan timur. Tingkat dBW-nya berkisar dari beam edge sebesar 32 dBW sampai dengan beam center sebesar 43 dBW. Dengan kekuatan ini, satelit Palapa-D mampu memberikan layanan *uplink* dan *downlink* dari manapun dalam cakupan layanan satelit. Lima Ku-band transponder mencakup wilayah Indonesia dan beberapa negara ASEAN dengan kekuatan *transponder* tertinggi sebesar 53 dBW.

Satelit Palapa-C2 memiliki enam *extended C-band transponder* 36-megahertz milik Pasifik Satelit Nusantara, dan dua puluh empat transponder C-band standar 36-megahertz serta empat *Ku-band transponder* 72-megahertz yang dimiliki oleh kami. Kekuatan maksimum pada setiap *transponder C-band* adalah 40 dBW. Karena lokasi baru Palapa-C2 dekat dengan satelit lain dengan rencana frekuensi *Ku-band* yang sama, kami, konsisten dengan peraturan dari International Telecommunication Union dan izin kami, tidak mengoperasikan *transponder Ku-band* untuk menghindari benturan berbahaya dari satelit lain. Satelit Palapa-C2 menyediakan cakupan *C-band* secara substansial di seluruh Asia, dengan jarak yang membentang dari Asia Tengah ke Jepang dan dari Cina bagian selatan ke Selandia Baru, termasuk beberapa bagian Australia. Tingkat dBW berkisar dari tepi 32 dBW ke pusat 40 dBW. Dengan kekuatan ini, satelit Palapa-C2 memiliki kapasitas untuk menyediakan jasa uplink dan *downlink* dari lokasi manapun dalam jarak bentangan satelit.

Serat Optik dan *Microwave Terrestrial Links*. *Backbone* serat optik kami yang baru yang berbasis DWDM telah menghubungkan semua kota di propinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. *Backbone* serat optik menyediakan 40-60 gigabits per detik untuk lalu lintas selular di dalam maupun antar kota-kota dan juga menyediakan peningkatan *broadband* internet kami secara progresif saat ini melalui 3.5 HSDPA dan akses wireless broadband tetap. Oleh karena pertimbangan kapasitas dan teknologi, sistem terestria *microwave* yang lama telah dipindahkan untuk mencakup remote spur route areas. Per tanggal 31 Desember 2010, kami memiliki fiber optic dan *microwave terrestrial link* ke lebih dari 25 kota besar. Jaringan ini pada prinsipnya digunakan untuk layanan jasa Internet dan MIDI kepada pelanggan perusahaan.

Pada Desember 2010, kami menandatangani perjanjian pembelian dengan Alcatel Lucent Submarine Networks dalam rangka meningkatkan kapasitas sistem kabel bawah laut JAKASUSI yang ada, yang mana mengharuskan kami untuk mengeluarkan biaya modal sekitar US$2,6 juta. Sistem yang telah meningkat ini akan meningkatkan pula kapasitas antar pulau dari/ke Jawa – Kalimantan (90 Gbps) dan Kalimantan – Sulawesi (60 Gbps). Sistem yang telah meningkat ini diharapkan akan siap untuk memulai layanan pada Juli 2011.

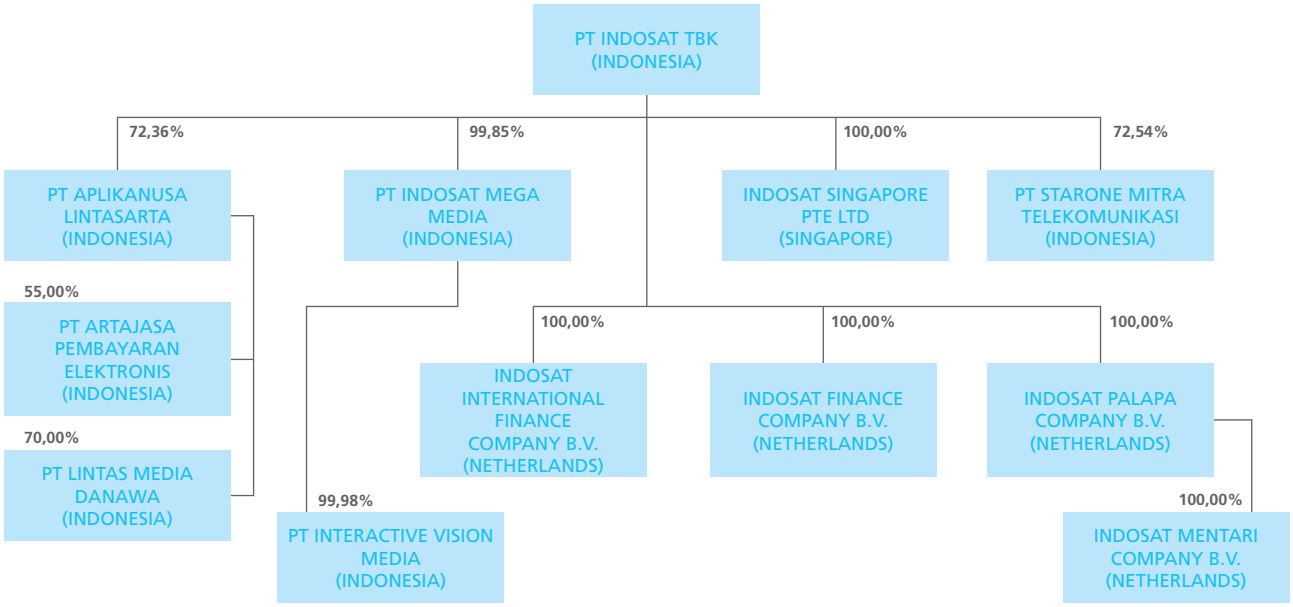
Pada Desember 2010, kami menandatangani nota pembelian dengan IFactor Sdn Bhd, Malaysia dalam rangka pembangunan sistem kabel bawah laut JAVALI, suatu sistem kabel bawah laut baru yang akan menghubungkan pulau Jawa (Jawa Timur) dan pulau Bali dan memberikan *bandwith* berkapasitas tinggi, dan yang mana berkaitan dengan proyek berbiaya total US$10,8 juta. Sistem kabel bawah laut JAVALI akan dimiliki sepenuhnya oleh kami dan didesain dengan 24 pita *fiber optic* (sistem yang tidak berulang). Sistem tersebut akan mulai dilengkapi dengan kapasitas 50 *gigabits* per detik dengan kapasitas maksimum sebesar 160 *gigabits* per detik per pasang *fiber*. Pembangunan sistem kabel baru ini diharapkan akan siap melayani pada Juli 2011.

IP/MPLS Backbone dan *Metro Ethernet Network*. Per tanggal 31 Desember 2011, kami telah menyelesaikan proyek pemasangan jaringan Metro Ethernet di lebih dari 299 *point of presence* di Indonesia dengan konektivitas serat optik. Melalui jaringan ini, kami menyediakan *leased line virtual* yang menawarkan akses *point-to-point Ethernet*, jasa virtual private LAN yang menawarkan akses *multipoint-to-multipoint Ethernet* dan jaringan virtual private routed yang menawarkan IP VPN dan Internet yang terhubung secara lokal. Kami juga memakai Jaringan Metro Ethernet kami untuk melakukan backhauling terhadap trafik selular 2G dan 3G kami. *Dual redundant routers* untuk IP-MPLS backbone di 24 kota telah ditempatkan dan dihubungkan melalui *backbone* serat optik. Jaringan Metro Ethernet juga telah ditempatkan di sembilan kota besar untuk memberikan akses *broadband* bagi pasar korporasi di gedung-gedung pencakar langit dan *backhaul* selular untuk layanan 3.5 HSDPA. Layanan yang digunakan oleh para pelanggan kami, di antaranya adalah akses Internet, jasa penyiaran dan sambungan pusat data.

Karena teknologi saat ini bergerak ke arah "all IP" dan permintaan layanan berbasis IP meningkat akibat keuntungan atas jaringan lama, kami berniat untuk menempatkan jaringan di masa yang akan datang sehingga layanan-layanan berbasis IP tersedia secara luas di wilayah tersebut. Pada tahun 2008, kami merampungkan pembangunan *Disaster Recovery Center* ("DRC"), di Jatiluhur untuk pelanggan perusahaan agar mereka memiliki pusat back-up data untuk mengamankan dan melindungi informasi bisnis mereka.

Struktur Organisasi

Bagan berikut ini merupakan struktur organisasi ringkas Perusahaan per 31 Desember 2010, termasuk kepemilikan langsung dan tidak langsung pada anak perusahaan kami bersama dengan yurisdiksi pendirian masing-masing anak perusahaan tersebut. Daftar lengkap mengenai anak-anak perusahaan kami dan investasi-investasi kami di perusahaan-perusahaan afiliasi, dan kepemilikan persentase saham kami di dalam masing-masing perusahaan, pada tanggal 31 Desember 2010 dimuat dalam Catatan 1d dari laporan keuangan konsolidasi kami yang terlampir di bagian lain dari laporan tahunan ini.



Lintasarta didirikan pada tahun 1988. Berdasarkan anggaran dasarnya, Lintasarta bergerak dalam usaha penyediaan layanan telekomunikasi sistem data dan teknologi informasi, serta aplikasi jaringan, yang mencakup penyediaan infrastruktur fisik dan aplikasi perangkat lunak dan layanan konsultasi pada sistem komunikasi dan informasi data untuk perbankan, keuangan dan industri lainnya.

PT Indosat Mega Media ("IM2"), didirikan pada tahun 1996 untuk bergerak dalam usaha penyediaan layanan Internet dan televisi.

PT Starone Mitra Telekomunikasi ("SMT"), didirikan pada tahun 2006 untuk menyediakan layanan telekomunikasi dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi, termasuk multimedia.

PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("Artajasa"), didirikan pada tahun 2000 untuk menyediakan layanan perdagangan umum dan aplikasi untuk industri, terutama industri perbankan, konsultasi teknologi informasi dan jasa telekomunikasi.

PT Lintas Media Danawa didirikan pada 28 Juli 2008 untuk menyediakan jasa informasi dan komunikasi, seperti jasa-jasa pusat data, *e-learning* dan belajar jarak jauh untuk layanan pendidikan masyarakat dan layanan muatan yang berbasis pada *Internet Protocol* (antara lain IPTV, permainan internet dan jalur pembayaran melalui internet).

PT Interactive Vision Media ("IVM"), didirikan pada tanggal 21 April 2009 untuk beroperasi dalam bisnis Pay TV dan sedang dalam proses untuk mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut. IM2 menanamkan modal awal kepada IVM pada bulan Maret 2011 sebesar Rp4,99 miliar.

Asuransi

Per tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan telah mengasuransikan tanah/bangunan dan perangkat (kecuali kabel laut dan hak atas tanah), termasuk asuransi terhadap risiko gangguan bisnis. Selama tahun 2010, kami tidak memiliki asuransi terhadap risiko kerugian yang terkait dengan barang yang diasuransikan. Secara umum, kami tidak mengalami kesulitan dalam memperpanjang polis asuransi dan kami yakin asuransi kami adalah wajar dan sesuai dengan standar industri.

Kami memiliki asuransi in-orbit di satelit Palapa-C2 dan Palapa-D dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan praktik industri. Pada tanggal 31 Desember 2010, kami memiliki cakupan polis asuransi dengan total pertanggungan sebesar US$153,0 juta, untuk kerugian total dan sebagian dari satelit Palapa-C2 dan Palapa-D kami.

Hak Atas Kekayaan Intelectual

Perusahaan telah mendaftarkan merek dagang dan hak cipta untuk nama, logo dan beberapa jasa di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Kami yakin bahwa merek dagang kami adalah penting untuk keberhasilan kami. Kami tidak pernah melakukan pembelaan terhadap salah satu dari merek dagang kami, akan tetapi kami akan melakukannya secara sungguh-sungguh, bilamana diperlukan.

Aset Tetap

Kecuali hak milik yang diberikan kepada perorangan di Indonesia, hak atas tanah dimiliki oleh Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Agraria No. 5/1960. Penggunaan tanah dapat dilakukan dengan hak atas tanah dimana pemegang hak atas tanah dapat menggunakan tanah sepenuhnya untuk jangka waktu yang ditentukan, yang mana dapat diperbaharui dan diperpanjang. Dalam banyak hal, hak atas tanah bebas diperjualbelikan dan dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjaman. Aktiva tetap kami yang terpenting berada di Jakarta (sekitar 12.050 m^2 digunakan sebagai sentral gerbang internasional dan kantor pusat), Ancol (sekitar 11.809 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut dan digunakan sebagai pusat switching), Tanjung Pakis, Karawang (sekitar 1.850 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Daan Mogot (sekitar 134.925 m^2 digunakan sebagai kompleks stasiun bumi), Medan (sekitar 9.780 m^2 digunakan sebagai sentral gerbang internasional), Jatiluhur (sekitar 135.800 m^2 digunakan sebagai kompleks stasiun bumi), Pantai Cermin (sekitar 68.228 m^2 digunakan

sebagai stasiun bumi dan stasiun kabel laut), Batam Sekupang (sekitar 19.989 m^2 digunakan sebagai sentral gerbang internasional dan stasiun bumi), Tanjung Bemban (sekitar 3.500 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Surabaya (sekitar 10.565 m^2 digunakan sebagai kantor regional) dan Banyu Urip-Gresik (sekitar 125.344 m^2 digunakan sebagai stasiun bumi dan sentral gerbang internasional dan stasiun kabel laut), Takisung – Banjarmasin (sekitar 1.000 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut), Aeng Batu-batu-Makasar (sekitar 2.000 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut) dan Sei Kakap Pontianak (sekitar 5.394 m^2 digunakan sebagai stasiun kabel laut). Kecuali untuk aset tetap kami di Daan Mogot, yang kami sewa dari Telkom, kami memegang hak atas tanah atas sebagian besar aset tetap kami untuk jangka waktu beberapa tahun. Kami perkirakan hak atas tanah kami akan diperbaharui pada biaya nominal di kemudian hari. Tidak ada satupun dari aktiva tetap kami yang digadaikan dengan tanggungan atau dengan cara lain.

Alamat Kantor-kantor Utama

Kantor Pusat:	Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110, Indonesia Tel: (62-21) 3000 3001, 3869 999 Fax: (62-21) 3000 3754, 3000 3757
Kantor Regional Jabotabek & Jawa Barat	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110, Indonesia Tel: (62-21) 3000 7001 Fax: (62-21) 3000 5702
Kantor Wilayah Jakarta	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta 10110, Indonesia Tel: (62-21) 3000 7001 Fax: (62-21) 3000 5702
Kantor Wilayah Bogor Tangerang Bekasi	Jl. Veteran No. 40 Bekasi Selatan 17141, Indonesia Tel: (62-21) 3017 7075, 3017 7076 Fax: (62-21) 3000 0811
Kantor Wilayah Jawa Barat	Jl. Asia Afrika No. 141-147 Bandung 40112, Indonesia Tel: (62-22) 3000 0900 Fax: (62-22)3000 5702
Kantor Regional Sumatera	Komplek Nagoya Gateway Blok E No. 1 Jl. Raden Patah - Baloi Batam, Indonesia Tel: (62-778) 6000 815 Fax: (62-778) 6000 855
Kantor Wilayah Sumatera Utara	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 39 Medan 20236, Indonesia Tel: (62-61) 4567 001 Fax: (62-61) 4531 031
Kantor Wilayah Sumatera Selatan	Jl. Angkatan 45 No. 222 Palembang 30137, Indonesia Tel: (62-711) 605 9999 Fax: (62-711) 605 9966, 605 9977
Kantor Regional Jawa Tengah, Jawa Timur & Bali Nusra	Jl. Kayoon No. 72 Surabaya 60271, Indonesia Tel: (62-31) 6000 6001 Fax: (62-31) 5456 001, 5464 392

Kantor Wilayah Jawa Tengah	Jl. Pandanaran No. 131 Semarang 50134, Indonesia Tel: (62-24) 3300 2000 Fax: (62-24) 3300 1001
Kantor Wilayah Jawa Timur	Jl. Kayoon No. 72 Surabaya 60271, Indonesia Tel: (62-31) 6000 6001 Fax: (62-31) 5456 001, 5464 392
Kantor Wilayah Bali Nusra	Jl. Raya Bay Pass Ngurah Rai No. 88 Kuta Bali 80361, Bali, Indonesia Tel: (62-361) 300 5000 Fax: (62-361) 300 5005
Kantor Regional Kalimantan & Sulampapua	Jl. MT Haryono No. 69 Balikpapan 76114, Indonesia Tel: (62-542) 741 001, 3030 001 Fax: (62-542) 7514 001, 7206 750
Kantor Wilayah Kalimantan	Jl. MT Haryono No. 69 Balikpapan 76114, Indonesia Tel: (62-542) 741 001, 3030 001 Fax: (62-542) 7514 001, 7206 750
Kantor Wilayah Sulampapua	Jl. Slamet Riyadi No. 4 Makassar 90111, Indonesia Tel: (62-411) 326 808 Fax: (62-411) 326 828

Industri Telekomunikasi Indonesia

Latar Belakang

Sejak tahun 1961, jasa telekomunikasi di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya, perluasan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi merupakan hal yang penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia secara umum. Selain itu, banyaknya penduduk dan meningkatnya perekonomian Indonesia telah menyebabkan meningkatnya permintaan atas jasa telekomunikasi.

Pada tahun 2009, Indonesia memiliki penduduk sekitar 229,96 juta orang, yang menyebabkan Indonesia menjadi negara keempat terbanyak penduduknya di dunia berdasarkan perkiraan International Telecommunications Union. *Gross Domestic Product* atau GDP Indonesia telah meningkat secara signifikan dari US$257,6 miliar di tahun 2004 menjadi US$540,3 miliar di tahun 2009 dalam mata uang Dolar A.S. saat ini menurut data Bank Dunia, yang memperlihatkan tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun sebesar 4,5%. Tingkat pertumbuhan ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan GDP sekitar -2,2% dan sekitar -1,7% yang dialami oleh Thailand dan Malaysia dalam periode yang sama. Menurut Bank Dunia, GDP per kapita pada tingkat daya beli juga telah meningkat dari US$3,004.9 di tahun 2003 menjadi US$4,205 di tahun 2008.

Pemerintah, melalui Menkominfo, memiliki kewenangan untuk mengatur dan memiliki kendali pengawasan yang besar atas sektor telekomunikasi. Meskipun Pemerintah secara historis telah mempertahankan praktek monopoli di sektor jasa telekomunikasi di Indonesia, reformasi hukum baru-baru ini yang sebagian besar sudah berlaku sejak tanggal 8 September 2000 telah berupaya untuk membuat kerangka hukum yang mendukung persaingan usaha dan mempercepat investasi infrastruktur pada fasilitas-fasilitas telekomunikasi.

Di Indonesia, sebagian besar jasa telepon tetap diselenggarakan oleh Telkom, yaitu badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, yang memiliki dan menyelenggarakan PSTN dan titik akses telepon tetap nirkabel. Sebelum pelaksanaan peraturan interkoneksi yang baru, operator telekomunikasi terinterkoneksi dengan jaringan Telkom guna mengakses semua pengguna telepon tetap dan selular. Monopoli telepon tetap lokal Telkom berakhir pada tanggal 1 Agustus 2002, dan kami sejak saat itu mulai membangun jaringan tetap tersendiri. Menurut peraturan interkoneksi yang baru, para operator telekomunikasi dapat mengadakan perjanjian bilateral yang memungkinkan mereka untuk melakukan interkoneksi secara langsung dengan operator telekomunikasi lainnya.

Meskipun laju penetrasi selular relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia, berdasarkan estimasi International Telecommunications Union, laju penetrasi selular Indonesia telah meningkat dari sekitar 28,7% di tahun 2006 menjadi sekitar 69,3% di tahun 2009, dengan tingkat pertumbuhan keseluruhan per tahun sebesar 42,4%. Profil pertumbuhan GDP dan laju penetrasi yang relatif rendah menunjukkan adanya potensi peningkatan pelanggan selular di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2009, jumlah telepon tetap, termasuk akses telepon tetap nirkabel, adalah sekitar 33,9 juta, yang mencerminkan penetrasi telepon tetap sebanyak 14,8%, yaitu salah satu yang terendah di wilayah Asia dan sebagai akibatnya hal ini mengakibatkan pertumbuhan telepon tetap yang stagnan berdasarkan sistem peraturan yang lama. Tabel di bawah ini merupakan rangkuman beberapa informasi mengenai laju penetrasi selular dan telepon tetap di Indonesia dan wilayah Asia pada tahun 2009:

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009			
	Penduduk[1]	Penetrasi Telepon Tetap[1]	Penetrasi Selular[1][2]	GDP per Kapita
	(juta)			(US$)[3]
Hong Kong	7,02	60,9%	179,4%	45.277
Singapore	4,74	40,6%	145,1%	50.705
Korea Selatan	48,33	53,7%	100,7%	27.168
Malaysia	27,47	17,6%	109,7%	13.982
Thailand	67,76	10,6%	97,3%	8.004
Filipina	91,98	7,4%	100,3%	3.546
Cina	1.345,75	23,3%	55,5%	6.838
India	1.198,00	3,1%	43,8%	3.275
Indonesia	229,96	14,8%	69,3%	4.205

(1) Sumber: International Telecommunications Union World Telecommunication / ICT Indicators Database & World Bank estimates, ICT Statistics 2009.
(2) Penetrasi selular adalah persentase jumlah pelanggan selular dan populasi penduduk.
(3) Sumber: World Bank 2009.

Pasar Jasa Selular

Industri telekomunikasi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di sektor jasa telekomunikasi selular beberapa tahun terakhir ini. International Telecommunications Union memperkirakan jumlah keseluruhan pelanggan selular di Indonesia meningkat dari sekitar 63,8 juta per tanggal 31 Desember 2006 menjadi sekitar 159,2 juta per tanggal 31 Desember 2009, yang merupakan peningkatan laju penetrasi selular dari sekitar 28,7% menjadi sekitar 69,3%. Terlepas dari tingkat pertumbuhan yang cepat ini, laju penetrasi selular sebesar 69,3% per tanggal 31 Desember 2009 relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia.

Tabel berikut ini memuat informasi berkenaan dengan industri telekomunikasi di Indonesia untuk periode yang disebutkan:

	Per tanggal 31 Desember				
	2006	2007	2008	2009	Tingkat Pertumbuhan Keseluruhan Tahun 2006-2009
	(dalam jutaan, kecuali persentase)				
Penduduk Indonesia[1]	222	225	227	229,96	1,20%
Pelanggan Selular[1]	64	93	141	159,2	44,22%
Penetrasi Selular[2]	28,7%	41,6%	61,8%	69,3%	42,40%

(1) Sumber: International Telecommunications Union World Telecommunication / ICT Indicators Database ICT Statistics 2009, tidak termasuk jasa nirkabel telepon tetap.
(2) Penetrasi selular merupakan jumlah pelanggan selular yang dinyatakan dalam persentase penduduk Indonesia.

Pasar nirkabel di Indonesia saat ini telah didominasi oleh tiga operator GSM terbesar: Telkomsel, kami dan XL. Sejak tahun 2002, Pemerintah telah mengeluarkan ijin penyelenggaraan jasa selular yang baru dengan menggunakan teknologi CDMA kepada Mobile-8 dan ijin penyelenggaraan jasa akses telepon tetap nirkabel dengan menggunakan teknologi CDMA kepada Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom. Per 31 Desember 2010, berdasarkan perkiraan kami, para operator GSM berskala nasional ini secara bersama-sama telah menguasai sekitar 90,8% dari pangsa pasar nirkabel Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2010, Telkomsel merupakan penyelenggara jasa selular nasional terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggannya berkisar 94,0 juta dan menguasai lebih dari sekitar 49,4% dari pangsa pasar GSM. Kami adalah penyelenggara jasa selular terbesar kedua dengan jumlah pelanggan berkisar 44,3 juta dan menguasai sekitar 21,0% dari pangsa pasar GSM pada tanggal yang sama. XL, penyelenggara terbesar ketiga, memiliki sekitar 40,4 juta pelanggan dan menguasai sekitar 20,4% dari pangsa pasar GSM pada tanggal yang sama. Sedangkan jasa akses telepon tetap nirkabel didominasi oleh Telkom dengan merek Flexi dengan jumlah pelanggannya sekitar 16,8 juta, berdasarkan laporan triwulanan Telkom pada Desember 31, 2010. Penyelenggara terbesar kedua adalah Bakrie Telecom dengan merek Esia dengan jumlah pelanggan sebesar 21,1 juta pelanggan, berdasarkan laporan Tahun 2009 Bakrie Telecom. Akses telepon tetap nirkabel kami memiliki jumlah pelanggan sebanyak 0,6 juta dengan merek StarOne. Terdapat juga beberapa pemain lainnya dengan skala lebih kecil dalam pasar nirkabel Indonesia seperti HCPT, NTS, Mobile-8, Smart Telecom dan STI.

Pertumbuhan jumlah pelanggan nirkabel di Indonesia sebagian dipacu oleh sistem "*calling party pays*", peluncuran jasa pra-bayar, serta diperkenalkannya layanan SMS. Sistem "*calling party pays*" mengharuskan pihak asal sambungan telepon membayar tarif telepon. Berdasarkan pengalaman di lingkungan internasional, negara-negara yang menjalankan sistem "*calling party pays*" umumnya mengalami laju penetrasi telepon nirkabel yang lebih tinggi karena para pelanggan telepon nirkabel lebih besar kemungkinannya untuk memberikan nomor teleponnya dan tetap membiarkan telepon genggamnya dalam keadaan hidup.

Sejak peluncurannya di tahun 1998, layanan pra-bayar telah populer di Indonesia, sebagaimana yang terjadi juga di negara-negara lainnya di Asia karena layanan pra-bayar ini memungkinkan para pelanggannya untuk berlangganan telepon nirkabel tanpa perlu melewati prosedur pemeriksaaan atas sejarah kredit mereka. Layanan pra-bayar juga memberikan lebih banyak kontrol pada para pelanggan atas pengeluaran bulanan mereka. SMS telah terbukti populer di Indonesia, terutama pada layanan pra-bayar karena memberikan alternatif lain yang nyaman dan hemat biaya daripada komunikasi suara dan e-mail. Persaingan di industri layanan nirkabel Indonesia terutama terjadi dalam hal kualitas layanan, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur nilai tambah seperti voice mail dan sms.

Pasar Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional

Penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional di Indonesia memperoleh pendapatan dari trafik jarak jauh internasional baik ke dalam maupun ke luar negeri. Tiga penyelenggara jasa sambungan jarak jauh internasional adalah Telkom yang memberikan layanan "007", Bakrie Telecom dengan kode akses "009" dan kami dengan kode akses "001" dan

"008". Tarif ke luar negeri ditetapkan oleh Menkominfo, sedangkan tarif ke dalam negeri dihitung berdasarkan *accounting rate* yang berlaku. Trafik ke luar negeri berasal dari pelanggan telepon tetap dan selular dan dikirimkan ke tiga penyelenggara layanan internasional secara langsung melalui international gateway atau secara tidak langsung melalui PSTN Telkom. Trafik sambungan internasional ke dalam negeri diterima di *international gateway* dan diarahkan ke tujuan yang dimaksud dari *international gateway* atau melalui jaringan PSTN Telkom yang pada akhirnya dialihkan ke tujuan yang dimaksud.

Di Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara yang pasarnya yang mulai berkembang, trafik komunikasi ke dalam negeri melebihi trafik komunikasi ke luar negeri dimana banyak negara-negara maju memperoleh penghasilan dari trafik sambungan jarak jauh internasional yang tidak berimbang.

Secara historis, trafik antar-operator diselesaikan berdasarkan konsep *accounting rate* yaitu metode kompensasi penyelenggara asal dan akhir. Umumnya, penyelenggara sambungan jarak jauh internasional melakukan negosiasi *accounting rate* per menit atas dasar *route-by-route* dengan menggunakan satu tarif yang dipakai oleh semua penyelenggara di *route* tersebut. Pada tahun 2003, kami mulai mengganti sistem *accounting rate* dengan sistem berbasis tarif terminasi pasar dengan beberapa pihak penyelenggara telekomunikasi asing, dimana kami menyetujui tarif asimetris untuk sambungan ke dalam maupun ke luar negeri. Berdasarkan sistem berbasis tarif terminasi pasar, kami dapat mengurangi tarif yang kami harus bayar untuk sambungan ke banyak tujuan internasional dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan pengurangan tarif sambungan dari tujuan tersebut ke Indonesia. Meskipun sistem tarif ini mengurangi tarif yang kami terima untuk sambungan ke dalam negeri, kami yakin bahwa secara keseluruhan hal ini dapat meningkatkan marjin kami untuk jasa sambungan jarak jauh internasional, terutama sambungan ke luar negeri.

Persaingan antar para penyelenggara VoIP yang menawarkan layanan seperti telepon hemat, yaitu "01017" yang ditawarkan Telkom dan "FlatCall 01016" yang ditawarkan oleh kami, dan kartu telepon pra-bayar telah mulai dan diperkirakan akan berdampak negatif pada pendapatan yang berasal dari jasa sambungan jarak jauh internasional yang telah ada.

Seiring dengan berkembangnya infrastruktur komunikasi data di Indonesia, permintaan atas layanan VoIP meningkat. VoIP menggunakan koneksi komunikasi data untuk memindahkan trafik suara ke Internet, yang biasanya menghemat banyak biaya bagi para pelanggan.

Meskipun Pemerintah telah memberlakukan sistem perijinan untuk membatasi jumlah operator VoIP di Indonesia, Pemerintah saat ini tidak lagi mengendalikan tarif yang dikenakan kepada para pengguna akhir dari layanan VoIP. Akan tetapi, Pemerintah telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk mengatur tarif tersebut di kemudian hari, dan diperkirakan peraturan tersebut akan membatasi tarif VoIP menjadi setara dengan tarif diskon maksimum pada kisaran 40,0% dari tarif PSTN yang berlaku saat ini.

Pasar Komunikasi Data

Secara historis, layanan data di Indonesia terutama terdiri dari layanan *narrow bandwidth leased line*, layanan x.25, layanan jaringan data digital dan layanan jaringan digital terpadu. Layanan jaringan data digital merupakan layanan digital *leased line* untuk transmisi data. Layanan jaringan digital terpadu merupakan protokol yang memberikan akses *dial-in* berkapasitas tinggi untuk jaringan publik. Jenis protokol ini dapat menangani trafik suara dan data dalam bentuk digital secara bersamaan pada sambungan digital yang sama melalui integrated *switches* melewati jaringan publik. Layanan x.25 merupakan protokol *open standard packet switching* yang dapat membuat terminal berkecepatan rendah sampai menengah memperoleh akses dial-in atau permanen ke jaringan dari tempat pengguna dan beroperasi pada jaringan. Tarif untuk layanan-layanan ini menurun pada beberapa tahun terakhir ini.

Meningkatnya penggunaan Internet dan meluasnya aplikasi multimedia diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas layanan data *broadband* yang canggih. Para operator di Indonesia tengah mempergunakan jaringan *broadband* tingkat lanjut agar dapat memberikan jasa *high-end data*, seperti jasa *frame relay, asynchronous transfer mode* dan *Internet protocol*. Secara khusus, layanan virtual *private network*, yang menggunakan ATM dan teknologi *Internet protocol*, dapat mengambil

bagian yang lebih besar dari pangsa pasar karena layanan ini memberikan alternatif lain yang dapat diandalkan dan hemat biaya bagi jaringan privat yang bergantung pada *dedicated leased lines*.

Pasar Jasa Layanan Satelit

Beberapa tahun terakhir ini, persaingan yang semakin ketat terjadi di pasar satelit Asia-Pasifik. Perusahaan-perusahaan di bisnis ini bersaing terutama dalam hal kemampuan cakupan, penawaran produk dan harga. Pada tanggal 6 September 2005, melalui MD No. 13/2005, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua operator telekomunikasi yang menggunakan satelit dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk memiliki ijin penyelenggaraan stasiun bumi dan stasiun luar angkasa. Ijin-ijin ini hanya diberikan kepada operator telekomunikasi yang memiliki landing right dan dengan ketentuan bahwa spektrum frekuensi yang digunakannya tidak akan menimbulkan gangguan terhadap para operator yang ada. Satelit asing diperkenankan untuk beroperasi di Indonesia apabila operator telekomunikasi Indonesia memiliki hak penyelenggaraan yang bersifat timbal balik di negara asal satelit tersebut.

Trend Industri

Kami meyakini bahwa trend industri telekomunikasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Jasa Nirkabel

- Pertumbuhan yang terus berlanjut di sektor telekomunikasi nirkabel. Kami memperkirakan industri telekomunikasi nirkabel dan permintaan atas layanan telekomunikasi nirkabel akan terus tumbuh dengan laju tetap sekitar 9% seiring dengan semakin berkembang dan modernnya Indonesia. Nilai yang sangat signifikan dari pertumbuhan ini akan tetap datang dari "pasar-pasar" utama tradisional.
- Selain dari pertumbuhan pada pasar-pasar utama, terdapat segmen-segmen berukuran besar yang berkembang dengan pertumbuhan kuat, terutama pada broadband konsumen dan menara-menara telekomunikasi bergerak.
- Dibutuhkan satu abad untuk menghubungkan satu miliar tempat dengan sambungan telepon namun dibutuhkan kurang dari 30 tahun untuk menghubungan lima miliar orang dengan telekomunikasi bergerak, dan diharapkan bahwa sampai dengan 50 miliar obyek akan terhubung selama 20 tahun ke depan atau kurang dari itu. Hal ini merupakan suatu cara mudah untuk membandingkan dimasukinya jasa nirkabel dengan jasa kabel.
- Pertumbuhan yang signifikan pada tingkat penetrasi nirkabel di wilayah luar Jawa. Tingkat penetrasi nirkabel yang relatif rendah di luar Jawa memberikan potensi besar untuk para penyelenggara layanan nirkabel di Indonesia karena penduduk yang tinggal di luar Jawa semakin makmur.
- Pertumbuhan penggunaan jasa nilai tambah. Pertumbuhan tingkat penggunaan jasa nilai tambah, seperti SMS, content dan akses internet diharapkan meningkat di tahun-tahun mendatang, oleh karenanya akan membantu menstabilkan penurunan tingkat penggunaan dan ARPU untuk layanan suara.
- Saat ini, terdapat berbagai pelaku jasa telekomunikasi bergerak dan berbagai perusahaan yang dengan agresif mendorong pelanggan dan jalur telekomunikasi untuk dengan segera meningkatkan skala bisnis dan mendapatkan pangsa pasar. Kami berharap konsolidasi tersebut terus berlanjut, terutama di luar dari tiga pelaku utama (Telkomsel, Indosat, XL). Salah satu dari hambatan utama terhadap pasar adalah kemerosotan harga lebih lanjut. Penawaran jasa dan inovasi akan menjadi penentu utama di dalam persaingan yang ada.

Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional

- Meningkatnya persaingan di sektor jasa sambungan jarak jauh internasional. Kami memperkirakan akan terjadi deregulasi Pemerintah dan peningkatan kualitas layanan VoIP untuk meningkatkan persaingan dengan jasa sambungan jarak jauh internasional.
- Pertumbuhan jumlah sambungan telepon yang cukup. Kami yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang berkelanjutan dan meningkatnya penggunaan telepon selular akan mendorong peningkatan jumlah layanan sambungan jarak jauh internasional. Selain itu, pertumbuhan layanan VoIP juga diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas jasa sambungan jarak jauh internasional.

Jasa MIDI

- Meningkatnya permintaan atas layanan komunikasi data tingkat lanjut. Kami yakin bahwa meningkatnya penggunaan Internet dan meluasnya pasar untuk aplikasi multimedia dapat meningkatkan permintaan atas layanan komunikasi data yang canggih.
- Semakin ketatnya persaingan di pasar ISP. Sebagai dampak dari liberalisasi pasar dan terus diterbitkannya ijin-ijin baru, kami mengantisipasi bahwa persaingan di pasar ISP akan meningkat. Kami yakin persaingan akan terjadi terutama dalam hal harga, kualitas layanan dan cakupan jaringan.
- Meningkatnya permintaan atas layanan broadband baik kabel dan nirkabel. Kami yakin akan terjadi peningkatan preferensi dan permintaan pelanggan atas akses Internet berkecepatan tinggi yang mana akan mendorong pertumbuhan layanan broadband dalam negeri.

Peraturan Industri Telekomunikasi Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menkominfo, memiliki kewenangan dan memegang kendali regulasi dan melaksanakan kebijakan yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Kerangka hukum industri telekomunikasi didasarkan pada beberapa undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri dan direktorat jenderal yang diberlakukan dan dikeluarkan dari waktu ke waktu. Sebelum bulan Maret 1998, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi adalah instansi yang mengatur industri telekomunikasi di Indonesia. Setelah pemilihan umum tahun 1999 dan pergantian Pemerintahan di tahun 2001, Departemen Perhubungan mengambil alih tanggung jawab pengaturan industri telekomunikasi. Pada bulan Februari 2005, kewenangan untuk mengatur industri telekomunikasi dialihkan dari Departemen Perhubungan ke Menkominfo.

Melalui Menkominfo, Pemerintah mengatur penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Selain itu, Menkominfo mengatur alokasi spektrum frekuensi radio untuk semua operator telekomunikasi, yang diwajibkan untuk memperoleh ijin dari DJPT, untuk setiap layanan yang menggunakan spektrum frekuensi. Selain tarif spektrum frekuensi radio, Pemerintah mewajibkan semua operator telekomunikasi untuk membayar biaya hak penggunaan (BHP) sebesar 0,5% dari pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi dan penyisihan untuk piutang macet, untuk setiap tahun buku, yang harus dibayar dengan cicilan setiap triwulanan.

Kebijakan reformasi telekomunikasi Pemerintah diformulasi dalam "Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Telekomunikasi" tanggal 17 September 1999. Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam cetak biru tersebut adalah untuk:

- meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi;
- meliberalisasi sektor telekomunikasi dengan struktur persaingan melalui penghapusan praktek monopoli;
- meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kerangka peraturan;
- menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan mitra asing; dan
- menciptakan peluang bisnis untuk usaha berskala kecil dan menengah dan memfasilitasi peluang kerja yang baru.

Reformasi peraturan di sektor telekomunikasi Indonesia baru-baru ini didasarkan pada Undang-Undang Telekomunikasi.

Undang-Undang Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2000 dan mengatur pedoman penting untuk reformasi industri, termasuk liberalisasi industri, kemudahan bagi para pemain baru dan mendorong persaingan. Pemerintah menetapkan pedoman melalui peraturan pemerintah, keputusan atau peraturan menteri dan keputusan-keputusan dari instansi pemerintah. Undang-Undang Telekomunikasi memberikan kewenangan kepada Pemerintah, melalui Menteri Perhubungan, untuk membuat kebijakan dan untuk mengatur, mengawasi dan melakukan kontrol atas industri telekomunikasi. Sampai pada tahun 2005, Menteri Perhubungan adalah badan pembuat peraturan untuk industri telekomunikasi, yang memiliki wewenang atas sektor telekomunikasi di Indonesia dan dapat mengeluarkan peraturan melalui keputusan menteri, membuat kebijakan dan menerbitkan izin serta membuat formulasi tarif.

Peraturan Pemerintah No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi") dan Peraturan Pemerintah No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit diberlakukan sebagai peraturan-peraturan pelaksana pertama dari Undang-Undang Telekomunikasi. Departemen Perhubungan juga mengeluarkan berbagai keputusan, yaitu: (i) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20 Tahun 2001, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010, tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi ("Peraturan Jaringan Telekomunikasi"), (ii) Peraturan Menteri Perhubungan No. 21 Tahun 2001, yang kemudian diubah oleh Peraturan Menkominfo No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008, tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ("Peraturan Jasa Telekomunikasi"), dan (iii) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2003 yang selanjutnya dibatalkan dengan Keputusan Menkominfo No. 36/PER/M.KOMINFO/2008 dan selanjutnya diubah dengan Keputusan Menkominfo No. 31/PER/M.KONINFO/8/2009 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi").

Pada tanggal 11 Juli 2003, Menteri Perhubungan mengeluarkan Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi, berdasarkan mana Menteri Perhubungan mendelegasikan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan sektor telekomunikasi di Indonesia kepada BRTI, tetapi tetap memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan untuk industri telekomunikasi. BRTI pertama kali dibentuk pada bulan Januari 2004, yang terdiri dari tujuh anggota, termasuk jabatan ketua yang dipegang oleh DJPT, dari DJPT dan Komite Regulasi dan Informatika. Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi diangkat oleh Menkominfo. Seluruh anggota Komite Regulasi Telekomunikasi: (i) harus berwarga negara Indonesia; (ii) memiliki keahlian profesional di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, ekonomi, hukum atau ilmu sosial; (iii) tidak memiliki kepentingan apapun di salah satu operator telekomunikasi; dan (iv) tidak diangkat sebagai direktur atau komisaris di salah satu operator telekomunikasi.

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 67 Tahun 2003 mengatur hubungan antara Menteri Perhubungan (dan selanjutnya Menkominfo) dan BRTI. Dalam menjalankan fungsi pengaturan, BRTI diberikan kewenangan untuk: (i) melakukan pemberian ijin untuk jaringan dan jasa telekomunikasi sesuai dengan kebijakan Menkominfo dan (ii) mengusulkan kepada Menkominfo standar pelaksanaan operasional, jasa, biaya interkoneksi dan peralatan untuk jaringan dan jasa telekomunikasi. BRTI diberikan kewenangan untuk mengawasi dan diminta untuk melaporkan kepada Menkominfo atas: (i) pelaksanaan standar operasional, (ii) persaingan antara operator jaringan dan jasa, dan (iii) pemenuhan standar penggunaan peralatan telekomunikasi. Dalam menjalankan fungsi pengendalian, BRTI juga diminta untuk melaporkan kepada Menkominfo atas: (i) perkembangan penyelesaian sengketa diantara operator jaringan dan jasa, (ii) mengawasi penggunaan peralatan telekomunikasi, dan (iii) pelaksanaan standar kualitas jasa.

Penggolongan Penyelenggara Telekomunikasi

Undang-Undang Telekomunikasi menggolongkan penyelenggara telekomunikasi menjadi: (i) penyelenggara jaringan telekomunikasi, (ii) penyelenggara jasa telekomunikasi, dan (iii) penyelenggara telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan Telekomunikasi lebih lanjut digolongkan ke dalam: (i) penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap dan (ii) penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak selular. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, untuk setiap kategori penyelenggara telekomunikasi diperlukan ijin. Penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan ijin untuk memiliki dan/atau menyelenggarakan jaringan telekomunikasi. Sebaliknya, pemilik ijin penylenggara jasa telekomunikasi diberikan izin untuk menyelenggarakan jasa, tetapi tidak diharuskan untuk memiliki jaringan sendiri. Ijin telekomunikasi khusus diperlukan untuk para penyelenggara jasa telekomunikasi privat atau untuk keperluan yang berkaitan dengan penyiaran dan keperluan keamanan nasional. Peraturan Jaringan Telekomunikasi mengatur bahwa ijin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dikeluarkan oleh Menkominfo. Peraturan Jasa Telekomunikasi membedakan ijin penyelenggaraan jasa telepon dasar yang dikeluarkan oleh Menkominfo dan ijin penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon dan multimedia yang dikeluarkan oleh DJPT.

Pengakhiran Hak Eksklusifitas

Pada tahun 1995, Telkom diberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon tetap lokal sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dan layanan SLJJ sampai dengan tanggal 31 Desember 2005. Sementara Indosat dan

Satelindo (yang selanjutnya bergabung dengan Indosat) diberikan hak duopoli untuk secara eksklusif menyelenggarakan jasa telekomunikasi telepon dasar internasional sampai dengan tahun 2004.

Sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Telekomunikasi dan Keputusan Menkominfo No. 21 (2001), Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Telkom dan hak duopoli yang sebelumnya diberikan kepada Indosat dan Satelindo. Pemerintah mengadopsi kebijakan duopoli agar kami dan Telkom bersaing sebagai penyelenggara jasa dan jaringan terpadu.

Pasar untuk penyediaan layanan SLI telah dibebaskan pada bulan Agustus 2003 dengan diakhirinya hak eksklusif Indosat dan Satelindo. Kami mulai menyediakan jasa telepon tetap sejak tahun 2002 dan jasa telepon nirkabel serta SLJJ pada tahun 2003, setelah menerima izin SLJJ kami. Telkom telah menerima izin layanan SLI dan mulai menawarkan layanan SLI dengan kode akses internasional "007" pada tahun 2004 yang bersaing langsung dengan kami.

Dalam rangka liberalisasi di sektor jasa SLJJ, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengharuskan setiap operator jasa SLJJ untuk menyelenggarakan kode akses tiga digit yang harus digunakan oleh para pelanggan pada saat mereka melakukan sambungan SLJJ. Pada tanggal 1 April 2005, Menkominfo mengumumkan bahwa kode akses tiga digit untuk telepon SLJJ akan dilaksanakan secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak tanggal tersebut dan bahwa Menkominfo akan memberikan kode akses "011" kepada Perusahaan untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengijinkan kami untuk melakukan perluasan secara progresif ke semua kode area lainnya dalam waktu lima tahun. Telkom telah memperoleh "017" sebagai kode akses SLJJ-nya. Pada tanggal 3 Desember 2007, Menkominfo mengundangkan Keputusan Menteri No. 43/P/M.KOMINFO/12/2007, yang mengundurkan tanggal pelaksanaan kode akses SLJJ menjadi tanggal 3 April 2008 dan juga menetapkan jadwal pelaksanaan akses sambungan jarak jauh "01X". Pada bulan Januari 2007, Pemerintah telah menetapkan peraturan baru mengenai interkoneksi dan sistem akses kode lima angka untuk jasa VoIP. Pada April 2008, kode akses tersebut telah digunakan di Balikpapan. Penduduk Balikpapan dapat memilih menggunakan "0", "01016" atau "01017" pada saat mereka melakukan telepon jarak jauhnya. Apakah kode akses SLJJ akan dilaksanakan di kota-kota lain akan tergantung pada studi yang dilakukan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atas pelanggan jasa telepon tetap Indosat dan Telkom.

Tarif Jasa Jaringan Tetap dan Selular

Menkominfo bertanggung jawab untuk mengatur dan menyesuaikan formula tarif. Pada tahun 2006, Menkominfo mengeluarkan keputusan-keputusan kementerian seperti: (i) No. 8/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang interkoneksi berbasis biaya, (ii) No. 2/PER/M.KOMINFO/1/2006, (iii) No. 4/PER/M.KOMINFO/1/2006, No. 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2006 tentang Ketentuan Jasa 3G, (iii) No. 5/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Warung Telekomunikasi, (iv) No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006 sebagaimana diubah dengan No. 12/PER/M.KOMNFO/4/2008 tentang Tarif Telekomunikasi Telepon Tetap, (v) No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Penyadapan Sah, (vi) No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006 yang digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tarif Selular, dan (vii) No. 102/Kep/M.KOMINFO/10/2006 tentang 2G dan 3G Ijin Jaringan Selular sebagaimana diubah dengan Keputusan Menkominfo No. 181/2006 tentang Migrasi Jaringan FWA menuju Frekuensi Alokasi 800MHz. Pada tahun 2007, Menkominfo mengeluarkan keputusan-keputusan Menteri, termasuk No. 162/2007 tentang alokasi aliran frekuensi radio 800 MHz untuk pengoperasian FWA-CDMA dan selular (perubahan Keputusan Menkominfo No. 181/2006), Peraturan Menkominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang petunjuk pelaksanaan tarif pada kontribusi USO, No. 3/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang sewa jaringan, No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2007 (sekarang No. 38/2007) yang mengatur pelaksanaan pengembangan infrastruktur menggunakan dana USO dan Peraturan Menkominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/12/2007 tentang penggantian keempat FTPs (Rencana Teknis Dasar/Fundamental Technical Plans) – 2000 yang mengganti tanggal pelaksanaan dari kode akses jarak jauh di Balikpapan menjadi tanggal 3 April 2008. Pada bulan April 2008, Menkominfo menetapkan Peraturan Menteri No.9/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang penentuan tarif untuk jasa selular, yang menentukan tarif untuk tipe dan struktur retail selular berdasarkan formula dan Peraturan Menteri No. 15/PER/M.KOMINFO/04/2008 yang mengatur mengenai tarif baru layanan selular termasuk layanan teleponi dasar melalui jaringan tetap. Jenis tarif tersebut terdiri dari jasa layanan telepon dasar, layanan roaming dan multimedia struktur tarif terdiri dari biaya aktivasi, biaya bulanan, biaya pemakaian dan layanan tambah nilai. Tarif tertinggi untuk layanan selular retail tiap operator akan berbeda sebagai akibat dari perbedaan metode

perhitungan antar operator. Berdasarkan peraturan baru tersebut, tarif untuk jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap dan SMS sebagai fasilitas tambahan harus diperhitungkan oleh operator dengan menggunakan formula berbasis biaya dengan hasil penghitungan yang dinyatakan sebagai batas maksimum tarif. Pemerintah diharapkan untuk mengubah tarif formula untuk telekomunikasi tetap di kemudian hari. Pemerintah mengatur formula tarif untuk sewa jaringan berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007.

Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Telekomunikasi, masing-masing penyelenggara harus memenuhi tingkat pelayanan tertentu. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan atas kerugian kepada penyelenggara telekomunikasi.

Peraturan Menkominfo tentang standar penyediaan layanan dapat ditemukan di: (i) Peraturan Menkominfo No. 11/PER/M. KOMINFO/09/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tingkat Penyediaan Layanan Teleponi Dasar di Jaringan Tetap Lokal, (ii) Peraturan Menkominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/09/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Tingkat Penyediaan Layanan Teleponi Dasar di Jaringan Bergerak Selular, dan (iii) Peraturan Menkominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tingkat Penyediaan Layanan Teleponi Dasar di Jaringan Tetap dengan mobilitas terbatas.

Telepon Umum

Berdasarkan izin telekomunikasi tetap untuk jasa teleponi dasar yang kami miliki, kami mempunyai kewajiban untuk menyediakan telepon umum sejumlah 3,0% dari total kapasitas jaringan yang dipasang untuk jaringan telekomunikasi tetap yang telah kami bangun.

Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligations)

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, semua penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terikat oleh Kewajiban Pelayanan Universal ("USO"), yang mengharuskan semua penyelenggara untuk ikut serta dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah yang ditentukan sebagai wilayah USO oleh Menkominfo. USO dimaksudkan untuk menyediakan akses telekomunikasi dan/atau jasa di area-area yang sebelumnya belum ada akses atau jaringan.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 28/2005 dan Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/9/2005, Pemerintah mengumumkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembayaran USO dan mengubah tarif USO dari Rp750 untuk setiap telepon internasional keluar atau masuk menjadi 0,75% dari jumlah pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi yang telah dibayar kepada penyelenggara telekomunikasi dan piutang tidak lancar. Perdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7/2009, Pemerintah meningkatkan tarif USO dari 0,75% menjadi 1,25%.

Pada bulan Maret 2004, Menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No. KM 34 Tahun 2004 yang memuat spesifikasi pelaksanaan program dan zona USO, persyaratan teknis, pengoperasian, pendanaan dan monitor ("KM 34/2004"). KM 34/2004 digantikan dengan Peraturan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/4/2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 38/PER/M.KOMINFO/09/2007 yang mengatur prosedur penggunaan dana USO untuk keperluan pembangunan jaringan dan jasa telekomunikasi di wilayah dimana tidak ada jaringan telekomunikasi. Pada tahun 2008 Pemerintah menetapkan Peraturan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 (sebagaimana diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/02/2010) yang menggantikan Peraturan Menkominfo No. 11/ PER/M.KOMINFO/04/2007. Berdasarkan peraturan ini, penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memenangkan tender untuk menyediakan jasa telekomunikasi di daerah yang belum ada jaringan telekomunikasi ("Daerah USO") akan menggunakan dana yang dikumpulkan dari tarif USO untuk menyediakan akses dan layanan telekomunikasi, termasuk layanan teleponi, SMS, dan akses internet. Dalam menyediakan layanan telekomunikasi di Daerah USO, penyelenggara telekomunikasi memiliki hak untuk: (i) menggunakan teknologi, (ii) menandatangani perjanjian interkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, dan (iii) menggunakan frekuensi spektrum 2.390 – 2400 MHz.

Pengaturan Interkoneksi

Sesuai dengan larangan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi mengenai kegiatankegiatan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, Undang-Undang Telekomunikasi mewajibkan para penyelenggara jaringan untuk memperbolehkan para pengguna dari satu jaringan mengakses para pengguna atau layanan pada jaringan lainnya dengan membayar tarif yang disepakati oleh setiap penyelenggara jaringan. Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur bahwa tarif interkoneksi antara dua atau lebih penyelenggara jaringan harus bersifat transparan, disepakati bersama dan adil.

Pada tanggal 8 Februari 2006, melalui Peraturan Menkominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/02/2006, Pemerintah mengeluarkan peraturan interkoneksi yang baru yang merupakan peraturan interkoneksi berbasis biaya untuk menggantikan peraturan interkoneksi berbasis bagi hasil yang berlaku sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam peraturan baru, Pemerintah menetapkan suatu rumusan sebagai panduan untuk menghitung biaya interkoneksi dari setiap penyelenggara. Hasil perhitungan akan dievaluasi oleh Pemerintah dan digunakan oleh Pemerintah sebagai rujukan.

Penyelenggara harus memasukkan hasil penghitungan dari formula Pemerintah ke dalam usulan DPI, bersama dengan usulan-usulan untuk skenario panggilan, penyaluran trafik, titik interkoneksi, tata cara permohonan dan pemberian interkoneksi, dan lain-lain. Usulan DPI juga harus mengungkapkan jenis jasa interkoneksi dan tarif yang dikenakan untuk tiap jasa yang ditawarkan. Penyedia akses interkoneksi harus memberlakukan sistem antri atas dasar First-In–First-Serve. Selain itu, mekanisme interkoneksi juga harus transparan dan tanpa diskriminasi.

Para penyelenggara telekomunikasi SLI yang dominan seperti Perusahaan dan para penyelenggara non-dominan mengajukan DPI pada bulan September 2006. DPI dari penyelenggara do-minan disetujui oleh Pemerintah pada bulan Oktober 2006 dan pelaksanaan peraturan baru dimulai pada bulan Januari 2007 melalui perjanjian bilateral antar para penyelenggara. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, DPI akan diubah setiap tahun. Pada tanggal 11 April 2008, Pemerintah menyetujui DPI dari penyelenggara dominan untuk mengganti DPI sebelumnya.

Rencana Teknis Dasar Nasional Pemerintah mengatur persyaratan teknis seperti rencana *routing*, penomoran, dan aspek teknis untuk interkoneksi antar jaringan-jaringan dari berbagai penyelenggara telekomunikasi, yang dapat membuat semua penyelenggara jaringan berinterkoneksi secara langsung tanpa harus melalui PSTN.

Peraturan mengenai Biaya

Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dan sejalan dengan peraturan-peraturan lainnya, setiap penyelenggara telekomunikasi diwajibkan membayar kepada Pemerintah biaya hak penggunaan (BHP), biaya frekuensi dan biaya orbit satelit, sebagaimana yang berlaku. BHP untuk masing-masing penyelenggara telekomunikasi adalah sekitar 0,5% dari pendapatan kotor, yang meliputi hal-hal seperti pendapatan dari sewa jaringan, tarif interkoneksi, biaya aktivasi pelanggan baru, tarif penggunaan, tarif roaming dan kartu SIM. Sebagai tambahan, Pemerintah juga mewajibkan seluruh penyelenggara telekomunikasi untuk membayar tarif USO sebesar 1,25% dari pendapatan kotor dikurangi biaya interkoneksi dan hutang macet setiap tahunnya, yang dibayarkan secara triwulanan. Tarif frekuensi untuk jaringan CDMA 800 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz dan 3G 2100 MHz berdasarkan bandwidth allocated frequency. Selain itu, para pengguna harus melakukan pembayaran satu kali di muka untuk biaya koneksi orbit satelit ketika satelit dioperasikan.

Pendaftaran Pengguna Selular Pra-bayar

Pada tanggal 28 Oktober 2005, Pemerintah mulai mewajibkan para penyelenggara telekomunikasi untuk mengadakan pendaftaran para pengguna selular pra-bayar. Peraturan ini menyatakan bahwa proses pendaftaran tersebut wajib diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 28 April 2006, dimana kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 28 September 2006. Kami telah merancang prosedur agar kewajiban pendaftaran dapat dilakukan pada titik awal penjualan dan kami telah menyelesaikan kewajiban pendaftaran pengguna selular pra-bayar pada bulan September 2006, dengan membatalkan rekening sekitar 1,3 juta pelanggan yang tidak mendaftar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/10/2005, semua penyelenggara akan terus mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan setiap pelanggan baru selular prabayar mereka.

Peraturan tentang Satelit

Industri satelit internasional merupakan industri yang diatur secara ketat. Selain perijinan dan peraturan di dalam negeri, penempatan dan pengoperasian satelit kami harus didaftarkan pada Biro Komunikasi Radio. Setelah diadakannya Konferensi Radiokomunikasi Dunia/World Radiocommunication Conference ("WRC") yang diadakan pada tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 16 November 2007, beberapa karakteristik satelit Indonesia yang berada pada slot 113E dan 150,5E telah dinyatakan kembali pada International Telecommunication Union. Untuk memfasilitasi penggunaan slot orbit 150,5E, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah menerbitkan Peraturan No. 79/DIRJEN/2009 pada tanggal 12 Maret 2009, mengenai pembentukan kelompok kerja yang terdiri atas DJPT, Telkom dan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada 16 Maret 2009, Menkominfo telah mengeluarkan Surat No. 110/M.KOMINFO/03/2009 mengenai persetujuan untuk kerjasama dengan Perusahaan dan Telkom untuk memfasilitasi penggunaan slot orbit tersebut secara cepat.

Frekuensi *Fixed Wireless Access*-CDMA

Melalui Peraturan Menkominfo No. 181/2006, Pemerintah melakukan realokasi frekuensi 800MHz kepada penyelenggaran FWA sebagai bagian dari izin frekuensi untuk layanan 3G (IMT-2000) kepada Bakrie Telecom, Telkom, Mobile-8 dan Perusahaan. Perusahaan sebelumnya telah diberikan ijin 5MHz pada frekuensi uplink dan downlink di frekuensi berikut: uplink frekuensi 1880-1885MHz dan downlink 1960-1965MHz di Jakarta, Banten dan Jawa Barat dan frekuensi uplink dan downlink di frekuensi 830-835MHz dan downlink 875-880MHz untuk wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Berdasarkan peraturan baru di atas, Perusahaan diberikan ijin untuk frekuensi 2x1.23MHz (uplink 842.055-843.285MHz dan downlink 887.055-888.285MHz) di Jakarta, Banten dan Jawa Barat (uplink 843.285-844.515MHz dan downlink 888.285-889.515). Migrasi frekuensi telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2007.

Kewajiban Tower Bersama

Pada tanggal 17 Maret 2008, Menkominfo mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ("Peraturan Menara"). Berdasarkan Peraturan Menara, pembangunan menara telekomunikasi memerlukan ijin dari institusi pemerintah terkait, sementara pemerintah daerah menentukan penempatan dan lokasi dimana menara telekomunikasi dapat dibangun. Selain itu, penyedia telekomunikasi yang memiliki menara telekomunikasi dan pemilik menara diwajibkan untuk mengijinkan operator telekomunikasi lainnya untuk menggunakan menara telekomunikasi mereka (selain dari menara yang digunakan untuk jaringan utama), tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2009, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menkominfo serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengeluarkan Peraturan Bersama No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama") yang mewajibkan adanya ijin pendirian menara untuk setiap menara yang dibangun dan digunakan untuk layanan telekomunikasi yang harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu. Namun demikian, melalui pembuatan Peraturan Bersama ini, Peraturan Menara tetap berlaku sepanjang ketentuan yang didalamnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bersama.

Selain dari Peraturan Bersama dan Peraturan Menara, beberapa pemerintah daerah telah membuat peraturan-peraturan yang membatasi jumlah dan lokasi menara telekomunikasi dan mewajibkan operator untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama.

Pada tanggal 9 September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui diterbitkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak kabupaten/kota dan provinsi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010 dan memberlakukan suatu jenis pajak baru yang dapat menambah biaya regulasi dalam pengoperasian menara-menara kami. Pajak baru ini dibatasi pada nilai maksimum 2% dari nilai jual objek pajak, yang mana merujuk pada nilai jual kembali menara yang ditentukan oleh pejabat pajak yang bersangkutan. Pelaksanaan dari pajak baru ini akan berdampak luas pada kebijakan pemerintah provinsi.

Butir 5: ANALISA OPERASIONAL DAN KEUANGAN DAN PROSPEK USAHA

Pembahasan berikut ini harus dibaca bersama dengan laporan-laporan keuangan konsolidasi Perusahaan yang telah diaudit dan catatan-catatannya per tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010. Laporan Keuangan konsolidasi ini telah disiapkan sesuai dengan IFRS. Beberapa angka (termasuk persentase) telah dibulatkan untuk memudahkan.Diskusi ini mengandung forward-looking statements yang menggambarkan pandangan kami saat ini sehubungan dengan kejadian di masa mendatang dan keadaan keuangan di masa mendatang. Pernyataan ini mencakup risiko dan ketidakpastian, dan hasil nyata kami mungkin berbeda secara material dengan hal-hal yang diantisipasi dalam forward-looking statements ini yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu sebagaimana dicantumkan dalam "Forward-Looking Statements" dan Butir 3. "Informasi Penting – Faktor-Faktor Risiko" dan bagian lain dalam laporan ini.

A. HASIL-HASIL USAHA

Kami adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan menyediakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2010, kami adalah operator selular terbesar kedua di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular. Kami juga menyediakan jasa MIDI kepada para pelanggan korporat dan retail Indonesia maupun regional serta menyediakan jasa sambungan langsung jarak jauh di Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perusahaan

Hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan telah dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk hal-hal sebagai berikut:

Basis Pelanggan Selular dan Pola Pemakaian Selular

Jumlah pelanggan selular kami dan pemakaian jasa selular secara langsung mempengaruhi pendapatan usaha selular kami begitu juga dengan beban usaha kami, termasuk beban interkoneksi dan beban penyusutan dan amortisasi. Untuk memenuhi permintaan atas layanan kami yang semakin meningkat, kami kemungkinan harus memperluas cakupan dan kapasitas jaringan selular kami, yang memerlukan tambahan pengeluaran barang modal. Peningkatan dalam pengeluaran barang modal kami mempengaruhi arus kas, beban bunga dan beban penyusutan kami.

Kami adalah penyedia jasa selular yang terbesar kedua di Indonesia, bila diukur dari jumlah pelanggan selular, dengan 44,3 juta pelanggan (termasuk pelanggan *broadband* nirkabel) pada tanggal 31 Desember 2010.

Pada tahun 2009, kami mengimplementasikan strategi untuk mengurangi tipe pelanggan "*calling card*" yang bernilai-rendah, yang kami percaya sebagai pelanggan jangka pendek yang tidak akan mengisi ulang kartu SIM mereka. Berdasarkan strategi ini, kami mengidentifikasi pelanggan prabayar yang tidak mengisi ulang paket perdana mereka setelah kami secara signifikan mengurangi manfaat (seperti bonus aktivasi dan *on-net preloads*) yang tersedia untuk pelanggan-pelanggan tersebut. Kami percaya bahwa strategi ini memberikan kontribusi secara signifikan dalam penurunan jumlah pelanggan kami selama tahun 2009. Karena strategi ini, selama sembilan bulan pertama tahun 2009, kami telah menghapus 6,8 juta pelanggan jenis tersebut. Jumlah pelanggan kami berkurang sekitar 9,7% dari tanggal 31 Desember 2008, namun pendapatan usaha selular kami hanya berkurang sebanyak 0,9% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2008. Mulai triwulan ketiga tahun 2009, kami mulai melihat tanda-tanda stabilisasi dalam jumlah pelanggan kami dan kami menambah 4,4 juta pelanggan, setelah dikurangi dari pelanggan yang telah dideaktivasi, pada triwulan keempat tahun 2009. Jumlah pelanggan kami meningkat sekitar 34,3% dari 33,0 juta pada tahun 2009 menjadi 44,3 juta di tahun 2010.

Kompetisi

Kami menghadapi kompetisi yang sangat ketat pada seluruh segmen usaha kami. Kompetisi tersebut diantaranya berakibat kepada tarif yang dapat kami bebankan atas jasa, permintaan dan penggunaan jasa kami serta marjin usaha dan hasil usaha.

Bisnis layanan selular di Indonesia telah menjadi sangat kompetitif, sebagaimana terlihat dengan adanya program akuisisi besar-besaran atas pelanggan selular di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Secara historis, kompetisi pada industri selular utamanya didasarkan kepada cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus serta kualitas dan layanan pelanggan. Sejak tahun 2007, kompetisi semakin terfokus pada harga, dimana seluruh operator, termasuk kami, mulai menawarkan berbagai promosi potongan harga untuk menarik pelanggan, yang kami percayai menyebabkan terjadinya *churn rates* yang tinggi. Tingkat *churn rate* pelangggan yang tinggi di Indonesia menyebabkan terjadinya peningkatan sensitifitas harga para pelanggan, terutama pelanggan pra-bayar dan rendahnya biaya perpindahan pelanggan pasca bayar akibat pengikatan kontraktual terbatas. Sejak tahun 2009, kami yakin bahwa fokus pasar kepada harga yang merupakan kunci utama terjadinya seleksi produk oleh pelanggan telah menurun dan para pelanggan kembali terfokus pada pendorong historis yaitu cakupan jaringan, kualitas teknis, harga, ketersediaan layanan data dan fitur-fitur khusus.

Berdasarkan estimasi internal kami, ketiga penyelenggara mayoritas layanan nirkabel di Indonesia, Telkomsel, kami dan XL, secara bersama-sama menguasai sekitar 77% pangsa pasar jasa nirkabel di Indonesia pada tahun 2010. Kami berkompetisi dengan Telkomsel dan XL terutama pada cakupan jaringan, kualitas layanan dan harga. Dengan basis pelanggan "*on-net*" yang lebih besar dan penawaran harga yang lebih menarik bagi panggilan *on-net*, kami percaya bahwa jumlah pelanggan kami akan memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan terhadap penyelenggaran selular kecil lainnya, mengingat kami tidak perlu membayar biaya interkoneksi kepada pihak ketiga.

Kompetisi pada jasa MIDI juga semakin meningkat. Dalam beberapa tahun ini, kompetisi antar penyelenggara layanan komunikasi data semakin meningkat, yang utamanya disebabkan oleh penerbitan berbagai lisensi baru setelah terjadinya deregulasi pada industri telekomunikasi di Indonesia. Selain itu layanan satelit kami yang terdiri dari penyewaan transponder kepada *broadcaster* dan penyelenggara telekomunikasi layanan VSAT, selular dan SLI serta ISP menghadapi kompetisi dari penyelenggara asing dan domestik yang memberikan layanan pada basis pelanggan yang sama.

Kami tidak lagi menjadi satu-satunya penyelenggara jasa SLI tradisional di Indonesia (yaitu non VoIP). Pemerintah dapat menerbitkan lisensi baru untuk jasa SLI kepada operator telekomunikasi lainnya yang akan menyebabkan meningkatnya kompetisi pada layanan telekomunikasi tetap.

Kami menyadari bahwa kompetisi tiga segmen usaha kami akan terus meningkat. Kompetisi telah dan akan memberikan dampak pada hasil operasi dan kondisi keuangan kami.

Tingkat Tarif dan Harga

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Menkominfo menetapkan formula tarif yang menentukan jumlah yang dapat dibebankan oleh operator atas layanan telekomunikasi tetap dan selular. Namun demikian, Menkominfo mengijinkan operator telekomunikasi tetap dan selular, termasuk kami, untuk menawarkan paket-paket promosi yang menawarkan harga yang lebih rendah daripada tarif plafon yang ditentukan berdasarkan formula tarif.

Saat ini kami menetapkan harga kepada layanan selular kami berdasarkan berbagai program promosi yang sedang berlangsung yang dimaksudkan untuk menarik pelanggan-pelanggan baru, menstimulasi permintaan dan meningkatkan posisi saing kami. Perubahan dalam struktur harga kami, baik sebagai akibat dari kebijakan tarif Pemerintah atau sebagai tanggapan terhadap persaingan, dapat berdampak bagi pendapatan, hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

Ekonomi Indonesia

Kami percaya bahwa pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia sebagian didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini, dan permintaan atas jasa-jasa tersebut akan berlanjut, karena perekonomian Indonesia terus berkembang dan termodernisasi. Kinerja dan kualitas serta pertumbuhan jumlah pelanggan dan penawaran layanan kami tergantung pada kesehatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pengeluaran Barang Modal

Penyediaan jasa telekomunikasi bersifat sarat modal. Untuk dapat terus bersaing, kami harus terus-menerus melakukan perluasan, memodernisasi dan memperbarui teknologi kami, yang memerlukan pengeluaran barang modal yang besar. Dalam rangka memenuhi permintaan terkait dengan peningkatan yang substansial dalam jumlah pelanggan dan pemakaian jaringan selama tahun 2008 hingga 2010, kami harus meningkatkan pengeluaran barang modal kami secara substansial, terutama untuk memperluas kapasitas jaringan kami. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, pengeluaran barang modal konsolidasi aktual kami masing-masing berjumlah total Rp12.341,9 miliar, Rp11.584,5 miliar, dan Rp5.515,0 miliar (US$613,4 juta). Untuk tahun 2011, kami berencana untuk mengalokasikan US$794,5 juta untuk pengeluaran barang modal baru, yang bila memperhitungkan estimasi pengeluaran barang modal yang direalisasi untuk tahun 2011 untuk komitmen pengeluaran barang modal dari periode sebelumnya, akan menghasilkan jumlah aktual pengeluaran barang modal sekitar US$1.053,8 juta untuk tahun 2011, dimana kami bermaksud untuk menggunakannya bagi pengembangan aset tetap dalam segmen usaha selular, data tetap dan telekomunikasi tetap kami. Lihat "—Pengeluaran Barang Modal".

Sebelumnya, kami telah membiayai pengeluaran barang modal melalui sumber internal dan arus kas dari kegiatan usaha Perusahaan, dan juga dari hutang pembiayaan melalui pinjaman bank dan pasar modal. Kami mengharapkan untuk terus membiayai pengeluaran barang modal melalui sumber-sumber tersebut. Kami menghadapi risiko likuiditas apabila peristiwa-peristiwa tertentu terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada, lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang kami harapkan, menurunnya peringkat hutang kami, atau menurunnya kinerja keuangan atau rasio keuangan kami. Apabila kami tidak mendapatkan jumlah yang dibutuhkan untuk mendukung rencana pengeluaran barang modal kami untuk tahun 2011, kami mungkin tidak dapat memperbaiki atau memperluas infrastruktur telekomunikasi selular kami atau memperbarui teknologi kami yang dibutuhkan untuk tetap bersaing dalam pasar telekomunikasi Indonesia, dimana hal tersebut dapat berdampak bagi keadaan keuangan, hasil usaha serta prospek kami.

Selain itu, perubahan yang tidak diharapkan dalam teknologi, permintaan kapasitas jaringan yang lebih besar dari pelanggan kami dan tanggapan kepada usaha dan inovasi produk dari pesaing kami dapat mengharuskan kami untuk meningkatkan pengeluaran barang modal kami, yang dapat berdampak bagi pendapatan, hasil usaha dan keadaan keuangan kami.

Ketidakstabilan Nilai Tukar Valuta Asing

Nilai mata uang Rupiah telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir dari nilai terendah yaitu sekitar Rp17.000 per Dolar AS selama krisis keuangan Asia. Selama periode antara tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, nilai tukar Rupiah/Dolar AS berkisar dari nilai terendah Rp12.400 per Dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp8.888 per Dolar AS dan selama tahun 2010, berkisar dari nilai terendah Rp9.413 per Dolar AS sampai dengan nilai tertinggi yaitu Rp8.888 per Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai tukar Bank Indonesia yang berlaku saat itu adalah sebesar Rp8.991 per Dolar AS. Meskipun sebagian besar dari pendapatan usaha kami dalam mata uang Rupiah, sebagian pendapatan usaha kami dalam mata uang Dolar AS. Selain itu, sebagian besar dari pinjaman, pengeluaran barang modal dan beban usaha Perusahaan, termasuk pembayaran bunga untuk *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2020 dan Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS, adalah dalam mata uang selain dari Rupiah, terutama Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2010, 43,4% dari pinjaman kami adalah dalam mata uang Rupiah, dan sisanya adalah dalam mata uang Dolar AS. Melemahnya nilai Rupiah terhadap Dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, antara lain nilai Rupiah dari beban yang harus dibayarkan dalam mata uang Dolar AS akan meningkat karena faktor tersebut sehingga kami harus mengkonversi mata uang Rupiah yang lebih banyak lagi guna membayar kewajiban Perusahaan dalam Dolar AS. Sebaliknya, meningkatnya nilai Rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha kami karena, di antaranya, hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan dari panggilan masuk internasional yang dilakukan oleh pengguna layanan operator asing, *roaming* oleh pelanggan operator asing di Indonesia dan pendapatan usaha dari jasa MIDI dan operasi satelit kami. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, kami mencatat rugi selisih kurs bersih sebesar Rp885,7 miliar; untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, kami mencatat laba selisih kurs-bersih sebesar Rp1.656,4 miliar; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, kami mencatat laba selisih kurs bersih sebesar Rp492,4 miliar.

Sebagai tambahan, sebagian besar aset dan kewajiban moneter kami dapat terkena dampak risiko mata uang asing. Aset moneter ini terutama terdiri dari kas, setara kas, dan piutang usaha dari operator asing, dan piutang usaha dalam mata uang asing. Kewajiban moneter kami yang dapat terkena dampak risiko mata uang asing terdiri dari hutang pengadaan, hutang jangka panjang dan hutang obligasi yang timbul akibat kewajiban yang berkaitan dengan pengeluaran barang modal. Tingkat aset moneter bersih kami sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah panggilan masuk yang melebihi jumlah panggilan keluar dalam usaha SLI kami dan pendapatan dari mata uang asing kami. Dalam upaya mengelola risiko valuta asing kami dan menurunkan biaya pendanaan kami, kami menandatangani beberapa kontrak swap valuta asing. Kami tidak dapat memberikan kepastian bahwa kami dapat berhasil mengelola tingkat risiko valuta asing kami di kemudian hari ataupun bahwa kami tidak akan terus-menerus terkena dampak risiko valuta asing. Risiko kami terhadap fluktuasi nilai tukar valuta asing, terutama terhadap mata uang Dolar AS, dapat meningkat jika Perusahaan mengadakan hutang tambahan dalam mata uang Dolar AS untuk membiayai rencana pengeluaran barang modal kami.

Pada bulan Februari dan Maret 2009, kami mendapatkan persetujuan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam instrumen dan perjanjian hutang kami untuk memberikan tambahan fleksibilitas dalam kewajiban kami untuk mempertahankan ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas, hutang terhadap EBITDA dan EBITDA terhadap beban bunga. Sementara kami percaya bahwa perubahan tersebut akan memberikan ruang yang cukup jika terjadi ketidakstabilan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS , kami tidak dapat memastikan tidak terjadinya ketidakstabilan di masa mendatang dan tidak terjadinya ketidakstabilan yang lebih kuat dibandingkan yang dialami dalam 12 bulan terakhir, yang dapat mengakibatkan pelanggaran persyaratan keuangan kami. Lihat "—Pokok Terhutang."

Tinjauan Usaha

Pendapatan usaha

Kami memperoleh pendapatan usaha terutama melalui penyelenggaraan jasa selular, MIDI dan telekomunikasi tetap (terutama sambungan jarak jauh internasional). Tabel berikut ini memperlihatkan perincian total pendapatan usaha Perusahaan dan persentase kontribusi dari masing-masing jasa terhadap total pendapatan usaha Perusahaan untuk setiap periode yang disebutkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2008 (Disajikan Kembali)		2009 (Disajikan Kembali)		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	(dalam miliar Rupiah, kecuali persentase)					
Jasa Selular	14.460,8	75,3	14.331,3	76,0	15.867,1	80,8
Jasa MIDI	2.733,4	14,2	2.712,6	14,4	2.488,1	12,7
Telekomunikasi Tetap	2.021,8	10,5	1.803,0	9,6	1.293,2	6,5
Jumlah pendapatan usaha	19.216,0	100,0	18.846,9	100,0	19.648,4	100,0

Faktor-faktor yang paling mempengaruhi pendapatan usaha kami untuk semua jenis jasa yang ditawarkan adalah jumlah pelanggan, tingkat pemakaian dan tarif. Tingkat pemakaian jasa-jasa kami dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan berkelanjutan untuk permintaan atas jasa telekomunikasi di Indonesia, terus berkembangnya perekonomian Indonesia dan persaingan.

Jasa Selular. Kami menghasilkan pendapatan usaha jasa selular berasal dari pendapatan pemakaian selular, jasa nilai tambah, pendapatan langganan bulanan, penjualan modem *broadband* nirkabel dan telepon genggam selular, dan pendapatan jasa penyambungan dan juga pendapatan interkoneksi dari penyelenggara telekomunikasi lainnya dan pendapatan sewa menara. Pada triwulan ke-empat tahun 2008, kami mulai mencatat penjualan modem *broadband* nirkabel dan pemakaian komunikasi data *broadband* nirkabel sebagai pendapatan usaha Perusahaan dari jasa selular. Pendapatan tersebut sebelumnya dicatat sebagai bagian dari pendapatan usaha jasa MIDI.

Tabel berikut ini memperlihatkan komponen-komponen pendapatan usaha Perusahaan dari jasa selular untuk periode yang disebutkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						
	2008 (Disajikan Kembali)		2009 (Disajikan Kembali)		2010		
	Rp	%	Rp	%	Rp	US$	%
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta dolar AS, kecuali persentase)						
Pendapatan pemakaian	8.492,8	58,7	7.085,7	49,4	7.944,0	883,6	50,1
Jasa nilai tambah	5.052,6	35,0	5.999,0	41,9	7.039,2	782,9	44,4
Pendapatan interkoneksi	1.833,8	12,6	1.709,2	11,9	1.252,7	139,3	7,9
Sewa menara	-	-	62,4	0,4	252,0	28,0	1,6
Pendapatan langganan bulanan	66,3	0,5	184,2	1,3	200,5	22,3	1,3
Penjualan telepon genggam Blackberry dan modem	82,5	0,6	206,5	1,4	35,0	3,9	0,2
Lain-lain	136,2	0,9	171,4	1,2	177,3	19,7	1,1
Potongan harga dimuka dan Program Loyalitas Pelanggan	(1.203,4)	-8,3	(1.087,1)	-7,5	(1.033,6)	(114,9)	-6,6
Total pendapatan usaha jasa selular	14.460,8	100,0	14.331,3	100,0	15.867,1	1.764,8	100,0

Sebagian besar pelanggan selular kami pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar kurang lebih 97,5% adalah pelanggan prabayar. Kami menawarkan beberapa jasa nilai tambah kepada pelanggan prabayar kami, yang telah meningkatkan pendapatan usaha jasa selular dari jasa nilai tambah, terutama SMS dan SMS nilai tambah, yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses berbagai macam informasi, seperti berita politik, olahraga dan bisnis. Pendapatan dari jasa nilai tambah (termasuk SMS) mencerminkan masing-masing 35,0%, 41,9% dan 44,4% dari pendapatan usaha jasa selular kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010. Kami mengharapkan pendapatan dari SMS dan jasa nilai tambah lainnya untuk terus meningkat, yang kami percaya akan didorong oleh layanan broadband nirkabel dan situs jejaring sosial yang berkembang dan perkembangan konten online populer lainnya.

Kami mengakui pendapatan selular sebagai berikut:

- Pendapatan selular yang berasal dari pemakaian pulsa dan roaming diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan selular Perusahaan;
- Untuk pelanggan pasca-bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa diserahkan;
- Untuk pelanggan pra-bayar, bagian aktivasi dari penjualan paket perdana ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode rata-rata yang diharapkan dari hubungan pelanggan. Penjualan voucher pulsa perdana/isi ulang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya;
- Penjualan modem *broadband* nirkabel dan telepon genggam selular diakui pada saat penyerahan kepada pelanggan;
- Pendapatan dari komunikasi data *broadband* nirkabel diakui berdasarkan durasi dari pemakaian atau tagihan tetap bulanan tergantung perjanjian dengan pelanggan;
- Pendapatan selular disajikan sebesar jumlah bersih, setelah kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah;
- Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan perusahaan telekomunikasi dalam negeri dan internasional lainnya diakui setiap bulan berdasarkan lalu lintas komunikasi aktual yang tercatat selama bulan berjalan.

Jasa MIDI. Pendapatan usaha dari jasa MIDI terutama berasal dari (i) jasa Internet yang disediakan oleh kami, Indosat Mega Media ("IM2") dan PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"), (ii) jasa IP VPN, sewa jaringan berkecepatan tinggi dan *frame relay* yang diselenggarakan oleh kami dan Lintasarta, (iii) jasa *digital data network* yang diselenggarakan oleh Lintasarta, (iv) jasa satelit, dan (v) *World link* dan *Direct link*.

Kami menangguhkan pendapatan instalasi untuk jasa internet, *frame net*, *World link* dan *Direct link*, pada saat penyelesaian instalasi atau koneksi dari peralatan, dan diakui sebagai pendapatan selama masa hubungan pelanggan yang diestimasi. Kami mengakui pendapatan dari biaya jasa bulanan dan jasa MIDI lainnya diakui pada saat jasa tersebut diberikan. Pendapatan dari pemakaian internet diakui setiap bulan berdasarkan durasi pemakaian Internet atau berdasarkan jumlah tetap, tergantung perjanjian dengan pelanggan. Kami mencatat pendapatan sewa satelit dengan metode garis lurus sesuai dengan masa sewa *transponder*. Biaya sewa bulanan untuk kapasitas *transponder* satelit didasarkan terutama pada kapasitas yang disewa.

Sebagian besar pendapatan usaha yang berasal dari jasa MIDI adalah dalam mata uang Dolar AS dan oleh karenanya dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Beberapa faktor lainnya juga mempengaruhi pendapatan usaha dari jasa MIDI, termasuk persaingan dengan para penyelenggara telekomunikasi domestik dan internasional, penurunan tarif dan migrasi dari layanan tradisional ke layanan berbasis IP. Kami memperkirakan tren ini akan terus berlangsung tetapi kami yakin bahwa hal ini akan terkompensasi dengan peningkatan jumlah layanan yang disewakan kepada pelanggan korporasi, peningkatan permintaan layanan yang *customized*, dan juga pengoperasian satelit Palapa-D kami yang baru.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Jasa telekomunikasi tetap meliputi jasa sambungan jarak jauh internasional, jasa telepon jaringan tetap nirkabel dan jasa telepon jaringan tetap. Jasa sambungan jarak jauh internasional yang terdiri dari layanan SLI "001" dan "008", "Flatcall 01016" dan juga layanan dengan bantuan operator dan jasa nilai tambah, memberikan kontribusi sebanyak 76,8% dari jumlah pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sementara sisanya berasal dari pendapatan jasa telepon jaringan tetap nirkabel dan telepon jaringan tetap.

Jasa Sambungan Jarak Jauh Internasional. Pendapatan usaha dari jasa sambungan jarak jauh internasional berasal dari dua sumber utama, yaitu pendapatan dari percakapan telepon dari luar negeri dan pendapatan dari percakapan telepon ke luar negeri. Kami telah menegosiasikan *volume commitments* dan *accounting rates* dengan para penyelenggara telekomunikasi asing, atau telah melaksanakan sistem tarif *market termination based*, dan menerima pembayaran dalam jumlah bersih dari operator-operator tersebut. Pembayaran dalam jumlah bersih dan *accounting rates* ini biasanya dilaksanakan dan dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah, khususnya mata uang Dolar AS; dengan demikian, pendapatan dari percakapan telepon dari luar negeri dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya.

Jasa Telepon Jaringan Tetap Nirkabel. Pada tanggal 31 Desember 2010, kami telah memiliki 550.130 pelanggan telepon jaringan tetap nirkabel di 82 kota di Indonesia. Pada akhir tahun 2010, kami memperluas jasa telepon jaringan tetap nirkabel ke beberapa kota lainnya dalam upaya meningkatkan kapasitas untuk sekitar empat juta pelanggan telepon jaringan tetap nirkabel. Dengan demikian, kami mengharapkan di masa mendatang jasa telepon jaringan tetap nirkabel ini akan menjadi sumber yang semakin penting bagi pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap.

Pendapatan telepon jaringan tetap nirkabel yang berasal dari pendapatan pemakaian diakui berdasarkan durasi panggilan telepon yang berhasil dilakukan melalui jaringan tetap kami. Untuk pelanggan pasca bayar, pendapatan jasa bulanan diakui pada saat jasa tersebut diserahkan.Untuk pelanggan prabayar, komponen aktivasi dari penjualan paket perdana ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama estimasi hubungan dengan pelanggan. Pendapatan dari penjualan voucher pulsa perdana atau isi ulang diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan diakui sebagai pendapatan pada saat pemakaian pulsa atau pada saat pulsa telah habis masa berlakunya.

Jasa Telepon Jaringan Tetap. Saat ini kami memiliki cakupan lokal dan domestik jarak jauh di 82 kota di Indonesia. Pendapatan dari jasa instalasi telepon jaringan tetap ditangguhkan dan diakui selama estimasi masa hubungan pelanggan. Pendapatan dari pemakaian diakui berdasarkan durasi percakapan yang berhasil tersambung melalui jaringan tetap Perusahaan.

Beban Usaha

Beban usaha utama Perusahaan meliputi beban jasa telekomunikasi, penyusutan dan amortisasi, beban karyawan, beban pemasaran dan beban umum dan administrasi.

Beberapa beban Perusahaan dinyatakan dalam mata uang Dolar AS atau mata uang selain Rupiah. Beban-beban tersebut meliputi penyelesaian interkoneksi internasional, beberapa perjanjian pemeliharaan dan biaya konsultasi.

Beban Jasa Telekomunikasi. Beban jasa telekomunikasi meliputi beban interkoneksi, bea frekuensi radio, pemeliharaan, listrik, gas dan air, sewa, sewa sirkuit, harga pokok penjualan kartu SIM dan voucher isi ulang, USO, biaya akses Blackberry, biaya pemasangan dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyusutan dan Amortisasi. Kami menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aset tetap, selama taksiran umur manfaatnya. Sebagian besar beban penyusutan kami terkait dengan aset yang digunakan untuk jasa selular Perusahaan. Oleh karena kami terus memperluas dan meningkatkan cakupan, kapasitas dan kualitas jaringan kami, kami memperkirakan beban penyusutan akan terus meningkat.

Pemasaran. Beban pemasaran meliputi beban untuk pameran, promosi dan iklan yang berhubungan dengan program pemasaran kami.

Karyawan. Beban karyawan meliputi gaji, insentif dan imbalan kerja lainnya, bonus, pajak penghasilan karyawan, manfaat kesehatan setelah pensiun, biaya pengobatan dan jasa karyawan outsourcing.

Umum dan Administrasi. Beban umum dan administrasi terutama meliputi sewa, jasa tenaga profesional, listrik, gas dan air, cadangan penurunan nilai piutang, transportasi, dan kantor.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Komponen utama dari pendapatan (beban) lain-lain kami adalah pendapatan bunga, laba (rugi) selisih kurs bersih, beban pendanaan, laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif—bersih. Laba atau rugi selisih kurs biasanya dipengaruhi oleh besarnya hutang non-Rupiah yang belum dibayar, piutang usaha dari perusahaan internasional dan kas dan setara kas dalam mata uang asing. Kami saat ini sedang melakukan lindung nilai/hedging atas Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS. Lihat "Butir 11: Pengungkapan Secara Kualitatif dan Kuantitatif Tentang Risiko Pasar." Beban pendanaan meliputi bunga pinjaman, biaya bank dan kerugian akibat pelunasan *Guaranteed Notes* jatuh tempo 2010 dan 2012.

Perpajakan

Beban pajak periode berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode yang bersangkutan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan kewajiban antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan. Pengaruh pajak untuk suatu periode dialokasikan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk pengaruh pajak dari transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat nilai aset direalisasikan atau nilai kewajiban tersebut diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang berlaku atau berlaku secara substantif pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Untuk setiap perusahaan yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau kewajiban, disajikan dalam jumlah bersih untuk masing-masing perusahaan tersebut.

Laba bersih

Laba bersih kami untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010 tidak setara dengan pendapatan usaha dan laba usaha kami pada periode-periode tersebut. Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya fluktuasi yang besar pada beberapa pos non-usaha yang mempengaruhi laba bersih Perusahaan pada periode-periode tersebut. Pos non-usaha tersebut di antaranya adalah fluktuasi beban pajak penghasilan tangguhan, laba atau rugi selisih kurs-bersih, dan laba atau rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih.

Hasil Usaha

Tabel berikut ini memperlihatkan data pendapatan komprehensif yang dinyatakan dalam persentase dari total pendapatan usaha untuk periode-periode yang disebutkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2008 (Disajikan Kembali)	2009 (Disajikan Kembali)	2010
Pendapatan usaha:			
Selular	75,3%	76,0%	80,8%
MIDI	14,2%	14,4%	12,7%
Telekomunikasi tetap	10,5%	9,6%	6,5%
Total pendapatan usaha	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**
Beban usaha:			
Beban jasa telekomunikasi	34,5%	37,6%	36,2%
Penyusutan dan amortisasi	23,8%	29,6%	31,4%
Karyawan	8,5%	7,7%	7,2%
Pemasaran	4,8%	4,3%	4,0%
Umum dan administrasi	3,8%	3,7%	3,3%
Jumlah Beban Usaha	**75,4%**	**82,9%**	**82,1%**
Laba Bersih:			
Laba Usaha	24,6%	17,1%	17,9%
Beban lain-lain – bersih	(11,3)%	(3,6)%	(11,2)%
Laba sebelum pajak penghasilan	13,3%	13,5%	6,7%
Beban pajak penghasilan – bersih	(2,6)%	(4,2)%	(2,1)%
Laba yang diperuntukan untuk pemilik perusahaan	10,6%	9,0%	4,2%
Laba yang diperuntukan pemilik bukan pengendali	0,1%	0,3%	0,4%

Tabel berikut ini memperlihatkan pendapatan usaha dari segmen-segmen usaha untuk periode-periode yang disebutkan:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						
	2008 (Disajikan Kembali)		2009 (Disajikan Kembali)		2010		
	Rp	%	Rp	%	Rp	US$	%
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US$, kecuali presentase)						
Jasa Selular							
Pendapatan pemakaian	8.492,8	58,7%	7.085,7	49,4%	7.944,0	883,6	50,1%
Jasa nilai tambah	5.052,6	35,0%	5.999,0	41,9%	7.039,2	782,9	44,4%
Pendapatan interkoneksi	1.833,8	12,6%	1.709,2	11,9%	1.252,7	139,3	7,9%
Sewa Menara	–	–	62,4	0,4%	252,0	28,0	1,6%
Pendapatan langganan bulanan	66,3	0,5%	184,2	1,3%	200,5	22,3	1,3%
Penjualan telepon genggam Blackberry dan modem	82,5	0,6%	206,5	1,4%	35,0	3,9	0,2%
Lain-lain	136,2	0,9%	171,4	1,2%	177,3	19,7	1,1%
Potongan harga di muka dan Program Loyalitas Pelanggan	(1.203,4)	-8,3%	(1.087,1)	-7,5%	(1.033,6)	-114,9	-6,6%
Sub jumlah	14.460,8	100,0%	14.331,3	100,0%	15.867,1	1.764,8	100,0%
MIDI							
IP VPN	585,6	21,4%	566,1	20,9%	605,7	67,4	24,3%
Internet	703,9	25,8%	677,4	25,0%	519,6	57,8	20,9%
World link dan direct link	456,7	16,7%	394,2	14,5%	278,8	31,0	11,2%
Frame net	315,8	11,6%	276,5	10,2%	227,1	25,3	9,1%
Sewa jaringan	231,6	8,5%	211,1	7,8%	189,0	21,0	7,6%
Jasa aplikasi	118,9	4,3%	146,1	5,4%	168,2	18,7	6,8%
Sewa satelit	96,3	3,5%	113,1	4,2%	136,0	15,1	5,5%
Digital data network	124,9	4,6%	144,6	5,3%	94,7	10,5	3,8%
MPLS	25,1	0,9%	67,1	2,5%	66,6	7,4	2,7%
Lain-lain	74,6	2,7%	116,4	4,2%	202,4	22,5	8,1%
Sub jumlah	2.733,4	100,0%	2.712,6	100,0%	2.488,1	276,7	100,0%
Telekomunikasi tetap							
Telepon internasional	1.650,1	81,6%	1.422,2	78,9%	993,2	110,5	76,8%
Telepon jaringan tetap nirkabel	244,3	12,1%	249,9	13,9%	174,1	19,4	13,5%
Telepon jaringan tetap	126,7	6,3%	129,9	7,2%	125,4	13,9	9,7%
Lain-lain	0,7	0,0%	1,0	0,0%	0,5	0,0	0,0%
Sub jumlah	2.021,8	100,0%	1.803,0	100,0%	1.293,2	143,8	100,0%
Jumlah	**19.216,0**		**18.846,9**		**19.648,4**	**2.185,3**	

Pendapatan Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

Total pendapatan usaha meningkat dari Rp18.846,9 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp19.648,4 miliar (US$2.185,3 juta), atau sebesar 4,3%, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan jasa selular kami. Selama tahun 2010, pendapatan usaha dari jasa selular meningkat sebesar Rp1.535,8 miliar, atau 10,7%, dari Rp14.331,3 miliar pada tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa MIDI menurun sebesar Rp224,5 miliar, atau 8,3% dari Rp2.712,6 miliar di tahun 2009.

Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap di tahun 2010 menurun sebesar Rp509,8 miliar, atau 28,3%, dari Rp1.803,0 miliar di tahun 2009.

Jasa Selular. Pada tahun 2010, kami mencatat pendapatan usaha dari jasa selular sebesar Rp15.867,1 miliar (US$1.764,8 juta), meningkat sebesar 10,7% dari Rp14.331,3 miliar pada tahun 2009. Kami percaya bahwa peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan jumlah pelanggan. Pendapatan usaha dari jasa selular mewakili 80,8% dari total pendapatan usaha kami pada tahun 2010 yang memiliki persentase yang lebih tinggi daripada persentase pada tahun 2009.

Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp858,3 miliar, atau 12,1%, dari tahun 2009, dan mewakili 50,1% dari total pendapatan usaha jasa selular kami. Peningkatan dalam pemakaian terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah menit yang digunakan oleh pelanggan kami.

Pada tahun 2010, pendapatan usaha dari jasa selular yang berasal dari jasa nilai tambah mengalami peningkatan sebesar Rp1.040,2 miliar, atau 17,3%, dibandingkan pada tahun 2009. Kontribusi jasa nilai tambah untuk pendapatan usaha dari jasa selular meningkat sebesar 2,6% dari 41,8% pada tahun 2009 menjadi 44,4% pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan usaha dari jasa nilai tambah, demikian juga dengan peningkatan kontribusi pendapatan dari jasa nilai tambah kepada pendapatan usaha selular kami secara keseluruhan, didorong oleh peningkatan dalam penggunaan SMS dan *broadband* nirkabel.

Jasa MIDI. Pada tahun 2010, pendapatan usaha dari jasa MIDI menurun sebesar Rp224,5 miliar dari Rp2.712,6 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.488,1 miliar (US$276,7 juta) pada tahun 2010. Pendapatan usaha IP VPN mencerminkan komponen terbesar dari pendapatan usaha dari jasa MIDI. Pendapatan usaha IP VPN meningkat sebesar Rp39,6 miliar dari Rp566,1 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp605,7 miliar pada tahun 2010. Penurunan pendapatan usaha dari jasa MIDI, termasuk juga dari jasa Internet, demikian juga dengan jasa sewa jaringan domestik dan internasional, terutama disebabkan oleh meningkatnya persaingan dan menurunnya tarif layanan kami.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Terdapat penurunan dalam pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap dari Rp1.803,0 miliar di tahun 2009 menjadi Rp1.293,2 miliar (US$143,8 juta) pada tahun 2010. Pendapatan usaha dari jasa telepon internasional dan telepon jaringan tetap nirkabel, masing-masing mencerminkan 76,8% dan 13,5%, dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap pada tahun 2010. Sedangkan 9,7% lainnya dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap berasal dari jasa telepon tetap dan layanan-layanan lainnya pada tahun 2010. Pendapatan yang berasal dari telepon internasional menurun dari Rp1.422,2 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp993,2 miliar (US$110,5 juta) pada tahun 2010 akibat dari penurunan lalu lintas telepon SLI ke luar negeri oleh pelanggan Indosat dan pelanggan bukan Indosat. Jumlah volume sambungan telepon internasional dari sambungan "001" dan "008" Perusahaan meningkat sebanyak 6,1% dari 2.060,5 juta menit pada tahun 2009 menjadi 2.186,9 juta menit pada tahun 2010. Jumlah lalu lintas percakapan dari luar negeri meningkat sebesar 10,6% dari 1.558,5 juta menit pada tahun 2009 menjadi 1.723,9 juta menit pada tahun 2010, terutama dikarenakan *volume commitments* dari operator telekomunikasi asing. Lalu lintas percakapan keluar negeri menurun sebanyak 7,8% dari 502,0 juta menit pada tahun 2009 menjadi 463,0 juta menit pada tahun 2010 disebabkan oleh penurunan volume commitments dari operator telekomunikasi asing.

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar Rp505,3 miliar, atau 3,2%, dari Rp15.621,4 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp16.126,7 miliar (US$1.793,6 juta) pada tahun 2010, terutama karena adanya peningkatan beban penyusutan dan amortisasi dan pengeluaran untuk beban jasa telekomunikasi. Peningkatan ini sebagian diimbangi dengan penurunan beban karyawan, beban pemasaran dan beban umum dan administrasi pada tahun tersebut.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp25,5 miliar, atau 0,4%, dari Rp7.087,9 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp7.113,4 miliar (US$791,2 juta) pada tahun 2010, terutama karena adanya peningkatan iuran Pemerintah untuk biaya frekuensi, USO dan biaya-biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi. Peningkatan ini juga terjadi karena pembayaran sewa

untuk penambahan BTS, peningkatan biaya interkoneksi dan peningkatan dalam pemeliharaan terkait dengan peningkatan dalam aset tetap kami.

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar 10,6% dari Rp5.571,6 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp6.162,8 miliar (US$685,4 juta) pada tahun 2010, terutama sebagai akibat dari peningkatan dari jumlah aset tetap kami yang berkelanjutan, termasuk satelit Palapa-D kami yang baru. Total biaya dari aset tetap kami meningkat dari Rp74.818,5 miliar di tahun 2009 menjadi Rp78.101,2 miliar (US$8.686,6 juta) di tahun 2010.

Beban karyawan menurun sebesar Rp40,4 miliar, atau 2,8%, dari Rp1.451,6 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp1.411,2 miliar (US$157,0 juta) pada tahun 2010, terutama karena penurunan manfaat setelah masa kerja, manfaat atas kelanjutan gaji sebelum pensiun (MPP) dan diimbangi dengan peningkatan gaji dan bonus.

Beban pemasaran menurun sebesar Rp37,7 miliar, atau 4,6%, dari Rp816,9 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp779,2 miliar (US$86,7 juta) pada tahun 2010, terutama karena adanya penurunan beban iklan, promosi dan pameran, sejalan dengan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan program efisiensi yang kami lakukan.

Beban administrasi dan umum menurun sebesar Rp33,4 miliar, atau sebesar 4,8%, dari Rp693,4 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp660,0 miliar (US$73,4 juta) pada tahun 2010 terutama karena penurunan dalam cadangan penurunan nilai piutang, biaya sewa, biaya profesional dan beban perlengkapan kantor, sementara kami terus melaksanakan program efisiensi kami, yang dirancang untuk meminimalisasi biaya non-operasional.

Laba Usaha

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba usaha meningkat sebesar Rp296,2 miliar atau 9,2%, dari Rp3.225,5 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp3.521,7 miliar (US$391,7 juta) pada tahun 2010.

Beban Lain-lain – Bersih

Beban lain-lain bersih meningkat sebesar Rp1.515,1 miliar, dari Rp681,3 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp2.196,4 miliar (US$244,3 juta) pada tahun 2010, terutama karena laba selisih kurs yang lebih rendah, yang didorong oleh menguatnya Rupiah terhadap Dolar AS yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Laba selisih kurs-bersih sebesar Rp1.656,4 miliar pada tahun 2009 menurun menjadi Rp492,4 miliar (US$54,8 juta) pada tahun 2010. Kurs yang digunakan mengalami penurunan dari Rp9.400 untuk US$1 per tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp8.991 untuk US$1 per tanggal 31 Desember 2010, dibandingkan dengan penurunan dari Rp10.950 untuk US$1 per tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp9.400 untuk US$1 per tanggal 31 Desember 2009.

Rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih menurun sebesar Rp38,1 miliar dari Rp486,9 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp448,8 miliar (US$49,9 juta) pada tahun 2010 disebabkan oleh menguatnya Rupiah terhadap Dolar AS.

Kami mencatat peningkatan pendapatan bunga menjadi Rp143,4 miliar (US$15,9 juta) pada tahun 2010, yang mencerminkan peningkatan sebesar Rp4,4 miliar, atau 3,2% selama tahun 2009, karena jumlah rata-rata kas kami yang lebih tinggi. Beban lain-lain bersih mengalami penurunan sebesar Rp5,0 miliar dari Rp116,8 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp111,8 miliar (US$12,4 juta) pada tahun 2010 terutama akibat peningkatan pendapatan restorasi submarine cable dan laba dalam penjualan aset tetap.

Beban Pajak Penghasilan - Bersih

Kami mencatat beban pajak penghasilan-bersih sebesar Rp422,4 miliar (US$47,0 juta) pada tahun 2010 dibandingkan dengan Rp783,9 miliar pada tahun 2009. Penurunan dalam beban pajak penghasilan-bersih terutama disebabkan oleh pendapatan sebelum pajak yang lebih rendah terkait dengan laba selisih kurs yang lebih rendah dan beban pendanaan yang lebih tinggi.

Laba Bersih

Laba bersih kami menurun sebesar Rp857,4 miliar, atau 48,7%, dari Rp1.760,3 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp902,9 miliar (US$100,4 juta) pada tahun 2010 dikarenakan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Total pendapatan usaha menurun secara marginal dari Rp19.216,0 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp18.846,9 miliar pada tahun 2009, atau sebesar 1,9%, terutama disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan jasa selular kami. Selama tahun 2009, pendapatan usaha dari jasa selular menurun sebesar Rp129,5 miliar, atau 0,9%, dari Rp14.460,8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp14.331,3 pada tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa MIDI menurun sebesar Rp20,8 miliar, atau 0,8% dari Rp2.733,4 miliar di tahun 2008 menjadi Rp2.712,6 di tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap di tahun 2009 menurun secara marginal sebesar Rp218,8 miliar, atau 10,8%, dari Rp2.021,8 miliar di tahun 2008 menjadi Rp1.803,0 di tahun 2009.

Jasa Selular. Pada tahun 2009, kami mencatat pendapatan usaha dari jasa selular sebesar Rp14.331,3 miliar, menurun sebesar 0,9% dari Rp14.460,8 miliar pada tahun 2008. Kami percaya bahwa penurunan tersebut terutama disebabkan karena strategi nilai kami, yang dimulai pada tahun 2009, untuk meminimalisir pelanggan bernilai rendah "calling card". Penghapusan jenis pelanggan "*calling card*" mengakibatkan penurunan kurang dari 1,6% dari pendapatan usaha dari selular. Selain itu, kami yakin bahwa penurunan pendapatan usaha dari jasa selular diakibatkan oleh penurunan ARPU kami dari Rp38.639 pada tahun 2008 menjadi Rp37.664 pada tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa selular mewakili 76% dari total pendapatan usaha kami pada tahun 2009, yang memiliki persentase yang hampir sama pada tahun 2008 yaitu sebesar 75,3%.

Pendapatan pemakaian menurun sebesar Rp1.407,1 miliar, atau 16,6%, dari tahun 2008, dan mewakili 49,4% dari total pendapatan usaha jasa selular kami. Penurunan dalam pemakaian terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pelanggan, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan pendapatan dari jasa nilai tambah.

Pada tahun 2009, pendapatan usaha dari jasa selular yang berasal dari jasa nilai tambah mengalami peningkatan sebesar Rp946,4 miliar, atau 18,7%, dibandingkan pada tahun 2008. Kontribusi jasa nilai tambah untuk pendapatan usaha dari jasa selular meningkat sebesar 6,9% dari 35,0% pada tahun 2008 menjadi 41,9% pada tahun 2009. Peningkatan pendapatan usaha dari jasa nilai tambah, demikian juga dengan peningkatan kontribusi pendapatan dari jasa nilai tambah kepada pendapatan usaha selular kami secara keseluruhan, didorong oleh peningkatan penggunaan layanan *broadband* nirkabel kami.

Jasa MIDI. Pada tahun 2009, pendapatan usaha dari jasa MIDI relatif konstan, dengan Rp2.733,4 miliar pada tahun 2008 dan Rp2.712,6 miliar pada tahun 2009. Pendapatan usaha internet terus mencerminkan komponen terbesar dari pendapatan usaha dari jasa MIDI, walaupun terjadi penurunan dalam pendapatan usaha dari Internet sebesar Rp26,5 miliar di tahun 2009. Penurunan pendapatan usaha dari jasa Internet, demikian juga dengan jasa sewa jaringan domestik dan internasional, terutama disebabkan oleh meningkatnya persaingan dan menurunnya tarif jasa kami.

Jasa Telekomunikasi Tetap. Terdapat penurunan dalam pendapatan usaha dari jasa telekomunikasi tetap dari Rp2.021,8 miliar di tahun 2008 menjadi Rp1.803,0 miliar di tahun 2009. Pendapatan usaha dari jasa telepon internasional dan telepon jaringan tetap nirkabel, masing-masing mencerminkan 78,9% dan 13,9%, dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap pada tahun 2009. Sedangkan 7,2% lainnya dari pendapatan usaha jasa telekomunikasi tetap berasal dari jasa telepon tetap dan jasa-jasa lainnya pada tahun 2009. Pendapatan yang berasal dari telepon internasional menurun dari Rp1.650,1 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.422,2 miliar pada tahun 2009 akibat dari penurunan lalu lintas telepon SLI keluar oleh pelanggan bukan Indosat. Jumlah volume sambungan telepon internasional dari sambungan "001" dan "008" Perusahaan meningkat sebanyak 0,2% dari 2.056,4 juta menit pada tahun 2008 menjadi 2.060,5 juta menit pada tahun 2009. Jumlah lalu lintas percakapan dalam negeri menurun sebesar 1,5% dari 1.582,4 juta menit pada tahun 2008 menjadi 1.558,5 juta

menit pada tahun 2009, terutama karena adanya penurunan *volume commitments* dari operator telekomunikasi asing. Lalu lintas percakapan keluar meningkat sebanyak 5,9% dari 474,0 juta menit pada tahun 2008 menjadi 502,0 juta menit pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan lalu lintas pemakaian dari pelanggan kami, misalnya mereka yang menggunakan jasa "Flatcall 01016".

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar Rp1.133,6 miliar, atau 7,8%, dari Rp14.487,8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp15.621,4 miliar pada tahun 2009 terutama karena adanya kenaikan beban penyusutan dan amortisasi dan beban jasa telekomunikasi, yang merupakan dua komponen beban usaha terbesar kami. Peningkatan ini sebagian diimbangi dengan penurunan beban karyawan, beban pemasaran dan beban administrasi dan umum pada tahun tersebut.

Beban jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp460,1 miliar, atau 6,9%, dari Rp6.627,8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp7.087,9 miliar pada tahun 2009 terutama karena adanya peningkatan iuran Pemerintah untuk biaya frekuensi, pembayaran biaya ijin 3G tahunan, termasuk biaya penambahan spektrum pada tahun 2009, USO dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi. Peningkatan ini juga terjadi karena pembayaran sewa untuk penambahan BTS, peningkatan biaya pokok penjualan modem dan *handset* yang dipengaruhi dari tingginya penjualan Blackberry™ dan peningkatan beban terkait sewa jaringan, Internet dan penyewaan *transponder*.

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar 22,0% dari Rp4.565,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp5.571,6 miliar pada tahun 2009, terutama sebagai akibat dari pertumbuhan dari jumlah aset tetap kami yang berkelanjutan, termasuk satelit Palapa-D kami yang baru, serta percepatan penyusutan elemen yang tidak digunakan pada jaringan selular kami. Biaya perolehan aset tetap kami meningkat dari Rp63.478,4 miliar di tahun 2008 menjadi Rp74.818,5 miliar di tahun 2009.

Beban karyawan menurun sebesar Rp187,4 miliar, atau 11,4%, dari Rp1.639,0 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.451,6 miliar pada tahun 2009, terutama karena penurunan tarif pajak penghasilan karyawan, serta penurunan bonus, insentif dan kenikmatan karyawan lainnya, beban pegawai *outsourcing* dan tunjangan kesehatan masa pensiun.

Beban pemasaran menurun sebesar Rp101,2 miliar, atau 11,0%, dari Rp918,1 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp816,9 miliar pada tahun 2009 terutama karena adanya penurunan beban iklan, promosi dan pameran, sejalan dengan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan program efisiensi yang kami lakukan.

Beban administrasi dan umum menurun sebesar Rp44,0 miliar, atau 6%, dari Rp737,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp693,4 miliar pada tahun 2009 terutama karena penurunan biaya transportasi, pelatihan, pendidikan dan penelitian, biaya jasa profesional, biaya kantor dan biaya makan karyawan, sementara kami terus melaksanakan program efisiensi yang dirancang untuk mengurangi biaya non-operasional.

Laba usaha

Sebagai akibat dari faktor-faktor di atas, laba usaha menurun sebesar Rp1.502,7 miliar atau 31,8%, dari Rp4.728,2 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp3.225,5 miliar pada tahun 2009.

Beban Lain-lain – Bersih

Beban lain-lain - bersih menurun sebesar Rp1.491,6 miliar, dari Rp2.172,9 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp681,3 miliar pada tahun 2009, terutama karena adanya peningkatan laba selisih kurs, yang didorong oleh menguatnya Rupiah terhadap Dolar AS. Dari rugi selisih kurs-bersih sebesar Rp885,7 miliar pada tahun 2008, kami mencatat laba selisih kurs-bersih sebesar Rp1.656,4 miliar pada tahun 2009.

Kami mencatat laba perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp136,6 miliar pada tahun 2008 dan rugi perubahan nilai wajar derivatif-bersih sebesar Rp486,9 miliar pada tahun 2009 disebabkan oleh menguatnya rupiah terhadap Dolar AS.

Kami mencatat penurunan pendapatan bunga menjadi Rp139,0 miliar pada tahun 2009, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp321,1 miliar, atau 69,8% dari tahun 2008, karena jumlah rata-rata kas lebih rendah.

Beban lain-lain bersih mengalami peningkatan sebesar Rp91,2 miliar dari Rp25,6 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp116,8 miliar pada tahun 2009 terutama akibat peningkatan kerusakan aset tetap yang disebabkan bencana alam, seperti gempa bumi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2009 dibandingkan tahun 2008 yang menyebabkan perusahaan asuransi menurunkan jumlah yang dapat diklaim dari kerusakan aset tetap yang diasuransikan seiring dengan bertambahnya pembatasan dalam amandemen perjanjian asuransi, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 8 Juni 2009 atas pajak penghasilan badan Satelindo dan pajak penghasilan pasal 4(2), 21 dan 23 untuk tahun pajak 2002 dan 2003 dan pemeriksaan pajak atas pajak pertambahan nilai Satelindo untuk tahun pajak 2002 dan 2003.

Beban Pajak Penghasilan - Bersih

Kami mencatat beban pajak penghasilan-bersih sebesar Rp485,3 miliar pada tahun 2008 dibandingkan dengan Rp783,9 miliar pada tahun 2009. Peningkatan dalam beban pajak penghasilan - bersih terutama disebabkan oleh penyesuaian manfaat pajak penghasilan yang ditangguhkan karena adanya perubahan dalam tarif pajak penghasilan pada tahun 2008.

Laba Bersih

Laba bersih kami menurun sebesar Rp309,7 miliar, atau 15,0%, dari Rp2.070,0 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp1.760,3 miliar pada tahun 2009 dikarenakan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas.

B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Secara historis, kebutuhan likuiditas kami timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal sehubungan dengan perluasan bisnis telekomunikasi Perusahaan. Bisnis telekomunikasi kami membutuhkan modal yang besar untuk membangun dan memperluas infrastruktur jaringan bergerak dan data dan untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan, terutama selama tahap pengembangan jaringan. Meskipun kami memiliki banyak infrastruktur jaringan yang telah ada, kami memperkirakan akan kembali melakukan pengeluaran barang modal khususnya untuk pengembangan jaringan selular di daerah-daerah yang diperkirakan sebagai daerah yang tinggi pertumbuhannya, dan juga untuk meningkatkan kualitas dan cakupan jaringan yang telah ada.

Kami berkeyakinan kas dan setara kas kami, arus kas dari kegiatan usaha Perusahaan dan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia akan cukup memenuhi kebutuhan dana yang telah diantisipasi, termasuk kebutuhan dana untuk modal kerja dan pengeluaran barang modal yang telah direncanakan, di masa mendatang. Akan tetapi, apabila keadaan ekonomi dunia atau Indonesia memburuk, persaingan atau produk pengganti yang timbul lebih cepat di luar perkiraan saat ini atau nilai mata uang Rupiah melemah secara tajam terhadap Dolar AS, maka arus kas bersih Perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha dapat menurun dan jumlah pengeluaran barang modal yang dibutuhkan dalam mata uang Rupiah dapat meningkat, dimana salah satu di antaranya dapat memberikan dampak negatif bagi likuiditas kami.

Arus Kas

Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai arus kas Perusahaan secara historis:

	Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta Dolar Amerika Serikat)			
Kas bersih:				
Yang diperoleh dari kegiatan usaha	6.513,3	4.051,2	6.839,0	760,6
Yang digunakan untuk kegiatan investasi	(10.286,9)	(10.670,7)	(5.970,7)	(664,1)
Yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan	1.458,5	3.724,7	(1.629,7)	(181,2)

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Kegiatan Usaha

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha adalah masing-masing sebesar Rp6.513,3 miliar, Rp4.051,2 miliar, dan Rp6.839,0 miliar (US$760,6 juta) untuk tahun 2008, 2009 dan 2010. Pada tahun 2010, kas bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha meningkat terutama karena penerimaan dari pelanggan.

Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Kegiatan Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi adalah masing-masing sebesar Rp10.286,9 miliar, Rp10.670,7 miliar dan Rp5.970,7 miliar (US$664,1 juta) untuk tahun 2008, 2009 dan 2010. Kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi untuk tahun 2008, 2009 dan 2010 terutama untuk perolehan aset tetap, mencapai total masing-masing sebesar Rp10.307,9 miliar, Rp10.684,7 miliar dan Rp6.495,1 miliar (US$722,4 juta), seiring dengan dilakukannya perluasan cakupan dan kapasitas jaringan kami selama tahun-tahun tersebut. Aset tetap yang dibeli terutama meliputi aset sentral dan jaringan, perlengkapan pelanggan dan peralatan lain dan bangunan dan sarana penunjang bangunan dan partisi.

Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Kegiatan Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan pendanaan adalah masing-masing sebesar Rp1.458,5 miliar, Rp3.724,7 miliar dan Rp1.629,7 miliar (US$181,2 juta) pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan pendanaan pada tahun 2010 terutama berkaitan dengan pembayaran kembali hutang jangka panjang, hutang obligasi, yang sebagian diimbangi oleh hasil dari hutang obligasi.

Pokok Terhutang

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah hutang yang belum dibayar pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010:

	Per 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta Dolar Amerika Serikat)			
Hutang jangka panjang (setelah dikurangi biaya emisi pinjaman dan biaya consent solicitation yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek)	10.812,2	12.715,5	7.666,8	852,7
Hutang obligasi (setelah dikurangi biaya emisi hutang obligasi, diskon, biaya consent solicitation yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek)	10.315,6	8.472,2	12.114,1	1.347,4
Bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang	572,5	1.440,2	3.184,2	354,1
Bagian jangka pendek dari hutang obligasi	56,4	2.840,7	1.098,1	122,1

Penurunan hutang jangka panjang (setelah dikurangi biaya emisi pinjaman dan biaya consent solicitation yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek) menjadi sebesar Rp7.666,8 miliar (US$852,7 juta) pada tanggal 31 Desember 2010 dari Rp12.715,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 terutama disebabkan oleh pembayaran kembali lebih awal terhadap fasilitas kami dengan Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank DBS Indonesia. Peningkatan hutang obligasi (setelah dikurangi biaya emisi hutang obligasi, diskon, biaya consent solicitation yang belum diamortisasi dan bagian jangka pendek) dari Rp8.472,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp12.114,1 miliar (US$1.347,4 juta) pada tanggal 31 Desember 2010 terutama disebabkan oleh penerbitan atas *Guaranteed Notes* kami yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Beberapa instrumen hutang kami (selain dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2020) mewajibkan kami untuk mempertahankan maksimum rasio tertentu atas hutang (atau pinjaman) terhadap ekuitas, atau rasio hutang terhadap ekuitas yang sebelum Februari 2009 adalah 1,75:1,0 atau 175%. Sebagai hasil dari perubahan-perubahan yang kami minta atas instrumen dan perjanjian-perjanjian tersebut, kami sepakat dengan pemberi pinjaman dan wali amanat di bulan Februari dan Maret 2009 bahwa rasio hutang terhadap ekuitas menjadi 2,50:1,0 atau 250%. Kami juga meminta dan mendapatkan persetujuan pada batasan-batasan tertentu pada rasio hutang terhadap ekuitas sehingga definisi tersebut menjadi seragam terhadap seluruh instrumen dan perjanjian-perjanjian. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2020 tidak memuat persyaratan rasio hutang terhadap ekuitas.

Hutang kami meningkat sebesar 30,5% dari Rp16.692,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp21.756,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 terutama disebabkan oleh (i) peningkatan dalam penerbitan hutang baru untuk mendukung peningkatan pengeluaran barang modal pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007 dan (ii) efek akuntansi dari penurunan nilai Rupiah terhadap Dolar AS. Nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah menurun dari Rp10.950 untuk US$1,00 pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi Rp9.400 untuk US$1,00 pada tanggal 31 Desember 2009. Karena sebagian kewajiban kami dalam mata uang Dolar AS, kami terkena imbas fluktuasi Rupiah. Depresiasi Rupiah dan peningkatan ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing mengekspos kami terhadap penyesuaian akuntansi jangka pendek yang mempengaruhi rasio keuangan kami.

Untuk membantu menangani efek fluktuasi mata uang tersebut di masa depan, pada tahun 2009, kami mengubah kesepakatan rasio hutang terhadap ekuitas dalam semua instrumen dan perjanjian hutang kami untuk meningkatkan rasio dari 1,75 menjadi 2,50, untuk memberikan kami "ruang" tambahan dalam hal terjadinya pergerakan nilai tukar mata uang asing yang merugikan. Kami juga mengubah ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas untuk mencerminkan secara lebih baik efek kebijakan lindung nilai pada rasio ini dan mengubah definisi "Hutang" dan "Ekuitas" dalam instrumen dan perjanjian hutang tersebut untuk memberikan ruang dalam butir-butir tersebut. *Guaranteed Notes* jatuh tempo tahun 2020 tidak mengandung ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas.

Sebagai bagian dari perubahan yang disetujui pada tahun 2009, kami mendapatkan persetujuan untuk mengubah definisi dalam beberapa instrumen dan perjanjian hutang kami: (i) mengecualikan hal-hal non-kas, termasuk laba atau rugi kurs valuta asing, dari definisi "EBITDA"; (ii) mengecualikan hutang pengadaan yang dikenakan bunga dari definisi "Hutang" kecuali apabila jatuh temponya lebih dari enam bulan dari tanggal tagihan (*invoice*); dan (iii) memasukkan dalam definisi "Ekuitas" (a) hak minoritas, untuk entitas yang hutangnya 100% terkonsolidasi oleh kami, dan (b) pinjaman subordinasi pemegang saham.

Walaupun kami yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut akan memberikan kami ruangan yang cukup dalam hal terjadi ketidakstabilan antara nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah, kami tidak dapat memastikan bahwa ketidakstabilan yang lebih besar daripada yang terjadi pada 12 bulan terakhir tidak akan terjadi, yang dapat mengakibatkan kami melanggar ketentuan keuangan kami.

Di bawah ini adalah penghitungan rasio keuangan kami secara historis yang terdapat dalam ketentuan keuangan kami berdasarkan SAK yang dipersyaratkan oleh perjanjian hutang kami. Rasio keuangan secara historis pada tanggal 31 Desember 2008 dihitung berdasarkan perubahan definisi "Hutang" (juga didefinisikan sebagai "Pinjaman" dalam beberapa

terjemahan instrumen dan perjanjian hutang kami"), "Ekuitas" dan "EBITDA" dalam beberapa instrumen dan perjanjian kami seolah definisi tersebut telah berlaku sejak tanggal tersebut.

	Persyaratan Ratio	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
		2008	2009	2010	
		Rp	Rp	Rp	US$
		(dalam miliar Rupiah, dalam juta Dolar Amerika Serikat kecuali persentase)			
Data posisi keuangan dan pendapatan komprehensif:					
Bagian jangka pendek dari:					
Hutang jangka panjang		572,5	1.440,2	3.184,2	354,1
Hutang obligasi		56,4	2.840,7	1.098,1	122,1
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek:		56.4	2,840.7	1,098.1	122.1
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		1.596,2	2.192,5	997,0	110,9
Pihak ketiga		9.216,0	10.528,8	6.669,8	741,8
Hutang obligasi – setelah dikurangi bagian jangka pendek		10.315,6	8.472,2	12.114,1	1.347,4
Biaya emisi hutang obligasi, biaya consent solicitation dan diskon yang belum diamortisasi		312,3	338,5	336,1	37,4
Jumlah hutang[1]		22.069,0	25.812,9	24.399,3	2.713,7
Jumlah Aset		51.693,3	55.041,5	52.818,2	5.874,6
Jumlah Kewajiban		33.994,8	36.753,2	34.581,7	3.846,3
Jumlah Ekuitas[2]		17.698,5	18.288,3	18.236,5	2.028,3
Laba usaha		4.733,3	3.213,0	3.473,9	386,4
Penyusutan dan amortisasi		4.555,9	5.561,4	6.151,9	684,2
Depreciation and Amortization		4,555.9	5,561.4	6,151.9	684.2
EBITDA[3]		9.289,2	8.774,4	9.625,8	1.070,6
Beban bunga[4]		1.776,5	1808,6	2.080,3	231,3
Rasio Keuangan:					
Rasio hutang terhadap ekuitas[5]	<2,50X	1,25X	1,41X	1,34X	-
Rasio hutang terhadap EBITDA[6]	<3,50X	2,38X	2,94X	2,53X	-
Rasio EBITDA terhadap beban bunga[7]	>3,00X	5,23X	4,85X	4,63X	-

(1) Kami mendefinisikan total hutang sebagai jumlah dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi (bagian jangka pendek dan jangka panjang), biaya emisi yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang, obligasi dan notes), biaya consent solicitation yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang dan obligasi) dan diskon yang belum diamortisasi (hutang jangka panjang dan notes).
Menurut definisi yang telah diubah, "Hutang" berarti, dalam hubungannya dengan suatu pihak pada setiap tanggal penentuan (tanpa duplikasi):
(a) jumlah hutang pokok dan premium (jika ada) sehubungan dengan hutang kepada pihak tersebut dan hutang yang sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat hutang, obligasi atau instrumen serupa lainnya untuk pembayaran kepada pihak yang bertanggung jawab atau besar kemungkinan terlibat dalam suatu hal, tingkat suku bunga atau mengandung bunga yang masih harus dibayar; dan
(b) seluruh kewajiban kepada suatu pihak sehubungan dengan hutang pengadaan yang merupakan hutang usaha kepada pemasok yang mengandung suku bunga atau mengandung bunga yang masih harus dibayar dan pembayaran yang memiliki jatuh tempo lebih dari enam (6) bulan setelah tanggal penerbitan tagihan yang terkait. Akan tetapi, sehubungan dengan anggota dari Perusahaan, atau penggantinya, atau Grup, tidak termasuk seluruh pinjaman yang diperoleh anggota grup dari pemegang saham Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) yang memiliki peringkat subordinasi terhadap hutang termasuk dalam poin (a) dan (b) di atas.

(2) Kami mendefinisikan ekuitas sebagai jumlah ekuitas para pemegang saham dan hak minoritas. Menurut definisi yang telah diubah, "Ekuitas" berarti jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban, dimana jumlah kewajiban tidak termasuk seluruh pinjaman anggota Grup kepada pemegang saham Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) yang mempunyai kedudukan subordinasi terhadap Hutang.

(3) Kami telah mendefinisikan EBITDA sebagai pendapatan sebelum bunga, amortisasi goodwill, pendapatan non-operasional dan beban, beban pajak penghasilan dan penyusutan, dan hak minoritas dalam laba bersih anak perusahaan sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi yang dihitung berdasarkan SAK. EBITDA bukanlah merupakan ukuran standar dalam SAK maupun IFRS. Sebagaimana bisnis telekomunikasi yang memerlukan modal yang banyak, ketentuan pengeluaran barang modal dan tingkat hutang dan beban bunga dapat memiliki efek yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan dengan hasil operasional yang sama. Oleh karena itu, kami yakin bahwa EBITDA memberikan gambaran yang berguna bagi hasil operasional kami dan bahwa laba bersih adalah ukuran keuangan yang paling dapat secara langsung dibandingkan terhadap EBITDA sebagai indikator kinerja operasional. Anda tidak disarankan menganggap bahwa definisi kami tentang EBITDA merupakan indikator terhadap kinerja operasional, likuiditas atau ukuran standar lainnya berdasarkan SAK maupun IFRS, atau definisi perusahaan lainnya atas EBITDA. Definisi kami akan EBITDA tidak memperhitungkan pajak dan pengeluaran kas non-operasional

lainnya. Dana yang didapat dari ukuran ini mungkin tidak dapat digunakan untuk pembayaran hutang karena adanya pembatasan ketentuan, persyaratan pengeluaran barang modal dan komitmen lainnya. Menurut definisi yang telah diubah, "EBITDA" berarti, untuk suatu periode adalah jumlah laba usaha (yang dihitung sebelum beban pendanaan, pajak, pendapatan atau biaya yang berasal dari kegiatan non-operasional dan biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah depresiasi dan amortisasi, serta untuk keperluan penghitungan rasio total Hutang terhadap EBITDA dari Grup, setelah memperhitungkan proforma dari adanya akuisisi atau pengalihan material atas aset atau usaha seolah-olah akuisisi atau pengalihan tersebut terjadi pada hari pertama periode tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan rekonsiliasi laba bersih berdasarkan SAK terhadap pengertian EBITDA berdasarkan periode-periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta Dolar Amerika Serikat)			
EBITDA berdasarkan SAK	9.289,2	8.774,4	9.625,8	1.070,6
Penyesuaian:				
Amortisasi goodwill	(227,3)	(235,4)	(226,4)	(25,2)
Pendapatan bunga	460,1	139,0	143,4	15,9
Beban pendanaan (termasuk beban bunga)	(1.858,3)	(1.873,0)	(2.271,6)	(252,7)
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif – bersih	136,6	(517,7)	(418,1)	(46,5)
Lain-lain – bersih	(33,6)	(150,3)	(111,8)	(12,4)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(885,7)	1.656,4	492,4	54,8
Beban pajak penghasilan – bersih	(419,8)	(677,3)	(357,8)	(39,8)
Penyusutan dan amortisasi	(4.555,9)	(5.561,4)	(6.151,9)	(684,2)
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(26,8)	(56,5)	(76,8)	(8,5)
Laba bersih berdasarkan SAK	1.878,5	1.498,2	647,2	72,0

Tabel berikut ini menunjukkan rekonsiliasi EBITDA berdasarkan SAK terhadap IFRS berdasarkan periode-periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta Dolar Amerika Serikat)			
EBITDA berdasarkan SAK	9.289,2	8.774,4	9.625,8	1.070,6
Komisi dealer	-	-	46,9	5,2
Pendapatan jasa penyambungan yang ditangguhkan	4,4	22,7	11,8	1,3
EBITDA berdasarkan IFRS*	9.293,6	8.797,1	9.684,5	1.077,1

* Lihat "Butir 3: Informasi Penting – Beberapa Data Keuangan dan Data Lainnya" untuk menunjukkan rekonsiliasi EBITDA berdasarkan IFRS terhadap laba yang dibagikan kepada pemilik Perusahaan berdasarkan IFRS.

(4) "Beban Bunga" berarti, untuk setiap periode, beban bunga atas Hutang.

(5) menggunakan hasil IFRS, total Hutang akan mencapai masing-masing Rp22.069,0 miliar, Rp25.807,1 miliar dan Rp24.399,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, dan Total Ekuitas mencapai masing-masing sebesar Rp17.779,7 miliar, Rp18.574,9 miliar dan Rp18.702,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, sebagai akibatnya rasio Hutang terhadap Ekuitas adalah 124%, 139% dan 130% per 31 Desember 2008, 2009 dan 2010.

(6) menggunakan hasil IFRS, total Hutang akan mencapai masing-masing Rp22.069,0 miliar, Rp25.807,1 miliar dan Rp24.399,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, dan EBITDA akan mencapai Rp9.293,6 miliar, Rp8.797,1 miliar dan Rp9.684,5 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, mengakibatkan rasio Hutang terhadap EBITDA, masing-masing 237%, 293% dan 252% per tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010.

(7) menggunakan hasil IFRS, EBITDA sebesar Rp9.293,6 miliar, Rp8.797,1 miliar dan Rp9.684,5 miliar untuk tahun yang berakhir 31 December 2008, 2009 dan 2010, dan Beban Bunga Rp1.776,5 miliar, Rp1.808,6 miliar dan Rp2.080,3 miliar untuk tahun yang berakhir 31 December 2008, 2009 dan 2010, mengakibatkan rasio EBITDA terhadap Beban Bunga 523%, 486% dan 466% per 31 Desember 2008, 2009 dan 2010.

Dari waktu ke waktu, kami dapat membeli kembali bagian efek hutang kami melalui transaksi pasar terbuka berdasarkan kondisi pasar pada umumnya.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan hutang jangka panjang dan hutang obligasi utama kami per 31 Desember 2008, 2009 dan 2010.

	Per tanggal 31 Desember			
	2008	2009	2010	
	Rp	Rp	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta Dólar Amerika Serikat)			
Hutang Obligasi:				
Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020 – Setelah dikurangi biaya emisi GN dan diskon yang belum diamortisasi	-	-	5.749,6	639,5
Obligasi Indosat Kelima – Setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	2.593,1	2.587,2	2.589,0	288,0
Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 – Setelah dikurangi biaya emisi GN yang belum diamortisasi	2.563,5	2.202,7	-	-
Obligasi Indosat Ketujuh - Setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	-	1.293,8	1.294,6	144,0
Obligasi Indosat Keenam - Setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	1.075,7	1.073,0	1.074,6	119,5
Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2012 - Setelah dikurangi biaya emisi GN dan diskon yang belum diamortisasi	1.185,3	1.018,8	-	-
Obligasi Indosat Keempat - Setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	810,5	811,0	813,6	90,5
Obligasi Indosat Ketiga - Setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	637,3	637,9	-	-
Indosat Sukuk Ijarah III - Setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	567,8	566,4	567,4	63,1
Indosat Sukuk Ijarah II - Setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	399,0	398,1	398,5	44,3
Obligasi Indosat Syari'ah Ijarah - Setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	283,4	283,6	284,5	31,6
Obligasi Indosat Kedua	200,0	199,4	199,3	22,2
Indosat Sukuk Ijarah IV - Setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	-	199,0	199,1	22,1
Obligasi Terbatas II yang diterbitkan oleh Lintasarta(1)	31,1	25,0	25,0	2,8
Obligasi Terbatas I yang diterbitkan oleh Lintasarta(2)	25,3	17,0	17,0	1,9
Jumlah hutang obligasi	10.372,0	11.312,9	13.212,2	1.469,5
Dikurangi bagian jangka pendek	**56,4**	**2.840,7**	**1.098,1**	**122,1**
Hutang obligasi: bagian jangka panjang	**10.315,6**	**8.472,2**	**12.114,1**	**1.347,4**
Hutang jangka panjang:				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa – Setelah dikurangi biaya emisi pinjaman yang belum diamortisasi	1.796,2	2.592,4	1.297,1	144,2
Pihak ketiga – Setelah dikurangi biaya emisi pinjaman yang belum diamortisasi	9.588,5	11.563,3	9.553,9	1.062,6
Jumlah hutang jangka panjang	11.384,7	14.155,7	10.851,0	1.206,8
Dikurangi bagian jangka pendek	572,5	1.440,2	3.184,2	354,1
Hutang jangka panjang: bagian jangka panjang	**10.812,2**	**12.715,5**	**7.666,8**	**852,7**

(1) Setelah dieliminasi dengan Obligasi Terbatas II yang diterbitkan kepada Perusahaan sebesar Rp35,0 miliar
(2) Setelah dieliminasi dengan Obligasi Terbatas I yang diterbitkan kepada Perusahaan sebesar Rp9,6 miliar

Obligasi Indosat

Ketentuan-ketentuan khusus untuk masing-masing Obligasi Indosat Kedua, Obligasi Indosat Ketiga, Obligasi Indosat Keempat, Obligasi Indosat Kelima, Obligasi Indosat Keenam dan Obligasi Indosat Ketujuh ("Obligasi Indosat") akan diuraikan di bawah ini. Obligasi Indosat tidak dijamin dengan aset tertentu atau dijamin oleh pihak lain dan berkedudukan pari passu dengan hutang lainnya yang tidak dijamin. Kami menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyetujui untuk mempertahankan:

- modal ekuitas sekurang-kurangnya Rp5.000,0 miliar;
- rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5 terhadap 1,00, sebagaimana dilaporkan dalam tiap-tiap laporan keuangan konsolidasi tahunan;
- rasio hutang terhadap ekuitas 2,5 berbanding 1, sebagaimana dilaporkan pada tiap-tiap laporan keuangan konsolidasi triwulanan; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam tiap-tiap laporan keuangan konsolidasi tahunan sekurang-kurangnya 3,0 berbanding 1.

Pada tanggal 24 Maret 2009 kami mengadakan rapat dengan pemegang obligasi Rupiah, termasuk pemegang Obligasi Indosat, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Hutang," "EBITDA," memasukkan definisi baru "Ekuitas" dan "Grup" dan mengubah rasio Hutang terhadap Ekuitas dari 1,75 berbanding 1 menjadi 2,5 berbanding 1 dalam perjanjian perwaliamanatan yang mengatur obligasi-obligasi tersebut, berdasarkan perubahan perjanjian untuk Obligasi Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam.

Obligasi Indosat Kedua. Pada 6 November 2002, kami menerbitkan Obligasi Indosat II ("Obligasi Indosat Kedua"), dengan tingkat suku bunga tetap dan/atau mengambang, dimana satu-satunya seri yang masih terhutang adalah obligasi Seri B. Obligasi Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp200,0 miliar Rupiah, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 16,0% per tahun dan wajib dibayar setiap triwulan selama 30 tahun dimulai sejak 6 Februari 2003. Kami memiliki hak untuk membeli kembali obligasi Seri B, secara keseluruhan tapi tidak secara sebagian, setiap ulang tahun ke-5, 10, 15, 20 dan 25 atas penerbitan obligasi Seri B pada harga yang setara dengan 101% dari nilai nominal obligasi Seri B. Para pemegang obligasi Seri B memiliki suatu put right yang mengizinkan para pemegang tersebut untuk meminta pembayaran awal dari kami pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi Seri B pada saat (i) kapan pun, apabila peringkat dari obligasi tersebut turun menjadi "id AA-" atau lebih rendah (ii) setelah lewatnya salah satu dari ulang tahun ke-15, 20, dan 25 pada penerbitan obligasi Seri B. Obligasi Seri B jatuh tempo pada 6 November 2032.

Obligasi Indosat Ketiga. Pada 22 Oktober 2003, kami menerbitkan Obligasi Indosat III ("Obligasi Indosat Ketiga"), dimana satu-satunya seri yang terhutang adalah obligasi Seri B. Obligasi Seri B, yang mana akan jatuh tempo pada 22 Oktober 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp640,0 miliar, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,875% per tahun. Bunga atas Obligasi Indosat Ketiga dibayar setiap triwulan. Kami memiliki hak untuk melakukan pembayaran awal atas seluruh obligasi Seri B pada ulang tahun ke-empat dan ke-enam atas obligasi tersebut pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi. Setelah peringatan pertama penerbitan obligasi, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh bagian dari obligasi senilai harga pasar. Pada 22 Oktober 2010, kami membayar penuh seri dari Obligasi Indosat Ketiga senilai Rp640,0 miliar.

Obligasi Indosat Keempat. Pada 21 Juni 2005, kami menerbitkan Obligasi Indosat IV ("Obligasi Indosat Keempat"). Obligasi Indosat Keempat memiliki nilai nominal sebesar Rp815,0 miliar dan akan jatuh tempo pada 21 Juni 2011. Obligasi Indosat Keempat memiliki tingkat suku bunga tetap 12,0% per tahun, yang wajib dibayar setiap triwulannya. Kami memiliki hak untuk membeli kembali seluruh obligasi pada ulang tahun keempat obligasi-obligasi tersebut pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi tersebut. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar.

Obligasi Indosat Kelima. Pada 29 Mei 2007, kami menerbitkan Obligasi Indosat V ("Obligasi Indosat Kelima"), dalam dua seri dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.600,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan nilai nominal sebesar Rp1.230,0 miliar, akan

jatuh tempo pada 29 Mei 2014 dan obligasi Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp1.370,0 miliar, akan jatuh tempo pada 29 Mei 2017. Obligasi Seri A memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 10,20% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 10,65% per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar, baik untuk disimpan ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

Obligasi Indosat Keenam. Pada 9 April 2008, kami menerbitkan Obligasi Indosat VI ("Obligasi Indosat Keenam"), dalam dua seri dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.080,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan jumlah sebesar Rp760,0 miliar, yang akan jatuh tempo pada 9 April 2013 dan Obligasi Seri B, dengan jumlah sebesar Rp320,0 miliar yang akan jatuh tempo pada 9 April 2015. Obligasi Seri A memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 10,80% per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar, baik untuk disimpan ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

Obligasi Indosat Ketujuh. Pada 8 Desember 2009, kami menerbitkan Obligasi Indosat VII ("Obligasi Indosat Ketujuh"), dalam dua seri dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.300,0 miliar. Obligasi Seri A, dengan jumlah sebesar Rp700,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2014 dan obligasi Seri B, dengan jumlah sebesar Rp600,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2016. Obligasi seri A memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 11,25% per tahun dan obligasi Seri B memiliki tingkat suku bunga tetap yaitu 11,75% per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan obligasi tersebut, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan obligasi senilai harga pasar, baik untuk disimpan ataupun untuk tujuan pelunasan awal.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2010 dan *Guaranteed Notes* 2012

Pada bulan Oktober 2003, anak perusahaan kami di bidang pembiayaan, Indosat Finance Company B.V. ("Indosat Finance"), menerbitkan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 memiliki jumlah sebesar US$300,0 juta dan jatuh tempo pada tanggal 5 November 2010. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,75% per tahun yang harus dibayar dalam cicilan enam bulanan dan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei dan 5 November setiap tahun, dimulai sejak tanggal 5 Mei 2004.

Pada 22 Juni 2005, anak perusahaan kami di bidang pembiayaan, Indosat International Finance Company B.V. ("Indosat International"), menerbitkan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 memiliki jumlah sebesar US$250,0 juta yang diterbitkan pada 99,3% dari nilai nominal tersebut dan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2012. *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,125% per tahun yang harus dibayar dalam cicilan enam bulanan, yang jatuh tempo pada tanggal 22 Juni dan 22 Desember setiap tahun, dimulai sejak tanggal 22 Desember 2005.

Pada tanggal 12 Mei 2010, kami, bersama-sama dengan Indosat Finance dan Indosat International, mengumumkan dimulainya penawaran tender tunai untuk membeli secara tunai semua dan setiap jumlah yang terhutang dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Indosat Finance dan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Indosat International. Sebagai tambahan dari penawaran untuk membeli *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010, Indosat Finance juga mengajukan, satu usulan, atas beberapa perubahan tertentu yang diusulkan atas Indenture yang diubah dan dinyatakan kembali, tanggal 25 Januari 2006 ("Indenture 2010") yang memperpendek periode pemberitahuan untuk opsi pelunasan dari *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dan untuk melepaskan kedudukan Indosat International sebagai penjamin berdasarkan Indenture 2010.

Pada 2 Agustus 2010, Indosat Finance membayar sejumlah US$174,7 juta untuk *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 yang dibeli berdasarkan penawaran tender tunai, dengan nilai pokok sejumlah US$167,8 juta (untuk notes yang ditawarkan lebih awal) dan US$0,1 juta (untuk notes yang ditawarkan setelah tanggal penawaran awal), masing-masing pada harga senilai 102,1875% (untuk notes yang ditawarkan lebih awal) dan 101,9375% (untuk notes yang ditawarkan setelah tanggal

penawaran awal) dari nilai pokok yang dibeli, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasan dan biaya tambahan lainnya. Pada 10 Agustus 2010, Indosat Finance membayar sejumlah US$69,5 juta untuk pembelian atas bagian yang tersisa dari *Notes* 2010 yang telah dibeli kembali, dengan nilai pokok sejumlah US$66,9 juta pada harga senilai 101,9375% dari nilai pokok yang disebutkan, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasan dan biaya tambahan lainnya.

Pada 2 Agustus 2010, Indosat International membayar sejumlah US$58,6 juta untuk *Notes* 2012 yang dibeli berdasarkan penawaran tender tunai dengan nilai pokok sejumlah US$55,8 juta (untuk *notes* yang ditawarkan lebih awal) dan US$0,2 juta (untuk notes yang ditawarkan setelah tanggal penawaran awal), masing-masing pada harga senilai 103,8125% (untuk notes yang ditawarkan lebih awal) dan 103,5625% (untuk notes yang ditawarkan setelah tanggal penawaran awal) dari nilai pokok yang dibeli, ditambah dengan bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasan dan biaya tambahan lainnya. Pada 2 September 2010, Indosat International membayar sejumlah US$56,0 juta untuk pembelian bagian yang tersisa dari Notes 2010 yang telah dibeli kembali, dengan nilai pokok sejumlah US$53,4 juta pada harga senilai 103,5625% dari nilai pokok yang disebutkan, ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan tanggal pelunasan dan biaya tambahan lainnya.

Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020

Pada tanggal 29 Juli 2010, kami, melalui Indosat Palapa Company B.V. ("Indosat Palapa") menerbitkan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2020 dengan jumlah sebesar US$650,0 juta. *Notes* tersebut diterbitkan pada 99,478% dari nilai nominal tersebut dan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2020. *Notes* tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,375% per tahun yang harus dibayar dalam cicilan enam bulanan, yang jatuh tempo pada tanggal 29 Januari dan 29 Juli setiap tahun, dimulai sejak tanggal 29 Januari 2011. *Notes* tersebut dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Palapa, secara keseluruhan atau sebagian, pada setiap waktu pada atau setelah tanggal 29 Juli 2015 dengan harga senilai 103,6875%, 102,4583%, 101,2292% dan 100% dari nilai pokok masing-masing selama periode 12 bulan yang dimulai sejak 29 Juli 2015, 2016, 2017 dan 2018 dan seterusnya, ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar dan jumlah lainnya, jika ada. Selain itu, sebelum tanggal 29 Juli 2013, Indosat Palapa dapat membeli kembali sebanyak-banyaknya 35% dari seluruh nilai pokok *Notes* dengan hasil satu atau lebih penawaran umum saham kami, dengan harga senilai 107,375% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar dan jumlah lainnya, jika ada. *Notes* tersebut juga dapat dibeli kembali bila diinginkan oleh Indosat Palapa atau kami, secara keseluruhan tetapi tidak sebagian pada setiap waktu, dengan harga senilai 100% dari nilai pokok tersebut ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal pembelian kembali jumlah tambahan lainnya, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi pajak penghasilan di Indonesia dan Belanda. Apabila terjadi perubahan kendali di dalam Indosat (termasuk penjualan, pemindahan, pengalihan, penyewaan, penyerahan atau pelepasan lainnya atas semua atau sebagian besar aktiva kami), seorang pemegang surat hutang berhak meminta Indosat Palapa untuk membeli kembali semua atau sebagian dari surat hutang yang dimilikinya dengan harga senilai 101% dari nilai pokok tersebut, ditambah bunga yang belum dan masih harus dibayar dan jumlah lainnya, jika ada, sampai dengan tanggal pembelian.

Hasil bersih, setelah dikurangi biaya penjaminan emisi efek dan biaya penawaran, telah diterima pada 29 Juli 2010 dan digunakan (i) untuk membiayai penawaran untuk membeli *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2010 dan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 yang tersisa dan consent solicitation apapun terkait dengan, atau pembelian kembali atas, surat hutang tersebut dan (ii) untuk pembiayaan kembali sebagian dari hutang kami yang ada lainnya. Surat hutang tersebut dijamin secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh Indosat.

Berdasarkan indenture dari surat hutang tersebut, kami diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan, seperti mempertahankan beberapa rasio keuangan.

Fasilitas Kredit Ekspor

Pada tanggal 12 Mei 2006, kami mengadakan perjanjian fasilitas berjangka dengan Finnish Export Credit Ltd, sebagai pemberi pinjaman, dan The Royal Bank of Scotland, N.V. (yang dulunya dikenal dengan nama ABN Amro Bank, N.V.) sebagai

agen fasilitas (*facility agent*), untuk Fasilitas Kredit Ekspor, dengan total jumlah pokok sebesar US$38,0 juta. Jangka waktu Fasilitas Kredit Ekspor adalah 60 bulan sejak tanggal perjanjian dan harus dibayar dalam sepuluh kali cicilan dengan jumlah yang sama yang dibagi rata selama jangka waktu fasilitas. Fasilitas Kredit Ekspor memiliki tingkat suku bunga 4,15% per tahun, yang dihitung dengan merujuk pada tingkat suku bunga komersial untuk Dollar AS. Setelah nilai dari Fasilitas Kredit Ekspor ditarik dan dilunasi, jumlah tersebut tidak lagi tersedia untuk dipinjamkan secara berulang. Fasilitas Kredit Ekspor memuat ketentuan-ketentuan tertentu tentang keuangan. Selama tahun 2009 dan 2010, Indosat membayar cicilan atas fasilitas ini masing-masing dengan nilai sebesar US$7,6 juta dan US$7,6 juta.

Obligasi Syari'ah Ijarah (Sukuk Ijarah)

Ketentuan khusus atas setiap Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, Sukuk Ijarah Kedua, Sukuk Ijarah Ketiga, dan Sukuk Ijarah Keempat ("Obligasi Syari'ah Ijarah"), didiskusikan berikut ini. Obligasi Syari'ah Ijarah tidak dijaminkan dengan suatu aktiva apapun atau dijamin oleh suatu pihak manapun dan berkedudukan setingkat dengan hutang Indosat lainnya yang tidak dijaminkan.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah, Indosat setuju untuk tetap memberlakukan ketentuan-ketentuan tertentu yang termuat di dalam Obligasi Indosat. Selain itu, Indosat juga dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Disamping larang-larangan tersebut, tidak terdapat perbedaan yang material di antara ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Obligasi Syari'ah Ijarah dengan Obligasi Indosat. Pada 24 Maret 2009, Indosat menyelenggarakan rapat dengan para pemegang obligasi dengan mata uang Rupiah, termasuk dengan para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah, dan memperoleh persetujuan untuk mengubah definisi "Hutang" dan "EBITDA", untuk menambah definisi-definisi baru bagi "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk mengubah rasio Hutang terhadap Ekuitas dari semula 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 pada perjanjian perwaliamanatan yang mengatur obligasi-obligasi ini.

Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama. Pada 21 Juni 2005, Indosat menerbitkan Obligasi Syari'ah Ijarah Indosat I ("Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama memiliki total nilai sebesar Rp285,0 miliar dan jatuh tempo pada 21 Juni 2011. Para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama adalah sebesar Rp34,2 miliar per tahun. Kami memiliki hak untuk melakukan pembayaran awal untuk seluruh Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama pada ulang tahun keempat dari Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama pada harga yang setara dengan 100% dari nilai nominal obligasi tersebut. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari Obligasi Syari'ah Ijarah Pertama tersebut senilai harga pasar, baik untuk disimpan maupun untuk tujuan pelunasan awal.

Sukuk Ijarah Kedua. Pada 29 Mei 2007, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat II ("Sukuk Ijarah Kedua"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku di dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Sukuk Ijarah kedua memiliki total nilai sampai dengan Rp400,0 miliar dan jatuh tempo pada 29 Mei 2014. Para pemegang Sukuk Ijarah Kedua menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Sukuk Ijarah Kedua adalah sebesar Rp40,8 miliar per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Sukuk Ijarah Kedua, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku.

Sukuk Ijarah Ketiga. Pada 9 April 2008, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat III ("Sukuk Ijarah Ketiga"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang biasa berlaku dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Sukuk Ijarah Ketiga memiliki total nilai sampai dengan Rp570,0 miliar dan jatuh tempo pada 9 April 2013. Para pemegang dari Sukuk Ijarah Ketiga menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Sukuk Ijarah Ketiga adalah sebesar Rp58,4 miliar per tahun. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Sukuk Ijarah Ketiga, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku.

Sukuk Ijarah Keempat. Pada 8 Desember 2009, Indosat menerbitkan Sukuk Ijarah Indosat IV ("Sukuk Ijarah Keempat"), yang mana memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam fasilitas pembiayaan menurut ketentuan hukum Islam, dengan Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat. Sukuk Ijarah Keempat memiliki total nilai sebesar Rp200,0 miliar. Sukuk Ijarah Seri A, yang memiliki total nilai sebesar Rp28,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2014 dan Sukuk Ijarah Seri B, yang memiliki total nilai sebesar Rp172,0 miliar, akan jatuh tempo pada 8 Desember 2016. Para pemegang dari Sukuk Ijarah Keempat menerima cicilan imbalan Ijarah, yang harus dibayar setiap triwulanan. Total cicilan imbalan Ijarah yang diharapkan akan dibayarkan kepada para pemegang Sukuk Ijarah Keempat adalah sebesar Rp3,2 miliar per tahun untuk Sukuk Ijarah Keempat Seri A dan Rp20,2 miliar per tahun untuk Sukuk Ijarah Keempat Seri B. Setelah ulang tahun pertama dari penerbitan Sukuk Ijarah Keempat, kami memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau keseluruhan dari obligasi tersebut senilai harga pasar yang berlaku.

Fasilitas Pinjaman Goldman Sachs International

Pada tanggal 30 Mei 2007, kami menerima dari Goldman Sachs International ("GSI") suatu pinjaman sebesar Rp434,3 miliar, yang mana diterima dalam Dolar AS sebesar US$50,0 juta untuk keperluan pembelian perangkat telekomunikasi. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013. Pinjaman dikenakan suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, yang harus dibayar setiap triwulanan pada tanggal 28 Februari, 30 Mei, 30 Agustus dan 30 November, yang dimulai sejak 30 Agustus 2007 sampai dengan 30 Mei 2012.

Perjanjian pinjaman tersebut memberikan opsi bagi GSI untuk mengkonversikan pinjaman tersebut menjadi pinjaman dalam Dolar AS sebesar US$50,0 juta pada tanggal 30 Mei 2012 ("Opsi Konversi"). Nilai wajar dari Opsi Konversi disajikan sebagai bagian dari hutang jangka panjang. Jika GSI menggunakan opsi tersebut, maka sejak tanggal 30 Mei 2012, pinjaman akan dikenakan suku bunga tetap sebesar 6,45% per tahun terhadap nilai pokok atas jumlah US$50.0 juta. Hutang pokok dalam mata uang Dolar AS dan bunga tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013.

Perusahaan diharuskan untuk memberitahukan GSI mengenai peristiwa-peristiwa berikut yang dapat mengakibatkan pengakhiran pinjaman seperti (i) perubahan-perubahan tertentu yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan di Inggris ataupun Indonesia, (ii) cidera janji berdasarkan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012, (iii) cidera janji berdasarkan notes yang telah diterbitkan atau dijamin oleh kami, dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang Dolar AS atau cidera janji berdasarkan *notes* yang telah diterbitkan atau dijamin oleh kami, dimana pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah, (iv) pembelian kembali, pembelian atau pembatalan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo Tahun 2012 dan tidak ada hutang lain dalam mata uang Dolar AS yang masih terhutang, setelah pembelian kembali, pembelian ataupun pembatalan dan (v) perubahan kendali dalam Perusahaan. Pada tanggal 24 Juni 2008, GSI tidak melaksanakan haknya untuk mengakhiri pinjaman tersebut sebagai hasil dari perubahan kendali yang dipicu oleh akuisisi Qtel terhadap 40,81% kepemilikan atas modal saham ditempatkan Perusahaan, pada Juni 2008.

Fasilitas Pinjaman Bank Central Asia

Pada tanggal 28 Agustus 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Central Asia ("BCA") sebesar Rp1.600,0 miliar untuk membayar kembali Fasilitas Pinjaman Sindikasi II dan membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk JIBOR tiga bulanan ditambah 1,5% per tahun; dan seluruh pembayaran bunga dilakukan setiap triwulanan. Pada tanggal 20 September 2007, kami memperoleh fasilitas kredit tambahan sebesar Rp400,0 miliar dari BCA. Akibatnya, keseluruhan jumlah pokok dari fasilitas kredit dengan BCA menjadi sebesar Rp2.000,0 miliar. Pembayaran kembali atas pinjaman yang ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun kelima setelah penarikan pertama. Pada tanggal 27 September, 26 Oktober dan 27 Desember 2007, kami telah melakukan penarikan pinjaman pertama, kedua dan ketiga dengan jumlah total sebesar Rp2.000,0 miliar. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui beberapa ketentuan, termasuk mempertahankan ketentuan tersebut, yang mana serupa dengan ketentuan-ketentuan yang termuat

di dalam Obligasi Indosat. Pada 27 September 2008 dan 25 September 2009, kami membayar cicilan pertama dan kedua tengah tahunan kami masing-masing sejumlah Rp200,0 miliar. Pada 27 September 2010 kami membayar cicilan ketiga tahunan kami sejumlah Rp300,0 miliar.

Pada 17 September 2008, kami membuat perjanjian fasilitas kredit tiga tahun tanpa jaminan dengan BCA yang bernilai Rp500,0 miliar untuk pembelian, dan/atau untuk pembiayaan ulang dari hutang yang timbul karena pembelian tersebut, atas perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan bunga JIBOR tiga bulanan ditambah 2,25% per tahun. Pembayaran kembali atas pinjaman yang ditarik akan dibuat setiap tahunnya, sebagai berikut: (a) 20% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun pertama, (b) 30% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun kedua, (c) 50% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga. Pada 16 Maret 2009, kami melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp500,0 miliar. Pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (secara keseluruhan atau sebagian dari pinjaman) diizinkan dengan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai yang dibayar awal tersebut. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, kami diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti ketentuan untuk mempertahankan suatu rasio keuangan tertentu. Pada 16 Maret 2010, kami membayar cicilan pertama tahunan kami sejumlah Rp100,0 miliar. Pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (secara keseluruhan atau sebagian dari pinjaman) diizinkan dengan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai yang dibayar awal tersebut. Pada 19 Oktober 2010, kami melakukan pembayaran kembali lebih awal atas fasilitas kredit ini sejumlah Rp400,0 miliar.

Pada 12 Februari 2009, kami merubah perjanjian fasilitas kredit lima tahun dan tiga tahun dengan BCA, berdasarkan surat kesepakatan yang diterima tanggal 6 Februari 2009, untuk merubah definisi dari "EBITDA," untuk menambahkan definisi baru dari "Pinjaman," "Ekuitas," dan "Grup" dan untuk merubah rasio antara Hutang terhadap Ekuitas dari awalnya 1,75 banding 1 menjadi 2,5 banding 1 pada perjanjian pinjaman yang mengatur tentang fasilitas pinjaman tersebut.

Pada 8 Juni 2009, kami membuat perjanjian fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dengan BCA yang bernilai Rp1.000,0 miliar untuk pengadaan, dan/atau pembiayaan ulang dari hutang yang timbul dari pembelian tersebut, atas perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan bunga JIBOR tiga bulanan ditambah 4,00% per tahun. Pembayaran kembali atas pinjaman yang ditarik akan dibuat setiap tahunnya, sebagai berikut: (a) 10% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun pertama dan kedua, (b) 15% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun ketiga dan keempat, dan (c) 50% dari total pinjaman yang ditarik pada tahun kelima. Pada 25 Juni 2009, kami melakukan penarikan pinjaman yang bernilai Rp1.000,0 miliar. Pada 25 Juni 2010, kami membayar cicilan pertama tahunan sejumlah Rp100,0 miliar. Pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (secara keseluruhan atau sebagian dari pinjaman) adalah diizinkan, yang terikat pada 1% denda dari nilai yang dibayar awal tersebut, kecuali pembayaran dalam rangka membiayai kembali fasilitas ini. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, kami diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti ketentuan untuk mempertahankan suatu rasio pembiayaan tertentu. Pada 28 April 2010, kami menerima surat dari BCA mengenai perubahan tingkat suku bunga dari JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 4,00% per tahun menjadi JIBOR berjangka 3 bulanan ditambah 2,25% per tahun, dan berlaku efektif sejak 25 Juni 2010. Pada 19 Oktober 2010, kami melakukan pembayaran kembali lebih awal atas fasilitas kredit ini sejumlah Rp900,0 miliar.

Pada tanggal 10 Februari 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian fasilitas Time Loan Revolving dengan BCA sejumlah maksimum Rp1.000,0 miliar untuk membiayai pembelanjaan barang modal Perusahaan dan/atau untuk tujuan korporasi umum. Fasilitas ini akan tersedia dari 10 Februari 2011 sampai 10 Februari 2014 dan suku bunga penarikan sebesar JIBOR 1 bulanan ditambah 1,4% per tahun. Kami belum menarik fasilitas ini sampai dengan 20 April 2011.

Fasilitas Pinjaman Bank Mandiri

Pada 18 September 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Mandiri sebesar Rp2.000,0 miliar untuk membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,75% untuk tahun pertama dan 10,5% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk JIBOR tiga bulanan ditambah 1,5% per tahun, dan semua bunga harus dibayar setiap triwulanan. Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan setiap tahun,

sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Pada tanggal 27 September dan 27 Desember 2007, kami telah melakukan penarikan pinjaman pertama dan kedua sebesar Rp2.000,0 miliar. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui beberapa ketentuan, termasuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Pada 27 September 2008 dan 25 September 2009, kami membayar cicilan pertama dan kedua tengah tahunan kami masing-masing sejumlah Rp200,0 miliar. Pada tanggal 23 Maret 2009, kami telah mengadakan perjanjian dengan Bank Mandiri untuk melakukan perubahan pada definisi "EBITDA", menambah definisi baru mengenai "Pinjaman", "Ekuitas" dan "Grup" dan untuk merubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dalam pinjaman kami sesuai dengan ketentuan perjanjian perubahan. Pada 27 September 2010, kami membayar cicilan ketiga tahunan kami sejumlah Rp300,0 miliar berdasarkan fasilitas ini.

Pada 28 Juli 2009, kami membuat fasilitas kredit lima tahun tanpa jaminan dari Bank Mandiri sebesar Rp1.000 miliar untuk keperluan umum perseroan. Pinjaman dikenakan bunga pada suku bunga rata-rata JIBOR tiga bulanan ditambah 4% per tahun. Pada tanggal 31 Juli 2009, Perusahaan menarik sebesar Rp1.000,0 miliar dari fasilitas kredit tersebut. Pembayaran kembali dari pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, (c) 50% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun kelima setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Pembayaran kembali lebih awal secara sukarela (secara keseluruhan atau sebagian dari pinjaman) adalah diizinkan, yang terikat pada 2% denda dari nilai yang dibayar awal tersebut. Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, kami diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti ketentuan untuk mempertahankan suatu rasio keuangan tertentu. Pada 20 Mei 2010, kami menerima surat dari Bank Mandiri mengenai perubahan suku bunga dari suku bunga rata-rata JIBOR tiga bulanan ditambah 4,00% per tahun menjadi suku bunga rata-rata JIBOR tiga bulanan ditambah 2,25% per tahun, berlaku efektif mulai 31 Mei 2010. Pada 30 Juli 2010, kami membayar cicilan tahunan pertama sejumlah Rp100,0 miliar. Pada 15 November 2010, kami melakukan pembayaran kembali lebih awal atas fasilitas kredit ini sejumlah Rp900,0 miliar.

Fasilitas Pinjaman Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 1 November 2007, kami memperoleh fasilitas kredit lima tahun dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp500,0 miliar untuk membeli perangkat telekomunikasi. Pinjaman tersebut dikenakan (i) suku bunga tetap tahunan untuk dua tahun pertama (9,7% untuk tahun pertama dan 10,4% untuk tahun kedua), dan (ii) suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan suku bunga tahunan yang berlaku untuk sertifikat Bank Indonesia tiga bulan ditambah 1,5% per tahun; semua bunga harus dibayar setiap triwulanan. Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan setiap tahun, sebagai berikut: (a) 10,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun pertama dan kedua setelah penarikan pertama, (b) 15,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga dan keempat setelah penarikan pertama, dan (c) 50,0% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun kelima setelah penarikan pertama. Berdasarkan perjanjian pinjaman, kami telah menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk mempertahankan rasio keuangan tertentu. Pada 31 Januari 2008, kami menarik Rp500,0 miliar dari fasilitas tersebut. Pada 25 Maret 2009, kami membuat perjanjian dengan Bank DBS Indonesia untuk memasukkan definisi baru mengenai "Hutang", "EBITDA", "Ekuitas", dan "Grup" dan untuk merubah rasio Hutang terhadap Ekuitas pada perjanjian pinjaman yang mengatur fasilitas pinjaman ini. Pada 30 Januari 2009, kami membayar cicilan pertama tahunan sejumlah Rp50,0 miliar. Pada 25 Maret 2009, Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit berdasarkan surat persetujuan yang diterima pada 27 Februari 2009. Perubahan tersebut mencakup perubahan terhadap pengertian atas beberapa istilah dan perubahan terhadap rasio keuangan yang disyaratkan untuk dipertahankan. Pada 1 Februari 2010, kami membayar cicilan kedua tahunan sebesar Rp50,0 miliar. Pada 30 Oktober 2010, kami melakukan pembayaran kembali lebih awal atas fasilitas kredit ini sejumlah Rp400,0 miliar.

Pembiayaan Satelit HSBC

Pada 27 November 2007, kami menandatangani dua perjanjian fasilitas tanpa jaminan dengan HSBC Perancis dan satu perjanjian fasilitas tanpa jaminan dengan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta

("HSBC Jakarta") untuk membiayai satelit telekomunikasi kami yang baru. Gabungan fasilitas kredit ekspor dan fasilitas pembiayaan komersial ini terdiri dari:

- perjanjian fasilitas dengan jangka waktu 12 tahun sebesar US$157,2 juta untuk membiayai pembayaran 85,0% atas komponen yang dibuat di Perancis berdasarkan Kontrak Satelit Palapa-D ditambah 100% Premi COFACE, yang mana ketentuan tersebut diatur di dalam perjanjian fasilitas. Pinjaman dikenakan suku bunga tetap tahunan sebesar 5,69% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulanan. Pada 29 Maret 2010, 29 September 2010, dan 29 Maret 2011, kami membayar cicilan enam bulanan pertama, kedua, dan ketiga masing-masing sebesar US$7,9 juta;
- perjanjian fasilitas dengan jangka waktu 12 tahun sebesar US$44,2 juta untuk membiayai pembayaran 85,0% dari nilai Kontrak Jasa Peluncuran Satelit (sebagaimana yang didefinisikan di dalam perjanjian fasilitas) sehubungan dengan Satelit Palapa-D milik kami. Pinjaman dikenakan suku bunga mengambang atas dasar mata uang Dolar AS pada LIBOR ditambah 0,35% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulan. Pada 29 Maret 2010, 29 September 2010, dan 29 Maret 2011, kami membayar cicilan enam bulanan pertama, kedua dan ketiga masing-masing sebesar US$2,2 juta; dan
- Perjanjian Fasilitas Komersial dengan jangka waktu 9 tahun sebesar US$27,0 juta untuk membiayai pembangunan dan peluncuran satelit dan pembayaran premi yang berkaitan dengan polis asuransi kredit pembelian jangka menengah dan jangka panjang yang diterbitkan sehubungan dengan Fasilitas Sinosure. Pinjaman dikenakan suku bunga mengambang atas dasar mata uang Dollar AS pada LIBOR ditambah 1,45% per tahun, yang harus dibayar setiap enam bulanan. Pada 27 November 2009, kami membayar cicilan pertama enam bulanan sebesar US$1,4 juta. Pada 27 Mei dan 29 November 2010, kami membayar cicilan kedua dan ketiga enam bulanan, masing-masing sebesar US$1,4 juta.

Fasilitas memuat ketentuan-ketentuan keuangan tertentu. Pada 18 Maret 2009, kami membuat perjanjian-perjanjian dengan HSBC Perancis dan HSBC Jakarta untuk merubah definisi "Hutang", "EBITDA", dan "Ekuitas" dan rasio Hutang terhadap Ekuitas pada Perjanjian Fasilitas Berjangka COFACE, Perjanjian Fasilitas Berjangka Sinosure dan Perjanjian Fasilitas Komersial, sebagaimana yang berlaku. Berdasarkan perjanjian tersebut, kami diwajibkan untuk mempertahankan: (i) modal pokok senilai lebih dari Rp5.000 miliar, (ii) rasio Hutang terhadap ekuitas yang tidak melebihi 2,5:1, (iii) rasio EBITDA terhadap bunga untuk tidak kurang dari 2,5:1, dan (iv) rasio Hutang terhadap EBITDA yang tidak melebihi 3,5:1. Selain itu, pada 4 Desember 2009, kami membuat Perjanjian Fasilitas Korporasi dengan HSBC untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek. Fasilitas tersebut terdiri atas suatu batasan kombinasi sebesar US$30,0 juta dan *revolving loan* sebesar US$30,0 juta. Kami belum melakukan penarikan atas fasilitas ini sampai dengan 31 Desember 2010.

Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS

Pada tanggal 12 Juni 2008, kami menandatangani fasilitas pinjaman sindikasi sebesar US$450.0 juta dengan 13 bank dan lembaga keuangan, dengan ING Bank N.V., Cabang Singapura dan DBS Bank Ltd. bertindak sebagai arrangers. Jumlah bunga yang harus dibayar atas hutang tersebut adalah total dari (i) marjin yang berlaku sebesar 1,85% per tahun untuk pemberi pinjaman non-Indonesia atau 1,90% per tahun untuk pemberi pinjaman yang bertempat tinggal di Indonesia dan (ii) LIBOR. Pembayaran kembali atas hutang yang telah ditarik akan dibuat dengan cara cicilan per enam bulanan dimulai sejak tanggal 12 Juni 2011. Pada tanggal 24 Februari 2009, kami menandatangani suatu perjanjian dengan mayoritas kreditur untuk mengubah definisi "Hutang", "EBITDA", dan "Ekuitas" dan rasio Hutang terhadap Ekuitas dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/ DBS. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS, sebagaimana yang telah diubah berdasarkan akta-akta perubahannya, kami telah menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu, termasuk namun tidak terbatas untuk mempertahankan ketentuan sebagai berikut:

- rasio total hutang terhadap EBITDA kurang dari 3,5 : 1;
- rasio total hutang terhadap ekuitas sebesar 2,5 : 1; dan
- rasio EBITDA terhadap beban bunga, sebagaimana dilaporkan dalam setiap akhir tahun buku dan pada akhir setiap 3 bulan pertama tahun buku kami, sekurang-kurangnya 2,5 : 1.

Pembayaran kembali atas pinjaman yang telah ditarik akan dilakukan setiap enam bulanan, sebagai berikut: (a) 25% dari total pinjaman yang ditarik dalam tahun ketiga setelah tanggal penandatanganan perjanjian (tanggal pembayaran kembali pertama), (b) 24% dari total pinjaman yang ditarik dalam bulan keenam setelah tanggal pembayaran kembali pertama, (c)

masing-masing 8% dari total pinjaman yang ditarik dalam bulan ke-12 dan bulan ke-18 setelah tanggal pembayaran kembali pertama, dan (d) 35% dari total pinjaman yang ditarik dalam bulan ke-24 setelah tanggal pembayaran kembali pertama.

Pada 26 September dan 30 Oktober 2008, Perusahaan menerima penarikan pertama dan kedua dari fasilitas kredit ini sejumlah US$450,0 juta. Pada 31 Desember 2010, jumlah yang belum dibayar dalam fasilitas ini sebesar US$450,0 juta.

Fasilitas Pinjaman dari AB Svensk Exportkredit ("SEK") yang Dijamin oleh Export Kredit Namnden ("EKN")

Pada 18 Agustus 2009, kami memperoleh fasilitas kredit dari SEK, yang dijamin oleh EKN, suatu agen kredit ekspor dari Kerajaan Swedia, untuk total maksimum sebesar US$315.000.000 yang akan digunakan untuk keperluan pembelian perangkat telekomunikasi Ericsson, dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC"), Hong Kong dan The Royal Bank of Scotland N.V. (yang sebelumnya dikenal dengan nama ABN AMRO Bank N.V.), Cabang Hong Kong sebagai kreditur asli dan *arrangers*, sementara HSBC Bank PLC, London, Inggris bertindak sebagai agen fasilitas dan agen EKN. Pada 2 September 2009, kreditur asli mentransfer hak dan kewajiban kepada SEK, berdasarkan kepada ketentuan perjanjian.

Fasilitas kredit tersebut terdiri atas fasilitas A, B, dan C dengan nilai maksimum masing-masing sebesar US$100,0 juta, US$155,0 juta, dan US$60 juta. Fasilitas A dikenakan tingkat suku bunga pada LIBOR ditambah 0,25% per tahun, bersama-sama dengan biaya dana SEK dan marjin premium EKN. Fasilitas B dan Fasilitas C dikenakan tingkat suku bunga sebesar 0,05% per tahun ditambah 2,60% per tahun ditambah Margin Premium EKN. Pembayaran kembali atas masing-masing fasilitas A, B dan C harus dilakukan dengan 14 kali cicilan masing-masing dimulai sejak enam bulan setelah 31 Mei 2009, 28 Februari 2010 dan 30 November 2010. Berdasarkan perjanjian tersebut, kami diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu, seperti mempertahankan rasio keuangan tertentu, yang mana secara garis besar adalah sama dengan ketentuan-ketentuan di bawah Fasilitas Pinjaman Sindikasi ING/DBS. Selain itu, kami juga diwajibkan untuk mempertahankan modal konsolidasi minimum sebesar Rp5.000,0 miliar. Per 31 Maret 2011, kami telah menarik masing-masing US$100,0 juta, US$155,0 juta dan US$60,0 masing-masing untuk fasilitas A, B dan C.

Pada tanggal 30 November 2009, 27 Mei 2010 dan 30 November 2010, Perusahaan membayar cicilan 6 bulanan pertama, kedua dan ketiga, masing-masing, untuk Fasilitas A sebesar US$7,1 juta masing-masing. Pada tanggal 28 Agustus 2010 dan 28 Februari 2011, Perusahaan membayar cicilan 6 bulanan pertama dan kedua untuk Fasilitas B sejumlah US$11,1 juta masing-masing.

Lintasarta

Hutang jangka panjang Lintasarta terdiri dari beberapa fasilitas kredit investasi dari CIMB Niaga Tbk, dahulu PT Bank Niaga Tbk dan obligasi terbatas yang tidak dijamin. Pada tanggal 31 Desember 2010, fasilitas kredit investasi dari CIMB Niaga berjumlah Rp94,9 miliar, dan obligasi yang terhutang berjumlah Rp42,0 miliar.

Fasilitas Kredit Investasi V. Pada tanggal 10 Juli 2007, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga sebesar Rp50,0 miliar untuk pembelian peralatan telekomunikasi, komputer dan fasilitas pendukung lain. Pinjaman tersebut memiliki tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga tahunan yang berlaku bagi sertifikat Bank Indonesia berjangka satu bulan ditambah 2,25% per tahun. Kami memulai pelunasan secara triwulanan atas hutang pokok tersebut pada tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp5,0 miliar. Pembayaran kembali tersebut harus dibayar setiap twilunannya sampai dengan 10 Januari 2011.

Fasilitas Kredit Investasi VI. Pada 24 Februari 2009, Lintasarta memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga dengan nilai sebesar Rp75,0 miliar untuk pembelian perangkat telekomunikasi, komputer, dan fasilitas pendukung lainnya. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar 14,5%, yang mana dapat diubah oleh CIMB Niaga berdasarkan kondisi pasar. Kami memulai pembayaran kembali setiap triwulanan atas pinjaman pokoknya pada 24 Mei 2010, dengan nilai

sebesar Rp7,5 miliar. Pembayaran kembali tersebut harus dibayar setiap triwulanan sampai dengan 24 Agustus 2012. Pada tanggal 31 Desember 2010, Lintasarta telah sepenuhnya menarik fasilitas kredit ini.

Obligasi Terbatas I. Pada 2 Juni 2003, Lintasarta dan para pemegang sahamnya telah menyetujui untuk menerbitkan obligasi terbatas kepada para pemegang saham sebesar Rp40,0 miliar, yang sudah termasuk bagian kami sebesar Rp9,6 miliar. Obligasi terbatas tersebut tidak dijamin dan memiliki jatuh tempo awal pada tanggal 2 Juni 2006. Obligasi tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 16,0% per tahun untuk tahun pertama dan tingkat suku bunga mengambang untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka tiga bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) ditambah marjin 3,0%, dengan batas maksimum sebesar 19,0% per tahun dan batas minimum sebesar 11,0% per tahun. Pembayaran bunga harus dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal 2 September 2003. Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta menyetujui dengan para pemegang obligasi untuk memperpanjang jatuh tempo dari tanggal 2 Juni 2006 menjadi 2 Juni 2009 dan nilai nominal Obligasi Terbatas menjadi Rp34,9 miliar, yang sudah termasuk bagian kami sebesar Rp9,6 miliar. Pada 2 Juni 2009, Lintasarta membayar kembali sebagian dari Obligasi Terbatas senilai Rp8.303 juta. Pada 25 Agustus 2009, perjanjian yang mengatur tentang Obligasi Terbatas I diubah dalam rangka merubah total nilai dari obligasi tersebut menjadi Rp26,6 miliar, memperpanjang tanggal jatuh tempo menjadi 2 Juni 2012, dan untuk merubah tingkat suku bunga mengambang menjadi berdasarkan JIBOR ditambah 4%, tanpa melebihi 19%, dengan tingkat suku bunga mengambang minimum sebesar 12,75%.

Obligasi Terbatas II. Pada tanggal 14 Juni 2006, Lintasarta menandatangani perjanjian dengan para pemegang sahamnya terlebih dahulu dalam rangka mengeluarkan Obligasi Terbatas II sebesar Rp66,2 miliar. Obligasi terbatas merupakan obligasi tidak dijamin dan memiliki jatuh tempo awal pada tanggal 14 Juni 2009 serta memiliki tingkat suku bunga mengambang yang ditentukan dengan menggunakan rata-rata tingkat suku bunga deposito rupiah berjangka tiga bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) ditambah premi tetap sebesar 3,0%. Batas maksimum dari suku bunga mengambang adalah sebesar 19,0% per tahun dan batas minimum adalah sebesar 11,0% per tahun. Pembayaran bunga harus dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal 14 September 2006. Hasil dari obligasi terbatas digunakan untuk pengeluaran barang modal dalam rangka memperluas jangkauan telekomunikasi Lintasarta.

Pada tanggal 17 Juli 2006, Lintasarta memperoleh persetujuan dari CIMB Niaga atas penerbitan dari obligasi terbatas.

Pada tanggal 14 Juni 2009, Lintasarta membayar sebagian Obligasi Terbatas sejumlah Rp6,2 miliar. Berdasarkan Berita Acara Rapat Bersama dari Dewan Komisaris dan Direksi Lintasarta yang diadakan pada tanggal 20 Mei 2009, perwakilan dari pemegang saham Lintasarta setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo atas sisa dari Obligasi Terbatas II sebesar Rp60,0 miliar menjadi 14 Juni 2012 dan meningkatkan batas minimum suku bunga mengambang sebesar 12,75%. Pada tanggal 25 Agustus 2009, perjanjian Obligasi Terbatas II difinalisasi, setelah diubah dalam rangka mengakomodasi perubahan tanggal jatuh tempo dan batas minimum dari suku bunga mengambang.

Praktek Pembayaran Dividen

Pemegang saham kami menentukan pembayaran dividen pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2008, 2009 dan 2010, pemegang saham mengumumkan dividen tunai final sebesar 50,0% dari laba bersih kami untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, masing-masing. Kami berniat untuk terus melakukan pembayaran dividen dalam jumlah tersebut agar memungkinkan bagi kami untuk memenuhi tata kelola keuangan yang baik dan pengharapan investor.

Sumber-Sumber Permodalan

Kami percaya bahwa arus kas dari kegiatan operasional dan penarikan dari fasilitas kredit kami akan menyediakan dana yang memadai untuk pembelanjaan barang modal, pembayaran hutang dan kewajiban bunga di masa mendatang serta

kebutuhan operasional lainnya yang diperlukan untuk rencana bisnis kami saat ini. Namun, kami menghadapi risiko likuiditas apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada lambatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia dari tingkat pertumbuhan yang kami harapkan, turunnya peringkat hutang Perusahaan atau melemahnya kinerja keuangan atau rasio keuangan Perusahaan.

Apabila kami tidak dapat membiayai pengeluaran barang modal yang direncanakan dari arus kas internal Perusahaan, kami akan berupaya memperoleh sumber pembiayaan eksternal lainnya. Kemampuan kami untuk dapat memperoleh hutang pembiayaan tambahan tergantung pada beberapa ketentuan yang diatur pada perjanjian hutang Perusahaan yang telah ada. Kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa kami akan dapat memperoleh pembiayaan dengan ketentuan yang sesuai (termasuk pembiayaan dari pihak penjual (*vendor*) atau pihak ketiga lainnya) untuk membiayai pengeluaran barang modal yang telah direncanakan oleh Perusahaan. Apabila kami tidak dapat mencari sumber pembiayaan eksternal tambahan, maka kami dapat memutuskan untuk menurunkan jumlah pengeluaran barang modal yang telah direncanakan. Penurunan jumlah pengeluaran barang modal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kinerja operasional dan kondisi keuangan Perusahaan.

Pengeluaran Barang Modal

Historis Pengeluaran Barang Modal

Sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2010, jumlah total pengeluaran barang modal kami telah mencapai sebesar Rp29.441,4 miliar (US$2.972,9 juta). Dana ini, terutama kami gunakan untuk membeli peralatan dan jasa-jasa dari pemasok asing sehubungan dengan pembangunan jaringan selular kami. Kami telah mencapai jumlah total pengeluaran barang modal sebesar Rp5.515,0 miliar (US$613,4 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, di mana investasi tersebut kami fokuskan pada perluasan cakupan selular kami melalui penambahan 1.755 *base transceiver stations*.

Pengeluaran Barang Modal untuk tahun 2011

Berdasarkan program pengeluaran barang modal untuk berbagai kegiatan usaha kami, rencana pengeluaran barang modal kami berjumlah lebih sedikit dari pengeluaran pada tahun 2008 dan 2009 tetapi lebih banyak dari pengeluaran pada tahun 2010, dikarenakan kami lebih fokus pada upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan selular, tetap dan MIDI dan infrastruktur telekomunikasi kami yang ada saat ini. Sepanjang tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, jumlah total pengeluaran barang modal konsolidasi kami adalah sebesar masing-masing Rp12.341,9 miliar, Rp11.584,5 miliar dan Rp5.515,0 miliar (US$613,4 juta). Selama tahun 2011, kami bermaksud untuk mengalokasikan US$794,5 juta untuk pengeluaran barang modal yang baru, yang bila memperhitungkan estimasi pengeluaran barang modal yang direalisasi untuk tahun 2011 untuk komitmen pengeluaran barang modal dari periode sebelumnya, akan menghasilkan jumlah aktual pengeluaran barang modal sekitar US$1.053,8 juta untuk tahun 2011. Kami bermaksud untuk mengalokasikan pengeluaran barang modal tahun 2011 sebagai berikut:

- Investasi Jaringan Selular: Kami berencana untuk menggunakan sebagian besar pengeluaran barang modal kami untuk membiayai kelanjutan pemutakhiran dan perluasan kapasitas dan cakupan jaringan selular kami.
- Investasi lain: Kami berencana untuk menginvestasikan sisa anggaran pengeluaran barang modal untuk area-area di luar jaringan selular, termasuk jaringan akses tetap, sebagaimana kami meningkatkan akses jaringan untuk pelanggan-pelanggan korporat kami, dan terus menyediakan untuk mereka servis suara, jarak jauh dan MIDI, serta mengadakan peningkatan kekuatan perusahaan kami.

Jumlah di atas merepresentasikan rencana anggaran investasi kami; pengeluaran aktual atas dasar kas akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk metode pembiayaan dan waktu penyelesaian pengiriman peralatan dan jasa yang dibeli. Secara historis, pengeluaran atas dasar jalur uang tunai dianggarkan akan menghabiskan biaya paling sedikit sekitar 20,0% dari anggaran kami.

Rencana pengeluaran barang modal di atas didasarkan pada pemahaman kami tentang keadaan pasar dan kondisi peraturan saat ini, dan kami dapat mengubah rencana kami dalam menanggapi perubahan kondisi-kondisi tersebut. Secara khusus, tergantung pada kerangka peraturan atas jasa jaringan tanpa kabel lainnya, kami dapat memutuskan untuk meningkatkan investasi kami pada jaringan dan layanan akses tetap tanpa kabel, baik melalui peningkatan pengeluaran barang modal, realokasi rencana pengeluaran yang ada, skema pembagian pendapatan atau kombinasi dari ketiga hal di atas. Skema pembagian pendapatan akan mencakup kerjasama dengan investor swasta di mana investor akan membiayai pembangunan proyek dengan imbalan pendapatan dari proyek tersebut, yang mirip dengan struktur *build-operate-transfer*.

Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan konsolidasi kami telah disusun sesuai dengan IFRS. Referensi untuk IFRS termasuk penerapan International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards ("IAS"), penafsiran dari International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC") dan Standards Interpretarion Committee ("SIC").

Penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan serta pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan dan pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan tersebut. Taksiran dan asumsi manajemen didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor lain yang relevan pada kondisi tersebut. Kami secara terus menerus mengevaluasi taksiran dan asumsi tersebut. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari taksiran di atas bila asumsi atau kondisi yang sebenarnya berbeda. Kami percaya bahwa dengan adanya perbedaan signifikan prinsip akuntansi, berikut ini mungkin akan melibatkan tingkat penilaian atau kompleksitas yang lebih tinggi.

Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya

Laporan keuangan konsolidasi dan hasil operasi mencerminkan entitas yang diakuisisi setelah penyelesaian dari proses akuisisi terkait. Kami menghitung entitas yang diakuisisi dengan menggunakan metode pembelian (*purchase method*) yang membutuhkan estimasi akuntansi dan penilaian untuk mengalokasikan harga akuisisi ke nilai pasar wajar dari aset dan kewajiban entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. Nilai lebih dari harga pembelian atas estimasi nilai pasar wajar dari aset bersih yang diakuisisi diakui sebagai *goodwill* pada laporan neraca konsolidasi. Proses akuisisi ini telah menghasilkan *goodwill* dan aset tak berwujud, yang masing-masing menjadi tunduk pada proses penurunan nilai dan amortisasi. Oleh karena itu, sejumlah penilaian yang diambil dalam mengestimasi nilai pasar wajar untuk dialokasikan ke aset dan kewajiban entitas yang diakusisi dan mempengaruhi kinerja keuangan kami secara signifikan.

Taksiran Umur Manfaat dan Penurunan Nilai Aset Tetap

Kami memperkirakan umur manfaat dari aset tetap kami berdasarkan pada ekspektasi masa penggunaan aset sebagaimana diatur dalam rencana usaha dan strategis (*business plans and strategies*) yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan kelakuan pasar (*market behaviour*). Taksiran masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penelaahan secara kolektif pada praktek industri (*industry practice*), evaluasi teknis secara internal dan pengalaman dengan aset-aset yang sejenis. Akan tetapi, terdapat kemungkinan hasil usaha di masa depan dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor disebutkan di atas.

Jumlah dan waktu dari beban yang diakui untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor-faktor tersebut. Pengurangan dalam taksiran masa manfaat dari aset tetap kami akan meningkatkan beban usaha yang diakui dan menurunkan aset tidak lancar.

Estimasi Beban Pensiun dan Manfaat Karyawan Lainnya

Penentuan dari kewajiban dan biaya pensiun dan manfaat karyawan kami lainnya tergantung pada pemilihan beberapa asumsi yang digunakan oleh aktuaris untuk menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut termasuk, di antara hal lainnya, tingkat diskonto, tingkat pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan dan kenaikan tingkat kompensasi.

Hasil sebenarnya yang berbeda dari estimasi kami diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi bersih dari laba atau rugi aktuarial pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari kelebihan kewajiban manfaat pensiun tetap dan nilai wajar aset dana pensiun pada tanggal tesebut.

Kami berkeyakinan bahwa asumsi mereka dapat diandalkan dan tepat, perbedaan signifikan dengan pengalaman aktual kami atau perubahan signifikan dalam asumsi mereka dapat mempengaruhi biaya dan kewajiban pensiun dan manfaat karyawan lainnya secara material.

Realisasi dari Aset Pajak Tangguhan

Kami menelaah nilai tercatat dari aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi jumlah tersebut sampai jumlah yang mungkin dapat direalisasikan dimana jumlah pendapatan kena pajak akan tersedia untuk memungkinkan semua atau sebagian aset pajak tangguhan dapat digunakan. Penelaahan kami terhadap pengakuan aset pajak tangguhan pada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan berdasarkan pada tingkat dan waktu dari pendapatan kena pajak yang diperkirakan untuk periode pelaporan selanjutnya. Perkiraan ini didasarkan pada hasil kami di masa lampau dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban sebagaimana juga strategi perencanaan pajak di masa datang.

Perkiraan Cadangan atas Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Kami memperkirakan cadangan atas kerugian penurunan nilai terkait dengan piutang usaha yang secara spesifik diidentifikasikan sebagai piutang yang mungkin tidak tertagih. Tingkat pencadangan ditelaah oleh manajemen dengan basis faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas dari piutang tersebut. Dalam kasus ini, kami menggunakan penilaian berdasarkan fakta terbaik yang tersedia dan keadaan-keadaan, termasuk tapi tidak terbatas pada, lama hubungan dengan pelanggan dan keadaan kredit pelanggan berdasarkan laporan kredit dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang umum, untuk mencatat pencadangan spesifik terhadap jumlah terhutang pelanggan yang telah jatuh tempo untuk mengurangi jumlah piutang kami menjadi jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Cadangan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan apabila terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Sebagai tambahan terhadap cadangan spesifik untuk piutang individual yang signifikan, kami juga menelaah cadangan penurunan nilai kolektif terhadap risiko kredit terhadap pelanggan-pelanggan mereka yang dikelompokkan berdasarkan risiko kredit yang sama, yang mana, meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan pencadangan, memiliki risiko yang lebih besar terhadap kegagalan bayar daripada sewaktu piutang tersebut diberikan kepada pelanggan pada awalnya. Cadangan kolektif ini didasarkan pada sejarah pengalaman kerugian dengan menggunakan faktor-faktor yang bervariasi seperti kinerja historis dari pelanggan dalam kelompok kolektif, penurunan di pasar yang mana pelanggan beroperasi dan kelemahan struktur yang teridentifikasi atau penurunan dalam arus kas dari pelanggan.

Penentuan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan

Kami mencatat beberapa aset dan kewajiban keuangan pada nilai wajar, yang memerlukan penggunaan estimasi akuntansi yang berkelanjutan dan penilaian untuk nilai wajar aset dan kewajiban keuangan. Sementara komponen signifikan untuk pengukuran nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti-bukti objektif yang dapat diverifikasi (contoh nilai tukar valuta asing, suku bunga dan tingkat volatilitas (*volatility rates*), jumlah perubahan nilai wajar akan berbeda jika kami menggunakan metode penilaian yang berbeda. Setiap perubahan dalam nilai wajar aset keuangan ini akan langsung mempengaruhi laporan posisi keuangan konsolidasi, laporan pendapatan komprehensif atau laporan perubahan ekuitas konsolidasi.

Standar Akuntansi Baru dan Interpretasi Terhadap Standar Yang Ada Saat Ini Yang Akan Berlaku Efektif Setelah 31 Desember 2011

Lihat Catatan 2 – Ringkasan Kebijakan Akuntansi Penting atas laporan keuangan konsolidasi yang tercantum dalam Butir 19 untuk diskusi atas standar akuntansi baru yang akan berlaku efektif setelah 31 Desember 2010 dan dampak yang diantisipasi terhadap laporan keuangan konsolidasi kami untuk periode saat ini dan masa mendatang.

C. Penelitian dan Pengembangan, Paten dan Lisensi, dan lain-lain

Untuk tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010, kami tidak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat signifikan.

D. Informasi Tentang Tren

Lihat pembahasan pendahuluan pada "Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha" di atas untuk keterangan lebih lanjut mengenai tren-tren penting yang memberikan dampak bagi hasil-hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan. Lihat juga "Butir 3: Informasi Penting—Faktor-Faktor Risiko" untuk keterangan lebih lanjut mengenai mengapa informasi keuangan yang dilaporkan tidak selalu merupakan indikasi hasil usaha di kemudian hari.

Pada bulan Januari 2011, Perusahaan memperkenalkan suatu restrukturisasi organisasi sebagai bagian dari program transformasi kami yang telah dimulai sejak tahun 2009 untuk meningkatkan produktivitas Perusahaan dan meningkatkan hasil operasional jangka panjang kami. Perusahaan menawarkan paket kompensasi khusus kepada tenaga kerjanya yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dan kepada tenaga kerja yang memilih untuk memutuskan hubungan ketenagakerjaan mereka dengan Perusahaan sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi tersebut di bawah Program VSS. IAS 37 tentang Persediaan, Tanggung Jawab Kontijensi dan Aset Kontijensi mewajibkan kami untuk mengungkapkan jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam program dan jumlah kompensasi yang dibayarkan; namun demikian, kami belum mengungkapkan informasi ini dalam laporan tahunan ini dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan anggapan yang terlalu dini mengenai hasil dari program ini, mengingat Perusahaan saat ini masih menawarkan program tersebut kepada karyawannya.

E. Penyelenggaraan *Off-Balance Sheet*

Pada tanggal 31 Desember 2010, kami tidak mempunyai penyelenggaraan *off-balance sheet* yang sewajarnya dapat memberikan pengaruh pada saat ini atau di kemudian hari terhadap kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan, pendapatan atau pengeluaran, hasil usaha, likuiditas, pengeluaran barang modal atau sumber modal Perusahaan, yang bersifat material bagi para investor.

F. Pengungkapan dalam bentuk Tabel (Tabular Disclosure) Tentang Kewajiban Kontraktual

Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan memiliki kewajiban kontraktual sebesar US$1.635,3 juta dari kontrak-kontrak dalam Dolar Amerika Serikat dan Rp12.133,9 miliar dari kontrak-kontrak dalam mata uang Rupiah. Kewajiban kontraktual dalam mata Dolar Amerika Serikat yang harus dibayar adalah US$373,6 juta di 2011, US$365,5 juta dari 2012 sampai 2013 dan US$121,2 juta dari tahun 2014 sampai 2015 dan US$775,0 juta dari 2016 dan seterusnya. Kewajiban kontraktual dalam Rupiah mewajibkan pembayaran sampai dengan Rp2.304,1 miliar di 2011, Rp3.918,0 miliar dari tahun 2012 sampai 2013, Rp2.678,0 miliar dari 2014 sampai 2015 dan Rp3.233,8 miliar dari 2016 dan seterusnya.

	Pembayaran jatuh tempo per 31 Desember									
	Jumlah		2011		2012-2013		2014-2015		2016 dan seterusnya	
	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$	Rp	US$
	(dalam miliar Rupiah, dalam juta US$)									
Hutang jangka panjang (1)	3.091,7	886,6	634,9	283,6	2.456,8	356,8	-	121,2	-	125,0
Hutang obligasi[1]	7.492,0	650,0	1.100,0	-	1.372,0	-	2.678,0	-	2.342,0	650,0
Kewajiban pembelian	569,2	90,0	569,2	90,0	-	-	-	-	-	-
Kewajiban tidak lancar dan kewajiban keuangan tidak lancar lainnya	981,0	8,7	-	-	89,2	8,7	-	-	891,8	-
Total kewajiban kontraktual tunai	12.133,9	1.635,3	2.304,1	373,6	3.918,0	365,5	2.678,0	121,2	3.233,8	775,0
Total contractual cash obligations	12,133.9	1,635.3	2,304.1	373.6	3,918.0	365.5	2,678.0	121.2	3,233.8	775.0

(1) Angka-angka ini tidak termasuk kewajiban bunga kontraktual yang terkait dan telah dihitung berdasarkan asumsi bahwa opsi yang terkait dengan hutang pinjaman dan obligasi, tidak digunakan.

Butir 6: DIRESI, MANAJEMEN SENIOR DAN KARYAWAN

Direksi dan Manajemen Senior

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, Perusahaan memiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Dua organ perusahaan ini terpisah, dan tidak seorangpun dapat menjadi anggota dari keduanya.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris kami terdiri dari sepuluh anggota, satu di antaranya diangkat menjadi Komisaris Utama. Para anggota Dewan Komisaris dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan para pemegang saham yang diambil di dalam rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan seorang anggota Dewan Komisaris diajukan oleh pemegang saham Seri A. Sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau Bapepam-LK, dan peraturan Bursa Efek Indonesia, empat orang komisaris telah diangkat sebagai Komisaris Independen, yaitu: George Thia Peng Heok, Alexander Rusli, Soeprapto S.IP, dan Chris Kanter. Per tanggal 20 April 2011, Dewan Komisaris kami terdiri dari sepuluh anggota sebagai berikut:

Nama	Umur	Komisaris Sejak	Jabatan
Abdulla Mohammed S.A. Al Thani	51	2008	Komisaris Utama
Dr. Nasser Mohammed Marafih	50	2008	Komisaris
Parikesit Suprapto	59	2011	Komisaris
Richard Farnsworth Seney	56	2009	Komisaris
Rachmat Gobel	48	2008	Komisaris
Rionald Silaban	45	2008	Komisaris
George Thia Peng Heok	62	2008	Komisaris Independen
Alexander Rusli	40	2010	Komisaris Independen
Soeprapto S.IP	64	2005	Komisaris Independen
Chris Kanter	58	2010	Komisaris Independen

Di bawah ini adalah biografi singkat dari masing-masing Komisaris Perusahaan.

Abdulla Mohammed S.A. Al Thani telah menjabat sebagai Komisaris Utama sejak bulan Agustus 2008. Saat ini, Sheikh Abdulla adalah *Chairman of the Board of Directors* Qtel. Dalam kapasitasnya sebagai *Chairman*, beliau telah mengembangkan sistem *corporate governance* Qtel untuk menjamin Qtel dikelola sesuai dengan praktek yang berlaku secara internasional, dengan demikian memperkuat baik akuntabilitas korporasi dan juga terciptanya kesejahteraan pemegang

saham secara berkelanjutan. Sheikh Abdulla telah juga melakukan restrukturisasi dan pengembangan usaha Qtel di regional. Setelah akuisisi Qtel atas Wataniya, sebagai perusahaan yang berbasis di Kuwait, yang saat itu dianggap merupakan transaksi telekomunikasi terbesar di wilayah Arab, Sheikh Abdulla ditunjuk sebagai *Chairman* Wataniya. Sheikh Abdulla dahulu memegang beberapa posisi terkemuka di Qatar termasuk Chief dari Royal Court (Amiri Diwan) sejak tahun 2000 hingga 2005. Beliau juga merupakan anggota dari Qatari Planning Council sejak tahun 2001 hingga 2004. Sebagai seorang instruktur pilot bersertifikasi dari British Royal Air Force, Sheikh Abdulla memiliki latar belakang yang beragam baik dalam bidang militer maupun penerbangan. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Senior Army War College, Carlisle Barracks di Amerika Serikat.

Dr. Nasser Mohammed Marafih telah menjabat sebagai Komisaris Indosat sejak bulan Agustus 2008 dan juga merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Anggaran. Beliau memulai karirnya di Qatar Telecom (Qtel) pada tahun 1992 sebagai penasihat ahli dari Universitas Qatar dan selanjutnya pada tahun 1994 ditunjuk sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan (*Director of Strategic Planning and Development*) dan akhirnya ditunjuk untuk posisinya yang sekarang sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) pada tahun 2002. Dalam kapasitasnya ini, Dr Marafih telah berpartisipasi dalam sejumlah komite pemerintah tingkat tinggi dan merupakan anggota Direksi dari sejumlah anak perusahaan Qtel. Beliau juga menduduki jabatan sebagai Direksi dari GSM Association. Dr Marafih sukses membawa Qtel melewati transformasi menjadi perusahaan global dan beliau memainkan peran penting dalam akuisisi besar oleh Qtel. Dr. Marafih merupakan seorang dosen dan asisten professor di *Electrical Engineering Department* dari Universitas Qatar. Dr Marafih memiliki gelar *Bachelor of Science* di bidang teknik Elektro, *Master of Science* dan Ph.D. dalam bidang *Communication Engineering*, semuanya dari George Washington University, di Amerika Serikat. Beliau adalah anggota dari the Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. selama lebih dari sepuluh tahun.

Parikesit Suprapto telah menjabat menjadi Komisaris sejak bulan Februari 2011. Beliau saat ini menjabat sebagai Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Bidang Jasa dan sebelumnya pernah menjabat berbagai posisi, termasuk sebagai Deputi Kementerian BUMN Bidang Perbankan dan Usaha Jasa Keuangan sejak tahun 2008 sampai dengan 2010, Penasihat Ahli Kementerian BUMN Bidang Usaha Kecil sejak tahun 2006 sampai dengan 2008, Asisten Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Jasa Keuangan dan Jasa Konstruksi sejak tahun 2002 sampai dengan 2005 dan Direktur Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Direktorat Jenderal BUMN Kementerian Keuangan sejak tahun 2001 sampai dengan 2002. Beliau memperoleh gelar *Bachelor* di bidang Ekonomi Korporasi dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Jakarta pada tahun 1980, gelar Master di bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Indiana di Amerika Serikat pada tahun 1990, dan gelar Doktor di bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Notre Dame di Amerika Serikat pada tahun 1995.

Richard Farnsworth Seney telah menjabat menjadi Komisaris sejak bulan Juni 2009. Beliau telah menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional di Qtel International (QI) sejak tahun 2007 hingga sekarang, Presiden dan Kepala Bagian Eksekutif di MCT Corp (termasuk para pendahulunya) dari tahun 1992 hingga tahun 2007, Wakil Presiden Deputi Eksekutif dan General Manager dari MCT Investors, L.P sejak tahun 1987 hingga tahun 2002, dan Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Bagian Keuangan dari Charisma Communications Corporation, Perusahaan yang bergerak di bidang Komunikasi sejak tahun 1985 hingga tahun 1992. Beliau memperoleh gelar *Bachelor* di bidang *Commerce* dari University of Virgina McIntire School of *Commerce*.

Rachmat Gobel telah menjadi Komisaris sejak bulan Agustus 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai Pimpinan dari Grup Gobel yang bergerak di bidang pengolahan, perdagangan, jasa, manajemen logistik terintegrasi seperti makanan dan obat-obatan, termasuk industri katering. Grup Gobel adalah partner joint venture dari Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., suatu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang elektronik dan barang-barang elektronik yang dipasarkan dengan merek Panasonic. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua dari Dewan Pengawas dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Wakil Ketua dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ketua dari Federasi Gabungan Elektronik dan Telematika (F.GABEL) dan ditunjuk sebagai anggota dari Komite Inovasi Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science* di bidang Perdagangan Internasional dari Universitas Chuo, Tokyo, pada tahun

1987,dan dianugerahi gelar *Honorary Doctorate* dari Universitas Takushoku, Tokyo, Jepang, pada tahun 2002. Pada tahun 2009, Beliau telah menerima "*Distinguished Engineering Award in Manufacturing Technology*", gelar yang bergengsi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beliau juga aktif terlibat dalam beberapa kegiatan sosial, termasuk Komite Olimpiade Indonesia dan Palang Merah Indonesia.

Rionald Silaban menjabat sebagai Komisaris sejak Juni 2008 dan ditunjuk sebagai anggota dari Komite Manajemen Risiko pada tahun yang sama. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Departemen Keuangan. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi termasuk sebagai Direktur Manajemen Risiko Fiskal Departemen Keuangan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008, Penasehat Senior di World Bank di Washington D.C., Amerika Serikat sejak tahun 2004 hingga tahun 2006, Kepala Divisi Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan sejak tahun 2002 hingga tahun 2004, Kepala Divisi Pengawasan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional sejak tahun 2000 hingga tahun 2002, Kepala Divisi Jasa Keuangan di Biro Hukum Departemen Keuangan sejak tahun 1998 hingga tahun 2000, Wakil Direktur untuk Direktorat Privatisasi untuk Direktorat Umum Badan Usaha Milik Negara Departemen Keuangan sejak tahun 1997 hingga tahun 1998, Kepala Seksi Biro Hukum Departemen Keuangan sejak tahun 1994 hingga tahun 1997 dan Kepala Sekretariat Komite Privatisasi Departemen Keuangan sejak tahun 1994 hingga tahun 1997. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar LL.M.dari Georgetown University Law Center, Washington D.C., Amerika Serikat pada tahun 1993.

George Thia Peng Heok menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perusahaan sejak bulan Juni 2008. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur/Konsultan di Asiainc Private Limited. Sebelumnya beliau menduduki beberapa posisi, termasuk sebagai Konsultan/Direktur Strategic Advisor Private Limited sejak tahun 2003 hingga tahun 2006, Ketua Eksekutif MediaStream Limited sejak tahun 1999 hingga tahun 2003, Direktur/Konsultan Phoenix Capital Private Limited sejak tahun 1995 hingga tahun 1998, Ketua Eksekutif Asia Matrix Limited sejak tahun 1993 hingga tahun 1995, Managing Director Lum Chang Securities Private Limited sejak tahun 1991 hingga tahun 1993, *Managing Director* Sun Hung Kai Securities Private Limited sejak tahun 1989 hingga tahun 1991, *Managing Director* Merrill Lynch International Bank Limited sejak tahun 1987 hingga tahun 1989, Direktur Eksekutif/Partner Kay Hian Private Limited sejak tahun 1985 hingga tahun 1987 dan *Managing Director* Morgan Grenfell (Asia) limited sejak tahun 1975 hingga tahun 1985. Beliau adalah seorang akuntan publik bersertifikat and anggota dari Chartered Association of Certified Accountants (Inggris) dan *Singapore Institute of Directors*.

Alexander Rusli telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2010 dan saat ini menjabat sebagai anggota dari Komite Remunerasi Perusahaan. Saat ini Beliau menjabat sebagai komisaris dari PT Krakatau Steel (Persero), badan usaha yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara yang memproduksi produk baja-karbon. Beliau pernah menjabat sebagai Konsultan Ahli untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara, dengan pengawasan kepada 140 Badan Usaha Milik Negara dan lebih dari 500 anak perusahaan. Sebelumnya, beliau menjabat pula sebagai Konsultan Ahli untuk Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, dimana beliau terlibat dalam perumusan kebijakan dan peraturan dan dalam mengawasi proyek-proyek nasional infrastruktur ICT negara. Posisi ini beliau duduki selama dua masa kabinet kementrian. Beliau juga bertindak sebagai Konsultan bagi Pricewaterhouse Coopers. Beliau meraih gelar *Doctor of Philosophy*, Sistem Informasi, Curtin University of Technology, Australia.

Soeprapto S.IP telah menjabat sebagai Komisaris Independen dan anggota Komite Audit sejak bulan Juni 2005. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan, seperti Asisten Pribadi dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan 2001 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Sawit Kaltim Lestari sejak 2010. Beliau memperoleh gelar sarjana ilmu politik dari Universitas Terbuka, Jakarta dan merupakan peserta Kelas Biasa (KRA 29) pada tahun 1996 di Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS).

Chris Kanter telah menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Januari 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua dan Pendiri dari Sigma Sembada Group, sebuah kontraktor alat berat untuk perangkat transportasi dan logistik. Beliau telah menjabat sebagai Wakil Presiden untuk Investasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi, Transportasi dan Kepariwisataan

di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) sejak tahun 1994 sampai tahun 2010. Baru-baru ini beliau ditunjuk kembali untuk jangka waktu lima tahun berikutnya sampai dengan tahun 2015 sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas. Beliau juga baru-baru ini ditunjuk sebagai Wakil Ketua dari APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Ketua dari Dewan Pendiri Swiss German University. Beliau juga menjabat beberapa peran di pemerintahan Indonesia dan telah terlibat langsung dalam Paket Kebijakan untuk Mengembangkan Iklim Investasi di Indonesia dan juga bertindak sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan 2002 dan baru-baru ini ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia sebagai anggota dari Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang memberikan laporan langsung kepada Presiden. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Teknik, Universitas Trisakti, Indonesia.

Masa jabatan dari masing-masing Komisaris berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang ke-empat setelah tanggal pengangkatan komisaris yang bersangkutan, yang mana akan berakhir pada tahun 2012 untuk para Komisaris yang sedang menjabat saat ini. Seorang Komisaris dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya pada rapat umum pemegang saham. Alamat kantor Dewan Komisaris adalah di Jalan Medan Merdeka Barat 21, Jakarta, 10110, Republik Indonesia.

Direksi

Direksi bertanggung jawab atas segala kepengurusan dan kegiatan Perusahaan sehari-hari di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, termasuk satu Direktur Utama. Para anggota Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham yang diambil dalam rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan seorang anggota Direksi diajukan oleh pemegang saham Seri A. Per 20 April 2011, Direksi Perusahaan terdiri dari lima orang sebagai berikut:

Nama	Umur	Direktur Sejak	Jabatan
Harry Sasongko Tirtotjondro	51	2009	President Director and Chief Executive Officer
Fadzri Sentosa	47	2007	Director & Chief Wholesale and Infrastructure Officer
Peter Wladyslaw Kuncewicz	57	2009	Director & Chief Financial Officer
Stephen Edward Hobbs*	60	2009	Director & Chief Technology Officer
Hans Christiaan Moritz*	57	2011	Director & Chief Technology Officer
Laszlo Imre Barta	42	2010	Director & Chief Commercial Officer

* Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 8 Februari 2011, Pemegang Saham telah memberhentikan Stephen Edward Hobbs sejak 30 April 2010 dan menunjuk Hans Christian Moritz sebagai penggantinya sejak 1 Mei 2011.

Di bawah ini adalah biografi singkat dari masing-masing Direktur Perusahaan:

Harry Sasongko Tirtotjondro telah menjabat sebagai *President Director* and *Chief Executive Officer* sejak bulan Agustus 2009. Sebelumnya beliau telah memegang beberapa jabatan sebagai Presiden Direktur dan CEO dari GE Consumer Finance sejak tahun 2005 sampai 2009, dimana beliau diakui sebagai salah satu dari 10 CEO terbaik di Indonesia pada tahun 2008 oleh the SWA Magazine & Synovate awards. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2005, beliau merupakan anggota Lippo Group dimana Beliau sempat menjabat sebagai *Managing Director* dari Matahari Retail & Lippo Bank. Beliau pernah menjabat sebagai *Managing Director of Consumer Banking* di PT Bank Tiara Asia pada tahun 1995 sampai dengan 1998, dan sebelumnya sebagai Direktur di PT Citicorp Finance dan Citibank, N.A. pada tahun 1998. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung Indonesia, gelar *Master of Science* di bidang Pendidikan dari the Ohio State University, Amerika Serikat, dan merupakan *Chartered Financial Consultant* (ChFC), gelar yang diperoleh dari Singapore College of Insurance / American Collegedi Amerika Serikat.

Fadzri Sentosa telah menjabat sebagai Direktur sejak bulan Juni 2007 dan sebagai *Director and Chief Wholesale and Infrastructure Officer* sejak bulan Juni 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Aplikanusa Lintasarta. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan di Perusahaan, termasuk sebagai anggota dari Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, *Group Head National Card* dan *Channel Management* sejak tahun 2006 sampai dengan 2007, Senior Vice President bidang Commerce, daerah Jabotabek sejak tahun 2005 sampai dengan 2006 dan *Senior Vice President* bidang Penjualan Selular sejak tahun 2003 sampai dengan 2004, anggota dari Direksi Satelindo pada tahun 2003 dan anggota dari Dewan Direksi dari IM3 dari tahun 2002 sampai 2003. Beliau memperoleh gelar Master di bidang Regional Business Management dari University of Technology, Sydney pada tahun 2001 dan gelar Sarjana Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986.

Peter Wladyslaw Kuncewicz telah menjabat sebagai *Director and Chief Financial Officer* sejak bulan September 2009. Beliau memiliki pengalaman selama 30 tahun di bidang keuangan di berbagai pasar keuangan internasional, 10 di antaranya bergerak di bidang telekomunikasi. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2009, Beliau memegang jabatan sebagai *Chief Financial Officer* di Telenor Pakistan, memegang urutan ke-2 terbaik dalam urutan 5 pasar keuangan teraktif. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2006, beliau menjabat sebagai *Chief Financial Officer* di Star Foods SA, sebuah perusahaan FMCG, dan sejak tahun 1996 sampai dengan 1997 beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di United Biscuits Poland. Beliau juga bekerja di bidang pengadaan keuangan dan IT roles di Batelco, Bahrain sejak tahun 1996 sampai dengan 1998. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Biologi dari University of Sussex, England, dan *Master of Science* di bidang di bidang *Business Planning* dan *Finance* dari University of Salford, England. Beliau juga merupakan anggota dari Chartered Institute of Management Accountants di Inggris.

Hans Christian Moritz diangkat sebagai *Director and Chief Technology Officer* pada bulan Februari 2011 dan mengambil alih seluruh tugasnya sejak 1 Mei 2011. Beliau memiliki pengalaman selama 22 tahun di industi Telekomunikasi Seluler dan pernah menjabat berbagai posisi sebelumnya, termasuk *Head Corporate Project Officer* di Vodafone India sejak tahun 2009 sampai dengan 2011, *Group Operations Director* Africa/*Chief Technology Officer* di Zain sejak tahun 2006 sampai dengan 2009, Chief Technology Officer di Zain Uganda sejak tahun 2004 sampai dengan 2006, Chief Operating Officer di KPN Internet sejak tahun 2003 sampai dengan 2004, *General Manager of the Business Unit Broadband Network* di KPN Telecom sejak tahun 2001 sampai dengan 2003, *Chief Operating Officer* di BASE dan sejak tahun 1998 sampai dengan 2000, *Operations Director Asia* (berdomisili di Indonesia) di KPN Asia sejak tahun 1994 sampai dengan 1997. Beliau memperoleh gelar Master di bidang Matematika pada tahun 1986 dan beberapa gelar Sarjana, seperti di bidang Elektronika pada tahun 1978, *Feedback* dan Sistem Pengendalian pada tahun 1984 dan Manajemen Perairan pada tahun 1984.

Laszlo Imre Barta telah menjabat sebagai *Director and Chief Commercial* Officer sejak tanggal 1 Mei 2010. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Deputy Chief Marketing Officer* di Grameenphone di Bangladesh. Beliau menghabiskan lebih dari empat tahun di Grameenphone di Bangladesh, dimana beliau mengembangkan diri dan memimpin peluncuran strategi bisnis pasar, mendirikan dan memimpin departemen UKM, dan menjabat sebagai Direktur Penjualan. Sebelum diperbantukan untuk Grameenphone oleh Grup Telenor, beliau bekerja untuk Pannon GSM di Hungaria, dimana beliau mengepalai departemen *Corporate Client*. Sebelum Pannon, beliau bekerja untuk Ericsson Hungary dimana beliau memimpin penjualan handset dan aksesori untuk operator selular lokal Hungaria. Beliau bergabung dengan Ericsson dari Phillip Morris, dimana beliau memulai karirnya dalam bidang Penjualan. Beliau menerima *Postgraduate Award* dalam Studi Manajemen dari Szamalk Open Business School, Budapest pada tahun 2004 dan memiliki gelar di bidang Akuntansi dan *Landscape Architecture & Engineering* dari universitas-universitas di Hungaria.

Stephen Edward Hobbs telah menjabat sebagai *Director and Chief Technology Officer* sejak bulan Juni 2009. Beliau telah mengambil alih peran CTO untuk Asiacell di Irak untuk 9 bulan pertama dari kegiatan operasionalnya, kemudian beliau memperoleh CPA *license award* antara tahun 2003 dan 2004. Sebelumnya beliau bekerja di praktisi konsultan independen, mendukung klien-klien penting seperti Virgin Management, Inggris, C&W, Inggris, Wataniya Telecom (Kuwait) dan Sapient (Inggris/Amerika Serikat), mendukung bidang teknologi, pengembangan dan strategi. Beliau memiliki pengalaman sebagai *Chief Engineer* dari C&W Mobile, CTO Asia, CTO Global Mobile, Vice President Mobile and ASP services (C&W Global)

sampai dengan tahun 2001, sebagai pendiri dalam suatu sistem satelit antena kecil dan ahli dalam program pengamanan di lingkungan nirkabel. Beliau memiliki pengalaman di bidang manajemen internasional selama lebih dari 3 tahun untuk industri telekomunikasi dan teknologi untuk kawasan Eropa dan Asia. Beliau dahulu merupakan *Petty Officer Radio Electrician* (Royal Navy) di Cable & Wireless Telecommunication.

Masa jabatan Direksi berakhir pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Pada rapat umum pemegang saham, para pemegang saham dapat memberhentikan Direktur sebelum habis masa jabatannya. Masa jabatan seorang Direktur akan berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan pailit, berada dalam pengampuan berdasarkan putusan pengadilan, mengundurkan diri atau meninggal dunia atau apabila Direktur yang bersangkutan dilarang memegang jabatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila salah seorang anggota Direksi mengundurkan diri, yang bersangkutan wajib menyerahkan surat pemberitahuan pengunduran dirinya kepada Perusahaan, ditujukan untuk perhatian Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan pengunduran diri tersebut dalam waktu 60 hari setelah menerima surat pengunduran diri. Dalam waktu 45 hari setelah terdapat lowongan jabatan di dalam Direksi yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimum Direktur yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, maka rapat umum pemegang saham harus diadakan untuk mengisi lowongan jabatan tersebut. Seorang anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung. Seorang anggota Direksi dapat merangkap jabatan lain yang tidak mengakibatkan benturan kepentingan, dengan ketentuan ia harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan memberikan pemberitahuan kepada rapat umum pemegang saham. Apabila Direktur Utama bermaksud untuk merangkap jabatan, Direktur Utama harus memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Alamat kantor Direksi adalah di Jalan Medan Merdeka Barat 21, Jakarta, 10110, Republik Indonesia.

Tidak seorangpun anggota Komisaris ataupun Direktur Perusahaan yang memiliki kontrak kerja dengan Perusahaan, dan tidak terdapat kontrak kerja yang telah ditawarkan atau sedang dipertimbangkan. Selain itu, tidak ada hubungan keluarga antara para Komisaris ataupun para Direktur yang tercantum di atas.

Remunerasi Para Komisaris dan Direktur

Untuk jasa-jasa yang diberikannya, para anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan berhak atas remunerasi, yang besarnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan. Jumlah uang remunerasi untuk dibayarkan kepada para anggota Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, termasuk kompensasi dasar dan insentif jangka pendek dan jangka panjang adalah sebesar Rp39,5 miliar (US$4,4 juta).

Remunerasi para anggota Direksi Perusahaan ditentukan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam memutuskan hal tersebut, Dewan Komisaris harus mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan harus melaporkan keputusannya kepada para pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Sejak tahun 2006, insentif per semester dihapuskan dan kami memperkenalkan rencana Unit Saham Terbatas sebagai insentif jangka panjang untuk para Komisaris dan Rencana Bagi Hasil Ekonomis untuk para Direksi yang dibagi menjadi pembayaran bonus tunai sebagai insentif jangka pendek dan Rencana Unit Saham Terbatas sebagai insentif jangka panjang.

Pensiun dan Fasilitas Lainnya

Kami dan Lintasarta telah menyusun rencana pensiun dan fasilitas lainnya yang secara substansial meliputi seluruh karyawan tetap Perusahaan. PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), suatu perusahaan persero yang bergerak di bidang asuransi, mengelola rencana dan jumlah fasilitas pensiun yang akan diberikan pada masa pensiun berdasarkan gaji pokok terakhir karyawan dan masa kerja mereka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan, Lintasarta, dan IM2 mengeluarkan biaya sebesar Rp193,1 miliar untuk dana pensiun, manfaat pasca pensiun (misalnya fasilitas berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan)

dan manfaat kesehatan pasca pensiun untuk karyawan-karyawan kami. Per tanggal 31 Desember 2010, kami dan Lintasarta mencatat biaya pensiun dibayar di muka sebesar Rp113,3 miliar, sementara kami, Lintasarta dan IM2 mencatat kewajiban total yang masih harus dibayar, manfaat pasca pensiun dan manfaat kesehatan pasca pensiun sebesar Rp844,8 miliar. Untuk informasi lebih lanjut tentang Dana Pensiun termasuk jumlah dana pensiun, masa pensiun atau manfaat lainnya dapat dilihat di Catatan 17 dan Catatan 24 dari Laporan Keuangan Konsolidasi kami.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Perusahaan bertindak sebagai penasehat dan pengawas Perusahaan secara keseluruhan dengan fungsi utama untuk mengkaji rencana pengembangan Perusahaan, mengawasi kinerja rencana kerja Perusahaan dan mengkaji serta menyetujui anggaran Perusahaan. Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan rapat umum pemegang saham. Keputusan-keputusan yang melebihi batas keuangan tertentu harus diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau para pemegang saham untuk dikaji dan disetujui. Dalam menjalankan kegiatan pengawasannya, Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris Perusahaan harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan, atau apabila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau atas permintaan dari paling sedikit dari 1/3 dari jumlah seluruh angggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dapat dianggap sah dan mengikat dalam membuat keputusan hanya apabila sebagian besar anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili. Pada setiap rapat, masing-masing Komisaris berhak memberikan satu suara, dan memberikan satu suara tambahan untuk setiap Komisaris yang ia wakili. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh Komisaris lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Kecuali apabila diatur lain di dalam Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan-keputusan Dewan Komisaris harus diambil secara musyarawah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan-keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari anggota Dewan Komisaris. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ditolak, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut individu, dimana Komisaris Utama berhak menentukan. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui dan menandatangani keputusan tersebut.

Direksi Perusahaan secara umum bertanggung jawab untuk menjalankan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan dan perintah yang dikeluarkan oleh rapat umum pemegang saham dan Dewan Komisaris. Direktur Utama sendiri berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perusahaan. Namun, apabila Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir, maka salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Direksi harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: (i) membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal; (ii) mengadakan perjanjian, melakukan komitmen untuk, mengubah dan/atau mengakhiri perjanjian atau kerjasama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain; (iii) membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan seluruh atau sebagian dari kegiatan usaha, hak atau aktiva tetap atau aktiva lain milik Perusahaan (termasuk seluruh kepentingan yang ada); (iv) tidak menagih lagi dan menghapuskan piutang dari pembukuan serta persediaan barang; (v) mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalis) atau dengan cara apapun sehingga Perusahaan menjadi bertanggung jawab terhadap utang pihak lain, baik berdasarkan perjanjian untuk mengambil alih utang pihak lain, memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran di muka, atau pinjaman untuk membayar lunas utang pihak lain; (vi) menerima atau memberikan atau melakukan komitmen untuk memberikan pinjaman jangka waktu menengah atau panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang bersifat operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku); (vii) melakukan pembelian barang modal dalam 1 (satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke

waktu; (viii) menerbitkan obligasi atau efek lain yang bisa dikonversi menjadi saham; (ix) mengusulkan pengeluaran saham baru Perusahaan; (x) memberikan *indemnity* (ganti rugi) kepada atau memberikan jaminan atas kewajiban suatu pihak; (xi) menentukan dan/atau mengubah struktur manajemen Perusahaan; (xii) membuat rencana bisnis baru atau mengubah rencana bisnis; (xiii) mengubah praktek dan sistem akuntansi, keuangan, atau pajak di Perusahaan atau Anak Perusahaannya; (xiv) mengubah nama Perusahaan (xv) menyetujui laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (xvi) menentukan anggaran tahunan Perusahaan dan dan anggaran tahunan Anak Perusahaannya; (xvii) melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal Perusahaan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal; (xviii) mendirikan Anak Perusahaan atau menyetujui pelepasan atau pengurangan kepemilikan, baik langsung atau tidak langsung, dalam setiap anak perusahaan atau mengambil alih saham di perusahaan lain atau melepaskan saham di perusahaan lain; (xix) melakukan setiap tindakan korporasi atau investasi terkait dengan anak perusahaan Perusahaan; (xx) menggunakan hak sebagai pemegang saham pada anak perusahaan Perusahaan, atau pada perusahaan lain dimana Perusahaan mempunyai penyertaan saham; (xxi) menyetujui pembayaran bonus atau pembayaran yang sejenis kepada karyawan Perusahaan atau mengubah struktur remunerasi karyawan; (xxii) melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu); (xxiii) menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva dan tanggung jawab pembayaran (*asset liability*) Perusahaan; (xxiv) menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan menandatangani yang menyangkut transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian dan penjualan aktiva, pinjaman dan dan komitmen-komitmen lainnya; dan (xxv) mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu yang memiliki nilai mana yang lebih kecil dari 5,0% (lima persen) atau lebih dari seluruh pendapatan atau 2,5% (dua setengah persen) atau lebih dari aktiva tidak lancar Perusahaan yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah diaudit. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menentukan batasan nilai berkaitan dengan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) sampai dengan (viii), (x) dan (xxi) di atas dan berhak untuk mengubah batasan tersebut dari waktu ke waktu. Apabila tindakan-tindakan tersebut masih tercakup dalam batasan nilai yang telah ditetapkan, persetujuan Dewan Komisaris tidak diperlukan. Dalam memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris harus memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

Rapat Direksi diadakan apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau apabila diminta oleh sepertiga dari seluruh anggota Direksi. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak membuat keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 anggota Direksi hadir atau diwakili. Seorang Direktur dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh Direktur lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang dibuat untuk tujuan khusus tersebut. Pada setiap Rapat Direksi, masing-masing Direktur berhak memberikan satu suara, dan memberikan satu suara tambahan untuk setiap Direktur yang ia wakili. Keputusan Rapat Direksi harus diambil secara musyarawah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan, apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Direktur Utama yang menentukan. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi apabila seluruh anggota Direksi menyetujui dan menandatangani keputusan tersebut secara tertulis.

Setiap orang Direktur akan diberikan tanggung jawab khusus. Apabila terdapat jabatan Direksi yang kosong, maka selama jabatan tersebut belum terisi, salah satu Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan melaksanakan pekerjaan dari Direktur yang tidak ada tersebut. Apabila karena alasan apapun, Perusahaan sama sekali tidak memiliki Direktur, maka Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Direksi dan wajib mengadakan rapat umum pemegang saham untuk memilih anggota Direksi yang baru, dalam waktu sekurang-kurangnya 45 hari.

Anggaran Dasar Perusahaan mengatur bahwa apabila terdapat benturan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan seorang Direktur, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi yang lainnya. Apabila seluruh Direktur mempunyai benturan kepentingan, maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau satu

Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Apabila seluruh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka para pemegang saham dapat menunjuk salah satu atau lebih orang yang akan mewakili Perusahaan dalam rapat umum pemegang saham.

Komite Audit

Sesuai dengan peraturan Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange, kami telah membentuk Komite Audit yang independen, yang terdiri dari lima orang dan diketuai oleh salah satu Komisaris Independen. Tugas-tugas Komite Audit meliputi pemberian nasehat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, termasuk tinjauan pada hal-hal berikut ini: informasi keuangan Perusahaan (termasuk laporan dan proyeksi keuangan); independensi dan objektivitas dari akuntan publik Perusahaan; kecukupan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik Perusahaan untuk memastikan bahwa semua risiko material telah dipertimbangkan; kecukupan pengendalian internal Perusahaan; kepatuhan Perusahaan sebagai perusahaan terbuka terhadap peraturan pasar modal yang berlaku dan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan kewajiban-kewajiban auditor internal Perusahaan.

Komite Audit juga memeriksa dan melaporkan keluhan-keluhan kepada Dewan Komisaris, menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perusahaan, melakukan audit terhadap dugaan kesalahan yang dilakukan di dalam keputusan-keputusan rapat Direksi atau penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan keputusan rapat tersebut dan membuat Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

Pada tanggal 5 Juni 2008, George Thia Peng Heok diangkat sebagai Ketua Komite Audit. Pada tanggal 29 Januari 2010, Chris Kanter diangkat sebagai anggota Komite Audit. Per tanggal 31 Desember 2010, anggota Komite Audit terdiri dari George Thia Peng Heok (Ketua), Soeprapto S.IP, Chris Kanter, Kanaka Puradiredja dan Unggul Saut Marupa Tampubolon. Peraturan Bapepam-LK mensyaratkan paling sedikit dua orang anggota independen untuk menjabat sebagai anggota Komite Audit, Kanaka Puradiredja dan Unggul Saut Marupa Tampubolon menjabat sebagai anggota independen dari Komite Audit. Kami telah memasukkan Piagam Komite Audit ke dalam situs Perusahaan di *www.indosat.com* yang tersedia untuk umum.

Piagam tersebut dikaji setiap satu tahun sekali dan charter yang direvisi telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana terlampir di dalam Exhibit 15.14.

Komite Remunerasi

Komite Remunerasi bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi, bonus dan manfaat lainnya kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta para karyawan, termasuk mengenai struktur, ketentuan-ketentuan dan penerbitan opsi saham. Per tanggal 31 Desember 2010, anggota Komite Remunerasi terdiri dari Dr. Nasser Mohammed Marafih (Ketua), Alexander Rusli dan Soeprapto S.IP.

Kami telah memasukkan Piagam Komite Remunerasi (*Remuneration Committee Charter*) ke dalam situs kami di www.indosat.com yang tersedia untuk umum.

Komite Manajemen Risiko

Pada tanggal 26 Oktober 2005, kami membentuk Komite Manajemen Risiko, yang melapor ke Dewan Komisaris. Komite Manajemen Risiko kami mengevaluasi risiko potensial tentang bisnis kami dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan kami mengenai penilaian risiko dan manajemen risiko, termasuk membuat rekomendasi untuk memperbaiki prosedur kami yang ada, sebagaimana diperlukan. Per tanggal 31 Desember 2010, anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari Rachmat Gobel (Ketua), George Thia Peng Heok, Jarman dan Rionald Silaban. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, per 8 Februari 2011, anggota dari Komite Manajemen Risiko kami adalah Rachmat Gobel (Ketua), George Thia Peng Heok, dan Rionald Silaban. Kami telah memasukkan Piagam Komite Manajemen Risiko (*Management Risk Charter*) ke dalam situs kami di *www.indosat.com* yang tersedia untuk umum.

Komite Anggaran

Komite Anggaran kami membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat dengan meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan rencana strategis Perusahaan, rencana kerja tahunan dan anggaran (termasuk rancangan anggaran belanja). Per tanggal 31 Desember 2010, anggota dari Komite Anggaran adalah Dr. Nasser Mohammed Marafih (Ketua), George Thia Peng Heok, Richard Farnsworth Seney and Jarman. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, per 8 Februari 2011, anggota dari Komite Anggaran kami adalah Dr. Nasser Mohammed Marafih (Ketua), George Thia Peng Heok dan Richard Farnsworth Seney.

Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2010, secara keseluruhan, kami mempekerjakan sekitar 6.694 karyawan, 4.838 di antaranya adalah karyawan tetap dan 1.856 lainnya adalah karyawan tidak tetap. Per tanggal 31 Desember 2010, di luar karyawan yang ditempatkan, anak-anak perusahaan kami telah mempekerjakan sekitar 1.005 karyawan tetap. Per tanggal 31 Desember 2010, karyawan tetap kami meliputi 787 karyawan tingkat manajer (karyawan dengan jabatan manajer atau lebih tinggi) dan 3.046 karyawan non-manajer, dibandingkan dengan 735 karyawan tingkat manajer dan 3.152 karyawan non-manajer per tanggal 31 Desember 2009, dan 772 manajer and 3.221 non-manajer per tanggal 31 Desember 2008. Tingkat t*urnover* karyawan kami selama tahun 2010 adalah 2,37% per tahun. Dengan demikian, per tanggal 31 Desember 2010, rata-rata jangka waktu karyawan yang bekerja di Perusahaan adalah 13,07 tahun.

Pada bulan Januari 2011, Perusahaan memperkenalkan suatu restrukturisasi organisasi yang merupakan bagian dari program transformasi kami yang telah dimulai pada tahun 2009 untuk meningkatkan produktifitas Perusahaan dan meningkatkan hasil operasional jangka panjang kami. Perusahaan menawarkan paket kompensasi khusus kepada tenaga kerjanya yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dan kepada tenaga kerja yang memilih untuk mengakhiri hubungan ketenagakerjaan mereka dengan Perusahaan sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi tersebut di bawah Program VSS. IAS 37 tentang Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi mewajibkan kami untuk mengungkapkan jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam program dan jumlah kompensasi yang dibayarkan; namun demikian, kami belum mengungkapkan informasi ini dalam laporan tahunan ini dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan dugaan awal yang tergesa-gesa terhadap hasil dari program mengingat Perseroan saat ini masih menawarkan program tersebut kepada karyawannya.

Kami memberikan beberapa tunjangan kepada karyawan, termasuk program pensiun, tunjangan kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan pajak penghasilan dan akses ke koperasi yang didirikan oleh para karyawan.

Pada tanggal 25 Agustus 1999, karyawan kami membentuk suatu serikat pekerja yang dinamakan Serikat Pekerja Indosat, atau SPI. Pada tanggal 15 September 2006, manajemen kami dan SPI telah menandatangani suatu perjanjian kerja bersama yang memuat ketentuan-ketentuan kerja umum, meliputi jam kerja, gaji, pengembangan dan kompetensi karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, kesejahteraan karyawan, tunjangan sosial, tata tertib karyawan dan tata cara penyelesaian perselisihan. Perjanjian kerja bersama ini telah diperbaharui pada tanggal 31 Desember 2010. Kami yakin bahwa kami memiliki hubungan baik dengan serikat pekerja. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.3 dari perjanjian kerja bersama, kami mengadakan pertemuan dengan serikat pekerja sedikitnya satu kali setiap 3 bulan.

Sejumlah karyawan kami berhak atas pensiun berdasarkan program tunjangan yang telah ditetapkan, dimana mereka memperoleh pembayaran sekaligus dan tunjangan bulanan melalui program asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), suatu perusahaan asuransi milik negara. Per tanggal 31 Desember 2010, kami telah mengasuransikan 2.343 karyawan tetap melalui program pensiun yang dibiayai penuh. Berdasarkan program ini, seorang karyawan yang mengundurkan diri pada saat berusia 56 tahun akan menerima tunjangan pensiun. Selain itu, kami juga membuat program pensiun kontribusi yang ditetapkan untuk para karyawan kami pada bulan Mei 2001. Setelah dilakukannya merger Satelindo dan IM3 ke dalam Indosat, kami menggabungkan program kami dengan program pensiun kontribusi yang ditetapkan untuk karyawan perusahaan-perusahaan yang bergabung. Berdasarkan program kontribusi yang ditetapkan, seorang karyawan

akan memberikan kontribusi sebesar 10,0% sampai dengan 13,33% dari gaji pokoknya ke program tersebut. Kami memberikan kontribusi sebesar 50% kepada masing-masing karyawan.

Para karyawan kami juga membentuk sebuah koperasi yang dinamakan Koperasi Pegawai Indosat ("Kopindosat"). Kopindosat menyediakan berbagai manfaat, seperti pinjaman yang bersifat konsumtif, terutama kepada karyawan Perusahaan, dan penyewaan mobil dan peralatan, terutama kepada Perusahaan. Manajemen Kopindosat dipilih oleh para karyawan setiap tiga tahun sekali dalam rapat anggota. Kopindosat memiliki saham minoritas di dalam beberapa perusahaan afiliasi kami. Perusahaan juga menempatkan beberapa karyawan kami untuk sementara waktu di Kopindosat dan anak perusahaannya untuk membantu mereka dalam menjalankan usaha dan memberikan pelatihan kerja untuk para karyawannya.

Kepemilikan saham

Satu dari anggota direktur kami secara individual dan benefisial memiliki kurang dari satu persen dari saham biasa kami dan kepemilikan saham beliau di Perusahaan sudah dicatatkan dalam daftar khusus pemegang saham.

Butir 7: PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Per tanggal 31 Maret 2010, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan terbagi atas 1 saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp100. Pemerintah, melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, memiliki 1 saham Seri A dan memiliki hak suara istimewa, serta memiliki 776.624.999 saham Seri B yang mewakili 14,29% saham Perusahaan. Qtel Asia memiliki sebesar 3.031.528.000 saham Seri B dan 500.528.600 saham Seri B yang mendasari kepemilikan saham di dalam ADS, atau sebesar 3.532.056.600 lembar saham Seri B yang mewakili 65% saham Perusahaan. SKAGEN AS memiliki 7.000.000 saham Seri B dan 270.824.400 saham Seri B yang mendasari kepemilikan saham di dalam ADS, atau sebesar 277.824.400 lembar saham Seri B yang mewakili 5,11% saham Perusahaan. Per tanggal 31 Desember 2010, sebanyak 82.868.450 saham biasa Perusahaan yang mendasari kepemilikan saham Perusahaan di dalam ADS, mewakili secara keseluruhan sekitar 1,52% dari seluruh saham Perusahaan yang ditempatkan, dan 764.559.050 saham Seri B yang mewakili 14,07% saham Perusahaan yang dimiliki oleh publik. Oleh karena saham Seri B dan ADS Perusahaan banyak dimiliki oleh pialang dan lembaga-lembaga lainnya atas nama pemegang efek, kami yakin bahwa jumlah pemegang saham biasa Perusahaan lebih besar.

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi per tanggal 31 Desember 2010 tentang (i) pihak-pihak yang kami ketahui memiliki lebih dari 5,0% dari saham biasa Perusahaan (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *American Depository Shares*) dan (ii) jumlah saham biasa Perusahaan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Nama Kelas	Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki	Persentase dari jumlah kelas saham yang di tempatkan
Seri A	Pemerintah	1	100,00%
Seri B	Qtel Asia[(1)]	3.532.056.600	65,00%
Seri B	Pemerintah	776.624.999	14,29%
Seri B	SKAGEN AS	277.824.400	5,11%
Seri B	Fadzri Sentosa	*	*

* Kurang dari 1,0%
(1) Qtel Asia secara keseluruhan dimiliki oleh Qtel.

Pemerintah

Sebelum dilakukannya penawaran saham perdana Perusahaan di tahun 1994, Pemerintah memiliki 100% saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan. Sejak awal tahun 2002, Pemerintah memiliki 65,0% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan. Berdasarkan kepemilikan saham tersebut, Pemerintah mengendalikan Perusahaan dan memiliki kekuasaan untuk memilih seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan untuk menentukan semua tindakan yang memerlukan persetujuan dari para pemegang saham. Selain itu, program pensiun, dana asuransi dan investor Indonesia lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, membeli sebagian saham biasa pada penawaran saham perdana Perusahaan.

Pada tanggal 16 Mei 2002, Pemerintah menjual 8,1% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan melalui global tender, yang mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi 56,9%. Pada tanggal 20 Desember 2002, Pemerintah menjual 41,9% dari saham biasa yang ditempatkan oleh Perusahaan kepada ICLM (sebagaimana diuraikan di bawah ini), yang kembali mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi 15,0%. Walaupun kepemilikan Pemerintah telah berkurang, Pemerintah tetap memiliki kendali yang signifikan atas Perusahaan melalui kepemilikan satu saham Seri A.

Sebagai pemegang 1 saham Seri A, Pemerintah memiliki hak suara istimewa. Hak-hak dan batasan-batasan material yang berlaku atas saham biasa juga berlaku atas 1 saham Seri A Perusahaan, kecuali bahwa Pemerintah tidak dapat memindahkan hak atas saham Seri A. Selain itu, melalui saham Seri A, Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan tindakan: (i) peningkatan modal Perusahaan tanpa memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu; (ii) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang melibatkan Perusahaan; (iii) pembubaran, likuidasi dan kepailitan; (iv) perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan hak veto pemegang saham Seri A.

ICLM dan Qtel Asia

Pada tanggal 15 Desember 2002, ICLM, yang pada waktu itu merupakan anak perusahaan dari STT, menandatangani perjanjian jual beli saham (Share Purchase Agreement) dan perjanjian antara pemegang saham (Shareholders Agreement) dengan Pemerintah, yang bertindak melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham Perusahaan. STT seluruhnya dimiliki oleh ST Telemedia, yang dimiliki secara tidak langsung oleh Temasek Holdings (Private) Limited. Berdasarkan perjanjian jual beli saham, Pemerintah menjual kepada ICLM sebanyak 434.250.000 saham Seri B yang merupakan 41,9% dari seluruh saham Seri B yang ditempatkan oleh Perusahaan. Setelah dilaksanakannya transaksi jual beli saham ini, Pemerintah memiliki 155.324.999 saham Seri B, yang merupakan 15,0% dari seluruh saham Seri B yang ditempatkan oleh Perusahaan. Per tanggal 4 Mei 2006, ICLM memiliki 2.171.250.000 (39,96%) dari saham Seri B di Perusahaan, Pemerintah memiliki 1 saham Seri A dan 776.624.999 (14,29%) dari saham Seri B di Perusahaan dan ICLS, sebagai afiliasi dari ICLM, memiliki 46.340.000 (0,85%) dari saham Seri B di Perusahaan.

Pada tanggal 17 Januari 2007, ICLM memberitahukan kepada Perusahaan mengenai rencana Qtel untuk melakukan investasi modal sekitar 25,0% di AMH, yang pada saat itu dimiliki sepenuhnya oleh STT, yang mana kami memahami bahwa transaksi berakhir pada tanggal 1 Maret 2007. Setelah penutupan transaksi, STT secara efektif mengendalikan sekitar 75,0% dari AMH, yang secara langsung memiliki ICLM dan ICLS.

Pada tanggal 22 Juni 2008, setelah melakukan negosiasi dengan ST Telemedia, Qtel membeli semua saham yang diterbitkan dan ditempatkan masing-masing dari ICLM dan ICLS. Sesuai dengan perjanjian jual beli saham, Qtel, melalui anak perusahaannya Qatar South East Asia Holding S.P.C., membeli seluruh saham ICLM dan ICLS milik AMH, yang 75,0% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh STT dan 25,0% dimiliki secara tidak langsung oleh Qtel. Setelah akuisisi ini, sesuai dengan persyaratan dalam hukum Indonesia, Qtel melakukan penawaran tender untuk membeli sampai dengan 24,19% dari saham seri B kami (termasuk Saham Seri B yang berdasarkan ADSs) dan saat ini memiliki saham sebesar 65.0% pada Perusahaan. Pada 4 Juni 2009, ICLM menjual kepemilikan sahamnya di Indosat sebesar 39,96% kepada ICLS dan berdasarkan penjualan tersebut, ICLS menjadi pemilik yang sah dari 3.532.056.600 saham yang mewakili 65% saham Indosat. Pada tanggal 11 September 2009, ICLS mengubah namanya menjadi Qatar Telecom Asia (Qtel Asia) Pte. Ltd. Qtel dimiliki 68% oleh pemerintah Qtar.

Qtel menyediakan ahli keuangan, pengadaan, hukum, operasional, pembangunan jaringan dan pemeliharaan, pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan bisnis dan dukungan teknis yang signifikan kepada Perusahaan. Qtel memiliki perwakilan manajemen di dalam Perusahaan dan secara aktif berpartisipasi dalam perumusan strategi bisnis. Kami bermaksud untuk mengambil keuntungan dari sinergi yang sudah ada dan diciptakan oleh keanggotaan dalam kelompok Qtel, dengan demikian meningkatkan posisi kami di pasar Telekomunikasi Indonesia.

Skagen AS

Pada bulan September 2010, kami diinformasikan oleh SKAGEN AS, suatu perusahaan investasi Norwegia dengan sebelas reksadana di bawah manajemennya, yang melalui beberapa pembelian ADSs kami, SKAGEN AS memiliki lebih dari 5% saham kami. Per tanggal 31 Desember 2010, SKAGEN AS memiliki sekitar 5,11% saham kami.

Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Kami adalah pihak dari beberapa perjanjian dan mengadakan transaksi-transaksi dengan sejumlah perusahaan yang terkait dengan kami, termasuk perusahaan usaha patungan, koperasi dan yayasan, dan juga dengan pemegang saham pengendali, yaitu Pemerintah dan Qtel Asia, dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan atau dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah dan Qtel Asia. Beberapa transaksi utama meliputi kas dan setara dengan kas sebesar Rp1.615,6 miliar yang disimpan di bank-bank milik pemerintah per tanggal 31 Desember 2010, pendapatan usaha dari Telkom mencapai Rp587,4 miliar dan biaya jasa kepada Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi sebesar Rp1.939,4 miliar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tingkat bunga sehubungan dengan hutang tertunggak Perusahaan, lihat Butir 5: Tinjauan dan Prospek Usaha dan Keuangan—Hutang Pokok." Selain itu, Perusahaan juga merupakan pihak dari berbagai perjanjian dengan badan usaha milik negara, seperti perusahaan asuransi, bank dan berbagai pemasok. Sebagai bahan diskusi untuk beberapa transaksi signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dapat dilihat di Catatan 25 dari Laporan Keuangan Konsolidasi kami yang dimasukkan di dalam laporan tahunan ini.

Butir 8: INFORMASI KEUANGAN

Laporan Keuangan Konsolidasi dan Informasi Keuangan Lainnya

Lihat "Butir 17: Laporan Keuangan" untuk laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan tahunan ini. Tidak ada perubahan signifikan yang terjadi sejak tanggal laporan keuangan Perusahaan tersebut.

Proses Perkara Hukum

Dari waktu ke waktu, kami terlibat di dalam proses perkara hukum berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan bisnis Perusahaan. Saat ini, kami tidak terlibat, dan belum terlibat di dalam, proses perkara pengadilan ataupun arbitrase yang menurut kami dapat memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan atau hasil usaha kami selain dari yang telah diungkapkan di dalam laporan tahunan ini.

Pada tanggal 5 Mei 2004, Perusahaan menerima putusan Mahkamah Agung No. 1610K/PDT/2003 yang memenangkan Primer Koperasi Pegawai Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata (dikenal sebagai Primkopparseni), berkenaan dengan perselisihan transaksi valuta asing. Putusan Mahkamah Agung mengharuskan kami untuk membayar Rp13,7 miliar ditambah 6,0% bunga per tahun sejak tanggal 16 Februari 1998 sampai dengan tanggal pelunasan dan pada tanggal 22 Desember 2004, Perusahaan telah memenuhi putusan dengan melakukan pembayaran sebesar Rp19,3 miliar kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lebih lanjut, pada bulan Januari 2005, kami mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal 20 April 2011, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan untuk peninjauan kembali tersebut.

Untuk menutup pengeluaran yang telah dibayarkan kepada Primkopparseni, Perusahaan kemudian mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut bahwa rapat anggota Primkopparseni dimana di dalamnya para anggota memutuskan untuk memperkarakan Perusahaan adalah tidak sah. Pada tanggal 19 Januari 2005, Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa rapat anggota tersebut adalah tidak sah, tetapi tidak mewajibkan Primkopparseni untuk memberikan kompensasi kepada Perusahaan, telah mendorong Perusahaan dan Primkopparseni untuk mengajukan banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 1 Pebruari 2005. Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusannya No. 483 / PDT / 2005 / PT.DKI memenangkan kami dengan mengeluarkan putusan bahwa rapat tersebut tidak sah, tetapi di sisi lain, tidak mewajibkan Primkopparseni untuk memberikan kompensasi kepada kami. Kami dan Primkopparseni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk memohon ganti rugi atas biaya hukum dan atas pencemaran nama baik kami, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan kami pada tanggal 13 Agustus 2008 melalui putusannya No. 229/K/PDT/2008. Dikarenakan kami tidak mengambil tindakan hukum lebih lanjut terkait dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Schedule TO yang diajukan oleh Qtel tertanggal 20 Januari 2009 dan disampaikan kepada SEC pada tanggal 20 Januari 2009, pada 19 November 2007, KPPU memutuskan dan menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("Temasek"), bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. ("ST Telemedia"), STT, Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd. ("AMHC"), AMH, ICLM, ICLS, Singapore Telecomunications Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("Singtel"), dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("SingTel Mobile") telah melanggar hukum persaingan usaha Indonesia dan menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan STT, AMHC, AMH, ICLM, ICLS dan SingTel ("Entitas Afiliasi Temasek") untuk melepaskan kepemilikan sahamnya di Telkomsel atau Indosat dalam waktu dua tahun, efektif sejak tanggal putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hukum persaingan usaha Indonesia menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50,0% (lima puluh persen) pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu. Temasek dan para pihak lainnya yang terkait telah mengajukan banding atas putusan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan dan membenarkan keputusan KPPU, dan menghukum Temasek dan Entitas Afiliasi Temasek untuk melepaskan kepemilikannya di Telkomsel atau Indosat dalam jangka waktu dua belas bulan setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 10 September 2008, Mahkamah Agung menolak kasasi dan membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi sebagai berikut: (1) menyatakan Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang No.5/1999; (2) menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek untuk menghentikan kepemilikan silang saham mereka di Telkomsel dan Indosat dengan mengalihkan sahamnya di Telkomsel atau Indosat, dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau mengurangi 50,0% kepemilikan sahamnya di masing-masing Telkomsel dan Indosat tidak lebih dari dua belas bulan dari tanggal keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; (3) menghukum Temasek, secara bersama-sama dengan Entitas Afiliasi Temasek untuk menetapkan perusahaan dimana mereka akan melepaskan saham-saham tersebut dan melepaskan hak suara dan hak-hak untuk mengangkat direktur dan komisaris baik di Telkomsel maupun Indosat sampai dengan dilakukannya pelepasan seluruh saham yang dimilikinya atau dilakukannya penurunan kepemilikan saham sampai dengan 50,0% saham mereka di masing-masing Telkomsel dan Indosat sebagaimana disebutkan dalam butir 2 di atas. Pada 22 Juni 2008, Qtel membeli semua 40,81% kepemilikan saham Entitas Afiliasi Temasek yang ada di Indosat. Temasek dan STT, AMHC, AMH, Singtel dan ICLM serta ICLS mengajukan permohonan peninjauan kembali, tetapi berdasarkan website resmi Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak berdasarkan putusan No. Reg. 128 PK/PDT.SUS/2009 tertanggal 5 Mei 2010. Dengan demikian, Temasek dan STT, AMHC, AMH, Singtel dan ICLM serta ICLS berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp15 miliar kepada KPPU.

Runtutan gugatan *class action* juga diajukan terhadap kami dan Telkomsel di Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Tangerang sehubungan dengan kepemilikan silang saham Temasek sebelumnya di Indosat dan Telkomsel, yang dituduh mengakibatkan penetapan harga jasa telekomunikasi yang tinggi yang merugikan masyarakat. Pada tanggal 31 Oktober 2007, sekelompok pelanggan telepon selular di Indonesia mengajukan gugatan di

Pengadilan Negeri di Bekasi menuntut di antaranya ganti rugi sebesar Rp1.231,7 miliar sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Kami juga menjadi pihak tergugat dalam *class action* yang sama yang diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2007 ("*Class Action* Tangerang"). Penggugat mewakili para pelanggan kami dan pelanggan dari Telkomsel dan XL di seluruh Indonesia yang menggunakan jasa-jasa Simpati, Mentari, Kartu As, IM3, Kartu Halo, Matrix, Jempol, Xplor dan Bebas dan menuntut kompensasi di antaranya sebesar Rp30.808,7 miliar. Pada tanggal 22 April 2008 kami menerima pemberitahuan bahwa kami, Temasek Holdings, ST Telemedia, STT, AMH, ICLM, ICLS. SingTel, SingTel Mobile, Telkomsel, Telkom dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah menjadi tergugat dalam gugatan class action yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("*Class Action* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"). Para penggugat mewakili pelanggan Telkomsel, Indosat dan XL dan telah mengajukan gugatan yang sama dengan gugatan *class action* di Tangerang. Para penggugat meminta di antaranya kompensasi sampai dengan Rp30.808,7 miliar. Pada Juli 2008, kami memperoleh pemberitahuan bahwa gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Bekasi telah dicabut oleh Penggugat dan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah digabungkan dengan *Class Action* Tangerang. Gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Tangerang ditunda dengan putusan penundaan hakim, dikarenakan menunggu putusan banding ke Mahkamah Agung oleh Penggugat dari gugatan *class action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 27 Maret 2009, kami memperoleh informasi bahwa Mahkamah Agung pada tanggal 21 Januari 2009 telah mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan gugatan *class action*. Pada tanggal 22 Desember 2009, Indosat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menyebutkan bahwa selama tidak ada bukti yang menunjukkan kerugian pelanggan selama jangka waktu kepemilikan STT. Di waktu yang sama, Indosat juga mempersiapkan eksepsi atas ketidakwenangan wakil dari perwakilan kelompok dan juga jawaban atas gugatan. Pada tanggal 5 Januari 2010, para tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi sehubungan dengan *legal standing* dari wakil kelompok berdasarkan ketentuan hukum acara gugatan perwakilan kelompok. Pada tanggal 27 Januari 2010, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan *Class action* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima dan memerintahkan para penggugat dan tergugat untuk menghentikan kasus dikarenakan (i) penggugat menolak untuk membuktikan legal standing mereka dan (ii) dua anggota dari penggugat kolektif tidak memenuhi kualifikasi sebagai wakil dalam gugatan perwakilan kelompok. Jangka waktu untuk mengajukan banding telah lewat sejak tanggal 18 Maret 2010, keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2010 telah menjadi putusan akhir dan mengikat.

Pada tanggal 22 Maret 2010, sidang *Class Action* Tangerang berlanjut, namun para penggugat tidak hadir. Pada tanggal 3 Mei 2010, Perusahaan mengajukan eksepsi dan pada tanggal 24 Mei 2010 majelis hakim memutuskan bahwa gugatan *Class Action* di Pengadilan Negeri Tangerang tidak dapat diterima karena ketidakseriusan penggugat dalam mengajukan gugatan dan penggugat juga gagal untuk membuktikan pemenuhan syarat sebagai perwakilan dari *Class Action*. Dikarenakan batas waktu untuk mengajukan banding telah lewat sejak tanggal 21 Juli 2010, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 24 Mei 2010 menjadi berkekuatan hukum tetap.

Selain yang telah disebutkan diatas, kami telah menerima surat dari KPPU No. 398/AK/KTPP/XI/2007, tanggal 15 November 2007 sehubungan dengan kemungkinan pelanggaran atas Pasal 5 dari Undang-Undang No. 5/1999 tentang penetapan harga SMS yang dilakukan oleh operator telekomunikasi (pokok perkara nomor 26/KPPU-L/2007). Pada tanggal 18 Juni 2008, KPPU menetapkan bahwa hanya Telkom, Telkomsel, XL, Bakrie Telecom, Mobile-8 dan Smart Telecom yang secara bersama melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5/ 1999. Telkomsel mengajukan keberatan dari putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sementara Mobile-8 mengajukan keberatan dari putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana XL, Telkomsel, Indosat, Telkom, Hutchison, Bakrie Telecom, Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Selular dipanggil sebagai turut termohon.

Pada pemeriksaan pajak terhadap pembayaran pajak kami untuk tahun 2004 dan 2005 oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara ("KPP BUMN"), pada tanggal 4 Desember 2006 dan 27 Maret 2007, kami diberitahu bahwa pemotongan pajak penghasilan untuk bunga pinjaman antar perusahaan (*intercompany loans*) yang dibayarkan kepada Indosat Finance Company B.V. dan Indosat International Finance Company B.V. sehubungan dengan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2010 Perusahaan dengan jumlah pokok sebesar US$300,0 juta dan *Guaranteed Notes* Jatuh Tempo 2012

dengan jumlah pokok sebesar US$250,0 juta adalah 20,0%, bukan 10,0%. Berdasarkan opini dari Penasihat Pajak kami dan pemahaman kami atas hukum Indonesia, kami berpendapat bahwa perhitungan kami pertama kali atas pemotongan pajak adalah benar dan kami telah mengajukan keberatan kepada KPP BUMN terhadap pemeriksaan tersebut. Pada tanggal 18 Februari 2008 dan 4 Juni 2008, kami menerima Surat Keputusan dari Direktorat Pajak yang menolak keberatan kami terhadap pembayaran pajak tahun 2004 dan 2005, masing-masing sebesar Rp60.493 juta dan Rp82.126 juta. Pada tanggal 14 Mei 2008, kami mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak tentang keberatan Perusahaan terhadap revisi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun pajak 2004. Pada tanggal 25 Mei 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menolak keberatan Perusahaan terhadap revisi pajak penghasilan pasal 26 untuk tahun 2004. Perusahaan membebankan pembetulan pajak ke dalam usaha periode berjalan, yang ditunjukkan sebagai bagian dari "Pendapatan (beban) lain-lain – Lain-Lain – Bersih".

Kami juga mempermasalahkan kelebihan pembayaran pajak untuk tahun buku 2005 kepada Kantor Pajak. Pada tanggal 27 Maret 2007, kami menerima surat dari Kantor Pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyetujui pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan di tahun 2005 sebesar Rp135.766 juta dimana jumlah tersebut lebih rendah daripada Rp176.645 juta yang kami ketahui. Kami mengajukan keberatan kepada Kantor Pajak pada tanggal 22 Juni 2007 dan menggugat adanya perbedaan jumlah yang bernilai sampai Rp40.879 juta. Pada tanggal 27 Mei 2008, kami menerima Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menerima sebagian keberatan kami, tetapi hanya berjumlah sampai Rp2.725 juta. Pada tanggal 21 Agustus 2008, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai keberatan Perusahaan atas sisa pajak penghasilan badan tahun 2005. Pada tanggal 29 Oktober 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Pengadilan Pajak yang menerima keberatan Perusahaan terhadap revisi pajak penghasilan badan untuk tahun 2005 sebesar Rp38.155 juta, yang dikompensasikan dengan kurang bayar pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun 2008 dan 2009 berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang diterima oleh Perusahaan pada tanggal 17 September 2010.

Pada tanggal 24 Desember 2008, kami menerima Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang meningkatkan jumlah lebih bayar sebesar Rp84.650 juta, dalam surat kelebihan pembayaran pajak untuk tahun pajak 2004, dimana jumlah tersebut lebih rendah daripada jumlah yang dinyatakan dalam Surat Keputusan sebelumnya yang kami terima pada tanggal 4 Juli 2008. Pada tanggal 21 Januari 2009, kami telah mengajukan banding terhadap perbedaan jumlah kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2004. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 17 November 2009, Pengadilan Pajak telah membatalkan Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-539/WPJ.19/BD.05/2008, tanggal 24 Desember 2008. Pada tanggal 17 Maret 2010, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan putusan yang mendukung kedudukan Perusahaan, yang memberitahukan bahwa kelebihan bayar pajak untuk fiskal tahun 2004 seharusnya sebesar Rp126.403 juta bukanlah Rp84.650 juta, yang mana memberikan hak kepada Perusahaan untuk mendapatkan pengembalian dari perbedaan jumlah tersebut, dengan jumlah yang bernilai sampai Rp41.753 juta. Selanjutnya Perusahaan menerima pembayaran dari pengembalian kelebihan bayar pajak sebesar Rp41.753 juta dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 13 April 2010.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dari DGT untuk pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002 sebesar Rp105.809 juta (termasuk denda dan bunga). Perusahaan menerima suatu bagian dari revisi terhadap pajak penghasilan badan tahun 2002 sebesar Rp2.646 juta yang dibebankan ke dalam usaha periode berjalan tahun 2009. Berdasarkan Hukum Perpajakan Indonesia, wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak kurang bayar dengan jumlah sebagaimana dicantumkan dalam SKPKB dalam waktu satu bulan sejak tanggal SKPKB. Wajib pajak dapat menuntut kembali pajak yang dibayarkan melalui proses keberatan atau banding. Pada tanggal 28 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak mengenai sisa revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun 2002. Pada tanggal 15 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-357/WPJ.19/BD.05/2010 dari DGT yang menolak keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002. Pada tanggal 14 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan badan Satelindo untuk tahun pajak 2002. Sampai dengan tanggal 20 April 2011, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Pengadilan Pajak atas banding tersebut.

Pada tanggal 8 Juni 2009, Perusahaan juga menerima SKPKB dari DGT untuk pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003, masing-masing sebesar Rp51.546 juta dan Rp40.307 juta (termasuk denda dan bunga). Pada tanggal 27 Agustus 2009, Perusahaan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Pajak atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Pada tanggal 16 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-367/WPJ.19/BD.05/2010 dan KEP-368/WPJ.19/BD.05/2010 dari DGT yang menolak keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Pada tanggal 12 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai keberatan Perusahaan atas revisi pajak penghasilan pasal 26 Satelindo untuk tahun 2002 dan 2003. Sampai dengan tanggal 20 April 2011, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Pengadilan Pajak atas banding tersebut.

Pada tanggal 7 September 2009, Perusahaan menerima Surat Keputusan No. KEP-335/WPJ.19/BD.05/2009 dari DGT yang menolak keberatan Perusahaan atas sisa revisi pajak penghasilan badan untuk tahun 2006. Pada tanggal 2 Desember 2009, Perseroan mengajukan surat banding kepada Pengadilan Pajak mengenai sisa revisi pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun 2006. Sampai dengan tanggal 20 April 2011, Perusahaan belum menerima keputusan apapun dari Pengadilan Pajak atas banding tersebut.

Pada tanggal 17 September 2010, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak dari DGT atas pajak kurang bayar untuk pajak penghasilan pasal 26 Perusahaan untuk tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp80.018 juta (termasuk bunga). Pada tanggal 13 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat pembatalan kepada Kantor Pajak mengenai Surat Tagihan Pajak tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 16 November 2010, Perusahaan diwajibkan untuk membayar suatu bagian tertentu dari Surat Tagihan Pajak ini dengan menggunakan tuntutan kelebihan bayar pajak yang telah disetujui atas Pajak Penghasilan Perusahaan untuk tahun pajak 2005 sebesar Rp38.155 juta. Pada tanggal 7 Januari 2011, Perusahaan membayar sisa sebesar Rp41.863 juta.

Kami tidak terlibat dalam perkara-perkara material lainnya, termasuk perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara atau arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ataupun perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan secara material.

Kebijakan Dividen

Para pemegang saham kami menetapkan pembagian dividen di dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi kami. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2008, 2009 dan 2010, pemegang saham kami mengumumkan dividen tunai final sebesar 50% dari laba bersih untuk masing-masing tahun yang berakhir 31 Desember 2007, 2008 dan 2009. Kami bermaksud untuk terus membayar dividen dalam jumlah tersebut untuk memenuhi tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan harapan investor.

Butir 9: PENAWARAN DAN PENCATATAN

Penjelasan tentang Penawaran dan Pencatatan

Tabel di bawah ini memperlihatkan kutipan laporan harga tertinggi dan terendah untuk periode tertentu dari saham biasa kami di Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Seluruh harga yang tercantum sebelum tanggal 3 Desember 2007 adalah berasal dari BEJ, sedangkan seluruh harga yang tercantum setelah tanggal 3 Desember 2007 adalah berasal dari BEI, setelah BEI mulai beroperasi:

	Harga per saham	
	Tertinggi	Terendah
	(dalam Rupiah)	
Tahunan		
2006	6.750	4.050
2007	9.900	5.600
2008	8.750	3.950
2009	5.950	4.200
2010	6.300	4.400
Periode Triwulan		
Triwulan Pertama 2009	5.900	4.200
Triwulan Kedua 2009	5.950	4.850
Triwulan Ketiga 2009	5.700	5.050
Triwulan Keempat 2009	5.700	4.600
Triwulan Pertama 2010	6.200	4.700
Triwulan Kedua 2010	6.150	4.775
Triwulan Ketiga 2010	5.500	4.400
Triwulan Keempat 2010	6.300	5.100
Bulan		
Oktober 2010	6.300	5.600
Nopember 2010	6.100	5.400
Desember 2010	5.850	5.100
Januari 2011	5.650	4.875
Februari 2011	5.050	4.800
Maret 2011	5.300	4.975
April 2011 (sampai dengan 20 April 2011)	5.450	5.250

Tabel di bawah ini memperlihatkan kutipan laporan harga tertinggi dan terendah untuk ADS, untuk periode tertentu, dari ADS di New York Stock Exchange atau NYSE.

	Harga per ADS	
	Tertinggi	Terendah
	(dalam USD)	
Periode Tahunan		
2006	38 71/128	21 13/16
2007	51 13/16	30 13/64
2008	47 1/64	16
2009	30 47/128	16 189/256
2010	35 37/64	24 7/32
Periode Triwulan		
Triwulan Pertama	26 1/4	16 95/128
Triwulan Kedua 2009	26 83/128	20 127/128
Triwulan Ketiga 2009	28 45/128	24 37/128
Triwulan Keempat 2009	30 47/128	24 9/32
Triwulan Pertama 2010	33 123/128	25 97/256
Triwulan Kedua 2010	34 3/16	25 31/32
Triwulan Ketiga 2010	30 59/128	24 7/32
Triwulan Keempat 201064	35 37/64	28 1/64
Periode Bulanan		
Oktober 2010	35 37/64	30 29/32
Nopember 2010	33 91/128	30 39/128
Desember 2010	32 1/4	28 1/64
Januari 2011	31 1/64	27 9/64
Februari 2011	28 41/128	27 3/64
Maret 2011	30 33/128	27 37/64
April 2011 (sampai dengan 20 April 2011	31 5/64	30 5/64

Pasar

Saham biasa kami tercatat di BEI. BEI merupakan bursa perdagangan non-Amerika Serikat untuk saham biasa kami. Sebagai tambahan, tiap lembar ADS kami mewakili 50 saham biasa kami, dan tercatat di NYSE. Setelah pemecahan saham, yang telah efektif pada 10 Maret 2004, tiap ADS mewakili 50 saham Seri B (sebagaimana dibandingkan dengan 10 saham Seri B yang sebelumnya diwakili).

Pasar Modal Indonesia

Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi BEI. BEI mulai beroperasi pada tanggal 3 Desember 2007, dan pada tahun 2007, BEI memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2.539,041 miliar, dimana Rp1.982 miliar di antaranya berasal dari saham, Rp79.065 miliar dan 105 juta Dolar AS berasal dari obligasi perusahaan dan Rp477 triliun berasal dari obligasi pemerintah.

Tinjauan tentang BEI

Saat ini, ada dua sesi perdagangan efek harian untuk pasar reguler dan pasar negosiasi dari Senin sampai dengan Kamis, yaitu pukul 9:30 sampai dengan pukul 12:00, dan pukul 13:30 sampai dengan pukul 16:00. Sementara itu, ada dua sesi perdagangan untuk pasar reguler dan pasar negosiasi di hari Jumat, dari pukul 9:30 sampai dengan pukul 11:30 dan dari pukul 14:00 sampai dengan pukul 16:00. Hanya terdapat satu sesi perdagangan untuk pasar tunai dari hari Senin sampai dengan Kamis, yaitu pukul 9:30 sampai dengan pukul 12:00, dan di hari Jumat, dari pukul 9:30 sampai dengan pukul 11:30. Perdagangan di BEI berlangsung berdasarkan order-driven market system. Para investor harus menghubungi perusahaan

pialang atau anggota BEI, yang akan menjalankan pesanan mereka melalui sistem perdagangan BEI. Perdagangan efek di BEI hanya dapat dilakukan oleh anggota BEI yang terdaftar sebagai anggota PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Perusahaan pialang juga dapat melakukan transaksi jual beli efek untuk dirinya sendiri. Tidak ada batasan kepemilikan saham oleh investor asing atau institusi asing, baik dalam bentuk penyertaan modal langsung maupun melalui transaksi perdagangan di BEI, kecuali untuk bank, yang hanya dapat dimiliki asing sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99,0%.

Perdagangan saham dibedakan menjadi tiga segmen pasar: pasar reguler, pasar negosiasi dan pasar tunai. Pasar reguler adalah mekanisme perdagangan saham dengan menggunakan satuan lot di pasar lelang yang berlangsung terus-menerus selama jam bursa. Sehubungan dengan perdagangan saham, satu lot saham terdiri dari 500 lembar saham. Fraksi harga dibatasi, yaitu sebagai berikut: (i) apabila harga saham berada di bawah Rp200, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp1 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp10; (ii) apabila harga saham sama dengan Rp200 atau lebih, tetapi kurang dari Rp500, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp5 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp50; (iii) apabila harga saham sama dengan Rp500 atau lebih, tetapi kurang dari Rp2.000, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp10 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp100; (iv) apabila harga saham sama dengan Rp2.000 atau lebih, tetapi kurang dari Rp5.000, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp25 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp250; and (v) apabila harga saham sama dengan Rp5.000 atau lebih, maka ditetapkan fraksi sebesar Rp50 dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp500. Pesanan-pesanan diproses dengan komputer yang akan melakukan matching antara "penawaran" dan "permintaan" yang ditempatkan sesuai dengan prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga memprioritaskan pesanan pembelian dengan harga terendah atau pesanan penjualan dengan harga tertinggi. Apabila pesanan pembelian atau penjualan dilakukan pada harga yang sama, prioritas diberikan pada pesanan pembelian atau penjualan yang dilakukan pertama (prioritas waktu).

Perdagangan efek di pasar negosiasi dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem lot saham dan aturan tahapan harga. Anggota BEI dapat mengumumkan pesanan penjualan atau pembelian melalui sistem perdagangan BEI dan dapat mengubah pesanan mereka berdasarkan negosiasi dengan anggota lainnya. Harga akhir terbentuk berdasarkan kesepakatan, tetapi disarankan untuk berpatokan pada harga saham di pasar reguler.

Transaksi-transaksi di pasar reguler dan pasar non-reguler pada BEI harus diselesaikan selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga setelah dilakukannya transaksi. Apabila anggota bursa melanggar ketentuan waktu penyelesaian transaksi, maka anggota bursa tersebut diwajibkan untuk membayar 125,0% dari harga tertinggi untuk efek yang sama pada hari perdagangan yang sama.

Direksi BEI dapat membatalkan suatu transaksi apabila terbukti adanya unsur penipuan, manipulasi atau penggunaan informasi orang dalam. Direksi dapat menghentikan perdagangan efek sementara apabila terdapat indikasi adanya transaksi tipuan atau upaya manipulasi harga saham, informasi yang menyesatkan, penggunaan informasi orang dalam, surat berharga palsu atau surat berharga yang diblokir dari perdagangan, atau kejadian-kejadian penting lainnya.

Anggota BEI dapat mengenakan biaya untuk jasa-jasanya berdasarkan suatu perjanjian dengan para nasabahnya. Ketika melakukan transaksi saham di BEI, anggota bursa diwajibkan membayar biaya transaksi sebesar 0,03% dari nilai transaksi kumulatif untuk setiap bulan ditambah 0,01% untuk transaksi di pasar tunai dan reguler yang dijamin oleh KPEI (dengan ketentuan biaya transaksi minimum sebesar Rp2.000.000). Komisi dan biaya transaksi tidak termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10,0% dan pajak transaksi sebesar 0,1% yang dikenakan atas nilai kumulatif dari penjualan saham.

Pasar modal Indonesia umumnya kurang likuid dibandingkan dengan di negara-negara yang memiliki pasar modal yang lebih berkembang. Tidak likuidnya pasar modal ini terutama untuk efek dalam jumlah besar. Selain itu, harga saham di pasar modal Indonesia biasanya lebih bergejolak dibandingkan pasar modal di negara lainnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat menjamin bahwa seorang pemegang saham biasa akan dapat melepaskan saham biasanya dengan harga atau pada waktu

dimana pemegang saham tersebut dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid atau tidak sama sekali. Selain itu, kami tidak dapat menjamin bahwa seorang pemegang saham biasa akan dapat melepaskan saham biasanya dengan atau di atas harga beli dari pemegang saham yang bersangkutan.

Perdagangan di NYSE

Bank of New York berfungsi sebagai depositary atau Depositary, sehubungan dengan ADS Perusahaan, yang diperdagangkan di NYSE. Setelah dilakukannya pemecahan saham, yang berlaku efektif pada tanggal 10 Maret 2004, masing-masing ADS mewakili 50 saham biasa Perusahaan (dibandingkan sepuluh saham Seri B yang sebelumnya diwakili). Per tanggal 31 Desember 2010, 17.084.429 ADSs yang merupakan 15,72% dari saham biasa kami, telah ditempatkan di Amerika Serikat dan terdapat 50 pemegang ADSs kami yang tercatat.

Butir 10: INFORMASI TAMBAHAN

Uraian tentang Anggaran Dasar dan Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2010, modal dasar Indosat adalah sebesar Rp2.000.000.000.000, terbagi menjadi 20.000.000.000 saham yang terdiri dari satu saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100. Dari modal dasar Perusahaan, 5.433.933.500 saham telah ditempatkan dan disetor penuh secara tunai, terdiri dari satu saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B, atau dengan total nilai nominal sebesar Rp543.393.350.000 yang dimiliki oleh:

a. Pemerintah Republik Indonesia, satu saham Seri A dan 776.624.999 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp77.662.500.000;
b. Qtel Asia, 3.532.056.600 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp353.205.660.000; dan
c. Publik, 1.125.251.900 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp112.525.190.000.

Pada tanggal 8 Maret 2004, kami mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui pemecahan nilai nominal saham Seri A dan saham Seri B dari Rp500 menjadi Rp100 per lembar saham, yang meningkatkan jumlah saham dalam modal dasar kami menjadi 20.000.000.000 saham dan saham yang ditempatkan menjadi 5.177.500.000 saham. Setelah dilakukannya pemecahan saham, modal dasar Indosat adalah sebesar Rp2.000.000.000.000, terbagi menjadi 20.000.000.000 saham yang terdiri dari satu saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100. Dari modal dasar kami, 5.177.500.000 saham telah ditempatkan dan disetor penuh secara tunai, terdiri dari satu saham Seri A dan 5.177.499.999 saham Seri B, atau dengan total nilai nominal sebesar Rp517.750.000.000 yang dimiliki oleh:

a. Pemerintah Republik Indonesia, satu saham Seri A dan 776.624.999 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp77.662.499.900;
b. ICLM, 2.171.250.000 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp217.125.000.000; dan
c. Publik, 2.229.625.000 saham Seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp222.962.500.000.

Perubahan Anggaran Dasar Indosat, sehubungan dengan adanya pemecahan saham, telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor C- 05582 HT.01.04.TH.2004, tanggal 8 Maret 2004. Perubahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah nomor 0540/RUB.09.05/III/2004, tanggal 9 Maret 2004. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berubah nama menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada tanggal 28 Januari 2010, Indosat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui, antara lain, perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Indosat mengenai maksud dan tujuan Indosat. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam and LK No. IX.J.1.

Anggaran Dasar Perusahaan, atau Anggaran Dasar, menyatakan bahwa setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal harus memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen dalam rapat umum pemegang saham yang khusus diadakan untuk itu.

Masing-masing Direksi menerima bonus tahunan serta insentif lainnya apabila kami dapat melampaui target keuangan dan operasional tertentu, dimana besarnya akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan. Bonus dianggarkan setiap tahunnya dan dibuat berdasarkan rekomendasi Direksi, yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada pemegang saham Perseroan. Masing-masing Komisaris diberikan honorarium bulanan dan beberapa tunjangan lainnya, yang besarnya ditentukan oleh pemegang saham di dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perusahaan.

Direksi kami bertanggung jawab untuk memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mengendalikan, mempertahankan dan mengelola aset Perusahaan. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, Direksi diberi wewenang untuk memastikan agar Perusahaan dapat memperoleh pinjaman dana sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur di dalam Anggaran Dasar. Kekuasaan Direksi untuk melakukan pinjaman hanya dapat diubah dengan cara mengubah Anggaran Dasar. Anggaran Dasar tidak memuat ketentuan tentang usia pensiun tertentu dari Direksi atau untuk memiliki saham dalam batasan tertentu.

Saham Biasa

Berikut ini adalah ringkasan hak-hak dan batasan-batasan material berkenaan dengan saham biasa Indosat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, yang diubah pada tanggal 28 Januari 2010 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2010. Penjelasan yang diberikan di sini bukan merupakan penjelasan yang lengkap dan karena itu harus mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perseroan terbatas, yang dalam beberapa hal dapat berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Anggaran Dasar.

Semua saham biasa adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar di dalam daftar pemegang saham Indosat. Direksi menyimpan daftar pemegang saham Indosat, dan Indosat harus memperlakukan pihak yang namanya tercantum di dalam daftar pemegang saham tersebut sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum berkenaan dengan saham biasa tersebut.

Segala pemindahan hak atas saham biasa harus dibuktikan dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan atau berdasarkan surat-surat lainnya, yang memberikan bukti yang cukup menurut pendapat Direksi. Pemindahan hak atas saham biasa berlaku hanya setelah pemindahan hak tersebut didaftarkan di daftar pemegang saham. Pihak yang memindahkan saham biasa akan diakui sebagai pemilik saham biasa tersebut sampai dengan nama pihak yang menerima pemindahan telah dicatatkan ke dalam daftar pemegang saham.

Para pemegang saham biasa berhak atas hak memesan efek terlebih dahulu/pre-emptive right apabila Indosat mengeluarkan saham biasa, obligasi konversi, waran atau efek serupa. Hak memesan efek terlebih dahulu dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan memperhatikan batasan-batasan yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap pengeluaran hak memesan efek terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari rapat umum pemegang saham Indosat dan rencana tersebut harus diumumkan oleh Direksi di dalam dua surat kabar harian (satu berbahasa Inggris dan yang lainnya berbahasa Indonesia). Apabila para pemegang saham biasa tidak menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu dalam waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang terkait, maka Direksi dapat mengeluarkan saham biasa,

obligasi konversi, waran atau efek serupa tersebut kepada pihak ketiga dengan harga dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sekurang-kurangnya sama dengan apa yang ditawarkan sebelumnya kepada para pemegang saham yang ada dan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

Modal dasar Indosat hanya dapat ditingkatkan atau diturunkan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan melalui perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar berlaku efektif hanya setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai pengecualian dari ketentuan-ketentuan di atas, Indosat dapat mengeluarkan saham baru tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, dengan ketentuan tindakan tersebut memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dimana pemegang saham Seri A hadir di dalam rapat dan menyetujui keputusan. Penerbitan saham ini dapat dilakukan sepanjang saham yang diterbitkan terbatas jumlahnya dan diterbitkan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan pasar modal Indonesia atau berdasarkan pengecualian yang diperoleh oleh Indosat, dan saham tersebut dapat dijual oleh Indosat kepada pihak manapun dengan harga dan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan harga saham tidak lebih rendah dari harga nominal. Tidak ada batasan mengenai hak para investor asing untuk memiliki saham biasa Perusahaan jika saham tersebut diperoleh melalui pasar modal.

Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku secara mutatis mutandis dalam hal Indosat mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau surat berharga lainnya yang serupa, dengan ketentuan bahwa setiap saham baru yang dikeluarkan sebagai akibat penerbitan obligasi konversi dan/atau waran atau efek lainnya yang serupa akan terbatas jumlahnya dan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan pasar modal Indonesia atau berdasarkan pengecualian yang diperoleh oleh Indosat.

Saham Seri A

Hak-hak dan batasan-batasan yang bersifat material yang berlaku atas saham biasa juga berlaku atas satu saham Seri A, kecuali Pemerintah tidak dapat memindahkan hak atas saham Seri A dan Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan: (i) perubahan maksud dan tujuan Perusahaan; (ii) peningkatan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; (iii) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang melibatkan Perusahaan; (iv) perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan hak veto pemegang saham Seri A; dan (v) pembubaran, kepailitan dan likuidasi terhadap Perusahaan.

Tujuan dan Jangka Waktu

Menurut Pasal 3 dari Anggaran Dasar kami, sebagaimana diubah pada tanggal 28 Januari 2010, untuk mematuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, maksud, tujuan dan kegiatan usaha Indosat adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa teleponi dasar, jasa multimedia, jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, jasa akses internet, jaringan telekomunikasi bergerak dan jaringan telekomunikasi tetap; dan
   b. menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi serta informatika dan/atau teknologi konvergensi.

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perusahaan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
   a. Merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan, serta memelihara sarana/fasilitas termasuk sumber daya untuk mendukung usaha Perusahaan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi;
   b. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pengembangan, pemasaran serta penjualan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang diselenggarakan Perusahaan), termasuk penelitian, layanan pelanggan, penyelenggaraan pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
   c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan/atau terkait dengan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi elektronis, penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, konten serta jasa pengelolaan telekomunikasi.

Perusahaan didirikan pada tanggal 10 November 1967 tanpa batas waktu pendirian.

Hak Suara

Setiap saham biasa memberikan hak bagi pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk memberikan satu suara pada setiap rapat umum pemegang saham Indosat. Pemegang saham menunjuk anggota Direksi untuk suatu periode yang dimulai pada tanggal rapat umum pemegang saham yang menunjuk mereka dan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan kelima setelah tanggal penunjukan mereka.

Rapat umum pemegang saham tahunan harus diadakan, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni setiap tahun. Pada rapat umum pemegang saham tahunan, Direksi wajib (i) melaporkan perihal jalannya Indosat dan administrasi keuangan dari tahun buku yang baru berlalu; (ii) menyampaikan neraca dan perhitungan laporan rugi laba yang sudah diaudit untuk disetujui dan disahkan oleh rapat umum pemegang saham; (iii) menentukan rencana penggunaan keuntungan dan besarnya dividen yang akan dibayarkan pada tahun keuangan yang terkait; (iv) mengajukan penunjukkan akuntan; dan (v) mengajukan hal-hal lainnya yang perlu dibahas dalam rapat. Selain itu, Dewan Komisaris juga harus melaporkan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahun buku yang baru berlalu sebagaimana dicantumkan dalam laporan tahunan. Semua bahan yang diuraikan dalam butir (i) sampai dengan (v) tersedia di kantor Indosat untuk diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal panggilan rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan tanggal rapat umum pemegang saham tahunan. Usul-usul yang disampaikan secara sah oleh para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10,0% dari saham yang ditempatkan oleh Indosat dapat dimasukkan ke dalam agenda rapat tersebut, dengan ketentuan usul-usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 21 hari sebelum rapat tersebut.

Direksi atau Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa dan wajib mengadakan rapat tersebut setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari seorang pemegang saham atau para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10,0% dari saham yang ditempatkan dalam Indosat. Dalam waktu 22 hari setelah menerima permohonan tersebut, Direksi akan membahas, memutuskan, dan jika Direksi memutuskan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, maka Direksi akan membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa selambat-lambatnya 14 hari sebelum panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan. Kemudian, selambat-lambatnya 14 hari sebelum diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, Direksi akan membuat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Apabila para Direktur tidak membuat panggilan rapat tersebut, maka para pemegang saham yang bersangkutan akan mengajukan kembali permohonannya kepada Dewan Komisaris. Dalam waktu 22 hari setelah menerima permohonan tersebut Dewan Komisaris akan membahas, memutuskan, dan jika Dewan Komisaris memutuskan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, maka Dewan Komisaris akan membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa selambat-

lambatnya 14 hari (tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan) sebelum panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Kemudian, selambat-lambatnya 14 hari sebelum diselenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, Dewan Komisaris akan membuat panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa. Apabila Dewan Komisaris tidak membuat pengumuman tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa dalam waktu 22 hari setelah diterimanya permohonan tersebut, maka para pemegang saham yang bersangkutan dapat mengadakan rapat atas biaya Indosat setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pengumuman tentang rapat umum pemegang saham diberikan kepada para pemegang saham sekurang-kurangnya 14 hari (tanpa memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan) sebelum panggilan rapat umum pemegang saham melalui iklan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian (satu berbahasa Inggris dan yang lainnya berbahasa Indonesia), satu di antaranya memiliki peredaran yang luas di Indonesia. Panggilan rapat harus disampaikan melalui iklan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian, satu di antaranya berbahasa Indonesia dan memiliki peredaran luas di Indonesia dan yang lainnya berbahasa Inggris, sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tanggal rapat umum pemegang saham tahunan atau rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Apabila seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili, maka ketentuan panggilan rapat dapat dikesampingkan dan rapat umum pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Secara umum, kuorum untuk rapat umum pemegang saham memerlukan kehadiran pemegang saham secara langsung atau kuasanya, berdasarkan surat kuasa, yang mewakili lebih dari 50% dari saham biasa yang dikeluarkan Perusahaan.

Pemegang saham dapat diwakili di dalam rapat umum pemegang saham oleh seseorang yang memiliki surat kuasa, tetapi tidak satupun Komisaris, Direktur atau karyawan Indosat yang dapat bertindak dalam kapasitas tersebut. Kecuali ditentukan lain di dalam Anggaran Dasar, dan dengan memperhatikan hak suara istimewa dari Saham Istimewa, keputusan-keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari para pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% saham biasa hadir dan memberikan suara di dalam rapat (suara mayoritas biasa).

Tahun Buku dan Laporan Keuangan

Tahun buku Perusahaan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Selambat-lambatnya 90 hari sejak penutupan tahun buku, Direksi wajib menyampaikan neraca, laporan rugi laba dan laporan-laporan keuangan lainnya yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Komisaris, yang harus mengkaji laporan-laporan ini dan melaporkan hasil pengkajiannya kepada rapat umum pemegang saham. Salinan dari dokumen-dokumen tersebut harus tersedia di kantor pusat Indosat sejak tanggal panggilan rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan tanggal penutupan rapat umum pemegang saham tahunan.

Rapat umum pemegang saham tahunan akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah neraca dan laporan rugi laba Indosat akan disetujui atau tidak. Persetujuan tersebut berarti memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab mereka selama tahun buku yang bersangkutan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam neraca dan laporan rugi laba.

Penggunaan Laba dan Dividen

Perolehan Laba Indosat, sebagaimana ditetapkan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan, setelah dikurangi pajak perusahaan, harus digunakan untuk dana cadangan, dividen atau keperluan lainnya, dimana persentasenya harus ditentukan oleh rapat umum pemegang saham setiap tahunnya.

Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil di dalam rapat umum pemegang saham, berdasarkan rekomendasi dari Direksi, dimana keputusan tersebut juga menentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen. Seluruh

saham biasa yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat diumumkannya dividen atau pembagian laba lainnya berhak mendapat bagian yang sama atas dividen atau pembagian laba lainnya tersebut. Dividen harus dibayarkan kepada pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam daftar pemegang saham Indosat, pada hari kerja yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dimana pembagian dividen diputuskan.

Direksi dan Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan keduanya, dapat mengumumkan pembagian dividen interim apabila kondisi keuangan Indosat mengijinkan, dengan ketentuan dividen interim akan dikompensasikan terhadap dividen yang akan dibagikan pada rapat umum pemegang saham tahunan berikutnya.

Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal dimana dividen harus dibayarkan menjadi tidak lagi harus dibayarkan dan dimasukkan ke dalam dana cadangan Indosat. Pemberitahuan tentang dividen dan dividen interim harus diumumkan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas atau nasional di Indonesia, di satu surat kabar harian berbahasa Inggris dan pada bursa efek dimana saham Perusahaan tercatat.

Apabila laporan rugi laba dalam satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup oleh dana cadangan yang dimaksud di atas, maka kerugian akan tetap dicatat di dalam laporan rugi laba dan untuk tahun-tahun selanjutnya Indosat dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat di dalam laporan rugi laba tersebut belum tertutup sama sekali.

Untuk menutup kerugian di kemudian hari, dana cadangan dapat dibentuk dan besarnya dana cadangan akan ditentukan oleh rapat umum pemegang saham. Dana cadangan dapat digunakan untuk pengeluaran barang modal atau keperluan lainnya sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan. Akan tetapi, dana cadangan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan Indosat. Setiap laba yang diperoleh dari dana cadangan tersebut harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi Indosat.

Likuidasi

Dalam hal terjadi likuidasi Perusahaan, Direksi akan bertindak sebagai likuidator jika dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sisa dari seluruh aset likuidasi yang telah dipersiapkan, setelah pembayaran seluruh utang dan kewajiban Perusahaan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham. Jika memungkinkan, pembayaran terhadap saham-saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan harga yang tertera pada sertifikat saham. Sisa aset likuidasi akan dibagikan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham.

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari para pemegang saham dan disetujui oleh lebih dari dua per tiga dari para pemegang saham dengan hak suara, dengan ketentuan hal-hal yang berkenaan dengan (i) peningkatan modal Perusahaan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (*pre-emptive rights*); (ii) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang melibatkan Perusahaan; (iii) pembubaran dan likuidasi; (iv) perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan hak veto pemegang saham Seri A, hanya dapat diberlakukan apabila rapat dihadiri dan tindakan tersebut disetujui oleh pemegang saham Seri A.

Keputusan mengenai pengurangan modal dasar dan modal ditempatkan harus diumumkan oleh Direksi di dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian, satu di antaranya berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, dan yang lainya berbahasa Inggris, untuk kepentingan para kreditur dalam jangka waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal rapat umum pemegang saham. Dalam hal kuorum rapat umum pemegang saham luar biasa tidak tercapai, maka dalam waktu sepuluh sampai dengan dua puluh satu hari sejak rapat umum pemegang saham luar biasa yang pertama, rapat kedua dapat diadakan untuk memutuskan hal-hal yang tidak diselesaikan di dalam rapat pertama. Rapat kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga per lima dari jumlah pemegang saham dan disetujui oleh lebih dari ½ dari jumlah pemegang saham dengan hak suara. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan pengurangan modal hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Transaksi-Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Indosat memiliki kebijakan untuk tidak mengadakan transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi kecuali apabila ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya tidak kurang menguntungkan Indosat dibanding dengan yang akan diperoleh Indosat di dalam transaksi yang dilakukan secara wajar dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi.

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK dan Pasal 19 dari Anggaran Dasar Perusahaan, setiap transaksi dimana di dalamnya terdapat benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) harus mendapat persetujuan mayoritas dari para pemegang saham biasa yang tidak memiliki benturan kepentingan di dalam transaksi yang diusulkan, kecuali apabila benturan kepentingan tersebut telah timbul sebelum Indosat mencatatkan sahamnya dan benturan kepentingan tersebut telah diungkapkan di dalam dokumen-dokumen penawaran saham. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, benturan kepentingan berarti perbedaan kepentingan Indosat di satu pihak, dan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham mayoritas (pemegang saham yang memiliki 20,0% atau lebih dari saham yang dikeluarkan) Indosat dalam satu transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Perusahaan. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK, benturan kepentingan juga terjadi apabila anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham pengendali Indosat terlibat di dalam suatu transaksi dimana kepentingan pribadi mereka dapat berbenturan dengan kepentingan Indosat, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan Bapepam-LK.

Mengingat banyaknya perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah atau Qtel Asia atau salah satu dari afiliasi mereka yang berada di Indonesia, kami memperkirakan bahwa seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis kami, kami ingin mengadakan usaha patungan atau pengaturan atau transaksi lainnya dengan suatu perusahaan tersebut dari waktu ke waktu. Dalam keadaan tersebut, kami dapat berkonsultasi dengan Bapepam-LK mengenai apakah rencana usaha patungan, pengaturan atau transaksi akan memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan menurut ketentuan-ketentuan peraturan Bapepam-LK. Apabila Bapepam-LK memandang bahwa berdasarkan peraturannya rencana usaha patungan, pengaturan atau transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan, maka kami dapat melaksanakan rencana tersebut tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan. Akan tetapi, apabila Bapepam-LK berpendapat bahwa berdasarkan peraturannya rencana tersebut memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan, maka kami akan berupaya memperoleh persetujuan pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak melanjutkan rencana tersebut.

Kontrak-Kontrak Material

Pada tanggal 30 Juli 2007, kami menandatangani perjanjian kerjasama dengan Telkomsel untuk membuat jaringan interkoneksi antara jaringan telekomunikasi lokal tetap kami dengan jaringan seluler Telkomsel. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkomsel sepakat untuk memungkinkan pelanggan masing-masing pihak untuk melakukan panggilan lokal, jarak jauh dan internasional antara jaringan telekomunikasi lokal tetap kami dan jaringan seluler Telkomsel. Kami mengubah perjanjian ini melalui perubahan pertama No. Telkomsel: AMD.2283/LG.05/PD-00/XII/2007 – No. Indosat: 029/CC0-CC0/LG/07 bulan Desember 2007, perubahan kedua No. Telkomsel: AMD.339/LG.05/PD-00/III/2008 – No. Indosat: 004/C00-CC0/LGL/08 tertanggal 3 Maret 2008 dan perubahan ketiga No. Telkomsel: 1762/LG.05/PD-00/XI/2010 dan No. Indosat: 011/C00-C0AA/LGL/10 tertanggal 1 November 2010.

Pada tanggal 18 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian kerjasama interkoneksi dengan Telkom untuk menggunakan jaringan interkoneksi antara jaringan selular kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkom setuju untuk membuka prefiks dan kode akses milik pihak lainnya yang dapat memungkinkan pelanggan dari masing-masing pihak untuk melakukan berbagai macam panggilan antara jaringan telekomunikasi tetap kami dan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Perjanjian ini mengatur tarif interkoneksi terkait dengan penyediaan jasa interkoneksi berdasarkan formula biaya (cost-based) dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun, akan tetapi dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Kami mengubah perjanjian ini sebagaimana dinyatakan dalam perubahan pertama No. Telkom 47/HK.820/DCI-A1000000/2008 – No. Indosat 021/C00-CC0/LGL/2008 tertanggal

31 Maret 2008 dan perubahan kedua No. Telkom 123/HK.820/DCI-A1000000/2009 – No. Indosat 007/C00-C0A/LGL/2009 tertanggal 30 Desember 2009 dan perubahan ketiga sebagaimana dinyatakan dalam bentuk berita acara kantor bersama No. Telkom Tel.024/YN.000/DCI-A1050000/2011 – No. Indosat 003/C00-C0H/LGL/2011 tertanggal 31 Januari 2011.

Pada tanggal 18 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian interkoneksi dengan Telkom untuk membuat jaringan interkoneksi antara jaringan telekomunikasi tetap kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkom setuju untuk membuka prefiks dan kode akses milik pihak lainnya yang dapat memungkinkan pelanggan dari masing-masing pihak untuk melakukan sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh dan sambungan internasional antara jaringan telekomunikasi tetap kami dengan jaringan telekomunikasi tetap Telkom. Perjanjian ini mengatur tarif interkoneksi terkait dengan penyediaan jasa interkoneksi berdasarkan formula biaya (cost-based) dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun, akan tetapi dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Kami mengubah perjanjian ini melalui perubahan pertama No. Telkom 48/HK.820/DCI-A1000000/2008 – No. Indosat 020/C00-CC0/LGL.2008 tertanggal 31 Maret 2008, perubahan kedua No. Telkom 125/HK.820/DCI-A1000000/2009 – No. Indosat 006/C00-COA/LGL/2009 tertanggal 30 Desember 2009 dan perubahan ketiga sebagaimana dinyatakan dalam bentuk berita acara kantor bersama No. Telkom Tel.025/YN.000/DCI-A1050000/2011 – No. Indosat 002/C00-C0H/LGL/2011 tertanggal 31 Januari 2011.

Pada tanggal 19 Desember 2007, kami menandatangani perjanjian kerjasama dengan Telkomsel untuk membuat jaringan interkoneksi antara jaringan seluler kami dan jaringan seluler Telkomsel. Berdasarkan perjanjian ini, kami dan Telkomsel setuju untuk memungkinkan pelanggan masing-masing pihak untuk melakukan atau menerima panggilan interkoneksi dari berbagai jenis antara jaringan seluler kami dan jaringan seluler Telkomsel. Perjanjian ini secara otomatis diperbarui setiap dua tahun tetapi dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 3 bulan sebelumnya. Kami mengubah perjanjian melalui perubahan pertama No. Telkomsel: AMD.233/LG.05/PD-00/II/2008 dan No. Indosat: 003/C00-CC0/LGL/08 tertanggal 18 Februari 2008 dan melalui perubahan kedua No. Telkomsel: 1392/LG.05/PD-00/IX/2010 dan No. Indosat: 009/C00-C0AA/LGL/10 tertanggal 7 September 2010.

Pada tanggal 25 November 2009, kami menandatangani dua perjanjian perwaliamanatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai waliamanat, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Indosat Ketujuh dan Sukuk Ijarah Indosat Keempat. Obligasi Indosat Ketujuh diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2009 dan memiliki total nilai nominal sebesar Rp1.300,0 miliar. Sedangkan, Sukuk Ijarah Indosat Keempat diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2009 dan memiliki total nilai nominal sebesar Rp200,0 miliar.

Pada tanggal 17 September 2008 dan 8 Juni 2009, kami menandatangani credit facility agreement tanpa jaminan dengan jangka waktu tiga tahun dan credit facility agreement tanpa jaminan dengan jangka waktu lima tahun dengan BCA, masing-masing bernilai Rp500 miliar dan Rp1.000 miliar.

Pada tanggal 28 Juli 2009, kami menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan jangka waktu lima tahun dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bernilai Rp1.000 miliar dan pada tanggal 18 Agustus 2009, kami telah memperoleh export credit facility dari EKN sejumlah US$315,0 juta.

Pada tanggal 24 Maret 2009, kami menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi untuk pemegang obligasi Seri B dari Obligasi Indosat II, Obligasi Indosat III, Obligasi Indosat IV, Obligasi Indosat V, Obligasi Indosat VI, Sukuk Ijarah Indosat I, Sukuk Ijarah Indosat II dan Sukuk Ijarah Indosat III, dan telah mendapatkan persetujuan untuk, antara lain mengubah definisi "Pinjaman", "EBITDA", dan "Ekuitas" dan untuk mengubah rasio Pinjaman terhadap Ekuitas dari 1,75 banding 1, menjadi 2,5 banding 1 di masing-masing perjanjian perwaliamanatan untuk masing-masing obligasi tersebut.

Pada tanggal 29 Juli 2010, kami, melalui Indosat Palapa Company B.V. ("Indosat Palapa") mengeluarkan *Guaranteed Notes* 2020 dengan total nilai nominal sebesar US$650,0 juta. Notes tersebut diterbitkan pada 99,478% dari nilai pokok dan jatuh tempo pada 29 Juli 2020. Notes tersebut memiliki suku bunga tetap sebesar 7,375% per tahun yang dibayarkan dengan

cicilan enam bulanan yang jatuh tempo cicilannya pada 29 Januari dan 29 Juli setiap tahun, dimulai sejak 29 Januari 2011. Pada tanggal 10 Februari 2011, kami menandatangani perjanjian fasilitas Time Loan Revolving tanpa jaminan selama 3 tahun dengan BCA sejumlah Rp1.000 miliar. Untuk informasi lebih lanjut atas perjanjian ini, lihat "Butir 5: Analisa Operasional dan Keuangan dan Prospek Usaha – Pokok Terhutang."

Perjanjian Sewa Menara

Untuk mematuhi Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/2008 dalam hubungannya dengan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, kami telah menandatangani perjanjian sewa menara dengan beberapa penyewa, sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Januari 2010, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan PT Hutchison CP Telecommunications ("HCPT"), di mana HCPT bermaksud untuk menyewa menara Indosat dengan layanan dasar (tanpa komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu minimal selama 6 tahun setelahnya, kecuali HCPT bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan dalam waktu satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pada tanggal 15 April 2010, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan PT Natrindo Telepon Seluler ("NTS"), di mana NTS bermaksud untuk menyewa menara Indosat dengan layanan dasar (tanpa kompenen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu awal, kecuali NTS bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan dalam waktu 90 hari sebelum berakhirnya perjanjian.

Pada tanggal 24 Mei 2010, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan PT XL Axiata ("XL"), di mana XL bermaksud untuk menyewa menara Indosat dengan layanan dasar (tanpa komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk suatu periode minimum selama 5 tahun kecuali XL bermaksud untuk mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan dalam waktu 120 hari sebelum berakhirnya perjanjian.

Pada tanggal 3 Juni 2010, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan PT Berca Global Access ("BERCA"), di mana BERCA bermaksud untuk menyewa menara Indosat dengan layanan dasar (tanpa komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk suatu periode minimum selama 6 tahun kecuali BERCA bermaksud untuk mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang diberikan dalam waktu satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pada tanggal 4 Februari 2011, kami menandatangani perjanjian sewa menara dengan PT Daya Mitra Telekomunikasi ("Mitratel"), di mana Mitratel bermaksud untuk menyewa menara kami untuk layanan dasar (tanpa komponen sipil, mekanikal, dan elektrikal), dan memperoleh hak untuk menyewakan kembali menara tersebut kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Group dengan layanan penuh (termasuk komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk suatu periode minimum selama 5 tahun dengan persetujuan bersama antara para pihak.

Pada tanggal 10 Februari 2011, kami menandatangani memorandum of agreement dengan PT First Media ("FM"), di mana FM menyewa menara Indosat untuk layanan penuh (termasuk komponen sipil, mekanikal dan elektrikal). Jangka waktu memorandum of agreement ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode minimal selama 5 tahun berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak.

Salinan, berupa ringkasan dan atau terjemahan, dari perjanjian-perjanjian yang tercantum di atas dilampirkan dalam Lampiran 4.2 sampai dengan 4.11, 15.2, 15.11, 15.15 sampai dengan 15.21, 15.26 dan 15.28.

Pengawasan Valuta Asing

Lihat "Butir 3: Informasi Penting–Valuta Asing" yang terdapat pada bagian lainnya dari laporan tahunan ini.

Perpajakan

Rangkuman di bawah ini memuat penjelasan mengenai konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan menurut peraturan perpajakan Indonesia dan federal Amerika atas pembelian, kepemilikan dan pelepasan ADS atau saham biasa. Rangkuman ini tidak dimaksudkan sebagai penjelasan yang bersifat persaingan mengenai semua pertimbangan pajak yang mungkin berkaitan dengan keputusan untuk membeli, memiliki atau melepaskan ADS atau saham biasa. PARA CALON PEMBELI HARUS BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MENGENAI KONSEKUENSI-KONSEKUENSI PAJAK INDONESIA DAN PAJAK FEDERAL, NEGARA BAGIAN DAN LOKAL AMERIKA BAGI DIRINYA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN, KEPEMILIKAN DAN PENJUALAN ADS ATAU SAHAM BIASA.

Hukum Perpajakan di Indonesia

Berikut ini adalah rangkuman konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan Indonesia sehubungan dengan kepemilikan dan pelepasan saham biasa atau ADS bagi perorangan non-penduduk maupun badan non-penduduk yang memiliki saham biasa atau ADS ("Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia"). Sebagaimana digunakan di dalam kalimat sebelumnya, "perorangan non-penduduk" adalah orang berkebangsaan asing yang secara fisik tidak tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih selama jangka waktu dua belas bulan dalam periode manapun dengan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dimana selama jangka waktu tersebut perorangan non-penduduk menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS, dan "badan non-penduduk" adalah perusahaan atau badan non-perusahaan yang didirikan, berdomisili atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu yurisdiksi selain dari Indonesia dan tidak memiliki tempat usaha yang tetap atau secara lain menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia selama tahun pajak Indonesia, dimana selama jangka waktu tersebut badan non-penduduk menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS. Dalam menentukan tempat tinggal perorangan atau badan, akan dipertimbangkan juga ketentuan-ketentuan dari perjanjian pajak berganda yang berlaku dimana Indonesia menjadi salah satu pihaknya.

Dividen. Dividen yang diumumkan oleh kami yang berasal dari laba yang ditahan dan dibagikan kepada Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia sehubungan dengan saham biasa atau ADS akan dikenakan pajak potongan Indonesia, yang saat ini besarnya 20,0%, atas jumlah yang dibagikan (dalam hal dividen tunai) atau bagian pemegang saham yang bersangkutan atas nilai pembagian. Pengenaan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak berganda dapat diberikan apabila pihak penerima adalah beneficial owner dari dividen dan menyerahkan kepada Perusahaan (dengan tembusan ke Kantor Pelayanan Pajak Indonesia dimana Perusahaan terdaftar) surat pernyataan domisili pajak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, atau yang ditunjuknya, yang menerangkan yurisdiksi dimana Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia tersebut berdomisili. Indonesia telah mengadakan perjanjian pajak berganda dengan lebih dari 50 negara, seperti Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Malaysia, Belanda, Singapura, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian pajak berganda Amerika-Indonesia, pajak potongan atas dividen secara umum, apabila tidak ada hak suara sebanyak 20,0%, adalah sebesar 15,0%.

Laba/Capital Gains. Penjualan atau pemindahan hak atas saham biasa yang tercatat di bursa efek Indonesia akan dikenakan pajak sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Pialang yang menangani transaksi harus melakukan pemotongan pajak tersebut. Kepemilikan, penjualan atau pemindahan saham pendiri yang tercatat di bursa efek Indonesia, berdasarkan peraturan pajak Indonesia saat ini, dapat dikenakan juga pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Dengan memperhatikan pemberlakuan peraturan pelaksana (yang belum dikeluarkan sampai saat ini), perkiraan laba bersih yang diterima atau timbul dari penjualan aset bergerak di Indonesia, yang meliputi saham biasa yang tidak tercatat di bursa efek Indonesia atau ADS, oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia (kecuali penjualan aset berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dari undang-undang pajak penghasilan Indonesia) dapat dikenakan pajak potongan Indonesia sebesar 20,0%. Akan tetapi, ketentuan pajak penghasilan ini belum diterapkan di dalam prakteknya. Kami perkirakan, apabila dan jika peraturan pelaksana dikeluarkan berkenaan dengan ketentuan ini, maka di dalam prakteknya pajak potongan ini (i) hanya akan dikenakan apabila saham biasa yang tidak

tercatat di bursa efek Indonesia dibeli dan dibayar oleh penduduk Indonesia yang merupakan subyek pajak atau oleh badan usaha tetap di Indonesia dari badan atau perorangan non-penduduk dan (ii) tidak akan mempengaruhi hasil bersih penjualan atau pemindahan ADS melalui perdagangan reguler di NYSE oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia.

Dalam hal dimana pembeli atau pialang Indonesia diwajibkan berdasarkan undang-undang pajak Indonesia untuk memotong pajak atas pembayaran harga beli untuk saham biasa atau ADS, pembayaran tersebut dapat dikecualikan dari pengenaan pajak potongan atau pajak penghasilan Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian pajak berganda yang berlaku dimana Indonesia adalah salah satu pihaknya (termasuk perjanjian pajak berganda Amerika-Indonesia). Akan tetapi, peraturan perpajakan Indonesia saat ini tidak mengatur secara tegas prosedur untuk mencabut kewajiban pembeli atau pialang Indonesia untuk memotong pajak dari hasil penjualan tersebut. Untuk memanfaatkan keringanan perjanjian pajak berganda, Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia harus berupaya memperoleh pengembalian uang/refund dari Kantor Pajak Indonesia dengan mengajukan permohonan khusus yang disertai dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh instansi perpajakan yang berwenang, atau yang ditunjuknya, yang menerangkan yurisdiksi dimana Pemilik Berkebangsaan Non-Indonesia tersebut berdomisili.

Bea materai. Transaksi-transaksi saham biasa di Indonesia akan dikenakan bea materai sebesar Rp6.000 untuk transaksi-transaksi bernilai lebih dari Rp1.000.000 dan Rp3.000 untuk transaksi-transaksi bernilai antara Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000. Untuk transaksi-transaksi bernilai kurang dari Rp250.000 tidak dikenakan bea materai.

Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Pemerintah Federal AS

Pembahasan berikut ini berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi utama perpajakan Pemerintah federal Amerika Serikat bagi Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, sebagaimana yang didefinisikan di bawah ini, sehubungan dengan kepemilikan ADS atau saham biasa. Penjelasan di bawah ini adalah berdasarkan *Internal Revenue Code of* 1986, sebagaimana diubah atau *Code*, *Treasury Regulations* yang diberlakukan berdasarkan *Code*, perjanjian pajak penghasilan antara Amerika Serikat dan Indonesia dan penafsiran judisial dan administratif daripadanya, dimana seluruhnya berlaku pada tanggal laporan keuangan ini dan seluruhnya dapat diubah, bahkan mungkin berlaku secara retroaktif. Perlakuan pajak atas pemilik ADS atau saham biasa dapat berbeda tergantung pada situasi tertentu dari pemiliknya. Beberapa pemilik (termasuk namun tidak terbatas, perusahaan asuransi, organisasi yang dikecualikan dari pajak, lembaga keuangan, pihak yang tunduk pada alternatif pajak minimum, pialang-penjual, pihak yang memiliki "mata uang fungsional/functional currency" selain dari Dolar AS, pihak yang menerima ADS atau saham biasa sebagai imbalan atas jasa-jasanya, pihak yang memiliki baik secara langsung atau tidak langsung 10,0% atau lebih dari saham dengan hak suara Perusahaan, dan pihak yang memiliki ADS atau saham biasa sebagai bagian dari "lindung nilai/*hedge*", "strategi pergerakan harga/straddle" atau "transaksi konversi/conversion transaction" dalam pengertian Sections 1221, 1092 dan 1258 *of the Code dan the Treasury Regulations*) tunduk pada peraturan khusus yang tidak dibahas di sini. Kecuali sebagaimana dibahas di bawah ini berkenaan dengan pihak yang bukan merupakan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, rangkuman berikut ini terbatas untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang akan memiliki ADS atau saham biasa sebagai "aset modal/*capital assets*" dalam pengertian Section 1221 of the Code. Pembahasan berikut ini tidak menyinggung dampak dari undang-undang pajak negara bagian atau lokal terhadap pemilik ADS atau saham biasa.

Sebagaimana digunakan di sini, istilah "Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat" berarti pemilik ADS atau saham biasa, untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, yang merupakan (i) warga negara atau penduduk Amerika Serikat; (ii) perusahaan (termasuk badan yang dianggap perusahaan untuk tujuan pajak penghasilan federal Amerika Serikat) yang didirikan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat, salah satu negara bagiannya atau District of Columbia; (iii) tanah yang penghasilannya tunduk pada pajak Amerika Serikat terlepas dari sumbernya; (iv) suatu pengelola dana jika Pengadilan Amerika Serikat dapat melakukan pengawasan utama terhadap administrasi pengelolaan dana dan satu atau lebih warganegara Amerika Serikat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh keputusan penting dari pengelola dana tersebut; atau (v) pemilik ADS atau saham biasa yang penghasilannya dari ADS atau saham biasa dikenakan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat berdasarkan laba bersih.

Apabila suatu bentuk kemitraan/partnership atau badan atau pengaturan lainnya yang dianggap sebagai kemitraan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat memiliki ADS atau saham biasa, maka perlakuan pajak atas seorang mitra/partner umumnya tergantung pada status mitra tersebut dan kegiatan kemitraannya. Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang merupakan mitra dalam suatu kemitraan yang memiliki ADS atau saham biasa disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya.

Rangkuman berikut ini tidak membahas semua aspek dari pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat yang mungkin relevan bagi pemilik ADS atau saham biasa tertentu sehubungan dengan keadaan tertentu mereka dan situasi pajak penghasilan tertentu. Calon pemilik ADS atau saham biasa harus berkonsultasi dengan konsultan pajaknya mengenai konsekuensi-konsekuensi pajak baginya, secara terperinci, sehubungan dengan pembelian, kepemilikan dan pelepasan ADS atau saham biasa, termasuk penerapan dan keberlakuan peraturan perundang-undangan pajak negara bagian, lokal, asing dan lainnya dan kemungkinan dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan pajak Amerika Serikat atau lainnya.

Pajak atas Pembagian Dividen. Dengan memperhatikan pembahasan tentang "Status Perusahaan Investasi Asing Pasif" di bawah ini, untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, besarnya pembagian laba berkenaan dengan kepemilikan ADS atau saham biasa (termasuk pajak potongan yang harus dikenakan atas pembagian laba tersebut) akan dianggap sebagai dividen kena pajak seperti penghasilan biasa pada tanggal penerimaannya masing-masing oleh *Depositary* atau pemiliknya, sebatas besarnya penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi sebagaimana ditentukan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat. Pembagian laba, jika ada, yang melebihi penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi pertama-tama akan dianggap sebagai pengembalian modal yang tidak kena pajak sebatas besarnya penghasilan dan laba Perusahaan yang sedang berjalan dan terakumulasi tersebut, dan kemudian dianggap sebagai capital gain yang direalisasikan pada saat pelepasan ADS atau saham biasa. Bagian dari setiap pembagian laba yang dianggap sebagai pengembalian modal yang tidak kena pajak ini akan mengurangi dasar penyesuaian pajak dari pemilik yang bersangkutan atas ADS atau saham biasa yang dimilikinya. Capital gain bersifat jangka panjang apabila ADS atau saham biasa telah dimiliki lebih dari satu tahun. Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat tidak berhak atas faktor pengurang pajak sejumlah dividen yang diterima/*dividends received deduction*, yang seharusnya diperbolehkan berdasarkan *Code* untuk pembagian laba kepada perusahaan domestik, sehubungan dengan pembagian laba dari ADS atau saham biasa.

Untuk tahun kena pajak yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2013, "penghasilan dividen yang memenuhi syarat/qualified dividend income" yang diterima oleh perorangan akan dikenakan pajak penghasilan federal yang besarnya lebih rendah dari yang dikenakan atas penghasilan biasa lainnya. Berdasarkan kegiatan usaha dan aset lancar kami saat ini dan perkiraan masa depan, kami berpendapat bahwa kami adalah "perusahaan asing yang memenuhi syarat" dan bahwa dividen kami yang dibayarkan kepada Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat perorangan dapat dianggap sebagai "penghasilan dividen yang memenuhi syarat", dengan ketentuan bahwa persyaratan mengenai jangka waktu kepemilikan yang berlaku atas ADS atau saham biasa dan ketentuan yang berlaku lainnya telah dipenuhi oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang bersangkutan. Dividen yang dibayar oleh perusahaan asing yang digolongkan sebagai perusahaan investasi asing pasif/*passive foreign investment company* atau PFIC bukan merupakan "penghasilan dividen yang memenuhi syarat." Lihat "—Status Perusahaan Investasi Asing Pasif" di bawah ini.

Apabila pembagian dividen dibayar dalam mata uang lain selain dari dolar AS, maka besarnya pembagian laba tersebut akan dikonversikan ke mata uang dolar AS dengan menggunakan nilai tukar spot pada tanggal diterimanya pembagian laba tersebut (untuk para pemilik ADS, pada tanggal dividen tersebut diterima oleh *Depositary*), terlepas apakah pembagian dividen tersebut benar-benar dikonversikan ke mata uang dolar AS pada tanggal itu. Setiap keuntungan atau kerugian berkenaan dengan mata uang non-Amerika Serikat yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing setelah tanggal itu akan dianggap sebagai laba atau rugi biasa.

Pajak atas Keuntungan dan Kerugian Modal/Capital Gains and Losses. Dengan memperhatikan pembahasan tentang "Status Perusahaan Investasi Asing Pasif" di bawah ini, Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat umumnya mengetahui adanya rugi atau laba kena pajak atas penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa yang besarnya

sama dengan selisih antara jumlah yang diperoleh dari penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya tersebut dengan dasar penyesuaian pajak dari pemilik yang bersangkutan atas ADS atau saham biasa miliknya. Hal ini akan mengakibatkan keuntungan atau kerugian modal jangka panjang atau jangka pendek, tergantung pada apakah ADS atau saham biasa tersebut telah dimiliki lebih dari satu tahun. Untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat non-perusahaan, pajak penghasilan Amerika Serikat yang dikenakan atas capital gain bersih jangka panjang yang diakui untuk satu tahun atas penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa, pada saat ini besarnya tidak akan melebihi 15,0% untuk tahun kena pajak yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2013. Penempatan dan penarikan saham biasa sebagai ganti ADS yang dilakukan oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat tidak akan mengakibatkan realisasi laba atau rugi untuk tujuan pajak penghasilan federal Amerika Serikat.

Status Perusahaan Investasi Asing Pasif. Aturan khusus pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat berlaku bagi Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki penyertaan di PFIC. Umumnya, perusahaan asing dianggap sebagai PFIC pada tahun kena pajak berjalan untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat apabila 75,0% atau lebih dari penghasilan kotornya untuk tahun kena pajaknya terdiri dari penghasilan pasif (biasanya, bunga, dividen, uang sewa, royalti dan keuntungan bersih dari pelepasan asset yang menghasilkan penghasilan tersebut) atau 50,0% atau lebih dari aset rata-ratanya selama tahun kena pajak terdiri dari aset pasif yang menghasilkan, atau yang dimiliki sebagai hasil dari penghasilan pasif.

Berdasarkan kegiatan bisnis dan aset lancar kami saat ini dan proyeksi masa depan, kami berpendapat bahwa kami bukan PFIC dan kami memperkirakan bahwa kami tidak akan menjadi PFIC di kemudian hari. Akan tetapi, apabila Perusahaan tidak beroperasi sesuai dengan yang diperkirakan pada saat ini, kami mungkin akan dianggap sebagai PFIC untuk tahun yang berjalan dan yang akan datang, tergantung pada kegiatan kami yang sebenarnya. Selain itu, oleh karena status PFIC tergantung pada komposisi penghasilan dan aset perusahaan dan harga pasar dari asetnya dari waktu ke waktu, maka tidak ada jaminan bahwa kami tidak akan dianggap sebagai PFIC untuk setiap tahun kena pajak.

Apabila kami adalah PFIC dalam tahun kena pajak berjalan dimana Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki ADS atau saham biasa, pemilik tersebut akan dikenakan kebijakan pajak khusus terhadap penerimaan atas "pembagian berlebih" dan keuntungan yang direalisasikan dari penjualan atau disposisi lain termasuk gadai, atas ADS atau saham biasa. Pembagian yang diterima di dalam tahun kena pajak berjalan yang lebih besar dari 125% dari rata-rata pembagian tahunan yang diterima selama waktu yang lebih singkat antara tiga tahun pajak sebelumnya atau selama ADS atau saham biasa dimiliki, akan diperlakukan sebagai pembagian berlebih. Kebijakan pajak khusus ini mengatur: (a) kelebihan pembagian atau keuntungan akan dikenakan secara proporsional selama periode kepemilikan; (b) jumlah yang dialokasikan perpajakan yang berlaku untuk tahun berjalan dan perpajakan untuk tahun sebelum tahun pertama dimana kami adalah PFIC, akan diperlakukan sebagai pendapatan biasa dan; (c) jumlah yang dialokasikan pada setiap tahun lain akan dikenakan pajak tambahan yang harus dibayar pada tahun pajak berjalan dan dimana besarnya sama dengan total, pada tahun-tahun tersebut, dari (i) jumlah yang dialokasikan untuk tahun tersebut dikalikan dengan tarif pajak tertinggi pada tahun tersebut dan (ii) jumlahnya sebesar beban bunga yang ditagih yang akan dikenakan untuk tahun tersebut.

Pemilihan dapat diberikan untuk menghindari konsekuensi pajak negatif dalam kondisi tertentu dimana Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat memilih untuk melakukan perbandingan dengan harga pasar atas ADS atau saham biasa yang dimilikinya. Selanjutnya, walaupun pemegang PFIC diperkenankan untuk menggunakan peraturan-peraturan di atas dengan cara memilih untuk memperlakukan PFIC sebagai "pemilikan dana yang wajar" sesuai Section 1295 of the Code, opsi ini tidak berlaku untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat karena kami tidak bermaksud untuk memenuhi persyaratan untuk memperbolehkan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat untuk melakukan pemilihan.

Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajaknya tentang konsekuensi-konsekuensi pajak penghasilan federal Amerika Serikat sehubungan dengan kepemilikan ADS atau saham biasa dan atas penentuan pilihan mark-to-market apabila kami dipertimbangkan sebagai PFIC untuk pajak tahun berjalan. Pemilik

Berkebangsaan Amerika Serikat yang memiliki ADS atau saham biasa selama tahun dimana kami dianggap sebagai PFIC diwajibkan untuk menyampaikan Form 8621 ke Internal Revenue Service atau IRS.

Pertimbangan Pajak Asing yang Terutang. Untuk tujuan pajak penghasilan Pemerintah federal Amerika Serikat, Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat akan dianggap telah menerima jumlah pajak Indonesia yang telah dipotong dari pembayaran dividen dan telah menyetor pajak tersebut ke Indonesia. Sebagai akibat pemberlakuan peraturan ini, besarnya dividen yang dimasukkan ke dalam laba kotor Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat menjadi lebih besar dari jumlah uang tunai yang sesungguhnya diterima (atau dapat diterima) oleh Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat.

Dengan memperhatikan batasan-batasan dan syarat-syarat yang dimaksud di dalam Code, Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat dapat memilih untuk mengajukan klaim kredit terhadap kewajiban pajak penghasilan federal Amerika Serikat untuk pajak Indonesia yang telah dipotong dari dividen atau pajak Indonesia yang dikenakan atas capital gain, jika ada, atau, apabila Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat memilih untuk tidak mengkreditkan pajak asing untuk tahun kena pajak, mereka dapat melakukan pengurangan pajak tersebut. Untuk tujuan batasan kredit pajak asing, dividen dan capital gain, tergantung pada keadaan-keadaan tertentu dari Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, umumnya akan dianggap sebagai penghasilan "pasif" atau "umum". Selanjutnya, dividen umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan asing, dan keuntungan valuta asing dan capital gain umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan Amerika Serikat. Capital loss umumnya akan dialokasikan terhadap sumber penghasilan Amerika Serikat. Oleh karena capital gain umumnya akan dianggap sebagai sumber penghasilan Amerika Serikat, karena batasan kredit pajak asing Amerika Serikat, maka setiap pajak Indonesia atau pajak asing lainnya sehubungan dengan ADS atau saham biasa saat ini tidak dapat dikreditkan, kecuali apabila Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat memiliki sumber penghasilan asing lainnya untuk tahun tersebut yang dapat masuk ke dalam keranjang batasan kredit pajak asing, atau tersedia pilihan untuk menganggap keuntungan tersebut sebagai sumber penghasilan asing. Para investor disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak mereka mengenai tersedianya kredit pajak asing berdasarkan keadaan-keadaan mereka.

Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat. Kecuali kemungkinan adanya pengenaan cadangan pajak penghasilan Amerika Serikat (lihat "–Cadangan Pajak Penghasilan Amerika Serikat dan Pelaporan Informasi"), pembayaran setiap dividen atas ADS atau saham biasa kepada pemilik yang bukan Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat ("Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat") tidak akan dikenakan pajak penghasilan federal Amerika Serikat dan setiap keuntungan dari penjualan, penarikan atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa, dengan ketentuan:

a. Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat tidak akan atau tidak sedang menjalankan perdagangan atau bisnis di negara Amerika Serikat;
b. tidak ada hubungan baik saat ini atau sebelumnya antara Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat dan negara Amerika Serikat, termasuk tidak terbatas pada status Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat sebagai bekas warga negara atau penduduk Amerika Serikat; dan
c. dalam hal keuntungan dari penjualan, penarikan atau pelepasan lainnya dari ADS atau saham biasa oleh perorangan, Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat yang tidak berada di Amerika Serikat selama 183 hari atau lebih dalam tahun kena pajak atas penjualan atau terpenuhinya syarat-syarat lainnya.

Apabila dividen, keuntungan atau penghasilan sehubungan dengan ADS atau saham biasa yang dimiliki oleh Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat secara efektif berhubungan dengan pelaksanaan perdagangan atau bisnis (atau akibat adanya badan usaha tetap di Amerika Serikat, apabila pemilik merupakan penduduk dari suatu negara yang memiliki perjanjian pajak penghasilan dengan Amerika Serikat), Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat dapat dikenakan pajak penghasilan Amerika Serikat atas dividen, keuntungan atau penghasilan tersebut sesuai dengan persentase pajak yang ditetapkan untuk Pemilik Berkebangsaan Amerika Serikat, setelah dikurangi dengan faktor pengurang pajak sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan/deductible expenses terhubung secara efektif dengan penghasilan. Sebagai tambahan, apabila Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat adalah perusahaan asing, pemilik yang bersangkutan dapat dikenakan pajak keuntungan atas kantor cabang sebesar 30,0% dari penghasilan dan keuntungan yang berhubungan secara efektif untuk tahun pajak tersebut, sebagaimana disesuaikan untuk beberapa hal, kecuali apabila terdapat tarif pajak yang lebih rendah

berdasarkan perjanjian pajak penghasilan Amerika Serikat dengan negara tempat tinggal Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat. Untuk tujuan ini, dividen, keuntungan atau penghasilan sehubungan dengan ADS atau saham biasa akan dimasukkan ke dalam penghasilan dan keuntungan yang kena pajak bergantung pada keuntungan atas kantor cabang apabila dividen, keuntungan atau penghasilan tersebut berhubungan secara efektif dengan pelaksanaan perdagangan atau bisnis Pemilik Berkebangsaan Non-Amerika Serikat di Negara Amerika Serikat.

Cadangan Pajak Penghasilan Amerika Serikat dan Pelaporan. Pembayaran yang dilakukan oleh agen pembayaran Amerika Serikat atau pialang perantara Amerika Serikat sehubungan dengan ADS atau saham biasa dapat dikenakan kewajiban membuat pelaporan kepada IRS dan cadangan terhadap pajak penghasilan. Cadangan pajak penghasilan tidak akan dikenakan apabila (i) pemilik yang memberikan nomor identifikasi subyek pajak yang benar dan membuat surat pernyataan lainnya yang ditentukan atau (ii) pada pemilik lainnya yang dikecualikan dari cadangan pajak penghasilan.

Setiap jumlah uang yang dipotong berdasarkan peraturan cadangan pajak penghasilan atas pembayaran kepada pemilik dapat diperoleh kembali dalam bentuk pengembalian uang atau kredit terhadap pajak penghasilan federal Amerika Serikat dari pemilik yang bersangkutan, dengan ketentuan pemilik tersebut telah memenuhi kewajiban pelaporan yang berlaku.

Informasi Sehubungan dengan Aset Keuangan Asing. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan baru-baru ini, perorangan yang memiliki "specified foreign financial assets" dengan total nilai melebihi US$50.000 dalam tahun pajak yang dimulai setelah 18 Maret 2010, secara umum akan diwajibkan untuk melaporkan informasi sehubungan dengan aset tersebut dalam Surat Pemberitahuan mereka. "Specified foreign financial assets" mencakup setiap rekening keuangan yang disimpan oleh lembaga keuangan asing tertentu, serta hal-hal berikut, namun hanya apabila mereka tidak memiliki rekening yang disimpan oleh lembaga keuangan: (i) saham dan efek yang diterbitkan oleh perorangan berkebangsaan non-Amerika Serikat, (ii) instrumen dan perjanjian keuangan dalam rangka investasi yang melibatkan penerbit atau counterpart berkebangsaan non-Amerika Serikat dan (iii) bunga di badan usaha asing. Pemilik berkebangsaan Amerika Serikat yang merupakan perorangan disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak mereka terkait dengan penerapan peraturan ini terhadap kepemilikan mereka atas ADSs atau saham biasa.

Penyajian dokumen-dokumen

Bahan materi apapun yang diajukan sebagai dokumen pendukung untuk laporan tahunan dalam Form 20-F oleh the U.S. Securities and Exchange Commission dapat dilakukan inspeksi di kantor kami. Lihat "Butir 4: Informasi tentang Perusahaan – Kantor Utama".

Butir 11: PENGUNGKAPAN DARI SEGI KUANTITATIF DAN KUALITATIF RISIKO PASAR

Pengungkapan dari Segi Kuantitatif dan Kualitatif tentang Risiko Pasar

Kami memiliki risiko terhadap pasar terutama yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga, perubahan nilai tukar valuta asing dan risiko nilai ekuitas atas nilai investasi jangka panjang Perusahaan. Untuk mengatur risiko nilai tukar valuta asing dan nilai tingkat suku bunga, kami telah menandatangani kontrak *interest rate swap*, kontrak *cross currency swap* dan transaksi lainnya yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau mengatur dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga pada pelaksanaan kegiatan bisnis dan arus kas kami. Kami mengadakan transaksi-transaksi tersebut untuk memperkecil risiko tanpa terlibat pada praktek-praktek spekulatif. Kami mencatat hal-hal tersebut sebagai bukan transaksi lindung nilai (*hedge*), dimana perubahan dalam nilai wajar akan ditagih atau dikreditkan secara langsung sebagai beban atau pendapatan pada tahun yang bersangkutan. Kami mengkonversi kelebihan dana dalam mata uang Rupiah menjadi Dolar AS secara berkala yang jumlahnya disesuaikan dengan pengeluaran kami dalam mata uang Dolar AS.

Sensitivitas terhadap Tingkat Suku Bunga

Per tanggal 31 Desember 2010, sebagian besar hutang kami yang belum dibayarkan dikenakan suku bunga tetap. Tabel berikut ini memperlihatkan beberapa informasi mengenai instrumen keuangan kami yang sensitif terhadap perubahan

tingkat suku bunga. Untuk hutang jangka panjang dan obligasi yang harus dibayar, tabel ini menyajikan arus kas pokok dan tingkat suku bunga yang terkait dengan perkiraan tanggal jatuh tempo. Informasi yang disajikan di dalam tabel tersebut telah dibuat berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini: (i) variabel tingkat suku bunga deposito dalam mata uang Dolar AS dan Rupiah adalah berdasarkan tingkat suku bunga pada tahun 2010; (ii) tingkat suku bunga deposito jangka panjang dalam mata uang Rupiah adalah berdasarkan Sertifikat Bank Indonesia untuk satu bulan dan JIBOR tiga bulan pada bulan Desember 2010 ditambah marjin; (iii) tingkat suku bunga hutang jangka panjang dalam mata uang Dolar AS adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan dari berbagai perjanjian. Akan tetapi, kami tidak dapat memberikan kepastian kepada Anda bahwa asumsi-asumsi tersebut adalah benar untuk periode di masa mendatang. Asumsi-asumsi dan informasi yang diuraikan di dalam tabel ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kenaikan tingkat suku bunga di Indonesia akibat terus berlangsungnya keadaan ekonomi yang tidak likuid dan faktor-faktor moneter dan makro eknomi lainnya yang mempengaruhi Indonesia.

	Suku bunga	Jumlah terhutang pada tanggal 31 Desember 2010		Jatuh tempo pada tanggal 31 Desember						
		Mata uang asing	Jumlah rupiah yang setara	2011	2012	2013	2014	2015	2016 dan setelahnya	Jumlah
		(dalam jutaan US$)	(dalam miliar Rp)	(dalam miliar Rp)						
Aset										
Suku bunga variabel										
Deposito berjangka dan deposito on call										
Rp	2,50%-10,00%	-	945,2	945,2	-	-	-	-	-	945,2
US$	0,05%-4,75%	94,2	846,6	846,6	-	-	-	-	-	846,6
Total aset		**94,2**	**1.791,8**	**1.791,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.791,8**
Kewajiban										
Hutang jangka panjang										
Suku bunga tetap										
Rp										
Pokok		-	434,3	-	-	434,3	-	-	-	434,3
Bunga	Suku bunga tetap 8,75% per tahun	-	-	38,0	38,0	19,0	-	-	-	95,0
US$										
Pokok		295,3	2.654,8	374,6	340,4	395,0	340,4	340,4	864,0	2.654,8
Bunga	Suku bunga tetap, berkisar dari 4,15% per tahun sampai dengan 5,69% per tahun	-	-	124,1	106,8	90,3	73,8	57,3	85,1	537,4
Suku bunga variabel										
Rp										
Pokok		-	2.657,4	634,9	2.022,5	-	-	-	-	2.657,4
Bunga	Suku bunga mengambang JIBOR 3 bulanan ditambah 1,5%-2,25%	-	-	210,0	125,7	-	-	-	-	335,7
US$										
Pokok		591,3	5.316,7	2.175,0	852,0	1.620,7	204,7	204,7	259,6	5.316,7

	Suku bunga	Jumlah terhutang pada tanggal 31 Desember 2010		Jatuh tempo pada tanggal 31 Desember						
		Mata uang asing	Jumlah rupiah yang setara	2011	2012	2013	2014	2015	2016 dan setelahnya	Jumlah
		(dalam jutaan US$)	(dalam miliar Rp)	(dalam miliar Rp)						
Bunga	Suku bunga mengambang LIBOR 6 bulanan ditambah 0,35%-2,87%		-	94,9	61,8	51,7	30,0	22,4	19,9	280,7
Hutang Obligasi										
Suku bunga tetap										
Rp										
Pokok			7.450,0	1.100,0	-	1.330,0	2.358,0	320,0	2.342,0	7.450,0
Bunga	Suku bunga tetap, berkisar dari 10,2% per tahun -16,0% per tahun		-	753,7	687,7	619,5	468,2	285,9	853,4	3.668,4
US$										
Pokok		650,0	5.844,1	-	-	-	-	-	5.844,1	5.844,1
Bunga	7,38%		-	431,0	431,0	431,0	431,0	431,0	2.155,0	4.310,0
Suku bunga variabel										
Rp										
Pokok			42,0	-	42,0	-	-	-	-	42,0
Bunga	Maksimum sebesar 19% per tahun dan minimum sebesar 12,75% per tahun		-	5,4	2,6	-	-	-	-	8,0
Jumlah kewajiban		**1.536,6**	**24.399,3**	**5.941,6**	**4.710,5**	**4.991,5**	**3.906,1**	**1.661,7**	**12.423,1**	**33.634,5**
Arus kas bersih		**(1.442,4)**	**(22.607,5)**	**(4.149,8)**	**(4.710,5)**	**(4.991,5)**	**(3.906,1)**	**(1.661,7)**	**(12.423,1)**	**(31.842,7)**

Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2010, kami memiliki beberapa deposito dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS, yang juga memiliki risiko terhadap fluktuasi tingkat suku bunga.

Sensitivitas terhadap Nilai Tukar Valuta Asing

Kami memiliki risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing terutama akibat adanya kewajiban hutang jangka panjang, obligasi yang harus dibayar dan piutang dan hutang dalam mata uang Dolar AS.

Kewajiban utama kami yang harus dibayar adalah kewajiban pembayaran bersih dalam valuta asing kepada para operator telekomunikasi asing. Sementara di lain pihak, sebagian besar piutang kami adalah dalam mata uang Rupiah dari para operator domestik. Selama periode sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2010, nilai tukar Rupiah/ Dolar AS berkisar dari yang terendah yaitu Rp12.151 per Dolar AS sampai dengan yang tertinggi yaitu Rp8.924 per Dolar AS, dan selama tahun 2010, berkisar dari yang terendah yaitu Rp9.365 per Dolar AS sampai dengan yang tertinggi yaitu Rp8.888 per Dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai tukar Bank Indonesia yang berlaku adalah sebesar Rp8.991 per Dolar AS. Dengan demikian, kami mencatat kerugian nilai tukar bersih sebesar Rp885,7 miliar pada tahun 2008, laba nilai tukar bersih sebesar Rp1.656,4 miliar pada tahun 2009 dan laba nilai tukar bersih sebesar Rp492,4 miliar (US$54,8 juta) pada tahun 2010.

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi-informasi mengenai instrumen keuangan kami dalam mata uang fungsional dan menyajikan informasi tersebut dalam mata uang Rupiah yang setara nilainya, yang dalam hal ini merupakan mata uang yang

digunakan dalam dokumen pelaporan kami. Tabel ini merangkum informasi mengenai instrumen dan transaksi yang sensitif terhadap nilai tukar valuta asing, termasuk deposito, hutang dan piutang, dan instrumen keuangan Perusahaan seperti deposito, piutang dan hutang, dan hutang jangka panjangnya. Tabel ini menyajikan arus kas pokok pada perkiraan tanggal jatuh tempo.

Informasi yang disajikan di dalam tabel ini telah ditentukan berdasarkan asumsi-asumsi bahwa nilai tukar untuk Dolar AS adalah berdasarkan nilai tukar Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp8.991 = US$1,00. Akan tetapi, kami tidak dapat memberikan kepastian kepada anda bahwa asumsi-asumsi tersebut akan benar untuk masa mendatang. Asumsi-asumsi dan informasi yang diuraikan di dalam tabel ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti depresiasi nilai Rupiah pada periode mendatang.

	Perkiraan Jatuh Tempo per tanggal 31 Desember							
	Mata uang asing	2011	2012	2013	2014	2015	2016 dan seterusnya	Jumlah
	(dalam jutaan US$)	(dalam miliar Rupiah)						
Aset:								
Kas dan setara kas[1]								
Dalam US$	111,8	1.005,1	-	-	-	-	-	1.005,1
Piutang								
Dalam US$	116,1	1.043,6	-	-	-	-	-	1.043,6
Aset derivatif								
Dalam US$	7,7	69,3	-	-	-	-	-	69,3
Aset keuangan lancar lainnya								
Dalam US$	1,7	15,4	-	-	-	-	-	15,4
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa								
Dalam US$	0,1	-	1,1	-	-	-	-	1,1
Aset keuangan tidak lancar lainnya								
Dalam US$	1,4	-	12,8	-	-	-	-	12,8
Jumlah Aset	**238,8**	**2.133,4**	**13,9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.147,3**
Kewajiban:								
Hutang usaha								
Dalam US$	32,8	294,8	-	-	-	-	-	294,8
Hutang pengadaan								
Dalam US$	246,6	2.217,3	-	-	-	-	-	2.217,3
Biaya masih harus dibayar								
Dalam US$	46,3	416,0	-	-	-	-	-	416,0
Uang muka dari pelanggan								
Dalam US$	1,5	13,3	-	-	-	-	-	13,3
Kewajiban derivatif								
Dalam US$	23,9	215,4	-	-	-	-	-	215,4
Kewjiban keuangan lancar lainnya								
Dalam US$	0,1	0,6	-	-	-	-	-	0,6
Kewajiban lancar lainnya								
Dalam US$	6,1	55,0	-	-	-	-	-	55,0
Hutang jangka panjang termasuk bagian jangka pendek								
Dalam US$	886,6	2.549,6	1.192,4	2.015,7	545,1	545,1	1.123,5	7,971.4

	Perkiraan Jatuh Tempo per tanggal 31 Desember							
	Mata uang asing	2011	2012	2013	2014	2015	2016 dan seterusnya	Jumlah
	(dalam jutaan US$)	(dalam miliar Rupiah)						
Hutang Obligasi termasuk bagian jangka pendek								
Dalam US$	650,0	-	-	-	-	-	5.844,2	5.844,2
Kewajiban tidak lancar lainnya	8.7	–	78.5	–	–	–	–	78.5
Dalam US$	8,7	-	78,5	-	-	-	-	78,5
Jumlah Kewajiban	**1.902,6**	**5.762,0**	**1.270,9**	**2.015,7**	**545,1**	**545,1**	**6.967,7**	**17.106,5**
Arus Kas Bersih	**(1.663,8)**	**(3.628,6)**	**(1.257,0)**	**(2.015,7)**	**(545,1)**	**(545,1)**	**(6.967,7)**	**(14.959,2)**

(1) Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka.

Risiko Harga Ekuitas

Investasi jangka panjang kami terutama terdiri dari investasi minoritas dalam ekuitas perusahaan swasta Indonesia dan perusahaan asing. Sehubungan dengan investasi kami di perusahaan-perusahaan Indonesia, kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat terkena dampak buruk akibat kondisi ekonomi di Indonesia.

Kontrak *Swap* Valuta Asing

Per 31 Desember 2010, kami mempertahankan kontrak *swap* valuta asing yang dibuat antara tahun 2005 sampai dengan 2008. Sejak 2008 sampai dengan 2009, kami telah menyelesaikan seluruh sisa kontrak *structured currency forward* dengan tiga lembaga keuangan internasional yang berbeda. Per tanggal 31 Desember 2010, kami mendapatkan fasilitas lindung nilai (*hedging facilities*) sebesar US$275,0 juta yang mewakili 17,9% dari obligasi dan pinjaman kami dalam mata uang dolar AS per 31 Desember 2010.

Per 31 Desember 2010, kami memiliki kontrak-kontrak valuta asing dimana berdasarkan kontrak-kontrak tersebut kami menyetujui untuk membayar mata uang Rupiah dan sebagai gantinya pihak lainnya wajib membayar mata uang Dolar AS berdasarkan nilai tukar *spot* yang disepakati. Namun, apabila keadaan nilai Rupiah menguat terhadap US dollar, kami akan mengakui kerugian atas transaksi tersebut yang mana akan memiliki efek merugikan yang material pada keadaan keuangan kami.

Kontrak Swap Suku Bunga

Per 31 Desember 2010, kami mempertahankan kontrak *swap* suku bunga yang dibuat antara tahun 2008 sampai dengan 2009 dengan nilai keseluruhan sebesar US$478,3 juta dimana kami menyetujui untuk membayar tingkat bunga tetap sebagai ganti pembayaran tingkat suku bunga mengambang yang terkait dengan LIBOR untuk enam bulan dalam mata uang dolar AS ditambah salah satu antara 0,35%, 1,45% atau 1,85% per tahun, agar dapat melakukan lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga pada masing-masing perjanjian pembiayaan satelit HSBC Komersial dan HSBC Sinosure dan Pinjaman Sindikasi ING/DBS Perusahaan.

Butir 12: PENJELASAN TENTANG EFEK SELAIN DARI EFEK EKUITAS

Biaya dan beban yang mungkin harus dibayar oleh para pemegang American Depositary Shares (ADS) kami

The Bank of New York Mellon, depositary dari program ADS kami, mengenakan biaya berikut kepada setiap pihak yang menyimpan atau menarik saham biasa atau setiap pihak yang menyerahkan ADR atau kepada siapa ADR akan diterbitkan, sebagaimana berlaku, berdasarkan *deposit agreement* dengan *depositary*: (1) pajak dan biaya pemerintah lainnya, (2) biaya pendaftaran sebagaimana diperlukan dari waktu ke waktu untuk mendaftarkan peralihan saham, (3) kabel, telex dan biaya pengiriman faksimili sebagaimana dinyatakan dalam *deposit agreement* menjadi beban dari orang yang menyimpan saham atau pemilik, (4) biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *depositary* dalam melakukan konversi mata uang asing berdasarkan *deposit agreement*, (5) biaya dalam jumlah tidak lebih dari $5.00 per 100 ADS (atau bagian dari itu) untuk pelaksanaan dan pengiriman ADS dan penyerahan ADS dan, (6) biaya untuk pembagian hasil penjualan efek atau hak berdasarkan *deposit agreement* dalam jumlah senilai dengan biaya untuk menerbitkan ADS sebagaimana dimaksud di atas yang akan dibiayakan sebagai akibat dari penyimpanan oleh pemilik pada saat saham diterima sebagai pelaksanaan *rights* yang dibagikan kepada mereka berdasarkan *deposit agreement*, dan juga efek atau *rights* yang dijual oleh *depositary* dan hasil bersih yang dibagikan. Berdasarkan *deposit agreement*, depositary mengumpulkan biaya tersebut dengan mengurangi biaya-biaya dari jumlah yang dibagikan atau dengan menjual bagian dari harta yang dibagi untuk membayar biaya.

Biaya Yang Harus Dibayar *Depositary* kepada Kami

Depositary telah setuju untuk mengganti biaya-biaya tertentu sehubungan dengan program ADS kami dan yang kami keluarkan berdasarkan program. *Depositary* akan mengganti kepada kami, atau membayar jumlah untuk dan atas nama kami kepada pihak ketiga, atau mengesampingkan biaya dan pengeluaran, dalam jumlah kotor sebesar US$222.697,21 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010.

Tabel di bawah ini menunjukkan tipe biaya yang telah disetujui oleh *depositary* untuk diganti, dan tagihan-tagihan yang terkait dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 yang diganti:

Jenis Biaya	Jumlah ($)
Biaya percetakan	0,00
Biaya pendaftaran di New York Stock Exchange	54.083,96
Biaya terkait dengan program ADS	49.363,26
Total	**103.447,22**

Depositary juga setuju untuk mengesampingkan biaya-biaya standar yang berhubungan dengan administrasi program ADS dan telah membayar biaya tertentu secara langsung kepada pihak ketiga atas nama kami. Tabel berikut ini menunjukkan pengeluaran-pengeluaran yang telah dikesampingkan atau dibayar langsung kepada pihak ketiga oleh *Depositary* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010:

Jenis Biaya	Jumlah ($)
Biaya pengiriman, pencetakan dan jasa	0,00
Biaya rapat	4.116,16
Biaya dan pengeluaran terkait dengan administrasi program ADS	115.133,83
Total	**119.249,99**

Bagian 2

Butir 13: CIDERA JANJI, DIVIDEN YANG BELUM DIBAYAR DAN TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Menyusul terjadinya krisis keuangan Asia dan devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS pada akhir tahun 1997, Satelindo dinyatakan cidera janji akibat tidak memenuhi kewajiban hutangnya pada 1998. Satelindo melakukan restrukturisasi kewajiban hutangnya pada tahun 2000. Sebelum dilakukannya restrukturisasi hutang, Satelindo mempunyai hutang pokok keseluruhan sebesar US$530,5 juta, dimana US$519,1 juta dari hutang tersebut telah direstrukturisasi. Per tanggal 31 Desember 2010, baik kami ataupun anak perusahaan kami tidak memiliki cidera janji yang bersifat material sehubungan dengan kewajiban yang masih terhutang.

Butir 14: PERUBAHAN MATERIAL TERHADAP HAK PEMEGANG EFEK DAN PENGGUNAAN HASIL

Tidak ada.

Butir 15: PENGAWASAN DAN PROSEDUR

Pengawasan dan Prosedur Pengungkapan Informasi

Per tanggal 31 Desember 2010, atau Tanggal Evaluasi, manajemen kami, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, telah melakukan evaluasi terhadap efektifitas pengawasan dan prosedur pengungkapan informasi, sebagaimana didefinisikan di dalam Rules 13(a)-15(e) dan 15(d)-15(e) dari *Exchange Act*. Berdasarkan evaluasi tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada Tanggal Evaluasi, pengawasan dan prosedur pengungkapan informasi kami telah dilakukan secara memadai untuk memberikan kepastian yang sewajarnya bahwa informasi yang harus diungkapkan oleh kami di dalam laporan yang kami ajukan atau serahkan menurut ketentuan *Exchange Act* telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan di dalam aturan dan format yang berlaku, dan bahwa informasi tersebut telah dikumpulkan dan diberitahukan kepada manajemen kami, termasuk kepada Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sebagaimana layaknya, untuk memberikan waktu yang cukup untuk memberikan persetujuan atas pengungkapan tersebut.

Laporan Tahunan Manajemen tentang Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan

Sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 404 dari Sarbanes-Oxley Act of 2002, manajemen kami bertanggung jawab atas pembentukan dan pengadaan pengendalian internal yang memadai atas pelaporan keuangan, sebagaimana didefinisikan di dalam Rule 13a-15(f) dari Exchange Act. Sistem pengendalian internal kami atas pelaporan keuangan dirancang untuk memberikan kepastian yang sewajarnya kepada manajemen dan Komite Audit mengenai keandalan pelaporan keuangan kami dan penyusunan laporan keuangan yang dipublikasikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Direksi kami telah melakukan evaluasi terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan Kerangka Pengendalian Internal Terpadu/*Internal Control – Integrated Framework*, yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* atau COSO. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan meliputi kebijakan dan prosedur (1) mengenai pengadaan catatan yang memperlihatkan transaksi-transaksi dan pengaturan-pengaturan aset perusahaan secara terperinci, tepat dan wajar sebagaimana layaknya; (2) yang memberikan kepastian yang sewajarnya bahwa transaksi-transaksi telah dicatat sebagaimana diperlukan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan agar penerimaan dan pengeluaran perusahaan yang telah dilakukan semata-mata sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi kami; dan (3) yang memberikan kepastian yang sewajarnya sehubungan dengan pencegahan atau pendeteksian pada waktunya terhadap akuisisi, penggunaan atau pelepasan tanpa ijin atas aset perusahaan yang secara material akan sangat mempengaruhi laporan keuangan. Berdasarkan kriteria ini, manajemen kami menyimpulkan bahwa, pada tanggal 31 Desember 2010, pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan telah berjalan secara efektif.

Semua sistem pengendalian internal, sebaik apapun rancangannya, mempunyai keterbatasan misalnya adanya kemungkinan kesalahan manusia/human error dan adanya tindakan menghindari atau melampaui pengawasan dan prosedur yang mungkin tidak dapat mencegah atau mendeteksi pernyataan yang salah. Selain itu, perkiraan-perkiraan dari setiap evaluasi tentang efektifitas untuk masa mendatang harus juga memperhatikan risiko bahwa pengawasan dapat menjadi tidak memadai karena adanya perubahan-perubahan keadaan.

Purwantono, Suherman & Surja, member firm of Ernst & Young Global Limited, kantor akuntan publik independen terdaftar, telah melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi kami yang dicantumkan dalam laporan tahunan ini dan telah mengeluarkan laporan atestasi atas pengendalian internal seputar laporan keuangan per 31 Desember 2010. Laporan atestasi ini terdapat dalam halaman 3 dalam laporan keuangan konsolidasi kami yang terlampir.

Perubahan-perubahan di dalam Pengendalian internal atas Pelaporan Keuangan

Tidak ada perubahan-perubahan di dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan kami selama periode yang dicakup dalam laporan tahunan ini yang dapat mempengaruhi secara material, atau sewajarnya mungkin akan sangat mempengaruhi pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan.

Butir 16A: AHLI KEUANGAN DARI KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris telah menetapkan bahwa George Thia Peng Heok dan Kanaka Puradiredja adalah "ahli keuangan dari Komite Audit," sebagaimana didefinisikan di dalam Butir 16A dari Format 20-F, dan bahwa masing-masing dari mereka juga adalah "independen," sebagaimana didefinisikan di dalam Rule 10A-3 dari *Exchange Act*. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai George Thia Peng Heok, lihat "Butir 6. Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan—Direktur dan Manajemen Senior-Dewan Komisaris."

Butir 16B: KODE ETIK

Kami telah mengadaptasi Kode Etik yang berlaku bagi seluruh karyawan, termasuk Direksi kami. Kami telah mengumumkan Kode Etik ini di dalam situs kami di *www.indosat.com*, yang tersedia untuk umum. Salinan atas Kode Etik ini terdapat pada Lampiran 11.1 pada laporan tahunan kami pada Format 20-F untuk tahun pajak yang berakhir tanggal 31 Desember 2009. Kami telah mengeluarkan suatu Pedoman untuk menerapkan Kode Etik PT Indosat Tbk pada tanggal 20 November 2010 sebagai penegasan/pelaksanaan terhadap Keputusan Direksi No. 002/DIREKSI/2007 tentang Kode Etik.

Butir 16C: BIAYA DAN JASA AKUNTAN

Tabel berikut ini memuat rangkuman biaya jasa yang dibayar kepada Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, Indonesian member firm of Ernst & Young Global, auditor eksternal independen kami untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 dan biaya jasa yang dibayar kepada Purwantono, Suherman & Surja, anggota dari Ernst & Young Global dari Indonesia, auditor eksternal independen kami untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010:

	2008	2009	2010
		(dalam US$)	
Biaya audit[1]	1.963.307	2.330.298	2.287.934
Biaya terkait audit[2]	953.962	1.279.708	1.543.584
Biaya pajak[3]	–	–	–
Biaya yang lainnya[4]	–	–	–
Jumlah Biaya	**2.917.269**	**3.610.006**	**3.831.518**

(1) Biaya jasa audit merupakan biaya jasa profesional audit keuangan terhadap laporan keuangan kami dan anak perusahaan kami, PT Indosat Mega Media, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Starone Mitra Telekomunikasi dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dan audit pengendalian internal dan jasa review atestasi untuk memenuhi Section 404 dari Sarbanes-Oxley Act of 2002.
(2) Biaya yang terkait dengan audit pada tahun 2008, 2009 dan 2010 terutama terdiri dari biaya untuk melaksanakan penelaahan terbatas triwulanan atas laporan keuangan konsolidasi kami, termasuk laporan keuangan anak perusahaan kami, dan untuk penerbitan obligasi pada tahun 2008, 2009 dan 2010.
(3) Biaya jasa pajak merupakan biaya jasa profesional yang terkait dengan kepatuhan terhadap pajak dan konsultasi perencanaan/nasihat tentang perpajakan.
(4) Semua biaya lainnya merupakan biaya jasa profesional untuk layanan-layanan yang tidak secara langsung mendukung audit laporan keuangan.

Layanan profesional ini terdapat dalam cakupan dari audit yang diizinkan sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Komisi.

Pada Juni 2004, Komite Audit telah mengambil sebuah kebijakan yaitu seluruh jasa audit dan non-audit harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit. Dalam keadaan apapun, auditor eksternal kami tidak dapat memberikan jasa yang dilarang berdasarkan Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau peraturan yang diterbitkan dibawahnya. Jasa audit yang tidak dilarang dapat diberikan kepada kami sesuai dengan proses persetujuan terlebih dahulu dan dengan memperhatikan larangan yang ada. Kebijakan mengenai persetujuan terlebih dahulu tersebut disyaratkan untuk semua layanan yang diberikan oleh auditor eksternal dan tidak termasuk persetujuan untuk biaya yang telah ditentukan sebelumnya, yang tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu atau pengecualian de minimis.

Butir 16D: PENGECUALIAN DARI STANDAR PENCATATAN UNTUK KOMITE AUDIT

Sesuai dengan hukum Indonesia, kami mempunyai struktur dua tingkatan dewan, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Fungsi manajemen eksekutif dijalankan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris secara prinsip bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan-kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perusahaan dan memberikan nasehat kepada Direksi.

Menurut aturan Bursa Efek Indonesia, Komite Audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, satu di antaranya harus merupakan komisaris independen yang juga menjabat sebagai ketua Komite Audit, sementara dua anggota lainnya merupakan pihak independen eksternal dimana satu di antaranya harus memiliki keahlian akuntansi dan/atau keuangan. Komite Audit kami terdiri dari lima anggota dan diketuai oleh salah satu Komisaris Independen. Anggota Komite Audit kami diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Aturan pencatatan baru yang diadopsi berdasarkan Rule 10A-3 dari Exchange Act mewajibkan perusahaan swasta asing yang efeknya dicatat di NYSE untuk mempunyai komite audit yang terdiri dari para direktur independen. Aturan ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2005. Menurut Rule 10A-3(c)(3), perusahaan swasta asing dikecualikan dari persyaratan independensi apabila (i) pemerintah atau bursa dari negara asal mengharuskan perusahaan untuk mempunyai komite audit; (ii) komite audit terpisah dari direksi atau mempunyai anggota baik dari dalam maupun luar direksi; (iii) para anggota komite audit tidak dipilih oleh manajemen dan tidak ada pejabat eksekutif manajemen dari perusahaan yang menjadi anggota komite audit; (iv) pemerintah atau bursa dari negara asal mensyaratkan bahwa komite audit bersifat independen dari manajemen perusahaan; dan (v) komite audit bertanggung jawab atas pengangkatan, pengikatan dan pengawasan kerja dari para auditor eksternal. Kami mengikuti ketentuan pengecualian umum berdasarkan Rule 10A-3(c)(3) dari *Exchange Act* sehubungan dengan komposisi Komite Audit kami sebagaimana dimaksud di dalam Bagian 303A.11 dari pengungkapan melalui situs kami, yang tersedia untuk umum pada situs *www.indosat.com*.

Kami yakin bahwa dengan mengikuti ketentuan pengecualian tersebut, hal ini tidak akan memberikan dampak yang material ataupun negatif bagi kemampuan Komite Audit kami untuk bertindak independen. Kami juga yakin bahwa maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk memastikan agar Komite Audit bebas dari pengaruh manajemen dan agar tersedianya suatu forum yang terpisah dari manajemen dimana para auditor dan para pihak yang berkepentingan dapat secara bebas membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Aturan Bursa Efek Indonesia mensyaratkan bahwa setiap anggota Komite Audit harus independen. Aturan ini juga mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya dua dari anggota Komite Audit merupakan anggota independen eksternal, yang berarti bahwa mereka harus independen tidak saja dari Direksi tetapi juga Dewan Komisaris dan Perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, kami yakin standar yang ditetapkan oleh aturan Bursa Efek Indonesia setidaknya sama efektifnya dengan ketentuan dari New York Stock Exchange dalam memastikan agar Komite Audit kami bertindak secara independen.

Butir 16E: PEMBELIAN EFEK BERSIFAT EKUITAS OLEH PERUSAHAAN DAN PIHAK TERAFILIASI

Tidak berlaku.

Butir 16F: PERUBAHAN DALAM PENDAFTARAN AKUNTAN BERSERTIFIKAT

Tidak ada perubahan atau perbedaan pendapat dengan akuntan terhadap segala hal yang menyangkut prinsip-prinsip akuntansi, praktik atau pengungkapan keuangan selama dua tahun buku terakhir.

Butir 16G: TATA KELOLA PERUSAHAAN (*CORPORATE GOVERNANCE*)

Kami didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan bursa perdagangan utama kami untuk saham biasa kami adalah BEI. Saham biasa kami terdaftar di United States Securities and Exchange Commission dan tercatat di NYSE. Dengan demikian, kami tunduk pada ketentuan tata kelola perusahaan tertentu.

Ketentuan tata kelola perusahaan di negara kami terutama diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia dan Lembaga Keuangan, atau Peraturan BAPEPAM-LK dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh bursa efek Indonesia, yaitu BEI. Selain ketentuan peraturan ini, anggaran dasar kami memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur praktek tata kelola perusahaan.

Namun demikian, banyak aturan tentang tata kelola perusahaan dari NYSE *Listed Company Manual* atau standar pencatatan NYSE, yang tidak diwajibkan untuk "foreign private issuer" dan kami diperbolehkan untuk mengikuti praktek tata kelola perusahaan dari negara asal kami sebagai pengganti sebagian besar standar tata kelola perusahaan yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE. Meskipun kami secara sukarela telah mematuhi sebagian besar aturan tata kelola perusahaan menurut standar pencatatan NYSE, ada beberapa perbedaan antara standar tata kelola perusahaan kami dengan standar yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tercatat di NYSE yang akan dijelaskan di bawah ini.

Komite audit

Standar pencatatan NYSE mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE untuk memiliki suatu Komite Audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota yang memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang dimaksud dalam Section 303A.02. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK, perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia wajib memiliki komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu komisaris independen dan dua anggota dari luar perusahaan. Komite Audit kami terdiri dari lima anggota, tiga di antaranya adalah Komisaris Independen dan dua lainnya merupakan pihak luar yang independen, sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam-LK.

Tidak seperti ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE, Komite Audit kami tidak mempunyai tanggung jawab langsung atas penunjukkan, retensi dan kompensasi untuk auditor eksternal kami. Komite Audit kami hanya dapat memberikan rekomendasi auditor eksternal kepada Dewan Komisaris, dan keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari pemegang saham sebagaimana ditentukan oleh hukum Indonesia. Salinan dari charter tertulis Komite Audit kami dapat dilihat pada situs kami di *www.indosat.com*.

Susunan Direksi; Komite Pencalonan

Standar pencatatan NYSE mewajibkan agar direksi dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE terdiri dari sebagian besar direktur independen dan agar dibentuk komite pencalonan. Perusahaan kami memiliki struktur dua dewan, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, yang memisahkan kekuasaan manajemen (yang dijalankan oleh Direksi) dan kekuasaan pengawasan (yang dijalankan oleh Dewan Komisaris). Dengan demikian, apabila standar pencatatan NYSE menerapkan prinsip tata kelola perusahaan pada para direktur dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE, kami mengevaluasi

kegiatan usaha kami dengan mengacu pada para Komisaris kami. Sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Bapepam-LK dan aturan BEI, sepuluh anggota Dewan Komisaris kami terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota independen. Selain itu, kami tidak memiliki komite pencalonan. Pada rapat umum pemegang saham, para pemegang saham kami mencalonkan dan memilih orang-orang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris kami.

Menurut standar pencatatan NYSE, para direktur dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE harus bertemu dalam sesi eksekutif yang terjadwal secara berkala tanpa manajemen. Sehubungan dengan hal ini, baik Peraturan Bapepam-LK ataupun aturan BEI tidak mewajibkan kami untuk mengadakan sesi eksekutif tersebut dimana Dewan Komisaris bertemu tanpa kehadiran Direktur. Dahulu, semua anggota Dewan Komisaris kami, yang seluruhnya merupakan orang-orang non-manajemen, bertemu dalam sesi eksekutif secara berkala, selain dari pertemuan untuk menyampaikan informasi yang biasa dilakukan oleh Direksi kami kepada Dewan Komisaris. Pada awal tahun 2005, kami memberlakukan prosedur dimana Dewan Komisaris kami mengadakan pertemuan sesi eksekutif pada akhir dari setiap rapat yang terjadwal secara berkala, yang saat ini dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali.

Komite Remunerasi

Standar pencatatan NYSE mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di NYSE untuk memiliki komite remunerasi yang seluruh anggotanya terdiri dari direktur yang independen dengan peraturan tertulis yang mengatur kinerja dan tanggung jawab komite dan juga mewajibkan dilakukannya evaluasi kinerja tahunan. Komite Remunerasi kami terdiri dari tiga anggota Dewan Komisaris dan mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang dimuat dalam standar pencatatan NYSE. Akan tetapi, hanya satu komisaris dari tiga anggota komite yang merupakan komisaris independen dan peraturan tertulisnya tidak mengatur evaluasi kinerja tahunan Komite Remunerasi. Salinan dari peraturan Komite Remunerasi kami dapat ditemui dalam situs kami di *www.indosat.com*.

Butir 17: LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang terdapat pada bagian 19(a) pada laporan tahunan ini, bersama dengan laporan dari auditor independen kami, disampaikan sebagai bagian dalam laporan tahunan ini.

Butir 18: LAPORAN KEUANGAN

Tidak berlaku. Lihat butir 17.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD **(IFRS)**

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH REPORT OF INDEPENDENT
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
JANUARY 1, 2009 AND DECEMBER 31, 2009 AND 2010
AND YEARS ENDED DECEMBER 31, 2008, 2009 AND 2010

Table of Contents

	Page
Report of Independent Registered Public Accounting Firm	
Consolidated Statements of Financial Position……	1 - 4
Consolidated Statements of Comprehensive Income……	5 - 6
Consolidated Statements of Changes in Stockholders' Equity……..	7 - 9
Consolidated Statements of Cash Flows……..	10 - 11
Notes to Consolidated Financial Statements……	12 - 120

****

ERNST & YOUNG

Purwantono, Suherman & Surja
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
www.ey.com/id

Report of Independent Registered Public Accounting Firm

Report No. RPC-1030/PSS/2011

The Stockholders and Boards of Commissioners and Directors
PT Indosat Tbk

We have audited the accompanying consolidated statements of financial position of PT Indosat Tbk ("the Company") and its subsidiaries as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in stockholders' equity and cash flows for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Public Company Accounting Oversight Board (United States). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit also includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements, assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Indosat Tbk and its subsidiaries as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, and the consolidated results of their operations and their cash flows for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 in conformity with International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board.

As discussed in Note 2.g to the consolidated financial statements, the Company changed its method of accounting for leases effective January 1, 2010.

We also have audited, in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States), PT Indosat Tbk and its subsidiaries' internal control over financial reporting as of December 31, 2010, based on criteria established in Internal Control-Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission and our report dated April 20, 2011 expressed an unqualified opinion thereon.

Purwantono, Suherman & Surja

Purwantono, Suherman & Surja

Jakarta, Indonesia

April 20, 2011

ERNST & YOUNG

Purwantono, Suherman & Surja
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
www.ey.com/id

Report of Independent Registered Public Accounting Firm

Report No. RPC-1031/PSS/2011

The Stockholders and Boards of Commissioners and Directors
PT Indosat Tbk

We have audited PT Indosat Tbk ("the Company") and its subsidiaries' internal control over financial reporting as of December 31, 2010, based on criteria established in Internal Control-Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (the COSO criteria). The Company's management is responsible for maintaining effective internal control over financial reporting, and for its assessment of the effectiveness of internal control over financial reporting included in the accompanying Management's Annual Report on Internal Control over Financial Reporting. Our responsibility is to express an opinion on PT Indosat Tbk and its subsidiaries' internal control over financial reporting based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether effective internal control over financial reporting was maintained in all material respects. Our audit included obtaining an understanding of internal control over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk, and performing such other procedures as we considered necessary in the circumstances. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

A company's internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company, (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company, and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Because of its inherent limitations, internal control over financial reporting may not prevent or detect misstatements. Also, projections of any evaluation of effectiveness to future periods are subject to the risk that controls may become inadequate because of changes in conditions or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

In our opinion, PT Indosat Tbk and its subsidiaries maintained, in all material respects, effective internal control over financial reporting as of December 31, 2010, based on the COSO criteria.

Ernst & Young

We also have audited, in accordance with auditing standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States), the consolidated statements of financial position of PT Indosat Tbk and its subsidiaries as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in stockholders' equity and cash flows for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010, and our report dated April 20, 2011 expressed an unqualified opinion thereon.

Purwantono, Suherman & Surja

Purwantono, Suherman & Surja

Jakarta, Indonesia

April 20, 2011

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah, except share data)

	Notes	January 1, 2009 (Restated)*	December 31, 2009 (Restated)*	December 31, 2010
		Rp	Rp	Rp
ASSETS				
CURRENT ASSETS				
Cash and cash equivalents	2f8,4,16 25,31	5,737,866	2,835,999	2,075,270
Short-term investments - net of allowance for decline in value of Rp25,395 as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010	2f8,16	-	-	-
Accounts receivable	2d,2f,5,3b			
Trade - net of allowance for impairment of Rp496,163 as of January 1, 2009, Rp461,810 as of December 31, 2009 and Rp496,110 as of December 31, 2010	16,25,31	1,340,706	1,385,125	1,548,426
Others - net of allowance for impairment of Rp18,867 as of January 1, 2009, Rp16,544 as of December 31, 2009 and Rp15,281 as of December 31, 2010		16,914	564,859	10,031
Inventories - net of allowance for obsolescence of Rp3,368 as of January 1, 2009, Rp10,769 as of December 31, 2009 and Rp13,961 as of December 31, 2010	2f20	241,991	112,260	105,885
Derivative assets	2f8,2f15 16,28,31	656,594	224,004	69,334
Advances	29f	39,151	35,173	67,273
Taxes receivable	6,12	247,185	396,581	479,786
Prepaid expenses	2f19,2f21,9, 24,25	1,019,073	1,125,091	1,527,254
Other current assets	2f5	347,516	424,623	222,476
Other current financial assets	2f8,16,31	44,777	35,173	53,119
Total Current Assets		9,691,773	7,138,888	6,158,854

* Certain amounts shown here do not correspond to the 2009 financial statements and reflect reclassifications and adjustments made as detailed in Notes 2d and 2g, respectively.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah, except share data)

	Notes	January 1, 2009 (Restated)*	December 31, 2009 (Restated)*	2010
		Rp	Rp	Rp
NON-CURRENT ASSETS				
Due from related parties - net of allowance for impairment of Rp2,419 as of January 1, 2009, Rp1,182 as of December 31, 2009 and Rp646 as of December 31, 2010	2f8,16,25,31	42,496	7,215	8,421
Deferred tax assets - net	2f6,3b,12	70,744	87,999	95,018
Investments in associated companies - net of allowance for decline in value of Rp56,586 as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and Rp56,300 as of December 31, 2010	2f3,2f22	700	422	-
Other long-term investments - net of allowance for decline in value of Rp99,977 as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010	2f8,16	2,730	2,730	2,730
Property and equipment - net	2f16,2f17,2f18, 2f22,2g,7	38,333,613	44,358,138	43,489,401
Goodwill and other intangible assets - net	2f1,2f2,2f22, 3b,8	2,060,709	2,042,817	2,063,177
Long term prepaid rentals - net of current portion	2d,9	632,566	735,185	750,472
Long-term prepaid licenses - net of current portion	2f19,2f21	199,289	463,549	397,708
Long-term advances	10	456,093	294,391	216,643
Long-term prepaid pension - net of current portion	2f7,3b,24,25	169,986	147,380	111,344
Long-term receivables	2d,2f8	67,081	50,767	45,911
Other non-current financial assets	2d,2f8,16	72,800	100,004	77,675
Other non-current assets	2d,2f21,25	61,899	5,518	8,341
Total Non-current Assets		42,170,706	48,296,115	47,266,841
TOTAL ASSETS		**51,862,479**	**55,435,003**	**53,425,695**

* Certain amounts shown here do not correspond to the 2009 financial statements and reflect reclassifications and adjustments made as detailed in Notes 2d and 2g, respectively.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah, except share data)

	Notes	January 1, 2009 (Restated)*	December 31, 2009 (Restated)*	2010
		Rp	Rp	Rp
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY				
CURRENT LIABILITIES				
Accounts payable - trade	2f9,16,25,31	608,754	537,476	645,505
Procurement payable	2f9,11,16, 25,31	6,446,357	5,289,782	3,644,467
Taxes payable	2f6,12	111,169	61,948	23,789
Accrued expenses	2f9,13,16,24,25,31	1,445,238	1,525,561	1,710,885
Unearned income	2f5	867,456	962,975	1,106,914
Deposits from customers	31	32,121	22,463	50,279
Derivative liabilities	2f9,2f15, 16,28,31	315,866	174,540	215,403
Current maturities of:				
Loans payable	2f9,14,16,31	572,469	1,440,259	3,184,147
Bonds payable	2f9,15,16,31	56,442	2,840,662	1,098,131
Other current liabilities	2d,24,25,31	232,821	167,937	207,268
Other current financial liabilities	2f9,16,31	31,022	43,721	23,127
Total Current Liabilities		10,719,715	13,067,324	11,909,915
NON-CURRENT LIABILITIES				
Due to related parties	2f9,16,25,31	14,699	13,764	22,099
Deferred tax liabilities - net	2f6,2g,12	1,348,746	1,651,818	1,951,306
Loans payable - net of current maturities	2f9,14, 16,25,31	10,812,160	12,715,492	7,666,804
Bonds payable - net of current maturities	2f9,15,16,31	10,315,616	8,472,175	12,114,104
Employee benefit obligations	2d,17	695,687	825,714	872,407
Other non-current liabilities	2d,25,31	130,661	113,807	187,097
Other non-current financial liabilities	2d,2f9,16,31	45,511	-	-
Total Non-current Liabilities		23,363,080	23,792,770	22,813,817
TOTAL LIABILITIES		**34,082,795**	**36,860,094**	**34,723,732**

* Certain amounts shown here do not correspond to the 2009 financial statements and reflect reclassifications and adjustments made as detailed in Notes 2d and 2g, respectively.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah, except share data)

	Notes	January 1, 2009 (Restated)*	December 31, 2009 (Restated)*	2010
		Rp	Rp	Rp
EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE COMPANY				
Capital stock - Rp100 par value per A share and B share Authorized - 1 A share and 19,999,999,999 B shares Issued and fully paid - 1 A share and 5,433,933,499 B shares	18	543,393	543,393	543,393
Premium on capital stock	18	1,546,587	1,546,587	1,546,587
Retained earnings				
Appropriated		100,678	119,464	134,446
Unappropriated	2g	14,885,383	15,631,240	15,691,773
Other components of equity	2b,2f3,2f4	417,395	406,473	401,377
Total Equity Attributable to Owners of the Company		17,493,436	18,247,157	18,317,576
Non-controlling Interests	2g	286,248	327,752	384,387
TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY		**17,779,684**	**18,574,909**	**18,701,963**
TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY		**51,862,479**	**55,435,003**	**53,425,695**

* Certain amounts shown here do not correspond to the 2009 financial statements and reflect reclassifications and adjustments made as detailed in Notes 2d and 2g, respectively.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended December 31, 2008, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah, except share data)

	Notes	2008 (Restated)*	2009 (Restated)*	2010
		Rp	Rp	Rp
OPERATING REVENUES	2f5,3b,19, 25,30			
Cellular	2d	14,460,806	14,331,235	15,867,091
Multimedia, Data Communication, Internet ("MIDI")		2,733,412	2,712,632	2,488,110
Fixed telecommunication	2d	2,021,753	1,803,039	1,293,177
Total Operating Revenues		**19,215,971**	**18,846,906**	**19,648,378**
OPERATING EXPENSES	2f5.4			
Cost of services	2d,20,25	6,627,804	7,087,850	7,113,410
Depreciation and amortization	2f2,2f16,7, 8	4,565,370	5,571,600	6,162,851
Personnel	2f7,21,24,25	1,638,993	1,451,560	1,411,244
Marketing		918,124	816,934	779,192
General and administration	22,25	737,432	693,437	659,987
Total Operating Expenses		**14,487,723**	**15,621,381**	**16,126,684**
OPERATING INCOME		**4,728,248**	**3,225,525**	**3,521,694**
OTHER INCOME (EXPENSES)	2f5			
Gain (loss) on foreign exchange - net	2f4,2f11,5	(885,729)	1,656,407	492,401
Interest income	2f5.2,25	460,089	138,951	143,402
Financing cost	23,25	(1,858,294)	(1,872,967)	(2,271,628)
Gain (loss) on change in fair value of derivatives - net	2f11,2f15,28	136,603	(486,916)	(448,831)
Others - net	12	(25,597)	(116,821)	(111,830)
Other Expenses - Net		**(2,172,928)**	**(681,346)**	**(2,196,486)**
PROFIT BEFORE INCOME TAX		**2,555,320**	**2,544,179**	**1,325,208**
INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)	2f6,3b,12			
Current		(587,642)	(494,490)	(128,171)
Deferred	2g	102,302	(289,459)	(294,167)
Income Tax Expense - Net		**(485,340)**	**(783,949)**	**(422,338)**
PROFIT FOR THE YEAR		**2,069,980**	**1,760,230**	**902,870**
OTHER COMPREHENSIVE INCOME	12			
Differences in foreign currency translation		9,485	(14,563)	(6,795)
Income tax effect		(2,371)	3,641	1,699
Differences in foreign currency translation - net of tax		7,114	(10,922)	(5,096)
Difference in transaction of equity changes in associated company		389	-	-
Income tax effect		(97)	-	-
Difference in transaction of equity changes in associated company - net of tax		292	-	-

* Certain amounts shown here do not correspond to the 2009 financial statements and reflect reclassifications and adjustments made as detailed in Notes 2d and 2g, respectively.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (continued)
Years Ended December 31, 2008, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah, except share data)

	Notes	2008 (Restated)*	2009 (Restated)*	2010
		Rp	Rp	Rp
OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX	2f4	7,406	(10,922)	(5,096)
NET COMPREHENSIVE INCOME		**2,077,386**	**1,749,308**	**897,774**
PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:				
Owners of the Company		2,043,775	1,703,898	824,637
Non-controlling interests		26,205	56,332	78,233
Total		**2,069,980**	**1,760,230**	**902,870**
OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET OF TAX ATTRIBUTABLE TO:				
Owners of the Company		7,406	(10,922)	(5,096)
Non-controlling interests		-	-	-
Total		**7,406**	**(10,922)**	**(5,096)**
NET COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:				
Owners of the Company		2,051,181	1,692,976	819,541
Non-controlling interests		26,205	56,332	78,233
Total		**2,077,386**	**1,749,308**	**897,774**
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE COMPANY	2f25,18,26	**376.11**	**313.57**	**151.76**
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER AMERICAN DEPOSITARY SHARE (ADS) (50 B SHARES PER ADS) ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE COMPANY	2f25,18,26	**18,805.67**	**15,678.31**	**7,587.85**

* Certain amounts shown here do not correspond to the 2009 financial statements and reflect reclassifications and adjustments made as detailed in Notes 2d and 2g, respectively.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY
Years Ended December 31, 2008, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah)

Description	Notes	Attributable to the Owners of the Company							Non-controlling Interests	Net Equity
		Capital Stock – Issued and Fully Paid	Premium on Capital Stock	Difference in Transactions of Equity Changes in Associated Companies/ Subsidiaries*	Difference in Foreign Currency Translation**	Retained Earnings		Total		
						Appropriated	Unappropriated			
Balance as of January 1, 2008, as previously reported		543,393	1,546,587	403,812	6,177	80,258	13,846,541	16,426,768	294,794	16,721,562
Accounting policy change	2g	-	-	-	-	-	36,523	36,523	444	36,967
Balance as of January 1, 2008, as restated		543,393	1,546,587	403,812	6,177	80,258	13,883,064	16,463,291	295,238	16,758,529
Profit for the year, as previously reported		-	-	-	-	-	2,037,753	2,037,753	25,998	2,063,751
Accounting policy change	2g	-	-	-	-	-	6,022	6,022	207	6,229
Other comprehensive income		-	-	292	7,114	-	-	7,406	-	7,406
Total comprehensive income for the year, as restated		-	-	292	7,114	-	2,043,775	2,051,181	26,205	2,077,386
Resolution during the Annual Stockholders' General Meeting on June 5, 2008	27									
Declaration of cash dividend		-	-	-	-	-	(1,021,036)	(1,021,036)	-	(1,021,036)
Appropriation for reserve fund		-	-	-	-	20,420	(20,420)	-	-	-
Changes in non-controlling interest		-	-	-	-	-	-	-	(35,195)	(35,195)
Balance as of December 31, 2008, as restated		543,393	1,546,587	404,104	13,291	100,678	14,885,383	17,493,436	286,248	17,779,684

**This reserve includes difference in foreign currency translation resulting from reduction in tax rates.*
***This reserve arose from the translation of the financial statements of Indosat Finance B.V. and Indosat International Finance Company B.V. from euro, and Indosat Singapore Pte. Ltd. from U.S. dollar to rupiah, net of applicable taxes.*

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)
Years Ended December 31, 2008, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah)

Description	Notes	Attributable to the Owners of the Company								
		Capital Stock – Issued and Fully Paid	Premium on Capital Stock	Difference in Transactions of Equity Changes in Associated Companies/ Subsidiaries*	Difference in Foreign Currency Translation**	Retained Earnings		Total	Non-controlling Interests	Net Equity
						Appropriated	Unappropriated			
Balance as of January 1, 2009, as previously reported		543,393	1,546,587	404,104	13,291	100,678	14,842,838	17,450,891	285,597	17,736,488
Accounting policy change	2g	-	-	-	-	-	42,545	42,545	651	43,196
Balance as of January 1, 2009, as restated		543,393	1,546,587	404,104	13,291	100,678	14,885,383	17,493,436	286,248	17,779,684
Profit for the year, as previously reported		-	-	-	-	-	1,690,804	1,690,804	56,194	1,746,998
Accounting policy change	2g	-	-	-	-	-	13,094	13,094	138	13,232
Other comprehensive income		-	-	-	(10,922)	-	-	(10,922)	-	(10,922)
Net comprehensive income, as restated		-	-	-	(10,922)	-	1,703,898	1,692,976	56,332	1,749,308
Resolution during the Annual Stockholders' General Meeting on June 19, 2009	27									
Declaration of cash dividend		-	-	-	-	-	(939,255)	(939,255)	-	(939,255)
Appropriation for reserve fund		-	-	-	-	18,786	(18,786)	-	-	-
Changes in non-controlling interest		-	-	-	-	-	-	-	(14,828)	(14,828)
Balance as of December 31, 2009, as restated		543,393	1,546,587	404,104	2,369	119,464	15,631,240	18,247,157	327,752	18,574,909

**This reserve includes difference in foreign currency translation resulting from reduction in tax rates.*
***This reserve arose from the translation of the financial statements of Indosat Finance B.V. and Indosat International Finance Company B.V. from euro, and Indosat Singapore Pte. Ltd. from U.S. dollar to rupiah, net of applicable taxes.*

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)
Years Ended December 31, 2008, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah)

Description	Notes	Attributable to the Owners of the Company								
		Capital Stock – Issued and Fully Paid	Premium on Capital Stock	Difference in Transactions of Equity Changes in Associated Companies/ Subsidiaries*	Difference in Foreign Currency Translation**	Retained Earnings		Total	Non-controlling Interests	Net Equity
						Appropriated	Unappropriated			
Balance as of January 1, 2010, as previously reported		543,393	1,546,587	404,104	2,369	119,464	15,575,601	18,191,518	326,963	18,518,481
Accounting policy change	2g	-	-	-	-	-	55,639	55,639	789	56,428
Balance as of January 1, 2010, as restated		543,393	1,546,587	404,104	2,369	119,464	15,631,240	18,247,157	327,752	18,574,909
Profit for the year		-	-	-	-	-	824,637	824,637	78,233	902,870
Other comprehensive income		-	-	-	(5,096)	-	-	(5,096)	-	(5,096)
Net comprehensive income		-	-	-	(5,096)	-	824,637	819,541	78,233	897,774
Resolution during the Annual Stockholders' General Meeting on June 22, 2010	27									
Declaration of cash dividend		-	-	-	-	-	(749,122)	(749,122)	-	(749,122)
Appropriation for reserve fund		-	-	-	-	14,982	(14,982)	-	-	-
Changes in non-controlling interest		-	-	-	-	-	-	-	(21,598)	(21,598)
Balance as of December 31, 2010		543,393	1,546,587	404,104	(2,727)	134,446	15,691,773	18,317,576	384,387	18,701,963

**This reserve includes difference in foreign currency translation resulting from reduction in tax rates.*
***This reserve arose from the translation of the financial statements of Indosat Finance B.V. and Indosat International Finance Company B.V. from euro, and Indosat Singapore Pte. Ltd. and Indosat Palapa B.V. from U.S. dollar to rupiah, net of applicable taxes.*

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Years Ended December 31, 2008, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah)

	Notes	2008	2009	2010
		Rp	Rp	Rp
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
Cash received from:				
Customers		18,336,914	18,415,890	19,678,609
Interest income		460,020	146,826	145,067
Refund of taxes	6	271,321	84,650	41,753
Settlement from derivative contract	28a	58,375	-	-
Cash paid to/for:				
Suppliers and others		(7,992,693)	(10,116,183)	(9,061,007)
Financing cost		(1,776,934)	(1,730,149)	(2,175,997)
Employees		(1,708,174)	(1,359,817)	(1,310,556)
Income taxes		(897,161)	(878,137)	(215,874)
Interest rate swap contracts	28v-ai	(2,432)	(47,715)	(117,231)
Swap cost from cross currency swap contracts	28a,c-o	(235,971)	(125,748)	(121,449)
Settlement from derivative contract	28c,28k	-	-	(24,431)
Long-term prepaid licenses	2f19	-	(338,408)	-
Net Cash Provided by Operating Activities		**6,513,265**	**4,051,209**	**6,838,884**
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
Proceeds of Palapa D-Satellite insurance claim	7	-	-	537,657
Cash dividend received from other long-term investment		26,348	26,774	19,281
Proceeds from sale of property and equipment	7	1,131	2,253	7,741
Acquisitions of property and equipment	7	(10,307,932)	(10,684,690)	(6,495,146)
Acquisition of intangible assets	8	(6,952)	(15,044)	(40,052)
Proceeds from sale of short-term investment		1,250	-	-
Purchase of investment in an associated company		(700)	-	(194)
Net Cash Used in Investing Activities		**(10,286,855)**	**(10,670,707)**	**(5,970,713)**
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
Proceeds from bonds payable	15	1,650,000	1,500,000	5,851,301
Proceeds from long-term loans	14	5,126,570	3,892,786	1,092,059
Settlement from derivative contract	28b	109,099	-	59,925
Decrease (increase) in restricted cash and cash equivalents		4,200	(18,206)	2,846
Repayment of long-term loans	14	(506,220)	(632,814)	(4,098,277)
Repayment of bonds payable	15	(3,828,827)	(14,453)	(3,720,815)
Cash dividend paid by the Company	27	(1,021,037)	(939,255)	(749,122)
Swap cost from cross currency swap contract	28b	(64,009)	(54,116)	(46,136)
Cash dividend paid by subsidiaries to non-controlling interest		(11,326)	(9,291)	(21,436)
Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities		**1,458,450**	**3,724,651**	**(1,629,655)**

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT INDOSAT Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
Years Ended December 31, 2008, 2009 and 2010
(Expressed in millions of rupiah)

	Notes	2008	2009	2010
		Rp	Rp	Rp
NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		**(2,315,140)**	**(2,894,847)**	**(761,484)**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR		**8,053,006**	5,737,866	2,835,999
CASH AND CASH EQUIVALENTS OF LIQUIDATED SUBSIDIARY*		**-**	(7,020)	**-**
CASH AND CASH EQUIVALENTS OF ACQUIRED SUBSIDIARY	1b	**-**	**-**	755
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR	4	**5,737,866**	**2,835,999**	**2,075,270**
DETAILS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS:				
Time deposits with original maturities of three months or less and deposits on call		5,469,039	2,611,529	1,791,783
Cash on hand and in banks		268,827	224,470	283,487
Cash and cash equivalents as stated in the consolidated statements of financial position		**5,737,866**	**2,835,999**	**2,075,270**
SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION:				
Transactions not affecting cash flows:				
Acquisitions of property and equipment credited to:				
Long-term advances		190,906	161,702	77,748
Long-term loans payable		1,516,354	723,112	-
Procurement payables		274,248	-	-
Other non-current liabilities		45,511	-	-

* PT Satelindo Multi Media ("SMM") was liquidated on June 23, 2009.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

1. GENERAL

a. Company's Establishment

PT Indosat Tbk ("the Company") was established in the Republic of Indonesia on November 10, 1967 within the framework of the Indonesian Foreign Investment Law No. 1 of 1967 based on the notarial deed No. 55 of Mohamad Said Tadjoedin, S.H. The deed of establishment was published in Supplement No. 24 of State Gazette No. 26 dated March 29, 1968 of the Republic of Indonesia. In 1980, the Company was sold by American Cable and Radio Corporation, an International Telephone & Telegraph subsidiary, to the Government of the Republic of Indonesia ("the Government") and became a State-owned Company (*Persero*).

On February 7, 2003, the Company received the approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM) in its letter No. 14/V/PMA/2003 for the change of its legal status from a State-owned Company (*Persero*) to a Foreign Capital Investment Company. Subsequently, on March 21, 2003, the Company received the approval from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia on the amendment of its Articles of Association to reflect the change of its legal status.

The Company's Articles of Association has been amended from time to time. The latest amendment was covered by notarial deed No. 123 dated January 28, 2010 of Aulia Taufani, S.H., (as a substitute notary of Sutjipto, S.H.) as approved in the Stockholders' Extraordinary General Meeting held on January 28, 2010, in order to comply with the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) Rule No. IX.J.1 dated May 14, 2008 on the Principles of Articles of Association of Limited Liability Companies that Conduct Public Offering of Equity Securities and Public Companies and Rule No. IX.E.1 on Affiliate Transactions and Certain Conflict of Interests Transactions. The latest amendment of the Company's Articles of Association has been approved by and reported to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its letters No. AHU-09555.AH.01.02 Year 2010 dated February 22, 2010 and No. AHU-AH.01.10-04964 dated February 25, 2010. The amendments relate to, among others, the changes in the Company's purposes, objectives and business activities, appointment of acting President Director if the incumbent President Director is unavailable and definition of conflict of interests.

According to article 3 of its Articles of Association, the Company's purposes and objectives are to provide telecommunications networks, telecommunications services as well as information technology and/or convergence technology services by carrying out the following main business activities:

a. To provide telecommunications networks, telecommunications services as well as information technology and/or convergence technology services, including but not limited to providing basic telephony services, multimedia services, internet telephony services for public use, interconnection internet services, internet access services, mobile telecommunications networks and fixed telecommunications networks; and

b. To engage in payment transactions and money transfer services through telecommunications networks as well as information technology and/or convergence technology.

The Company can provide supporting business activities in order to achieve the purposes and objectives, and to support its main businesses, as follows:

a. To plan, to procure, to modify, to build, to provide, to develop, to operate, to lease, to rent, and to maintain infrastructures/facilities including resources to support the Company's business in providing telecommunications networks, telecommunications services as well as information technology and/or convergence technology services;

1. GENERAL (continued)

a. Company's Establishment (continued)

b. To conduct business and operating activities (including development, marketing and sales of telecommunications networks, telecommunications services as well as information technology and/or convergence technology services by the Company), including research, customer services, education and courses (both domestic and overseas); and

c. To conduct other activities necessary to support and/or related to the provision of telecommunications networks, telecommunications services as well as information technology and/or convergence technology services including but not limited to electronic transactions and provision of hardware, software, content as well as telecommunications-managed services.

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Companies") as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010 and for each of the three years in the period ended December 31, 2010 were approved and authorized for issue by the Board of Directors on April 20, 2011, as reviewed and recommended for approval by the Audit Committee.

b. Structure of the Company's Subsidiaries

As of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, the Company has direct and indirect ownership in the following subsidiaries:

Name of Subsidiary	Location	Principal Activity	Start of Commercial Operations	Percentage of Ownership (%)		
				January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010
Indosat Palapa Company B.V. ("IPBV") [2]	Amsterdam	Finance	2010	-	-	100.00
Indosat Mentari Finance Company B.V. ("IMBV") [2]	Amsterdam	Finance	2010	-	-	100.00
Indosat Finance Company B.V. ("IFB") [3]	Amsterdam	Finance	2003	100.00	100.00	100.00
Indosat International Finance Company B.V. ("IIFB") [4]	Amsterdam	Finance	2005	100.00	100.00	100.00
Indosat Singapore Pte. Ltd. ("ISPL")	Singapore	Telecommunication	2005	100.00	100.00	100.00
PT Indosat Mega Media ("IMM")	Jakarta	Multimedia	2001	99.85	99.85	99.85
PT Starone Mitra Telekomunikasi ("SMT")	Semarang	Telecommunication	2006	72.54	72.54	72.54
PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	Jakarta	Data Communication	1989	72.36	72.36	72.36
PT Lintas media Danawa ("LMD")	Jakarta	Information and Communication Services	2008	-	-	50.65
PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("APE") (Note 2b)	Jakarta	Telecommunication	2000	39.80	39.80	39.80
PT Satelindo Multi Media ("SMM") [1]	Jakarta	Telecommunication	1999	99.60	-	-

1. GENERAL (continued)

b. Structure of the Company's Subsidiaries (continued)

Name of Subsidiary	Total Assets (Before Eliminations)		
	January 1, 2009 (Restated)	December 31, 2009 (Restated)	December 31, 2010
IPBV [2]	-	-	5,966,764
IMBV [2]	-	-	5,946,885
IFB [3]	2,637,074	2,261,226	21,876
IIFB [4]	1,235,816	1,044,174	9,635
ISPL	21,167	28,779	54,353
IMM	735,632	738,371	814,652
SMT	147,814	139,833	155,277
Lintasarta	1,326,762	1,407,461	1,739,049
LMD	-	-	2,671
APE	133,241	179,681	221,297
SMM [1]	10,690	-	-

[1] Liquidated on June 23, 2009
[2] IPBV and IMBV were incorporated in Amsterdam on April 28, 2010 to engage in treasury activities, to lend and borrow money, whether in the form of securities or otherwise, to finance enterprises and companies, to grant security in respect of their obligation or those of their group companies and third parties.
[3] Based on an IFB shareholder's resolution dated November 6, 2008, IFB decided to refund capital injection amounting to EUR99,996. The Company received such refund in February 2009.
[4] Based on an IIFB shareholder's resolution dated November 6, 2008, IIFB decided to refund capital injection amounting to EUR1,124,064. The Company received such refund in February 2009.

c. Merger of the Company, Satelindo, Bimagraha and IM3

Based on Merger Deed No. 57 dated November 20, 2003 ("merger date") of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., the Company, PT Satelit Palapa Indonesia ("Satelindo"), PT Bimagraha Telekomindo ("Bimagraha") and PT Indosat Multi Media Mobile ("IM3") agreed to merge, with the Company as the surviving entity. All assets and liabilities owned by Satelindo, Bimagraha and IM3 were transferred to the Company on the merger date. These three companies were dissolved by operation of law without the need to undergo the regular liquidation process.

The names "Satelindo" and "IM3" in the following notes refer to these entities before they were merged with the Company, or as the entities that entered into contractual agreements that were taken over by the Company as a result of the merger.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 are as follows:

a. Basis of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are presented using the historical cost basis of accounting, except for inventories which are stated at the lower of cost or net realizable value and derivative financial instruments and available-for-sale financial assets which are stated at fair value.

The consolidated statements of cash flows classify cash receipts and payments into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

The consolidated financial statements are presented in Indonesian rupiah, which is the Company's functional and reporting currency.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the Company's accounts and those of its subsidiaries (Note 1b).

In accordance with IAS 27 (Revised 2008), the Company prepares and presents the consolidated financial statements for a group of entities under its control.

Control is presumed to exist when the parent owns, directly or indirectly through subsidiaries, more than half of the voting power of an entity. Control also exists when the parent owns half or less of the voting power of an entity when there is:

a) power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;
b) power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;
c) power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or
d) power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.

The consolidated financial statements also include the accounts of APE (Lintasarta's subsidiary). The accounts of APE in 2008, 2009 and 2010 were consolidated because its financial and operating policies were controlled by Lintasarta.

The accounts of IPBV, IMBV, IFB, IIFB, and ISPL were translated into rupiah amounts at the middle rates of exchange prevailing at balance sheet date for balance sheet accounts and the average rates during the year for profit or loss accounts. The resulting differences arising from the translations of the financial statements of IPBV, IMBV, IFB, IIFB, and ISPL are presented as part of "Other Components of Equity" under the Stockholders' Equity section of the consolidated balance sheets.

Non-controlling interest in subsidiaries represents the minority stockholders' proportionate share in the equity (including net income) of the subsidiaries which are not wholly-owned. Intergroup balances, transactions, income and expenses are eliminated in full on consolidation.

c. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Companies have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRS") as issued by the International Accounting Standards Board ("IASB").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Reclassifications

Certain accounts were reclassified to allow their comparison with 2010 accounts. The following items discuss the significant reclassifications in the consolidated financial statements:

For the year ended December 31, 2008:

As Previously Reported	As Reclassified	Amount
Operating revenues - cellular	Operating expenses - cost of services	267,542*
Operating revenues - fixed telecommunications	Operating revenues - cellular	7,811

As of January 1, 2009:

As Previously Reported	As Reclassified	Amount
Long-term receivables	Other non-current financial assets	14,443
Other non-current assets	Long-term prepaid rentals - net of current portion	632,566
Other non-current liabilities	Employee benefit obligations - net of current portion	695,687
Other non-current financial liabilities	Other non-current liabilities	6,667

As of and for the year ended December 31, 2009:

As Previously Reported	As Reclassified	Amount
Accounts receivable - others	Accounts receivable - trade - third parties	28,428
Long-term receivables	Other non-current financial assets	15,844
Other non-current assets	Long-term prepaid rentals - net of current portion	735,185
Other non-current liabilities	Employee benefit obligations - net of current portion	825,714
	Other current liabilities	3,112
Other non-current financial liabilities	Other non-current liabilities	6,546
Operating revenues - cellular	Operating expenses - cost of services	217,421*
Operating revenues - fixed telecommunications	Operating revenues - cellular	154,140

* Refer to Note 2g.

e. Adoption of New and Revised Accounting Standards

New and amended standards and interpretations

The accounting policies adopted are consistent with those of the previous financial year, except for the following new and amended IFRS and IFRIC interpretations for financial statements beginning on or after January 1, 2010:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Adoption of New and Revised Accounting Standards (continued)

New and amended standards and interpretations (continued)

- IFRS 2 *Share-based Payment: Group Cash-settled, Share-based Payment Transactions* for financial statements beginning on or after January 1, 2010
- IFRS 3 *Business Combinations (Revised)* and IAS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements (Amended)* for financial statements beginning on or after 1 July 2009, including consequential amendments to IFRS 2, IFRS 5, IFRS 7, IAS 7,IAS 21, IAS 28, IAS 31 and IAS 39
- IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement - Eligible Hedged Items* effective July 1, 2009
- IFRIC 17 *Distributions of Non-cash Assets to Owners* for financial statements beginning on or after July 1, 2009
- Improvements to IFRSs (May 2008)
- Improvements to IFRSs (April 2009)

The adoption of the standards or interpretations is described below:

IFRS 2 *Share-based Payment (Revised)*
The IASB issued an amendment to IFRS 2 that clarified the scope and the accounting for group cash-settled share-based payment transactions. It did not have an impact on the financial position or performance of the Companies.

IFRS 3 *Business Combinations (Revised)* and IAS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements (Amended)*
IFRS 3 (Revised) introduces significant changes in the accounting for business combinations occurring after becoming effective. Changes affect the valuation of non-controlling interest, the accounting for transaction costs, the initial recognition and subsequent measurement of a contingent consideration and business combinations achieved in stages. These changes will impact the amount of goodwill recognized, the reported results in the period that an acquisition occurs and future reported results.

IAS 27 (Amended) requires that a change in the ownership interest of a subsidiary (without loss of control) is accounted for as a transaction with owners in their capacity as owners. Therefore, such transactions will no longer give rise to goodwill, nor will it give rise to a gain or loss. Furthermore, the amended standard changes the accounting for losses incurred by the subsidiary as well as the loss of control of a subsidiary. The changes by IFRS 3 (Revised) and IAS 27 (Amended) affect acquisitions or loss of control of subsidiaries and transactions with non-controlling interests after January 1, 2010.

The change in accounting policy was applied prospectively and had no material impact on earnings per share.

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement – Eligible Hedged Items
The amendment clarifies that an entity is permitted to designate a portion of the fair value changes or cash flow variability of a financial instrument as a hedged item. This also covers the designation of inflation as a hedged risk or portion in particular situations. The Companies have concluded that the amendment will have no impact on the financial position or performance of the Companies, as the Companies have not entered into any such hedges.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Adoption of New and Revised Accounting Standards (continued)

New and amended standards and interpretations (continued)

IFRIC 17 *Distribution of Non-cash Assets to Owners*
This interpretation provides guidance on accounting for arrangements whereby an entity distributes non-cash assets to shareholders either as a distribution of reserves or as dividends. The interpretation has no effect on either the financial position or performance of the Companies.

Improvements to IFRSs
In May 2008 and April 2009, the IASB issued omnibus of amendments to its standards, primarily with a view to removing inconsistencies and clarifying wording. There are separate transitional provisions for each standard. The adoption of the following amendments resulted in changes to accounting policies but did not have any impact on the financial position or performance of the Companies, except for The amendment on IAS 17 Leases as disclosed in Note 2g.

Issued in May 2008

- IFRS 5 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations:* clarifies that when a subsidiary is classified as held for sale, all its assets and liabilities are classified as held for sale, even when the entity remains a non-controlling interest after the sale transaction. The amendment is applied prospectively and has no impact on the financial position nor financial performance of the Companies.

Issued in April 2009

- IFRS 5 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*: clarifies that the disclosures required in respect of non-current assets and disposal groups classified as held for sale or discontinued operations are only those set out in IFRS 5. The disclosure requirements of other IFRSs only apply if specifically required for such non-current assets or discontinued operations. This amendment did not have an impact on the financial position or performance of the Companies.
- IFRS 8 *Operating Segments*: clarifies that segment assets and liabilities need only be reported when those assets and liabilities are included in measures that are used by the chief operating decision maker. As the Companies' chief operating decision maker does review segment assets and liabilities, the Companies have continued to disclose this information in Note 32.
- IAS 7 *Statement of Cash Flows*: states that only expenditure that results in recognizing an asset can be classified as a cash flow from investing activities.
- IAS 36 *Impairment of Assets:* the amendment clarifies that the largest unit permitted for allocating goodwill, acquired in a business combination, is the operating segment as defined in IFRS 8 before aggregation for reporting purposes. The amendment has no impact on the Companies as the annual impairment test is performed before aggregation.

Other amendments resulting from Improvements to IFRSs to the following standards did not have any impact on the accounting policies, financial position or performance of the Companies:

Issued in April 2009

- IFRS 2 *Share-based Payment*
- IAS 1 *Presentation of Financial Statements*
- IAS 34 *Interim Financial Reporting*
- IAS 38 *Intangible Assets*
- IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*
- IFRIC 9 *Reassessment of Embedded Derivatives*
- IFRIC 16 *Hedge of a Net Investment in a Foreign Operation*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Adoption of New and Revised Accounting Standards (continued)

Standards and Interpretations in issue not yet adopted

Standards issued but not yet effective up to the date of issuance of the Companies' financial statements are listed below. This listing is of standards and interpretations issued, which the Companies reasonably expect to be applicable at a future date. The Companies intend to adopt those standards when they become effective.

IAS 24 *Related Party Disclosures (Amendment)*
The amended standard is effective for annual periods beginning on or after January 1, 2011. It clarified the definition of a related party to simplify the identification of such relationships and to eliminate inconsistencies in its application. The revised standard introduces a partial exemption of disclosure requirements for government-related entities. The Companies do not expect any impact on their financial position or performance. Early adoption is permitted for either the partial exemption for government-related entities or for the entire standard.

IAS 32 *Financial Instruments: Presentation – Classification of Rights Issues (Amendment)*
The amendment to IAS 32 is effective for annual periods beginning on or after February 1, 2010 and amended the definition of a financial liability in order to classify rights issues (and certain options or warrants) as equity instruments in cases where such rights are given pro rata to all of the existing owners of the same class of an entity's non-derivative equity instruments, or to acquire a fixed number of the entity's own equity instruments for a fixed amount in any currency. This amendment will have no impact on the Companies after initial application.

IFRS 9 *Financial Instruments: Classification and Measurement*
IFRS 9 as issued reflects the first phase of the IASBs work on the replacement of IAS 39 and applies to classification and measurement of financial assets as defined in IAS 39. The standard is effective for annual periods beginning on or after January 1, 2013. In subsequent phases, the IASB will address classification and measurement of financial liabilities, hedge accounting and derecognition. The completion of this project is expected in early 2011. The adoption of the first phase of IFRS 9 will have an effect on the classification and measurement of the Companies' financial assets. The Companies will quantify the effect in conjunction with the other phases, when issued, to present a comprehensive picture.

IFRIC 14 *Prepayments of a minimum funding requirement (Amendment)*
The amendment to IFRIC 14 is effective for annual periods beginning on or after January 1, 2011 with retrospective application. The amendment provides guidance on assessing the recoverable amount of a net pension asset. The amendment permits an entity to treat the prepayment of a minimum funding requirement as an asset. The amendment is deemed to have no impact on the financial statements of the Companies.

IFRIC 19 *Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments*
IFRIC 19 is effective for annual periods beginning on or after July 1, 2010. The interpretation clarifies that equity instruments issued to a creditor to extinguish a financial liability qualify as consideration paid. The equity instruments issued are measured at their fair value. In case that this cannot be reliably measured, the instruments are measured at the fair value of the liability extinguished. Any gain or loss is recognized immediately in profit or loss. The adoption of this interpretation will have no effect on the financial statements of the Companies.

Improvements to IFRSs (issued in May 2010)
The IASB issued *Improvements to IFRSs*, an omnibus of amendments to its IFRS standards. The amendments have not been adopted as they become effective for annual periods on or after either July 1, 2010 or January 1, 2011. The amendments listed below, are considered to have a reasonable possible impact on the Companies:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Adoption of New and Revised Accounting Standards (continued)

***Standards and Interpretations in issue not yet adopted* (continued)**

- IFRS 3 *Business Combinations*
- IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosures*
- IAS 1 *Presentation of Financial Statements*
- IAS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*
- IFRIC 13 *Customer Loyalty Programmes*

The Companies, however, expect no impact from the adoption of the amendments on their financial position or performance.

f. Significant Accounting Policies and Practices

f1. Business combinations and goodwill

Business combinations from January 1, 2010
Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any non-controlling interest in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are expensed and included in administrative expenses.

When the Companies acquires a business, they assess the financial assets and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability, will be recognized in accordance with IAS 39 either in profit or loss or as a change to other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

Goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Companies' cash-generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.

Where goodwill forms part of a cash-generating unit and part of the operation within that unit is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f1. Business combinations and goodwill (continued)

Business combinations from January 1, 2010 (continued)

carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the cash-generating unit retained.

Business combinations prior to January 1, 2010
In comparison to the above-mentioned requirements, the following differences applied:

Business combinations were accounted for using the purchase method. Transaction costs directly attributable to the acquisition formed part of the acquisition costs. The non-controlling interest (formerly known as minority interest) was measured at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets.

Business combinations achieved in stages were accounted for as separate steps. Any additional acquired share of interest did not affect previously recognized goodwill.

When the Companies acquired a business, embedded derivatives separated from the host contract by the acquire were not reassessed on acquisition unless the business combination resulted in a change in the terms of the contract that significantly modified the cash flows that otherwise would have been required under the contract.

Contingent consideration was recognized if, and only if, the Companies had a present obligation, the economic outflow was more likely than not and a reliable estimate was determinable. Subsequent adjustments to the contingent consideration were recognized as part of goodwill.

f2. Intangible assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is its fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the consolidated statements of comprehensive income in the expense category consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f2. Intangible assets (continued)

At the time of acquisition of a subsidiary, any intangible assets recognized are amortized using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Years
Customer base	
- Prepaid	6
- Post-paid	5
Spectrum license	5
Brand	8

Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in the consolidated statements of comprehensive income in the year in which the expenditure is incurred.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the asset is derecognized.

f3. Investments in associated companies

The Company's investment in its associate is accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Company has significant influence.

Under the equity method, the investment in the associate is carried in the consolidated statements of financial position at cost plus post acquisition changes in the Company's share of net assets of the associate. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor individually tested for impairment.

The consolidated statements of comprehensive income reflect the share of the results of operations of the associate. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Company recognizes its share of any changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statements of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Company and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The share of profit of an associate is shown on the face of the consolidated statements of comprehensive income. This is the profit attributable to equity holders of the associate and therefore is profit after tax and non-controlling interests in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period as the Company. Where necessary, adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Company.

After application of the equity method, the Company determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Company's investment in its associate. The Company determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognizes the amount in the 'share of profit of an associate' in the consolidated statements of comprehensive income.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f3. Investments in associated companies (continued)

Upon loss of significant influence over the associate, the Company measures and recognizes any retaining investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence and the fair value of the retaining investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

f4. Foreign currency translation

Transactions in foreign currencies are initially recorded at the functional currency rate prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the functional currency spot rate of exchange prevailing at the end of the reporting period. All differences are taken to the statements of comprehensive income, except for foreign exchange differences that qualify as capitalizable borrowing costs for qualifying properties under construction and installation. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined.

The functional currency and presentation currency of IPBV, IMBV, IFB and IIFB are in Euro, while ISP is in U.S. dollar. As at the end of the reporting period, the assets and liabilities of these subsidiaries are translated into the presentation currency of the Company at the spot rate which is the exchange rate prevailing at the end of the reporting period and their statement of comprehensive income is translated at the average rate during the period. The resulting differences arising from the translations of the financial statements of IPBV, IMBV, IFB, IIFB and ISP are included in other comprehensive income and presented as part of "Difference in Foreign Currency Translation" in the consolidated statements of changes in stockholders' equity.

f5. Revenue recognition and expense recognition

f5.1 Service Revenues

Cellular

Cellular revenues arising from airtime and roaming calls are recognized based on the duration of successful calls made through the Company's cellular network.

For post-paid subscribers, monthly service fees are recognized as the service is rendered.

For prepaid subscribers, the activation component of starter package sales is deferred and recognized as revenue over the expected average period of the customer relationship. Sales of initial/reload vouchers are recorded as deferred revenue and recognized as revenue upon usage of the airtime or upon expiration of the airtime.

Sales of wireless broadband modems and cellular handsets are recognized upon delivery to the customers.

Revenues from wireless broadband data communications are recognized based on the duration of usage or fixed monthly charges depending on the arrangement with the customers.

Cellular revenues are presented on a net basis, after compensation to value added service providers.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f5. Revenue recognition and expense recognition (continued)

f5.1 Service Revenues (continued)

Cellular (continued)

Customer Loyalty Program

The Company operates a customer loyalty program called "Poin Plus Plus", which allows customers to accumulate points for every reload and payment by the Company's prepaid and post-paid subscribers, respectively. The points can then be redeemed for free telecommunication and non-telecommunication products, subject to a minimum number of points being obtained.

Customer loyalty credits are accounted for as a separate component of the sales transaction in which they are granted. The consideration received at the time of reload and payment by the Company's prepaid and post-paid subscribers, respectively, is allocated between the cellular products sold and the points issued, with the consideration allocated to the points equal to their fair value. Fair value of the points issued is deferred and recognized as revenue when the points are redeemed or when the redemption period expires.

Dealer Commissions

Consideration in the form of sales discount given by the Company to a dealer is recognized as a reduction of revenue.

If the Company receives, or will receive, an identifiable benefit in exchange for a consideration given by the Company to a dealer, and the fair value of such benefit can be reasonably estimated, the consideration will be recorded as a marketing expense.

Tower Leasing

Revenue from tower leasing is recognized on the straight-line basis over the lease term based on the amount stated in the agreement between the Company and the lessee. Based on the Company's assessment on the current tower leasing arrangements, the leasing transactions are classified as operating leases.

MIDI

- Internet
  Revenues arising from installation service are deferred and recognized over the expected average period of the customer relationship. Revenues from monthly service fees are recognized as the services are rendered. Revenues from usage charges are recognized monthly based on the duration of internet usage or based on the fixed amount of charges depending on the arrangement with the customers.
- Frame Net, World Link and Direct Link
  Revenues arising from installation service are deferred and recognized over the expected average period of the customer relationship. Revenues from monthly service fees are recognized as the services are rendered.
- *Satellite Operating Lease*
  Revenues are recognized on the straight-line basis over the lease term.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f5. Revenue recognition and expense recognition (continued)

f5.1 Service Revenues (continued)

MIDI (continued)

- Other MIDI services
  Revenues from other MIDI services are recognized when the services are rendered.

Fixed Telecommunication

- International Calls

  Revenues from outgoing international call traffic are recognized on the basis of the actual recorded traffic for the year and had been reported on a net basis up to December 31, 2009, after allocations to overseas international carriers.

  In addition, starting January 1, 2010, the Company has decided to reclassify the portion of incoming calls revenue that belongs to the Company's cellular segment. The Company believes that this change will bring the Company's revenue presentation to be aligned more closely with the Company's profit or loss performance and to provide reliable and more relevant information to shareholders and users of the accounts.

  To improve the comparability of the consolidated financial statements, the Company made accounts reclassification in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2009 (Note 2d).

- Fixed Wireless
  Fixed wireless revenues arising from usage charges are recognized based on the duration of successful calls made through the Company's fixed network.

  For post-paid subscribers, monthly service fees are recognized as the services are rendered.

  For prepaid subscribers, the activation component of starter package sales is deferred and recognized as revenue over the expected average period life of the customer relationship.

  Sale of initial/reload vouchers is recorded as deferred revenue and recognized as income upon usage of the airtime or upon expiration of the airtime.

- Fixed Line
  Revenues from fixed line installations are deferred and recognized as revenue over the expected average period of the customer relationship. Revenues from usage charges are recognized based on the duration of successful calls made through the Company's fixed network.

  Interconnection Revenue

  Revenues from network interconnection with other domestic and international telecommunications carriers are recognized monthly on the basis of the actual recorded traffic for the month.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f5. Revenue recognition and expense recognition (continued)

f5.2 Interest Income

Interest income is recognized as it accrues on a time proportion basis taking into account the principal amount outstanding and the effective interest rate. Majority of interest income represents interest earned from cash and cash equivalents.

f5.3 Dividends

Dividend income is recognized when the Company's right to receive the payment is established.

f5.4 Expenses

Expenses are recognized when incurred.

f6. Income tax

Current income tax

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in the countries where the Companies operate and generate taxable income.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the consolidated statements of comprehensive income. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the balance sheet liability method on all temporary differences at the end of the reporting year between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences except: (1) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss and (2) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is possible that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carryforward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and carryforward of unused tax losses can be utilized except: (1) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss and (2) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f6. Income tax (continued)

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset, if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Sales tax

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of sales tax.

The net amount of sales tax recoverable from, or payable to, the taxation authority is included as part of receivables or payables in the consolidated statements of financial position.

f7. Pensions and other post-employment benefits

Funded Plans

The Companies have defined benefit pension plans which require contributions to be made to separately administered funds. Pension costs under the Companies' defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, expected return on plan assets and annual rate of increase in compensation. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceed 10% of the present value of the defined benefit obligation or fair value of plan assets, whichever is greater, at that date. These gains or losses in excess of the 10% corridor are recognized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

The past service costs are recognized as an expense on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. If the benefits have already vested, immediately following the introduction of or changes to a pension plan, past service costs are recognized immediately.

Actuarial gains or losses and past service costs from other long-term employee benefits are recognized immediately in the current year's consolidated statement of income.

The defined benefit asset or liability comprises the present value of the defined benefit obligation (using a discount rate based on government bonds), less past service costs and actuarial gains and losses not yet recognized and less the fair value of plan assets out of which the obligations are to be settled. Plan assets are assets that are held by qualifying

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f7. Pensions and other post-employment benefits (continued)

insurance policies. Fair value is based on market price information and in the case of quoted securities, it is the published bid price. The value of any defined benefit asset recognized is restricted to the sum of any past service costs and actuarial gains and losses not yet recognized and the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in the future contributions to the plan.

Unfunded Plans

The Companies also provide other post-employment benefits to their employees, such as benefits under Labor Law No.13/2003 ("Labor Law") and post-retirement healthcare benefits. These benefits are unfunded. The accounting treatment for the unfunded plans is the same as that of the funded plans above.

f8. Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of IAS 39 are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Companies determine the classification of their financial assets at initial recognition.

All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Companies commit to purchase or sell the assets.

The Companies' financial assets include cash and cash equivalents, trade and other receivables, due from related parties, quoted and unquoted financial instruments, derivative financial instruments and other current and non-current financial assets.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Financial assets at fair value through profit or loss

  Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

  Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchase in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by IAS 39. Derivatives, including separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f8. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit and loss are carried in the consolidated statements of financial position at fair value with changes in fair value recognized in the statements of comprehensive income.

Derivatives embedded in host contracts are accounted for as separate derivatives and recorded at fair value if their economic characteristics and risks are not closely related to those of the host contracts and the host contracts are not carried at fair value. These embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in the consolidated statements of comprehensive income. Reassessment only occurs if there is a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required.

- Loans and receivables

  Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR), less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the consolidated statements of comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

  The Companies' cash and cash equivalents, trade and other receivables, due from related parties, other current financial assets and other non-current assets are included in this category.

  Time deposits with original maturities of three months or less at the time of placement are considered as "Cash Equivalents".

  Cash in banks and time deposits which are pledged as collateral for long-term debts and bank guarantees and time deposits with original maturities of more than three months are not classified as part of "Cash and Cash Equivalents". These are presented as part of either "Other Current Financial Assets" or "Other Non-current Financial Assets".

- Held-to-maturity (HTM) investments

  Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Companies have the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the consolidated statements of comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

  The Companies did not have any held-to-maturity investments during the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f8. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

- Available-for-sale (AFS) financial assets

  AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in other comprehensive income until the investment is derecognized. At which time, the cumulative gain or loss is recognized or determined to be impaired, and the cumulative loss is reclassified from equity to profit or loss.

  The Companies have the following investments classified as AFS:

  - Investments in shares of stock that do not have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20%, and other long-term investments are carried at cost.
  - Investments in equity shares that have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20% and which are classified as available-for-sale, are recorded at fair value.

f9. Financial liabilities

Initial recognition

Financial liabilities within the scope of IAS 39 are categorized as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Companies determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Companies' financial liabilities include trade payables, accrued expenses, procurement payable, loans and bonds payable, due to related parties, derivative financial instruments, other current and non-current financial liabilities.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss

  Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

  Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchase in the near term. This category includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by IAS 39. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

  Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f9. Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

- Loans and borrowings

  After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

  Gains and losses are recognized in the consolidated statements of comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

f10. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

f11. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis or other valuation models.

Credit risk adjustment

The Company adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Company's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

f12. Amortized cost of financial instruments

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

f13. Impairment of financial assets

The Companies assess at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated. Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors are experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganisation and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f13. Impairment of financial assets (continued)

- *Financial assets carried at amortized cost*

  For loans and receivables carried at amortized cost, the Companies first assess whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Companies determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, they include the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assess them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

  If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

  The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the consolidated statements of comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Companies. If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.

- *AFS financial assets*

  In the case of equity investments classified as an AFS financial asset, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost.

  Where there is objective evidence of impairment, the cumulative loss - measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in profit or loss - is reclassified from equity to profit or loss. Impairment losses on equity investments are not reversed through the profit or loss; increases in their fair value after impairment are recognized in other comprehensive income.

In the case of debt instruments classified as available-for-sale, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Future interest income is based on the reduced carrying amount and is accrued based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Such accrual is recorded as part of "Interest income" account in the consolidated statements

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f13. Impairment of financial assets (continued)

of comprehensive income. If, in a subsequent year, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through profit or loss.

f14. Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Companies have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Companies have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Companies have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

f15. Derivative financial instruments

The Company enters into and engages in cross currency swap, interest rate swap, currency forward and other permitted instruments, if considered necessary, for the purpose of managing its foreign exchange and interest rate exposures emanating from the Company's loans and bonds payable in foreign currencies. These derivative financial instruments do not meet the criteria for hedge accounting and are initially recognized at fair value on the date the derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. Derivatives are carried as assets when the fair value is positive and as liabilities when the fair value is negative.

Any gains or losses arising from changes in fair value on derivatives during the year that do not qualify for hedge accounting are taken directly to the profit or loss.

Derivative assets and liabilities are presented under current assets and liabilities, respectively. Embedded derivative is presented with the host contract on the consolidated statements of financial position which represents an appropriate presentation of overall future cash flows for the instrument taken as a whole.

The net changes in fair value of derivative instruments, swap cost or income, termination cost or income, and settlement of derivative instruments are charged or credited to "Gain (Loss) on Change in Fair Value of Derivatives - Net", which is presented under Other Income (Expenses) in the consolidated statements of comprehensive income.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f16. Property and equipment

Property and equipment are stated at cost (which includes capitalization of certain borrowing costs incurred during the construction phase), less accumulated depreciation, amortization and impairment in value. Depreciation and amortization of property and equipment is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets.

Property and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values unless:

(i) the exchange transaction lacks commercial substance, or
(ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.

The acquired assets are measured this way even if the Companies cannot immediately derecognize the assets given up. If the acquired assets cannot be reliably measured at fair value, their value is measured at the carrying amount of the assets given up.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognized in profit or loss in the year the asset is derecognized.

The estimated useful lives of the assets are as follows:

	Years
Landrights	50
Exchange and network assets	3 to 15
Subscribers' apparatus and other equipment	3 to 15
Buildings and building & leasehold improvements	20 and 3 to 15

Personnel costs which are directly related to the development, construction and installation of property and equipment are capitalized as part of the cost of such assets.

The cost of maintenance and repairs is charged to income as incurred. Significant renewals and betterments which enhance the asset condition on its initial performance, are capitalized. When properties are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts, and any resulting gains or losses are recognized in profit or loss for the year.

Properties under construction and installation are stated at cost. This includes cost of construction, equipment, capitalizable borrowing costs and other direct costs. Property under construction is not depreciated until such time that the relevant asset is completed and available for its intended use.

The residual values, useful lives and methods of depreciation and amortization of property and equipment are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f17. Borrowing costs

Borrowing costs are capitalized if they are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset. Capitalization of borrowing costs commences when the activities necessary to prepare the asset for its intended use are in progress and expenditures and borrowing costs are being incurred. Borrowing costs are capitalized until the asset is available for its intended use. If the resulting carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, an impairment loss is recognized. Borrowing costs include interest charges and other costs incurred in connection with the borrowing of funds, as well as exchange differences arising from foreign currency borrowings used to finance these projects, to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs (estimated quarterly by capping the exchange differences taken as borrowing costs at the amount of borrowing costs on the functional currency equivalent borrowings).

f18. Asset retirement obligations

The Companies are legally required under various lease agreements to dismantle the installation in leased sites and restore such sites to their original condition at the end of the lease contract term.

The amount of asset retirement obligations is accreted, and such accretion is recognized as interest expense.

f19. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

The Companies, as lessees, classify a lease as a finance lease if it transfers to them substantially all the risks and rewards incidental to ownership. All other leases are classified as operating leases.

A finance lease gives rise to a depreciation expense for the asset, as well as an interest expense for each year. Finance charges are charged directly to current operations. The depreciation policy for leased assets which is based on straight-line method is consistent with that for depreciable assets that are directly owned.

Leased assets are depreciated using the straight-line method over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term, if there is no reasonable certainty that the Companies will obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term.

In 2006, the Company was granted a license to use 2.1 GHz radio frequency spectrum by the Ministry of Communications and Information and Technology (“MOCIT”). The upfront fee is recorded as Long-term Prepaid License for the non-current portion and Prepaid Expenses for the current portion, and amortized over the 10-year license term using the straight-line method.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f19. Leases (continued)

In 2009, the Company received additional 3G license and IMM was granted an operating license for "Packet Switched" local telecommunication network using 2.3 GHz radio frequency spectrum of Broadband Wireless Access ("BWA"). The Company and IMM were obliged to, among others, pay upfront fee and annual radio frequency fee over the next 10 years (Note 29h).

Management believes, as supported by written confirmation from the DGPT, that the 3G and BWA licenses may be returned at any time without any financial obligation to pay the remaining outstanding annual radio frequency fees (i.e., the license arrangement does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership).

Accordingly, the Company and IMM recognize the annual radio frequency fee as operating lease expense amortized using the straight-line method over the term of the rights to operate the 3G and BWA licenses. Management evaluates its plan to continue to use the licenses on an annual basis.

f20. Inventories

Inventories, which mainly consist of SIM cards, broadband modems, starter packs and pulse reload vouchers and cellular handsets, are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs necessary to make the sale.

f21. Prepaid expenses

Prepaid expenses, which mainly consist of frequency fee, rentals, upfront fee of 3G and BWA licenses and insurance are expensed as the related asset is utilized. The non-current portions of prepaid rentals and upfront fee of 3G and BWA licenses are shown as part of "Long-term Prepaid Rentals - Net of Current Portion" and "Long-term Prepaid Licenses - Net of Current Portion", respectively.

f22. Impairment of non-financial assets

Property and equipment

The Companies assess at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset is required, the Companies make an estimate of the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of such asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell or its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent from those of other assets or groups of assets in which case it is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Where the carrying amount of an asset or cash-generating unit exceeds its recoverable amount, the asset or cash-generating unit is considered impaired and is written down to its recoverable amount. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining the fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators. Impairment losses of

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f22. Impairment of non-financial assets (continued)

Property and equipment (continued)

continuing operations are recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

For assets, excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Companies make an estimate of the recoverable amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation and amortization, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in the consolidated statements of comprehensive income. After such reversal, the depreciation and amortization charges are adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining economic useful life.

The following criteria are also applied in assessing impairment of specific assets:

Goodwill and other intangible assets

Goodwill is reviewed for impairment annually or more frequently if events or changes in circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of the cash-generating unit or group of cash-generating units to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the cash-generating unit or group of cash-generating units is less than the carrying amount of the cash-generating unit or group of cash-generating units to which goodwill has been allocated, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

Intangible assets with indefinite useful lives are tested for impairment annually either individually or at the cash-generating unit level, as appropriate. The amount of impairment is calculated as being the difference between the recoverable amount of the intangible asset and its carrying amount and is recognized in the consolidated statements of comprehensive income. Impairment losses relating to intangible assets can be reversed in future periods.

Investments in associates

The Companies determine at each balance sheet date whether there is any objective evidence that their investments in associates are impaired. If this is the case, the Companies calculate the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investments in associates and its carrying amount. The amount of impairment loss should be recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Significant Accounting Policies and Practices (continued)

f23. Provisions

Provisions are recognized when the Companies have a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Companies expect some or all of provisions to be reimbursed, for example under an insurance contract, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to any provision is presented in profit or loss net of any reimbursement.

f24. Operating segment

An operating segment is a component of entity that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity), whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker (Board of Directors) to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance and for which discrete financial information is available.

f25. Basic and diluted earnings per share/ADS

Basic earnings per share is computed by dividing net income for the year attributable to ordinary owners of the Company by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the year (Note 26).

Basic earnings per ADS is computed by multiplying basic earnings per share by 50, which is equal to the number of shares per ADS.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income for the year attributable to ordinary owners of the Company (after adjusting profit or loss effect related to dilutive potential ordinary shares) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on conversion of all potentially dilutive ordinary shares.

g. Accounting Policy Change

IAS 17 Leases

Before January 1, 2010, under IFRS as issued by IASB, the costs to acquire the landrights as well as other expenses associated with the acquisition are capitalized as prepaid landrights lease, and are amortized over the period of the right to use the land obtained from the Government which ranges from 20 to 30 years.

Based on IAS 17 amendment (as part of the Improvements Project), starting January 1, 2010, the Companies classify land leases as finance leases and present them in the financial statements as property and equipment. The Companies adopted a retrospective application of this amendment and amortize land leases over 50 years (i.e., over the initial lease term of 30 years plus one extension of 20 years).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Accounting Policy Change (continued)

***IAS 17 Leases* (continued)**

As a result of the accounting policy change, the following adjustments were made to the financial statements:

For the year ended December 31, 2008:

	December 31, 2008 (Previously Reported)	Increase (Decrease)	December 31, 2008 (Restated)
OPERATING EXPENSES			
Cost of services	6,375,987	(15,725)	6,627,804
		267,542*	
Depreciation and amortization	4,555,891	9,479	4,565,370
INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)			
Deferred	102,319	(17)	102,302
NET COMPREHENSIVE INCOME ATRIBUTABLE TO:			
Non-controlling interests	25,998	207	26,205

As of January 1, 2009:

	January 1, 2009 (Previously Reported)	Increase (Decrease)	January 1, 2009 (Restated)
ASSETS			
Property and equipment - net	37,904,724	428,889	38,333,613
Prepaid landrights lease	386,622	(386,622)	-
LIABILITIES			
Deferred tax liabilities - net	1,349,675	(929)	1,348,746
STOCKHOLDER'S EQUITY			
Retained earnings			
Unappropriated	14,842,838	42,545	14,885,383
Non-controlling interest	285,597	651	286,248

* Refer to Note 2d.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Accounting Policy Change (continued)

***IAS 17 Leases* (continued)**

As of and for the year ended December 31, 2009:

	December 31, 2009 (Previously Reported)	Increase (Decrease)	December 31, 2009 (Restated)
ASSETS			
Property and equipment - net	43,922,342	435,796	44,358,138
Prepaid landrights lease	377,868	(377,868)	-
LIABILITIES			
Deferred tax liabilities - net	1,650,318	1,500	1,651,818
STOCKHOLDER'S EQUITY			
Retained earnings			
Unappropriated	15,575,601	55,639	15,631,240
Non-controlling interest	326,963	789	327,752
OPERATING EXPENSE			
Cost of services	6,896,300	(25,871)	7,087,850
Depreciation and amortization	5,561,390	217,421* 10,210	5,571,600
INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)			
Deferred	(287,030)	(2,429)	(289,459)
NET COMPREHENSIVE INCOME ATRIBUTABLE TO:			
Non-controlling interests	56,194	138	56,332

* Refer to Note 2d.

The effect on earnings per share related to the restatement in 2008 and 2009 was less than Rp1.10 and Rp2.50, respectively.

The effect on earnings per ADS related to the restatement in 2008 and 2009 was less than Rp55.50 and Rp120.50, respectively.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Companies' consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

- *Determination of functional currency*

  The functional currencies of the entities under the Company are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services.

- *Leases*

  The Companies have various lease agreements as lessors in respect of certain properties and equipment. The Companies evaluate whether significant risks and rewards of ownership of the leased properties are transferred to the lessee or retained by the Companies based on *IAS 17, "Leases"*, which requires the Companies to make judgments and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of leased properties.

b. Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

- *Determination of fair values of financial assets and financial liabilities*

  Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. The judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

- *Estimating useful lives of property and equipment and intangible assets*

  The Companies estimate the useful lives of their property and equipment and intangible assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of property and equipment is based on the Companies' collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year-end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

  The amounts and timing of recorded expenses for any period will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Companies' property and equipment will increase the recorded operating expenses and decrease non-current assets.

- *Goodwill and intangible assets*

  The consolidated financial statements and results of operations reflect acquired businesses after the completion of the respective acquisition. The Company accounts for the acquired businesses using the acquisition method starting January 1, 2010 and purchase method for prior year acquisitions, which requires extensive use of accounting estimates and judgments to allocate the purchase price to the fair market values of the acquiree's identifiable assets and liabilities at the acquisition date. Any excess in the purchase price over the estimated fair market values of the net assets acquired is recorded as goodwill in the consolidated statements of financial position. Thus, the numerous judgments made in estimating the fair market value to be assigned to the acquiree's assets and liabilities can materially affect the Company's financial performance.

- *Realizability of deferred income tax assets*

  The Companies review the carrying amounts of deferred income tax assets at the end of each reporting date and reduce these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred income tax assets to be utilized. The Companies' assessment on the recognition of deferred income tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting periods. This forecast is based on the Companies' past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that sufficient taxable income will be generated to allow all or part of deferred income tax assets to be utilized.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

- *Estimating allowance for impairment of receivables*

  If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred in trade receivables, the Companies estimate the allowance for impairment losses related to their trade receivables that are specifically identified as doubtful for collection. The level of allowance is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Companies use judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Companies' relationship with the customers and the customers' credit status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Companies' receivables to amounts that they expect to collect. These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affect the amounts estimated.

  In addition to specific allowance against individually significant receivables, the Companies also assess a collective impairment allowance against credit exposure of their customers which are grouped based on common credit characteristics, which, although not specifically identified as requiring a specific allowance, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to customers. This collective allowance is based on historical loss experience using various factors such as historical performance of the customers within the collective group, deterioration in the markets in which the customers operate, and identified structural weaknesses or deterioration in the cash flows of customers.

- *Estimation of pension cost and other employee benefits*

  The cost of defined benefit plan and present value of the pension obligation are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial valuation includes making various assumptions which consist, among other things, discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates. Actual results that differ from the Companies' assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceed 10% of the higher of the present value of defined benefit obligation and the fair value of plan assets at that date. Due to complexity of valuation, the underlying assumptions and their long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in assumptions.

  While the Companies believe that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Companies' actual experience or significant changes in their assumptions may materially affect the costs and obligations of pension and other long-term employee benefits. All assumptions are reviewed at each reporting date.

- *Asset retirement obligations*

  Asset retirement obligations are recognized in the year in which they are incurred if a reasonable estimate of fair value can be made. This requires an estimation of the cost to restore/dismantle on a per location basis and is based on the best estimate of the expenditure required to settle the obligation at the future restoration/dismantlement date, discounted using a pre-tax rate that reflects the current market assessment of the time value of money and, where appropriate, the risk specific to the liability.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

- *Revenue recognition*

  The Company's revenue recognition policies require the use of estimates and assumptions that may affect the reported amounts of revenues and receivables.

  The Company's agreements with domestic and foreign carriers for inbound and outbound traffic subject to settlements require traffic reconciliations before actual settlement is done, which may not be the actual volume of traffic as measured by Company. Initial recognition of revenues is based on observed traffic adjusted by normal experience adjustments, which historically are not material to the consolidated statements of comprehensive income. Differences between the amounts initially recognized and the actual settlements are taken up in the account upon reconciliation. However, there is no assurance that the use of such estimates will not result in material adjustments in future periods.

  The Companies recognize revenues from installation and activation related fees and the corresponding costs over the expected average periods of customer relationship for cellular, MIDI and fixed telecommunication services. The Companies estimate the expected average period of customer relationship based on the most recent churn-rate analysis.

- *Uncertain tax exposure*

  In certain circumstances, the Companies may not be able to determine the exact amount of their current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Companies apply similar considerations as they would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with IAS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.* The Companies make an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax benefit should be recognized.

  As of December 31, 2010, the Company is subject to tax audit for tax year 2009.

  The Companies record interest and penalties for the underpayment of income tax, if any, in income tax expense account in the consolidated financial statements.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of the following:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Cash on hand (including US$10 on January 1, 2009 and US$12 on December 31, 2010)	1,626	1,581	1,792
Cash in banks			
Related parties (Note 25) (including US$328 on January 1, 2009, US$4,365 on December 31,2009 and US$4,726 on December 31, 2010)	31,509	91,783	116,107
Third parties (including US$16,905 on January 1, 2009, US$9,759 on December 31, 2009 and US$12,885 on December 31, 2010)	235,692	131,106	165,588
	268,827	224,470	283,487
Time deposits and deposits on call			
Related parties (Note 25) (including US$309,079 on January 1, 2009, US$265 on December 31, 2009 and US$81,705 on December 31, 2010)	4,505,596	1,976,259	1,499,544
Third parties (including US$43,925 on January 1, 2009, US$22,725 on December 31, 2009 and US$12,454 on December 31, 2010)	963,443	635,270	292,239
	5,469,039	2,611,529	1,791,783
Total	**5,737,866**	**2,835,999**	**2,075,270**

Time deposits and deposits on call denominated in rupiah earned interest at annual rates ranging from 1.25% to 14.00% on January 1, 2009, from 2.50% to 14.50% in 2009 and from 2.50% to 10.00% in 2010, while those denominated in U.S. dollar earned interest at annual rates ranging from 0.002% to 6.00% on January 1, 2009, from 0.001% to 6.00% in 2009 and from 0.05% to 4.75% in 2010.

The interest rates on time deposits and deposits on call in related parties are comparable to those offered by third parties.

5. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE

This account consists of the following:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Related parties (Note 25)			
Telkom (including US$271 on January 1, 2009, US$75 on December 31, 2009 and US$55 on December 31, 2010)	32,801	31,724	56,108
Others (including US$5,032 on January 1, 2009, US$6,322 on December 31, 2009 and US$7,764 on December 31, 2010)	112,721	151,726	214,038
Sub-total	145,522	183,450	270,146
Less allowance for impairment	69,444	57,538	47,640
Net	**76,078**	**125,912**	**222,506**
Third parties			
Overseas international carriers (including US$81,810 on January 1, 2009, US$98,042 on December 31, 2009 and US$93,755 on December 31, 2010)	895,820	921,595	842,954
Local companies (including US$24,987 on January 1, 2009, US$15,291 on December 31, 2009 and US$13,956 on December 31, 2010)	506,191	463,069	628,224
Post-paid subscribers from:			
Cellular	249,124	252,008	255,973
Fixed telecommunication	40,212	26,813	47,239
Sub-total	1,691,347	1,663,485	1,774,390
Less allowance for impairment	426,719	404,272	448,470
Net	**1,264,628**	**1,259,213**	**1,325,920**
Total	**1,340,706**	**1,385,125**	**1,548,426**

The aging schedule of the accounts receivable - trade is as follows:

	January 1, 2009		December 31, 2009		December 31, 2010	
Number of Months Outstanding	Amount	Percentage (%)	Amount	Percentage (%)	Amount	Percentage (%)
Related parties						
0 - 6 months	82,495	56.69	121,522	66.24	201,256	74.50
7 - 12 months	10,199	7.01	27,207	14.83	47,973	17.76
13 - 24 months	3,382	2.32	2,661	1.45	6,913	2.56
Over 24 months	49,446	33.98	32,060	17.48	14,004	5.18
Total	**145,522**	**100.00**	**183,450**	**100.00**	**270,146**	**100.00**
Third parties						
0 - 6 months	984,794	58.23	820,082	49.30	787,871	44.40
7 - 12 months	191,825	11.34	287,533	17.28	279,806	15.77
13 - 24 months	266,779	15.77	285,407	17.16	308,808	17.40
Over 24 months	247,949	14.66	270,463	16.26	397,905	22.43
Total	**1,691,347**	**100.00**	**1,663,485**	**100.00**	**1,774,390**	**100.00**

As of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, the Companies have no “past due and not impaired” accounts receivable.

5. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE (continued)

The movements in the allowance for impairment on accounts receivable - trade are as follows:

	Total	Related Parties	Third Parties
January 1, 2009			
Balance at beginning of year	414,484	88,342	326,142
Provision (reversal) (Note 22)	74,281	(23,514)	97,795
Write-offs	(35,134)	(2,044)	(33,090)
Net effect of foreign exchange adjustment	42,532	6,660	35,872
Balance at end of year	496,163	69,444	426,719
Individual impairment	212,008	66,503	145,505
Collective impairment	284,155	2,941	281,214
Total	496,163	69,444	426,719
Gross amount of receivables, individually impaired, before deducting any individually assessed impairment allowance	591,363	70,901	520,462

	Total	Related Parties	Third Parties
December 31, 2009			
Balance at beginning of year	496,163	69,444	426,719
Provision (Note 22)	98,042	6,635	91,407
Write-offs	(101,586)	(9,398)	(92,188)
Net effect of foreign exchange adjustment	(29,560)	(9,143)	(20,417)
Deduction due to liquidation of SMM (Note 1b)	(1,249)	-	(1,249)
Balance at end of year	461,810	57,538	404,272
Individual impairment	162,967	52,137	110,830
Collective impairment	298,843	5,401	293,442
Total	461,810	57,538	404,272
Gross amount of receivables, individually impaired, before deducting any individually assessed impairment allowance	790,213	63,391	726,822

5. ACCOUNTS RECEIVABLE - TRADE (continued)

	Total	Related Parties	Third Parties
December 31, 2010			
Balance at beginning of year	461,810	57,538	404,272
Provision (reversal) - net (Note 22)	67,041	(9,712)	76,753
Write-offs	(23,586)	-	(23,586)
Net effect of foreign exchange adjustment	(9,155)	(186)	(8,969)
Balance at end of year	496,110	47,640	448,470
Individual impairment	182,175	37,576	144,599
Collective impairment	313,935	10,064	303,871
Total	496,110	47,640	448,470
Gross amount of receivables, individually impaired, before deducting any individually assessed impairment allowance	405,926	118,486	287,440

The net effect of foreign exchange adjustment was due to the strengthening or weakening of the rupiah vis-à-vis the U.S. dollar in relation to U.S. dollar accounts previously provided with allowance and was credited or charged to “Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net”.

Information about the Companies’ exposure to credit risk is disclosed in Note 31.

Management believes the established allowance is sufficient to cover impairment of accounts receivable - trade.

6. TAXES RECEIVABLE

This account consists of claims for tax refund as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010 amounting to Rp247,185, Rp396,581 and Rp479,786, respectively, mainly consisting of the Company's corporate income tax for fiscal years 2004, 2005, 2006, 2009 and 2010 and Satelindo's corporate income tax for fiscal year 2002.

On July 4, 2008, the Company received Decision Letter No. KEP-00080/WPJ.19/KP.0303/2008 (KEP-00080) from the Tax Court which accepted the Company's objection to the correction of the 2003 corporate income tax amounting to Rp126,403. On December 24, 2008, the Company received Decision Letter No. KEP-539/WPJ.19/BD.05/2008 from the DGT which increased the overpayment amount by Rp84,650 in the assessment letter on tax overpayment ("SKPLB") for fiscal year 2004, which amount is lower than the amount stated in KEP-00080. On January 21, 2009, the Company filed an appeal letter to the Tax Court to increase the SKPLB for fiscal year 2004 as stated in KEP-00080. On February 2, 2009, the Company received the tax refund from the Tax Office amounting to Rp84,650 for the additional tax overpayment of corporate income tax for fiscal year 2004. On December 4, 2009, the Company received from the Tax Court its Decision No. Put.20644/PP/M.II/2009 which granted the request to increase the SKPLB for fiscal year 2004. Furthermore, on December 15, 2009, the DGT issued Decision Letter No. KEP-00101/WPJ.19/KP.0303/2009 to implement such Tax Court Decision. On April 13, 2010, the Company received the tax refund from the Tax Office amounting to Rp41,753 for the remaining tax overpayment of corporate income tax for the fiscal year 2004.

On August 21, 2008, the Company submitted an appeal letter to the Tax Court concerning the Company's remaining objection to the correction of the 2005 corporate income tax. On October 29, 2010, the Company received the Decision Letter from the Tax Court which accepted the Company's objection to the correction of the 2005 corporate income tax amounting to Rp38,155 (Note 33k), which was offset against the underpayment of the Company's 2008 and 2009 income tax article 26 based on Tax Collection Letters ("STPs") received by the Company on September 17, 2010 (Note 29c).

On June 8, 2009, the Company received the assessment letter on tax underpayment ("SKPKB") from the DGT for Satelindo's corporate income tax for fiscal year 2002 amounting to Rp105,809 (including penalties and interest). The Company accepted a part of the correction of the 2002 corporate income tax amounting to Rp2,646 which was charged to current operations in 2009. Under Indonesian Tax Law, a taxpayer is required to pay the tax underpayment amount as stated in the SKPKB within one month from the date of the SKPKB. The taxpayer can reclaim the tax paid through an objection or appeal process. On August 28, 2009, the Company submitted an objection letter to the Tax Office regarding the remaining correction on Satelindo's 2002 corporate income tax. On July 15, 2010, the Company received Decision Letter No.KEP-357/WPJ.19/BD.05/2010 from the DGT declining the Company's objection to the correction on Satelindo's corporate income tax for fiscal year 2002. On October 14, 2010, the Company submitted an appeal letter to the Tax Court concerning the Company's objection to the correction on Satelindo's corporate income tax for fiscal year 2002. As of April 20, 2011, the Company has not yet received any decision from the Tax Court on such appeal.

On September 7, 2009, the Company received Decision Letter No.KEP-335/WPJ.19/BD.05/2009 from the DGT which declined the Company's objection to the remaining corrections of the 2006 corporate income tax. On December 2, 2009, the Company submitted an appeal letter to the Tax Court regarding the remaining corrections of the Company's 2006 corporate income tax. As of April 20, 2011, the Company has not yet received any decision from the Tax Court on such appeal.

7. PROPERTY AND EQUIPMENT

The details of property and equipment are as follows:

	Exchange and network assets	Subscribers' apparatus and other equipment	Buildings and building & leasehold improvements	Landrights	Properties under construction and installation	Total
Cost						
At January 1, 2008 (restated)	32,414,532	3,120,129	7,190,475	428,828	8,010,903	51,164,867
Additions	276,929	138,288	8,354	7,712	11,903,668	12,334,951
Derecognitions	(17,381)	(4,026)	-	-	-	(21,407)
Reclassifications	3,715,632	231,418	2,004,008	36,569	(5,987,627)	-
At December 31, 2008 (restated)	36,389,712	3,485,809	9,202,837	473,109	13,926,944	63,478,411
Additions	158,871	56,996	18,922	-	11,334,716	11,569,505
Derecognitions	(89,448)	(34,507)	(14,604)	-	(84,218)	(222,777)
Divestment of SMM - a subsidiary	-	(6,617)	(70)	-	-	(6,687)
Reclassifications	14,701,390	368,118	2,369,910	31,511	(17,470,929)	-
At December 31, 2009 (restated)	51,160,525	3,869,799	11,576,995	504,620	7,706,513	74,818,452
Additions	364,134	51,381	4,088	15,977	5,039,357*	5,474,937
Derecognitions	(2,091,220)	(30,657)	(70,346)	-	-	(2,192,223)
Reclassifications	7,572,859	412,498	1,278,139	20,490	(9,283,986)	-
At December 31, 2010	57,006,298	4,303,021	12,788,876	541,087	3,461,884	78,101,166
Accumulated depreciation, amortization and impairment						
Accumulated depreciation, amortization and impairment at January 1, 2008 (restated)	15,856,348	2,023,547	2,712,199	50,981	-	20,643,075
Depreciation and amortization charge for the year	3,336,090	499,939	676,717	9,479	-	4,522,225
Derecognitions	(17,357)	(3,145)	-	-	-	(20,502)
Accumulated depreciation, amortization and impairment at December 31, 2008 (restated)	19,175,081	2,520,341	3,388,916	60,460	-	25,144,798
Depreciation and amortization charge for the year	4,156,188	431,015	857,032	10,210	-	5,454,445
Derecognitions	(89,448)	(34,359)	(9,637)	-	-	(133,444)
Divestment of SMM - a subsidiary	-	(5,415)	(70)	-	-	(5,485)
Accumulated depreciation, amortization and impairment at December 31, 2009 (restated)	23,241,821	2,911,582	4,236,241	70,670	-	30,460,314
Depreciation and amortization charge for the year	4,784,832	437,982	950,794	10,940	-	6,184,548
Derecognitions	(1,932,935)	(29,838)	(70,324)	-	-	(2,033,097)
Accumulated depreciation, amortization and impairment at December 31, 2010	26,093,718	3,319,726	5,116,711	81,610	-	34,611,765

* including additional property and equipment purchased from Lintasarta amounting to Rp71,423 (net of intercompany loss of Rp11,683)

7. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

	Exchange and network assets	Subscribers' apparatus and other equipment	Buildings and building & leasehold improvements	Landrights	Properties under construction and installation	Total
Net book value						
At January 1, 2008 (restated)	16,558,184	1,096,582	4,478,276	377,847	8,010,903	30,521,792
At December 31, 2008 (restated)	17,214,631	965,468	5,813,921	412,649	13,926,944	38,333,613
At December 31, 2009 (restated)	27,918,704	958,217	7,340,754	433,950	7,706,513	44,358,138
At December 31, 2010	30,912,580	983,295	7,672,165	459,477	3,461,884	43,489,401

Submarine cables (presented as part of exchange and network assets) represent the Company's proportionate investment in submarine cable circuits jointly constructed, operated, maintained and owned with other countries, based on the respective contracts and/or the construction and maintenance agreements.

Depreciation and amortization expense charged to profit or loss amounted to Rp4,522,225, Rp5,454,445 and Rp6,184,548 in 2008, 2009 and 2010, respectively.

Management believes that there is no impairment in assets value or recovery of the impairment reserve for the current year.

On August 31, 2009, the Company launched its Satellite Palapa-D. The Satellite experienced an under-performance of the launch vehicle during the Satellite's placement to its intended orbital position. Consequently, its orbital lifetime has been reduced. The insurance claim for the partial loss of the Satellite has been made and is recorded as a reduction of the cost of the Satellite. The Satellite has been in operation since November 2009 after going through the process of testing and arranging its orbital position in September and October 2009. On January 4 and 19, 2010, the Company collected the Palapa-D Satellite insurance claim amounting to US$58,008 (equivalent to Rp537,657) as a loss compensation for the decrease in the Satellite's useful life from 15 years to 10.77 years due to the under-performance of the launch vehicle in the Satellite's orbital process.

As of December 31, 2010, approximately Rp31,691 of property and equipment are pledged as collateral to credit facilities obtained by Lintasarta (Note 14).

As of December 31, 2010, the Companies insured their respective property and equipment (except submarine cables) for US$232,785 and Rp40,306,958 including insurance on the Company's satellite amounting to US$153,000. Management believes that the sum insured is sufficient to cover possible losses arising from fire, explosion, lightning, aircraft damage and other natural disasters.

The details of the Companies' properties under construction and installation as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010 are as follows:

7. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

	Percentage of Completion	Cost	Estimated Date of Completion
January 1, 2009			
Exchange and network assets	5 - 99	12,415,087	January - September 2009
Subscribers' apparatus and other equipment	40 - 98	147,966	January - June 2009
Buildings and building & leasehold improvements	15 - 99	1,363,891	January 2009 - January 2010
Total		**13,926,944**	
December 31, 2009			
Exchange and network assets	5 - 99	6,819,312	January - September 2010
Subscribers' apparatus and other equipment	55 - 95	120,609	January - July 2010
Buildings and building & leasehold improvements	6 - 75	766,592	January 2010 - December 2011
Total		**7,706,513**	
December 31, 2010			
Exchange and network assets	5 - 99	3,158,581	January - December 2011
Subscribers' apparatus and other equipment	25 - 95	25,853	January - December 2011
Buildings and building & leasehold improvements	6 - 95	277,450	January - December 2011
Total		**3,461,884**	

Borrowing costs capitalized to properties under construction and installation for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 amounted to Rp134,875, Rp181,522 and Rp18,698, respectively.

For the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010, sales or exchange of certain property and equipment were made as follows:

	2008	2009	2010
	Rp	Rp	Rp
Exchange of Assets (Note 29b)			
Carrying amount of assets received	-	-	158,285
Carrying amount of assets given up	-	-	(158,285)
Sales of Assets			
Proceeds	1,131	2,253	7,741
Net book value	(905)	(5,115)	(841)
Gain (loss)	**226**	**(2,862)**	**6,900**

In the above exchange of assets transaction, the fair value of neither the asset received nor the assets given up cannot be measured reliably, hence, the value of the asset received is measured at the carrying amount of the assets given up.

8. GOODWILL AND OTHER INTANGIBLE ASSETS

Goodwill arose from the acquisition of ownership in Bimagraha and Satelindo in 2001 and 2002, respectively, and from the acquisition of additional ownership in Lintasarta in 2005, in SMT in 2008 and LMD in 2010, respectively.

The details of the other intangible assets arising from the acquisition of Satelindo in 2002 are as follows:

	Amount
Spectrum license	222,922
Customer base	
- Post-paid	154,220
- Prepaid	73,128
Brand	147,178
Total	**597,448**

8. GOODWILL AND OTHER INTANGIBLE ASSETS (continued)

The changes in the goodwill and other intangible assets account are as follows:

	Non-integrated Software	Other Intangible Assets	Goodwill	Total
Cost:				
At January 1, 2008	213,581	597,448	2,934,638	3,745,667
Additions	6,952	-	9,724	16,676
At January 1, 2009	**220,533**	**597,448**	**2,944,362**	**3,762,343**
Additions	15,044	-	-	15,044
At December 31, 2009	**235,577**	**597,448**	**2,944,362**	**3,777,387**
Additions	40,052	-	-	40,052
At December 31, 2010	**275,629**	**597,448**	**2,944,362**	**3,817,439**
Accumulated Amortization:				
At January 1, 2008	182,096	545,531	930,862	1,658,489
Amortization	18,722	24,423	-	43,145
At January 1, 2009	**200,818**	**569,954**	**930,862**	**1,701,634**
Amortization	14,539	18,397	-	32,936
At December 31, 2009	**215,357**	**588,351**	**930,862**	**1,734,570**
Amortization	10,595	9,097	-	19,692
At December 31, 2010	**225,952**	**597,448**	**930,862**	**1,754,262**
Net book value:				
At January 1, 2008	**31,485**	**51,917**	**2,003,776**	**2,087,178**
At January 1, 2009	**19,715**	**27,494**	**2,013,500**	**2,060,709**
At December 31, 2009	**20,220**	**9,097**	**2,013,500**	**2,042,817**
At December 31, 2010	**49,677**	**-**	**2,013,500**	**2,063,177**

Other intangible assets consist of the following:

		January 1, 2009			December 31, 2009			December 31, 2010		
		Gross			Gross			Gross		
	Useful lives (years)	Carrying Amount	Accumulated Amortization	Net	Carrying Amount	Accumulated Amortization	Net	Carrying Amount	Accumulated Amortization	Net
Customer base:										
Post-paid	5	154,220	154,220	-	154,220	154,220	-	154,220	154,220	-
Prepaid	6	73,128	73,128	-	73,128	73,128	-	73,128	73,128	-
Spectrum license	5	222,922	222,922	-	222,922	222,922	-	222,922	222,922	-
Brand	8	147,178	119,684	27,494	147,178	138,081	9,097	147,178	147,178	-
Total		**597,448**	**569,954**	**27,494**	**597,448**	**588,351**	**9,097**	**597,448**	**597,448**	**-**

8. GOODWILL AND OTHER INTANGIBLE ASSETS (continued)

Impairment testing of goodwill

Goodwill acquired through business combinations has been allocated to Cellular business unit, which is also considered as one of the Companies' operating segments.

The Company performed its annual impairment testing of goodwill at December 31, 2008, 2009 and 2010.

The business enterprise value of the Cellular business unit has been determined based on discounted cash flow and weighted average cost of capital (WACC) covering a five-year period. This projection is based on the Companies' long-term plan approved by the Board of Directors, which management believes is reasonable and is management's best estimate of the ranges of economic conditions that will exist over the remaining useful life of the asset.

Key assumptions used in fair value less cost to sell (FVLCTS) calculation at December 31, 2010:

Discount rates - The Company has chosen to use WACC as a discounted rate for the discounted cash flow. The estimated WACC applied in determining the recoverable amount of the unit is between 12% and 14%.

Compounded Annual Growth Rate (CAGR) - The CAGR projection for the 5-year budget period of cellular segment revenue made by management is approximately 12%. This is higher than the historical revenue CAGR of approximately 7% due to tighter competition. The total operating expenses (including depreciation) are projected as a percentage of revenue.

Cost to Sell - As the recoverable amount of the Cellular Business is determined using FVLCTS, the estimated cost to sell the business is based on a certain percentage of the equity value. The estimated cost to sell used for this calculation is at approximately 1.5% of the enterprise value.

9. LONG-TERM PREPAID RENTALS - NET OF CURRENT PORTION

This account represents mainly the long-term portion of prepaid rentals on sites and towers.

10. LONG-TERM ADVANCES

This account represents advances to suppliers and contractors for the purchase and construction/installation of property and equipment which will be reclassified to the related property and equipment accounts upon the receipt of the property and equipment purchased or after the construction/installation of the property and equipment has reached a certain percentage of completion.

11. PROCUREMENT PAYABLE

This account arose from purchases of capital and operating expenditures procured from the following:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Related parties (Note 25) (including US$505 January 1, 2009, US$631 in 2009 and US$404 in 2010)	77,718	117,284	68,681
Third parties (including US$411,796 on January 1, 2009, US$309,520 in 2009 and US$246,211 in 2010)	6,368,639	5,172,498	3,575,786
Total	**6,446,357**	**5,289,782**	**3,644,467**

11. PROCUREMENT PAYABLE (continued)

The billed amount of procurement payable amounted to Rp1,266,204, Rp1,478,057 and Rp360,508 as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, respectively. The unbilled amount of procurement payable amounted to Rp5,180,153, Rp3,811,725 and Rp3,283,959 as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, respectively.

12. TAXES PAYABLE

This account consists of the following:

		December 31,	
	January 1, 2009	**2009**	**2010**
Estimated corporate income tax payable, less tax prepayments of Rp500,923 on January 1, 2009, Rp439,147 in 2009 and Rp123,281 in 2010	78,800	21,826	4,890
Income tax article 25	32,369	40,122	18,899
Total	**111,169**	**61,948**	**23,789**

The computation of the income tax expense for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 is as follows:

	December 31,		
	2008	**2009**	**2010**
Estimated taxable income (tax loss) of the Company	**1,529,795**	**1,117,916**	**(1,142,061)**
Income tax expense - current (at statutory tax rates)			
Company	458,921	313,016	-
Subsidiaries	120,802	147,957	128,171
Tax correction from previous year paid during the year	7,919	33,517	-
Total income tax expense - current	587,642	494,490	128,171
Income tax expense (benefit) - deferred - effect of temporary differences at enacted maximum tax rates (30% in 2008, 28% or 25% in 2009 and 25% in 2010)			
Company			
Depreciation - net	132,066	228,846	423,027
Loss on sale of property and equipment - net	-	1,036	86,055
Amortization of other intangible assets	67,565	58,962	47,642
Equity in net income of investees	50,834	34,073	42,652
Amortization of 3G licenses	(194)	1,722	8,751
Tax loss	-	-	(285,515)
Write-off of accounts receivable (provision for impairment of receivables) - net	(24,056)	15,517	(8,685)
Provision for termination, gratuity and compensation benefits of employees	(6,574)	(7,662)	(8,217)
Net periodic pension cost	(458)	(115)	(4,253)
Accrual of employee benefits - net	(38,496)	(27,818)	(3,820)
Amortization of debt and bonds issuance costs, consent solicitation fees and discount (Notes 14 and 15)	(1,990)	548	(2,580)
Others	(16,950)	(1,992)	4,402
Net	161,747	303,117	299,459

12. TAXES PAYABLE (continued)

	December 31,		
	2008	2009	2010
Subsidiaries			
Net periodic pension cost	542	1,524	720
Write-off of accounts receivable (provision for impairment of receivables) - net	(985)	(2,943)	533
Depreciation - net	(8,528)	(10,549)	(6,073)
Accrued expenses	1,303	(506)	(948)
Tax loss carryforward	13,318	-	-
Others	(522)	(1,184)	476
Net	5,128	(13,658)	(5,292)
Net income tax expense - deferred	166,875	289,459	294,167
Deferred tax expense (benefit) resulting from reduction in tax rate			
Company	(283,047)	-	-
Subsidiaries	13,870	-	-
Net	(269,177)	-	-
Income tax expense - net	**485,340**	**783,949**	**422,338**

The computation of the estimated income tax payable is as follows:

	December 31,		
	2008	2009	2010
Income tax expense - current			
Company	458,921	313,016	-
Subsidiaries	120,802	147,957	128,171
Tax correction from previous year	7,919	33,517	-
Total income tax expense - current	587,642	494,490	128,171
Less prepayments of income tax of the Company			
Article 22	99,462	101,137	52,126
Article 23	9,053	7,071	6,810
Article 25	317,745	299,289	28,795
Total prepayments of income tax of the Company	426,260	407,497	87,731
Less prepayments of income tax of Subsidiaries			
Article 22	1,036	7,534	1,107
Article 23	3,214	3,306	3,696
Article 25	72,086	151,693	194,309
Total prepayments of income tax of Subsidiaries	76,336	162,533	199,112
Total prepayments of income tax	502,596	570,030	286,843

Estimated income tax payable

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Company	32,661	-	-
Subsidiaries	46,139	21,826	4,890
Total estimated income tax payable	**78,800**	**21,826**	**4,890**

12. TAXES PAYABLE (continued)

	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010
Claim for tax refund (presented as part of "Taxes Receivable")			
Company	-	94,481	87,731
Subsidiaries	1,673	36,402	75,831
Total claim for tax refund	**1,673**	**130,883**	**163,562**

The reconciliation between the income tax expense calculated by applying the applicable tax rate of 30% in 2008, 28% in 2009 and 25% in 2010 to the profit before income tax and the income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 is as follows:

	December 31, 2008	December 31, 2009	December 31, 2010
Profit before income tax	**2,555,320**	**2,544,179**	**1,325,208**
Income tax expense at the applicable tax rate of 30% in 2008, 28% in 2009 and 25% in 2010	766,596	712,370	331,302
Company's equity in Subsidiaries' income before income tax and reversal of inter-company consolidation eliminations	48,539	56,265	58,384
Tax effect on permanent differences			
Assessment for income taxes and related penalties	2,878	15,497	20,844
Employee benefits	19,027	15,815	16,180
Donation	18,632	3,577	6,037
Amortization of landrights	2,844	2,859	2,735
Interest income already subjected to final tax	(140,563)	(41,764)	(36,200)
Others	9,073	(5,918)	11,161
Tax correction from previous year	7,919	33,517	-
Adjustment due to tax audit and others	19,572	(8,269)	11,895
Net deferred tax benefits resulting from reduction in tax rates	(269,177)	-	-
Income tax expense - net per consolidated statements of comprehensive income	**485,340**	**783,949**	**422,338**

The tax effects of significant temporary differences between financial and tax reporting of the Company are as follows:

	January 1, 2009 (Restated)	December 31, 2009 (Restated)	December 31, 2010
Deferred tax assets			
Tax loss	-	-	285,515
Accrual of employee benefits - net	187,587	223,067	235,104
Allowance for impairment of receivables	125,027	109,510	118,195
Allowance for decline in value of investment in associated company and other long-term investments	39,069	39,069	39,069
Pension cost	17,775	17,890	22,143
Allowance for decline in value of short-term investments	6,349	6,349	6,349
Others	10,153	5,242	4,483
Total	385,960	401,127	710,858

12. TAXES PAYABLE (continued)

	December 31,		
	January 1, 2009 (Restated)	2009 (Restated)	2010
Deferred tax liabilities			
Property and equipment	1,490,947	1,711,076	2,220,158
Investments in subsidiaries/associated companies -net of amortization of goodwill and other intangible assets	230,232	308,680	398,974
Deferred debt and bonds issuance costs, consent solicitation fees and discount	2,805	13,106	10,527
Long-term prepaid licenses	3,089	4,811	13,562
Difference in transactions of equity changes in associated company	1,460	1,460	1,460
Others	5,088	9,132	11,075
Total	1,733,621	2,048,265	2,655,756
Deferred tax liabilities - net	**1,347,661**	**1,647,138**	**1,944,898**

The breakdown by entity of the deferred tax assets and liabilities:

	December 31,					
	January 1, 2009		2009		2010	
	Deferred Tax Assets	Deferred Tax Liabilities (Restated)	Deferred Tax Assets	Deferred Tax Liabilities (Restated)	Deferred Tax Assets	Deferred Tax Liabilities
Company	-	1,347,661	-	1,647,138	-	1,944,898
Subsidiaries						
Lintasarta	66,104	-	76,475	-	77,755	-
IMM	4,640	-	11,524	-	17,263	-
APE	-	565	-	3,070	-	4,383
ISP	-	331	-	619	-	428
SMT	-	189	-	991	-	1,597
LMD	-	-	-	-	-	-
Total	**70,744**	**1,348,746**	**87,999**	**1,651,818**	**95,018**	**1,951,306**

The deferred tax assets of Lintasarta relate mainly to the deferred tax on the temporary difference in the recognition of depreciation of property and equipment.

The significant temporary differences on which deferred tax assets have been computed are not deductible for income tax purposes until the accrued employee benefits are paid, the doubtful accounts are written off, the allowance for decline in value of investment in associated company and other long-term investments is realized upon sale of the investments, and the pension cost is paid.

The significant deferred tax liabilities relate to the differences in the book and tax bases of property and equipment, investments in subsidiaries/associated companies, debt and bonds issuance costs, consent solicitation fees and discount, and long-term prepaid licenses.

The Company provides for deferred tax liabilities and deferred tax assets relating to the book-versus-tax-basis differences in its investment in domestic subsidiaries as the Company believes that for certain subsidiaries the investment will be recovered through the sale of the shares which is a taxable transaction and for certain subsidiaries the differences will be deductible from ordinary income as a result of a merger.

12. TAXES PAYABLE (continued)

In September 2008, Law No. 7 Year 1983 regarding "Income Tax" was revised for the fourth time with the issuance of Law No. 36 Year 2008. The revised Law stipulates change in the corporate tax rates from progressive tax rates to a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal years 2010 onwards. The revised Law was effective on January 1, 2009. The Companies recorded the effects of the changes in tax rates for the year ended December 31, 2008 resulting from the reduction in tax rates as a reduction of income tax expense amounting to Rp269,177 and credits amounting to Rp292 and Rp886, respectively, to "Other Components of Equity - Difference in transactions of equity changes in associated companies/subsidiaries" and "Difference in foreign currency translation", which are presented as part of other comprehensive income in the consolidated statements of comprehensive income.

On June 8, 2009, the Company received SKPKB from the DGT for Satelindo's 2003 corporate income tax amounting to Rp30,870 (including interest), which was paid to the Tax Office on July 7, 2009 and charged to current operations in 2009.

The tax losses carryover of SMT and the Company as of December 31, 2010 can be carried forward through 2015 based on the following schedule:

Year of Expiration	Amount
2011	14,190
2012	30,205
2013	26,660
2014	31,901
2015	1,192,832
Total	**1,295,788**

13. ACCRUED EXPENSES

This account consists of the following:

	December 31,		
	January 1, 2009	2009	2010
Interest	231,640	228,743	339,957
Network repairs and maintenance	303,200	301,857	265,428
Employee benefits (Notes 17 and 24)	122,049	152,447	216,732
Radio frequency fee	257,671	240,718	195,686
Dealer incentive (Note 2f5.1)	80,760	80,778	125,836
Marketing	161,698	125,908	120,092
Utilities	8,202	94,359	85,650
Consultancy fees	45,792	66,218	65,288
Universal Service Obligation ("USO")	38,526	62,378	59,899
Concession fee	49,227	2,468	38,005
Link	3,614	7,204	31,111
Rental	21,762	18,225	28,090
General and administration	25,829	25,546	27,706
Blackberry access fee	2,507	10,340	20,679
Others (each below Rp20,000)	92,761	108,372	90,726
Total	**1,445,238**	**1,525,561**	**1,710,885**

14. LOANS PAYABLE

This account consists of the following:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Related party (Note 25)			
Mandiri - net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp3,858 on January 1, 2009, Rp7,511 in 2009 and Rp2,955 in 2010	1,796,142	2,592,489	1,297,045
Third parties - net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp233,736 on January 1, 2009, Rp250,888 in 2009 and Rp189,979 in 2010; and unamortized debt discount of Rp31,844 on January 1, 2009, Rp25,892 in 2009 and Rp19,267 in 2010	9,588,487	11,563,262	9,553,906
Total loans payable	11,384,629	14,155,751	10,850,951
Less current maturities (net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fees of Rp373 in 2010):			
Related party	200,000	400,000	300,000
Third parties	372,469	1,040,259	2,884,147
Total current maturities	572,469	1,440,259	3,184,147
Long-term portion	**10,812,160**	**12,715,492**	**7,666,804**

The loans from third parties consist of the following:

Syndicated U.S. Dollar Loan Facility - net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp47,276 on January 1, 2009, Rp44,563 in 2009 and Rp27,122 in 2010	4,880,224	4,185,437	4,018,828
AB Svensk Exportkredit, Sweden with Guarantee from Export Kredit Namnden - net of unamortized debt issuance cost of Rp36,909 in 2009 and Rp27,593 in 2010	-	1,200,551	1,972,905
HSBC France - net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp176,408 on January 1, 2009, Rp156,357 in 2009 and Rp129,167 in 2010	1,276,607	1,736,678	1,500,434
BCA - net of unamortized debt issuance on cost and consent solicitation fee of Rp3,858 on January 1, 2009, Rp7,055 in 2009 and Rp2,903 in 2010	1,796,142	3,092,945	1,297,097
Goldman Sachs International			
Principal, net of unamortized debt discount of Rp31,844 on January 1, 2009, Rp25,892 in 2009 and Rp19,267 in 2010	402,456	408,408	415,033
Foreign Exchange (FX) Conversion Option - net of credit risk adjustment	185,768	97,942	54,595
9-Year Commercial Loan - net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp3,962 on January 1, 2009, Rp3,707 in 2009 and Rp2,821 in 2010	292,093	237,733	203,805

14. LOANS PAYABLE (continued)

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Investment Credit Facility 6 from CIMB Niaga	-	23,772	52,483
Finnish Export Credit Ltd. - net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp1,463 on January 1, 2009, Rp1,113 in 2009 and Rp373 in 2010	206,587	106,047	33,793
Investment Credit Facility 5 from CIMB Niaga	44,933	24,933	4,933
Investment Credit Facility 4 from CIMB Niaga	4,446	-	-
DBS - net of unamortized debt issuance cost and consent solicitation fee of Rp769 on January 1, 2009 and Rp1,184 in 2009	499,231	448,816	-
Total	9,588,487	11,563,262	9,553,906
Less current maturities	372,469	1,040,259	2,884,147
Long-term portion	**9,216,018**	**10,523,003**	**6,669,759**

The details of the loans from a related party and third parties are as follows:

Counterparties	Loan Type	Maturity	Amount	Interest Structure	Early Repayment
a. Mandiri*	▪ 5-year unsecured credit facility 1 ▪ Loan drawdowns are payable annually	September 18, 2012	Rp2,000,000	▪ Year 1: 9.75% p.a. ▪ Year 2: 10.5% p.a. ▪ Years 3-5: Average 3-month Jakarta Inter-Bank Offered Rate ("JIBOR") + 1.5% p.a. ▪ Payable quarterly	▪ Without penalty if the repayment is made after the 24th month after the agreement date subject to 7 days' prior written notice ▪ With penalty of 2% of the prepaid amount for repayment prior to the 24th month after the agreement date
b. Mandiri*	▪ 5-year unsecured credit facility 2 ▪ Loan drawdowns are payable annually	July 28, 2014	Rp1,000,000	▪ Average 3-month JIBOR + 4% p.a. ▪ Effective May 31, 2010: average 3-month JIBOR + 2.25% p.a. ▪ Payable quarterly	▪ Permitted - subject to 2% penalty of the prepaid amount ▪ On November 15, 2010, the Company made an early repayment of the remaining loan balance amounting to Rp900,000.
c. Syndicated U.S. Dollar Loan Facility - 13 Financial Institutions	▪ 5-year unsecured credit facility ▪ Loan drawdowns are payable semi-annually	June 12, 2013	US$450,000	▪ USD London Inter-Bank Offered Rate ("LIBOR") + 1.9% p.a. (onshore lenders); USD LIBOR + 1.85% p.a. (off-shore lenders) ▪ Payable semi-annually	▪ Permitted only after the 6th month from the date of loan agreement subject to 15 days' prior written notice (in the minimum amount of US$10,000 and in an amount divisible by US$1,000)

* a related party (Note 25)

14. LOANS PAYABLE (continued)

Counterparties	Loan Type	Maturity	Amount	Interest Structure	Early repayment
d. AB Svensk Exportkredit ("SEK"), Sweden with Guarantee from Export Kredit Namnden ("EKN")	▪ Credit facilities consisting of Facilities A,B and C with maximum amounts of US$100,000, US$155,000 and US$60,000, respectively ▪ Loan drawdowns are payable semi-annually	May 31, 2016 for facility A, February 28, 2017 for facility B and November 30, 2017 for facility C	US$315,000	▪ Facility A: Margin of 0.25%, LIBOR, SEK Funding Cost of 1.05% and EKN Premium Margin of 1.58% ▪ Facility B: Margin of 0.05%, Commercial Interest Reference Rate ("CIRR") and EKN Premium Margin of 1.61% ▪ Facility C: Margin of 0.05%, CIRR and EKN Premium Margin of 1.61%.	▪ Permitted only in proportionate amount for each Facility A, B and C, after the last day of the availability period and on a repayment date subject to 20 days' prior written notice ▪ In minimum amount of US$5,000 and in an amount divisible by US$500 ▪ Any repayment shall satisfy the obligations of loan repayment in inverse chronological order.
e. HSBC France	▪ 12 year - COFACE term facility ▪ Payable in twenty semi-annual installments	November 27, 2019	US$157,243	▪ 5.69% p.a. ▪ Payable semi-annually	▪ Permitted with a corresponding proportionate voluntary prepayment under the SINOSURE Facility after the last day of the availability period and on a repayment date subject to 30 days' prior written notice ▪ In minimum amount of US$10,000 and in an amount divisible by US$1,000 ▪ Any repayment shall satisfy the obligations of loan repayment in inverse chronological order.
f. HSBC France	▪ 12 year - SINOSURE term facility ▪ Payable in twenty semi-annual installments	November 27, 2019	US$44,200	▪ USD LIBOR + 0.35% p.a. ▪ Payable semi-annually	▪ Permitted with a corresponding proportionate voluntary prepayment under the COFACE Facility after the last day of the availability period and on a repayment date subject to 30 days' prior written notice ▪ In minimum amount of US$10,000 and in an amount divisible by US$1,000 ▪ Any repayment shall satisfy the obligations of loan repayment in inverse chronological order.
g. BCA	▪ 5-year unsecured credit facility 1 ▪ Loan drawdowns are payable annually	August 28, 2012	Rp2,000,000	▪ Year 1: 9.75% p.a. ▪ Year 2: 10.5% p.a. ▪ Years 3-5: 3-month JIBOR + 1.5% p.a. ▪ Payable quarterly	▪ Without penalty if the repayment is made after the 24th month after the agreement date subject to 7 days' prior written notice ▪ With penalty of 2% of the prepaid amount for repayment prior to the 24th month after the agreement date.

14. LOANS PAYABLE (continued)

Counterparties	Loan Type	Maturity	Amount	Interest Structure	Early repayment
h. BCA	▪ 3-year unsecured credit facility 2 ▪ Loan drawdowns are payable annually	March 16, 2012	Rp500,000	3-month JIBOR + 2.25% p.a.	▪ With penalty of 1% of the prepaid amount ▪ On October 19, 2010, the Company made an early repayment of the remaining loan balance amounting to Rp400,000.
i. BCA	▪ 5-year unsecured credit facility 3 ▪ Loan drawdowns are payable annually	June 25, 2014	Rp1,000,000	▪ 3-month JIBOR + 4% p.a. ▪ Effective June 25, 2010: 3-month JIBOR +2.25% p.a.	▪ With penalty of 1% of the prepaid amount, except for prepayment to refinance this credit facility ▪ On October 19, 2010, the Company made an early repayment of the remaining loan balance amounting to Rp900,000.
j. Goldman Sachs International (GSI)	▪ Investment loan ▪ provides an "FX Conversion Option" for GSI to convert the loan payable into a U.S. dollar loan of US$50,000 on May 30, 2012 ("FX Conversion Option"). ▪ Fair value of FX Conversion Option as of January 1, 2009, December 31, 2009 and 2010 amounting to US$16,965.12, US$10,419.43 and US$6,072.20 (equivalent to Rp185,768, Rp97,942 and Rp54,595), respectively	May 30, 2013	Rp434,300	▪ 8.75% p.a. ▪ Payable quarterly ▪ If GSI takes FX Conversion Option, starting May 30, 2012, the loan will bear interest at the fixed annual rate of 6.45% applied on the US$50,000 principal.	▪ Certain changes affecting withholding taxes in the United Kingdom or Indonesia. ▪ Default under Guaranteed Notes due 2012 ▪ Default under the Company's USD Notes and IDR Bonds ▪ Redemption, purchase or cancellation of the Guaranteed Notes Due 2012 and there are no USD Indosat Notes outstanding upon such redemption, purchase or cancellation ▪ Change of control in the Company.
k. HSBC Jakarta Branch, CIMB Niaga and Bank of China Limited, Jakarta Branch	▪ 9-year unsecured commercial facility ▪ Payable in fifteen semi-annual payments after 24 months from the date of loan agreement. For the 1st five installments: US$1,351.85 each; and US$2,027.78 each for the remaining installments thereafter	November 27, 2016	US$27,037	▪ USD LIBOR + 1.45% p.a. ▪ Payable semi-annually	▪ Permitted only on each repayment date after first repayment date subject to 30 days' prior written notice ▪ In minimum amount of US$5,000 and in an amount divisible by US$1,000 ▪ Any prepayment shall satisfy the obligations of loan repayment proportionately.

14. LOANS PAYABLE (continued)

Counterparties	Loan Type	Maturity	Amount	Interest Structure	Early repayment
l. CIMB Niaga	▪ Investment credit facility 6 obtained by Lintasarta ▪ Payable quarterly	June 24, 2012	Rp75,000	▪ 14.5% p.a., subject to change by CIMB Niaga depending on the market condition	Permitted only on interest payment date subject to 15 days' prior written notice. Lintasarta may repay the whole or any part of the loan before the due date only by using the fund from Lintasarta's operational activities. Repayment using the fund from loans obtained from other parties is allowed with penalty determined by CIMB Niaga.
m. Finnish Export Credit Ltd.	▪ 5-year credit facility ▪ Payable semi-annually	May 12, 2011	US$38,000	▪ 4.15% p.a. ▪ Payable semi-annually	Permitted only after 60 days of the loan agreement subject to 15 days' prior written notice (in the minimum amount of US$10,000 and in an amount divisible by US$1,000).
n. CIMB Niaga	▪ Investment credit facility 5 obtained by Lintasarta ▪ Payable quarterly	January 10, 2011	Rp50,000	▪ 1-month SBI + 2.25% p.a.	Permitted only on interest payment date subject to 13 days' prior written notice. Lintasarta may repay the whole or any part of the loan before the due date only by using the fund from Lintasarta's operational activities. Repayment using the fund from loans obtained from other parties is allowed with 1% penalty of the early repaid amount.
o. DBS	▪ 5-year unsecured credit facility ▪ Loan drawdowns are payable annually	November 1, 2012	Rp500,000	▪ Year 1: 9.7% ▪ Year 2: 10.4% ▪ Years 3-5: 3-month SBI + 1.5% p.a. ▪ Payable quarterly	▪ Without penalty if the repayment is made after the 24th month after the agreement date subject to 15 days' prior written notice ▪ With penalty of 1% of the prepaid amount for repayment prior to the 24th month after the agreement date ▪ On October 30, 2010, the Company made an early repayment of the remaining loan balance amounting to Rp400,000.

14. LOANS PAYABLE (continued)

The scheduled principal payments from 2011 to 2015 and thereafter of all the loans payable as of December 31, 2010 are as follows:

	Twelve months ending December 31,					
	2011	2012	2013	2014	2015 and thereafter	Total
In rupiah						
Mandiri*	300,000	1,000,000	-	-	-	1,300,000
BCA*	300,000	1,000,000	-	-	-	1,300,000
GSI*	-	-	434,300	-	-	434,300
CIMB Niaga*	34,933	22,483	-	-	-	57,416
Sub-total	**634,933**	**2,022,483**	**434,300**	**-**	**-**	**3,091,716**
In U.S. dollar						
Syndicated U.S. Dollar Loan facility (US$450,000) *	1,982,516	647,352	1,416,082	-	-	4,045,950
SEK, Sweden (US$222,500) *	327,529	327,529	327,529	327,529	690,382	2,000,498
HSBC France (US$181,248.02) *	181,067	181,067	181,067	181,067	905,333	1,629,601
9-Year Commercial Facility (US$22,981.45) *	24,309	36,463	36,463	36,463	72,928	206,626
GSI (US$6,072.20) *	-	-	54,595	-	-	54,595
FEC (US$3,800) *	34,166	-	-	-	-	34,166
Sub-total	**2,549,587**	**1,192,411**	**2,015,736**	**545,059**	**1,668,643**	**7,971,436**
Total	**3,184,520**	**3,214,894**	**2,450,036**	**545,059**	**1,668,643**	**11,063,152**
Less:						
- unamortized debt issuance costs and consent solicitation fees						(192,934)
- unamortized debt discount						(19,267)
Net						**10,850,951**

* Refer to previous discussion on early repayment options for each loan.

The amortization of debt issuance costs, consent solicitation fees and debt discount on the loans amounted to Rp15,331 in 2008, Rp35,838 in 2009 and Rp72,091 in 2010 (Note 23).

As of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, the Companies have complied with all financial ratios required to be maintained under the loan agreements.

15. BONDS PAYABLE

This account consists of the following:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
a) Guaranteed Notes Due 2020 - net of unamortized notes issuance cost of Rp64,885 and discount of Rp29,666	-	-	5,749,599
b) Fifth Indosat Bonds in Year 2007 with Fixed Rates - net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fees of Rp6,948 on January 1, 2009, Rp12,793 in 2009 and Rp11,041 in 2010	2,593,052	2,587,207	2,588,959
c) Seventh Indosat Bonds in Year 2009 with Fixed Rates - net of unamortized bonds issuance cost of Rp6,198 in 2009 and Rp5,362 in 2010	-	1,293,802	1,294,638

15. BONDS PAYABLE (continued)

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
d) Sixth Indosat Bonds in Year 2008 with Fixed Rates - net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fees of Rp4,256 on January 1, 2009, Rp7,050 in 2009 and Rp5,414 in 2010	1,075,744	1,072,950	1,074,586
e) Fourth Indosat Bonds in Year 2005 with Fixed Rate - net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fees of Rp4,404 on January 1, 2009, Rp4,050 in 2009 and Rp1,382 in 2010	810,596	810,950	813,618
f) Indosat Sukuk Ijarah III in Year 2008 - net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fees of Rp2,229 on January 1, 2009, Rp3,601 in 2009 and Rp2,625 in 2010	567,771	566,399	567,375
g) Indosat Sukuk Ijarah II in Year 2007 - net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fees of Rp1,042 on January 1, 2009, Rp1,872 in 2009 and Rp1,517 in 2010	398,958	398,128	398,483
h) Indosat Syari'ah Ijarah Bonds in Year 2005 - net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fees of Rp1,560 on January 1, 2009, Rp1,429 in 2009 and Rp487 in 2010	283,440	283,571	284,513
i) Second Indosat Bonds in Year 2002 with Fixed and Floating Rates - net of unamortized consent solicitation fees of Rp656 in 2009 and Rp652 in 2010	200,000	199,344	199,348
j) Indosat Sukuk Ijarah IV in Year 2009 - net of unamortized bonds issuance cost of Rp982 in 2009 and Rp873 in 2010	-	199,018	199,127
k) Limited Bonds II issued by Lintasarta*	31,150	25,000	25,000
l) Limited Bonds I issued by Lintasarta**	25,292	16,989	16,989
m) Guaranteed Notes Due 2010 - net of unamortized notes issuance cost of Rp6,977 on January 1, 2009 and Rp3,879 in 2009	2,563,503	2,202,743	-
n) Guaranteed Notes Due 2012 - net of unamortized notes discount of Rp4,129 on January 1, 2009, Rp3,116 in 2009; and unamortized notes issuance cost of Rp8,649 on January 1, 2009 and Rp6,521 in 2009	1,185,261	1,018,817	-
o) Third Indosat Bonds in Year 2003 with Fixed Rates - net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fees of Rp2,709 on January 1, 2009 and Rp2,081 in 2009	637,291	637,919	-
Total bonds payable	10,372,058	11,312,837	13,212,235
Less current maturities (net of unamortized bonds issuance cost and consent solicitation fees totalling Rp5,960 in 2009 and Rp1,869 in 2010)	56,442	2,840,662	1,098,131
Long-term portion	**10,315,616**	**8,472,175**	**12,114,104**

* after elimination of Limited Bonds II amounting to Rp35,000 issued to the Company
** after elimination of Limited Bonds I amounting to Rp9,564 issued to the Company

15. BONDS PAYABLE (continued)

Bond	Nominal Amount	Interest	Maturity	Remarks
a. Guaranteed Notes Due 2020	US$650,000	▪ 7.375% p.a. ▪ Payable semi-annually	July 29, 2020	The notes are redeemable at the option of IPBV: ▪ At any time on or after July 29, 2015. ▪ Prior to July 29, 2013, IPBV may redeem up to a maximum of 35% of the original aggregate principal amount. ▪ At any time, upon not less than 30 days nor more than 60 days prior notice, at a price equal to 100% of the principal amount thereof, plus any accrued and unpaid interest to (but not including) the redemption date and any additional amounts, in the event of certain changes affecting withholding taxes in Indonesia and the Netherlands. ▪ Upon a change in control of IPBV, the holder of the notes has the right to require IPBV to repurchase all or any part of such holder's notes.
b. Fifth Indosat Bonds in Year 2007				
▪ Series A	Rp1,230,000	▪ 10.20% p.a. ▪ Payable quarterly	May 29, 2014	▪ The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price temporarily or as an early settlement. ▪ Based on the latest rating report released in October 2010, the bonds have $_{id}^{AA}$+ (stable outlook) rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").
▪ Series B	Rp1,370,000	▪ 10.65% p.a. ▪ Payable quarterly	May 29, 2017	
c. Seventh Indosat Bonds in Year 2009				
▪ Series A	Rp700,000	▪ 11.25% p.a. ▪ Payable quarterly	December 8, 2014	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price temporarily or as an early settlement.
▪ Series B	Rp600,000	▪ 11.75% p.a. ▪ Payable quarterly	December 8, 2016	
d. Sixth Indosat Bonds in Year 2008				
▪ Series A	Rp760,000	▪ 10.25% p.a. ▪ Payable quarterly	April 9, 2013	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price temporarily or as an early settlement.
▪ Series B	Rp320,000	▪ 10.80% p.a. ▪ Payable quarterly	April 9, 2015	
e. Fourth Indosat Bonds in Year 2005 with Fixed Rate	Rp815,000	▪ 12% p.a. ▪ Payable quarterly	June 21, 2011	The Company has early settlement option on the 4th anniversary of the bonds at 100% of the bonds' nominal value and buy-back option after the 1st anniversary of the bonds at market price temporarily or as an early settlement.
f. Indosat Sukuk Ijarah III in Year 2008 ("Sukuk Ijarah III")	Rp570,000	▪ Bondholders are entitled to annual fixed Ijarah return ("*Cicilan Imbalan Ijarah*") totalling Rp58,425, payable on a quarterly basis starting July 9, 2008 up to April 9, 2013.	April 9, 2013	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price.

15. BONDS PAYABLE (continued)

Bond	Nominal Amount	Interest	Maturity	Remarks
g. Indosat Sukuk Ijarah II in Year 2007 ("Sukuk Ijarah II")	Rp400,000	▪ Bondholders are entitled to annual fixed Ijarah return ("*Cicilan Imbalan Ijarah*") totalling Rp40,800, payable on a quarterly basis starting August 29, 2007 up to May 29, 2014.	May 29, 2014	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price.
h. Indosat Syari'ah Ijarah Bonds in Year 2005 ("Syari'ah Ijarah Bonds")	Rp285,000	▪ Bondholders are entitled to annual fixed Ijarah return ("*Cicilan Imbalan Ijarah*") totalling Rp34,200, payable on a quarterly basis starting September 21, 2005 up to June 21, 2011.	June 21, 2011	The Company has *early settlement option* on the 4th anniversary of the bonds at 100% of the bonds' nominal value and *buy-back option* after the 1st anniversary of the bonds at market price temporarily or as an early settlement.
i. Second Indosat Bonds in Year 2002 - Series B	Rp200,000	▪ 16% p.a. ▪ Payable quarterly	November 6, 2032	The Company has *buy option* on the 10th, 15th, 20th and 25th anniversaries of the bonds at 101% of the bonds' nominal value and the bondholder has *sell option* if the rating of the bonds decreases to id AA- or lower or on the 15th, 20th and 25th anniversaries of the bonds.
j. Indosat Sukuk Ijarah IV in Year 2009 ("Sukuk Ijarah IV")				
▪ Series A	Rp28,000	▪ Bondholders are entitled to annual fixed ijarah return ("*Cicilan Imbalan Ijarah*") totalling Rp3,150, payable on a quarterly basis starting March 8, 2010 up to December 8, 2014.	December 8, 2014	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price.
▪ Series B	Rp172,000	▪ Bondholders are entitled to annual fixed ijarah return ("*Cicilan Imbalan Ijarah*") totalling Rp20,210, payable on a quarterly basis starting March 8, 2010 up to December 8, 2016.	December 8, 2016	The Company has option to buy back part or all of the bonds, after the 1st anniversary of the bonds, at market price.
k. Limited Bonds II issued by Lintasarta (amended on August 25, 2009)	Rp66,150, with the remaining amount of Rp60,000 since June 14, 2009	▪ Average 3-month rupiah time deposit rates with Mandiri, BNI, BRI and BTN, plus a fixed premium of 3% (The maximum limit of floating rates was 19% and the minimum limit was 11% p.a. and starting June 14, 2009, the minimum limit increased to 12.75%.) ▪ Payable quarterly	June 14, 2009 extended to June 14, 2012	-
l. Limited Bonds I issued by Lintasarta (amended on August 25, 2009)	Rp34,856, with the remaining amount of Rp26,553 since June 2, 2009	▪ Average 3-month rupiah time deposit rates with Mandiri, BNI, BRI and BTN, plus a fixed premium of 3% (The maximum limit of floating rates was 19% and the minimum limit was 11% p.a. and starting June 2, 2009, the minimum limit increased to 12.75%.) ▪ Payable quarterly	June 2, 2009 extended to June 2, 2012	-

15. BONDS PAYABLE (continued)

Bond	Nominal Amount	Interest	Maturity	Remarks
m. Guaranteed Notes Due 2010	US$300,000	▪ 7.75% p.a. ▪ Payable semi-annually	November 5, 2010	The notes are redeemable at the option of IFB: ▪ At any time on or after November 5, 2008. ▪ At any time, in the event of certain changes affecting withholding taxes in Indonesia and the Netherlands that would require IFB or the Company to pay an additional amount in respect of any note in excess of certain amounts. ▪ Upon a change in control of IFB, the holder of the notes has the right to require IFB to repurchase all or any part of such holder's notes. ▪ On September 19, 2008, IFB paid for the purchased portion of the notes with a total principal amount of US$65,253. ▪ On August 2, 2010, IFB paid for the purchased portion of the 2010 Notes under tender offers with total principal amount of US$167,874. ▪ On August 10, 2010, IFB paid for the remaining purchased portion of the 2010 Notes which was called with a total principal amount of US$66,873.
n. Guaranteed Notes Due 2012	US$250,000	▪ 7.125% p.a. ▪ Payable semi-annually	June 22, 2012	The notes are redeemable at the option of IIFB: ▪ At any time on or after June 22, 2010. ▪ At any time, in the event of certain changes affecting withholding taxes in Indonesia and the Netherlands that would require IIFB or the Company to pay an additional amount in respect of any note in excess of certain amounts. ▪ Upon a change in control of IIFB, the holder of the notes has the right to require IIFB to repurchase all or any part of such holder's notes. ▪ On September 19, 2008, IIFB paid for the purchased portion of the notes with a total principal amount of US$140,590. ▪ On August 2, 2010, IIFB paid for the purchased portion of the 2012 Notes under tender offers with total principal amounts of US$56,035. ▪ On September 2, 2010, IIFB paid for the remaining purchased portion of the 2012 Notes which was called with a total principal amount of US$53,375.
o. Third Indosat Bonds in Year 2003				
▪ Series A	Rp1,860,000	▪ 12.5% p.a. ▪ Payable quarterly	October 21, 2008	▪ The Company has *early settlement option* on the 6th anniversary of the bonds for Series B bonds at 100% of the bonds' nominal value and *buy-back option* after the 1st anniversary of the bonds at market price temporarily or as an early settlement. ▪ On October 22, 2010, the Company paid in full the Series B bonds.
▪ Series B	Rp640,000	▪ 12.875% p.a. ▪ Payable quarterly	October 22, 2010	

15. BONDS PAYABLE (continued)

The scheduled principal payments of all the bonds payable outstanding as of December 31, 2010 are as follows:

	Twelve months ending December 31,					
	2011	2012	2013	2014	2015 and thereafter *	Total
In U.S. dollar						
Guaranteed Notes* Due 2020 (US$650,000)	-	-	-	-	5,844,150	5,844,150
In Rupiah						
Fifth Indosat Bonds*	-	-	-	1,230,000	1,370,000	2,600,000
Seventh Indosat Bonds*	-	-	-	700,000	600,000	1,300,000
Sixth Indosat Bonds*	-	-	760,000	-	320,000	1,080,000
Fourth Indosat Bonds*	815,000	-	-	-	-	815,000
Sukuk Ijarah III*	-	-	570,000	-	-	570,000
Sukuk Ijarah II*	-	-	-	400,000	-	400,000
Syari'ah Ijarah Bonds*	285,000	-	-	-	-	285,000
Second Indosat Bonds*	-	-	-	-	200,000	200,000
Sukuk Ijarah IV*	-	-	-	28,000	172,000	200,000
Limited Bonds II	-	25,000	-	-	-	25,000
Limited Bonds I	-	16,989	-	-	-	16,989
Sub-total	**1,100,000**	**41,989**	**1,330,000**	**2,358,000**	**2,662,000**	**7,491,989**
Total	**1,100,000**	**41,989**	**1,330,000**	**2,358,000**	**8,506,150**	**13,336,139**

Less:	
- unamortized notes issuance cost	(64,885)
- unamortized bonds issuance costs and consent solicitation fees	(29,353)
- unamortized notes discount	(29,666)
Net	**13,212,235**

* Refer to previous discussion on early repayment options for each bond/note.

The total amortization of bonds issuance cost, consent solicitation fees, notes issuance cost and discount for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 amounted to Rp38,210, Rp15,467 and Rp18,025, respectively (Note 23).

As of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, the Companies have complied with all financial ratios required to be maintained under the Notes Indenture and Trustee Agreements.

16. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The Companies have various financial assets such as trade and other cash and cash equivalents, accounts receivable, other current financial assets, due from related parties, other non-current financial assets, short-term investments and other long-term investments, which arise directly from the Companies' operations. The Companies' principal financial liabilities, other than derivatives, consist of trade payables, procurement payable, accrued expenses, deposits from customers, loans and bonds payable, other current financial liabilities, due to related parties and other non-current financial liabilities. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Companies' operations. The Company also enters into derivative transactions, primarily cross currency swaps and interest rate swaps for the purpose of managing its foreign exchange and interest rate exposures emanating from the Company's loans and bonds payable in foreign currencies.

The following table sets forth the Companies' financial assets and financial liabilities as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Financial Assets			
Held for trading			
Derivative assets	656,594	224,004	69,334
Loans and receivables			
Cash and cash equivalents	5,737,866	2,835,999	2,075,270
Accounts receivable - trade and others - net	1,357,620	1,949,984	1,558,457
Other current financial assets	44,777	35,173	53,119
Due from related parties - net	42,496	7,215	8,421
Other non-current financial assets	72,800	100,004	77,675
Available for sale			
Short-term investments - net	-	-	-
Other long-term investments - net	2,730	2,730	2,730
Total Financial Assets	**7,914,883**	**5,155,109**	**3,845,006**
Financial Liabilities			
Held for trading			
Derivative liabilities	315,866	174,540	215,403
Liabilities at amortized cost			
Accounts payable - trade	608,754	537,476	645,505
Procurement payable	6,446,357	5,289,782	3,644,467
Accrued expenses	1,445,238	1,525,561	1,710,885
Deposits from customers	32,121	22,463	50,279
Loans payable - current maturities	572,469	1,440,259	3,184,147
Bonds payable - current maturities	56,442	2,840,662	1,098,131
Other current financial liabilities	31,022	43,721	23,127
Due to related parties	14,699	13,764	22,099
Loans payable - net of current maturities	10,812,160	12,715,492	7,666,804
Bonds payable - net of current maturities	10,315,616	8,472,175	12,114,104
Other non-current financial liabilities	45,511	-	-
Total Financial Liabilities	**30,696,255**	**33,075,895**	**30,374,951**

16. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The following table sets forth the carrying values and estimated fair values of the Companies' financial instruments that are carried in the consolidated statements of financial position:

	Carrying Amount			Fair Value		
		December 31,			December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010	January 1, 2009	2009	2010
Current Financial Assets						
Cash and cash equivalents	5,737,866	2,835,999	2,075,270	5,737,866	2,835,999	2,075,270
Short-term investments - net	-	-	-	-	-	-
Accounts receivable - trade and others - net	1,357,620	1,949,984	1,558,457	1,357,620	1,949,984	1,558,457
Derivative assets	656,594	224,004	69,334	656,594	224,004	69,334
Other current financial assets	44,777	35,173	53,119	44,777	35,173	53,119
Total current financial assets	**7,796,857**	**5,045,160**	**3,756,180**	**7,796,857**	**5,045,160**	**3,756,180**
Non-current Financial Assets						
Due from related parties - net	42,496	7,215	8,421	32,414	6,263	7,176
Other long-term investments - net	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
Other non-current financial assets	72,800	100,004	77,675	54,129	81,369	73,309
Total non-current financial Assets	**118,026**	**109,949**	**88,826**	**89,273**	**90,362**	**83,215**
Total Financial Assets	**7,914,883**	**5,155,109**	**3,845,006**	**7,886,130**	**5,135,522**	**3,839,395**
Current Financial Liabilities						
Accounts payable - trade	608,754	537,476	645,505	608,754	537,476	645,505
Procurement payable	6,446,357	5,289,782	3,644,467	6,446,357	5,289,782	3,644,467
Accrued expenses	1,445,238	1,525,561	1,710,885	1,445,238	1,525,561	1,710,885
Deposits from customers	32,121	22,463	50,279	32,121	22,463	50,279
Derivative liabilities	315,866	174,540	215,403	315,866	174,540	215,403
Loans payable - current portion maturities	572,469	1,440,259	3,184,147	567,337	1,425,325	3,155,634
Bonds payable - current portion maturities	56,442	2,840,662	1,098,131	57,251	2,904,566	1,110,737
Other current financial liabilities	31,022	43,721	23,127	31,022	43,721	23,127
Total current financial liabilities	**9,508,269**	**11,874,464**	**10,571,944**	**9,503,946**	**11,923,434**	**10,556,037**
Non-current Financial Liabilities						
Due to related parties	14,699	13,764	22,099	11,212	11,948	18,833
Loans payable - net of current maturities	10,812,160	12,715,492	7,666,804	10,826,572	13,281,903	7,510,510
Bonds payable - net of current maturities	10,315,616	8,472,175	12,114,104	9,806,811	8,495,278	13,228,171
Other non-current financial liabilities	45,511	-	-	45,511	-	-
Total non-current financial liabilities	**21,187,986**	**21,201,431**	**19,803,007**	**20,690,106**	**21,789,129**	**20,757,514**
Total Financial Liabilities	**30,696,255**	**33,075,895**	**30,374,951**	**30,194,052**	**33,712,563**	**31,313,551**

16. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Fair Value Measurement

The fair values of the financial assets and liabilities are presented at the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced sale or liquidation.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practicable to estimate such value:

Short-term financial assets and liabilities:

- *Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash and cash equivalents, trade and other accounts receivable, other current financial assets, trade accounts payable, procurement payable, accrued expenses, deposits from customers and other current financial liabilities)*.

  These financial instruments approximate their carrying amounts largely due to their short-term maturities.

- *Derivative Financial Instruments*

  Cross currency swap contracts (including bifurcated embedded derivative)

  These derivatives are measured at their fair values using internal valuation techniques as no quoted market prices exist for such instruments. The principal technique used to value these instruments is the use of discounted cash flows. The key inputs include interest rate yield curves, foreign exchange rates, Credit Default Spread (“CDS”), and the spot price of the underlying instruments.

  Interest rate swap contracts

  These derivatives are measured at their fair values, computed using discounted cash flows based on observable market inputs which include interest rate yield curves and payment dates.

Long-term financial assets and liabilities:

- *Long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (unquoted loans and bonds payable)*

  The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

- *Other long-term financial assets and liabilities (due from/to related parties, other long-term investments, other non-current financial assets and liabilities)*

  Estimated fair value is based on discounted value of future cash flows adjusted to reflect counterparty risk (for financial assets) and the Companies’ own credit risk (for financial liabilities) and using risk-free rates for similar instruments.

- *Financial instruments quoted in an active market*

  The fair value of the bonds issued by the Company which are traded in an active market is determined with reference to their quoted market prices.

  For equity investments classified as available-for-sale, the fair value is determined based on the latest market quotation as published by the Indonesia Stock Exchange as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010.

16. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Fair Value Hierarchy

Financial assets and liabilities are classified in their entirety based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurements. The assessment of the significance of a particular input to the fair value measurements requires judgment, and may affect the valuation of the assets and liabilities being measured and their placement within the fair value hierarchy.

The best evidence of fair value is quoted prices in an active market. If the market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique. The objective of using a valuation technique is to establish what the transaction price would have been on the measurement date in an arm's length exchange motivated by normal business considerations. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing models. If there is a valuation technique commonly used by market participants to price the instrument and that technique has been demonstrated to provide reliable estimates of prices obtained in actual market transactions, the entity uses that technique. The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs and relies as little as possible on entity-specific inputs. It incorporates all factors that market participants would consider in setting a price and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Periodically, the Company calibrates the valuation technique and tests it for validity using prices from any observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging) or based on any available observable market data.

The Company's fair value hierarchy as of December 31, 2009 and 2010 are as follows:

	December 31, 2009			
	TOTAL	Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)	Significant and observable inputs, directly or indirectly (Level 2)	Significant unobservable inputs (Level 3)
Current Financial Assets				
Derivative assets	224,004	-	224,004	-
Total Financial Assets	**224,004**	**-**	**224,004**	**-**
Current Financial Liabilities				
Derivative liabilities	174,540	-	174,540	-
Embedded derivatives	97,942	-	97,942	-
Total Financial Liabilities	**272,482**	**-**	**272,482**	**-**

	December 31, 2010			
	TOTAL	Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)	Significant and observable inputs, directly or indirectly (Level 2)	Significant unobservable inputs (Level 3)
Current Financial Assets				
Derivative assets	69,334	-	69,334	-
Total Financial Assets	**69,334**	**-**	**69,334**	**-**
Current Financial Liabilities				
Derivative liabilities	215,403	-	215,403	-
Embedded derivatives	54,595	-	54,595	-
Total Financial Liabilities	**269,998**	**-**	**269,998**	**-**

16. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

During the reporting periods ending December 31, 2009 and 2010, there were no transfers between Level 1 and Level 2 fair value measurements.

17. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

This account consists of the non-current portions of employee benefit obligations as follows:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Post-retirement healthcare (Note 24)	474,118	549,007	639,271
Labor Law 13 (Note 24)	111,174	147,790	187,944
Service award	27,207	31,265	43,058
Accumulated leave benefits	741	1,391	2,134
Post-retirement benefit of salary continuation before retirement*	82,447	96,261	-
Total	**695,687**	**825,714**	**872,407**

* Before December 31, 2010, the current portion of salary continuation before retirement included in accrued expenses (Note 13) amounted to Rp1,412 and the non-current portion included in employee benefit obligations amounted to Rp117,773, before deducting benefit payments made during the year amounting to Rp852. On December 31, 2010, the Company and its employees' union reached a collective labor agreement ("CLA") on the revocation of post-retirement benefit of salary continuation before retirement effective January 1, 2011. This revocation eliminates the Company's legal or constructive obligation on the benefit. Consequently, the Company reversed the outstanding accrual for this benefit as of December 31, 2010 amounting to Rp118,333.

18. CAPITAL STOCK

The Company's capital stock ownership details as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010 are as follows:

Stockholders	Number of Shares Issued and Fully Paid	Amount	Percentage of Ownership (%)
January 1, 2009			
A Share			
Government	1	-	-
B Shares			
Indonesia Communications Limited, Mauritius ("ICL")	2,171,250,000	217,125	39.96
Government	776,624,999	77,662	14.29
Stockholders holding more than 5%:			
Fidelity Entities	553,479,050	55,348	10.19
Goldman Sachs (Asia) L.L.C	469,653,300	46,965	8.64
Noonday (Farallon Entities)	432,226,800	43,223	7.95
SKAGEN Funds (SKAGEN AS)	349,945,317	34,995	6.44
Indonesia Communications Pte. Ltd., Singapore ("ICLS")	46,340,000	4,634	0.85
Directors:			
Raymond Tan Kim Meng	222,500	22	0.01
Wahyu Wijayadi	152,500	15	0.00
Wong Heang Tuck	75,000	8	0.00
Johnny Swandi Sjam	30,000	3	0.00
Fadzri Sentosa	10,000	1	0.00
Others (each holding below 5%)	633,924,033	63,392	11.67
Total	**5,433,933,500**	**543,393**	**100.00**

18. CAPITAL STOCK (continued)

Stockholders	Number of Shares Issued and Fully Paid	Amount	Percentage of Ownership (%)
December 31, 2009			
A Share			
Government	1	-	-
B Shares			
Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd. (previously ICLS)	3,532,056,600	353,206	65.00
Government	776,624,999	77,662	14.29
Director:			
Fadzri Sentosa	10,000	1	0.00
Others (each holding below 5%)	1,125,241,900	112,524	20.71
Total	**5,433,933,500**	**543,393**	**100.00**
December 31, 2010			
A Share			
Government	1	-	-
B Shares			
Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd.	3,532,056,600	353,206	65.00
Government	776,624,999	77,662	14.29
SKAGEN Funds (SKAGEN AS)	277,824,400	27,782	5.11
Director:			
Fadzri Sentosa	10,000	1	0.00
Others (each holding below 5%)	847,417,500	84,742	15.60
Total	**5,433,933,500**	**543,393**	**100.00**

The “A” share is a special share held by the Government and has special voting rights. The material rights and restrictions which are applicable to the “B” shares are also applicable to the “A” share, except that the Government may not transfer the “A” share, which has a veto right with respect to (i) amendment to the objective and purposes of the Company; (ii) increase of capital without pre-emptive rights; (iii) merger, consolidation, acquisition and demerger; (iv) amendment to the provisions regarding the rights of “A” share as stipulated in the Articles of Association; and (v) dissolution, bankruptcy and liquidation of the Company. The “A” share also has the right to appoint one director and one commissioner of the Company.

On June 6, 2008, STT Communications Limited (“STTC”) entered into a Share Purchase Agreement to sell its 75% ownership in ICL and ICLS to Qtel. The closing process of such sale was made on June 22, 2008 and resulted in Qtel’s direct ownership in ICL and ICLS. As a result, Qtel has become the ultimate shareholder of the Company and all of STTC’s affiliations ceased to be related parties of the Companies.

On January 8, 2009, Qtel filed tender offer statements with the United States Securities and Exchange Commission (“U.S. SEC”) and the BAPEPAM-LK to purchase additional Company shares which became effective on January 16, 2009. Subsequently, as required by the U.S. SEC, on January 20, 2009, the Company filed schedule 14D-9, Solicitation/Recommendation Statement, with the U.S. SEC in response to the Tender Offers made by Qtel in the United States of America and Indonesia through Qtel’s indirect wholly owned subsidiary, ICLS, to purchase Series B shares (including Series B shares held as ADS, each representing 50 Series B shares) which represent approximately 24.19% of the Company’s total issued and outstanding Series B shares. On March 4, 2009, ICLS increased its ownership interest in the Company from 0.85% to 25.04%.

18. CAPITAL STOCK (continued)

On May 29, 2009, ICL entered into a Share Purchase Agreement to sell its 39.96% ownership in the Company to ICLS. The closing process of such sale was made on June 4, 2009; consequently, from this date, ICLS has become the legal owner of 3,532,056,600 "B" shares representing 65.00% ownership in the Company.

On September 11, 2009, ICLS changed its name into Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte. Ltd.

19. OPERATING REVENUES

This account consists of the following:

	2008 (Restated)	2009 (Restated)	2010
Cellular			
Usage charges	8,492,799	7,085,741	7,943,960
Value added services	5,052,615	5,998,963	7,039,243
Interconnection revenues	1,833,768	1,709,193	1,252,751
Tower leasing (Note 29e)	-	62,365	251,981
Monthly subscription charges	66,302	184,174	200,519
Sale of blackberry handsets and modems	82,476	206,481	34,956
Others	136,226	171,382	177,269
Upfront discount and customer loyalty program (Note 2f5.1)	(1,203,380)	(1,087,064)	(1,033,588)
Net	**14,460,806**	**14,331,235**	**15,867,091**
MIDI			
Internet Protocol Virtual Private Network (IP VPN)	585,658	566,105	605,685
Internet	703,914	677,375	519,553
World link and direct link	456,692	394,189	278,788
Frame net	315,791	276,477	227,051
Leased line	231,570	211,092	189,112
Application services	118,895	146,137	168,196
Satellite lease	96,280	113,060	136,008
Digital data network	124,891	144,619	94,686
Multiprotocol Label Switching (MPLS)	25,161	67,141	66,579
Others	74,560	116,437	202,452
Sub-total	**2,733,412**	**2,712,632**	**2,488,110**
Fixed Telecommunication			
International Calls	1,650,104	1,422,268	993,165
Fixed Wireless	244,304	249,886	174,157
Fixed Line	126,660	129,935	125,383
Others	685	950	472
Sub-total	**2,021,753**	**1,803,039**	**1,293,177**
Total	**19,215,971**	**18,846,906**	**19,648,378**

Operating revenues from related parties amounted to Rp1,790,115, Rp1,474,208 and Rp1,640,591 for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010, respectively. These amounts represent 9.32%, 7.82% and 8.35% of total operating revenues in 2008, 2009 and 2010, respectively (Note 25).

The operating revenues from interconnection services are presented on a gross basis (Note 2f5).

20. OPERATING EXPENSES - COST OF SERVICES

This account consists of the following:

	2008 (Restated)	2009 (Restated)	2010
Interconnection	2,242,797	1,880,105	1,735,942
Radio frequency fee	1,025,082	1,331,416	1,612,375
Maintenance	903,244	922,225	943,503
Utilities	507,985	772,450	715,349
Rent	361,319	449,759	517,432
Leased circuits	447,319	487,074	377,580
Cost of SIM cards and pulse reload vouchers	391,101	326,472	259,323
USO	123,452	218,210	214,636
Blackberry access fee	14,099	50,068	197,434
Installation	88,179	97,142	133,746
Concession fee	170,321	83,970	112,404
Delivery and transportation	84,825	80,157	84,075
Cost of handsets and modems	111,537	247,135	74,266
Billing and collection	49,209	44,297	54,816
License	32,504	67,030	31,543
Others	74,831	30,340	48,986
Total	**6,627,804**	**7,087,850**	**7,113,410**

Interconnection relates to the expenses for the interconnection between the Company's telecommunications networks and those owned by Telkom or other telecommunications carriers (Note 2f5).

21. OPERATING EXPENSES - PERSONNEL

This account consists of:

	2008	2009	2010
Salaries	420,297	451,150	492,452
Incentives and other employee benefits	278,837	260,884	277,361
Bonuses	279,483	207,690	236,950
Employee income tax	251,950	145,421	131,630
Post-retirement healthcare benefits (Note 24)	120,147	88,615	104,600
Medical expense	61,220	68,471	69,509
Outsourcing	115,890	74,809	60,858
Pension (Note 24)	36,796	32,336	45,688
Separation, appreciation and compensation expense under Labor Law No. 13/2003 (Note 24)	27,581	40,972	42,833
Early retirement*	19,598	38,106	16,253
Post-retirement benefit of salary continuation before retirement (Note 17)	9,052	14,933	(96,820)
Others	18,142	28,173	29,930
Total	**1,638,993**	**1,451,560**	**1,411,244**

* On June 27, 2006, the Company's Directors issued Decree No. 051/DIREKSI/2006, "Additional Benefits for Voluntarily Resigned Employees". Under this decree, employees qualified for early retirement and who voluntarily resigned after the approval from the Board of Directors were given benefits of additional remuneration, traveling and training package. For the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010, there were additional 41, 66 and 19 employees, respectively, who took the option.

The personnel expenses capitalized to properties under construction and installation during the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 amounted to Rp37,111, Rp34,092 and Rp38,668, respectively.

22. OPERATING EXPENSES - GENERAL AND ADMINISTRATION

This account consists of:

	2008	2009	2010
Rent	141,245	144,585	120,428
Professional fees	116,043	103,916	109,374
Utilities	60,760	77,318	97,518
Provision for impairment of receivables (Note 5)	74,281	98,042	67,041
Transportation	122,987	58,882	64,485
Office	49,673	44,710	48,370
Insurance	26,093	29,183	39,807
Catering	22,045	20,730	25,585
Others (each below Rp20,000)	124,305	116,071	87,379
Total	**737,432**	**693,437**	**659,987**

23. FINANCING COST

This account consists of:

	2008	2009	2010
Interest on loans	1,776,514	1,808,620	2,080,274
Loss on the redemption of GN 2010 and GN 2012 (Note 15)	19,493	-	96,487
Amortization of debt and bonds / notes issuance costs, consent solicitation fees and discount (Notes 14 and 15)	53,541	51,305	90,116
Bank charges	8,746	13,042	4,751
Total	**1,858,294**	**1,872,967**	**2,271,628**

24. PENSION PLAN

The Company, Satelindo and Lintasarta have defined benefit and defined contribution pension plans covering substantially all of their qualified permanent employees.

Defined Benefit Pension Plan

The Company, Satelindo and Lintasarta provide defined benefit pension plans to their respective employees under which pension benefits to be paid upon retirement are based on the employees' most recent basic salary and number of years of service. PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), a state-owned life insurance company, manages the plans. Pension contributions are determined by periodic actuarial calculations performed by Jiwasraya.

Based on an amendment dated December 22, 2000 of the Company's pension plan, which was further amended on March 29, 2001, the benefits and premium payment pattern were changed. Before the amendment, the premium was regularly paid annually until the plan would be fully funded and the benefits consisted of retirement benefit (regular monthly or lump-sum pension) and death insurance. In conjunction with the amendment, the plan would be fully funded after making installment payments up to January 2002 of the required amount to fully fund the plan determined as of September 1, 2000. The amendment also includes an additional benefit in the form of thirteenth-month retirement benefit, which is payable annually 14 days before Idul Fitri ("Moslem Holiday").

24. PENSION PLAN (continued)

Defined Benefit Pension Plan (continued)

The amendment covers employees registered as participants of the pension plan as of September 1, 2000 and includes an increase in basic salary pension by 9% compounded annually starting from September 1, 2001. The amendment also stipulates that there will be no increase in the premium even in cases of mass employee terminations or changes in marital status.

The total premium installments based on the amendment amounted to Rp355,000 and were paid on due dates.

On March 1, 2007, the Company entered into an agreement with Jiwasraya to provide defined death insurance plan to 1,276 employees as of January 1, 2007, who are not covered by the defined benefit pension plan as stated above. Based on the agreement, a participating employee will receive:

- Expiration benefit equivalent to the cash value at the normal retirement age, or
- Death benefit not due to accident equivalent to 100% of insurance money plus cash value when the employee dies not due to accident, or
- Death benefit due to accident equivalent to 200% of insurance money plus cash value when the employee dies due to accident.

The premium of Rp7,600 was fully paid on March 29, 2007. Subsequently, in August 2007, February to December 2008, January to December 2009 and January to December 2010, the Company made payments for additional premium of Rp275 for additional 55 employees, Rp805 for additional 161 employees, Rp415 for additional 81 employees and Rp120 for additional 14 employees, respectively.

On June 25, 2003, Satelindo entered into an agreement with Jiwasraya to amend the benefits and premium payment pattern of the former's pension plan. The amendment covers employees registered as participants of the pension plan as of December 25, 2002 up to June 25, 2003. Other new conditions include the following:

- An increase in pension basic salary at 6% compounded annually starting from December 25, 2002
- Thirteenth-month retirement benefit, which is payable annually 14 days before Idul Fitri
- An increase in periodic payment of retirement benefit at 6% compounded annually starting one year after receiving periodic retirement benefit for the first time
- If the average annual interest rate of time deposits of government banks exceeds 15%, the participants' retirement benefit will be increased by a certain percentage in accordance with the formula agreed by both parties.

On April 15, 2005, Lintasarta entered into an agreement with Jiwasraya to replace their existing agreement. Based on the new agreement, the benefits and premium payment pattern were changed. This agreement is effective starting January 1, 2005. The total premium installments based on the agreement amount to Rp61,623, which is payable in 10 annual installments starting 2005 until 2015.

The new agreement covers employees registered as participants of the pension plan as of April 1, 2003. The conditions under the new agreement include the following:

- An increase in pension basic salary by 3% (previously was estimated at 8%) compounded annually starting April 1, 2003
- An increase in periodic payment of retirement benefit at 5% compounded annually starting one year after receiving periodic retirement benefit for the first time
- If the average annual interest rate of time deposits of government banks exceeds 15%, the participants' retirement benefit will be increased by a certain percentage in accordance with the formula agreed by both parties.

24. PENSION PLAN (continued)

Defined Benefit Pension Plan (continued)

On May 2, 2005, Lintasarta entered into an agreement with Jiwasraya to amend the above agreement. The amendment covers employees registered as participants of the pension plan as of April 1, 2003 up to November 30, 2004 with additional 10 annual premium installments totalling Rp1,653 which are payable starting 2005 until 2015.

The contributions made by Lintasarta to Jiwasraya amounted to Rp9,653 each for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010, respectively.

The net periodic pension cost for the pension plans for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 was calculated based on the actuarial valuations as of December 31, 2008, 2009 and 2010, respectively. The actuarial valuations were prepared by an independent actuary, using the projected-unit-credit method and applying the following assumptions:

	2008	2009	2010
Annual discount rate	12.0%	10.5 - 10.7%	8.5 - 9.0%
Expected annual rate of return on plan assets	4.5 - 9.0%	4.5 - 9.0%	4.5 - 9.0%
Annual rate of increase in compensation	3.0 - 9.0%	3.0 - 9.0%	3.0 - 9.0%
Mortality rate (Indonesian Mortality Table - TMI)	TMI 1999	TMI 1999	TMI 1999

a. The composition of the net periodic pension cost for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 is as follows:

	2008	2009	2010
Interest cost	66,100	63,648	74,558
Service cost	29,502	39,510	41,749
Amortization of unrecognized actuarial loss (gain)	5,088	(1,429)	850
Return on plan assets	(63,894)	(69,393)	(71,469)
Net periodic pension cost (Note 21)	**36,796**	**32,336**	**45,688**

b. The funded status of the plans as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010 is as follows:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Plan assets at fair value	805,199	813,588	852,958
Projected benefit obligation	(541,239)	(726,427)	(750,625)
Excess of plan assets over projected benefit obligation	263,960	87,161	102,333
Unrecognized actuarial loss (gain)	(90,860)	62,659	10,928
Total prepaid pension cost	**173,100**	**149,820**	**113,261**

24. PENSION PLAN (continued)

Defined Benefit Pension Plan (continued)

c. Movements in the fair value of plan assets during the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 are as follows:

December 31, 2008

	The Company	Lintasarta	Total
Fair value of plan assets at beginning of year	697,641	33,146	730,787
Expected return on plan assets	60,960	2,934	63,894
Actuarial gain (loss) on plan assets	37,546	(1,632)	35,914
Contributions	805	9,653	10,458
Actual benefits paid	(33,252)	(2,602)	(35,854)
Fair value of plan assets at end of year	**763,700**	**41,499**	**805,199**

December 31, 2009

	The Company	Lintasarta	Total
Fair value of plan assets at beginning of year	763,700	41,499	805,199
Expected return on plan assets	65,745	3,648	69,393
Actuarial loss on plan assets	(8,910)	(3,000)	(11,910)
Contributions	415	9,653	10,068
Actual benefits paid	(57,706)	(1,456)	(59,162)
Fair value of plan assets at end of year	**763,244**	**50,344**	**813,588**

December 31, 2010

	The Company	Lintasarta	Total
Fair value of plan assets at beginning of year	763,244	50,344	813,588
Expected return on plan assets	67,149	4,320	71,469
Actuarial loss on plan assets	(12,283)	(2,677)	(14,960)
Contributions	120	9,653	9,773
Actual benefits paid	(24,566)	(2,346)	(26,912)
Fair value of plan assets at end of year	**793,664**	**59,294**	**852,958**

d. Movements in the present value of the defined benefit obligation during the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 are as follows:

December 31, 2008

	The Company	Lintasarta	Total
Benefit obligation at beginning of year	639,131	33,014	672,145
Interest cost	62,859	3,241	66,100
Current service cost	27,280	2,222	29,502
Actuarial gain on obligation	(10,588)	(8,144)	(18,732)
Actual benefits paid	(32,694)	(1,607)	(34,301)
Effect of changes in actuarial assumptions	(173,475)	-	(173,475)
Present value of obligation at end of year	**512,513**	**28,726**	**541,239**

24. PENSION PLAN (continued)

Defined Benefit Pension Plan (continued)

December 31, 2009

	The Company	Lintasarta	Total
Benefit obligation at beginning of year	512,513	28,726	541,239
Interest cost	60,288	3,360	63,648
Current service cost	36,496	3,014	39,510
Actuarial loss on obligation	624	7,809	8,433
Actual benefits paid	(57,057)	(1,093)	(58,150)
Effect of changes in actuarial assumptions	131,747	-	131,747
Present value of obligation at end of year	**684,611**	**41,816**	**726,427**

December 31, 2010

	The Company	Lintasarta	Total
Benefit obligation at beginning of year	684,611	41,816	726,427
Interest cost	70,279	4,279	74,558
Current service cost	38,375	3,374	41,749
Actuarial loss on obligation	(156,345)	2,912	(153,433)
Actual benefits paid	(24,102)	(2,166)	(26,268)
Effect of changes in actuarial assumptions	87,592	-	87,592
Present value of obligation at end of year	**700,410**	**50,215**	**750,625**

e. Movements in the prepaid pension cost during the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 are as follows:

December 31, 2008

	The Company	Lintasarta	Total
Prepaid pension cost at beginning of year	187,801	13,190	200,991
Net periodic pension cost	(33,607)	(3,189)	(36,796)
Refund from Jiwasraya	(558)	(995)	(1,553)
Contribution to Jiwasraya	805	9,653	10,458
Prepaid pension cost at end of year	**154,441**	**18,659**	**173,100**

December 31, 2009

	The Company	Lintasarta	Total
Prepaid pension cost at beginning of year	154,441	18,659	173,100
Net periodic pension cost	(29,487)	(2,849)	(32,336)
Refund from Jiwasraya	(649)	(363)	(1,012)
Contribution to Jiwasraya	415	9,653	10,068
Prepaid pension cost at end of year	**124,720**	**25,100**	**149,820**

24. PENSION PLAN (continued)

Defined Benefit Pension Plan (continued)

December 31, 2010

	The Company	Lintasarta	Total
Prepaid pension cost at beginning of year	124,720	25,100	149,820
Net periodic pension cost	(41,505)	(4,183)	(45,688)
Refund from Jiwasraya	(464)	(180)	(644)
Contribution to Jiwasraya	120	9,653	9,773
Prepaid pension cost at end of year	**82,871**	**30,390**	**113,261**

f. Prepaid pension cost consists of:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Current portion (presented as part of "Prepaid Expenses")			
The Company	2,712	1,715	1,401
Lintasarta	402	725	516
	3,114	2,440	1,917
Long-term portion			
The Company	151,729	123,005	81,470
Lintasarta	18,257	24,375	29,874
	169,986	147,380	111,344
Total prepaid pension cost	**173,100**	**149,820**	**113,261**

The major categories of plan assets as a percentage of the fair value of total plan assets are as follows:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Investment in mutual fund	71.67%	74.28%	78.90%
Investment in time deposits	12.84%	13.68%	12.16%
Investment in debt securities	9.71%	6.81%	5.06%
Investment in shares and properties	5.77%	5.22%	3.87%
Oher investments	0.01%	0.01%	0.01%

The overall expected rate of return on assets is determined based on the market expectations prevailing on that date, applicable to the period over which the obligation is to be settled. There has been a significant change in the expected rate of return on assets due to the improved stock market scenario.

24. PENSION PLAN (continued)

Defined Contribution Pension Plan

In May 2001 and January 2003, the Company and Satelindo assisted their employees in establishing their respective employees' defined contribution pension plans, in addition to the defined benefit pension plan as mentioned above. Starting June 2004, the Company also assisted ex-IM3 employees in establishing their defined contribution pension plan. Under the defined contribution pension plan, the employees contribute 10% - 20% of their basic salaries, while the Company does not contribute to the plans. Total contributions of the employees for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 amounted to Rp16,866, Rp19,451 and Rp46,557, respectively. The plan assets are being administered and managed by seven financial institutions appointed by the Company and Satelindo, based on the choice of the employees.

Labor Law No. 13/2003

The Company, Lintasarta and IMM also accrue benefits under Labor Law No. 13/2003 ("Labor Law") dated March 25, 2003. Their employees will receive the benefits under this law or defined benefit pension plan, whichever amount is higher.

The net periodic pension cost under the Labor Law for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 was calculated based on the actuarial valuations as of December 31, 2008, 2009 and 2010, respectively. The actuarial valuations were prepared by an independent actuary, using the projected-unit-credit method and applying the following assumptions:

	2008	2009	2010
Annual discount rate	12.0%	10.5%	8.5 - 9.0%
Annual rate of increase in compensation	10.0 - 11.0%	9.0 - 10.0%	8.0 - 9.0%

a. The composition of the periodic pension cost under the Labor Law for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 is as follows:

	2008	2009	2010
Service cost	16,779	19,587	21,747
Interest cost	10,357	18,639	19,586
Amortization of unrecognized actuarial loss	445	1,842	1,500
Immediate recognition of past service cost - vested benefit	-	904	-
Total periodic pension cost under the Labor Law (Note 21)	**27,581**	**40,972**	**42,833**

b. The composition of the accrued pension cost under the Labor Law as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010 is as follows:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Projected benefit obligation	156,454	187,888	217,754
Unrecognized actuarial loss	(42,698)	(27,147)	(17,245)
Unrecognized past service cost	(427)	(10,348)	(9,632)
Accrued pension cost	**113,329**	**150,393**	**190,877**

24. PENSION PLAN (continued)

Labor Law No. 13/2003 (continued)

c. Movements in the present value of pension cost obligation under the Labor Law during the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 are as follows:

December 31, 2008

	The Company	Lintasarta	IMM	Total
Benefit obligation at beginning of year	94,063	6,297	4,168	104,528
Actuarial loss (gain) on obligation	27,284	2,285	(667)	28,902
Current service cost	14,736	1,019	1,024	16,779
Interest cost	9,317	628	412	10,357
Actual benefits paid	(2,526)	(46)	(16)	(2,588)
Effect of changes in actuarial assumption	(1,558)	1,281	(1,247)	(1,524)
Present value of obligation at end of year	**141,316**	**11,464**	**3,674**	**156,454**

December 31, 2009

	The Company	Lintasarta	IMM	Total
Benefit obligation at beginning of year	141,316	11,464	3,674	156,454
Actuarial gain on obligation	(3,316)	(78)	(368)	(3,762)
Current service cost	16,173	1,817	1,597	19,587
Interest cost	16,832	1,372	435	18,639
Actual benefits paid	(3,841)	(47)	(20)	(3,908)
Past service cost	-	10,853	-	10,853
Effect of changes in actuarial assumption	(8,109)	(3,208)	1,342	(9,975)
Present value of obligation at end of year	**159,055**	**22,173**	**6,660**	**187,888**

December 31, 2010

	The Company	Lintasarta	IMM	Total
Benefit obligation at beginning of year	159,055	22,173	6,660	187,888
Actuarial loss (gain) on obligation	1,166	(890)	804	1,080
Current service cost	17,661	1,967	2,119	21,747
Interest cost	16,574	2,319	693	19,586
Actual benefits paid	(2,150)	(97)	(102)	(2,349)
Effect of changes in actuarial assumption	(9,734)	(1,132)	668	(10,198)
Present value of obligation at end of year	**182,572**	**24,340**	**10,842**	**217,754**

24. PENSION PLAN (continued)

Labor Law No. 13/2003 (continued)

d. Movements in the accrued pension cost under the Labor Law during the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 are as follows:

December 31, 2008

	The Company	Lintasarta	IMM	Total
Accrued pension cost under the Labor Law at beginning of year	78,604	7,013	2,719	88,336
Periodic Labor Law cost	24,440	1,642	1,499	27,581
Benefit payment	(2,526)	(46)	(16)	(2,588)
Accrued pension cost under the Labor Law at end of year	**100,518**	**8,609**	**4,202**	**113,329**

December 31, 2009

	The Company	Lintasarta	IMM	Total
Accrued pension cost under the Labor Law at beginning of year	100,518	8,609	4,202	113,329
Periodic Labor Law cost	34,739	4,209	2,024	40,972
Benefit payment	(3,841)	(47)	(20)	(3,908)
Accrued pension cost under the Labor Law at end of year	**131,416**	**12,771**	**6,206**	**150,393**

December 31, 2010

	The Company	Lintasarta	IMM	Total
Accrued pension cost under the Labor Law at beginning of year	131,416	12,771	6,206	150,393
Periodic Labor Law cost	35,019	4,974	2,840	42,833
Benefit payment	(2,150)	(97)	(102)	(2,349)
Accrued pension cost under the Labor Law at end of year	**164,285**	**17,648**	**8,944**	**190,877**

As of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, the current portion of pension cost under the Labor Law included in accrued expenses (Note 13) amounted to Rp2,155, Rp2,603 and Rp2,933, respectively, and the non-current portion included in employee benefit obligations (Note 17) amounted to Rp111,174, Rp147,790 and Rp187,944, respectively.

24. PENSION PLAN (continued)

Post-retirement Healthcare

The Company provides post-retirement healthcare benefits to its employees who leave the Company after the employees fulfill the early retirement requirement. The spouse and children who have been officially registered in the administration records of the Company are also eligible to receive benefits. If the employees die, the spouse and children are still eligible for the post-retirement healthcare until the spouse dies or remarries and the children reach the age of 25 or get married.

The utilization of post-retirement healthcare is limited to an annual maximum ceiling that refers to monthly pension from Jiwasraya as follows:

- 16 times the Jiwasraya monthly pension for a pensioner who receives monthly pension from Jiwasraya
- 16 times the equality monthly pension for a pensioner who became permanent employee after September 1, 2000
- 16 times the last monthly pension for a pensioner who retired after July 1, 2003 and does not receive Jiwasraya monthly pension.

The net periodic post-retirement healthcare cost for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 was calculated based on the actuarial valuations as of December 31, 2008, 2009 and 2010. The actuarial valuations were prepared by an independent actuary, using the projected-unit-credit method and applying the following assumptions:

	2008	2009	2010
Annual discount rate	12.0%	11.0%	9.5%
Ultimate cost trend rate	6.0%	6.0%	6.0%
Next year trend rate	18.0%	16.0%	14.0%
Period to reach ultimate cost trend rate	6 years	5 years	4 years

a. The composition of the periodic post-retirement healthcare cost for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 is as follows:

	2008	2009	2010
Interest cost	76,300	58,535	65,919
Service cost	16,997	19,628	28,229
Amortization of unrecognized past service cost	10,452	10,452	10,452
Amortization of unrecognized actuarial loss	16,398	-	-
Periodic post-retirement healthcare cost (Note 21)	**120,147**	**88,615**	**104,600**

b. The composition of the accrued post-retirement healthcare cost as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010 is as follows:

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Projected benefit obligation	492,615	605,660	846,636
Unrecognized past service cost	(52,158)	(41,705)	(31,253)
Unrecognized actuarial gain (loss)	43,315	(2,150)	(161,443)
Accrued post-retirement healthcare cost	**483,772**	**561,805**	**653,940**

24. PENSION PLAN (continued)

Post-retirement Healthcare (continued)

c. Movements in the present value of defined benefit obligation during the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 are as follows:

	2008	2009	2010
Benefit obligation at beginning of year	767,828	492,615	605,660
Interest cost	76,300	58,535	65,919
Current service cost	16,997	19,628	28,229
Actual benefits paid	(8,181)	(10,582)	(12,465)
Actuarial gain on obligation	(150,730)	(37,177)	(38,574)
Effect of changes in actuarial assumptions	(209,599)	82,641	197,867
Present value of obligation at end of year	**492,615**	**605,660**	**846,636**

d. Movements in the accrued post-retirement healthcare cost during the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 are as follows:

	2008	2009	2010
Beginning balance	371,806	483,772	561,805
Net periodic post-retirement healthcare cost	120,147	88,615	104,600
Benefit payment	(8,181)	(10,582)	(12,465)
Ending balance	**483,772**	**561,805**	**653,940**

e. The effect of a one percentage point change in assumed post-retirement healthcare cost trend rate would result in aggregate service and interest costs for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010 and accumulated post-retirement healthcare benefit obligation as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010 as follows:

Increase	2008	2009	2010
Service and interest costs	116,060	95,709	116,581

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Accumulated post-retirement healthcare benefit obligation	588,492	725,664	1,030,938

Decrease	2008	2009	2010
Service and interest costs	75,753	64,493	76,868

		December 31,	
	January 1, 2009	2009	2010
Accumulated post-retirement healthcare benefit obligation	416,360	510,522	702,632

As of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, the current portion of post-retirement healthcare cost included in accrued expenses (Note 13) amounted to Rp9,654, Rp12,798 and Rp14,669, respectively, and the non-current portion included in employee benefit obligations (Note 17) amounted to Rp474,118, Rp549,007 and Rp639,271, respectively.

24. PENSION PLAN (continued)

Amounts for the current annual period and previous four annual periods of employee benefits:

	Defined Benefit Pension Plan				
	December 31,			December 31,	
	2006	2007	January 1, 2009	2009	2010
The Company					
Plan assets	702,852	697,641	763,700	763,244	793,664
Projected benefit obligation	(616,715)	(639,131)	(512,513)	(684,611)	(700,410)
Excess of plan assets over projected benefit obligation	86,137	58,510	251,187	78,633	93,254
Unrecognized actuarial loss (gain)	139,158	129,291	(96,746)	46,087	(10,383)
Net Prepaid Pension	**225,295**	**187,801**	**154,441**	**124,720**	**82,871**
Lintasarta					
Plan assets	24,804	33,146	41,499	50,344	59,294
Projected benefit obligation	28,188	(33,014)	(28,726)	(41,816)	(50,215)
Excess of plan assets over projected benefit obligation	(3,384)	132	12,773	8,528	9,079
Unrecognized actuarial loss	11,663	13,058	5,886	16,572	21,311
Net Prepaid Pension	**8,279**	**13,190**	**18,659**	**25,100**	**30,390**
Total	**233,574**	**200,991**	**173,100**	**149,820**	**113,261**

	Labor Law No.13/2003				
	December 31,			December 31,	
	2006	2007	January 1, 2009	2009	2010
The Company					
Projected benefit obligation	(77,419)	(94,063)	(141,316)	(159,055)	(182,572)
Unrecognized actuarial loss	14,447	15,459	40,798	27,639	18,287
Net	**(62,972)**	**(78,604)**	**(100,518)**	**(131,416)**	**(164,285)**
Lintasarta					
Projected benefit obligation	(9,704)	(6,297)	(11,464)	(22,173)	(24,340)
Unrecognized actuarial loss (gain)	4,254	(716)	2,855	(547)	(2,569)
Unrecognized past service cost	-	-	-	9,949	9,261
Net	**(5,450)**	**(7,013)**	**(8,609)**	**(12,771)**	**(17,648)**
IMM					
Projected benefit obligation	(1,096)	(4,168)	(3,674)	(6,660)	(10,842)
Unrecognized actuarial loss (gain)	118	994	(955)	55	1,527
Unrecognized past service cost	-	455	427	399	371
Net	**(978)**	**(2,719)**	**(4,202)**	**(6,206)**	**(8,944)**
Total	**(69,400)**	**88,336**	**(113,329)**	**(150,393)**	**(190,877)**

	Post-retirement Healthcare				
	December 31,			December 31,	
	2006	2007	January 1, 2009	2009	2010
The Company					
Projected benefit obligation	(526,231)	(767,828)	(492,615)	(605,660)	(846,636)
Unrecognized past service cost	73,063	62,610	52,158	41,705	31,253
Unrecognized actuarial loss (gain)	180,210	333,412	(43,315)	2,150	161,443
Net	**(272,958)**	**(371,806)**	**(483,772)**	**(561,805)**	**(653,940)**

25. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The details of the accounts and the significant transactions entered into with related parties (affiliates, unless otherwise indicated) are as follows:

	Amount			Percentage to Total Assets/ Liabilities (%)		
	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010
Cash and cash equivalents (Note 4)						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk ("BRI")	763,563	171,500	799,125	1.47	0.31	1.50
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk ("Mandiri")	2,207,564	1,450,937	522,449	4.26	2.62	0.98
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	1,283,174	207,983	146,189	2.47	0.37	0.27
PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk ("BTN")	69,400	117,000	89,770	0.13	0.21	0.17
PT Bank Syariah Mandiri ("Mandiri Syariah")	202,786	107,310	32,215	0.39	0.19	0.06
"BPD-Jabar"	-	142	9,885	-	-	0.02
BRI Syariah	-	-	5,000	-	-	0.01
"BPD-NTT"	-	-	4,475	-	-	0.01
"BPD-Papua"	-	-	2,473	-	-	0.00
PT Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta ("BPD-DIY")	2,175	1,896	1,256	0.01	0.00	0.00
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	4,158	4,652	935	0.01	0.01	0.00
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	1,500	3,500	-	0.00	0.01	-
Others	2,785	3,122	1,879	0.01	0.01	0.00
Total	**4,537,105**	**2,068,042**	**1,615,651**	**8.75**	**3.73**	**3.02**
Accounts Receivable - trade (Note 5)						
State-owned banks	17,644	42,860	91,774	0.03	0.08	0.17
Telkom	32,801	31,724	56,108	0.06	0.06	0.11
PT Televisi Republik Indonesia (Persero) ("TVRI")	27,016	25,322	38,261	0.05	0.04	0.07
PT Citra Sari Makmur ("CSM")	10,932	13,807	13,135	0.02	0.02	0.02
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")	20,346	5,318	9,073	0.04	0.01	0.02
PT Pos Indonesia (Persero)	11,966	10,752	8,935	0.02	0.02	0.02
PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN")	6,419	2,746	8,607	0.01	0.00	0.02
Q-tel	-	3,460	2,827	-	0.01	0.01
Perusahaan Tambang Minyak Negara ("Pertamina")	-	1,737	2,281	-	0.00	0.00
Comnet	-	-	1,683	-	-	0.00
PT Angkasa Pura (Persero)	-	1,515	-	-	0.00	-
Others	18,398	44,209	37,462	0.05	0.09	0.07
Total	**145,522**	**183,450**	**270,146**	**0.28**	**0.33**	**0.51**
Less allowance for impairment of accounts receivable	69,444	57,538	47,640	0.13	0.10	0.09
Net	**76,078**	**125,912**	**222,506**	**0.15**	**0.23**	**0.42**
Prepaid expenses						
MOCIT	632,350	783,533	1,186,669	1.22	1.41	2.22
Kopindosat	2,790	2,306	3,294	0.01	0.00	0.01
Telkom	1,434	1,434	2,452	0.00	0.00	0.01
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("INTI")	1,648	2,116	1,947	0.00	0.00	0.00
Jiwasraya (Note 26)	3,114	2,440	1,917	0.01	0.01	0.00
Others	2,091	3,051	5,367	0.00	0.01	0.01
Total	**643,427**	**794,880**	**1,201,646**	**1.24**	**1.43**	**2.25**

25. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

	Amount			Percentage to Total Assets/ Liabilities (%)		
	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010
Other current assets						
Tax Office	345,695	421,745	-	0.67	0.76	-
Others	7	54	-	0.00	0.00	-
Total	**345,702**	**421,799**	**-**	**0.67**	**0.76**	**-**
Other current financial assets						
State-owned banks	26,045	20,173	35,957	0.05	0.04	0.07
Due from related parties						
Kopindosat	5,958	5,958	5,958	0.01	0.01	0.01
Senior management	817	68	1,362	0.00	-	0.01
Telkomsel	2,892	1,558	1,053	0.00	0.00	0.00
Directorate General of Customs and Excise	23,629	-	-	0.05	-	-
Pertamina	7,153	-	-	0.01	-	-
Others	4,466	813	694	0.01	0.00	0.00
Total	**44,915**	**8,397**	**9,067**	**0.08**	**0.01**	**0.02**
Less allowance for impairment of receivables	2,419	1,182	646	0.00	0.00	0.00
Net	**42,496**	**7,215**	**8,421**	**0.08**	**0.01**	**0.02**
Long-term prepaid pension (Note 26)						
Jiwasraya	169,986	147,380	111,344	0.33	0.27	0.21
Long-term advance						
INTI	1,830	3,108	3,705	0.00	0.01	0.01
Kopindosat	2,577	2,059	1,016	0.01	0.00	0.00
Total	**4,407**	**5,167**	**4,721**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
Long-term prepaid rentals						
Telkom	21,032	19,598	18,164	0.04	0.04	0.03
Kopindosat	12,288	11,982	12,817	0.02	0.02	0.02
INTI	4,744	5,499	3,658	0.01	0.01	0.01
Others	1,733	2,608	2,850	0.01	0.00	0.01
Total	**39,797**	**39,687**	**37,489**	**0.08**	**0.07**	**0.07**
Other non-current financial assets						
State-owned banks	32,520	46,170	55,274	0.06	0.08	0.10
Other non-current assets						
Others	-	-	87	-	-	0.00

25. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

	Amount			Percentage to Total Assets/ Liabilities (%)		
	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010
Accounts payable - trade						
Telkomsel	-	30,901	20,292	-	0.08	0.06
Indonesia Comnet Plus ("Comnet")	5,226	2,793	1,345	0.02	0.01	0.00
Telkom	431	4,447	456	0.00	0.01	0.00
Qtel	1,699	-	-	0.01	-	-
Others	4,753	529	167	0.01	0.00	0.00
Total	**12,109**	**38,670**	**22,260**	**0.04**	**0.10**	**0.06**
Procurement payable (Note 11)						
INTI	34,737	30,143	24,048	0.10	0.08	0.07
Kopindosat	25,240	25,509	22,123	0.08	0.07	0.06
PT Personel Alih daya	17,739	13,907	13,210	0.05	0.04	0.04
PT Pembangunan Perumahan	-	-	7,007	-	-	0.02
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	-	35,911	-	-	0.10	-
TVRI	-	11,797	-	-	0.03	-
Others	2	17	2,293	0.00	0.00	0.01
Total	**77,718**	**117,284**	**68,681**	**0.23**	**0.32**	**0.20**
Accrued expenses						
MOCIT	345,424	305,564	293,590	1.01	0.83	0.85
PLN	3,330	94,337	81,578	0.01	0.26	0.23
Senior management	15,914	27,825	33,553	0.05	0.08	0.10
PT Personel Alih Daya	-	9,305	16,906	-	0.02	0.05
Kopindosat	18,441	-	13,838	0.05	-	0.04
Telkom	-	1,112	1,063	-	0.00	0.00
Others	4,872	-	-	0.02	-	-
Total	**387,981**	**438,143**	**440,528**	**1.14**	**1.19**	**1.27**
Other current liabilities						
Telkomsel	2,738	1,664	1,664	0.01	0.00	0.00
Tax Office	157,721	99,872	-	0.46	0.27	-
Others	620	-	-	0.00	-	-
Total	**161,079**	**101,536**	**1,664**	**0.47**	**0.27**	**0.00**
Due to related parties						
TVRI	6,910	10,147	19,141	0.02	0.03	0.06
Kopindosat	1,303	1,490	1,490	0.00	0.01	0.00
State-owned banks	2,072	977	101	0.01	0.00	0.00
Telkom	601	59	-	0.00	0.00	-
PT Pos Indonesia (Persero)	3,813	48	-	0.01	0.00	-
Others	-	1,043	1,367	-	0.00	0.00
Total	**14,699**	**13,764**	**22,099**	**0.04**	**0.04**	**0.06**

25. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

	Amount			Percentage to Total Assets/ Liabilities (%)		
	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010
Loans payable (Note 14)						
State-owned Banks	1,796,142	2,592,489	1,297,045	5.27	7.03	3.74
Other non-current liabilities						
Telkomsel	9,782	8,118	6,454	0.02	0.02	0.02
Kas Negara	-	-	3,895	-	-	0.01
Total	**9,782**	**8,118**	**10,349**	**0.02**	**0.02**	**0.03**

	Amount			Percentage to Respective Income or Expenses (%)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Operating revenues						
Telkom	919,410	672,225	587,386	4.78	3.57	2.99
Telkomsel	375,198	260,345	414,860	1.95	1.38	2.11
State-owned banks	214,631	301,434	387,546	1.12	1.60	1.97
Qtel	2,546	6,714	36,521	0.01	0.04	0.19
PSN	9,847	7,202	23,694	0.05	0.04	0.12
Governmental Department	20,909	12,668	23,478	0.11	0.07	0.12
TVRI	4,178	22,547	19,698	0.02	0.12	0.10
PT Pos Indonesia	6,297	14,379	15,378	0.03	0.08	0.08
Pertamina	2,439	11,238	10,431	0.01	0.06	0.05
State-owned universities	5,203	17,348	8,445	0.03	0.09	0.04
Comnet	10,534	5,831	8,121	0.05	0.03	0.04
CSM	7,420	14,855	7,124	0.04	0.08	0.04
PT Angkasa Pura (Persero)	4,888	3,887	6,213	0.03	0.02	0.03
Badan Pusat Statistik	-	-	3,922	-	-	0.02
PLN	2,059	2,667	2,527	0.01	0.01	0.01
PT Infomedia Nusantara	1,478	2,274	2,248	0.01	0.01	0.01
Badan Meteorologi dan Geofisika ("BMG")	1,797	3,027	2,217	0.01	0.02	0.01
PT Aneka Tambang	1,445	1,591	1,623	0.01	0.01	0.01
StarHub*	36,748	-	-	0.19	-	-
Private banks	28,161	-	-	0.15	-	-
SingTel*	17,304	-	-	0.09	-	-
Others	117,623	113,976	79,159	0.62	0.59	0.41
Total	**1,790,115**	**1,474,208**	**1,640,591**	**9.32**	**7.82**	**8.35**
Operating expenses						
Cost of services						
MOCIT	1,318,855	1,633,596	1,939,415	9.10	10.46	12.03
Telkom	941,224	711,784	550,124	6.50	4.56	3.41
Telkomsel	584,470	566,334	528,067	4.03	3.62	3.28
PLN	390,965	617,953	508,473	2.70	3.95	3.15
PT Personel Alih Daya	68,948	57,714	80,902	0.48	0.37	0.50
Kopindosat	2,615	5,661	59,205	0.02	0.04	0.37
Comnet	37,649	36,741	27,681	0.26	0.24	0.17
Qtel	-	-	27,375	-	-	0.17
PT Pos Indonesia	-	-	14,947	-	-	0.09
INTI	7,015	3,367	10,040	0.05	0.02	0.06
Perusahaan Gas Negara ("PGN")	8,388	3,213	1,933	0.06	0.02	0.01
PSN	2,206	1,692	1,024	0.01	0.01	0.01
SingTel*	12,637	-	-	0.09	-	-
StarHub*	3,321	-	-	0.02	-	-
Others	3,570	-	-	0.02	-	-
Total	**3,381,863**	**3,638,055**	**3,749,186**	**23.34**	**23.29**	**23.25**

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 18)

25. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

	Amount			Percentage to Respective Income or Expenses (%)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Personnel						
Senior management	134,613	145,510	131,906	0.93	0.93	0.82
Jiwasraya	36,796	32,336	45,688	0.25	0.21	0.28
PT Personel Alih Daya	-	56,613	40,139	-	0.36	0.25
Kopindosat	114,368	-	-	0.79	-	-
Total	**285,777**	**234,459**	**217,733**	**1.97**	**1.50**	**1.35**
General and administration						
PLN	42,436	75,967	88,697	0.30	0.49	0.55
Kopindosat	45,124	24,465	26,072	0.31	0.16	0.16
PT Personel Alih Daya	-	35,912	17,914	-	0.23	0.11
Telkom	-	-	2,393	-	-	0.01
Usaha Gedung Bank Dagang Negara ("UGBDN")	4,806	887	1,603	0.03	0.00	0.01
State-owned banks	505	1,971	1,567	0.00	0.01	0.01
Others	6,891	4,122	6,727	0.05	0.03	0.05
Total	**99,762**	**143,324**	**144,973**	**0.69**	**0.92**	**0.90**
Other income (expenses)						
Interest income						
State-owned banks	222,727	101,693	106,177	10.25	14.93	4.83
Private banks*	36,458	-	-	1.68	-	-
Others	879	306	754	0.04	0.04	0.04
	260,064	**101,999**	**106,931**	**11.97**	**14.97**	**4.87**
Financing cost						
State-owned banks	(196,667)	(225,216)	(231,530)	(9.05)	(33.05)	(10.54)
Private banks*	(16,302)	-	-	(0.75)	-	-
Others	(6,715)	(5,624)	-	(0.31)	(0.83)	-
	(219,684)	**(230,840)**	**(231,530)**	**(10.11)**	**(33.88)**	**(10.54)**
Net	**40,380**	**(128,841)**	**(124,599)**	**1.86**	**(18.91)**	**(5.67)**

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 18)

The relationship and nature of account balances/transactions with related parties are as follows:

No.	Related Parties	Relationship	Nature of Account Balances/Transactions
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Affiliate	Cash and cash equivalents
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Affiliate	Cash and cash equivalents
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Affiliate	Cash and cash equivalents
4.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	Affiliate	Cash and cash equivalents
5.	PT Bank Syariah Mandiri ("Mandiri Syariah")	Affiliate	Cash and cash equivalents
6.	BPD - Jabar	Affiliate	Cash and cash equivalents
7.	BRI Syariah	Affiliate	Cash and cash equivalents

25. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

No.	Related Parties	Relationship	Nature of Account Balances/Transactions
8.	BPD - NTT	Affiliate	Cash and cash equivalents
9.	BPD - Papua	Affiliate	Cash and cash equivalents
10.	PT Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta ("BPD - DIY")	Affiliate	Cash and cash equivalents
11.	PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta ("BPD - DIY")	Affiliate	Cash and cash equivalents
12.	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ("BPD - DIY")	Affiliate	Cash and cash equivalents
13.	State-owned banks	Affiliate	Cash and cash equivalents, loans payable and operating revenues - MIDI
14.	Telkom (Note 29)	Affiliate	Operating revenues - cellular, fixed telecommunication and MIDI; operating expenses - cost of services
15.	TVRI	Affiliate	Operating revenues - MIDI
16.	CSM	Affiliate	Operating revenues - MIDI
17.	Telkomsel	Affiliate	Operating revenues - cellular and fixed telecommunication
18.	PT Pos Indonesia (Persero)	Affiliate	Operating revenues - MIDI
19.	PSN	Affiliate	Operating revenues - MIDI
20.	Qtel	Ultimate Stockholder	Operating revenues - fixed telecommunication
21.	Pertamina	Affiliate	Operating revenues - MIDI
22.	Comnet	Affiliate	Operating expenses - cost of services
23.	PT Angkasa Pura (Persero)	Affiliate	Operating revenues - MIDI
24.	MOCIT	Government Agency	Operating revenues - MIDI; operating expenses - cost of services
25.	Kopindosat	Affiliate	Operating expenses - personnel expenses, general and administration expenses

25. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

No.	Related Parties	Relationship	Nature of Account Balances/Transactions
26.	INTI	Affiliate	Procurement payable
27.	Jiwasraya	Affiliate	Long-term prepaid pension
28.	Tax Office	Government Agency	Other current asset and other current liabilities
29.	Senior management	Key management personnel	Operating expenses - personnel expenses, and prepaid expense - unamortized portions of housing and transformation advances, and transformation incentives
30.	Directorate General of Customs and Excise	Government Agency	Other current liabilities
31.	PT Personel Alih Daya	Affiliate	Operating expenses - personnel expenses and cost of services
32.	PT Pembangunan Perumahan	Affiliate	Procurement payable
33.	PLN	Affiliate	Operating expenses - cost of services
34.	Governmental Departments	Government Agency	Operating revenues - MIDI
35.	State-owned universities	Affiliate	Operating revenues - MIDI
36.	Badan Pusat Statistik	Government Agency	Operating revenues - MIDI
37.	PT Infomedia Nusantara	Affiliate	Operating revenues - MIDI
38.	BMG	Affiliate	Operating revenues - MIDI
39.	PT Aneka Tambang	Affiliate	Operating revenues - MIDI
40.	StarHub*	Affiliate	Operating revenues - international calls, operating expenses - cost of services
41.	SingTel*	Affiliate	Operating revenues - international calls, operating expenses - cost of services
42.	PGN	Affiliate	Operating expenses - cost of services
43.	UGBDN	Affiliate	Operating expenses - cost of services
44.	Private banks	Affiliates	Cash and cash equivalents, loans payable and operating revenues - MIDI

* no longer a related party since June 6, 2008 (Note 18)

26. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE

The following table sets forth the computation of basic and diluted earnings per share:

	2008 (Restated)	2009 (Restated)	2010
Numerator for basic and diluted earnings per share - profit for the year attributable to the Owners of the Company, as previously reported	2,037,753	1,690,804	824,637
Accounting policy change (Note 2g)	6,022	13,094	-
Numerator for basic and diluted earnings per share - profit for the year attributable to the Owners of the Company	2,043,775	1,703,898	824,637
Denominator for basic and diluted earnings per share - Weighted-average number of shares outstanding during the year	5,433,933,500	5,433,933,500	5,433,933,500
Basic and diluted earnings per share	**376.11**	**313.57**	**151.76**
Basic and diluted earnings per ADS (50 B shares per ADS)	**18,805.67**	**15,678.31**	**7,587.85**

There are no potential dilutive outstanding shares as of December 31, 2008, 2009 and 2010.

27. DISTRIBUTION OF INCOME AND APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

At the Company's Annual Stockholders' General Meeting ("ASGM"), the stockholders approved, among others, the appropriation of annual net income for reserve fund and cash dividend distribution, as follows, and the utilization of the remaining amount for reinvestment and working capital.

ASGM Date	Reserve Fund (Rp)	Dividend per Share (Rp)	Dividend Payment Date
2007 Net Comprehensive Income			
June 5, 2008	20,420	187.90	July 15, 2008
2008 Net Comprehensive Income			
June 11, 2009	18,786	172.85	July 22, 2009
2009 Net Comprehensive Income			
June 22, 2010	14,982	137.86	August 2, 2010

Dividend for the Government was paid in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

28. DERIVATIVES

The Company entered into several swap contracts. Listed below is the information related to the contracts and their fair values (net of credit risk adjustment) as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010:

	Notional Amount (US$)	Fair Value (Rp)		
		January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010
		Receivable (Payable)	Receivable (Payable)	Receivable (Payable)
Cross Currency Swap Contracts:				
a. Standard Chartered Bank, Jakarta Branch ("StandChart") [6]	25,000	-	-	-
b. GSI [9]	100,000	223,306	88,523	-
c. GSI [9]	25,000	36,569	(10,033)	-
d. GSI	75,000	22,604	70,588	50,866
e. Merrill Lynch Capital Market Bank Limited ("MLCMB") [5]	25,000	-	-	-
f. MLCMB [3]	25,000	-	-	-
g. StandChart	25,000	59,003	(431)	(12,055)
h. MLCMB [4]	25,000	-	-	-
i. StandChart	25,000	73,690	11,885	(1,731)
j. StandChart	25,000	83,663	22,768	9,443
k. HSBC, Jakarta Branch [10]	25,000	69,427	14,428	-
l. Merrill Lynch International Bank Limited, London Branch ("MLIB")	50,000	(31,106)	3,272	(2,234)
m. MLIB	25,000	(4,418)	(6,646)	2,154
n. MLIB	25,000	(1,345)	5,425	3,778
o. DBS	25,000	(20,991)	1,497	3,093
p. GSI [11]	84,000	87,600	5,618	-
Sub-total		**598,002**	**206,894**	**53,314**
Currency Forward Contracts:				
q. StandChart [1]	2,000	-	-	-
r. JPMorgan Close Bank, Singapore Branch ("JPMorgan") [2]	3,000 or 6,000	-	-	-
s. DBS [7]	5,000	-	-	-
t. DBS [7]	5,000	-	-	-
u. DBS [8]	5,000	-	-	-
Sub-total		**-**	**-**	**-**

[1] contract entered into in February 2007 and settled in February 2008
[2] contract entered into in April 2007 and settled in April 2008
[3] contract entered into in November 2005 and restructured into a new contract in August 2008
[4] contract entered into in March 2006 and restructured into a new contract in August 2008
[5] contract entered into in September 2005 and restructured into a new contract in September 2008
[6] contract entered into in April 2004 and settled in November 2008
[7] contracts entered into in May 2009 and settled in August 2009
[8] contract entered into in May 2009 and settled in November 2009
[9] contract entered into in May 2005 and settled in November 2010
[10] contract entered into in August 2006 and settled in November 2010
[11] contract entered into in December 2008 and settled in November 2010

28. DERIVATIVES (continued)

	Notional Amount (US$)	Fair Value (Rp)		
		January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010
		Receivable (Payable)	Receivable (Payable)	Receivable (Payable)
Interest Rate Swap Contracts:				
v. HSBC, Jakarta Branch	27,037 with decreasing amount	(28,549)	(9,184)	(13,100)
w. HSBC, Jakarta Branch	44,200 with decreasing amount	(67,402)	(19,935)	(29,027)
x. GSI	100,000	(111,690)	(73,226)	(90,273)
y. DBS	25,000 with decreasing amount	(16,941)	(10,680)	(9,238)
z. DBS	25,000 with decreasing amount	(13,856)	(9,927)	(9,343)
aa. Bank of Tokyo MUFJ ("BTMUFJ")	25,000 with decreasing amount	(7,094)	(5,134)	(6,656)
ab. BTMUFJ	25,000 with decreasing amount	(5,271)	(3,920)	(5,885)
ac. BTMUFJ	25,000 with decreasing amount	(3,882)	(3,116)	(5,297)
ad. StandChart	40,000 with decreasing amount	732	(1,311)	(6,814)
ae. DBS	26,000 with decreasing amount	(3,321)	(3,414)	(4,966)
af. DBS	26,000 with decreasing amount	-	(2,307)	(4,303)
ag. BTMUFJ	36,500 with decreasing amount	-	(6,485)	(7,347)
ah. ING Bank N.V.	25,000 with decreasing amount	-	(4,340)	(4,014)
ai. ING Bank N.V.	33,500	-	(4,451)	(3,120)
Sub-total		**(257,274)**	**(157,430)**	**(199,383)**
Total		**340,728**	**49,464**	**(146,069)**

The net changes in fair value of the swap contracts and embedded derivative (Note 14j), totaling Rp136,603, (Rp486,916) and (Rp448,831) in 2008, 2009 and 2010, respectively, were charged to "Gain (Loss) on Change in Fair Value of Derivatives - Net", which is presented under Other Income (Expenses) in the consolidated statements of comprehensive income.

28. DERIVATIVES (continued)

The following are the details of the contracts:

Cross Currency Swap Contracts

No.	Counter-parties	Contract Period and Swap Amount	Annual Swap Premium Rate	Swap Premium Payment Date	Amount of Swap Premium Paid/ Amortized (Rp)		
					2008	2009	2010
a.	StandChart [i]	April 23, 2004 - November 5, 2008 Swap Rp214,625 for US$25,000	6-month U.S. dollar LIBOR plus 2.60%	Every May 5 and November 5	16,263	-	-
b.	GSI [iv]	May 13, 2005 - November 5, 2010 Swap Rp832,250 for US$100,000	(i) Fixed rate of 6.96% per annum for US$50,000 and (ii) 6-month U.S. dollar LIBOR plus 2.62% per annum for US$50,000, netted with (a) 6-month U.S. dollar LIBOR per annum multiplied by US$11,750 during the period May 13, 2005 through May 13, 2008 and (b) the amount of US$11,750 on May 13, 2008. On May 14, 2008, the Company received from GSI the fixed amount of US$11,750 (equivalent to Rp109,099) related to the cross currency swap contract.	Every May 5 and November 5	64,009	54,116	46,136
c.	GSI [v]	May 13, 2005 - November 5, 2010 Swap Rp245,000 for US$25,000	4.30% of US$25,000	Every May 5 and November 5	11,005	10,906	9,841
d.	GSI	August 22, 2005 - June 22, 2012 The Company will swap the following: • US$75,000 which is equal to US$75,000 multiplied by the lowest IDR/USD exchange rate within the period of August 22, 2005 - June 22, 2012 if the IDR/USD spot rate at termination date is less than or equal to the lowest of IDR/USD exchange rate mentioned above plus Rp4,300 (in full amounts) • US$75,000 which is equal to US$75,000 multiplied by IDR/USD spot rate at termination date minus Rp4,300 (in full amount) if IDR/USD spot rate at termination date is greater than the lowest of IDR/USD exchange rate mentioned above plus Rp4,300 (in full amounts)	3.28% of US$75,000	Every June 22 and December 22	25,665	24,357	22,866
e.	MLCMB [ii]	September 20, 2005 - June 22, 2012 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at termination date is less than Rp9,500 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$25,000 multiplied by (1-Rp9,500 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp9,500 but is less than or equal to Rp14,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$25,000 multiplied by (Rp14,000-Rp9,500 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp14,000 to US$1 (in full amounts)	2.99% of US$25,000	Every June 22 and December 22	3,482	-	-
f.	MLCMB [ii]	November 16,2005 - June 22, 2012 Swap Rp245,000 for US$25,000	5.50% of US$25,000	Every June 22 and December 22	6,406	-	-
g.	StandChart	January 11, 2006 - June 22, 2012 Swap Rp236,250 for US$25,000	4.78% of US$25,000	Every June 22 and December 22	12,474	11,791	11,034
h.	MLCMB [ii]	March 1,2006 - June 22, 2012 Swap Rp229,975 for US$25,000	4.15% of US$25,000	Every June 22 and December 22	4,887	-	-
i.	StandChart	March 15, 2006 - June 22, 2012 Swap Rp228,550 for US$25,000	3.75% of US$25,000	Every June 22 and December 22	9,786	9,250	8,657
j.	StandChart	May 12, 2006 - June 22, 2012 Swap Rp217,500 for US$25,000	3.45% of US$25,000	Every June 22 and December 22	9,004	8,510	7,964
k.	HSBC [vi]	August 8, 2006 - November 5, 2010 Swap Rp225,000 for US$25,000	4.00% of US$25,000	Every May 5 and November 5	10,184	10,145	9,074

[i] On November 5, 2008, this contract expired and the Company received settlement gain on the cross currency swap amounting to Rp58,375.
[ii] On September 8, 2008, the Company restructured this contract into a new contract.
[iv] On November 5, 2010 this contract expired and the Company received settlement gain on the cross currency swap amounting to Rp59,925.
[v] On November 5, 2010 this contract expired and the Company paid settlement loss on the cross currency swap amounting to Rp21,881.
[vi] On November 5, 2010, this contract expired and the Company paid settlement loss on the cross currency swap amounting to Rp2,550.

28. DERIVATIVES (continued)

Cross Currency Swap Contracts (continued)

No.	Counter-parties	Contract Period and Swap Amount	Annual Swap Premium Rate	Swap Premium Payment Date	Amount of Swap Premium Paid/ Amortized (Rp)		
					2008	2009	2010
l.	MLIB [iii]	August 8, 2008 - June 22, 2012 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at termination date is less than or equal to Rp8,950 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$50,000 multiplied by (1 - Rp8,950 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp8,950 but is less than or equal to Rp11,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$50,000 multiplied by (Rp11,000 - Rp8,950) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp11,000 to US$1 (in full amounts)	4.22% of US$50,000	Every June 22 and December 22	11,988	22,778	23,965
m.	MLIB	September 2, 2008 - June 12, 2013 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at termination date is less than or equal to Rp8,800 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount as arranged in the contract multiplied by (IDR/USD spot rate - Rp8,800) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp8,800 but is less than or equal to Rp12,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount as arranged in the contract multiplied by (Rp3,200 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp12,000 to US$1 (in full amounts)	4.10% of US$25,000 up to June 12, 2011 , and 4.10% of decreasing U.S. dollar amount as arranged in the contract up to June 12, 2013	Every June 12 and December 12	3,203	11,230	11,852
n.	MLIB [iii]	September 8, 2008 - June 22, 2012 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at termination date is less than or equal to Rp9,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$25,000 multiplied by (1 - Rp9,000 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp9,000 but is less than or equal to Rp11,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$25,000 multiplied by (Rp11,000 - Rp9,000) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp11,000 to US$1 (in full amounts)	2.52% of US$25,000	Every June 22 and December 22	3,579	6,801	7,156

[ii] On September 8, 2008, the Company restructured this contract into a new contract.
[iii] On August 8, 2008, the Company restructured these contracts into a new contract.

28. DERIVATIVES (continued)

Cross Currency Swap Contracts (continued)

No.	Counter-parties	Contract Period and Swap Amount	Annual Swap Premium Rate	Swap Premium Payment Date	Amount of Swap Premium Paid/ Amortized (Rp)		
					2008	2009	2010
o.	DBS	September 10, 2008 - June 12, 2013 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at the scheduled settlement date is at or less than Rp8,800 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to U.S. dollar amount at scheduled settlement date multiplied by (IDR/USD spot rate - Rp8,800) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at settlement date is greater than Rp8,800 and is at or less than Rp12,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to U.S. dollar amount at scheduled settlement date multiplied by (Rp12,000 - Rp8,800) divided by IDR/USD spot rate (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at settlement date is greater than Rp12,000 to US$1 (in full amounts)	3.945% of US$25,000 up to June 12, 2011 , and 3.945% of decreasing U.S. dollar amount as arranged in the contract up to June 12, 2013	Every June 12 and December 12	2,833	9,980	9,044
p.	GSI [vii]	December 16, 2008 - November 5, 2010 The Company will receive the following: • zero amount if the IDR/USD spot rate at termination date is less than or equal to Rp11,500 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$84,000 multiplied by (IDR/USD spot rate - Rp11,500 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp11,500 but is less than or equal to Rp15,000 to US$1 (in full amounts) • certain U.S. dollar amount which is equal to US$84,000 multiplied by (Rp3,500 divided by IDR/USD spot rate) (in full amounts) if the IDR/USD spot rate at termination date is greater than Rp15,000 to US$1 (in full amounts)	Upfront premium of US$9,500 (equivalent to Rp105,212) which was fully paid on December 19, 2008. The premium is amortized over the contract period.	-	1,991	55,899	47,323

[vii] On November 5, 2010, this contract expired and the Company received zero settlement on the cross currency swap.

All cross currency swap contracts with GSI (contracts No. a, b and c) are structured to include credit-linkage with the Company as the reference entity and with the Company's (i) bankruptcy, (ii) failure to pay on certain debt obligations or (iii) restructuring of certain debt obligations as the relevant credit events. Upon the occurrence of any of these credit events, the Company's obligations and those of GSI under these swap contracts will be terminated without any further payments or settlements being made by or owed to either party, including a payment by either party of any marked-to-market value of the swap contracts.

28. DERIVATIVES (continued)

Currency Forward Contracts

No.	Counter-parties	Contract Period	IDR/USD Fixing Rate (in full amounts)	Settlement Dates
q.	StandChart [(viii)]	February 15, 2007 - February 20, 2008	Rp8,950 to US$1	Every month starting March 20, 2007 to February 20, 2008
r.	JPMorgan [(viii)]	April 24, 2007 - April 28, 2008	Spot rate on the settlement date	Every month starting May 25, 2007 to April 28, 2008
s.	DBS [(ix)]	May 8, 2009 - August 12, 2009	Rp10,610 to US$1	August 12, 2009
t.	DBS [(ix)]	May 8, 2009 - August 12, 2009	Rp10,610 to US$1	August 12, 2009
u.	DBS[(ix)]	May 11, 2009 - November 3, 2009	Rp10,750 to US$1	November 13, 2009

[(viii)] These contracts (q and r) expired on February 20, 2008 and April 28, 2008, respectively.
[(ix)] Contracts s and t expired on August 12, 2009 and contract u, on November 13, 2009.

Interest Rate Swap Contracts

No.	Counter-parties	Contract Period	Annual Interest Swap Rate	Swap Income (Expense) Receipt Date	Amount of Swap Income (Expense) Received (Paid) (Rp)		
					2008	2009	2010
v.	HSBC	April 23, 2008 - November 27, 2016	5.42% of US$27,037, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.45% per annum	Every April 1 and October 1 up to October 2009, and every May 27 and November 27 up to termination date	(1,784)	(4,320)	(7,589)
w.	HSBC	April 23, 2008 - September 29, 2019	4.82% of US$44,200, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for U.S. dollar LIBOR plus 0.35% per annum	Every January 28 and July 28 up to July 2009, and every March 29 and September 29 up to termination date	(648)	(7,309)	(16,920)
x.	GSI	September 2, 2008 - June 12, 2013	(8.10% - underlyer return) of US$100,000 per annum, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every June 10 and December 10 up to June 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(24,051)	(39,332)
y.	DBS	September 5, 2008 - June 12, 2013	5.625% of US$25,000 per annum, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every June 10 and December 10 up to December 2010, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(4,539)	(7,289)
z.	DBS	October 23, 2008 - June 12, 2013	5.28% of US$25,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(2,106)	(6,676)
aa.	BTMUFJ	December 1, 2008 - June 12, 2013	4.46% of US$25,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(1,107)	(4,778)
ab.	BTMUFJ	December 4, 2008 - June 12, 2013	4.25% of US$25,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(935)	(4,291)
ac.	BTMUFJ	December 12, 2008 - June 12, 2013	4.09% of US$25,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(835)	(3,921)
ad.	StandChart	December 19, 2008 - June 12, 2013	3.85% of US$40,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(504)	(5,384)

28. DERIVATIVES (continued)

Interest Rate Swap Contracts (continued)

No.	Counter-parties	Contract Period	Annual Interest Swap Rate	Swap Income (Expense) Receipt Date	Amount of Swap Income (Expense) Received (Paid) (Rp)		
					2008	2009	2010
ae.	DBS	December 22, 2008 - December 12, 2012	4.02% of US$26,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(558)	(3,909)
af.	DBS	January 21, 2009 - December 12, 2012	3.83% of US$26,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(302)	(3,451)
ag.	BTMUFJ	March 2, 2009 - June 12, 2012	4.10% of US$36,500, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(627)	(5,758)
ah.	ING Bank N.V.	March 3, 2009 - December 12, 2011	4.0094% of US$25,000, the notional amount of which will decrease based on predetermined schedule, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and every June 12 and December 12 up to termination date	-	(522)	(3,734)
ai.	ING Bank N.V.	April 14, 2009 - June 12, 2011	3.75% of US$33,500, in exchange for 6-month U.S. dollar LIBOR plus 1.85% per annum	Every March 25 and September 25 up to March 2011, and on June 12, 2011	-	-	(4,199)

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. As of December 31, 2010, commitments on capital expenditures which are contractual agreements not yet realized relate to the procurement and installation of property and equipment amounting to US$90,015 (Note 33r) and Rp569,173.

The significant commitments on capital expenditures are as follows:

Contract Date	Contract Description	Vendor	Amount of Contract/Purchase Orders ("POs") Already Issued	Amount of Contract/POs Not Yet Served
December 10, 2010	The Procurement of Technology Upgrade for 2G and 3G Telecommunications Network in Kalimantan (see "b" below)	PT Nokia Siemens Networks and Nokia Siemens Networks Oy	US$38,439	US$17,959
June 16, 2010	The Procurement of Telco Infrastructure	PT Nokia Siemens Networks and Nokia Siemen Networks Oy	US$106,655 and Rp461,479	US$13,344 and Rp142,002
May 16, 2007	Supply of GSM Cellular Infrastructure	PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy and Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG.	US$318,446 and Rp1,385,390	US$4,118 and Rp55,310
April 20, 2007	Telecommunications Equipment Supply and Service	PT Alcatel Lucent Indonesia and Alcatel Shanghai Bell Co. Ltd.	US$79,311 and Rp679,301	US$2,334 and Rp41,105
April 3, 2007	Supply of GSM Infrastructure	PT Ericsson Indonesia and Ericsson AB	US$383,104 and Rp1,110,375	US$358 and Rp24,871

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. On December 10, 2010, the Company agreed with PT Nokia Siemens Networks and Nokia Siemens Networks OY ("Nokia") to restate and amend the agreement for "The Procurement of Technology Upgrade for 2G and 3G Telecommunication Network in Kalimantan" that was originally entered into on June 30, 2010. Based on the new agreement, the Company agreed to exchange certain existing cellular technical equipment units in Kalimantan area with new equipment units from Nokia with total value of US$75,243 consisting of cellular technical equipment with net book value of U$66,963 (net of discount amounting to US$2,029) for 1,325 units of 2G Base Transceiver Station [BTS], 24 units of Base Station Controller [BSC], 11 units of Transcoders, 66 units of Node B equipment and 3 units of Radio Network Controller [RNC], and pay US$6,251 to Nokia for the installation services. As of December 31, 2010, the carrying amount of the cellular technical equipment units given up (122 units of 2G BTS, 5 units of BSC, 25 units of Node B equipment and 1 unit of RNC) totalled Rp158,285 (Note 7). The Company also committed to procure additional equipment units from Nokia with a total value of US$11,708 until the end of 2012.

c. On September 17, 2010, the Company received STPs from the DGT for the underpayment of the Company's 2008 and 2009 income tax article 26 totalling Rp80,018 (including interest). On October 13, 2010, the Company submitted cancellation letters to the Tax Office regarding such STPs. Subsequently, on November 16, 2010, the Company was required to pay a certain portion of these STPs by using the approved tax refund claim on the Company's corporate Income Tax for fiscal year 2005 (Note 6) amounting to Rp38,155. As of December 31, 2010, the remaining amount of Rp41,863 has not yet been paid (Note 33b).

d. On August 18, 2010, the Company and Telkom signed a memorandum of understanding on the cooperation for joint utilization of filling of satellite networks at 150.5 degree East geostationary orbital slot. This cooperation will include procuring, operating and maintaining satellite between the Company and Telkom in order to utilize filling of satellite networks at 150.5 degree East geostationary orbital slot after the termination of the operation of Satellite Palapa C-2 owned by the Company. The capital expenditure related to such cooperation will be borne on a pro rata basis between the Company and Telkom.

   As of December 31, 2010, the Company has not made any capital expenditure related to such cooperation.

e. On January 29, April 15, May 24 and June 3, 2010, the Company agreed to lease part of its telecommunications towers and sites to PT Hutchison CP Telecommunication ("Hutchison") for a period of 12 years, to PT Natrindo Telepon Selular ("NTS") for a period of 10 years, to PT XL Axiata Tbk ("XL Axiata", formerly PT Excelcomindo Pratama Tbk or "Excelcom") for a period of 10 years and to PT Berca Global Access ("Berca") for a period of 10 years, respectively. Hutchison, NTS, and XL Axiata (on annual basis) and Berca (on quarterly basis) are required to pay the lease and maintenance fees in advance which are recorded as part of unearned income.

   The agreements are cancellable before termination under certain conditions, as stated in the agreements.

f. On April 15, 2010, Lintasarta, a subsidiary, entered into agreements with MOCIT-*Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan* (MOCIT-BTIP), whereby Lintasarta agreed to provide *Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan* (Center for Internet Access and Services in Rural Areas) (PLIK) for Work Packages (*Paket Pekerjaan*) 7, 8 and 9 that cover the provinces of Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, West Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, Central Kalimantan, Maluku and Papua. On December 22, 2010, the agreements were amended to increase the contract values. The agreement covers four years starting from October 15, 2010 with contract values amounting to Rp91,895, Rp143,668 and Rp116,721 for Work Packages 7, 8 and 9, respectively. As of December 31, 2010, Lintasarta has outstanding advance payments from MOCIT-BTIP related with the agreements amounting to Rp56,573 and

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Rp11,739 which are classified as part of unearned income for the current portion and other non-current liabilities for the long-term portion, respectively. In accordance with the agreements, Lintasarta placed its time deposits totalling Rp18,200 as a performance bond for the four-year contract period which is classified as part of other non-current financial assets (Note 2f8).

On May 6, 2010, Lintasarta entered into an agreement with PT Wira Eka Bhakti (WEB), for the procurement of equipment and infrastructure required for the construction of PLIKs, as agreed with the MOCIT-BTIP above, with total contract value amounting to Rp189,704. On October 20, 2010, the agreement was amended to increase the contract value to become Rp203,776. As of December 31, 2010, Lintasarta has outstanding advances to WEB totalling Rp39,107 and Rp2,668 which are classified as part of advances for the current portion and long-term advances for the long-term portion, respectively.

On December 12, 2010, Lintasarta entered into agreements with MOCIT-BTIP to provide *Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan Bergerak* (Mobile Center for Internet Access and Services in Rural Areas) (PLIKB) for Work Packages 2, 3, 11, 15, 16 and 18 that cover the provinces of North Sumatra, West Sumatra, East Nusa Tenggara, West Kalimantan, South Kalimantan and East Kalimantan. The agreements cover four years starting on June 22, 2011 with contract values amounting to Rp79,533, Rp92,003, Rp71,879, Rp84,583, Rp69,830 and Rp60,149 for Work Packages 2, 3, 11, 15, 16 and 18, respectively. As of December 31, 2010, Lintasarta has outstanding advance payments from MOCIT-BTIP related with the agreements amounting to Rp9,725 and Rp73,543 which are classified as part of unearned income for the current portion and other non-current liabilities for the long-term portion, respectively.

g. On May 25, 2007, the Company and six other telecommunications operators signed a memorandum of understanding on the construction of the national optical fiber network Palapa Ring for the eastern part of Indonesia ("Palapa Ring Project Phase I") wherein the Company will share 10% of the total project cost of Rp3,000,000. In addition, they also agreed to equally bear the cost of preparation and implementation ("preparation cost") of Palapa Ring Project Phase I up to the amount of Rp2,000. If the preparation cost exceeds Rp2,000, there will be further discussion among them. However, one of the telecommunications operators subsequently decided not to join the project.

   On November 10, 2007, the Company and the other five telecommunications operators (including Telkom, a related party) signed the agreement on the consortium for the construction and maintenance of Palapa Ring wherein the Company agreed to bear 13.36% of the total project cost of US$225,037. This agreement replaced the previous memorandum of understanding.

   Furthermore, three of the telecommunications operators also no longer joined the project. Consequently, as of December 31, 2010, the remaining telecommunications operators which are still committed to this project are the Company, Telkom and Bakrie Telecom. Hence, the project's commitment is being evaluated to accommodate the change in the number of participating telecommunications operators.

   As of December 31, 2010, the Company has paid the amount of US$1,503 which is recorded as part of other non-current financial assets.

h. The Company and IMM have committed to pay annual radio frequency fee over the 3G and BWA licenses period, provided the Company and IMM hold the 3G and BWA licenses. The amount of annual payment is based on the payment scheme set out in Regulations No. 7/PER/M.KOMINFO/2/2006, No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 and No. 237/KEP/M.KOMINFO/7/2009 dated February 8, 2006, September 1, 2009 and July 27, 2009, respectively, of the MOCIT.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

i. On July 20, 2005, the Company obtained facilities from HSBC to fund the Company's short-term working capital needs. These facilities were amended on May 14, 2007 to extend the expiration date to February 28, 2008. On December 4, 2009, these facilities were further amended to extend the expiration date to April 30, 2010. Subsequently, on June 17, 2010, these facilities were further extended up to April 30, 2011. The facilities consist of the following:
   - Overdraft facility amounting to US$2,000 (including overdraft facility denominated in rupiah amounting to Rp17,000). Interest is charged on daily balances at 3.75% per annum and 6% per annum below the HSBC Best Lending Rate for the loan portions denominated in rupiah and U.S. dollar, respectively.
   - Revolving loan facility amounting to US$30,000 (including revolving loan denominated in rupiah amounting to Rp255,000). The loan matures within a maximum period of 180 days and can be drawn in tranches with minimum amounts of US$500 and Rp500 for loans denominated in U.S. dollar and rupiah, respectively. Interest is charged on daily balances at 3% per annum above the HSBC Cost of Fund Rate for the loans denominated either in rupiah or U.S. dollar.

   As of December 31, 2010, the Company has not used these facilities.

j. In 1994, the Company was appointed as a Financial Administrator ("FA") by a consortium which was established to build and sell/lease Asia Pacific Cable Network ("APCN") submarine cable in countries in the Asia-Pacific Region. As an FA, the Company collected and distributed funds from the sale of APCN's Indefeasible Right of Use ("IRU"), Defined Underwritten Capacity ("DUC") and Occasional Commercial Use ("OCU").

   The funds received from the sale of IRU, DUC and OCU and for upgrading the APCN cable did not belong to the Company and, therefore, were not recorded in the Company's books. However, the Company managed these funds in separate accounts.

   As of December 31, 2010, the balance of the funds (including interest earned) which are under the Company's custody amounted to US$5,428. Besides receiving their share of the funds from the sale of IRU, DUC and OCU, the members of the consortium also received their share of the interest earned by the above funds.

k. Other agreements made with Telkom are as follows:
   - Under a cooperation agreement, the compensation to Telkom relating to leased circuit/channel services, such as world link and bit link, is calculated at 15% of the Company's collected revenues from such services.

     The Company and Satelindo also lease circuits from Telkom to link Jakarta, Medan and Surabaya.

   - In 1994, Satelindo entered into a land transfer agreement for the transfer of Telkom's rights to use a 134,925-square meter land property located at Daan Mogot, West Jakarta, where Satelindo's earth control station is currently situated. The land transfer agreement enables Satelindo to use the land for a period of 30 years from the date of the agreement, for a price equivalent to US$40,000 less Rp43,220. The term of the agreement may be extended based on mutual agreement.

     This agreement was subsequently superseded by a land rental agreement dated December 6, 2001, generally under the same terms as those of the land transfer agreement.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- In 1999, Lintasarta entered into an agreement with Telkom, whereby Telkom agreed to lease transponder to Lintasarta. This agreement has been amended several times, the latest amendment of which is based on the ninth amendment agreement dated May 24, 2010. Transponder lease expense charged to operations amounting to Rp30,255 and Rp27,547 in 2009 and 2010, respectively, is presented as part of "Operating Expenses - Cost of Services" in the consolidated statements of income.

30. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Companies manage and evaluate their operations in three major reportable segments: cellular, fixed telecommunication and MIDI. The operating segments are managed separately because each offers different services/products and serves different markets. The Companies operate in one geographical area only, so no geographical information on segments is presented.

The cellular segment currently provides the network coverage in all major cities and population centers across Indonesia by using GSM 900 and GSM 1800 technology. Its primary service is the provision of voice and data transfer which is sold through post-paid and prepaid plans.

The fixed telecommunication segment is the provider of international long-distance services, fixed wireless services, DLD services and local fixed telephony services.

The MIDI segment offers products and services which include internet, high-speed point-to-point international and domestic digital leased line broadband and narrowband services, a high-performance packet-switching service and satellite transponder leasing and broadcasting services.

Refer to Notes 2f5 and 19 for the description of type of products and services under each reporting segment.

No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments.

Segment results and assets include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Expenditures for segment assets represent the total costs incurred during the period to acquire segment assets that are expected to be used for more than one year.

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss which in certain respects, as explained in the table below, is measured differently from operating profit or loss in the consolidated financial statements. The Companies' financing (including finance costs and finance income) and income taxes are managed on a group basis and are not allocated to operating segments.

Operating segments are reported based on financial information determined in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia ("Indonesian GAAP"), which information is also consistent with the internal reporting provided to the chief operation decision maker. The chief operation decision maker is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, and has been identified as a steering committee that makes strategic decisions.

30. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

Consolidated information by industry segment follows:

	Major Segments						
	Cellular	Fixed Telecom-munication	MIDI	Inter-Segment Eliminations [1]	Total	Adjustments [2]	Consolidated
December 31, 2008							
Operating revenues							
Revenues from external customers	14,454,275	2,021,753	2,735,495	-	19,211,523	4,448	19,215,971
Inter-segment revenues	(363,347)	363,347	472,460	(472,460)	-	-	-
Total operating revenues	**14,090,928**	**2,385,100**	**3,207,955**	**(472,460)**	**19,211,523**	**4,448**	**19,215,971**
Income							
Operating income	3,151,926	790,640	790,713	-	4,733,279	(5,031)	4,728,248
Interest income					460,089	-	460,089
Gain on change in fair value of derivatives - net					136,603	-	136,603
Financing cost					(1,858,294)	-	(1,858,294)
Loss on foreign exchange					(885,729)	-	(885,729)
Income tax expense - net					(419,830)	(65,510)	(485,340)
Amortization of goodwill					(227,317)	227,317	-
Others - net					(33,516)	7,919	(25,597)
Profit for the year					**1,905,285**	**164,695**	**2,069,980**
January 1, 2009							
Segment assets	39,472,716	2,570,142	7,115,939	(5,375,381)	43,783,416	169,156	43,952,572
Unallocated assets							7,909,907
Assets - net							**51,862,479**
Segment liabilities	29,574,729	1,197,315	3,795,130	(4,099,410)	30,467,764	88,031	30,555,795
Unallocated liabilities							3,527,000
Liabilities - net							**34,082,795**
Other disclosures							
Capital expenditures	10,042,807	682,907	1,616,189	-	12,341,903	-	12,341,903
Depreciation and amortization	3,698,620	290,842	566,429	-	4,555,891	9,479	4,565,370
December 31, 2009							
Operating revenues							
Revenues from external customers	14,300,163	1,803,039	2,720,984	-	18,824,186	22,720	18,846,906
Inter-segment revenues	-	-	515,961	(515,961)	-	-	-
Total operating revenues	**14,300,163**	**1,803,039**	**3,236,945**	**(515,961)**	**18,824,186**	**22,720**	**18,846,906**
Income							
Operating income	2,003,034	330,401	879,580	-	3,213,015	12,510	3,225,525
Gain on foreign exchange - net				-	1,656,407	-	1,656,407
Interest income				-	138,951	-	138,951
Financing cost				-	(1,872,967)	-	(1,872,967)
Income tax expense - net				-	(677,265)	(106,684)	(783,949)
Loss on change in fair value of derivatives - net				-	(517,655)	30,739	(486,916)
Amortization of goodwill				-	(235,420)	235,420	-
Others - net				-	(150,338)	33,517	(116,821)
Profit for the year				**-**	**1,554,728**	**205,502**	**1,760,230**
Segment assets	43,871,953	2,606,166	7,776,333	(4,953,666)	49,300,786	393,516	49,694,302
Unallocated assets							5,740,701
Assets - net							**55,435,003**
Segment liabilities	31,678,430	1,028,375	3,748,888	(3,542,963)	32,912,730	106,890	33,019,620
Unallocated liabilities							3,840,474
Liabilities - net							**36,860,094**
Other disclosures							
Capital expenditures	9,661,360	579,862	1,343,327	-	11,584,549	-	11,584,549
Depreciation and amortization	4,585,081	335,270	641,039	-	5,561,390	10,210	5,571,600

30. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

	Major Segments						
	Cellular	Fixed Telecom-munication	MIDI	Inter-Segment Eliminations [1]	Total	Adjustments [2]	Consolidated
December 31, 2010							
Operating revenues							
Revenues from external customers	16,027,062	1,293,177	2,476,276	-	19,796,515	(148,137)	19,648,378
Inter-segment revenues	-	-	563,726	(563,726)	-	-	-
Total operating revenues	**16,027,062**	**1,293,177**	**3,040,002**	**(563,726)**	**19,796,515**	**(148,137)**	**19,648,378**
Income							
Operating income	2,745,063	(34,495)	763,376	-	3,473,944	47,750	3,521,694
Gain on foreign exchange - net				-	492,401	-	492,401
Interest income				-	143,402	-	143,402
Financing cost				-	(2,271,628)	-	(2,271,628)
Loss on change in fair value of derivatives - net				-	(418,092)	(30,739)	(448,831)
Income tax expense - net				-	(357,798)	(64,540)	(422,338)
Amortization of goodwill				-	(226,380)	226,380	-
Others - net				-	(111,830)	-	(111,830)
Profit for the year				**-**	**724,019**	**178,851**	**902,870**
Segment assets	45,875,021	2,020,957	8,459,948	(7,802,547)	48,553,379	607,508	49,160,887
Unallocated assets							4,264,808
Assets - net							**53,425,695**
Segment liabilities	27,195,689	630,442	3,250,615	(6,219,525)	24,857,221	142,031	24,999,252
Unallocated liabilities							9,724,480
Liabilities - net							**34,723,732**
Other disclosures							
Capital expenditures	4,455,608	210,770	848,611	-	5,514,989	-	5,514,989
Depreciation and amortization	5,052,691	297,334	801,886	-	6,151,911	10,940	6,162,851

(1) These include inter-segment assets, liabilities and revenues eliminated upon consolidation.
(2) These are adjustments to reconcile segment financial information to consolidated IFRS financial statements. Segment financial information, as reported to the chief operation decision maker, is still managed and maintained by the Companies under Indonesian GAAP.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

A. RISK MANAGEMENT

The main risks arising from the Companies' financial instruments are interest rate risk, foreign exchange rate risk, equity risk, credit risk and liquidity risk. The importance of managing these risks has significantly increased in light of the considerable change and volatility in both Indonesian and international financial markets. The Company's Board of Directors reviews and approves the policies for managing these risks which are summarized below.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Companies' exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to their loans and bonds payable with floating interest rates.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

A. RISK MANAGEMENT (continued)

Interest rate risk (continued)

The Company's policies relating to interest rate risk are as follows:
(1) Manage interest cost through a mix of fixed and variable rate debts. The Company evaluates the fixed to floating rate ratio of its loans and bonds payable in line with movements of relevant interest rates in the financial markets. Based on management's assessment, new financing will be priced either on a fixed or floating rate basis, and
(2) Manage interest rate exposure on its loans and bonds payables by entering into interest rate swap contracts.

As of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, more than 70%, 50% and 60%, respectively, of the Companies' debts are fixed-rated.

Several interest rate swap contracts are entered into to hedge floating rate U.S. dollar debts. These contracts are accounted as transactions not designated as hedges, wherein the changes in the fair value are credited or charged directly to profit or loss for the year.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates, with all other variables held constant, of the Company's consolidated profit for the year ended December 31, 2010 (through the impact on floating rate borrowings which is based on LIBOR for U.S. dollar borrowings and on JIBOR for rupiah borrowings).

	2008	2009	2010
Increase or (decrease) in basis points:			
U.S. dollar	(2)	2	1
Rupiah	(280)	(10)	41
Effect on profit for the year			
U.S. dollar	USD18 (equivalent to Rp195)	USD(106) (equivalent to Rp(993))	USD(57) (equivalent to Rp(509))
Rupiah	Rp86,757	Rp3,857	Rp(9,490)

Management conducted a survey among the Company's banks to determine the outlook of the LIBOR and JIBOR interest rates until the Company's next reporting dates of March 31, 2009, 2010 and 2011. The outlook is that the LIBOR and JIBOR interest rates may move 2 and 280 basis points lower, 2 and 10 basis points higher and lower and 1 and 41 basis points higher, respectively, as compared to the year-end interest rates of 2008, 2009 and 2010, respectively.

If LIBOR interest rates were 2 basis points lower, 2 and 1 basis points higher than the market levels for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010, respectively, with all other variables held constant, the Companies' profit for the years then ended and the consolidated stockholders' equity would be Rp2,043,970, Rp1,702,905 and Rp824,128 and Rp17,493,631, Rp18,246,164 and Rp18,317,067, respectively, which are higher, lower and lower than the actual results for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010, respectively, mainly due to the lower, higher and higher interest expense on floating rate borrowings.

If JIBOR interest rates were 280 and 10 basis points lower and 41 basis points higher than the market levels for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010, respectively, with all other variables held constant, the Company' profit for the years then ended and the consolidated stockholders' equity would be Rp2,130,532, Rp1,707,755 and Rp815,147 and Rp17,580,193, Rp18,251,014 and Rp18,308,086, respectively, which are higher, higher and lower than the actual results for the years ended December 31, 2008, 2009 and 2010, respectively, mainly due to the lower, lower and higher interest expense on floating rate borrowings.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

A. RISK MANAGEMENT (continued)

Foreign exchange rate risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Companies' exposure to exchange rate fluctuations results primarily from U.S. dollar-denominated loans and bonds payable, accounts receivable, accounts payable and procurement payable.

To manage the Companies' foreign exchange rate risks, several cross currency swap contracts and other permitted instruments, if considered necessary, are entered into. These contracts are accounted for as transactions not designated as hedges, wherein the changes in the fair value are charged or credited directly to profit or loss for the year.

The Companies' accounts payable are primarily foreign currency net settlement payables to foreign telecommunications operators, while most of the Companies' accounts receivable are Indonesian rupiah-denominated collections from domestic operators.

To the extent the Indonesian rupiah depreciated further from the exchange rates in effect at December 31, 2008, 2009 and 2010, the Companies' obligations under such loans and bonds payable, accounts payable and procurement payable would increase in Indonesian rupiah terms. However, the increases in these obligations would be offset in part by increases in the values of foreign currency-denominated time deposits and accounts receivable. As of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, 51.42%, 43.31% and 17.90%, respectively, of the Company's U.S. dollar-denominated debts were insured from exchange rate risk by entering into several cross currency swap contracts.

The following table shows the Companies' consolidated U.S. dollar-denominated assets and liabilities as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010:

	January 1, 2009		December 31, 2009		December 31, 2010	
	U.S. Dollar	Rupiah *	U.S. Dollar	Rupiah *	U.S. Dollar	Rupiah *
Assets:						
Cash and cash equivalents	370,247	4,054,207	37,114	348,875	111,782	1,005,042
Accounts receivable						
Trade	112,100	1,227,495	119,730	1,125,462	115,530	1,038,726
Others	467	5,114	58,086	546,008	544	4,893
Derivative assets	59,963	656,594	23,830	224,004	7,711	69,334
Other current assets	36	397	-	-	-	-
Other current financial assets	2,223	24,339	1,686	15,850	1,715	15,418
Due from related parties	756	8,278	70	658	117	1,047
Other non-current financial assets	1,131	12,388	1,392	13,083	1,427	12,833
Total assets	**546,923**	**5,988,812**	**241,908**	**2,273,940**	**238,826**	**2,147,293**
Liabilities:						
Accounts payable - trade	31,044	339,932	4,927	46,316	32,788	294,797
Procurement payable	412,301	4,514,696	310,151	2,915,419	246,615	2,217,320
Accrued expenses	32,903	360,284	32,345	304,047	46,263	415,953
Deposits from customers	1,010	11,059	841	7,907	1,477	13,275
Derivative liabilities	28,846	315,866	18,568	174,540	23,958	215,403
Other current liabilities	6,145	67,292	6,189	58,172	6,124	55,058
Other current financial liabilities	23	252	40	373	67	602
Due to related parties	1	11	-	-	-	-
Loans payable (including current maturities)	645,698	7,070,388	830,536	7,807,038	886,602	7,971,436
Bonds payable (including current maturities)	344,157	3,768,519	344,157	3,235,076	650,000	5,844,150
Other non-current liabilities	8,495	93,024	8,365	78,637	8,730	78,494
Other non-current financial liabilities	4,765	52,178	-	-	-	-
Total liabilities	**1,515,388**	**16,593,501**	**1,556,119**	**14,627,525**	**1,902,624**	**17,106,488**
Net liabilities position	**968,465**	**10,604,689**	**1,314,211**	**12,353,585**	**1,663,798**	**14,959,195**

**The exchange rates used to translate the U.S. dollar amounts into rupiah were Rp10,950 to US$1.00 (in full amounts), Rp9,400 to US$1.00 (in full amounts) and Rp8,991 to US$1.00 (in full amounts) as published by the Indonesian Central Bank as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, respectively.*

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

A. RISK MANAGEMENT (continued)

Foreign exchange rate risk (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the U.S. dollar exchange rates, with all other variables held constant, of the Company's profit for the year:

	2008	2009	2010
Change in US dollar	6%	-3%	-3%
Effect on profit for the year	(445,397)	266,837	336,582

Management conducted a survey among the Company's banks to determine the outlook of the U.S. dollar exchange rate until the Company's next reporting dates of March 31, 2009, 2010 and 2011. The outlook was that the U.S. dollar exchange rate may strengthen by 6% as compared to the exchange rate at December 31, 2008 and weaken by 3% as compared to the exchange rate at December 31, 2009 and 2010, respectively.

If the U.S. dollar exchange rate strengthened by 6% and weakened by 3% as compared to the exchange rate as of December 31, 2008, 2009 and 2010, with all other variables held constant, the Companies' profit for the years then ended and the consolidated stockholders' equity would be Rp1,598,378, Rp1,970,735 and Rp1,161,219; and Rp17,048,039, Rp18,513,994 and Rp18,654,158, respectively, which are lower, higher and higher than the actual results as of December 31, 2008, 2009 and 2010, respectively, mainly due to the consolidated foreign exchange loss and gain on the translation of U.S. dollar-denominated net liabilities.

Equity price risk

The Companies' long-term investments consist primarily of minority investment in the equity of private Indonesian companies and equity of foreign companies. With respect to the Indonesian companies in which the Companies have investments, the financial performance of such companies may be adversely affected by the economic conditions in Indonesia.

Credit risk

Credit risk is the risk that the Companies will incur a loss arising from their customers, clients or counterparties that fail to discharge their contractual obligations. There are no significant concentrations of credit risk. The Companies manage and control this credit risk by setting limits on the amount of risk they are willing to accept for individual or collective customers and by monitoring exposures in relation to such limits.

The Companies trade only with recognized and creditworthy third parties. It is the Companies' policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

A. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the components of the consolidated statements of financial position.

	Gross Maximum Exposure (1)			Net Maximum Exposure (2)		
	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010
Loans and receivables:						
Cash and cash equivalents	5,737,866	2,835,999	2,075,270	5,737,866	2,835,999	2,075,270
Accounts receivable						
Trade - net	1,340,706	1,385,125	1,548,426	1,328,003	1,385,125	1,548,426
Others - net	16,914	564,859	10,031	16,914	564,859	10,031
Other current financial assets	44,777	35,173	53,119	44,777	35,173	53,119
Due from related parties - net	42,496	7,215	8,421	42,496	7,215	8,421
Other non-current financial assets	72,800	100,004	77,675	72,800	100,004	77,675
Held-for-trading:						
Cross currency swaps	655,862	224,004	69,334	655,862	224,004	69,334
Interest rate swap	732	-	-	732	-	-
Available-for-sale investments:						
Other long-term investments - net	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
Total	**7,914,883**	**5,155,109**	**3,845,006**	**7,902,180**	**5,155,109**	**3,845,006**

(1) gross financial assets before taking into account any collateral held or other credit enhancements or offsetting arrangements
(2) net financial assets after taking into account any collateral held or other credit enhancements or offsetting arrangements

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the cash flow position of the Companies indicates that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Companies' liquidity requirements have historically arisen from the need to finance investments and capital expenditures related to the expansion of their telecommunications business. The Companies' telecommunications business requires substantial capital to construct and expand mobile and data network infrastructure and to fund operations, particularly during the network development stage. Although the Companies have substantial existing network infrastructure, the Companies expect to incur additional capital expenditures primarily in order to focus cellular network development in areas they anticipate will be high-growth areas, as well as to enhance the quality and coverage of their existing network.

In the management of liquidity risk, the Companies monitor and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Companies' operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. The Companies also regularly evaluate the projected and actual cash flows, including their loan maturity profiles, and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiatives. These activities may include bank loans, debt capital and equity market issues.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

A. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

The table below summarizes the maturity profile of the Companies' financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

	Expected maturity as of January 1, 2009							
	2009	2010	2011	2012	2013 and thereafter	Total	Discount/ Debt issuance cost and consent solicitation fees	Carrying value as of January 1, 2009
Financial Liabilities:								
Accounts payable - trade	608,754	-	-	-	-	608,754	-	608,754
Procurement payable	6,446,357	-	-	-	-	6,446,357	-	6,446,357
Accrued expenses	1,445,238	-	-	-	-	1,445,238	-	1,445,238
Deposits from customers	32,121	-	-	-	-	32,121	-	32,121
Derivative liabilities	315,866	-	-	-	-	315,866	-	315,866
Other current financial liabilities	31,022	-	-	-	-	31,022	-	31,022
Due to related parties	-	14,699	-	-	-	14,699	-	14,699
Other non-current financial liabilities	-	45,511	-	-	-	45,511	-	45,511
Loans payable								
In rupiah	474,446	670,000	679,933	2,075,000	684,300	4,583,679	(40,329)	4,543,350
In U.S. dollar	98,023	258,127	1,448,392	1,766,509	3,499,337	7,070,388	(229,109)	6,841,279
Total loans payable	572,469	928,127	2,128,325	3,841,509	4,183,637	11,654,067	(269,438)	11,384,629
Bonds payable								
In rupiah	56,442	640,000	1,100,000	-	4,850,000	6,646,442	(23,148)	6,623,294
In U.S. dollar	-	2,570,480	-	1,198,039	-	3,768,519	(19,755)	3,748,764
Total bonds payable	56,442	3,210,480	1,100,000	1,198,039	4,850,000	10,414,961	(42,903)	10,372,058
Total financial liabilities	**9,508,269**	**4,198,817**	**3,228,325**	**5,039,548**	**9,033,637**	**31,008,596**	**(312,341)**	**30,696,255**

	Expected maturity as of December 31, 2009							
	2010	2011	2012	2013	2014 and thereafter	Total	Discount/ Debt issuance cost and consent solicitation fees	Carrying value as of December 31, 2009
Financial Liabilities:								
Accounts payable – trade	537,476	-	-	-	-	537,476	-	537,476
Procurement payable	5,289,782	-	-	-	-	5,289,782	-	5,289,782
Accrued expenses	1,525,561	-	-	-	-	1,525,561	-	1,525,561
Deposits from customers	22,463	-	-	-	-	22,463	-	22,463
Derivative liabilities	174,540	-	-	-	-	174,540	-	174,540
Other current financial liabilities	43,721	-	-	-	-	43,721	-	43,721
Due to related parties	-	13,764	-	-	-	13,764	-	13,764

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

A. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

	Expected maturity as of December 31, 2009							
	2010	2011	2012	2013	2014 and thereafter	Total	Discount/ Debt issuance cost and consent solicitation fees	Carrying value as of December 31, 2009
Loans payable								
In rupiah	993,772	1,029,933	2,625,000	984,300	1,000,000	6,633,005	(41,642)	6,591,363
In U.S. dollar	446,487	2,509,510	1,090,597	1,992,239	1,768,204	7,807,037	(242,649)	7,564,388
Total loans payable	1,440,259	3,539,443	3,715,597	2,976,539	2,768,204	14,440,042	(284,291)	14,155,751
Bonds payable								
In rupiah	640,000	1,100,000	41,989	1,330,000	5,020,000	8,131,989	(40,712)	8,091,277
In U.S. dollar	2,206,622	-	1,028,454	-	-	3,235,076	(13,516)	3,221,560
Total bonds payable	2,846,622	1,100,000	1,070,443	1,330,000	5,020,000	11,367,065	(54,228)	11,312,837
Total financial liabilities	**11,880,424**	**4,653,207**	**4,786,040**	**4,306,539**	**7,788,204**	**33,414,414**	**(338,519)**	**33,075,895**

	Expected maturity as of December 31, 2010							
	2011	2012	2013	2014	2015 and thereafter	Total	Discount/ Debt issuance cost and consent solicitation fees	Carrying value as of December 31, 2010
Financial Liabilities:								
Accounts payable – trade	645,505	-	-	-	-	645,505	-	645,505
Procurement payables	3,644,467	-	-	-	-	3,644,467	-	3,644,467
Accrued expenses	1,710,885	-	-	-	-	1,710,885	-	1,710,885
Deposits from customers	50,279	-	-	-	-	50,279	-	50,279
Derivative liabilities	215,403	-	-	-	-	215,403	-	215,403
Other current financial liabilities	23,127	-	-	-	-	23,127	-	23,127
Due to related parties		22,099	-	-	-	22,099	-	22,099
Loans payable								
In rupiah	634,933	2,022,483	434,300	-	-	3,091,716	(25,125)	3,066,591
In U.S. dollar	2,549,587	1,192,411	2,015,736	545,059	1,668,643	7,971,436	(187,076)	7,784,360
Total loans payable	3,184,520	3,214,894	2,450,036	545,059	1,668,643	11,063,152	(212,201)	10,850,951
Bonds payable								
In rupiah	1,100,000	41,989	1,330,000	2,358,000	2,662,000	7,491,989	(29,353)	7,462,636
In U.S. dollar	-	-	-	-	5,844,150	5,844,150	(94,551)	5,749,599
Total bonds payable	1,100,000	41,989	1,330,000	2,358,000	8,506,150	13,336,139	(123,904)	13,212,235
Total	**10,574,186**	**3,278,982**	**3,780,036**	**2,903,059**	**10,174,793**	**30,711,056**	**(336,105)**	**30,374,951**

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

B. CAPITAL MANAGEMENT

The Companies aim to achieve an optimal capital structure in pursuit of their business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and strong credit ratings, and maximizing stockholder value.

Some of the Companies' debt instruments contain covenants that impose maximum leverage ratios. In addition, the Company's credit ratings from the international credit ratings agencies are based on its ability to remain within certain leverage ratios. The Companies have complied with all externally imposed capital requirements.

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as debt-to-equity ratio. The Company's objective is to maintain its debt-to-equity ratio at a maximum of 1.75, 2.50 and 2.50 as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010.

The Companies continue to manage their debt covenants and capital structure based on financial information determined under Indonesian GAAP. As of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, the Companies' debt-to-equity ratio accounts are as follows:

	January 1, 2009	December 31, 2009	December 31, 2010
Long-term debts, including current maturities - gross	22,069,028	25,807,107	24,399,291
Interest-bearing procurement payable, which are overdue 6-month after the date of invoice	-	-	-
Total Debts	**22,069,028**	**25,807,107**	**24,399,291**
Equity attributable to owners of the Company	17,493,436	18,247,157	18,317,576
Debt-to-equity ratio	**1.26**	**1.41**	**1.33**

Under IFRS, the debt-to-equity ratios of the Companies are 1.26, 1.41 and 1.33 as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010, respectively, due to reconciliation difference in the equity attributable to owners of the Company.

C. COLLATERAL

The loans of a subsidiary, Lintasarta, which were obtained from CIMB Niaga, are collateralized by all equipment (Note 7) purchased by Lintasarta from the proceeds of the credit facilities and receivables (Note 5) from frame relay operations. There are no other significant terms and conditions associated with the use of collateral.

The Company did not hold any collateral as of January 1, 2009 and December 31, 2009 and 2010.

32. ECONOMIC CONDITIONS

The operations of the Companies have been affected and may continue to be affected for the foreseeable future by the market events and economic conditions in Indonesia that are mainly characterized by volatility in currency values and interest rates, which could negatively impact economic growth. Economic improvements and recovery are dependent upon several factors, such as fiscal and monetary actions being undertaken by the Government and others, actions that are beyond the control of the Companies. The financial statements include the effects of the economic conditions to the extent they can be estimated.

33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. On January 1, 2011, Lintasarta paid the last installment amounting to Rp4,933 on Investment Credit Facility 5 loan from CIMB Niaga (Note 14n).

b. On January 7, 2011 the Company paid the remaining amount of Rp41,863 on the underpayment of the Company's 2008 and 2009 income tax article 26 based on STPs from the DGT (Note 29c). Subsequently, on April 11, 2011, the Company received a letter from the Tax Office which declined the request for cancellation of such STPs. As of April 20, 2011, the Company is preparing an appeal letter to the Tax Court for such letter.

c. On January 11, 2011 and February 9, 2011, the Company agreed to amend the latest interconnection agreements with Telkom and Bakrie Telcom, respectively, to meet the requirement in the BRTI letter No. 227/BRTI/XII/2010 dated December 31, 2010 regarding the implementation of new interconnection tariff in 2011.

d. On January 20, 2011, the Company's Board of Directors issued Directors' Decree No. 003/Direksi/2011 regarding the Organizational Restructuring Program through an offering program on the basis of mutual agreement between the Company and certain employees (Voluntary Separation Scheme), that became effective on the same date. Under IAS 37, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Company is required to disclose the total number of employees who participate in the program and the compensation paid. However, the Company did not disclose such required information in these consolidated financial statements, as the Company believes it could affect the precipitate presumption on the outcome of the program, since the Company currently still offers such program to its employees.

e. On February 4, 2011, the Company and Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel") entered into a Tower Lease Agreement. Mitratel may sub-lease the Company's tower to Telkom and Telkomsel with additional infrastructure at Mitratel's cost.

f. On February 8, 2011, the Company held an Extraordinary General Meeting of Stockholders approving the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners (until the closing of the Annual General Meeting in 2012) and Board of Directors (until the closing of the Annual General Meeting in 2015).

g. On February 10, 2011, the Company entered into a Revolving Time Loan facility agreement with BCA covering a maximum amount of Rp1,000,000 to fund the Company's capital expenditure and/ or for general corporate purposes. This facility will be available from February 10, 2011 to February 10, 2014 and drawdowns bear interest at 1-month JIBOR plus 1.4% per annum.

h. On February 10, 2011 and March 11, 2011, SKAGEN AS increased its ownership in the Company to 5.15% and 5.38%, respectively.

i. On February 10, 2011, the Company agreed to lease part of its telecommunications towers and sites to PT First Media Tbk (FM) for a period of 5 years. FM is required to pay the lease and maintenance fees in advance on a semi-annual basis.

33. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

j. On February 24, 2011, the Company received letter No. MPK-161/SP.51/II/2011 from the Tax Court regarding the re-evaluation of the Tax Court's decision letter on its acceptance of the Company's remaining objection on its 2005 corporate income tax, which was previously released on October 29, 2010 (Note 6).

k. On February 28, 2011, the Company paid the second installment of SEK credit facility B amounting to US$11,071.43 (Note 14d).

l. On February 28, 2011, Lintasarta paid the loan installment of CIMB Niaga Investment Credit Facility 6 amounting to Rp7,500 (Note 14l).

m. On March 3, 2011, the Company and XL Axiata entered into the latest amendment of interconnection agreement in order to meet the implementation of new interconnection charge for the year 2011.

n. On March 3, 2011, the Company and Hutchison entered into the latest amendment of interconnection agreement in order to meet the implementation of new interconnection charge for the year 2011.

o. On March 9 and 30, 2011, IMM made the first and second capital injections, respectively to its newly established subsidiary, PT Interactive Vision Media ("IVM"), totalling Rp4,999 which is equal to 99.98% ownership. IVM will engage in Pay TV business.

p. On March 29, 2011, the Company paid the third semi-annual installments of its COFACE and SINOSURE facilities from HSBC France amounting to US$7,859.34 and US$2,210, respectively.

q. On March 30, 2011, the Company drew down US$60,000 from the SEK credit facility C (Note 14d).

r. As of April 20, 2011, the prevailing exchange rate of the rupiah to U.S. dollar is Rp8,657 to US$1 (in full amounts), while as of December 31, 2010, the prevailing exchange rate was Rp8,991 to US$1 (in full amounts). Using the exchange rate as of April 20, 2011, the Companies earned foreign exchange gain amounting to approximately Rp555,708 (excluding the effect of revaluing derivative contracts on April 20, 2011) on the foreign currency liabilities, net of foreign currency assets, as of December 31, 2010 (Note 31).

   The translation of the foreign currency liabilities, net of foreign currency assets, should not be construed as a representation that these foreign currency liabilities and assets have been, could have been, or could in the future be, converted into rupiah at the prevailing exchange rate of the rupiah to U.S. dollar as of December 31, 2010 or at any other rate of exchange.

   The commitments for the capital expenditures denominated in foreign currencies as of December 31, 2010 as disclosed in Note 29a are approximately Rp779,260 if translated at the prevailing exchange rate as of April 20, 2011.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DATA PERUSAHAAN

INFORMASI BAGI PEMEGANG SAHAM

Pertanyaan Pemegang Saham dan publik dapat dialamatkan kepada:

Group Investor Relations
Gedung Indosat, Lantai 2 Podium Depan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 21
Jakarta 10110
Indonesia
Tel. : +62 21 30003001, 3869615
Fax. : +62 21 30003757
Email : investor@indosat.com
Website : http://www.indosat.com

Modal Saham (per 31 Desember 2010)

Modal dasar Rp2.000.000.000.000 terdiri dari 20.000.000.000 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham.

Modal ditempatkan dan disetor penuh (per 31 Desember 2010) 5.433.933.500 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B dengan nilai nominal Rp543.393.350.000 yaitu:

1. Pemerintah Indonesia (1 saham Seri A dan 776.624.999 saham Seri B)
2. Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte Ltd (3.532.056.600 saham Seri B)
3. Masyarakat (1.125.251.900 saham Seri B)

Kepemilikan saham di atas 5% (per 31 Desember 2010)

1. Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte Ltd (65,00%)
2. Pemerintah Indonesia (14,29%)
3. SKAGEN AS (5,11%)
4. Masyarakat (15,60%)

Laporan Tahunan 2010 dalam format 20-F

Laporan ini memuat sebagian besar informasi keuangan Perusahaan yang disajikan dalam Laporan Tahunan dalam format 20-F yang dilaporkan ke U.S. Securities and Exchange Commission.

Nama Bursa Efek dimana saham Indosat dicatatkan

Indonesia Stock Exchange (BEI)
New York Stock Exchange (NYSE)

Nama dan Alamat Profesi Penunjang Pasar Modal

Bank Kustodian untuk ADR
The Bank of New York Mellon
Depository Receipt Division
101 Barclay Street
New York, New York 10286
USA
Tel. : +1 212 815 2293 (International Caller)
Fax. : +1 212 571 3050/1/2
1-888-BNY-ADRs (Toll Free within USA)
Email : shareowners@bankofny.com

Biro Administrasi Efek

PT EDI Indonesia
Wisma SMR, Lantai 10
Jl. Yos Sudarso Kav 89
Jakarta 14350
Indonesia
Tel. : +62 21 651 5130
Fax. : +62 21 651 5131

Auditor Independen

Purwantono, Suherman & Surja a member of Ernst & Young Global
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Tel. : +62 21 5289 5000
Fax. : +62 21 5289 4747

Wali Amanat/Trustee

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Treasury
Gedung BRI II, Lantai 3
Jl. Jenderal Sudirman kav 44-46
Jakarta 10210
Indonesia
Tel. : + 62 21 570 9060 ext 2371-2335-2307
Fax. : + 62 21 251 1647

The Bank of New York Mellon
Global Corporate Trust
21st Floor West
101 Barclay Street
New York, New York 10286

Global Corporate Trust
One Temasek Avenue
#02-01 Milenia Tower
Singapore 039192
Tel. : +65 6432.0348
Fax. : +65 6883 0338

Nama dan Alamat Perusahaan Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Setiabudi Atrium, Lantai 8, Suite 809-810
Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Kuningan
Jakarta 12920
Indonesia
Tel. : +62 21 521 0077
Fax. : +62 21 521 0078

Standard & Poors
Corporate Ratings, Standard & Poor's Rating Services,
Crisil House, Central Avenue Road, Hiranandani Business Park, Powai,
Mumbai - 400 076.

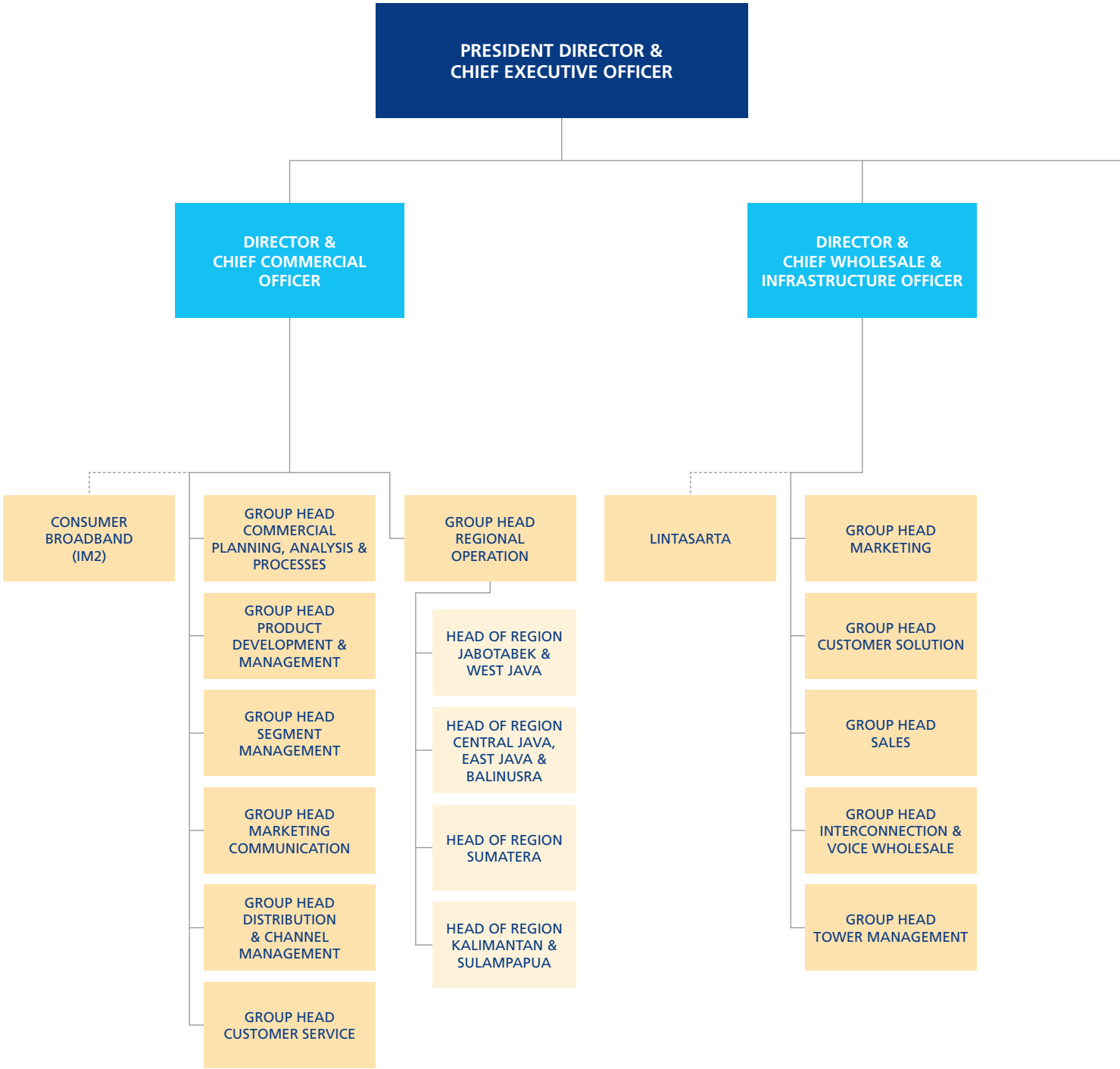
Moodys
Moody's Investors Service
50 Raffles Place #23-06
Singapore Land Tower
Singapore, 048623
www.moodys.com

FitchRatings
414-421, 4th Floor, World Trade Centre,
Connaught Place, New Delhi - 110001, India
Tel: +91 11 4356 7239
Fax: +91 11 4356 7231
www.fitchratings.com

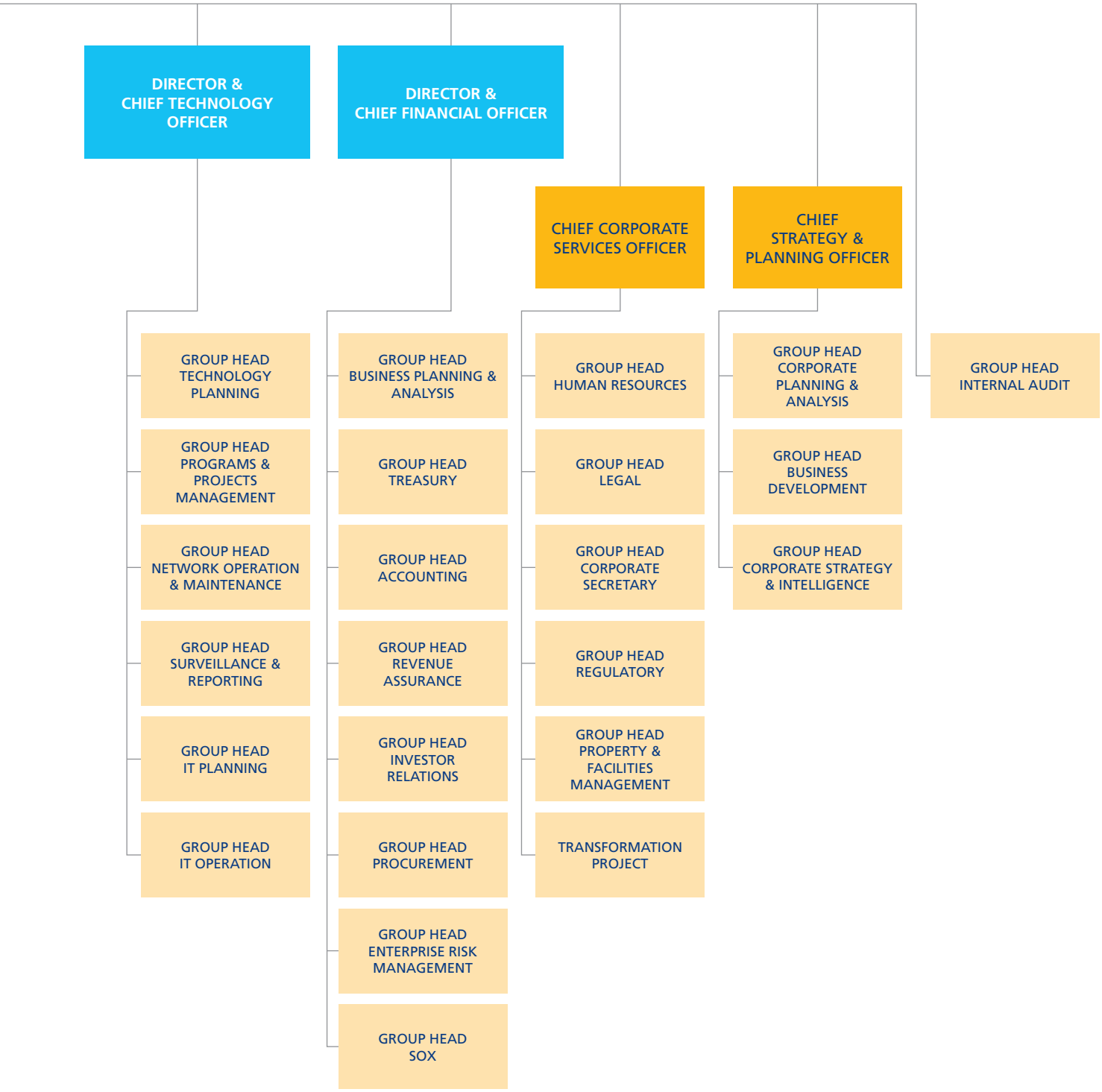
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2011.

STRUKTUR ORGANISASI


PRESIDENT DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER
DIRECTOR & CHIEF COMMERCIAL OFFICER
DIRECTOR & CHIEF WHOLESALE & INFRASTRUCTURE OFFICER
CONSUMER BROADBAND (IM2)
GROUP HEAD COMMERCIAL PLANNING, ANALYSIS & PROCESSES
GROUP HEAD PRODUCT DEVELOPMENT & MANAGEMENT
GROUP HEAD SEGMENT MANAGEMENT
GROUP HEAD MARKETING COMMUNICATION
GROUP HEAD DISTRIBUTION & CHANNEL MANAGEMENT
GROUP HEAD CUSTOMER SERVICE
GROUP HEAD REGIONAL OPERATION
HEAD OF REGION JABOTABEK & WEST JAVA
HEAD OF REGION CENTRAL JAVA, EAST JAVA & BALINUSRA
HEAD OF REGION SUMATERA
HEAD OF REGION KALIMANTAN & SULAMPAPUA
LINTASARTA
GROUP HEAD MARKETING
GROUP HEAD CUSTOMER SOLUTION
GROUP HEAD SALES
GROUP HEAD INTERCONNECTION & VOICE WHOLESALE
GROUP HEAD TOWER MANAGEMENT

* Per 11 Februari 2011


DIRECTOR & CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
DIRECTOR & CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHIEF CORPORATE SERVICES OFFICER
CHIEF STRATEGY & PLANNING OFFICER
GROUP HEAD TECHNOLOGY PLANNING
GROUP HEAD PROGRAMS & PROJECTS MANAGEMENT
GROUP HEAD NETWORK OPERATION & MAINTENANCE
GROUP HEAD SURVEILLANCE & REPORTING
GROUP HEAD IT PLANNING
GROUP HEAD IT OPERATION
GROUP HEAD BUSINESS PLANNING & ANALYSIS
GROUP HEAD TREASURY
GROUP HEAD ACCOUNTING
GROUP HEAD REVENUE ASSURANCE
GROUP HEAD INVESTOR RELATIONS
GROUP HEAD PROCUREMENT
GROUP HEAD ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
GROUP HEAD SOX
GROUP HEAD HUMAN RESOURCES
GROUP HEAD LEGAL
GROUP HEAD CORPORATE SECRETARY
GROUP HEAD REGULATORY
GROUP HEAD PROPERTY & FACILITIES MANAGEMENT
TRANSFORMATION PROJECT
GROUP HEAD CORPORATE PLANNING & ANALYSIS
GROUP HEAD BUSINESS DEVELOPMENT
GROUP HEAD CORPORATE STRATEGY & INTELLIGENCE
GROUP HEAD INTERNAL AUDIT

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT

1. George Thia Peng Heok

Riwayat Hidup anggota Komite Audit dapat dilihat di Profil Dewan Komisaris.

2. Soeprapto S.I.P

Riwayat Hidup anggota Komite Audit dapat dilihat di Profil Dewan Komisaris.

3. Chris Kanter

Riwayat Hidup anggota Komite Audit dapat dilihat di Profil Dewan Komisaris.

4. Kanaka Puradiredja

menjadi anggota Komite Audit sejak Januari 2009. Beliau adalah pendiri Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja, Suhartono Public dan menjadi Senior Partner sejak 2000 hingga October 2007. Saat ini, beliau menjabat Ketua pada Dewan Kehormatan Institut Komite Audit Indonesia, serta anggota Dewan Kehormatan Professionals in Risk Management Association (PRIMA). Sebelumnya beliau menjabat beberapa posisi, yaitu anggota Marketing & Communication Committee KPMG International pada tahun 1995, anggota KPMG Asia Pacific Board tahun 1994-1998, Managing Partner di KPMG Indonesia tahun 1978-1999 dengan posisi terakhir sebagai Chairman. Sebelumnya bekerja pada Peat Marwick Mitchell (pendahulu KPMG) di Melbourne, Australia tahun 1975-1977 dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (sekarang BPKP) tahun 1971-1974. Beliau lulusan Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi di Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1971 dan merupakan Charter Member dari Lembaga Komisaris Direksi Indonesia (LKDI).

5. Unggul Saut Marupa Tampubolon

telah menjadi anggota Komite Audit sejak tahun 2008. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan termasuk Direktur Utama PT satelindo sejak 2001 sampai dengan 2002, General Manager Hukum Indosat sejak 2000 sampai dengan 2001, Komisaris PT MGTI (Indosat Group) sejak 2000 sampai 2001, Direktur Utama PT Indosel sejak 1997 sampai dengan 1999, Komisaris PT Sisindosat (Indosat Group) sejak 1997 sampai 1999, Direktur PT Menara Jakarta sejak 1996 sampai dengan 1997, Komisaris PT Patrakom (Indosat Group) sejak 1996 sampai 1997 dan General Manager Hukum dan Humas Indosat sejak 1988 sampai dengan 1997. Sebelum bergabung dengan Indosat, beliau adalah penasihat hukum PT Nickel Indonesia sejak 1980 sampai dengan 1983 dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Imam & Associates. Bapak Tampubolon memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1977.

ANAK PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2010

PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")
Indosat holds of 72.36% the shares in Lintasarta, which provides high-speed communication and corporate network services.
Address:
Gedung Menara Thamrin Fl.12
Jl. M.H. Thamrin Kav.3
Jakarta 10250
Phone : (62-21) 230 2345
Fax. : (62-21) 230 3883
Website : http://www.lintasarta.net
Contact person: Lista Dewi Soegiharto, General Manager Corporate Secretary
Phone : (62-21) 230 2345
Email : lista.dewi@lintasarta.co.id

PT Indosat Mega Media ("IMM")
Indosat hold 99.85% of its shares in IMM , which provides multimedia and internet services which include IP -based multimedia, Internet, and IP-based LAN & WAN network communications services.
Address:
Jl. Kebagusan Raya No. 36
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Contact person: Andri Aslan, Head of Corporate Secretary
Phone : (62) 855 1082101, (62-21) 7854 6969, ext. 103.
Email : andri.aslan@indosatm2.com

Indosat Finance Company B. V. ("IFB")
IFB was established in Amsterdam, the Netherlands, in October 2003 and operates as a financing company. Indosat holds 100% of the shares in this company. In 2003, IFB issued guaranteed notes which are due in 2010.
Address:
Netherlands Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam, The Netherlands
Phone : (31-20) 521 4777
Fax. : (31-20) 521 4888
post address P.O. Box 990
1000 AZ Amsterdam, The Netherlands
Contact person: Gert Jan van Nieuwpoort, Financial Account Manager
Phone : (31-20) 521 4830
Fax. : (31-20) 521 4825
Email : gertjan.van.nieuwpoort@intertrustgroup.com

Indosat International Finance Company B. V. ("IIFB")
IIFB was incorporated in Amsterdam, the Netherlands, in April 2005 and operates as a financing company. Indosat holds 100% of the shares in this company. In 2005, IIFB issued guaranteed notes which are due in 2012.
Address:
Netherlands Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam, The Netherlands
Phone : (31-20) 521 4777
Fax. : (31-20) 521 4888
P.O. Box 990, 1000 AZ Amsterdam, The Netherlands
Contact person: Gert Jan van Nieuwpoort, Financial Account Manager
Phone : (31-20) 521 4830
Fax. : (31-20) 521 4825
Email : gertjan.van.nieuwpoort@intertrustgroup.com

Indosat Singapore Pte. Ltd ("ISPL")
ISP was established in Singapore on 21 December 2005. ISP is whollyowned by Indosat. This company provides telecommunications services. Indosat holds 100% of the shares in this company.
Address:
8 Temasek Boulevard, Suntec City Tower 3, #15-05
Singapore 038988
Phone : (65) 62355155
Fax. : (65) 63374838
Contact person: Fuad Fachroeddin
Email : info@indosat.com.sg

PT Star One Mitra Telekomunikasi ("SMT")
SM T was established on 15 June 2006 to support the construction and operation of fixed wireless access network using Code Division Multiple Access (CDMA) 2000-1x technology in Central Java and its surrounding area. Indosat holds 72.54% of the shares in this company.
Address:
Gd Grinatha Fl. 1
Jl. Pemuda No. 142
Semarang 50132
Phone : (62-21) 62355155
Fax. : (62-24) 3560806
Contact person: Ariehte Miranda
Email : ariehte.miranda@ptsmt.com

Indosat Palapa Company B.V. ("IPBV")
IPBV didirikan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 28 April 2010. IPBV bergerak di bidang keuangan. Indosat memiliki saham di IPBV sebesar 100%. Pada tahun 2010, IPBV menerbitkan guaranteed notes yang jatuh tempo tahun 2010.
Address:
Jan Luijkenstraat 12, 1071 CM Amsterdam
The Netherlands
Phone : (31) 20 890 6931
Fax. : (31) 20 890 6930
Contact person: John Peter van Leeuwen
Email : john@indosatpalapaco.com
info@indosatpalapaco.com

REFERENSI PERATURAN BAPEPAM-LK NO. X.K.6

Bapepam-LK mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan informasi yang setara kepada otoritas pasar modal dan bursa efek, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam-LK No. X.K.7. Bagian ini memberikan referensi untuk Peraturan Bapepam –LK No. X.K.6 untuk menunjukan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan yang ada.

Referensi Silang terhadap Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6

Materi & Penjelasan	Halaman
I. Umum	
1. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.	√
2. Dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas.	√
3. Mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman	√
4. Laporan Tahunan ditampilkan di website perusahaan.	√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting	
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) kotor 3. Laba (rugi) usaha 4. Laba (rugi) bersih 5. Laba (rugi) bersih per saham	18-19
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun Informasi memuat antara lain: 1. Modal kerja bersih 2. Jumlah investasi 3. Jumlah aset 4. Jumlah kewajiban 5. Jumlah ekuitas	18-19
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan	18 20-21
4. Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Informasi harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat: 1. Harga saham tertinggi, 2. Harga saham terendah, 3. Harga saham penutupan, 4. Volume saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada).	22-23
5. Laporan Tahunan wajib memuat informasi dalam 2 (dua) tahun buku terakhir mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konvertibel yang diterbitkan Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar 2. Tingkat bunga/imbalan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk	22

Materi & Penjelasan	Halaman
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	
1. Laporan Dewan Komisaris. Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. 3. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris. 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada)	30-33
2. Laporan Direksi. Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan 4. Perubahan komposisi Direksi (jika ada).	38-41
3. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	295
IV. Profil Perusahaan	
1. Nama dan alamat perusahaan. Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website	576 Sampul Belakang
2. Riwayat singkat perusahaan. Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).	16
3. Bidang usaha. Meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan	28-29
4. Struktur Organisasi. Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan	578-579
5. Visi dan Misi Perusahaan. Mencakup penjelasan visi dan misi perusahaan	17
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja	34-37

Materi & Penjelasan	Halaman
7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja	42-43
8. Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan) Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 4. Biaya yang telah dikeluarkan	61
9. Komposisi Pemegang saham. Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 2. Direktur dan komisaris yang memiliki saham 3. Pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	23 576
10. Daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi. Informasi memuat antara lain : 1. Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi 2. % Kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha perusahaan anak atau perusahaan asosiasi 4. Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)	581
11. Kronologi pencatatan saham. Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan	16
12. Kronologi pencatatan Efek lainnya. Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan 5. Peringkat efek	22
13. Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal. Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat	576-577
14. Akuntan perseroan. Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan 3. Besarnya fee audit 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit	77

Materi & Penjelasan	Halaman
15. Penghargaan dan atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional. Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan atau sertifikat 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan atau sertifikat 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)	24-25
16. Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).	357-358 581
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	
1. Tinjauan operasi per segmen usaha. Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Penjualan/pendapatan usaha; 3. Profitabilitas; 4. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; untuk masing-masing segmen usaha	46-55
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset; 2. Kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban; 3. Penjualan/pendapatan usaha; 4. Beban usaha; 5. Laba/Rugi bersih	114-151
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan. Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang 2. Tingkat kolektibilitas piutang	128-146 194
4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure), kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies), dan tingkat solvabilitas perusahaan. Penjelasan atas: 1. Struktur modal (capital structure), 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies), 3. Tingkat solvabilitas perusahaan	235-241
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal. Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan	147-148
6. Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi Penjelasan mengenai: 1. Kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi 2. Dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan Catatan: apabila tidak ada kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi, agar diungkapkan	223-224
7. Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan Penjelasan mengenai: 1. Komponen substansial dari pendapatan lainnya 2. Komponen substansial dari beban lainnya	118-119 122-123

Materi & Penjelasan	Halaman
8. Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan/pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru. Penjelasan mengenai: 1. Besaran peningkatan/penurunan penjualan atau pendapatan bersih 2. Peningkatan/penurunan material dari penjualan atau pendapatan bersih dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru	124
9. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan/pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun Ada atau tidak ada pengungkapan.	116
10. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan	282-283
11. Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.	33 41
12. Uraian tentang aspek pemasaran. Uraian tentang pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.	46-55
13. Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 tahun buku terakhir. Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah dividen 2. Jumlah dividen per saham 3. Payout ratio untuk masing-masing tahun Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasan tidak membagikan dividen	18
14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana, 2. Rencana penggunaan dana, 3. Rincian penggunaan dana, 4. Saldo dana, dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	223 371
15. Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal. Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yg direstrukturisasi; 3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	147-148
16. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi; 2. Sifat hubungan afiliasi; 3. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode berjalan. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	428

Materi & Penjelasan	Halaman
17. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan	Tidak Ada
18. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan	283-286 148
VI. Tata Kelola Perusahaan	
1. Uraian Dewan Komisaris. Uraian memuat antara lain: 1. Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Besarnya remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris. 4. Frekuensi pertemuan 5. Tingkat kehadiran dewan komisaris dalam pertemuan	70-71
2. Uraian Direksi. Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Besarnya remunerasi untuk setiap anggota direksi. 4. Frekuensi pertemuan 5. Tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan 6. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi	71-73
3. Komite Audit. Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit 2. Uraian tugas dan tanggung jawab. 3. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit 4. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 5. Independensi anggota komite audit	89-90 580
4. Komite Nominasi. Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi 2. Independensi anggota komite nominasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi	Tidak Ada
5. Komite Remunerasi. Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite remunerasi 2. Independensi anggota komite remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite remunerasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite remunerasi	93
6. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain	91-92
7. Uraian mengenai kebijakan penetapan remunerasi bagi Direksi yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan Mencakup antara lain: 1. Prosedur penetapan remunerasi tertuang dalam SOP 2. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi yang dikaitkan dengan remunerasi.	Tidak Ada Pengungkapan

Materi & Penjelasan	Halaman
8. Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan	82-85
9. Uraian mengenai unit audit internal. Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal 2. Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal 3. Struktur atau kedudukan unit audit internal 4. Keberadaan piagam unit audit internal 5. Uraian pelaksanaan tugas.	76
10. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah) 2. Upaya untuk mengelola risiko tersebut	96-111
11. Uraian mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Keberadaan Pusat Pengaduan Konsumen 2. Uraian mengenai tindak lanjut terhadap pengaduan 3. Tingkat penyelesaian pengaduan yang diterima 4. Program peningkatan layanan kepada konsumen	Buku Laporan Keberlanjutan 2010 hal. 30-35
12. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Mitra Usaha binaan Perusahaan. 2. Program pengembangan pendidikan/perbaikan kesehatan/pengembangan seni budaya dan lainnya. 3. Biaya yang telah dikeluarkan.	Buku Laporan Keberlanjutan 2010 hal. 36-41 hal. 48-55
13. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Aktivitas pelestarian lingkungan 2. Aktivitas pengelolaan lingkungan 3. Sertifikasi atas pengelolaan lingkungan 4. Biaya yang telah dikeluarkan	Buku Laporan Keberlanjutan 2010 hal. 42-47
14. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan. Mencakup antara lain: 1. pokok perkara/gugatan 2. status penyelesaian perkara/gugatan 3. pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan	78-82
15. Akses informasi dan data perusahaan. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, buletin dan sebagainya.	83-87
16. Etika Perusahaan. Memuat uraian antara lain: 1. Keberadaan code of conduct 2. Isi code of conduct 3. Penyebaran code of conduct kepada karyawan dan upaya penegakannya 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan	82

Materi & Penjelasan	Halaman
17. Pengungkapan mengenai whistleblowing system. Memuat uraian antara lain: 1. Keberadaan whistleblowing system 2. Mekanisme whistleblowing system 3. Penggunaan dan output whistleblowing system	82
VII. Informasi Keuangan	
1. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Kesesuaian dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.	152
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan.	157 451
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini. Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik	157 451
4. Laporan keuangan yang lengkap. Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Neraca 2. Laporan laba rugi 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan.	158-288
5. Perbandingan tingkat profitabilitas. Perbandingan laba/rugi usaha tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	18
6. Penyajian Laporan Arus Kas. Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pengungkapan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas 4. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas kepada pelanggan (customer), karyawan, pemasok, dan pembayaran pajak selama tahun berjalan pada aktivitas operasi 5. Penyajian penambahan dan pembayaran hutang jangka panjang serta dividen pada aktivitas pendanaan.	129 165-166
7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Konsep dasar penyajian laporan keuangan 2. Pengakuan pendapatan dan beban 3. Penilaian investasi (penyertaan pada entitas lain) 4. Persediaan 5. Sewa	174-190
8. Pengungkapan yang berhubungan dengan properti investasi. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model nilai wajar dan model biaya 2. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti investasi 3. Apakah penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan atas penilaian oleh penilai independen. Apabila tidak ada penilaian seperti itu, hal tersebut harus diungkapkan 4. Rekonsiliasi nilai tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode 5. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi yang berasal dari properti investasi (penghasilan rental, beban operasi langsung, perubahan kumulatif dalam nilai wajar)	356-357

Materi & Penjelasan	Halaman
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan. Hal-hal yang harus diungkapkan selain Jenis dan Jumlah Hutang Pajak 1. Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. 2. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan. 4. Rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disajikan pada neraca untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca. 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak	195-196 204-208
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (model biaya) 4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode untuk tiap kelompok aset tetap 5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode untuk tiap kelompok aset, yang menunjukkan: penambahan, aset yang diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual/kelompok lepasan, penggabungan usaha, revaluasi, rugi penurunan nilai, penyusutan, selisih nilai tukar neto, atau perubahan lain.	199-202
11. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang diterapkan dan mempengaruhi aktivitas perusahaan; dan 2. Dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.	283-286
12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan 2. Klasifikasi instrumen keuangan 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas 5. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangannya	209-235

Laporan Tahunan 2010

PT Indosat Tbk.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 21
Jakarta 10110, Indonesia
Tel: 62 21 3000 3001
Fax: 62 21 3812 617

www.indosat.com
email: publicrelations@indosat.com